



RUMAH

UNTUK KELUARGA MILENIAL INDONESIA



RUMAH

UNTUK KELUARGA MILENIAL INDONESIA

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270* juta jiwa merupakan modal yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dengan bonus demografi yang memprediksikan lebih kurang 20% diantaranya berusia 20-44 tahun, Indonesia menjadi negara dengan modal aset yang sangat potensial: penduduk dengan usia produktif yang besar.

Sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, Bank BTN mencoba menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "Milenial", sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Fokus Bank BTN untuk menjadi bank tabungan di sektor pembiayaan perumahan akan menjadi agenda prioritas ke depan. Dengan potensi pasar para Milenial yang cukup besar, Bank BTN berharap mampu menjadi mitra dalam ekosistem industri perumahan dan properti, sekaligus terus-menerus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

KESINAMBUNGAN **TEMA**

2018

MEMPERSIAPKAN EKOSISTEM DIGITAL MELALUI TRANSFORMASI UNTUK Mendukung BISNIS YANG BERKELANJUTAN

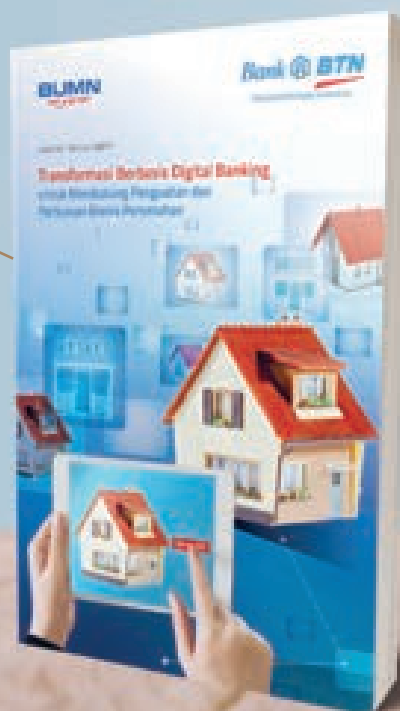
Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, Perseroan mampu memantapkan kinerjanya dibuktikan dengan keberhasilan dalam meningkatkan posisinya yang cukup kompetitif di industri perbankan dan sektor perumahan nasional, khususnya pada realisasi Program Sejuta Rumah. Keberhasilan kinerja tersebut, tidak terlepas dari proses transformasi Digital Banking yang secara konsisten diterapkan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan industri perbankan yang semakin kompleks. Menyadari tantangan ke depan, Perseroan telah mengambil langkah penting untuk memperkuat fundamental keuangan khususnya dalam mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang semakin dekat. Untuk itu, di tahun 2018 Perseroan telah memperkuat tata kelola proses bisnis yang lebih prudent dan meningkatkan penambahan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai upaya untuk meningkatkan rasio coverage. Bagi Perseroan, transformasi Digital Banking dengan upaya memperkuat fundamental keuangan merupakan keharusan untuk mengelola tantangan bisnis perbankan kedepannya, guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan Perseroan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa.



2017

TRANSFORMASI BERBASIS DIGITAL BANKING UNTUK Mendukung Penguatan DAN PERLUASAN BISNIS PERUMAHAN

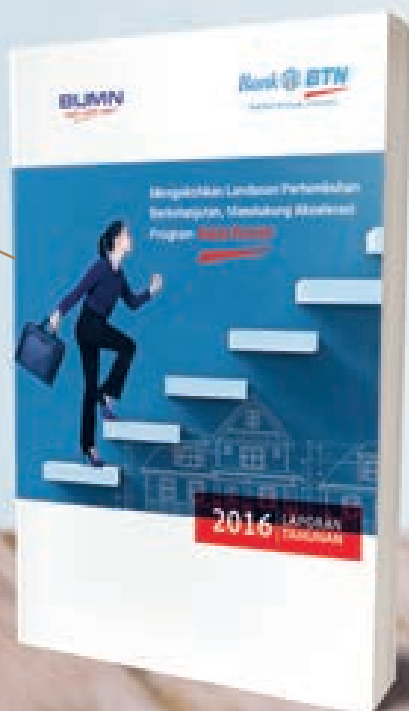
Transformasi Perseroan berbasis digital menjadi prioritas Perseroan di tahun 2017. Sebab dominasi digital pada aspek bisnis di segala sektor dan lini sudah kian nyata. Pemahaman Perseroan terhadap generasi milenial serta pengembangan SDM generasi milenial menjadi perhatian manajemen Perseroan untuk mengantisipasi persaingan khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kehandalan bersaing di market saat ini. Perseroan akan terus mengembangkan penggunaan teknologi digital terkini yang khusus maupun bersifat umum untuk mendukung layanan dan jaringannya.



2016

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, Mendukung AKSELERASI PROGRAM SEJUTA RUMAH

Di tahun 2016 Perseroan mampu mencatatkan keberhasilan dalam kinerja, menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara baik, dan meraih citra positif di mata publik. Keberhasilan dicapai berkat konsistensi Perseroan dalam menjalankan bisnis berdasarkan kaidah industri dan niaga yang sehat, memiliki sumber daya yang mampu menghasilkan value creation, comply dengan peraturan dan memiliki arah serta strategi yang jelas.



2015

BTN SIAP MENJADI PEMAIN UTAMA PROGRAM SEJUTA RUMAH

Posisi Perseroan di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh. Ditopang sejarah panjang di bidang tersebut, ditambah "Program 5 Siap", maka Perseroan siap menjadi pemain utama program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. 5 Siap itu adalah Siap Sumber Daya Manusia (SDM), Siap Teknologi, Siap Proses Bisnis, Siap Pendanaan dan Siap Suplai Rumah. Dengan bekal itu, Perseroan yakin akan terus dapat meningkatkan kinerjanya kini dan di masa mendatang.



INISIATIF STRATEGIS



KPR Gaeesss For Millenials

Bank BTN juga terus berperan meningkatkan ketersediaan rumah khususnya bagi **generasi millenial yang berusia mulai dari 21-35 tahun** melalui program KPR Gaeesss For Millenials. Hingga Desember 2019, realiasi KPR untuk program ini sebanyak **29.148 unit** dengan penyaluran dana kredit sebesar **Rp9,78 triliun**.

Produk
**KPR Gaeesss
For Millenials**

Realisasi (*juta)
9.789.198

Unit
29.148

TRANSFORMASI DIGITAL BANKING YANG BERKELANJUTAN

Bank BTN terus berinovasi dan meningkatkan layanan digital kepada para nasabah. Bank BTN terus melakukan Transformasi Digital Banking secara berkelanjutan melalui inovasi layanan digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan perbankan BTN.



BTN Digital
Solution



Debit BTN
Online



BTN Internet
Banking



BTN Cash
Management



BTN Mobile
Banking



LinkAja



SMS Banking

www.rumahbtn.co.id

www.btnproperti.co.id

BTN Mendorong Budaya Menabung

Bank BTN kembali mengokohkan diri sebagai tempat menabung terbaik dan terpercaya, sebagaimana namanya Bank Tabungan Negara. BTN memiliki tujuan untuk mendorong/ mendidik masyarakat agar gemar menabung dan memiliki rumah dengan menabung. BTN memiliki produk tabungan unggulan untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga yang sudah berkeluarga.

Tabungan BTN Batara



Tabungan BTN Prima

TabunganKu



Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)

Tabungan BTN e'BATARAPOS



Tabungan BTN Cermat

Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)



Tabungan BTN siap!

Tabungan BTN Felas



Tabungan Simuda Rumahku



DAFTAR ISI

4	KESINAMBUNGAN TEMA	133	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
6	INISIATIF STRATEGIS	134	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA
8	DAFTAR ISI	140	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
12	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	144	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
16	IKHTISAR OPERASIONAL	149	DAFTAR ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG
17	IKHTISAR SAHAM	157	JARINGAN MITRA USAHA
25	IKHTISAR OBLIGASI DAN INFORMASI TENTANG SUKUK DAN OBLIGASI KONVERSI	158	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
27	IKHTISAR SUMBER PENDANAAN LAINNYA	159	PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO
28	KILAS PERISTIWA	170	TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
35	LAPORAN DEWAN KOMISARIS	173	KEBIJAKAN STRATEGIS 2019
45	LAPORAN DIREKSI	175	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
58	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN	216	ASPEK PEMASARAN
60	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN	219	TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
62	JEJAK LANGKAH	286	PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS
64	VISI, MISI, DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN	290	MANAJEMEN RISIKO
67	STRATEGI MENCAPAI VISI DAN MISI	348	HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN
68	BTN TRANSFORMATION JOURNEY	362	TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
69	MAKNA LOGO PERUSAHAAN	375	DASAR, TUJUAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN GCG
70	BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA	379	IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN
84	WILAYAH OPERASI DAN JARINGAN USAHA	392	PENILAIAN GCG BANK BTN
86	STRUKTUR ORGANISASI	404	STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN
88	PROFIL DEWAN KOMISARIS	641	SISTEM MANAJEMEN RISIKO
94	PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH	661	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
97	PROFIL DIREKSI	666	PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING LAINNYA
105	PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DIBAWAH DIREKSI		
106	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF		
116	DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI		
124	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM		
130	INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR		
132	INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP DAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) SERTA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)		



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

667	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	759	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/ JASA SERTA PELANGGAN
674	KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)		
679	PENGENDALIAN GRATIFIKASI	764	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
684	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
690	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISTLEBLOWING SYSTEM	1043	REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018
695	TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)		
712	RENCANA STRATEGIS BANK		
719	TRANSPARANSI INFORMASI LAINNYA		
726	TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK DAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN		
729	STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN		
740	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA		
742	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL		
744	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP		
752	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA		



IKHTISAR UTAMA 2019

Di tengah tantangan bisnis yang dihadapi,
kinerja Bank BTN tetap solid dengan
performa perusahaan *on the track*.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil						
• Pendapatan Bunga	23.271.432	20.781.512	18.446.732	16.501.472	14.455.136	11,98%
• Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah	2.448.442	2.070.246	1.644.868	637.347	511.073	18,27%
Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.719.874	22.851.758	20.091.600	17.138.819	14.966.209	12,55%
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(16.758.073)	(12.762.581)	(10.750.660)	(8.975.274)	(8.155.133)	31,31%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.961.801	10.089.177	9.340.940	8.163.545	6.811.076	-11,17%
Pendapatan Operasional Lainnya	2.109.852	2.071.594	1.605.931	1.282.822	1.106.526	1,85%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan	(3.486.665)	(1.714.427)	(884.401)	(707.531)	(901.008)	103,37%
Pembalikan (Beban) Estimasi Penyisihan Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	7.198	-
Beban Operasional Lainnya	(7.063.215)	(6.852.544)	(6.170.567)	(5.386.604)	(4.490.187)	3,07%
Laba Operasional	521.773	3.593.800	3.891.903	3.352.232	2.533.605	-85,48%
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto	(110.711)	16.475	(30.348)	(22.148)	8.281	-771,99%
Laba Sebelum Beban Pajak	411.062	3.610.275	3.861.555	3.330.084	2.541.886	-88,61%
Beban Pajak	(201.799)	(802.352)	(834.089)	(711.179)	(690.979)	-74,85%
Laba Tahun Berjalan	209.263	2.807.923	3.027.466	2.618.905	1.850.907	-92,55%
Pendapatan Komprehensif Lain	348.069	(25.416)	29.213	3.012.712	(39.570)	1.469,49%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	557.332	2.782.507	3.056.679	5.631.617	1.811.337	-79,97%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						
• Pemilik	209.263	2.807.923	3.027.466	2.618.905	1.850.907	-92,55%
• Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						
• Pemilik	557.332	2.782.507	3.056.679	5.631.617	1.811.337	-79,97%
• Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham (Nilai Rupiah Penuh)	20	265	286	247	175	-92,45%

Bank BTN tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi, dengan demikian tidak memiliki informasi terkait Laba



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

Tahun Berjalan serta Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali.

POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Aset						
Kas	1.369.167	1.243.615	1.027.554	1.006.682	1.181.219	10,10%
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	15.417.862	12.554.585	10.697.378	10.986.351	0,61%
Giro pada Bank Lain	747.869	1.587.051	556.301	321.306	201.361	-52,88%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	11.097.193	26.464.760	24.697.503	17.581.350	7.839.477	-58,07%
Efek-efek	8.084.671	5.848.485	7.706.031	4.171.700	1.807.561	38,24%
Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138	8.183.973	9.243.639	8.230.908	17,68%
Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	-	-	-	-
Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah	249.708.993	234.999.600	196.634.594	162.330.347	136.905.226	6,26%
Tagihan Spot Suku Bunga	-	167	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi	487.052	528.148	8.081	-	-	-7,78%
Penyertaan Saham	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap	5.400.658	5.017.694	4.837.319	4.659.379	1.553.401	7,63%
Bunga yang Masih Akan Diterima	3.210.772	2.959.502	2.296.440	1.864.829	1.548.489	8,49%
Aset Pajak Tangguhan - Neto	629.105	260.251	174.555	102.791	-	141,73%
Aset Lain-lain	2.600.197	2.715.921	2.688.331	2.189.078	1.553.599	-4,26%
Jumlah Aset	311.776.828	306.436.194	261.365.267	214.168.479	171.807.592	1,74%
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas Segera	1.999.183	2.301.930	2.813.874	2.081.886	1.960.789	-13,15%
Simpanan dari Nasabah	206.905.692	211.034.488	177.091.421	147.787.618	127.708.670	-1,96%
• Giro	50.701.126	56.455.042	52.769.152	44.906.039	31.368.443	-10,19%
• Tabungan	42.274.798	39.117.163	38.840.337	33.344.626	30.757.681	8,07%
• Deposito Berjangka	113.929.768	115.462.283	85.481.932	69.536.953	65.582.546	-1,33%
Simpanan dari Bank Lain	4.509.238	2.992.579	5.063.433	3.643.889	1.721.198	50,68%



POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	935.000	935.000	1.385.000	1.385.000	2.135.091	-
Liabilitas Akseptasi	487.052	528.148	8.081	-	-	-7,78%
Liabilitas Spot Suku Bunga	-	152	-	-	-	-
Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan	19.783.552	20.644.760	20.480.459	14.919.910	12.492.202	-4,17%
Pinjaman yang Diterima	22.465.657	15.499.493	7.991.053	4.999.616	7.726.728	44,94%
Bunga yang Masih Harus Dibayar	630.002	630.134	492.361	382.551	357.364	-0,02%
Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain	5.736.637	6.217.814	5.612.462	4.629.410	3.835.877	-7,74%
Pinjaman Subordinasi	5.999.669	2.999.519	2.999.319	2.999.118		100,02%
Jumlah Liabilitas	269.451.682	263.784.017	223.937.463	182.828.998	157.947.485	2,15%
Dana Syirkah Temporer						
• Simpanan Nasabah	18.477.539	18.794.497	15.382.372	12.200.099	-	-1,69%
• Simpanan dari Bank Lain	11.412	17.232	381.998	8.846	-	-33,77%
Jumlah Dana Syirkah Temporer	18.488.951	18.811.729	15.764.370	12.208.945	-	-1,72%
Jumlah Ekuitas	23.836.195	23.840.448	21.663.434	19.130.536	13.860.107	-0,02%

Bank BTN tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi maupun entitas ventura bersama. Dengan demikian Bank BTN tidak memiliki informasi terkait investasi pada ketiga bentuk entitas tersebut.

RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA

	Satuan	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	%	17,32	18,21	18,87	20,34	16,97	-4,89%
Non Performing Loan (NPL) Gross	%	4,78	2,81	2,66	2,84	3,42	70,11%
Non Performing Loan (NPL) Netto	%	2,96	1,83	1,66	1,85	2,11	61,75%
Return On Asset (ROA)	%	0,13	1,34	1,71	1,76	1,61	-90,30%
Return On Equity (ROE)	%	1,00	14,89	18,11	18,35	16,84	-93,28%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA

	Satuan	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018-2019 (%)
Net Interest Margin (NIM)	%	3,32	4,32	4,76	4,98	4,87	-23,15%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	%	98,12	85,58	82,06	82,48	84,83	14,65%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	%	113,50	103,49	103,13	102,66	108,78	9,67%
Persentase Pelanggaran BMPK							
• Pihak Terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Pihak Tidak Terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Pelampauan BMPK							
• Pihak Terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Pihak Tidak Terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Giro Wajib Minimum (GWM)							
• GWM Utama Rupiah							
- Konvensional	%	6,19	6,61	7,02	6,72	7,95	-6,35%
- Syariah	%	4,64	5,30	5,00	5,08	5,04	-12,45%
• GWM Valuta Asing	%	8,28	8,69	8,38	8,47	8,08	-4,72%
Posisi Devisa Netto	%	4,14	1,55	1,29	0,29	1,74	167,10%



IKHTISAR OPERASIONAL

IKHTISAR KINERJA BISNIS

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Perbankan Konsumer						
Penyaluran Kredit Konsumer	33.349.158	49.371.120	44.187.731	34.804.253	30.399.375	-32,45%
Simpanan Konsumer	65.668.669	61.792.136	52.743.237	44.389.209	38.618.436	6,27%
Perbankan Komersial						
Penyaluran Kredit Komersial	25.962.288	29.135.261	23.298.077	18.521.043	16.565.305	-10,89%
Simpanan Komersial	137.900.318	146.263.780	120.011.519	100.568.259	77.985.698	-36,32%
Unit Usaha Syariah						
Penyaluran Pembiayaan Syariah	5.302.479	8.326.533	7.489.093	5.960.741	4.281.418	-5,72%
Simpanan Syariah	21.860.438	22.342.676	18.754.100	15.030.249	11.104.536	-2,16%
Penerimaan <i>Fee Based Income</i> Syariah	118.533	116.880	93.758	62.880	39.375	1,41%

IKHTISAR KINERJA OPERASI DAN ORGANISASI

	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)
Jumlah Kantor Cabang (unit)	78	76	75	65	65	2,63%
Jumlah ATM (unit)	2.159	2.126	1.964	1.830	1.830	1,55%
Jumlah Pegawai (orang)	11.647	11.810	10.360	9.244	9.042	-1,38%
Skor GCG*	Komposit 2 SEHAT	Komposit 2 SEHAT	Komposit 2 SEHAT	Komposit 2 SEHAT	Komposit 2 SEHAT	

*) Skor GCG berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) yang meliputi 11 (sebelas) parameter



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IKHTISAR SAHAM

INFORMASI BAGI INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM

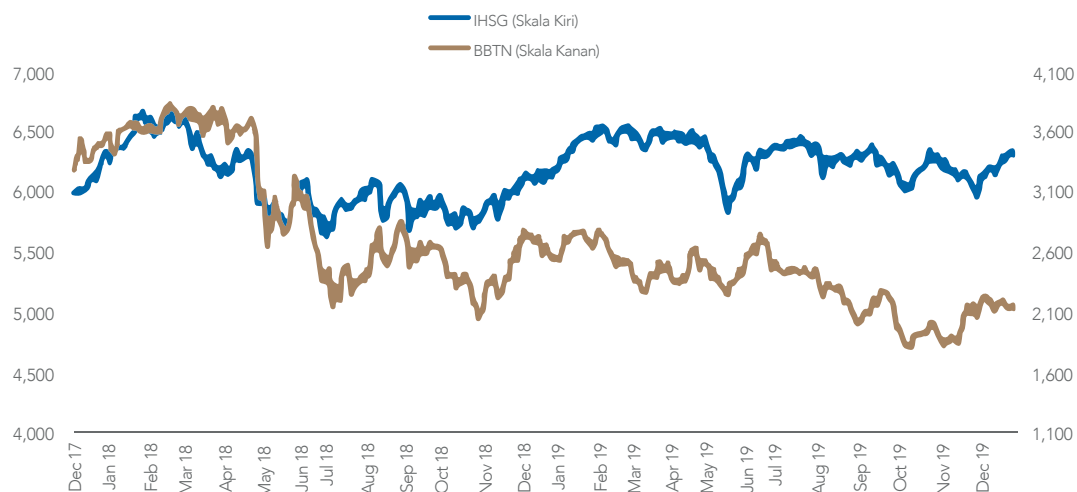
Kinerja pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2019 tak lepas dari berbagai tantangan, terutama ketidakpastian perekonomian global. Berdasarkan data World Economic Outlook (WEO) yang dirilis International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2019 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh 3%, pertumbuhan paling lambat setelah krisis ekonomi global 2008. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS), Eropa dan Tiongkok menjadi kunci dari kondisi tersebut. Di sisi lain, pasar keuangan global mulai menunjukkan gairahnya, termasuk pasar keuangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat mengalami kenaikan 1,70% di sepanjang 2019 ke level 6.299,54 dari level 6.194,49 pada penutupan tahun 2018.

KINERJA PASAR KEUANGAN DUNIA

No	Negara	Indeks	31-Des-19	31-Des-18	31-Des-17	% YoY 2018-2019	
1	India	S&P BSE	41.253,74	36.068,33	34.056,83	14,38%	▲
2	AS	DJI Index	28.538,44	23.327,46	24.719,22	22,34%	▲
3	Australia	AS30 Index	6.802,40	5.709,40	6.167,29	19,14%	▲
4	Malaysia	FBMKLCI Index	1.588,76	1.690,58	1.796,81	-6,02%	▼
5	Vietnam	VNINDEX Index	960,99	892,54	984,24	7,67%	▲
6	Jepang	NKY Index	23.656,62	20.014,77	22.764,94	18,20%	▲
7	Thailand	SET Index	1.579,84	1.563,88	1.753,71	1,02%	▲
8	Inggris	UKX Index	7.542,44	6.728,13	7.687,77	12,10%	▲
9	Indonesia	JCI Index	6.299,54	6.194,50	6.355,65	1,70%	▲
10	Singapura	STI Index	3.222,83	3.068,76	3.402,92	5,02%	▲
11	Korea Selatan	KOSPI Index	2.197,67	2.041,04	2.467,49	7,67%	▲
12	Hong Kong	HSI Index	28.189,75	25.845,70	29.919,15	9,07%	▲
13	Filipina	PSEi	7.815,26	7.466,02	8.558,42	4,68%	▲
14	Argentina	MERVAL Index	41.671,41	30.292,55	30.065,61	37,56%	▲
15	Tiongkok	SHCOMP Index	3.050,12	2.493,90	3.307,17	22,30%	▲
16	Turki	XU100 Index	114.425,00	91.270,48	115.333,00	25,37%	▲



KINERJA PASAR KEUANGAN DUNIA



INFORMASI PERGERAKAN SAHAM BBTN

KODE SAHAM
BBTN

“Bank BTN telah mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Desember 2009.”

RINGKASAN INFORMASI SAHAM BBTN
2015-2019

	2019	2018	2017	2016	2015
Harga Pembukaan (Rp/per lembar saham)	2.560	3.560	1.745	1.300	1.205
Harga Tertinggi (Rp/per lembar saham)	2.860	3.890	3.610	2.100	1.315
Harga Terendah (Rp/per lembar saham)	1.780	2.010	1.695	1.280	935
Harga Penutupan (Rp/per lembar saham)	2.120	2.540	3.570	1.740	1.295



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IKHTISAR SAHAM

RINGKASAN INFORMASI SAHAM BBTN
2015-2019

	2019	2018	2017	2016	2015
Rata-rata Volume Perdagangan Harian (Lot Saham)	248.000	294.954	209.739	202.509	302.217
Nilai Buku Per Saham (Rp)	2.251	2.251	2.046	1.806	1.310
Price to Book Value (kali)	0,94	1,13	1,75	0,96	0,99
Price to Earning Ratio (kali)	107,29	9,58	12,49	7,04	7,40
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham)	10.590.000.000	10.590.000.000	10.590.000.000	10.590.000.000	10.590.000.000
Kapitalisasi Pasar (Rp-juta)	22.450.800	26.898.600	37.806.300	18.426.600	13.704.137

“Saham Bank BTN dengan kode “BBTN” berhasil masuk dalam komponen perhitungan beberapa Indeks Saham terkemuka.”

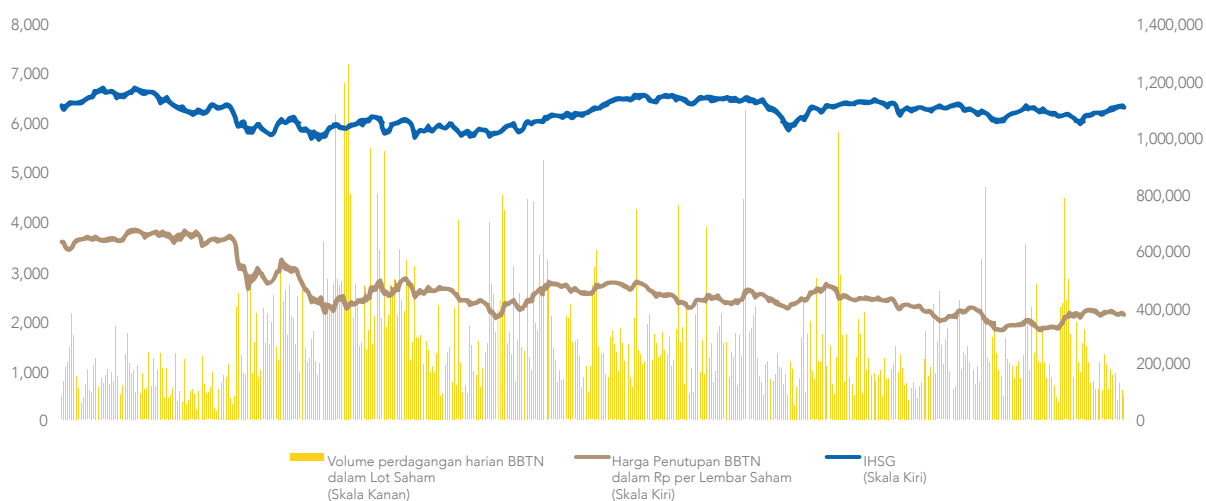
Indeks	Periode
LQ45	November 2019 s.d. Januari 2020
Kompas100	Agustus 2019 s.d. Januari 2020
IDX30	November 2019 s.d. Januari 2020
IDX80	November 2019 s.d. Januari 2020
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Composite	Agustus 2019 s.d. Januari 2020
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Liquid	Agustus 2019 s.d. Januari 2020
IDX High Dividend 20	Agustus 2019 s.d. Januari 2020
IDX BUMN20	November 2019 s.d. Januari 2020
SRI-KEHATI	November 2019 s.d. April 2020
PEFINDO i-Grade	Januari s.d. Juni 2020
Infobank15	Juli s.d. Desember 2019
Investor33	Desember 2019 s.d. Mei 2020



INFORMASI HARGA, VOLUME DAN KAPITALISASI SAHAM BBTN 2018-2019

Periode 2019	Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Harga Saham Pembukaan		Harga Saham Tertinggi	
		Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal	Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal
Triwulan I	10.590.000.000	2.560	2 Januari 2019	2.860	1 Februari 2019
Triwulan II	10.590.000.000	2.440	1 April 2019	2.750	19 Juni 2019
Triwulan III	10.590.000.000	2.490	1 Juli 2019	2.550	2 Juli 2019
Triwulan IV	10.590.000.000	1.970	1 Oktober 2019	2.240	4 Desember 2019
Selama Tahun Pelaporan	10.590.000.000	2.560	2 Januari 2019	2.860	1 Februari 2019

Periode 2018	Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Harga Saham Pembukaan		Harga Saham Tertinggi	
		Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal	Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal
Triwulan I	10.590.000.000	3.560	2 Januari 2018	3.890	22 Maret 2018
Triwulan II	10.590.000.000	3.740	2 April 2018	3.770	2 April 2018
Triwulan III	10.590.000.000	2.450	2 Juli 2018	2.920	30 Agustus 2018
Triwulan IV	10.590.000.000	2.630	1 Oktober 2018	2.820	3 Desember 2018
Selama Tahun Pelaporan	10.590.000.000	3.560	2 Januari 2018	3.890	22 Maret 2018

GRAFIK PERGERAKAN HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME PERDAGANGAN BBTN
2018-2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

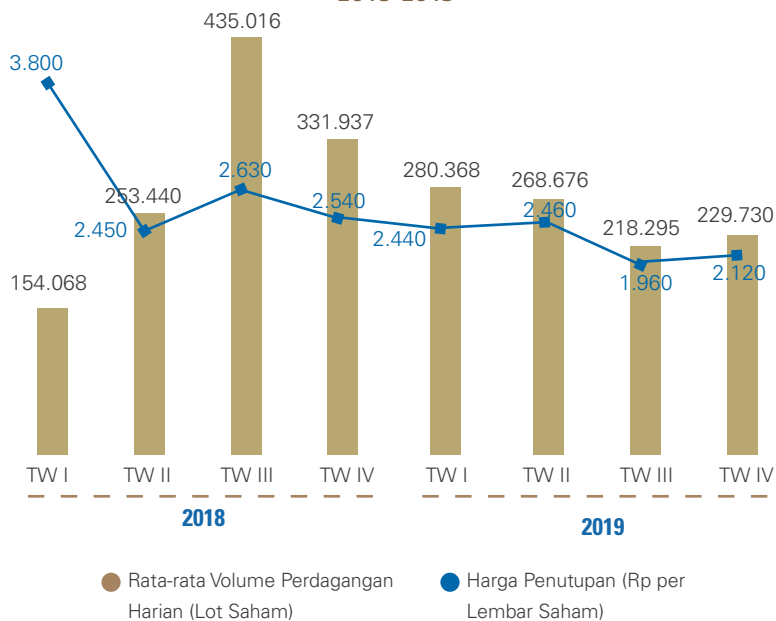
IKHTISAR SAHAM

Harga Saham Terendah		Harga Saham Penutupan		Volume Perdagangan (miliar lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp triliun)
Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal	Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal		
2.250	8 Maret 2019	2.440	29 Maret 2019	280.368	25,84
2.160	20 Mei 2019	2.460	28 Juni 2019	268.676	26,05
1.950	30 September 2019	1.960	30 September 2019	218.295	20,76
1.780	9 Oktober 2019	2.120	30 Desember 2019	229.730	22,45
1.780	9 Oktober 2019	2.120	30 Desember 2019	248.000	22,45

Harga Saham Terendah		Harga Saham Penutupan		Rata-rata Volume Perdagangan Harian (lot saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp-triliun)
Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal	Harga (Rp/lembar saham)	Tanggal		
3.370	4 Januari 2018	3.800	29 Maret 2018	154.068	40,24
2.370	28 Juni 2018	2.450	29 Juni 2018	253.440	25,95
2.110	6 Juli 2018	2.630	28 September 2018	435.016	27,85
2.010	30 Oktober 2018	2.540	28 Desember 2018	331.937	26,90
2.010	30 Oktober 2018	2.540	28 Desember 2018	294.954	26,90



**GRAFIK PERGERAKAN HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME PERDAGANGAN BBTN PER TRIWULAN
2018-2019**



INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI SAHAM

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian IPO tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan oversubscribe sebanyak 2,04 kali dengan nilai proceed sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan “Best IPO in Indonesia 2009” dari Majalah The Asset dan “Mid Cap/ IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009” dari Publisher Alpha South Asia (Hong Kong).

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (floating shares). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IKHTISAR SAHAM

SEKILAS KRONOLOGIS AKSI KORPORASI SAHAM YANG PERNAH DILAKUKAN BANK BTN

Aksi Korporasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Saham yang Ditawarkan (lembar saham)	Jumlah Saham Sebelum Aksi Korporasi (lembar saham)	Jumlah Saham Setelah Aksi Korporasi (lembar saham)	Nilai Nominal Saham (Rp/lembar saham)	Harga Penawaran/ Pelaksanaan (Rp/lembar saham)	Keterangan
Penawaran Umum Perdana Saham	17 Desember 2009	2.360.057.000 saham Seri B	0	8.623.285.575 saham Seri B	Rp500	Rp800	-
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	23 November 2012	1.512.857.500 saham Seri B	8.859.291.500 saham Seri B	10.481.074.500 saham Seri B	Rp500	Rp1.235	Dilusi kepemilikan 14,61% sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% setelah pelaksanaan MESOP

Sepanjang tahun 2019 Perseroan tidak melakukan aksi korporasi yang berdampak signifikan pada kelangsungan usaha, baik itu pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

DIVIDEN SAHAM

Di tahun 2019 Perseroan membagikan Dividen Saham sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2019. Berdasarkan RUPSTahunan 2019, pemegang saham memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.807.921.063.074,00 sebagai berikut:

- Dividen sebesar 20% atau Rp561.584.212.615,00 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah Indonesia atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp336.950.527.569,00, akan disetorkan ke

Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% atau Rp2.246.336.850.459,00 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Pembagian dividen saham untuk tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019 telah direalisasikan. Historikal pembagian dividen saham yang dibagikan Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:



Dividen Saham	Tahun Pembagian 2019 (untuk Laba Bersih dan Dividen Tahun Buku 2018)	Tahun Pembagian 2018 (untuk Laba Bersih dan Dividen Tahun Buku 2017)	Tahun Pembagian 2017 (untuk Laba Bersih dan Dividen Tahun Buku 2016)
Laba bersih (Rp)	2.807.921.063.074	3.027.466.149.252	2.618.905.537.321
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp)	561.584.212.615	605.493.229.850	523.781.107.464
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih tahun sebelumnya yang dibagikan sebagai dividen) (%)	20,00%	20,00%	20,00%
Nilai dividen per lembar saham (Rp/lembar)	53,03	57,18	49,46
Jumlah saham yang berhak atas dividen (lembar)	10.590.000.000	10.590.000.000	10.590.000.000
Tanggal pengumuman	17 Mei 2019	26 Maret 2018	20 Maret 2017
Tanggal pembayaran	12 Juni 2019	24 April 2018	13 April 2017

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA DAN/ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM BBTN SERTA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Di sepanjang tahun 2019, saham BBTN tidak pernah menerima sanksi yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat mencatatkan dan memperdagangkan saham baik berupa penghentian perdagangan saham sementara (*suspension*). Perseroan juga tidak melakukan penghapusan pencatatan saham (*delisting*).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IKHTISAR OBLIGASI DAN INFORMASI TENTANG SUKUK DAN OBLIGASI KONVERSI

“Bank BTN telah menerbitkan obligasi sebanyak 22 kali penerbitan dan 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak 25 Juli 1989. Penerbitan Obligasi dilakukan sebagai alternatif sumber pendanaan jangka panjang”

Rincian obligasi yang masih beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu (Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo	Kupon (%)	Peringkat		Status (per 31 Desember 2019)	Bursa
						2019	2018		
Obligasi BTN XIV Tahun 2010	1.650.000	11 Juni 2010	10	11 Juni 2020	10,250%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi BTN XV Tahun 2011	1.300.000	28 Juni 2011	10	28 Juni 2021	9,500%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	2.000.000	5 Juni 2012	10	5 Juni 2022	7,900%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	2.000.000	27 Maret 2013	10	27 Maret 2023	7,900%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	500.000	8 Juli 2015	5	8 Juli 2020	9,875%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	800.000	8 Juli 2015	7	8 Juli 2022	10,000%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	800.000	8 Juli 2015	10	8 Juli 2025	10,500%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	1.653.000	30 Agustus 2016	5	30 Agustus 2021	8,750%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	1.466.000	13 Juli 2017	3	13 Juli 2020	8,300%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	1.295.000	13 Juli 2017	5	13 Juli 2022	8,500%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	853.000	13 Juli 2017	7	13 Juli 2024	8,700%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	1.386.000	13 Juli 2017	10	13 Juli 2027	8,900%	idAA+	idAA+	Belum Jatuh Tempo	BEI



Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu (Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo	Kupon (%)	Peringkat		Status (per 31 Desember 2019)	Bursa
						2019	2018		
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	1.756.500	28 Juni 2019	370 hari	8 Juli 2020	7,750%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.168.000	28 Juni 2019	3	28 Juni 2022	8,750%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo	BEI
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	1.219.500	28 Juni 2019	5	28 Juni 2024	9,000%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo	BEI
Jumlah	19.847.000								

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Bank BTN telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank BTN pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

Berikut disampaikan obligasi yang telah dilunasi Bank BTN di tahun 2019.

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu (Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo	Kupon (%)	Peringkat		Status	Bursa
						2019	2018		
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	1.347.000	30 Agustus 2016	3	30 Agustus 2019	8,200%	idAA+	idAA+	Lunas	BEI

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya.



IKHTISAR SUMBER PENDANAAN LAINNYA

“Bank BTN memanfaatkan instrumen keuangan lainnya sebagai alternatif sumber pendanaan, salah satunya dengan menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*”

Bank telah menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* sejak tahun 2014. Di tahun 2019 Bank telah melunasi seluruh NCD dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Seri	Nominal Penerbitan (Rp Juta)	Tanggal Transaksi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nominal per Seri (Rp Juta)	Status
NCD Tahap IV 2017	C	540.000	13 Desember 2017	24 bulan	13 Desember 2019	6,60%	60.000	Lunas
NCD Tahap I 2018	B	1.440.000	3 April 2018	12 bulan	2 April 2019	6,20%	610.000	Lunas
NCD Tahap II 2018	A	690.000	18 Juli 2018	6 bulan	15 Januari 2019	7,60%	520.000	Lunas
	B			12 bulan	16 Juli 2019	7,70%	170.000	Lunas
NCD Tahap III 2018	A	2.020.000	5 November 2018	6 bulan	7 Mei 2019	8,30%	1.340.000	Lunas
	B			9 bulan	2 Agustus 2019	8,40%	170.000	Lunas
	C			12 bulan	5 November 2019	8,50%	510.000	Lunas
NCD Tahap IV 2018	A	340.000	10 Desember 2018	3 bulan	12 Maret 2019	8,00%	80.000	Lunas
	B			6 bulan	11 Juni 2019	8,40%	260.000	Lunas
Jumlah		5.030.000					3.720.000	



KILAS PERISTIWA



JANUARI

➤ BANK BTN SIAPKAN PEMBIAYAAN RUMAH BAGI KOMUNITAS PENCUKUR RAMBUT GARUT

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang ditemani oleh Dirut BTN, Maryono dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut melaksanakan proses peletakan batu pertama di area perumahan Persaudaraan Pencukur Rambut (PPRG) di desa Sukamukti, Banyuwangi, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Hal ini sebagai wujud nyata dukungan Bank BTN kepada Pemerintah dalam program sejuta rumah melalui akses KPR Subsidi bagi para pekerja sektor informal yang tergabung dalam komunitas PPRG.



FEBRUARI

➤ SAMBUT HUT KE-69, BTN SELENGGARAKAN CHARITY FUNWALK

Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-69, Bank BTN menyelenggarakan kegiatan bertajuk Charity Funwalk yang diikuti lebih dari 10.000 peserta, kegiatan ini diadakan di JCC, Senayan, Jakarta pada Minggu (10/2). Pada usianya yang ke-69, Bank BTN berhasil membukukan aset sebesar lebih dari Rp300 triliun dan berhasil menduduki peringkat ke lima bank terbesar dari sisi aset di Indonesia. Bank BTN yang fokus pada kredit perumahan mencatatkan kredit sekitar Rp523 triliun selama 69 tahun berdiri.



FEBRUARI

➤ BTN SYARIAH LUNCURKAN KPR HITS

Bank BTN meluncurkan layanan pembiayaan properti BTN iB dengan nama KPR Hits di Jakarta pada Kamis (14/2) malam. KPR Hits merupakan produk KPR nonsubsidi yang membidik kaum milenial. KPR Hits ditargetkan bisa meraup pembiayaan hingga Rp 1,35 triliun sepanjang tahun 2019. Peluncuran layanan ini dilakukan oleh Direktur Bank BTN, Iman Nugroho Soeko bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah BTN, Quraish Shihab dan Kepala Divisi Syariah BTN, Joni Prasetyanto.



MARET

➤ BTN INISIASI SCHOOL OF PROPERTY DEVELOPER DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Bank BTN bersama Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) dan FT UGM menandatangani MoU tentang Pengembangan SDM dan Riset, Dalam MoU tersebut dihasilkan penginisiasian *School of Property Developer*. Tujuan dari kerja sama ini yakni dapat mendidik pengembang-pengembang perumahan MBR sehingga bisa meraih akreditasi dan sertifikasi dari Kementerian PUPR yang sekaligus menjadi standar baru bagi pengembang yang akan membangun proyek perumahan subsidi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



APRIL

» BTN AKUISISI ANAK USAHA PNM

Bank BTN melakukan ekspansi untuk memperluas cakupan bisnisnya dengan mengakuisisi saham dari PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM). Bertempat di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/4) Perseroan membeli 33.000 lembar saham PNMIM senilai Rp114,3 miliar milik induk perusahaannya PNM.



MEI

» BANK BTN JALIN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DAN LAYANAN PERBANKAN

Bertempat di Jakarta, Rabu (8/5) Bank BTN menjalin kemitraan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang pengamanan, penegakan hukum dan layanan jasa perbankan. Kemitraan Bank BTN dengan lembaga negara termasuk Polri dilakukan untuk menyukseskan program Sejuta Rumah. Kerja sama ini merupakan wujud nyata dukungan Bank BTN terhadap tugas dan tanggung jawab Polri dalam penegakan hukum di Indonesia.



JUNI

» OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP II TAHUN 2019 KELEBIHAN PERMINTAAN

Bank BTN berhasil menghimpun dana Rp4,11 triliun nilai tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp3,14 triliun. Dana tersebut berasal dari pasar modal lewat penerbitan surat utang atau obligasi. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap II yang telah ditawarkan pada pertengahan Juni 2019. Tiga seri obligasi PUB III Bank BTN pada tahap kedua ini semua meraih kelebihan permintaan, sehingga investor menilai bahwa kinerja dari Perseroan berlangsung dengan positif.



JULI

» BTN JALIN KERJA SAMA DENGAN TNI

Untuk menyukseskan program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah, Bank BTN menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyediaan jasa dan layanan perbankan bagi anggota TNI. Penandatanganan MoU antara Bank BTN dan TNI ini dilakukan di Mabes TNI, Senin (22/7). Melalui kerjasama tersebut Bank BTN akan memberikan layanan produk dan jasa layanan perbankan kepada TNI dalam bentuk Tabungan, Deposito maupun Giro. Termasuk dalam hal ini Perseroan akan menggarap potensi Kredit Kepemilikan Rumah dari anggota TNI yang diperkirakan bakal mencapai 300.000 unit rumah.



» BTN JADI PILOT PROJECT LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK YANG DILUNCURKAN KEMENTERIAN ATR

Pada bulan September 2019, Bank BTN secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai pilot project Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Layanan ini juga bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sertifikat hak tanggungan (HT) sebagai *second way out* penerapan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK 71) di Bank BTN. Layanan elektronik ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama yang ingin mengurus Kredit Pemilikan Rumah (KPR)



» BANK BTN LUNCURKAN PROGRAM KEMILAU EMAS

Pada Jumat (31/10) Bank BTN meluncurkan program “Kemilau Emas”, dalam peluncuran program ini Perseroan juga menunjukan mock up dari kepingan emas tersebut. Perseroan menargetkan dapat meraup dana segar untuk memupuk Dana Pihak Ketiga dari segmen ritel sebesar Rp 3 triliun dari program ini yang digelar dari November-Desember 2019.



» BANK BTN GELAR AKAD KPR MASSAL

Kepala Kantor Wilayah I PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Manahan Hutapea meninjau proses akad KPR massal yang diikuti oleh 200 debitur dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/11). Hingga akhir tahun 2019, Bank BTN telah menyalurkan KPR dengan skema BP2BT pada sekitar 5.635 unit rumah di seluruh Indonesia. Dengan pencapaian tersebut Bank BTN masih memegang peranan sebagai mitra utama pemerintah dalam menyalurkan BP2BT.



» BTN SIAP HADAPI 2020

Jajaran Direksi Bank BTN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (27/11). Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham sepakat untuk menunjuk Direktur Utama yang baru yakni Pahala N. Mansury serta menetapkan Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama Perseroan. Komposisi direksi dan komisaris Bank BTN yang baru ini, diyakini akan solid dalam menjalankan bisnis perseroan dan mendukung program perumahan rakyat milik Presiden Joko Widodo.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KILAS PERISTIWA



DESEMBER

»» BTN BERSIAP KUASAI PASAR MILENIAL

Untuk menjaring generasi milenial, Bank BTN meluncurkan aplikasi BTN Properti Mobile versi Android di Jakarta, Rabu (28/12). Aplikasi ini diharapkan akan mempermudah generasi milenial untuk mengakses produk KPR dari Bank BTN. Selain itu, Perseroan juga bersiap untuk menguasai pasar milenial dengan me-rebranding produk KPR Gaeesss for Millenials. Tercatat hingga November 2019 Perseroan sukses menyalurkan KPR Gaeesss senilai Rp9,3 triliun. Nilai penyaluran tersebut setara dengan 27.593 unit hunian bagi kalangan milenial.



DESEMBER

»» BTN CATATKAN EBA- SP SMF BTN 05

Bank BTN mencatatkan EBA-SP SMF BTN 05 di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (4/12). EBA-SP merupakan instrumen hasil sekuritisasi dari tagihan KPR. Dengan tercatatnya EBA-SP SMF BTN 05 yang meraih rating id AAA tersebut Bank BTN tercatat 12 kali melakukan transaksi sekuritisasi dengan total nilai EBA sebesar Rp11,65 triliun.



LAPORAN MANAJEMEN

Salah satu agenda besar dalam penguatan organisasi Perseroan adalah penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Manajemen menekankan tentang integritas sebagai kunci utama penerapan prinsip dan praktik GCG, khususnya dari seluruh insan Bank BTN.





Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

**Kinerja Bank
BTN tahun
2019 menjadi
bagian penting
dari refleksi
perjalanan Bank
BTN untuk dapat
tumbuh dengan
fondasi yang kuat
di masa-masa
mendatang**

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai pelaku usaha perbankan yang berfokus pada pembiayaan kredit perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, disebut juga “Perseroan” atau “Bank BTN”, memiliki peran yang cukup besar terhadap program “Satu Juta Rumah” dari Pemerintah Indonesia. Program yang bertujuan menyediakan hunian yang laik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar terkait rumah tinggal. Dengan pangsa pasar mencapai 90,82% terhadap jumlah KPR subsidi di Indonesia, Perseroan telah mengambil posisi strategis untuk mendukung terwujudnya program “Satu Juta Rumah”.

Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan laporan ringkas fungsi pengawasan dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2019 ini, sekaligus sebagai bagian dari pelaporan pengawasan atas kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2019 yang cukup menantang.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI BANK DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI OLEH DEWAN KOMISARIS

Pengawasan atas kebijakan strategis Perseroan yang dilakukan Direksi, dilakukan melalui pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank BTN, periode 2019-2021. Rencana Bisnis ini merupakan telaah mendasar atas kebijakan berbagai aspek dalam pengelolaan Perseroan, baik aspek operasional Bank maupun target-target yang dicanangkan. Termasuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Di sepanjang tahun 2019, Rencana Bisnis Bank BTN mengalami perubahan dalam rangka mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 yang akan efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Selain itu, tantangan likuiditas ketat perbankan yang berlanjut turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan hingga Triwulan III tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan kenaikan *outstanding Non Performing Loan* (NPL) dan beban bunga dana yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yang menyebabkan adanya deviasi proyeksi kinerja yang cukup signifikan atas proyeksi NPL, kebutuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta Laba Perseroan pada posisi Desember 2019.



Untuk itu, Perseroan dengan dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan melakukan koreksi atas Rencana Bisnis Bank yang sebelumnya telah ditetapkan di akhir tahun 2018 dan/atau awal tahun 2019. Penyesuaian atas Revisi/Perubahan Rencana Bisnis Bank 2019-2021 dilakukan Perseroan dengan fokus utama adalah komitmen untuk memenuhi rasio *coverage* dan upaya pembenahan kinerja untuk mewujudkan pertumbuhan yang sustain.

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intens Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat bersama yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional Bank, tantangan dan peluang, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) bentuk rapat, yaitu rapat internal Dewan Komisaris, dan rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melakukan 51 kali rapat internal dan 41 rapat bersama Direksi, dengan total rapat sebanyak 92 kali. Tingginya jumlah rapat dan agenda pembahasan terkait kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2019 yang cukup dinamis, menunjukkan intensitas Dewan Komisaris dan Direksi untuk bersama-sama menghadapi situasi yang cukup menantang. Dewan Komisaris berharap, komitmen kebersamaan ini dapat terus terjaga.

Secara khusus, Dewan Komisaris menekankan pentingnya likuiditas dan peningkatan sumber pendanaan bagi Perseroan. Kedua hal ini menjadi fokus pembenahan di tahun 2020, termasuk juga catatan Dewan Komisaris terkait NPL sebagai indikator bagi Perseroan untuk melakukan peningkatan kualitas kreditnya.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN BANK DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian terhadap kinerja Direksi didasarkan pada kontrak manajemen yang disusun bersamaan dengan Rencana Bisnis Bank periode 2019-2021. Dalam penilaian tersebut, terdapat 6 (enam) perspektif yang terbagi ke dalam 35 *Key Performance Indicator* (KPI) yang diturunkan ke dalam KPI Korporat maupun KPI masing-masing Direktorat.

6 PERSPEKTIF PENILAIAN KINERJA DIREKSI



Finansial



Customer



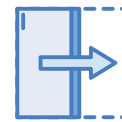
**Business
Process**



**Learning &
Growth**



**Agent of
Development**



**Program
Transformasi**

35 aspek KPI meliputi beberapa pencapaian kinerja Perseroan dengan ukuran target, termasuk diantaranya kinerja keuangan, pengembangan jaringan produk dan jasa, pencapaian skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), *Employee Engagement* index, pengembangan Teknologi Informasi, Sinergi antar BUMN, Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu dan berbagai kriteria kunci yang menggambarkan kinerja dan kontribusi Perseroan baik terhadap industri keuangan khususnya pembiayaan

perumahan, agenda Kementerian BUMN terkait eskalasi perekonomian, hingga program transformasi yang dijalankan Perseroan.

Secara umum, Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi telah berupaya untuk mewujudkan aspirasi para pemegang saham yang tertuang dalam KPI yang diemban. Beberapa catatan penting menjadi evaluasi bersama bagi seluruh jajaran untuk dapat melakukan pembenahan di tahun 2020.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2020 YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Tahun 2020 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, baik bagi perekonomian Indonesia, industri perbankan, maupun industri perumahan. Sesuai Rencana Bisnis Bank BTN periode 2020-2022, tahun 2020 menjadi fondasi bagi Perseroan untuk dapat melakukan pembenahan secara fundamental.

Sejalan dengan perekonomian dunia yang tumbuh landai, berbagai negara diprediksi akan menurunkan suku bunga acuannya dalam rangka menggerakkan perekonomiannya. Amerika Serikat melalui Bank Sentral Amerika telah melakukan kebijakan penurunan suku bunga di sepanjang tahun 2019 sejalan dengan perekonomiannya yang tak kunjung melakukan *bouncing*. Hal ini berdampak terhadap negara lain, termasuk Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuan BI 7 days *repo* secara gradual dan diprediksi akan kembali diturunkan di tahun 2020.

Tantangan eksternal lainnya adalah ketatnya likuiditas perbankan yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan kredit. Sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Direksi memiliki tantangan untuk tetap menumbuhkan kinerja Perseroan di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan tersebut. Selain itu, efektifnya pemberlakuan PSAK 71 memberikan imbas yang cukup signifikan bagi Perseroan, yang akan menjadi tantangan

besar bagi Direksi dalam melakukan pengelolaan keuangan Perseroan.

Dewan Komisaris memandang, tantangan Direksi adalah tetap menumbuhkan dan meningkatkan kinerja Perseroan melalui perbaikan aspek fundamental di tingkat organisasi. Aspek fundamental ini dicerminkan dari integritas seluruh Insan BTN untuk dapat mengembalikan kinerja Perseroan pada tingkat yang terbaik. Dewan Komisaris menekankan pentingnya transformasi Perseroan di seluruh bidang, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia berdasarkan meritokrasi, pembentukan kultur digital, kepatuhan, hingga fokus pada peningkatan Dana Pihak Ketiga sebagai kekuatan mendasar dari sumber pendanaan Bank, serta penurunan *cost of fund*.

Melalui penguatan aspek fundamental ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Perseroan untuk dapat menjaga kualitas kredit, mempertahankan pertumbuhan kredit yang berkualitas termasuk penurunan NPL, serta melebarkan optimisme untuk dapat tumbuh di tengah arus tantangan yang begitu luar biasa. Khususnya dengan fokus pasar pembiayaan perumahan yang telah menjadi *trade mark* Perseroan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat mewujudkan tahun 2020 sebagai tahun fondasi bagi Perseroan, dengan proyeksi optimis dapat tumbuh secara signifikan di tahun 2021.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA BANK DAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS

Implementasi prinsip-prinsip GCG, menjadi sebuah kewajiban bagi Perseroan. 2 (dua) makna mendasar dari penerapan prinsip ini adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta niat dan kemauan dari seluruh Insan BTN untuk dapat menciptakan sebuah organisasi yang sehat, akuntabel, dan memiliki aspek keberlanjutan hingga masa-masa yang akan datang.

Melalui fungsi pengawasan yang telah dijalankan, Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen Perseroan

telah senantiasa berupaya memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; baik kepatuhan terhadap ketentuan yang umum berlaku bagi pelaku usaha di Indonesia, ketentuan di sektor perbankan, ketentuan terkait pasar modal dan perusahaan terbuka, ketentuan pengelolaan Unit Usaha Syariah, hingga ketentuan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara mendasar, pemenuhan ketentuan ini dapat terlihat dari terselenggaranya beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham



(RUPS) sebagai perusahaan terbuka dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kemauan manajemen Perseroan dalam menghormati hak-hak pemegang saham, hingga pemegang saham minoritas.

2. Seluruh struktur dan mekanisme organ GCG berjalan dengan baik, yang ditandai dengan intensitas rapat yang cukup tinggi.
3. Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Perseroan mengindahkan saran dan masukan yang diberikan regulator dalam rangka memperkuat industri perbankan Indonesia.
4. Melakukan transparansi kinerja keuangan, baik melalui situs web maupun keterbukaan informasi kepada publik.
5. Mematuhi peraturan untuk sektor pembiayaan perumahan/KPR.

Kunci utama dalam pelaksanaan prinsip GCG perbankan adalah pengelolaan risiko di hulu sebagai *early warning system*, membentuk dan menjalankan kesadaran risiko operasional Bank dan pengelolaan keuangan, serta proses atau tahapan audit di hilir, baik audit secara internal maupun audit independen yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Keberadaan Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris serta Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi telah menunjukkan keseriusan Perseroan dalam pengelolaan risiko yang berimbang. Pada tingkat audit, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di bawah Direksi membentuk komposisi pengelolaan audit yang baik, yang dibarengi dengan audit independen atas laporan keuangan Perseroan oleh Akuntan Publik.

Lebih dari itu, Dewan Komisaris memandang penerapan prinsip GCG Bank terletak pada komitmen seluruh Insan

BTN untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan fundamental ini menjadi tantangan bagi Direksi di tahun 2020 untuk dapat mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh integritas seluruh pihak. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bahu-membahu bersama-sama dengan Direksi dalam upaya meletakkan fondasi tersebut dan memperkokoh pertumbuhan kinerja Perseroan dengan basis fondasi yang kuat.

Secara khusus, Dewan Komisaris turut berbangga atas kerja sama yang telah terjalin antara Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerapkan panduan Cegah Korupsi (CEK) dan program Profesional Berintegritas (PROFIT). Perseroan menjadi Bank BUMN pertama yang mengadopsi dan menerapkan CEK dan PROFIT untuk mendorong pencegahan korupsi dan *fraud* di lingkup Perseroan. Dewan Komisaris berharap, pelaksanaan program ini sungguh akan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat positif bagi Perseroan untuk meletakkan fondasi pengelolaan Bank yang berkelanjutan.

Tak lupa, pemberlakuan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang efektif berlaku pada 1 Januari 2019 turut memberikan imbas bagi pengelolaan Perseroan. Peraturan ini sejatinya bersandar pada semangat penerapan keuangan berkelanjutan yang berorientasi pada industri keuangan yang memerhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Dewan Komisaris berharap, penerapan lanjutan di tahun-tahun berikutnya akan membawa Perseroan menjadi pelaku usaha perbankan yang memiliki perhatian besar terhadap aspek-aspek tersebut, terutama sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan rumah bagi masyarakat.

APRESIASI ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa organ, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Masing-masing organ, baik ke-3 Komite maupun Sekretaris Dewan Komisaris, memiliki peran taktis dalam hal memberikan masukan bagi Dewan Komisaris. Komite Audit bekerja bersama dengan Satuan Pengawasan Intern untuk memberikan *check and balances* atas proses audit



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

internal di lingkup Perseroan, termasuk bekerja sama dalam proses audit independen atas laporan keuangan Perseroan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Demikian pula dengan Komite Pemantau Risiko yang menjalin hubungan kerja dengan Fungsi Manajemen Risiko yang dijalankan oleh perangkat di bawah Direksi. Serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas memberikan masukan atas proses remunerasi dan nominasi yang diberlakukan di lingkup Perseroan. Hubungan kerja yang baik ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pengembangan Perseroan ke depan.

Penilaian atas kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara periodik sesuai piagam masing-masing Komite. Penilaian ini dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran

masing-masing Komite, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite untuk periode jabatan berikutnya.

Dewan Komisaris menilai bahwa ke-3 Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ pendukung telah menjalankan fungsinya dengan baik. Pelaporan yang dilakukan secara periodik menjadi masukan berharga bagi Dewan Komisaris untuk melihat secara lebih mendalam terkait pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh upaya yang dilakukan dan masukan yang telah diberikan oleh para anggota Komite serta Sekretaris Dewan Komisaris.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN YANG DIBERLAKUKAN DI LINGKUP BANK, DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM MEKANISME TERSEBUT

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan pengaduan atau pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkup Perseroan dengan mengutamakan kerahasiaan identitas pelapor. Perseroan telah memiliki Pedoman WBS yang diatur berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 21/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang *Standard Operating Procedure Whistle Blowing System* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penerapan WBS Perseroan tidak lepas dari Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI No. 11/23/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP mengenai Kebijakan Anti Fraud. Mekanisme WBS Perseroan diterapkan dalam rangka menegakkan peraturan serta semangat keterbukaan terhadap pelaporan dari pihak manapun. Pihak pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim), terkecuali jika terdapat langkah hukum yang mengharuskan identitas pelapor menjadi terbuka di hadapan pengadilan. Perseroan

memiliki Tim WBS yang dibentuk secara khusus untuk mengelola seluruh pengaduan laporan yang masuk untuk diverifikasi dan diproses ke tahapan selanjutnya.

Dalam mekanisme WBS yang berlaku di Perseroan, Dewan Komisaris berperan sebagai penerima laporan di tingkat puncak. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Dewan Komisaris melalui surat PO BOX *Whistle Blowing System* (WBS) BTN Jakarta 10000. Sebaliknya, jika yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama. Laporan yang masuk kepada Dewan Komisaris akan diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut, dan akan mengambil langkah-langkah terbaik jika diperlukan.

Di samping itu, Dewan Komisaris turut memantau perkembangan pelaporan yang masuk di saluran WBS Perseroan. Melalui rapat dan pertemuan dengan Direksi, Dewan Komisaris dapat mengetahui jika terdapat pengaduan yang masuk melalui saluran WBS yang membutuhkan perhatian. Hingga akhir tahun 2019,



pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perseroan sebanyak 90 pengaduan baik melalui Surat/PO BOX, SMS/ Handphone, datang langsung, atau melalui surat elektronik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus), sedangkan 10 pengaduan lainnya diteruskan

ke proses audit klarifikasi dan/atau audit khusus. Per 31 Desember 2019, dari 10 pengaduan tersebut, sebanyak 8 (delapan) pengaduan masih dalam proses baik proses audit, pembuktian laporan maupun proses lintas divisi, sedangkan 2 (dua) pengaduan lainnya telah terbukti dan telah diberikan sanksi.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2019, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPSTahunan tanggal 17 Mei 2019, RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019, Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan dan pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris, dengan kronologi sebagaimana di bawah ini.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/ Independen)				I Wayan Agus Mertayasa tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)		Kamaruddin Sjam tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Arie Coerniadi (Komisaris Independen)		Arie Coerniadi tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)		Lucky Fathul Aziz Hadibrata tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Garuda Wiko (Komisaris Independen)		Garuda Wiko tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Sumiyati (Komisaris)	Sumiyati (Komisaris)			Sumiyati tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 29 Agustus 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Maurin Sitorus (Komisaris)				Maurin Sitorus tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Iman Sugema (Komisaris)	Iman Sugema (Komisaris)	Iman Sugema (Komisaris)		Iman Sugema tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Parman Nataatmadja (Komisaris)				Parman Nataatmadja tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
	Asmawi Syam (Komisaris Utama/ Independen)	Asmawi Syam (Komisaris Utama/ Independen)		Asmawi Syam diangkat melalui Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019, namun tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto diangkat melalui Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019
		Marwanto Harjowiryo (Komisaris)		Marwanto Harjowiryo diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019, namun tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
			Chandra M. Hamzah ^{*)} (Komisaris Utama/ Independen)	Chandra M. Hamzah diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
			Armand B. Arief ^{*)} (Komisaris Independen)	Armand B. Arief diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
			Ahdi Jumhari Luddin ^{*)} (Komisaris Independen)	Ahdi Jumhari Luddin diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019



Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
			Heru Budi Hartono^{*)} (Komisaris)	Heru Budi Hartono diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
			Andin Hadiyanto^{*)} (Komisaris)	Andin Hadiyanto diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019

^{*)} Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Posisi 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 6 (enam) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen, dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah ini mengalami perbedaan dibandingkan akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, dimana Perseroan memiliki 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 4 (empat) Komisaris.

Berikut susunan Dewan Komisaris yang menjabat di akhir tahun 2019.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2019

Dewan Komisaris	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Menjabat
Chandra M. Hamzah ^{*)} (Komisaris Utama/Independen)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Armand B. Arief ^{*)} (Komisaris Independen)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Ahdi Jumhari Luddin ^{*)} (Komisaris Independen)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Heru Budi Hartono ^{*)} (Komisaris)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Andin Hadiyanto ^{*)} (Komisaris)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama

^{*)} Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Dari ke-6 Dewan Komisaris yang menjabat hingga akhir periode pelaporan tahun buku, terdapat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris yang belum mendapatkan persetujuan dari OJK atas Uji Kepatutan dan Kelayakan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Seluruh pergantian dan perubahan susunan serta jumlah keanggotaan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam RUPS.

AKHIR KATA

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas komitmen untuk dapat menumbuhkembangkan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, perjalanan tahun 2019 menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran untuk dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Komisaris Utama
Chandra M. Hamzah

Komisaris
EKO D. HERIPOERWANTO



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



PAHALA NUGRAHA MANSURY

Direktur Utama



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

LAPORAN DIREKSI

Tahun 2019 menjadi catatan penting bagi perjalanan Bank BTN untuk dapat melakukan pembenahan di masa mendatang, dan tumbuh dari kompetensi intinya sebagai perbankan yang berfokus pada pembiayaan perumahan

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mewakili Direksi dan seluruh jajaran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, disebut juga “Perseroan” atau “Bank BTN”, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja Perusahaan untuk tahun buku 2019. Pencapaian kinerja baik operasi maupun bisnis Perseroan sebagai pelaku usaha perbankan yang berfokus pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tahun 2019 patut menjadi apresiasi bagi kita semua, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keseluruhan pencapaian Perseroan.

PERKEMBANGAN TAHUN 2019 DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Tahun 2019 menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian dunia. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 berada di angka 2,9%, turun dari tahun 2018 yang berada di angka 3%. Perhitungan ini tak berbeda dengan International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi perekonomian dunia tahun 2019 hanya tumbuh 2,9%, turun dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2019 sebesar 3%. Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih berlanjut di tahun 2019—yang belakangan ini mulai mereda pasca ditandatanganinya kesepakatan antar kedua negara, memberikan imbas pada pelemahan aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia. Selain itu, kondisi geopolitik di beberapa kawasan turut memberikan situasi ketidakpastian terhadap perekonomian dunia di sepanjang tahun 2019.

Melambatnya perekonomian AS serta Tiongkok di tahun 2019 membuat kedua negara harus mengambil langkah antisipasi; terutama menjaga suku bunga acuan. Pemerintah AS melalui Bank Sentral Amerika, atau “The Fed” di sepanjang tahun 2019 mengambil kebijakan menurunkan suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) dari 2,50% menjadi 1,75%. Hal ini berdampak pada mengalirnya modal asing ke beberapa pasar keuangan negara-negara berkembang, yang kemudian memberikan kesempatan kepada para negara berkembang untuk mengambil langkah kebijakan untuk menurunkan suku bunga dan menerapkan kebijakan akomodatif lainnya.



Di tengah perlambatan perekonomian dunia, Indonesia justru mampu menjaga perekonomiannya untuk tidak turut tergerus ke bawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, sedikit di bawah pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17%. Keberhasilan Indonesia untuk tetap bertahan di tengah situasi perekonomian dunia yang kurang menggembirakan terutama disebabkan postur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didominasi sektor konsumsi dalam negeri. Keberhasilan Bank Indonesia mampu menjaga laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, terendah sejak tahun 1999, turut berperan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Faktor positif tersebut, di samping membaiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan antisipatif terhadap suku bunga acuannya. Di tahun 2019 BI menurunkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7 DRRR) sebanyak 100 bps dari 6,0% menjadi 5,0%. Selain itu, BI melonggarkan beberapa kebijakan rasio makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan, salah satunya adalah memberikan kelonggaran LTV/FTV (*Loan To Value/Financing to Value*).

Namun demikian, likuiditas ketat perbankan yang berlanjut masih menjadi tantangan perbankan di 2019. Hal ini diindikasikan oleh rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Perbankan Nasional yang masih di atas 92% dan peningkatan sumber pendanaan dari surat berharga. Per November 2019 rasio LDR Perbankan adalah 93,5% dan surat berharga perbankan tumbuh 20,7% (yoy) lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sebesar 2,4%. Pertumbuhan surat berharga tersebut lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) per November sebesar 8,8% (yoy).

Likuiditas perbankan yang semakin terbatas mengakibatkan laju pertumbuhan kredit menjadi lebih lambat. Per November 2019 kredit perbankan nasional tumbuh 8,3% (yoy), lebih kecil dibanding pertumbuhan periode sebelumnya yang sebesar 11,6%. Selain pengetatan likuiditas, perlambatan pertumbuhan kredit di 2019 juga disebabkan oleh perilaku investor yang cenderung menunggu untuk melakukan aksi investasi atas kondisi politik pasca diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia tahun 2019.

Dalam menghadapi tantangan dinamika makro dan persaingan yang semakin ketat, di tahun 2019 manajemen menetapkan arah Kebijakan Umum Direksi (KUD) yaitu "Pertumbuhan Terkendali dengan Bisnis yang Lebih Prudent dan Berkualitas, didukung oleh Peningkatan Produktivitas SDM, Infrastruktur IT dan Manajemen Risiko yang Optimal". Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2019 Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Strategi Bisnis Kredit
 - a. Optimalisasi Program KPR Subsidi pemerintah.
 - b. Mengembangkan program KPR untuk generasi milenial.
 - c. Mengembangkan kredit komersial (KMK dan KI) dan korporasi di segmen BUMN.
 - d. Meningkatkan peran BTN HFC untuk mencetak pengembang-pengembang baru untuk proyek perumahan Subsidi dan MBR.
2. Strategi Pendanaan
 - a. Mengembangkan produk Tabungan dengan peningkatan fitur-fitur *electronic channel* (kartu *prepaid*, kartu debit, *mobile banking* dan *internet banking*).
 - b. Pengembangan *Cash Management* untuk segmen lembaga dan korporasi.
 - c. Selektif pada pemberian suku bunga dana.
 - d. Meningkatkan pendanaan wholesale baik yang bersumber dari surat berharga dan pinjaman bilateral.
3. Strategi *Fee Based Income*
 - a. Meningkatkan transaksi *treasury*.
 - b. Mengembangkan *fee bank* garansi dan *supply chain financing* pada nasabah lembaga dan korporasi.
 - c. Meningkatkan *fee based income* dari aktivitas institutional banking.
4. Strategi *Collection & Remedial*
 - a. Memperbaiki proses bisnis kredit dengan implementasi inisiatif business process improvement kredit KPR.
 - b. Meningkatkan efektivitas desk call untuk memperbaiki kolektibilitas 2 (Dalam Pengawasan Khusus).
 - c. Mengembangkan kerjasama strategis dengan investor, kejaskaan, *lawyer*, agen properti dan *debt collector*.
 - d. Mempercepat penyelesaian dokumen Lewat Ambang Toleransi (LAT).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

- e. Meningkatkan pencadangan CKPN untuk mempersiapkan implementasi PSAK 71 di awal 2020.
- f. Menurunkan kredit kualitas rendah (*loan at risk*).
- 5. Inisiatif Informasi Teknologi (IT)
 - a. Penguatan peran BTN *Property Portal*.
 - b. Mengembangkan Customer Relationship Management (CRM) untuk mengetahui 360 dalam penjualan DPK Ritel.
 - c. Mengembangkan aplikasi internet banking & *mobile banking*.
 - d. Mengembangkan management tools untuk aktivitas marketing dan sales dengan membentuk *digital marketing & sales tools* (BTN SMART).
 - e. Peningkatan operational supporting tools saat ini, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko.
 - f. Memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja.
 - g. Integrasi *Loan Origination System* dan penambahan iCremo untuk melakukan monitoring penyaluran kredit.
- 6. Penerapan *Risk, Governance* dan *Compliance*
 - a. Melaksanakan penerapan integrated GRC dengan melakukan pemantauan terhadap Key Performance Indicator (KPI), Key Risk Indicator (KRI), dan Key Compliance Indicator (KCI).
 - b. Meningkatkan standar *corporate governance* menurut 11 pilar BI/OJK, standar *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan standar *sustainability finance*.
 - c. Menerapkan peta kepatuhan kepada seluruh unit kerja
- 7. Strategi SDM dan Penguatan *Corporate Culture*
 - a. Membangun manajemen top talent dan suksesi.
 - b. Melakukan evaluasi manajemen karir dan *job family*.
 - c. Menyusun rencana suksesi dan *handover*.
 - d. Menyusun strategic man *power planning* dengan strategi alokasi pareto.
 - e. Memperkuat internalisasi *employer value proposition* melalui aktivitas rekrutmen terarah untuk menarik *top talent*.
 - f. Penguatan manajemen berbasis kinerja melalui penguatan sistem manajemen kinerja, mendesain mekanisme kompensasi yang menarik dan untuk seluruh segmen bisnis.
 - g. Penguatan budaya berkinerja yang tinggi melalui internalisasi budaya kerja integritas.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019

Kondisi ekonomi makro yang cukup menantang serta upaya persiapan implementasi PSAK 71 menjadi catatan penting pada kinerja Perseroan tahun 2019. Meskipun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, Perseroan tetap menunjukkan positioning dan kontribusi strategisnya pada sektor perbankan dan perumahan nasional.

Kredit dan pembiayaan Perseroan mengalami peningkatan 7,4% (yoy), menjadi Rp255,8 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh kredit perumahan segmen Subsidi. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, perseroan berhasil memperkuat positioningnya sebagai Bank Terbesar ke-5 dari segi Aset dan Bank dengan market share KPR terbesar dalam mendukung program Sejuta Rumah Pemerintah. Pada Desember 2019, asset perseroan tercatat sebesar Rp311,7 Triliun dan *market share* total KPR Bank BTN per September 2019 adalah 40,13%.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp225,4 triliun, turun 2,1% (yoy) akibat pengetatan

likuiditas perbankan yang mengakibatkan penghimpunan DPK menjadi semakin kompetitif sehingga meningkatkan pendanaan dari non DPK. Meskipun demikian, kinerja Tabungan Bank BTN masih lebih baik dibanding dengan industri yaitu tumbuh 8,9% (yoy) lebih tinggi dibanding pertumbuhan Tabungan Nasional yang berkisar 7% (posisi November 2019).

Rasio NPL *Gross* Perseroan meningkat menjadi 4,7%. Penurunan kualitas kredit disebabkan oleh upaya Perseroan untuk menurunkan kredit berkualitas rendah (*loan at risk*), terutama pada segmen komersial high rise (Apartemen) dikarenakan penurunan permintaan property pada segmen menengah – atas dan apartemen yang berdampak pada penurunan penjualan dan kemampuan debitur.

Kinerja laba Perseroan turun menjadi Rp209 miliar yang disebabkan dua faktor utama yaitu, Pertama adalah upaya untuk meningkatkan CKPN dalam rangka implementasi PSAK 71, dimana pada tahun 2019 Perseroan meningkatkan



posisi CKPN menjadi Rp6,1 Triliun meningkat dari 2018 yang hanya sebesar Rp3,3 Triliun. Faktor kedua adalah kenaikan beban bunga akibat tightening *liquidity*. Per Desember 2019, pendapatan bunga Perseroan tercatat

Rp25,6 triliun, naik dari periode sebelumnya yang sebesar Rp22,8 triliun. Namun, beban bunga meningkat menjadi Rp 16,5 triliun dari 2018 sebesar Rp12,6 triliun.

KENDALA, TANTANGAN, DAN PENYELESAIANNYA

Perlambatan pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berlanjut. Pada APBN 2020, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akan berkisar 5,1% - 5,2% belum membaik secara signifikan dibanding *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang sebesar 5,1%. Meskipun demikian, Perseroan optimis bahwa fundamental ekonomi domestik masih kuat dan menyimpan peluang yang dapat dikembangkan dalam memperluas bisnis kedepannya.

Optimisme Perseroan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Komitmen dan dukungan Pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program KPR Subsidi pada Program Sejuta Rumah. Meskipun alokasi kuota hunian subsidi cenderung menurun pada dua tahun terakhir, Pemerintah telah mengupayakan opsi-opsi pendanaan untuk tetap meningkatkan KPR Subsidi kedepannya. Untuk itu, Perseroan akan memperkuat komunikasi dengan stakeholder guna mengusulkan opsi-opsi pendanaan baru yang akan digunakan dalam penyaluran KPR Subsidi.
2. Berkembangnya sentra-sentra pertumbuhan baru yang didorong oleh tren urbanisasi, pengembangan infrastruktur dan rencana pemindahan Ibu Kota

Negara yang akan mendorong terciptanya wilayah metropolitan baru. Dalam lima tahun kedepan, diprediksi akan terdapat enam wilayah metropolitan baru yaitu Palembang, Medan, Manado, Banjarmasin, Makasar dan Denpasar yang merupakan peluang bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan bisnisnya.

3. Permintaan rumah dengan harga Rp150 Juta – Rp300 Juta masih tinggi, disaat pertumbuhan kredit *property* masih terbatas. Berdasarkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang dirilis oleh Bank Indonesia di tahun 2019, IHPR Rumah tipe kecil (Tipe < 36) memiliki indeks IHPR yang lebih tinggi dibanding dengan IHPR tipe rumah sedang dan besar. Pada Q4 2019, IHPR Rumah tipe kecil teralisasi sebesar 211,3 lebih tinggi dibanding IHPR Rumah Tipe menengah dan besar yang masing-masing sebesar 207,1 dan 177,2. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pasar perumahan *low segment* yang selama ini menjadi pangsa pasar utama Perseroan masih jauh dari jenuh.

Tren kolaborasi dan *partnership* Perbankan dengan Fintech sebagai *new engine growth* pertumbuhan bisnis. Kondisi tersebut merupakan peluang yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk mengembangkan ekosistem *property* dan kredit perumahan berbasis digital

PROSPEK TAHUN 2020

Memperhatikan tantangan dan peluang kedepan, Perseroan telah merumuskan lima fokus strategi jangka panjang yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja dan memperkuat kompetensi inti bisnis yaitu sebagai Bank Tabungan yang berfokus pada Pembiayaan Perumahan. Adapun lima fokus strategi dimaksud yaitu:

1. Menerapkan budaya kerja SIIPS (Sinergi, Integritas, Inovasi, Profesional dan *Strive for Excellence*), secara konsisten untuk meningkatkan produktivitas.
2. Meningkatkan kualitas aktiva produktif serta memperbaiki proses bisnis perkreditan.

3. Membangun bisnis model baru untuk mengembangkan CASA dan sumber pendanaan baru yang lebih murah (*low cost*).
4. Otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis.
5. Partnership dengan berbagai stakeholder untuk membangun ekosistem properti dan bisnis KPR.

Dengan penetapan lima fokus strategi tersebut, Perseroan telah menetapkan delapan inisiatif strategis utama yang akan dijalankan di tahun 2020 yaitu :

1. Penyelesaian NPL dan meningkatkan *rasio coverage* secara masif, yang akan dilakukan melalui :



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

- a. Memperkuat *collection management system*
 - b. Mempercepat penjualan kredit macet untuk meningkatkan *coverage*
2. Partnerhsip untuk mengembangkan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi generasi milenial di perkotaan
 - a. Membangun kerjasama pendanaan untuk penyaluran pembiayaan *housing* di segmen milenial dan urban
 - b. Memperluas Pasar dan Produktivitas Sekuritisasi
3. Bundling produk untuk meningkatkan CASA
 - a. Meningkatkan CASA melalui aktivasi rekening tabungan akun transaksional dan penjualan Produk *Bundling*
 - b. Memperbaiki Model *Sales* Manajemen penjualan DPK Ritel
 - c. Menjadi Bank Operasional transaksi bagi nasabah lembaga dan institusi
4. Memperkuat penerapan budaya kerja SIIPS
 - a. Program Budaya yang mendorong peningkatan kinerja
 - b. Memperbaiki *performance management cycle*
 - c. Penguatan *Performance Culture, Sales and Service Culture*
5. Melanjutkan inisiatif perbaikan proses bisnis kredit dan *collection management*
 - a. Memiliki bisnis model perkreditan yang menegakkan 3 Pilar (*Bisnis, Risk dan Operation*)
 - b. Memastikan kualitas aktiva produktif
 - c. Mengembangkan data *analytic*
6. Memperkuat komunikasi dengan Pemerintah untuk mengembangkan skema pembiayaan perumahan di segmen MBR
 - a. Mengembangkan kerjasama *stakeholder* untuk program *affordable housing*
 - b. Produk *Bundling* dengan *Anchor* di KPR
7. Automatisasi proses bisnis dan mengembangkan ekosistem KPR Digital
 - a. Meningkatkan *digital capability, realibility* dan *competitive feature* Automatisasi bisnis proses
 - b. Mengembangkan ekosistem digital, di sector payment, P2P, dan Property
8. Mengembangkan proposisi tabungan bagi segmen *mass affluent*
 - a. Rebranding Tabungan BTN dengan *image* Digital, Kemudahan transaksi dan *multi-benefit*

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Salah satu agenda besar dalam penguatan organisasi Perseroan adalah penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Menyandang status sebagai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus sebagai perusahaan terbuka, Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perseroan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ

dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham untuk menentukan beberapa kebijakan strategis terbatas bagi kelangsungan Perseroan.

Keberadaan berbagai organ pendukung seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, dan fungsi Manajemen Risiko, ditopang oleh perangkat kebijakan sebagai proses dan mekanisme GCG yang diberlakukan di lingkup Perseroan. Secara periodik manajemen melakukan tinjauan dan kekinian atas perangkat kebijakan yang dimiliki, agar terus memiliki relevansinya baik terhadap perkembangan Perseroan, perkembangan regulasi yang diberlakukan, maupun pertumbuhan industri perbankan di Indonesia.

Agar penerapan prinsip dan praktik GCG dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu menjadi bagian dari budaya, Perseroan memandang penting untuk melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh insan Bank BTN. Di samping itu, evaluasi, pemantauan dan peningkatan penerapan GCG di lingkup



Perseroan juga menjadi bagian penting dari pengembangan GCG secara keseluruhan agar penerapan GCG dapat mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Penilaian dilakukan baik terhadap penerapan aspek GCG, maupun penilaian manajemen risiko sesuai kepatuhan terhadap OJK.

Secara khusus manajemen menekankan tentang integritas sebagai kunci utama penerapan prinsip dan praktik GCG, khususnya dari seluruh insan Bank BTN. Manajemen memiliki

komitmen yang tinggi untuk terus membudayakan integritas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM. Perjalanan Perseroan di sepanjang tahun 2019 memberikan catatan penting atas keharusan seluruh insan Bank BTN dalam membangun pola berpikir positif dan budaya kerja yang dapat mendukung pengelolaan Bank yang sehat. Hanya dengan integritas, organisasi Perseroan akan dapat mencapai visinya, dan menjadi pelaku usaha industri perbankan terkemuka di Indonesia.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Di tahun 2019, melalui keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019, RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019, Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan dan pergantian susunan Direksi serta nomenklatur jabatan, dengan kronologi sebagaimana di bawah ini.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DI SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Maryono (Direktur Utama)	Maryono (Direktur Utama)			Maryono tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019.
Iman Nugroho Soeko (Direktur Finance & Treasury)				Iman Nugroho Soeko tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	Perubahan nomenklatur jabatan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Oni Febriarto Rahardjo (Direktur Commercial Banking)	Oni Febriarto Rahardjo (Direktur Commercial Banking)	Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking)		Pada 2 September 2019, Direksi menunjuk Oni Febriarto Rahardjo bertindak sebagai Plt. Direktur Utama. Oni Febriarto Rahardjo tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	Budi Satria (Direktur Consumer Banking)		Budi Satria tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DI SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Strategy, Compliance & Risk)	R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)	R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)		R. Mahelan Prabantarikso tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Collection & Asset Management)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Treasury & Strategy)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	Perubahan nomenklatur jabatan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)		Dasuki Amsir tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Yossi Istanto** (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto** (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto** (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto** (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	Perubahan nomenklatur jabatan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
		Suprajarto (Direktur Utama)		Suprajarto diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019, kemudian mengundurkan diri.
		Elisabeth Novie Riswanti* (Direktur Collection & Asset Management)	Elisabeth Novie Riswanti* (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	Elisabeth Novie Riswanti diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019. Perubahan nomenklatur jabatan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
			Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	Pahala Nugraha Mansury diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
			Hirwandi Gafar* (Direktur Consumer and Commercial Lending)	Hirwandi Gafar diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
			Jasmin* (Direktur Distribution and Retail Funding)	Jasmin diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019



KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DI SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
			Setiyo Wibowo* (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	Setiyo Wibowo diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

**) Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 8 (delapan) Direksi yang membidangi 8 (delapan) direktorat, dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur Utama. Jumlah ini mengalami perbedaan dibandingkan di awal tahun 2019, dimana Perseroan memiliki 9 (sembilan) Direksi yang membidangi 9 (sembilan) direktorat, dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur Utama. Hal ini sejalan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.

Berikut susunan Direksi yang menjabat di akhir tahun 2019.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2019

Dewan Komisaris	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Menjabat
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	Keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 23 Maret 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2023	Pertama
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	Keputusan RUPS Tahunan 2017 tanggal 17 Maret 2017	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2022	Pertama
Yossi Istanto** (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	Keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 23 Maret 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2023	Pertama
Elisabeth Novie Riswanti* (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Hirwandi Gafar* (Direktur Consumer and Commercial Lending)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Dewan Komisaris	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Menjabat
Jasmin* (Direktur Distribution and Retail Funding)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Setiyo Wibowo* (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024h	Pertama

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

**) Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Dari ke-8 Direksi yang menjabat hingga akhir periode pelaporan tahun buku, terdapat 4 (empat) Direksi yang belum mendapatkan persetujuan dari OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan yang telah dilakukan oleh masing-masing Direksi.

Seluruh pergantian dan perubahan susunan serta nomenklatur jabatan Direksi sepenuhnya menjadi keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam RUPS.

APRESIASI DAN OPTIMISME

Dengan seluruh perjalanan dan catatan penting di tahun 2019, Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh investor. Demikian pula kepada regulator, nasabah, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta.

Kepada seluruh karyawan Insan Bank BTN, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan. Semoga perjalanan di tahun 2019 dapat menjadi evaluasi bagi Perseroan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.


Direktur Utama
PAHALA NUGRAHA MANSURY

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2020



CHANDRA M. HAMZAH^{*)}
(Komisaris Utama/Independen)



HERU BUDI HARTONO^{*)}
(Komisaris)



EKO D. HERIPOERWANTO
(Komisaris)



ANDIN HADIYANTO^{*)}
(Komisaris)



ARMAND B. ARIEF^{*)}
(Komisaris Independen)



AHDI JUMHARI LUDDIN^{*)}
(Komisaris Independen)

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sudah cukup memadai.

Jakarta, Februari 2020



PAHALA NUGRAHA MANSURY
(Direktur Utama)



ELISABETH NOVIE RISWANTI *)
(Direktur Remedial and Wholesale Risk)



NIXON L.P NAPITUPULU
(Direktur Finance, Planning and Treasury)



YOSSI ISTANTO **)
(Direktur Human Capital, Legal and Compliance)



HIRWANDI GAFAR *)
(Direktur Consumer and Commercial Lending)



ANDI NIRWOTO
(Direktur Operation, IT and Digital Banking)



JASMIN *)
(Direktur Distribution and Retail Funding)



SETIYO WIBOWO *)
(Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

**) Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.



PROFIL PERUSAHAAN

Selama lebih dari enam dekade, BTN menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR. Upaya ini membuahkan hasil yang baik, BTN sukses meningkatkan posisinya menjadi 5 (lima) bank terbesar di Indonesia dari segi aset.





INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama Perusahaan

Bank BTN

Tanggal Pendirian

9 Februari 1950

Bidang Usaha

Bank Umum, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah

Dasar Hukum Pendirian

- Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 tentang Perubahan Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Akta pendirian Bank sebagai Persero No. 136 Tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta

Dasar Hukum Pendirian

- Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 tentang Perubahan Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Akta pendirian Bank sebagai Persero No. 136 Tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta

Perubahan Nama

Didirikan dengan nama "Postspaarbank" pada 1897, kemudian berubah nama menjadi "Tyokin Kyoku" atau "Kantor Tabungan" pada 1942. Kembali berubah nama menjadi "Kantor Taboengan Pos" pada 1945. Pada 1950, dilakukan perubahan nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI. Efektif pada tahun 1963, Perseroan berubah nama menjadi "Bank Tabungan Negara". Di tahun 1992 resmi menjadi Persero.

Status Perseroan

Perseroan Terbatas (PT) / Perusahaan Terbuka / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kepemilikan

- Pemerintah Republik Indonesia 60,00%
- Publik Domestik 16,82%
- Publik Asing 23,18%

Modal Dasar

Rp10.239.216.000.000,- terbagi atas:

- 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500,-
- 20.478.431.999 lembar saham Seri B dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 51,71% atau sejumlah 10.590.000.000,- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.295.000.000.000,- yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp500,-
- 10.589.999.999 lembar saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.294.999.999.500,-

Pencatatan Saham di Bursa Saham

17 Desember 2009, Bursa Efek Indonesia

Kode Saham

BBTN

Kode Obligasi dan Peringkatnya

- Obligasi BTN XIV Tahun 2010, peringkat idAA+
- Obligasi BTN XV Tahun 2011, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B, peringkat idAA+
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C, peringkat idAA+



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



Jumlah Karyawan



11.647 (2019)

Jaringan Usaha



- Jaringan Perbankan Konvensional: 6 Kantor Wilayah, 78 Kantor Cabang, 326 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 358 Kantor Kas, 52 Payment Point, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 2.950 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, dan 23 Mobil Kas Keliling.
- Jaringan Perbankan Syariah: 25 Kantor Cabang Syariah, 53 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, dan 12 Payment Point Syariah.

Alamat Kantor Pusat



Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta
10130, Indonesia



+62 21 6336789



+62 21 6346704



csd@btn.co.id



www.btn.co.id

Call Center : 1500-286

Media Sosial :

- BankBTNcoid
- @BankBTNcoid
- BankBTN
- Bank BTN

Kontak Perusahaan



Sekretaris Perusahaan

Achmad Chaerul
Menara BTN
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
Telepon : (021) 6336789 ext. 2003
Fax : (021) 6336719
E-mail : achmad.chaerul@btn.co.id



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



SEKILAS SEJARAH DAN PENCAPAIAN BANK TABUNGAN NEGARA

Sejarah panjang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, disebut sebagai “Bank” atau “Perseroan” atau “BTN”, diawali dengan berdirinya Postspaarbank pada tahun 1897. Pada tahun 1942, Postspaarbank diambil alih oleh Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan. Kemudian hal ini berlanjut pada tahun 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku dan mendirikan Kantor Taboengan Pos. Di era pasca kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Tyokin Kyoku menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 hingga sekarang. Pada tahun 1974, Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan Program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Di tahun 1976, Perseroan melakukan realisasi pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Pada tahun 1994, Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa, dan selanjutnya Perseroan ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah pada tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2009 Perseroan melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Perseroan melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragang Aset (KIK-EBA),

lalu pada 17 Desember 2009 melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia. Perseroan memiliki tekad untuk membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka memiliki rumah idaman. Tekad tersebut diwujudkan Perseroan dengan terus fokus pada pembiayaan perumahan serta konsistensinya.

Selama lebih dari enam dekade menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR, baik KPR Subsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Upaya ini membuahkan hasil yang baik, Perseroan sukses meningkatkan posisinya menjadi peringkat ke-5 bank terbesar di Indonesia dari segi aset. Dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Perseroan bercita-cita menjadi bank yang terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

Pada tahun 2015, Perseroan berperan penting dalam membantu program Pemerintah “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat”. Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



“BTN berfokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui 3 (tiga) produk utama, yakni perbankan konsumen, perbankan komersial dan perbankan syariah.”

pembiayaan KPR. Sebagai upaya mendorong percepatan program sejuta rumah, di tahun 2016 Perseroan terus menggenjot *supply* dan *demand* untuk KPR, di antaranya dengan mempermudah pembiayaan bagi pengembang untuk kredit konstruksi maupun pencairan KPR, memberikan kemudahan pembiayaan kepada para pengembang untuk akselerasi KPR subsidi, KPR non subsidi maupun KPR mikro. Tahun 2016 menjadi tahun pertama bagi Perseroan memasuki *transformasi* Tahap II, yaitu periode *digital banking*. Perseroan telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital seperti *mobile* BTN, *internet banking* dan *cash management*. Pada tahun 2017, perjalanan proses transformasi *digital banking* Perseroan terus berlanjut. Dari sisi bisnis, Perseroan terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan mengakselerasi tahapan transformasi di era digital, salah satunya dengan membuka *Smart Branch*. *Smart Branch* BTN dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam memperoleh informasi perbankan, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi, dan transaksi di luar produk perbankan.

Pada tahun 2018, periode *digital banking* melalui perbaikan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi telah mulai membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2018, Perseroan berhasil mendongkrak *Fee Based Income* (FBI) hingga 26,53% menjadi Rp2.062,99 miliar. Selain itu, melalui penerapan berbagai kebijakan strategis yang dilakukan

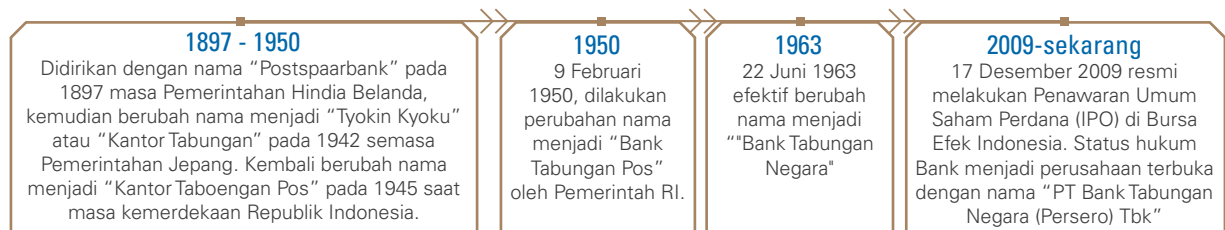
sepanjang tahun 2018, Perseroan berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori *The Best Good Corporate Governance* dalam ajang Anugerah BUMN 2018. Perseroan dinilai telah berhasil menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melebihi BUMN terbuka lainnya. Selain meraih *The Best GCG*, dalam ajang tersebut Perseroan juga meraih penghargaan Pengembangan Talenta Terbaik dan *The Best CEO* untuk kategori *Driving Execution*.

Sebagai bank terbesar ke-5 di Indonesia yang membawa mandat utama dalam pelaksanaan program Pemerintah terkait perumahan, pada tahun 2019, Bank BTN terus bertransformasi untuk memperkuat peran menjadi housing market maker yang diwujudkan dengan berperan sebagai integrator sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Untuk mewujudkan hal tersebut, telah di bentuk unit Housing Finance Center (HFC), yaitu unit yang berperan aktif sebagai *think tank* untuk mempercepat pembangunan sejuta rumah.

Selain itu, upaya Bank BTN dalam mewujudkan pembangunan sejuta rumah juga dilakukan dengan mendukung pengembangan developer rumah subsidi yang salah satunya adalah dengan melakukan keterpaduan riset yang melibatkan stakeholder di bidang properti (akademisi, bank, Pemerintah dan komunitas) dalam mengembangkan pola pembiayaan dan penyediaan perumahan bagi MBR yang dikategorikan sebagai informal.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Seperti yang telah diuraikan di atas, BTN memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi seperti saat ini; mulai dari nama Bank Tabungan Pos pada tahun 1950 hingga menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.





JEJAK LANGKAH

1897



Perseroan berdiri dengan nama "Postspaarbank" pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

1942



Perseroan diambil alih Pemerintah Jepang dan diganti namanya dengan Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan.

1945



Pemerintah RI mengambil alih Tyokin Kyoku dan didirikan Kantor Taboengan Pos.

1946

Semua Kantor Taboengan Pos diduduki oleh Belanda dan berhenti bekerja.

1949



Pemerintah RI membuka kembali Kantor Taboengan Pos dengan nama Bank Tabungan Pos RI

1950



Perubahan nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI.

1953



Dikukuhkan sebagai badan hukum di bawah Kementerian Perhubungan dan diizinkan membuka Kantor Cabang.

1963



Berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara dan berpindah menjadi di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

1965



Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral. Berdiri Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Umum Negara, BNI 1946 dan Bank Dagang Negara.

1968



Bank tunggal kembali dipecah dan dibuka kembali Bank Tabungan Negara disingkat BTN.

1971



BTN bekerja sama dengan Perum Pos dan Giro untuk melaksanakan program Tabungan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)

1974



Mendapat tugas membiayai perumahan rakyat dari Menteri Keuangan.

1976



Realisasi KPR BTN pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang.

1986

Mendapatkan kredit dari IBRD/Bank Dunia sebesar USD266.550.000 ditandatangani oleh Pemerintah RI.

1989



Pertama kali menerbitkan Obligasi dan awal melaksanakan kegiatan bank umum.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

1992



Efektif menjadi PT Persero.

1994

Memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

2001



Direkapitalisasi oleh Pemerintah RI dengan nilai Rp13,6 triliun.

2002



Dengan sistem *online real* sistem berbasis IBM-AS400, teknologi informasi diimplementasikan ke seluruh Kantor Cabang.

2005



Pembentukan Usaha Unit Syariah dan dibuka Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta Harmoni.

2008



Memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2000 untuk layanan kredit jangka menengah atas dengan pola layanan 1-5-1.

2009



Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) pertama di Indonesia. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (*Go Public*).

2012



Melakukan *Right Issue*.

2013



Perseroan melakukan transformasi menuju *leading housing bank* dan *world class banking*.

2014



Perseroan bersama SMF menandatangani Sekuritisasi terbesar.

2015



Perseroan turut serta mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

2016



Perseroan melanjutkan agenda transformasi yaitu "*Digital Banking Periods*".

2017

Pengembangan berbagai produk dan layanan yang berbasis digital, salah satunya adalah pembukaan *Smart Branch* Jakarta Harmoni.

2018

Pengembangan ekosistem digital untuk mendukung bisnis sebagai bank pembiayaan perumahan terdepan di Indonesia.

2019



Menjadi *Housing Market Maker* dan Memperkuat Posisi Sebagai Bank Terbesar ke-5.



VISI, MISI, DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN



VISI

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

PENJABARAN VISI

Akselerator dan Integrator di bidang perumahan

Bank BTN dapat memberikan kontribusi secara menyeluruh pada semua kegiatan sektor perumahan dari hulu sampai dengan hilir

Mitra Keuangan Keluarga

Dapat memberikan kontribusi secara menyeluruh pada semua kegiatan di sektor perumahan dan sekaligus sebagai jangkar untuk melayani kebutuhan nasabah lainnya

MISI



Berperan aktif dalam **mendukung sektor perumahan**, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.



Memberikan layanan unggul dalam **pembiayaan kepada sektor perumahan** dan kebutuhan keuangan Keluarga.



Meningkatkan keunggulan **kompetitif melalui inovasi pengembangan produk**, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.



Menyiapkan dan mengembangkan **human capital yang berkualitas**, profesional, dan memiliki integritas tinggi.



Meningkatkan **shareholder value** dengan fokus kepada **peningkatan pertumbuhan profitabilitas** sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.



Memedulikan **kepentingan masyarakat, sosial, dan lingkungan** secara berkelanjutan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PERSETUJUAN DAN KAJIAN MANAJEMEN KUNCI ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Penetapan Visi dan Misi Bank dilakukan secara periodik 5 (lima) tahunan berdasarkan mekanisme penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank, yang kini berlaku untuk RJP terkait Visi dan Misi Perseroan telah dikaji dan disetujui pada Cetak Biru Rencana Strategis Bank BTN.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN



Budaya Perusahaan dibangun dari nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan pekerjaan serta menjadi pegangan bagi setiap insan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai Budaya Perusahaan mengarahkan perilaku anggota organisasi dan menjadi landasan dalam penetapan aturan, kebijakan dan sistem organisasi (*"the way we do things around here"*). BTN memiliki Nilai Budaya Perusahaan yang disebut "SIIPS" dengan tagline "BTN Terdepan, GCG Rumahku".

SINERGI

Membangun kerja sama yang sinergis dengan seluruh *stakeholders* dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

INTEGRITAS

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

INOVASI

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.

PROFESIONALISME

Visioner, kompeten di bidangnya, selalu mengembangkan diri dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik.

SPIRIT MENCAPAI KEUNGGULAN

Menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil terbaik serta memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan pentingnya aspek kualitas disetiap kegiatan serta risiko yang telah diperhitungkan.





Setiap Nilai Budaya Perusahaan memiliki 2 (dua) Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan Perseroan (Bitniz). 10 (Sepuluh) perilaku utama tersebut adalah:

SINERGI



- Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
- Saling percaya dan menghargai

INTEGRITAS



- Konsisten dan disiplin
- Jujur dan berdedikasi

INOVASI



- Tanggap terhadap perubahan
- Kreatif dan Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah

PROFESIONALISME



- Kompeten, *intrapreneurship* dan bertanggung jawab
- Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil

SPIRIT MENCAPAI KEUNGGULAN



- Antusias, proaktif dan pantang menyerah
- Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



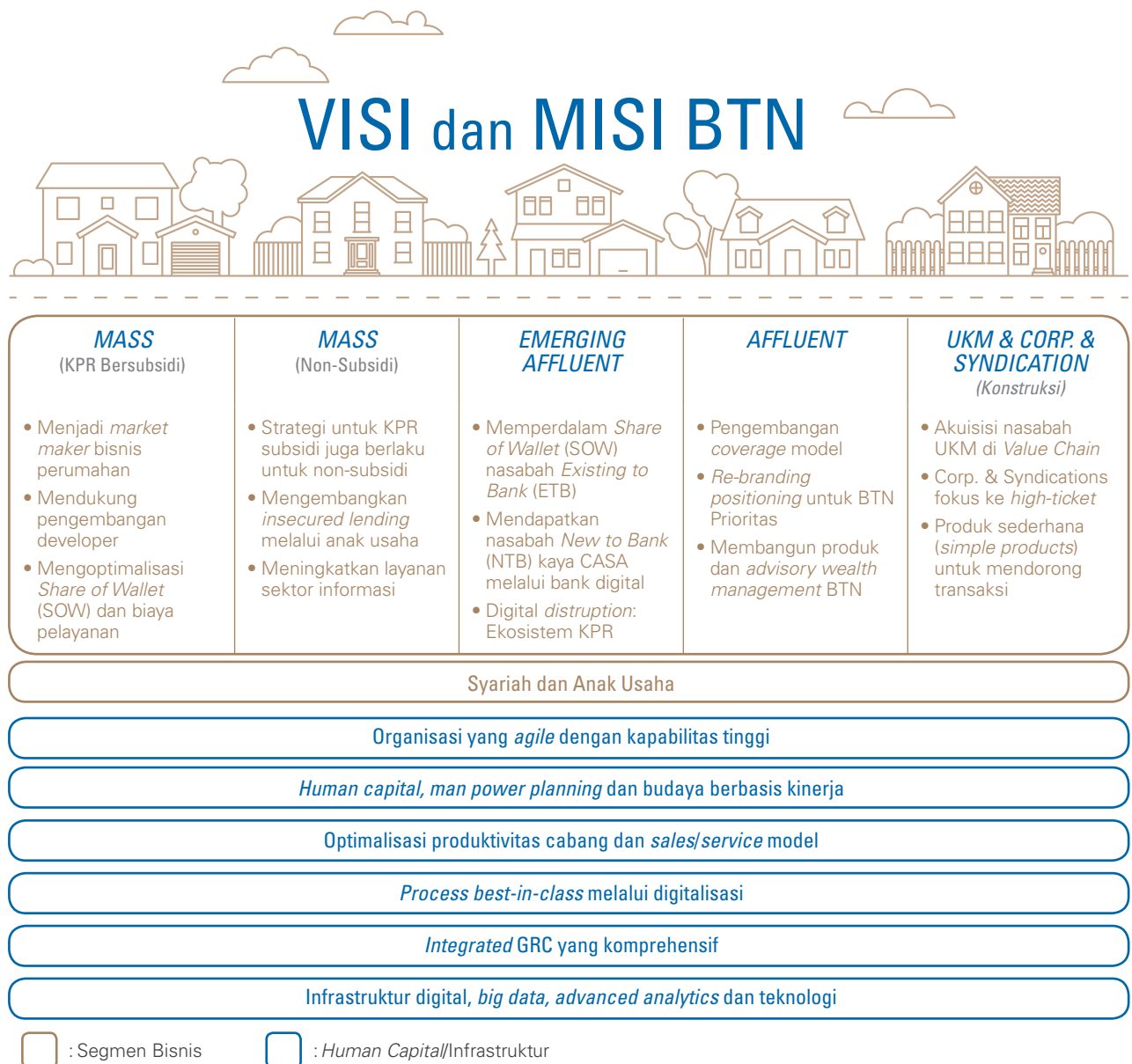
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

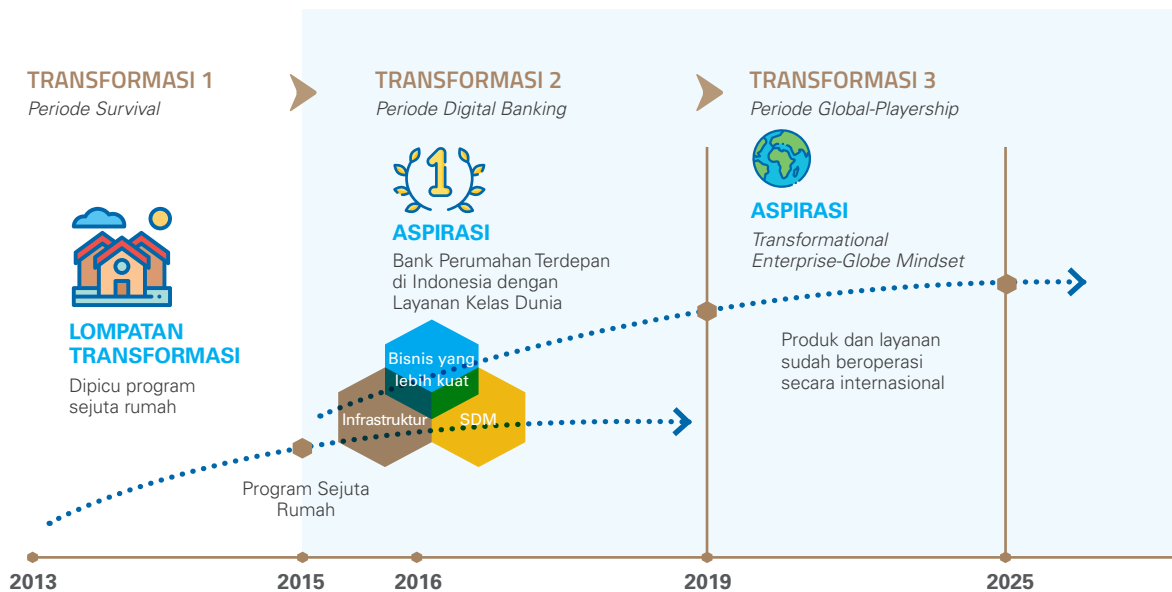
STRATEGI MENCAPAI VISI DAN MISI

Perseroan telah menetapkan pilar strategis dalam rangka pertumbuhan usaha serta mewujudkan visi untuk menjadi yang “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, sebagaimana terlihat pada grafis berikut ini.





BTN TRANSFORMATION JOURNEY



Periode *survival* telah dilalui dengan baik, dimana saat ini Perseroan menapaki fase *digital banking*. Fokus implementasi transformasi adalah memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, memperluas peran Perseroan dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah serta menawarkan layanan *digital banking* untuk memperluas pendanaan berbasis CASA dan peningkatan *basic transaction account*.



MEMPERKOKOH

Positioning bisnis di sektor perumahan dan *construction value chain*

- Mempertahankan dominasi pasar KPR segmen Mass (*Subsidized & Non Subsidized*).
- Memperluas kredit segmen *emerging affluent & affluent*.
- Meningkatkan kredit konstruksi dalam mendukung *supply* rumah dengan membidik segmen UMKM, Komersial dan Korporasi.



AKTIF BERPERAN

Sebagai integrator & akselerator di sektor bisnis perumahan

- Meningkatkan peran BTN HFC sebagai lembaga *think tank* utama di Indonesia.
- Mengembangkan inisiatif untuk mendukung pengembangan developer rumah subsidi.



MEMBANGUN

Strong customer orientation untuk membidik dan meningkatkan pendanaan berbasis CASA

- Menyasar segmen *emerging affluent* dan *affluent* yang meliputi keluarga dan kalangan muda (generasi milenial, *digital savvy*).
- Mengembangkan layanan *digital banking* untuk memperkuat *image bank* di segmen menengah atas.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MAKNA LOGO PERUSAHAAN



1. Simbol atap rumah dengan kesan tiga dimensi yang berbentuk ruang, melambangkan keleluasaan Perseroan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.
2. Atap rumah menggambarkan visi dan misi utama Perseroan sebagai lembaga pemberi Kredit Pemilikan Rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3. Tiga Dimensi yang terbentuk dari 4 Pilar Kokoh berarti menunjukkan keamanan dan keluwesan Perseroan.
4. Dua pola segi enam besar dan kecil, melambangkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia "yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil".



Simbol garis merah di bawah kata BTN diartikan sebagai kepercayaan diri.



Warna biru melambangkan kematangan Perseroan yang berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional.



Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan sebagai bank yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.



Warna merah melambangkan kepercayaan diri Perseroan sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut ini:

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan
Kegiatan Usaha Utama	
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;	✓
2. Memberikan kredit;	✓
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;	✓
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; c. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. Obligasi f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;	✓
6. Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;	✓
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;	✓
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;	✓
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;	✗
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;	✗
11. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	✓
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;	✓



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;	✓
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;	✗
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penanyaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	✗
16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;	✓
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, <i>commercial banking</i> , dan <i>investment banking</i> lainnya;	✓
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;	✓
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	✓
Kegiatan Usaha Penunjang	
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	✓

✓ = telah dijalankan | ✗ = belum dijalankan

PRODUK DAN JASA

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut.





Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



PERBANKAN
KONVENSIONAL



Kartu Konsumer



Wealth Management



Electronic
Channel ATM



CDM (Cash
Deposit Machine)



ATM Non
Tunai (Kiosk)



SMS Banking



Mobile Banking



Internet Banking



Virtual Account



Electronic Data
Capture (EDC)



Cash
Management



Branchless
Banking



Portal BTN
Properti



Jasa dan Layanan
Perbankan Lainnya

- Garansi Bank BTN
- SKBDN atau L/C Lokal
- Virtual Account BTN
- Transfer Management
- Payment Management
- Payroll Service BTN



Perbankan
Syariah/Unit
Usaha Syariah

- Kartu Debit Visa BTN Syariah
- Kiriman Uang
- BTN Cash Management
- Payment Point BTN iB
- Payroll BTN iB
- Penerimaan Biaya Perjalanan Haji
- SPP Online BTN iB
- Program Pengembangan Operasional BTN iB
- Garansi Bank BTN iB
- Safe Deposit Box BTN iB





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

RAGAM PRODUK



Perbankan Konvensional

Perbankan Konsumer

1. Produk Kredit Konsumer

a. Kredit Perumahan

- KPR BTN Subsidi

Program untuk Pemilikan Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

- KPR BTN Mikro

Produk dengan kemudahan untuk membeli lahan atau rumah, ataupun renovasi rumah secara bertahap serta untuk membangun rumah di atas lahan yang sudah dimiliki pemohon, yang diprioritaskan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.

- KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan KP Ruko.

- KPR BTN Platinum

Kredit pemilikan rumah untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

- » KPR Gaeesss!

Merupakan pengembangan fitur dari produk KPR/KPA BTN Platinum untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah atau apartemen untuk calon debitur dari segmentasi generasi millennial (21-35 tahun) dengan berbagai kemudahan & keunggulan.

- » KPR Atlet

Program khusus untuk produk KPR/KPA BTN Platinum yang diperuntukkan bagi atlet-atlet Indonesia maupun pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

- KPA BTN

Kredit pemilikan apartemen untuk keperluan pembelian apartemen dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian apartemen baru atau *second*, pembelian apartemen siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

- KP Ruko BTN



Kredit pemilikan ruko untuk membeli unit rumah toko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

- Kredit Perumahan Lainnya
 - Kredit Agunan Rumah BTN
Fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.
 - Kredit Bangun Rumah BTN
Fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri.
 - Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan – Pinjaman Uang Muka Perumahan Fasilitas pinjaman uang muka perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR BTN Subsidi.

b. Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pra Pensiunan (Kring BTN Pra Pensiun), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai.

- Kredit Ringan BTN (Kring BTN)
Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.
- Kredit Ringan BTN Pra Pensiun (Kring BTN Pra Pensiun)
Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji dan uang pensiun) yang gajinya belum atau telah disalurkan melalui Bank, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Jangka waktu pembiayaan ini dapat melintasi masa pensiun debitur.

- Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiun)
Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Bank BTN.
- Kredit Swadana BTN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- Kredit Pegawai
Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. Produk Simpanan Konsumer

a. Tabungan Konsumer

- Tabungan BTN Batara
Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah.
- Tabungan BTN Prima
Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik.
- TabunganKu
Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)
Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- Tabungan BTN e'BATARAPOS
Tabungan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat karena dapat melakukan transaksi di Kantor Pos *Online* seluruh Indonesia.



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

- Tabungan BTN Cermat
Tabungan yang memberikan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui EDC dan rekening ponsel sampai ke pelosok negeri tanpa harus datang ke kantor Bank. Tabungan yang digunakan dalam program Laku Pandai.
- Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan transaksi pasar modal.
- Tabungan BTN siap!
Tabungan berjangka yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan masa depan nasabah.
- Tabungan BTN Felas
Produk yang dapat digunakan untuk menabung, bertransaksi, dan berinvestasi dalam mata uang asing. Tersedia dalam mata uang USD & SGD.
- Tabungan Simuda Rumahku
Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pemuda usia 18-30 tahun sebagai sarana edukasi perencanaan kepemilikan rumah sejak dini.
- b. Deposito BTN Ritel
Deposito Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito Bank BTN adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

Perbankan Komersial

 1. Produk Kredit Komersial
 - a. Kredit Perumahan
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi BTN
Fasilitas kredit yang ditujukan untuk pengembang. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dll) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dll) berikut sarana dan prasarannya sepanjang berdasarkan penilaian Bank BTN layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Bank BTN memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi.
 - Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN
Kredit yang diberikan kepada pengembang untuk pembelian lahan perumahan sederhana/bersubsidi yang pembangunannya dibiayai oleh Bank BTN.
 - b. Kredit Non Perumahan
Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, Linkage Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Linkage Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Konstruksi, Investasi, Modal Kerja, Modal Kerja Kontraktor dan Sindikasi.
 - Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) BTN
Kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dengan kriteria UMKM. Kredit dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan maksimal plafon s.d. Rp5 Miliar.
 - Program Kemitraan
Program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri.
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Kredit Linkage BTN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskanpinjamkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Kredit Korporasi
Kredit Korporasi adalah kredit yang diberikan kepada Debitur berbentuk badan usaha berbadan hukum (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau kebutuhan investasi.



- Kredit Modal Kerja (KMK) BTN
Kredit Modal Kerja (Working Capital Loan) adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai modal kerja dari suatu perusahaan.
- Kredit Investasi BTN
Kredit Investasi (*Investment Loan*) adalah kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan dari suatu perusahaan.
- Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)
Fasilitas kredit modal kerja untuk membantu kontraktor menyelesaikan pekerjaan mereka berdasarkan kontrak tertentu dalam jumlah hingga 60% dari nilai kontrak.
- Kredit Sindikasi
Kredit Sindikasi adalah salah satu sistem pembiayaan kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, maupun sebagai *guarantor*) dimana beberapa Bank secara bersama-sama membiayai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama.

2. Produk Simpanan Komersial

a. Giro BTN

Giro BTN merupakan produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG, media penarikan lainnya, atau dengan BTN *Cash Management System* (i-Cash).

- Jenis Giro BTN berdasarkan kepemilikan
 - Giro Perorangan
Giro perorangan merupakan rekening atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha dan penarikannya dapat melalui Cek/BG, ATM dan media penarikan lainnya.
 - Giro Lembaga
Giro lembaga merupakan rekening atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, badan usaha/badan hukum (termasuk di dalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat) dan semua badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- Giro Gabungan (*Joint Account*)

Giro gabungan (*joint account*) merupakan rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan/lembaga, perorangan dan/atau gabungan dari keduanya.

- Jenis Giro BTN berdasarkan Jenis Valuta

- Giro BTN Rupiah

Giro BTN Rupiah merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan dengan menggunakan Cek/BG, media penarikan lainnya, atau dengan BTN *Cash Management System* (i-Cash).

- Giro BTN Valas

Giro BTN Valas merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan Surat Perintah Pembayaran.

b. Deposito Berjangka Lembaga

Merupakan Simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang Rupiah atau Valuta Asing dengan suku bunga yang menarik dan bersaing

- Deposito BTN Rupiah

Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

- Deposito BTN Valas

Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

- Deposito *On Call* Lembaga

Deposito *On Call* BTN merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD) dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai perjanjian antara nasabah dan bank.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

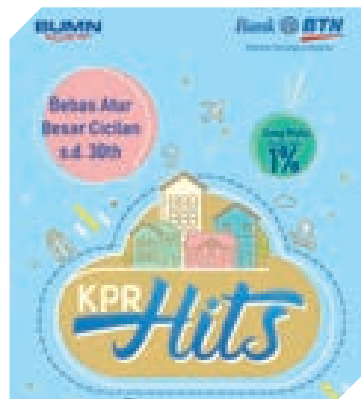


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA



Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Uraian terkait Produk Pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumer

a. KPR BTN Subsidi iB

KPR BTN Subsidi iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan skema FLPP dan SSM Menggunakan akad "Murabahah" (jual beli) serta skema BP2BT Menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Susun, atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

b. KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun Second.

c. Pembiayaan Properti BTN iB (KPR HITS)

Produk Pembiayaan dengan menggunakan akad "Musyarakah Mutanaqisah" (*sharing* kepemilikan) yang disewakan ke nasabah dengan angsuran fleksibel, dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, aset barang lainnya maupun sistem *refinancing*.

d. KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad "istishna" (jual beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

f. Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad "Qardh, Rahn dan Ijarah" yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

g. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad "Kafalah bil Ujroh" yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), Paket biaya Umrah/Haji Plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

h. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad "Murabahah" yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang



yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

- i. Pembiayaan Emasku BTN iB
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” yang digunakan untuk pembelian emas batangan dengan cicilan tetap selama jangka waktu
 - j. Pembiayaan Talangan Haji
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad “Qard” yang digunakan untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
2. Pembiayaan Komersial
 - a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad “Musyarakah” (kerja sama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip akad “Mudharabah” (bagi hasil), atau “Musyarakah” (Kerja sama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
 - c. Pembiayaan Investasi BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip “Murabahah” (Jual beli) atau “Musyarakah” (Kerja sama) yang diberikan kepada nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
 - d. Pembiayaan KUR BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip “Musyarakah” (kerja sama) atau “Murabahah” (jual beli) yang diberikan kepada usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan dan Lembaga *Linkage* untuk memenuhi kebutuhan

modal kerja dan investasi, dengan rencana pengembalian sesuai *cashflow* nasabah.

- e. Pembiayaan Sindikasi BTN iB
Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad “Mudharabah” (bagi hasil), “Musyarakah” (kerja sama), “Murabahah” (bagi hasil), atau “Ijarah” (sewa).

Produk Simpanan Syariah

1. Giro Syariah
 - a. Giro BTN iB
Produk simpanan dengan prinsip “Wadiah” (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
 - b. Giro BTN Prima iB
Produk simpanan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (bagi hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.
2. Tabungan Syariah
 - a. Tabungan BTN Batara iB
Produk simpanan dana dengan akad “Wadi’ah” (titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
 - b. Tabungan BTN Prima iB
Produk simpanan dana berakad “Mudharabah Mutlaqah” (bagi hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
 - c. Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad “Mudharabah” (bagi hasil) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
 - d. TabunganKu iB



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

Produk simpanan dengan akad “Wadiah” (titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- e. Tabungan BTN Qurban iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad “Mudharabah Mutlaqah” (bagi hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
 - f. Tabungan BTN Sempel iB
Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.
 - g. Tabungan BTN Emas iB
Produk tabungan dengan akad ‘Mudharabah Muthlaqah’ yang digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam mempersiapkan dana untuk pembelian emas dan kebutuhan lain nasabah dimasa yang akan datang.
3. Deposito Syariah
 - a. Deposito BTN iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (bagi hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.
 - b. Deposito *On Call* iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (bagi hasil). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.

JASA DAN LAYANAN

Jasa dan layanan perbankan yang dimiliki Perseroan di antaranya berupa kartu konsumen, *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksa Dana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan Kiosk, CDM, *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*. Sedangkan jasa dan layanan

perbankan lainnya berupa jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Perbankan Konvensional

1. Kartu Konsumer
 - a. Kartu Debit BTN
Berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online* (untuk beberapa jenis kartu ATM BTN). Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN Visa e’Batarapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN. Kartu Kredit BTN
Kartu Kredit BTN membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat.
 - b. Kartu Suka-suka BTN
Kartu Debit Visa pertama dengan desain kartu yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas, serta dapat digunakan di seluruh jaringan VISA diseluruh dunia.
 - c. Debit BTN *Online VBV* (*Verified by Visa*)
Dengan Debit BTN *Online VBV* (*Verified by Visa*), nasabah dan dengan mudah bertransaksi *online* dengan kartu debit BTN Syariah (*e-Commerce*).
2. *Wealth Management*
Keberadaan bisnis *Wealth Management* memberi kontribusi dalam perolehan pendapatan melalui *fee based income* yang berasal dari penjualan produk non banking baik *Bancassurance*, Reksadana, maupun *instrument* investasi yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam pengembangan bisnis *Wealth Management* bidang proteksi, Perseroan bekerja sama dengan beberapa mitra asuransi besar yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Sinarmas MSIG dan PT FWD Life Indonesia. Sedangkan dalam pengembangan produk investasi, Perseroan



bekerja sama dengan mitra investasi PT Trimegah Aset Manajemen, PT Bahana TCW Investment Management, PT Manulife Asset Management Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT Insight Investment Management. Tahun ini Perseroan juga menjadi bagian dalam penjualan produk Sukuk Negara Ritel Seri SR010, Saving Bonds Ritel Seri SBR004, Obligasi Negara Ritel Seri ORI015 dan Sukuk Tabungan Seri ST002.

Pada tahun 2018 jaringan *Wealth Management* telah memiliki 43 *Outlet* BTN Prioritas dan 8 *Lounge* BTN Prioritas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Layanan yang diberikan terdiri dari *Airport Executive Lounge*, *Airport Handling*, *Airport Transfer*, *Concierge Service*, *Merchant Discount*, *SMS Market Update*, Bingkisan Ulang Tahun dan Hari Raya, *Meeting Room*, *E-Consolidated Statement*, *Safe Deposit Box* dan *Priority Event*.

3. *Electronic Channel ATM*

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi premium seperti *Gallery ATM* di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

4. CDM (Cash Deposit Machine)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai sehingga memudahkan dalam bertransaksi, cepat dan realtime. Dapat menerima denominasi uang Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

5. ATM Non Tunai (Kiosk)

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak *modern*, *touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

6. *SMS Banking*

Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja

menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* di kantor cabang Bank BTN.

7. *Mobile Banking*

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi *iMobile* BTN dari *Google Play*, *Blackberry World* dan *Apple Store*. Koneksi jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

8. *Internet Banking*

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media internet. Alamat *website*: [https:// internetbanking.btn.co.id](https://internetbanking.btn.co.id) dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

9. *Virtual Account*

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerja sama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

10. *Electronic Data Capture (EDC)*

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara realtime online.

11. *Cash Management*

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

melalui koneksi internet. Alamat *website*: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

12. *Branchless Banking*

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan di luar wilayah jaringan kantor bank melalui kerja sama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan atau kerja sama dengan agen yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disebut LAKU PANDAI.

13. Portal BTN Properti

Layanan khusus berbasis portal properti yang memudahkan calon debitur dalam hal pencarian listing proyek yang telah bekerja sama dengan Bank BTN, simulasi angsuran, pengajuan KPR/KPA secara *online*, *online live chat* 24 jam, serta fitur-fitur lainnya. Portal BTN Properti juga melengkapi fiturnya dengan teknologi 4D *Tour Service* yang memungkinkan calon debitur mendapatkan gambaran real terhadap unit properti yang dipilih.

14. Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *Fee Based Income*, seperti pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran internet dan TV berlangganan, pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa. Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

a. Garansi Bank BTN

Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya (*wanprestasi*) dengan

baik kepada pihak yang menerima jaminan.

b. SKBDN atau L/C Lokal

Adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

- Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya atau mengaksep membayar wesel yang diterima oleh Bank
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima

c. *Virtual Account* BTN

Layanan bagi nasabah Giro Lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan *monitoring* penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

d. *Transfer Management*

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah Lembaga untuk membantu nasabah melakukan transfer dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (transfer ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). Transfer dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

e. *Payment Management*

Payment management merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- *Edu Payment*/SPP Online BTN
- *Edu payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan



penyelenggaraan pendidikan secara online real time.

- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dll)
- Pembayaran Pajak

- Pembayaran pembelian produk Pertamina
- Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan
- Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
- Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
- Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
- Bank Operasional I dan II

f. *Payroll Service* BTN

Payroll Service merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

1. Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

2. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama rekening Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

3. *BTN Cash Management*

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi web-browser yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

4. *Payment Point* BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.

5. *Payroll* BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.

6. Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.

7. *SPP Online* BTN iB

Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery channel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.

8. Program Pengembangan Operasional BTN iB

Program yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

9. Garansi Bank BTN iB

Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad "Kafalah" (Garansi).

10. *Safe Deposit Box* BTN iB

Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi *system* pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan, dan lainnya. Akad yang digunakan adalah "Ijarah" (Sewa).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

halaman ini sengaja dikosongkan



WILAYAH OPERASI DAN JARINGAN USAHA



SUMATERA

Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	12
Kantor Cabang Pembantu	58
Kantor Kas	42
Outlet Syariah	15
Outlet Prioritas	8
Kantor Pos	700
ATM	292

JAWA

Kantor Wilayah	4
Kantor Cabang	47
Kantor Cabang Pembantu	213
Kantor Kas	269
Outlet Syariah	60
Outlet Prioritas	31
Kantor Pos	1.623
ATM	1.538

KALIMANTAN

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	7
Kantor Cabang Pembantu	21
Kantor Kas	15
Outlet Syariah	5
Outlet Prioritas	5
Kantor Pos	299
ATM	116



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



JARINGAN KANTOR

	2017	2018	2019
Kantor Wilayah	5	6	6
Kantor Cabang	75	76	78
Kantor Cabang Pembantu	279	304	326
Kantor kas	485	468	358
Payment Point	32	48	52
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	2.951	2.948	2.950
Mobil Kas Keliling	22	23	23
Total Jaringan Kantor Konvensional	3.852	3.876	3.793
Kantor Cabang Syariah	24	24	25
Kantor Cabang Pembantu Syariah	42	48	53
Kantor Kas Syariah	7	8	7
Payment Point Syariah	13	13	12
Total Jaringan Kantor Syariah	86	93	97
ATM	1.964	2.126	2.159

SULAWESI

Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	6
Kantor Cabang Pembantu	19
Kantor Kas	18
Outlet Syariah	5
Outlet Prioritas	2
Kantor Pos	126
ATM	121

BALI DAN NUSA TENGGARA

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	12
Kantor Kas	9
Outlet Syariah	-
Outlet Prioritas	2
Kantor Pos	141
ATM	62

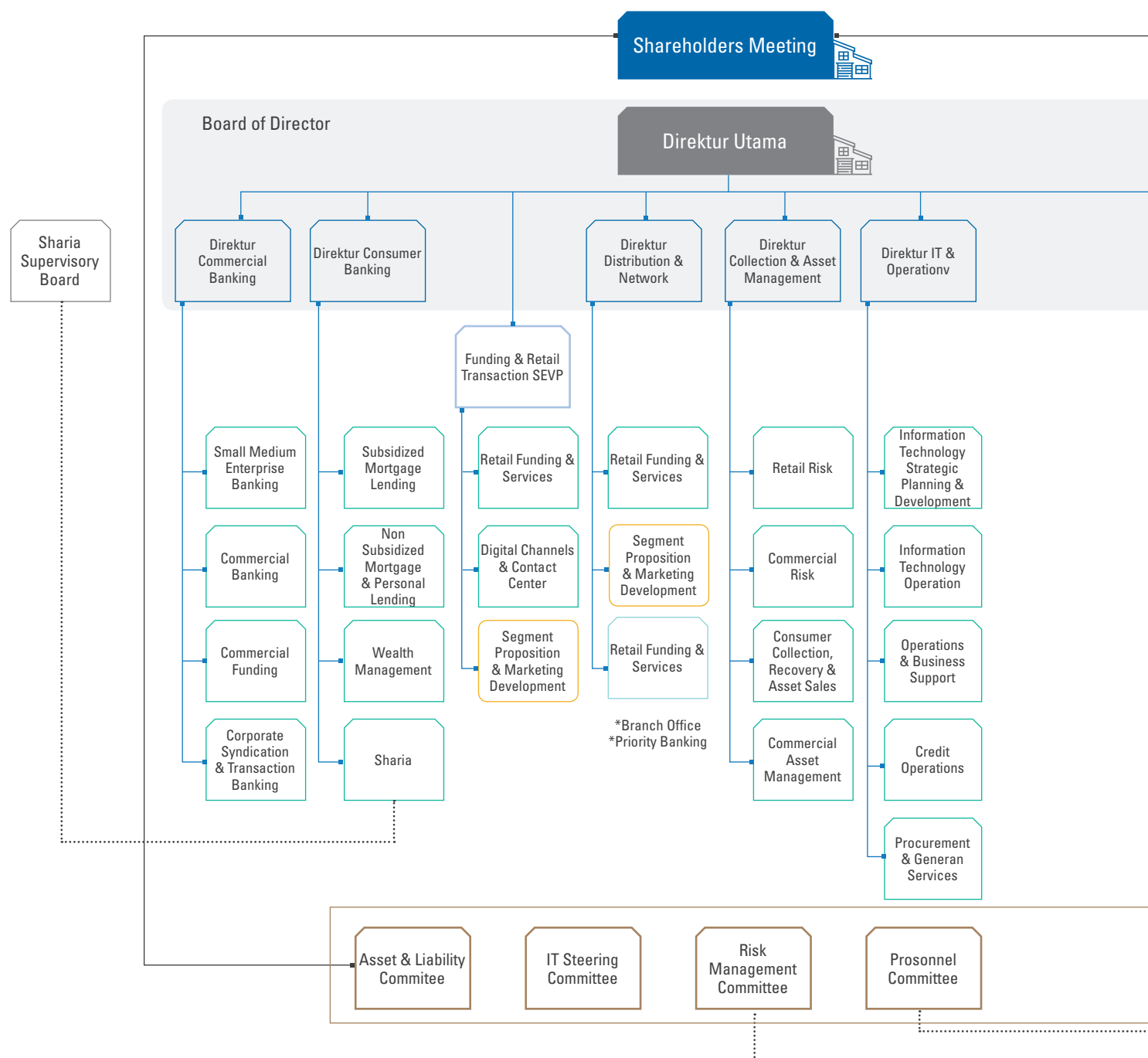
MALUKU DAN PAPUA

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	3
Kantor Kas	5
Outlet Syariah	-
Outlet Prioritas	3
Kantor Pos	61
ATM	30



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No.3/KD/DIR/PPBD/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan kedua atas ketetapan direksi nomor 04/KD/DIR/TMO/2018 tentang Struktur Organisasi kantor pusat dan kantor wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2019.



*Tahun 2019 Integrated Corporate Governance Committee saat ini belum efektif karena Perseroan belum memiliki perusahaan anak.



PROFIL DEWAN KOMISARIS



CHANDRA HAMZAH^{*)}
Komisaris Utama/Independen

Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

52 tahun

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan di tahun 2015.

Pendidikan	Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Indonesia (1995)
Pengalaman Kerja	• Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2012-sekarang) • Komisaris Utama Bank BTN (2015) • Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2014-2015) • Menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (2007-2011)
Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris BTN	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi*
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	<i>In House Training</i> , Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris, Jakarta, 16 Desember 2019, oleh Ikatan Bankir Indonesia.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan lainnya yang dapat berpotensi adanya benturan kepentingan maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Kepemilikan Saham BTN	Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

*Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Periode Jabatan
17 Mei 2019 - RUPS Tahun 2024,
Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
58 tahun

Domisili
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia



EKO D. HERIPOERWANTO
Komisaris

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 17 Mei 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 Desember 2019. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1987).
- Master (S2) in City Planning, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat (1994).
- Doktor (S3) bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (2009)

Pengalaman Kerja

- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang)
- Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR (2015-2016)
- Asdep Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR (2013-2015)

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris BTN

Anggota Komite Pemantau Risiko.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

- Seminar “60th Komisaris Profesional”, Jakarta, 20-21 November 2019, oleh Intipesan
- *In House Training* Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris, Jakarta, 3-4 Juli 2019, oleh Sandra Chalik (Perorangan)

Rangkap Jabatan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang)

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen**HERU BUDI HARTONO^{*)}**
Komisaris**Periode Jabatan**27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama**Kewarganegaraan**

Indonesia

Usia

54 tahun

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana (1998)
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana (1990)

Pengalaman Kerja

- Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang)
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015-2017)
- Wali Kota Jakarta Utara (2014-2015)
- Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013-2014)

**Penugasan di Lingkup Dewan
Komisaris BTN**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi*

**Pelatihan dan Pengembangan
Kompetensi**

In House Training Program Refreshment UKMR Level 1 Komisaris "Credit Risk Management", Jakarta, 16 Desember 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Rangkap Jabatan

Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang).

**Hubungan Afiliasi dengan Dewan
Komisaris Lainnya, Direksi, atau
Pemegang Saham Utama/Pengendali**

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

*Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Periode Jabatan
27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
55 tahun

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia



ANDIN HADIYANTO^{*)}
Komisaris

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989)
- Master of Art (M.A) (S2) dari Nagoya University, Jepang (1999)
- Doctor (S3) of Philosophy dari Nagoya University, Jepang (2000)

Pengalaman Kerja

- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional (2018-2019)

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris BTN

Anggota Komite Audit*

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training, Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris, Jakarta, 16 Desember 2019, oleh Ikatan Bankir Indonesia.

Rangkap Jabatan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang).

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen**ARMAND B. ARIEF^{*)}**
Komisaris Independen**Periode Jabatan**27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama**Kewarganegaraan**

Indonesia

Usia

67 tahun

Domisili

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Business Administration dari Suffolk University, Boston, Amerika Serikat (1979)
- Master (S2) Business Administration dari Curry College, Massachusetts, Amerika Serikat (1982)

Pengalaman Kerja

- Komisioner dan Senior Consultant of Dunamis Organization Services (2016-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia (2017-2018)
- Direktur Utama PT Bank UOB Buana (2007-2015)
- Deputy CEO PT Bank International Indonesia (2002-2007)

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris BTN

Ketua Komite Pemantau Risiko*

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan lainnya yang dapat berpotensi adanya benturan kepentingan maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

*Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Periode Jabatan
27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
65 tahun

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia



AHDI JUMHARI LUDDIN^{*)}
Komisaris Independen

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1982)
- Master (S2) of Science bidang Policy Economics dari University of Illinois, Chicago, Amerika Serikat (1989)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk (2019)
- Komisaris Independen PT Bank DKI (2015-2018)
- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015)
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010)

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris BTN

Ketua Komite Audit*

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training Program Refreshment UKMR Level 1 Komisaris "Credit Risk Management", Jakarta, 16 Desember 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan lainnya yang dapat berpotensi adanya benturan kepentingan maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**PROF. DR. H. MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB, MA**
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

76 tahun

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia

Riwayat Penunjukan

- Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak 22 Januari 2019 berdasarkan Surat OJK No. SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.

Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1967).
- Pascasarjana (S2) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1969).
- Doktor (S3) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1982).

Pengalaman Kerja

- Wakil Rektor IAIN Alauddin (1974-1980).
- Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta se Indonesia Timur (Kopertis Wilayah Timur) (1967-1980).
- Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Mental (1973-1975).
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1992-1998).
- Anggota DPS Bank Muamalat (1992-1999).
- Menteri Departemen Agama (1998).
- Anggota Eminent Person Group Indonesia Malaysia Person Group Indonesia Malaysia (2010).
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Arab, Mesir dan Jibuti (1998-2002).
- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014-sekarang).
- Anggota MPR-RI periode 1982-1987 dan periode 1987-2002.
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1985-1998).
- Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988-1996).
- Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998).
- Anggota Dewan Riset Nasional (1995-1999).
- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989-sekarang).
- Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI Tahun 2019 Oktober 2019

Rangkap Jabatan

- Ketua DPS UUS Bank BTN
- Anggota DPS USS CIMB Niaga

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Kota Tangerang, Banten, Indonesia



MUHAMMAD GUNAWAN YASNI,
SE.AK., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Riwayat Penunjukan

- Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak 22 Januari 2019 berdasarkan Surat OJK No. SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.

Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang dari Universitas Indonesia (1993).
- Pascasarjana (S2) bidang dari STIE Prasetya Mulya (1995).

Pengalaman Kerja

- Wakil Sekretaris – Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2015-2020).
- Dosen Kajian Timur Tengah-Islam Pascasarjana Universitas Indonesia (periode menjabat).
- Dewan Pengawas Syariah di BATASA Sharia Fund (2003-2007).
- SIMAS Sharia Insurance (2004-2005).
- Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2006-2009).
- State Owned Indonesia Exim Bank (2007-2012).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI Tahun 2019 Oktober 2019

Rangkap Jabatan

- Anggota USS Bank BTN
- Anggota DPS BRI Syariah
- Ketua Merangkap Anggota DPS pada Manulife Asset Management Indonesia
- Ketua DPS Asuransi Astra Buana

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Jumlah saham BTN yang dimiliki/ Pernyataan tidak ada kepemilikan saham BTN.



DR. H. MOHAMAD HIDAYAT,
MBA, MH
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

52 tahun

Domisili

Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.
Pendidikan	• Sarjana (S1) Fakultas Syariah dari IAIN Jakarta (1992). • Master (S2) of Business Administration (MBA) dari IPWI Jakarta. • Pasca Sarjana (S2) bidang dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003). • Doktor S-3 di bidang Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti, Jakarta (2014).
Pengalaman Kerja	• Dewan Pleno DSN-MUI. • Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). • Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. • Dosen S-2 Pada Indonesian Banking School, Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia, dan Program IEF Universitas Trisakti. • Advisor/supervisor pada beberapa lembaga keuangan/non keuangan syariah. • Pengasuh Ponpes Tahfiz Al Qurna Al Wasiah Jakarta. • Khotib tetap Masjid Istana Presiden dan Masjid Wakil Presiden RI, OJK, BI, dll. • Penulis Buku, Mubaligh dll.
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	• Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI Tahun 2019 Oktober 2019 • Pemateri dalam Seminar "Eksistensi Lembaga Pendidikan Islam dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" 13 Februari 2019 • The Syariah Insurance Socialization
Rangkap Jabatan	• Anggota DPS UUS BTN Syariah • Anggota DPS Bank Syariah Mandiri • Anggota DPS PT Asuransi Manulife • Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah • Anggota DPS PT BRI Ingin Life Syariah
Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Kepemilikan Saham BTN	Jumlah saham BTN yang dimiliki/pernyataan tidak ada kepemilikan saham BTN.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL DIREKSI

Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

49 tahun

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia



PAHALA NUGRAHA MANSURY
Direktur Utama

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 Februari 2020. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994).
- Gelar (S2) MBA Finance dari Leonard N. Stern School of Business, Amerika Serikat (1999).

Pengalaman Kerja

- Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) (2018-2019)
- Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018)
- Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training, Program Refreshment UKMR Level 5 "Credit Risk and Operational Risk Management", Jakarta, 18 Desember 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

453.100 lembar; 0,0042786% (kode saham: BBTN).



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

HIRWANDI GAFAR^{*)}
Direktur Consumer and Commercial Lending

Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur *Consumer and Commercial Lending* sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik/Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1992).

Pengalaman Kerja

- Head of Comercial Lending Division (2019)
- Head of Subsidized Mortgage Lending Division Bank BTN (2019)
- Head of Subsidized Mortgage Division Bank BTN (2014-2019)
- Head of Business Development Subsidized Mortgage Department Bank BTN (2013-2014)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training, Pembekalan UKMR Level 5, Jakarta, 11 Desember 2019, oleh Sandra Chalik (Perorangan).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

56.000 lembar; 0,0005288% (kode saham: BBTN).

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PROFIL DIREKSI

Periode Jabatan
17 Maret 2017 - RUPS Tahun 2022,
Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
50 tahun

Domisili
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia



NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Finance, Planning and Treasury

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur pertama kali sejak 17 Maret 2017 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Juli 2017. Dipercaya untuk melaksanakan fungsi Direktorat *Finance, Planning and Treasury* sejak RUPSLB Perseroan 2019 tanggal 27 November 2019. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1994).

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos (2015-2017).
- Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Head of Priority Project Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014).
- Pj Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2013).
- Group Head Micro Network Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2012).
- Pj Group Head Micro Network Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2010).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

- *In House Training Program Refreshment UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)"*, Jakarta, 23 Mei 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.
- Seminar PSAK 71 *Impairment Deep Dive In Risk Management Perspective & CSG-CIMB 13th Annual Indonesia Conference*, Bali, 27-28 Juni 2019, oleh Bankers Association for Risk Management.
- *In House Training Pembekalan & Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance*, Jakarta, 24-30 Agustus 2019, oleh ACI FMA Indonesia.
- Seminar *The 1st ASEAN CPA Conference 2020*, Bali, 16-17 Oktober 2019, oleh Institusi Akuntan Manajemen Indonesia.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

236.600 lembar; 0,0022342% (kode saham: BBTN).



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

YOSSI INSTANTO)**
Direktur Human Capital, Legal and Compliance

Periode Jabatan

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

46 tahun

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 September 2018. Dipercaya untuk melaksanakan fungsi Direktorat *Human Capital, Legal and Compliance* sejak RUPSLB Perseroan 2019 tanggal 27 November 2019. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1996).
- Magister (S2) Hukum Bisnis dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (2004).

Pengalaman Kerja

- Kepala Legal Division Bank BTN (2017-2018).
- Kepala Legal & Loan Document Desk Bank BTN (2014-2017).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Seminar *Leadership, Entrepreneurship And Innovation In The Global Economy*, London, 25-29 Maret 2019, oleh Asean Global Leadership Program.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

70.200 lembar; 0,0006629% (kode saham: BBTN).

**) Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL DIREKSI

Periode Jabatan
29 Agustus 2019 - RUPS Tahun 2024,
Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
52 tahun

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia



ELISABETH NOVIE RISWANTI *)
Direktur Remedial and Wholesale Risk

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur sejak 29 Agustus 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dipercaya untuk melaksanakan fungsi Direktorat Remedial and Wholesale Risk sejak RUPSLB Perseroan 2019 tanggal 27 November 2019. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan	Sarjana (S1) Hukum bidang Perdata dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).
Pengalaman Kerja	- Asset Management Division Head Bank BTN (2017-2019). - Small & Medium Lending Division Head Bank BTN (2015-2017). - Commercial Housing Loan Department Head Bank BTN (2013-2015).
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	<i>In House Training</i> , Pembekalan UKMR Level 5, Jakarta, 18 September 2019 & 06 Oktober 2019, oleh Sandra Chalik (Perorangan).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.
Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Kepemilikan Saham BTN	25.000 lembar; 0,0002361% (kode saham: BBTN).

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen**ANDI NIRWOTO**
Direktur Operation, IT and Digital Banking**Periode Jabatan**23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama**Kewarganegaraan**

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 September 2018. Dipercaya untuk melaksanakan fungsi Direktorat *Operation, IT and Digital Banking* sejak RUPSLB Perseroan 2019 tanggal 27 November 2019. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master (S2) of Finance dari Universitas Gadjah Mada/University of Lexington Kentucky, Amerika Serikat (1997).

Pengalaman Kerja

- General Manager Operational Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
- General Manager Divisi Solusi & Security Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Deputi General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2014).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training, Program *Refreshment* UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)", Jakarta, 23 Mei 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

70.200 lembar; 0,0006629% (kode saham: BBTN).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL DIREKSI

Periode Jabatan
27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan
Indonesia

Usia
54 tahun

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur *Distribution and Retail Funding* sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Gelar (S2) International Business dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998).

Pengalaman Kerja

- SEVP Consumer & Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019)
- Regional CEO IV/JKT 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018)
- Regional Manager IV-JKT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training, Pembekalan UKMR Level 5, Jakarta, 11 Desember 2019, oleh Sandra Chalik (Perorangan).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

SETIYO WIBOWO^{*)}
Direktur *Enterprise Risk Management,
Big Data and Analytics*

Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun
2024, Periode Pertama

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

43 tahun

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics* sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1999).
- Gelar (S2) MBA in Finance & Banking dari KDI School of Public Policy and Management, Korea Selatan (2009).

Pengalaman Kerja

- Group Head Consumer Credit Risk & Analytics PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019)
- Group Head Credit Portofolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2018)
- Group Head Consumer Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

In House Training Program Refreshment UKMR Level 5 "Credit Risk Management", Jakarta, 18 Desember 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, dengan Direksi Lainnya, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham BTN

Tidak memiliki saham Bank BTN (kode saham: BBTN).

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DIBAWAH DIREKSI



ACHMAD CHAERUL
*Corporate Secretary Division Head /
Vice President*

Periode Jabatan

Menjabat sejak: 30 Oktober 2018

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

49 tahun

Domisili

Jawa Tengah, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2002

Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Kepala *Divisi Compliance & Governance*
- 2017 menjabat Kepala Kantor Wilayah 5
- 2016 menjabat sebagai Kepala Cabang Makassar

Sertifikasi dan Pelatihan

- Seminar Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korporasi di BUMN Intrinsic Bali 2019
- *Strategy Excellence* Aztech Dubai, United Arab Emirates 2018



HERTANTA
*Internal Audit Division Head / Sr. Vice
President*

Periode Jabatan

Menjabat sejak: 01 Maret 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

55 tahun

Domisili

Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Mei 1991

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran tahun 2005

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Audit Intern Division Head*
- 2018 menjabat sebagai *Human Capital Strategy Division Head*
- 2017 menjabat sebagai *Commercial Risk Division Head*
- 2015 *Enterprise Risk Management Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- UKMR Level -5 LSPP*
- Executive Development Program DDI
- Directorship Program
- National Anti Fraud Conference 2019



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Anton Rijanto

Commercial Funding Division Head
Menjabat sejak: 23 September 2019



Erwin Dwi Kusuma

Enterprise Risk Management Division
Menjabat sejak: 24 Mei 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Mei 1996

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Hasanudin tahun 2004

Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai *Commercial Funding & Services Div. Head*
- 2017 menjabat sebagai *PJ Commercial Funding & Service Div Head*
- 2016 menjabat sebagai *Branch Manager*

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sosialisasi APU & PPT Bank Tabungan Negara Jakarta Pusat 2019
- *Executive Development Program Fase-3 PT.Daya Dimensi Indonesia DKI Jakarta 2019*

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

40 tahun

Domisili

Surabaya Timur, Surabaya, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

1 September 2017

Pendidikan Terakhir

- Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Institut Sepuluh November tahun 2002

Riwayat Profesi

- 2017 - 2018 menjabat sebagai *Retail Risk Division Head*
- 2019 sampai dengan saat ini menjabat sebagai *Enterprise Risk Management Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- PSAK 71 *Impairment Deep Dive in Risk Man*, Bali, 2019
- *Certified in Enterprise Risk Governance*, Jakarta, 2019



Heru Kurniawan

Digital Channel & Contact Center Division
Menjabat sejak: 30 Desember 2019



Dadang Eka Jatnika

Human Capital Strategy Division
Menjabat sejak: 10 Juni 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Kota Bogor Timur, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2003

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Digital Channels & Contact Ctr Div Head*
- 2018 menjabat sebagai *Commercial Lending Division Head*
- 2017 menjabat sebagai *SME Lending Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3 PT.Daya Dimensi Indonesia DKI Jakarta 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 November 1995

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Akuntansi dari Universitas Diponegoro tahun 2006

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Finance & Accounting Division Head*
- 2017 menjabat sebagai *PLT Policy & Procedure Desk Head*
- 2017 menjabat sebagai *Operation & Business Support Div Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Aktuaria Imbalan Kerja* sesuai PSAK 24, Jakarta, 2019
- *Certified Profession Human Resouce*, Jakarta, 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



Rudolf Valentino Saragih

Finance & Accounting Division
Menjabat sejak: 31 Mei 2019



Joni Prasetyanto

Credit Operations Division Head
Menjabat sejak: 31 Mei 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

52 tahun

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1997

Pendidikan Terakhir

S1 Ekonomi/Akuntansi
Universitas Sumatera Utara
tahun 1994

Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai *Credit Operations Division Head*
- 2019 menjabat sebagai *Finance & Accounting Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development
Program Fase-3, PT.Daya
Dimensi Indonesia, DKI Jakarta,
2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Juli 1994

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Hukum Bisnis
dari Universitas Indonesia
tahun 2004

Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Exec. Vice President
- 2017 menjabat sebagai Sr. Vice President
- 2015 menjabat sebagai Vice President

Sertifikasi dan Pelatihan

- Seminar Keuangan Berkelanjutan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta 2019
- *Integrating Strategic, Operational & Tactical Leadership For Outstanding Performance* Fairmont Hotel - Dubai, UEA Fairmont Hotel - Dubai, UEA 2018



Eko Waluyo

Human Capital Management Division
Menjabat sejak: 07 Februari 2019



Wilson Arafat

Procurement & General Services Division
Menjabat sejak: 02 Desember 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Agustus 1997

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari Universitas Gadjah Mada
tahun 2004

Riwayat Profesi

2017 menjabat sebagai HC Managment & Culture Spec. Divisi Head 2019 menjabat sebagai Human Capital Management Division Head

Sertifikasi dan Pelatihan

Seminar Nasional dengan tema dibawa kemana dana pensiun ke depan, ADPI, Jakarta, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Kebun Jeruk, Jakarta Barat,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

02 Januari 1998

Pendidikan Terakhir

S2 Ekonomi/Manajemen Pemasaran, Universitas Gadjah Mada 2014

Riwayat Profesi

- 2016 menjabat sebagai *Project Leader* Anggota "BTN Transformer Team" untuk penyusunan cetak biru transformasi Bank BTN
- 2019 menjabat sebagai *Change Leader* Program Budaya Perusahaan Tahun 2019

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development
Program Fase-3, PT.Daya
Dimensi Indonesia, DKI Jakarta,
2019



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



Adi Santoso Budi Darma

Institutional Banking Division Head
Menjabat sejak: 1 Juni 2017



Mohammad Faiz

Small Medium Enterprise Banking Division
Menjabat sejak: 30 September 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

54 tahun

Domisili

Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1990

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila tahun 1988

Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai *Institutional Banking Division Head*
- 2019 menjabat sebagai *Institutional Banking Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- SESPIBANK, LPPI, tahun 2011.
- Certified Wealth Manager, MM UGM, tahun 2015.
- Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan, Level 4, LSPP, tahun 2018.
- Executive Development Program, PT. DDI, tahun 2019.

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1997

Pendidikan Terakhir

S1 Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1995

Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai *SME Lending Division Head*
- 2019 menjabat sebagai *Small Medium Enterprise Banking Div Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3, 2019, PT Daya Dimensi Indonesia, DKI Jakarta 2019



L. Esti Dwi Retnosari

Policy, Procedure & BPR Division
Menjabat sejak: 16 September 2019



Sindhu Rahardian Ardita

Corporate Syndication & Transaction Banking
Menjabat sejak: 19 November 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

S-2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Gajah Mada

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Policy & Procedure Desk Head*
- 2018 menjabat sebagai *PLT. Policy & Procedure Desk Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3 PT. Daya Dimensi Indonesia DKI Jakarta 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

47 tahun

Domisili

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gajah Mada tahun 2004

Riwayat Profesi

- 2014 -2017 Menjabat Sebagai Kepala *Institutional Banking*
- Kepala *Divisi Corporate Syndication and Transactional Banking, 2017*
- 2018 Menjabat Sebagai *Corporate & Loan Syndication Division*

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Advanced Analysis of Infrastructure* Proj PT Pernerkat Efek Indonesia (PEFINDO) Jakarta 2019
- *International Housing Finance Program* Wharton School Univ. Pennsylvania USA 2012
- Sespibank LPPI 2016



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Sahat Sihombing

Retail Risk Division Head

Menjabat sejak: 27 Mei 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

53 tahun

Domisili

Rawamangun, Jakarta Timur,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Juli 1994

Pendidikan Terakhir

Doktor (S-3) Administrasi
Bisnis dari Universitas
Brawijaya Malang tahun 2019

Riwayat Profesi

- Kepala Divisi *Retail Risk* 2019
- Kepala Divisi *Enterprise Risk Management* 2017- 2019
- Kepala *Divisi Strategic, Innovation & Performance* 2017
- 2016 Kepala *Divisi Wealth Management*

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sertifikasi UKMR 5, LSPP 2019
- Executive Development Program DDI 2018
- Sespibank 66, LPPI 2017



Ferry Sipahutar

Retail Funding & Service Division

Menjabat sejak: 16 September
2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

49 tahun

Domisili

Citeureup, Jawa Barat,
Indonesias

Bergabung di Bank BTN

01 Desember 1996

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen,
UGM & University of Kentucky
USA, 2004

Riwayat Profesi

2018 Menjabat Sebagai *Retail
Funding & Service Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Executive Development, DDI Tahun 2018*
- *Refreshment UKMR 4, LSPP 2019*



Nasril

Service Quality & Distribution

Menjabat sejak: 17 Desember
2018

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

54 tahun

Domisili

Bogor, Jawa Barat

Bergabung di Bank BTN

01 Mei 1991

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Manajemen
Keuangan dari STIE KBP
Padang tahun 1989

Riwayat Profesi

- 2016 menjabat sebagai *Retail Funding & Services Division Head*
- 2014 menjabat sebagai *Regional Office Head*
- 2012 menjabat sebagai *Branch Manager Tangerang*

Sertifikasi dan Pelatihan

Refreshment UKMR Level 4,
Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan, DKI Jakarta, 2019



Marfiades

*Consumer Collection, Recovery &
Asset Sales Division*

Menjabat sejak: 12 November
2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

55 tahun

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Februari 1990

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari Universitas Borobudur
tahun 2006

Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai *Consumer Collection & Remedial Div Head*
- 2017 menjabat sebagai *Regional Office IV Head*
- 2017 menjabat sebagai *Regional Office Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Business Process Improvement
KPR Bank Tabungan Negara
Yogyakarta 2019



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



Alex Sofyan Noor

Sharia Division Head

Menjabat sejak: 31 Mei 2019



Beki Kanuwa

Corporate Strategy & Alliances

Management Division

Menjabat sejak: 18 November 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

53 tahun

Domisili

Pejompongan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Maret 1993

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia tahun 1991

Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai Vice President
- 2011 menjabat sebagai Ass. Vice President
- 2011 menjabat sebagai Senior Manager

Sertifikasi dan Pelatihan

Sosialisasi APU & PPT Bank Tabungan Negara, Jakarta Pusat, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

47 tahun

Domisili

Bambu Apus, Jakarta Timur, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

02 Januari 1998

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung tahun 1996

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Corp Strategy & Alliances Mgmt Div Head*
- 2018 menjabat sebagai *Corp. Strategy & Perf Mgt Div. Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3, PT.Daya Dimensi Indonesia, DKI Jakarta, 2019



R. Wahyu B. Witjaksono

Compliance & Governance Division

Menjabat sejak: 05 September 2019



Adee Indriana D

Operation & Business Support Division

Menjabat sejak: 07 Februari 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

49 tahun

Domisili

Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat

Bergabung di Bank BTN

01 November 1995

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2004

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT. *Compliance & Governance Div. Head*
- 2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Internal Audit
- 2017 menjabat sebagai *Auditor Coordination Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Sertifikasi *General Banking Level III*, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Bekasi Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1997

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sebelah Maret tahun 1995

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Operations & Business Support Div. Head*
- 2018 menjabat sebagai *Operation & Business Support Div. Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program (EDP), PT.Daya Dimensi Indonesia, Jakarta 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Suryanti Agustinar

Non Subsidized Mortgage & Personal

Menjabat sejak: 01 Oktober 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

54 tahun

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1991

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 1997

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Non Subsidized Mortgage Lending Div Head*
- 2016 menjabat sebagai *Non Subsidized & Consumer Lending Divisi*
- 2013 menjabat sebagai *Branch Manager Bekasi*

Sertifikasi dan Pelatihan

Eksekutif *Development Program (EDP)* PT. Daya Dimensi Indonesia, Jakarta Pusat, 2018



M. Amin Sholeh

Commercial Asset Management Division

Menjabat sejak: 12 November 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Banyuwangi, Jawa Timur

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Sebelah Maret tahun 1993

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *PJ Asset Management Division Head*
- 2019 menjabat sebagai *Branch Manager Banjarmasin*
- 2017 menjabat sebagai *Commercial Loan Monitor & Restruct Dep Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Asset Management: Special Asset Sales Tandika Learning Institute Jakarta 2019



Sri Rezeki Murni Sudarsari

Wealth Management Division Head

Menjabat sejak: 11 November 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

54 tahun

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Mei 1991

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 1998

Riwayat Profesi

- 2016 menjabat sebagai *Regional Office Head*
- 2014 menjabat sebagai *Branch Manager Bekasi*
- 2011 menjabat sebagai *Housing Dept Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Sertifikasi AAJI, Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Jakarta, 2019



Lusiana Anjarsari

Legal Division Head

Menjabat sejak: 5 September 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

46 tahun

Domisili

Ragunan, Jakarta Selatan, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Maret 1998

Pendidikan Terakhir

S2 Hukum/Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia 2002

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Legal Division Head*
- 2018 menjabat sebagai *PLT Legal Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3, PT. Daya Dimensi Indonesia, DKI Jakarta, 2019



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



Katon Djoko Soekarsono

IT Strategic Planning & Development Division

Menjabat sejak: 21 Februari 2019



Nofry Rony Poetra

Treasury Division Head

Menjabat sejak: 21 April 2014

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat

Bergabung di Bank BTN

15 April 2019

Pendidikan Terakhir

S2 Magister Manajemen/
Agribisnis Institut Pertanian
Bogor 2001

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *IT Strategic Planning & Dev. Div Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Certified ITIL V3 Foundation*, Jakarta, 2017
- *Certified Master Black Belt Lean Six Sigma* (CMBB), USA, 2014
- *Certified Business Continuity Professional* (CBCP), Singapore, 2014

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta

Bergabung di Bank BTN

01 Maret 1993

Pendidikan Terakhir

S2 Magister Master Business
Administration, The George
Washington University, USA

Riwayat Profesi

- 2013 Menjabat Sebagai *Institutional Banking Division Head*
- 2015 *Regional Office Head*
- 2016 *Treasury Division Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

Sertifikasi Treasury Level
Advance - LSPP 2019



Mochamad Yut Penta

Subsidized Mortgage Lending Division

Menjabat sejak: 18 November 2019



Sri Astuti

PJ. Commercial Banking Division

Menjabat sejak: 10 Januari 2020

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bandung, Jawa Barat,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

S2 Magister Manajemen
Universitas Gadjah Mada
2004

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Subsidized Mortgage Lending Div Head*
- 2018 menjabat sebagai *Roll Out Project Lead*

Sertifikasi dan Pelatihan

Business Process Improvement
KPR Bank Tabungan
Negara, Yogyakarta, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

47 tahun

Domisili

Umbulharjo, Yogyakarta,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

02 Januari 1998

Pendidikan Terakhir

S1 Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia 1995

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *PJ. Commercial Banking Division Head*
- 2018 menjabat sebagai *Corporate & Loan Syndication Depart Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

General Manager Development
Program, PT. Daya Dimensi
Indonesia, DKI Jakarta, 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Wahyudi Joko Santoso

PJ IT Operations Division Head
Menjabat sejak: 09 September 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

48 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari STIE Indonesia Banking
School tahun 2019

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PJ IT Operations Division Head
- 2017 menjabat sebagai IT Security Policy, Risk & Governance DH

Sertifikasi dan Pelatihan

Refreshment UKMR Level 3
Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan DKI Jakarta 2019



Muhamad Irwan

PLT. Transformation Management Division
Menjabat sejak: 18 November 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

49 tahun

Domisili

Sunter, Jakarta, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

02 Januari 1998

Pendidikan Terakhir

S1 Ekonomi Universitas
Pancasila 1996

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT. Transf. Management Office Head
- 2018 menjabat sebagai Infrastructure & GRC Transformation DH

Sertifikasi dan Pelatihan

General Manager Development,
Program PT.Daya Dimensi
Indonesia, DKI Jakarta ,2019



Roni Subagio

PLT. Commercial Risk Division
Menjabat sejak: 26 Agustus 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat

Bergabung di Bank BTN

01 Mei 1996

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi/
Akuntansi dari Univeristas
Brawijaya tahun 1993

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT. Commercial Risk Division Head
- 2017 menjabat sebagai Credit Risk Housing Dept Head

Sertifikasi dan Pelatihan

Refreshment UKMR Level 3
Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan Jakarta 2018



Khaeruddin B.

PLT. Learning Center Division Head
Menjabat sejak: 03 Februari 2020

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

53 tahun

Domisili

Tangerang , Banten

Bergabung di Bank BTN

01 November 1991

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari Universitas Gadjah Mada
tahun 1999

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai School of Operational Banking Dept Head
- 2017 menjabat sebagai Associate School of Operational Banking

Sertifikasi dan Pelatihan

Refreshment UKMR Level 3
Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan DKI Jakarta 2019
Training Housing Finance
Management - HDFC HDFC
India, India 2018



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen



Dewi Fitrianingrum

Regional Office Head II

Menjabat sejak: 30 Desember 2018



Edward Alimin Syarif

Regional Office Head V

Menjabat sejak: 5 September 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

53 tahun

Domisili

Tebet, Jakarta Selatan,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 April 1991

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari Universitas Gadjah Mada
tahun 1998

Riwayat Profesi

- *Comm Funding & Services Division Head*, 2015 - 2017
- *Regional Office II Head* 2017 Sampai saat ini

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sertifikasi Kredit, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, 2017
- Executive Development Program (EDP) 2018
- *Refreshment UKMR Level 4*, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Juli 1994

Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen
dari Universitas Terbuka
tahun 2013

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Regional Office Head*
- 2015 menjabat sebagai *Sharia Business Deputy*

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3, PT.Daya Dimensi Indonesia, DKI Jakarta, 2019



Frisaba H. Yusdianto

Regional Office Head III

Menjabat sejak: 27 Juli 2018



Sri Nuryanti Ekaningsih

Regional Office Head VI

Menjabat sejak: 29 September 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

55 tahun

Domisili

Cibubur, Jawa Barat,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Desember 1989

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Hukum dari
Universitas Krisnadwipayana
tahun 1989

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *Regional Office Head*
- 2018 menjabat sebagai *Regional Office III Head*

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Refreshment UKMR Level 3* Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Jakarta Pusat 2019
- Sertifikasi *Wealth Management Modul 1-3 Maesa Consulting* Indonesia (MCI) Jakarta 2018

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

55 tahun

Domisili

Serpong, Tangerang,
Indonesia

Bergabung di Bank BTN

01 Agustus 1989

Pendidikan Terakhir

S1 Hukum / Hukum Perdata
Universitas Gadjah Mada
1988

Riwayat Profesi

Regional Office Head, Regional Office 6, 2019

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-2, Jakarta, 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Manahan Hutapea

Regional Office Head I

Menjabat sejak: 18 November
2019



Benjamin Sihombing

Pj. Regional Head IV

Menjabat sejak: 18 November
2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

51 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, 2019

Bergabung di Bank BTN

01 November 1995

Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi dari
Universitas Sumatera Utara

Riwayat Profesi

- *Deputy Regional Manager Business, General Management*, 2017
- *Regional Office IV Head, General Management*, 2018
- *Regional Office Head*, 2019

Sertifikasi dan Pelatihan

Executive Development Program Fase-3, 2019

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

50 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Bank BTN

03 Februari 1997

Pendidikan Terakhir

S1 Ekonomi/Manajemen
Universitas Sumatera Utara,
1993

Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai *PJ Regional Office Head*
- 2018 menjabat sebagai *Branch Manager Bekasi*

Sertifikasi dan Pelatihan

Refreshment UKMR Level 3,
Lembaga Sertifikasi Profesi
Perbankan, 2019



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

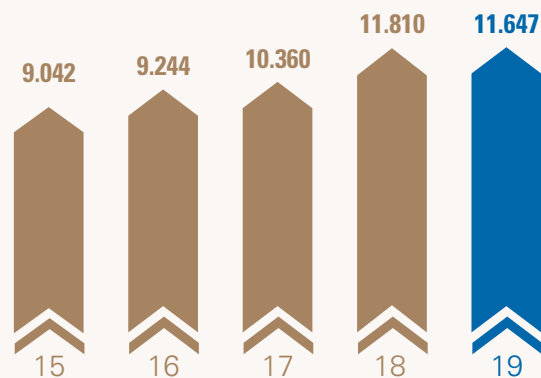


Per 31 Desember 2019, Perseroan mengaryakan 11.647 pegawai, turun dari jumlah pegawai di akhir tahun 2018 sebanyak 11.810. Penyebab penurunan jumlah pegawai selain disebabkan pegawai yang memasuki masa pensiun (MPP), pegawai yang mengundurkan diri (*resign*) tetapi juga target rekrutmen yang lebih rendah dari tahun 2018 yaitu sebanyak 410 pegawai.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR 2015-2019

(orang)





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

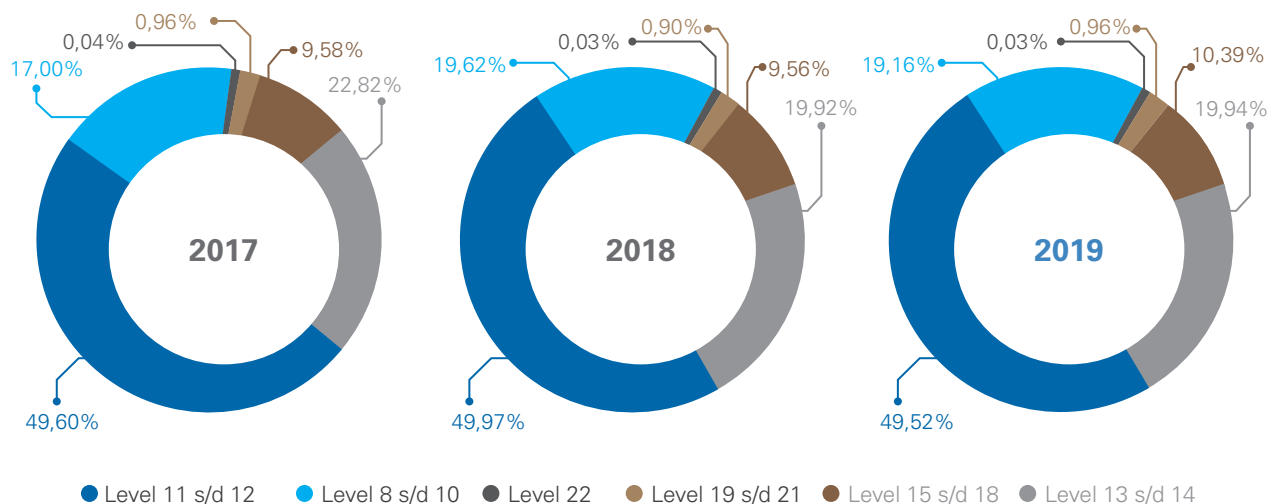
(orang)

Status Kependudukan	2019				2018				2017			
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	(%)
Level 22	2	2	4	0,03%	2	2	4	0,03%	1	3	4	0,04%
Level 19-21	93	19	112	0,96%	88	18	106	0,90%	82	17	99	0,96%
Level 15-18	910	300	1.210	10,39%	852	277	1.129	9,56%	755	238	993	9,58%
Level 13-14	1.503	819	2.322	19,94%	1.561	792	2.353	19,92%	1.613	751	2.364	22,82%
Level 11-12	2.950	2.818	5.768	49,52%	3.045	2.856	5.901	49,97%	2.697	2.442	5.139	49,60%
Level 8-10	885	1.346	2.231	19,16%	917	1.400	2.317	19,62%	649	1.112	1.761	17,00%
Jumlah	6.343	5.304	11.647	100,00%	6.465	5.345	11.810	100,00%	5.797	4.563	10.360	100,00%

L = Laki-laki | P = Perempuan

KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

(%)



Jumlah pegawai tahun 2019 sejumlah 11,647 didominasi oleh pegawai dengan level 11 sd. 12 sebanyak 49,52% yang didominasi pegawai dengan usia muda (millennials). Pada tahun 2019, pelaksanaan *Manpower Planning* mampu memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja Perseroan dengan tingkat rekrutmen untuk pemenuhan pegawai mencapai 100% dari target rekrutmen sebesar 410 pegawai baru.

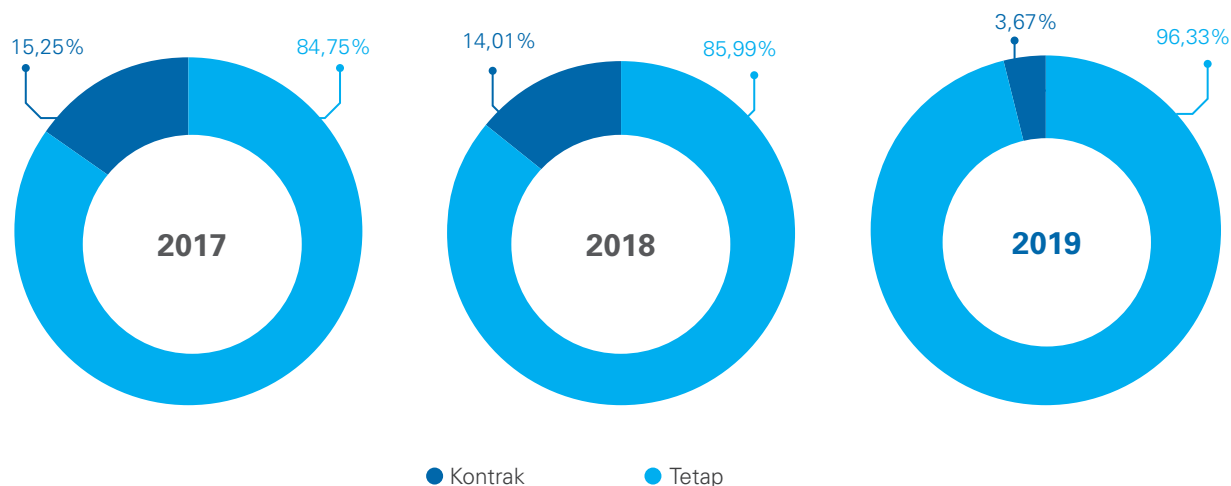


DEMOGRAFI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAAN (ORANG)

Status Kepegawaian	2019				2018				2017			
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
Tetap	6.150	5.069	11.219	96,33%	5,649	4,506	10.155	85,99%	4.921	3.859	8.780	84,75%
Kontrak	193	235	428	3,67%	816	839	1.655	14,01%	876	704	1.580	15,25%
Jumlah Tanpa Pegawai <i>Outsource</i>	6.343	5.304	11.647	100,00%	6,465	5,345	11.810	100,00%	5.797	4.563	10.360	100,00%
<i>Outsource</i>	9.113	1.013	10.125		9.360	926	10.286		8.485	738	9.223	
Jumlah Termasuk Pegawai <i>Outsource</i>	15.456	6.317	21.772		15.825	6.271	22.096		14.282	5.301	19.583	

L = Laki-laki | P = Perempuan

KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAAN (TERHADAP JUMLAH PEGAWAI TERMASUK *OUTSOURCE*) (%)



Di akhir tahun 2019, Perseroan mempekerjakan 11.647 pegawai, terdiri dari Pegawai Tetap sebanyak 11.219 orang dan Pegawai Kontrak/PKWT sebanyak 428 orang. Selain itu, Perseroan juga mempekerjakan Pegawai *Outsource* sebanyak 10.125 orang sehingga jumlah pegawai termasuk Pegawai *Outsource* di akhir tahun 2019 mengalami penurunan -1,47% dari total pegawai sebanyak 11.810 pada akhir tahun 2018. Penyebab penurunan jumlah pegawai selain disebabkan pegawai yang memasuki masa pensiun (MPP), pegawai yang mengundurkan diri (resign) tetapi juga target rekrutmen yang lebih rendah dari tahun 2018 yaitu sebanyak 410 pegawai.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

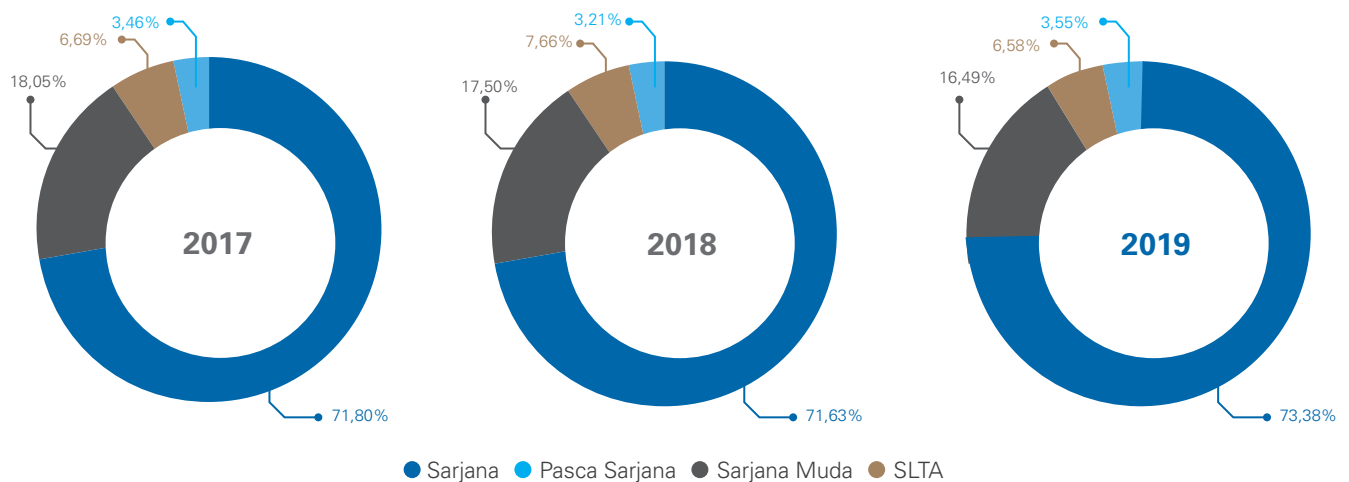
(orang)

Tingkat Pendidikan	2019				2018				2017			
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
Pasca Sarjana	303	111	414	3,55%	312	110	422	3,57%	319	113	432	4,17%
Sarjana	4.895	3.651	8.546	73,38%	4.957	3.644	8.601	72,83%	4.461	3.219	7.680	74,13%
Sarjana Muda	847	1.074	1.921	16,49%	857	1.084	1.941	16,44%	755	888	1.643	15,86%
SLTA	298	468	766	6,58%	339	507	846	7,16%	262	343	605	5,84%
Jumlah	6.343	5.304	11.647	100,00%	6.465	5.345	11.810	100,00%	5.797	4.563	10.360	100,00%

L = Laki-laki | P = Perempuan

KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

(%)



Pada tahun 2019, jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1) memiliki komposisi terbanyak yaitu 73,38% lebih banyak dari tahun 2018 sebanyak 72,83%. Hal ini disebabkan karena mayoritas rekrutmen pegawai baru mensyaratkan minimal S1. Selain itu, jumlah SLTA tahun 2019 memiliki komposisi 6,58% atau menurun dari tahun 2018 sebanyak 7,16% disebabkan karena mayoritas didominasi Teller yang pensiun usia 36 tahun.

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

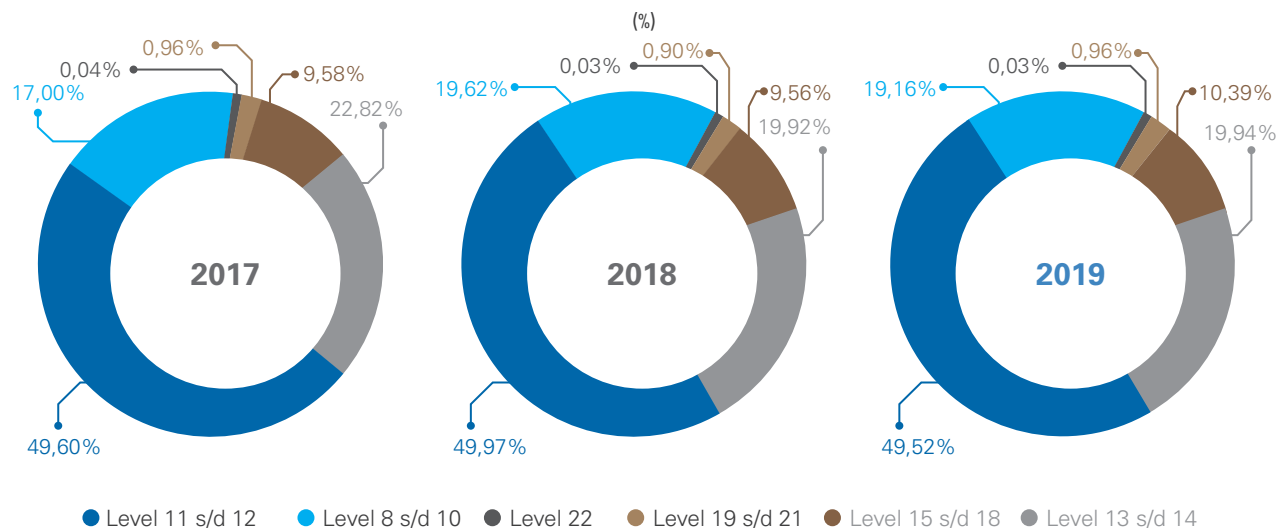
(orang)

Rentang Usia	2019				2018				2017			
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
≥ 51	466	227	693	5,95%	443	230	673	5,70%	465	220	685	6,61%
31–50	2.313	1.753	4.066	34,91%	2.129	1.488	3.617	30,63%	1.899	1.223	3.122	30,14%
≤ 30	3.564	3.324	6.888	59,14%	3.893	3.627	7.520	63,67%	3.433	3.120	6.553	63,25%
Jumlah	6.343	5.304	11.647	100,00%	6.465	5.345	11.810	100,00%	5.797	4.563	10.360	100,00%

L = Laki-laki | P = Perempuan



KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA



Pada tahun 2019, jumlah pegawai didominasi pegawai dengan rentang usia < 30 tahun atau millennials yaitu sebesar 59.14%. Hal ini disebabkan karena Bank pernah tidak melakukan rekrutmen selama 10 tahun sejak tahun 1998 sehingga komposisi pegawai saat ini didominasi oleh rentang usia yang muda.

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

(orang)

Rentang Masa Kerja	2019				2018				2017			
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
> 30th	127	42	169	1,45%	96	25	121	1,02%	55	21	76	0,73%
25th-30th	369	251	620	5,32%	355	253	608	5,15%	425	235	660	6,37%
20th-25th	765	194	959	8,23%	788	234	1.022	8,65%	651	276	927	8,95%
15th-20th	-	-	-	0,00%	148	21	169	1,43%	372	46	418	4,03%
10th-15th	232	345	577	4,95%	129	275	404	3,42%	27	223	250	2,41%
5th-10th	1.562	1.882	3.444	29,57%	1.158	1.672	2.830	23,96%	925	1.360	2.285	22,06%
0-5th	3.288	2.590	5.878	50,47%	3.791	2.865	6.656	56,36%	3.342	2.402	5.744	55,44%
Jumlah	6.343	5.304	11.647	100,00%	6.465	5.345	11.810	100,00%	5.797	4.563	10.360	100,00%

L = Laki-laki | P = Perempuan

Pada tahun 2019, komposisi pegawai didominasi oleh pegawai dengan masa kerja 0-5 tahun sebanyak 50.47%. Mayoritas pegawai merupakan pegawai muda dan rekrutmen baru yang termasuk golongan millennials. Tingginya komposisi ini juga disebabkan berkurangnya jumlah pegawai usia diatasnya (>20 tahun) karena pensiun dan Bank tidak melakukan rekrutmen selama 10 tahun sejak 1998.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



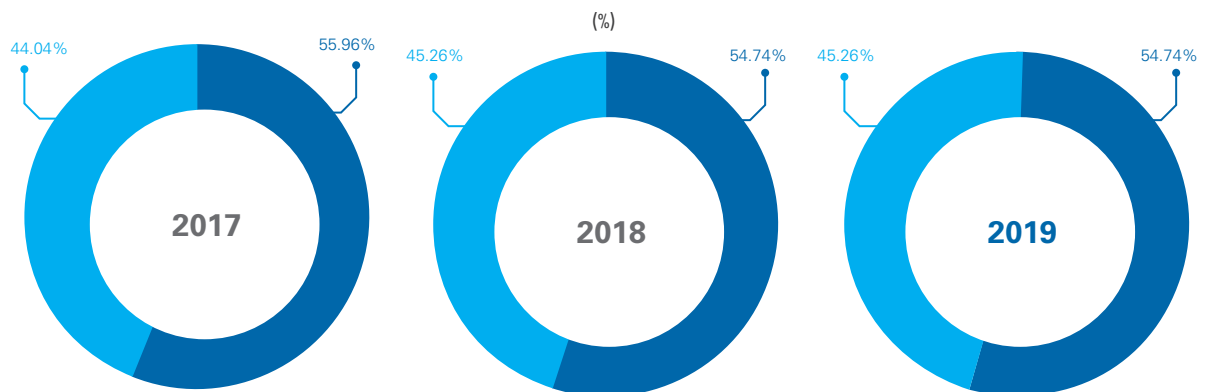
Laporan Keuangan Audited

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN

Gender	2019		2018		2017	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	6,343	54.46%	6.465	54,74%	5.797	55,96%
Perempuan	5,304	45.54%	5.345	45,26%	4.563	44,04%
Jumlah	11,647	100.00%	11.810	100,00%	10.360	100,00%

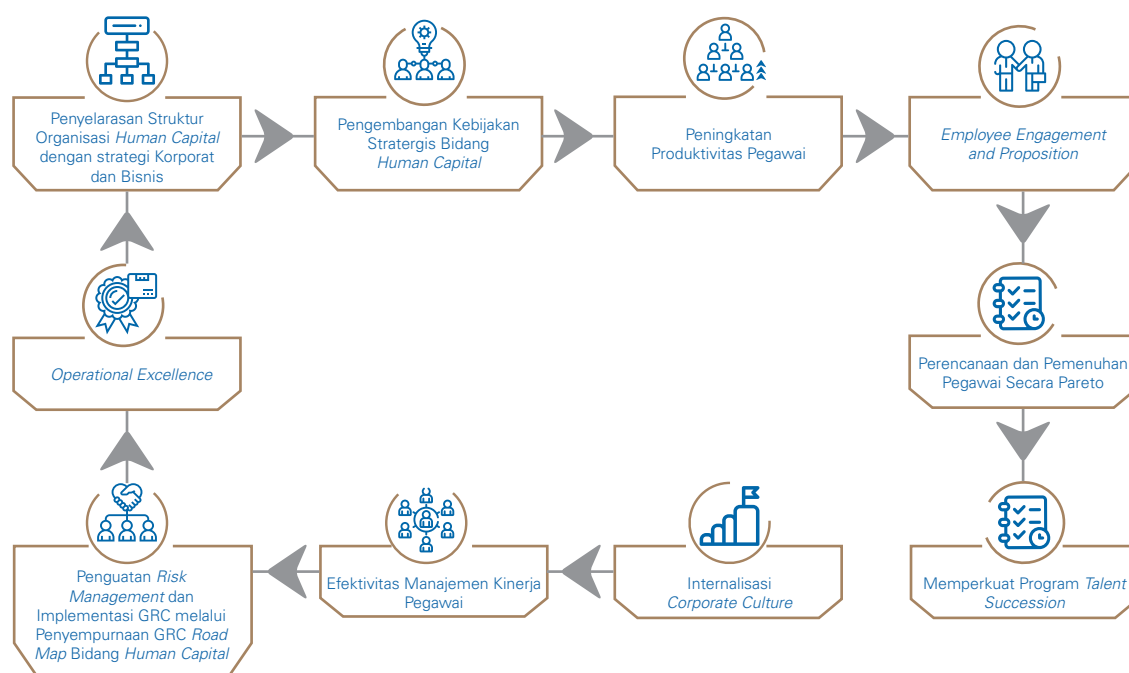
KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN



Tahun 2019, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 54,46%. Kondisi ini sama dengan tahun 2017 atau 2018 karena Bank memprioritaskan pegawai laki-laki karena memiliki tingkat dan retensi kerja yang lebih lama.

SEKILAS KEBIJAKAN STRATEGIS SDM DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Perseroan menekankan pentingnya pengelolaan SDM atau *Human Capital* sebagai modal utama bagi Perseroan untuk menghadirkan produk dan jasanya, mewujudkan operasional dan *service excellence*, serta menciptakan organisasi yang mampu menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Perseroan memandang pegawai sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan besar terhadap laju perkembangan Perseroan. Untuk itu, Perseroan merumuskan kebijakan strategis terkait pengembangan *Human Capital* yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan talenta pribadi dari setiap pegawai.



Pengembangan kompetensi SDM berupa pendidikan dan pelatihan menjadi agenda prioritas bagi Perseroan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Berikut tabel jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai Perseroan berdasarkan level jabatan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi pada periode Januari hingga Desember 2019.

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Level Jabatan	Jumlah Peserta		Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Gender	
			2019	2018	2019	2018
<i>Leadership</i>	Fokus untuk pengembangan <i>leadership</i>	• Junior staff • Staff • Senior staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Exec. Vice President • Sr. Vice President • Directors & Commissioners	5.936	4.893	• Laki-laki 54% • Perempuan 46%	• Laki-laki 71% • Perempuan 29%
<i>Business</i>	Fokus untuk pengembangan pelatihan mengenai produk dan layanan	• Junior staff • Staff • Senior staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Exec. Vice President • Sr. Vice President • Directors & Commissioners	12.632	10.153	• Laki-laki 48% • Perempuan 52%	• Laki-laki 45% • Perempuan 55%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

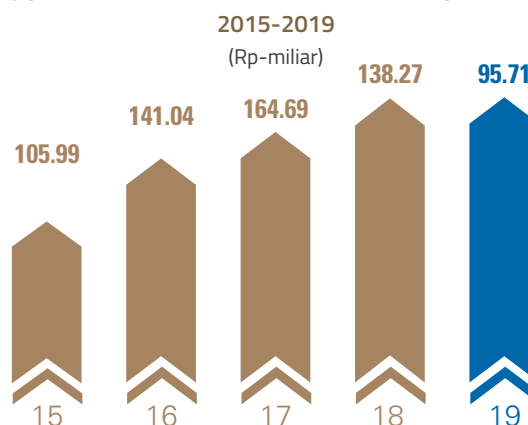
DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Level Jabatan	Jumlah Peserta		Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Gender	
			2019	2018	2019	2018
<i>Operational Banking</i>	Fokus untuk pengembangan pelatihan mengenai kegiatan operasional untuk mendukung unit bisnis	• Junior staff • Staff • Senior staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Exec. Vice President • Sr. Vice President • Directors & Commissioners	37.690	13.781	• Laki-laki 48% • Perempuan 52%	• Laki-laki 56% • Perempuan 44%

Di tahun 2019 Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 56.258 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.632 pegawai mengikuti School of Business, 5.936 peserta mengikuti School of Leadership, dan 37.690 peserta mengikuti School of Operational Banking. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 95% dibandingkan tahun 2018.

Investasi atau biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai sepanjang tahun 2019 mencapai Rp95,71 miliar, turun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp138,27 miliar. Realisasi penggunaan biaya pendidikan tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018 karena Perseroan menetapkan metode delivery blended learning yang menggabungkan online learning dan classroom sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan. Perkembangan investasi program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

PERKEMBANGAN INVESTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR



“URAIAN LENGKAP TERKAIT KEBIJAKAN BANK BTN DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAPAT DILIHT PADA PEMBAHASAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BAB FUNGSI PENUNJANG BISNIS DALAM LAPORAN TAHUNAN INI.”



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

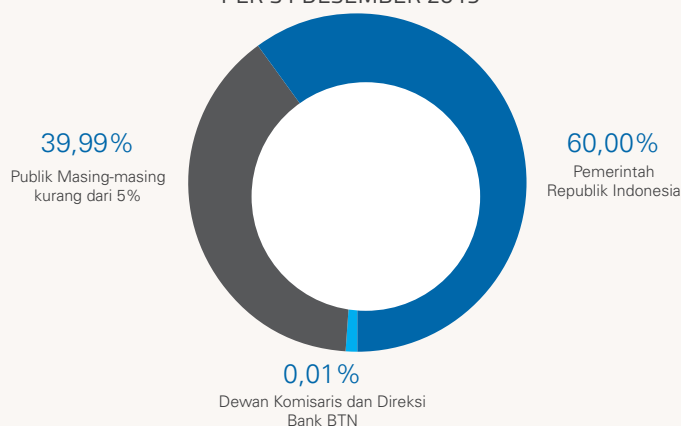
KEPEMILIKAN SAHAM BANK BTN

PER 31 DESEMBER 2019

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-juta)	Persentase Kepemilikan (%)
Nilai Nominal Saham = Rp500,-/lembar saham			
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih			
• Pemerintah Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1		
- Saham Seri B	6.353.999.999		
	6.354.000.000	3.177.000	60,00%
Kepemilikan Saham Kurang dari 5% (Saham Seri B)			
• Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN	911.100	456	0,01%
• Publik, Masing-masing Kurang dari 5%	4.235.088.900	2.117.544	39,99%
Jumlah	10.590.000.000	5.295.000	100,00%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK BTN

PER 31 DESEMBER 2019



Pemerintah Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan

Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Per 31 Desember 2019, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia memiliki 6.353.999.999

lembar Saham Biasa dan 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus, sehingga jumlah kepemilikan saham sebanyak 6.354.000.000 lembar dengan komposisi sebesar 60,00% dari jumlah keseluruhan saham yang diterbitkan Perseroan.

INFORMASI TENTANG 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR BANK BTN PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama Investor	Status	Domisili	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pemerintah Republik Indonesia	Pemerintah	Indonesia	6.354.000.000	60,00%
2.	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	Perseroan Terbatas	Indonesia	389.275.808	3,68%
3.	Citibank New York S/A Government of Norway - 15	Badan Usaha Asing	Norwegia	290.528.400	2,74%
4.	UI Equity Solid	Asuransi	Indonesia	131.623.300	1,24%
5.	JPMBLSAS UCITS CLT RE-HANDELSBANKENTILLVAXTMARKNAD Tema	Badan Usaha Asing	Swedia	122.000.000	1,15%
6.	PT Taspen (Persero)	Dana Pensiun	Indonesia	113.794.200	1,07%
7.	NT TST Co S/A Lsv Emerging Markets Equity Fund, LP	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	92.008.000	0,87%
8.	Citibank New York S/A Government of Norway - 23	Badan Usaha Asing	Norwegia	81.538.600	0,77%
9.	DJS Ketenagakerjaan Program JP	Perseroan Terbatas	Indonesia	77.756.000	0,73%
10.	Citibank New York S/A Government of Norway - 16	Badan Usaha Asing	Norwegia	70.000.000	0,66%
11.	PT Taspen (Asuransi) - Afs	Dana Pensiun	Indonesia	69.237.600	0,65%
12.	PT Prudential Life Assurance - Ref	Asuransi	Indonesia	61.935.400	0,58%
13.	JPMCB Na Re-Vanguard Total International Stock Index Fund	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	59.459.999	0,56%
14.	Jpmcb Na Re-Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	50.760.638	0,48%
15.	Citibank New York S/A Emerging Markets Core Equity Portfolio of Dfa Inv Dimensio	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	46.100.835	0,44%
16.	Reksa Dana Batavia Dana Saham - 898544000	Reksadana	Indonesia	44.972.300	0,42%
17.	Gic S/A Government of Singapore	Badan Usaha Asing	Singapura	40.582.200	0,38%
18.	Ssb 2q27 S/A Ishares Core Msci Emerging Markets Etf	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	39.701.876	0,37%
19.	Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	Reksadana	Indonesia	33.520.000	0,32%
20.	Citibank New York S/A Dimensional Emerging Markets Value Fund	Badan Usaha Asing	Amerika Serikat	31.640.327	0,30%



INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Berikut disampaikan transparansi informasi terkait kepemilikan saham oleh manajemen kunci, mencakup kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Nama dan Jabatan	2019		2018	
	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris				
Chandra Hamzah (Komisaris Utama)	-	-	-	-
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	-	-	-	-
Heru Budi Hartono (Komisaris)	-	-	-	-
Andin Hadiyanto (Komisaris)	-	-	-	-
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	-	-	-	-
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	-	-	-	-
Direksi				
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	453.100	0,0042786%	-	-
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	56.000	0,0005288%	-	-
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	236.600	0,0022342%	146.400	0,00%
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	70.200	0,0006629%	-	-
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	25.000	0,0002361%	-	-
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	70.200	0,0006629%	-	-
Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	-	-	-	-
Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	-	-	-	-
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi	911.100	0,0086034%	146.400	0,00%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

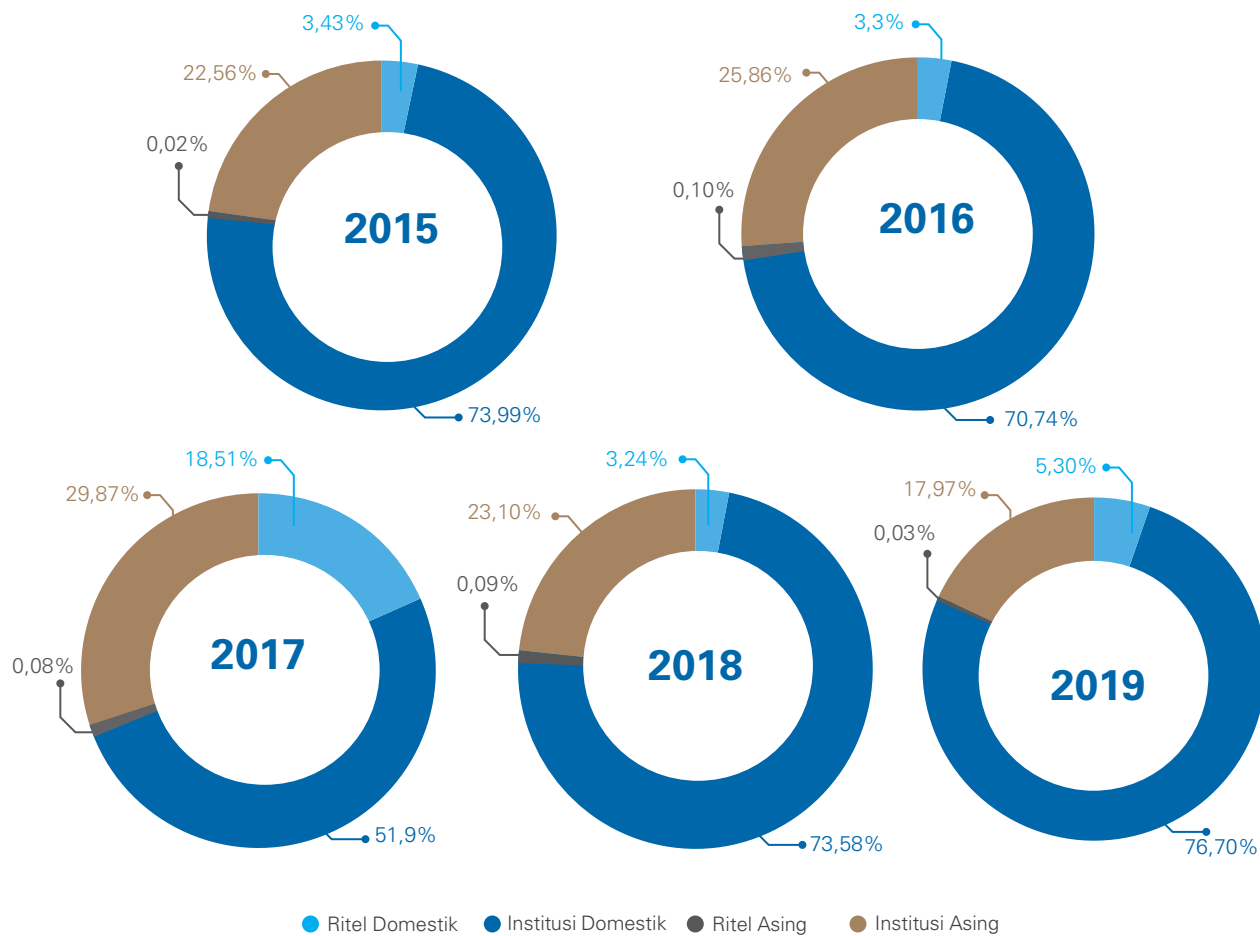
INFORMASI TENTANG STATUS PEMEGANG SAHAM

INFORMASI TENTANG STATUS PEMEGANG SAHAM
PER 31 DESEMBER 2019

Status Pemegang Saham	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	1	6.354.000.000	60,00%
Publik, Masing-masing Kurang dari 5%			
Pemodal Domestik			
Ritel Domestik			
• Perorangan	24.003	549.995.719	5,19%
• Karyawan Bank BTN	926	11.083.000	0,10%
Sub-Jumlah Ritel Domestik	24.929	561.078.719	5,30%
Institusi Domestik			
• Koperasi	5	1.172.500	0,01%
• Yayasan	16	30.951.947	0,29%
• Dana Pensiun	112	295.482.685	2,79%
• Asuransi	81	453.119.702	4,28%
• Perseroan Terbatas	80	488.197.438	4,61%
• Reksadana	223	499.999.390	4,72%
Sub-Jumlah Institusi Domestik	517	1.768.923.662	16,70%
Jumlah Pemodal Domestik	25.446	2.330.002.381	22,00%
Pemodal Asing			
Ritel Asing			
Perorangan	74	2.822.840	0,03%
Institusi Asing			
Badan Usaha	460	1.903.174.779	17,97%
Jumlah Pemodal Asing	534	1.905.997.619	18,00%
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Publik, Masing-masing Kurang dari 5%	25.980	4.236.000.000	40,00%
Jumlah Kepemilikan Saham	25.981	10.590.000.000	100,00%



PERKEMBANGAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK BTN BERDASARKAN STATUS 2015-2019





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

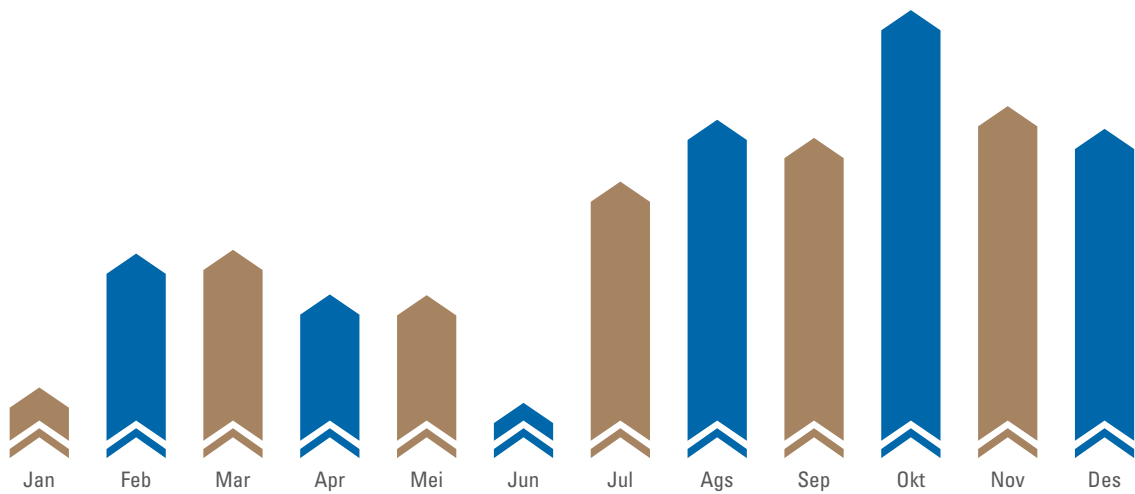


Laporan Keuangan Audited

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

INFORMASI TERKAIT PEMEGANG SAHAM MASING-MASING KURANG DARI 5%

PERGERAKAN JUMLAH PEMEGANG SAHAM PUBLIK BANK BTN
DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM MASING-MASING KURANG DARI 5%





INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR



“Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama/pengendali Bank BTN dengan kepemilikan sebesar 60,00%.”



Pendukung Bisnis



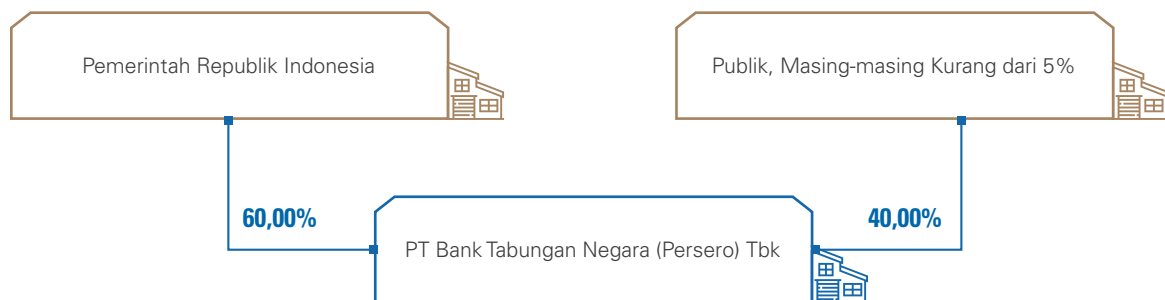
Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



Seperti telah diungkapkan di atas, 60,00% saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana 1 (satu) lembar saham diantaranya adalah Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Sisanya yaitu Saham Seri B dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 0,01% dan publik masing-masing kurang dari 5% sebanyak 39,99% yang didapatkan dari mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian, pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah Republik Indonesia / Kepresidenan

Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara No.3
RT.2/RW.3, Kel. Gambir
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10110, Indonesia

Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 3845627
www.setneg.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kantor Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 29935678
Fax. +62 21 29935740
www.bumn.go.id



INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP DAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA *JOINT VENTURE* (JV) SERTA *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)



Per 31 Desember 2019 maupun tanggal disampaikan data/informasi ini, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (Jv) ataupun *Special Purpose Vehicle* (Spv). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Terkait entitas induk, seperti yang telah disampaikan pada bagian kepemilikan saham, entitas induk Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham utama/pengendali yang juga bertindak sebagai entitas pemilik akhir, dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 60,00%.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

PENCATATAN SAHAM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO*), 17 DESEMBER 2009

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian IPO (*Initial Public Offering*) tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *oversubscribe* sebanyak 2,04 kali dengan nilai *proceed* sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan “Best IPO in Indonesia 2009” dari majalah The Asset dan “Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009” dari Publisher Alpha South Asia (Hong Kong).

Aksi Korporasi	: Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>)
Tahun Penerbitan Saham	: 17 Desember 2009
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan
Nilai Nominal Saham	: Rp500 per lembar saham
Harga Penawaran	: Rp800 per lembar saham
Jumlah Saham Sebelum IPO	: 0 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah IPO	: 8.623.285.575 lembar saham Seri B
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia

PENAWARAN UMUM TERBATAS I - *RIGHTS ISSUE*, 23 NOVEMBER 2012

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.

Aksi Korporasi	: Penawaran Umum Terbatas I - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / <i>Rights Issue</i>
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: 1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal Saham	: Rp500
Harga Pelaksanaan	: Rp1.235
Jumlah Saham Tercatat Sebelum <i>Rights Issue</i>	: 8.859.291.500
Jumlah Saham Tercatat Setelah <i>Rights Issue</i>	: 10.481.074.500 lembar saham
Jumlah Dana (<i>Proceeds</i>) Diterima	: Rp1.868.379.012.500
Rasio Konversi	: 555.000 Saham Lama berhak atas 94.943 HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 14,61% sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	: 23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	: 23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 23 November 2012
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	: PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas



KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA

Kronologi pencatatan efek lainnya yang dilakukan Perseroan terdiri dari pencatatan Obligasi, Sekuritisasi KPR, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), dengan kronologis sebagai berikut.

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI YANG MASIH AKTIF (Bursa Pencatatan: Bursa Efek Indonesia)

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu (Tahun)	Kupon (%)	Peringkat		Status
						2019	2018	
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	1.650.000	11 Juni 2010	11 Juni 2020	10	10,25%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	1.300.000	28 Juni 2011	28 Juni 2021	10	9,50%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	2.000.000	5 Juni 2012	5 Juni 2022	10	7,90%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	2.000.000	27 Maret 2013	27 Maret 2023	10	7,90%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	500.000	8 Juli 2015	8 Juli 2020	5	9,88%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	800.000	8 Juli 2015	8 Juli 2022	7	10,00%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	800.000	8 Juli 2015	8 Juli 2025	10	10,50%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	1.653.000	30 Agustus 2016	30 Agustus 2021	5	8,75%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	1.466.000	13 Juli 2017	13 Juli 2020	3	8,30%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	1.295.000	13 Juli 2017	13 Juli 2022	5	8,50%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu (Tahun)	Kupon (%)	Peringkat		Status
						2019	2018	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	853.000	13 Juli 2017	13 Juli 2024	7	8,70%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	1.386.000	13 Juli 2017	13 Juli 2027	10	8,90%	idAA+	idAA+	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	1.756.500	28 Juni 2019	8 Juli 2020	370 hari	7,750%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.168.000	28 Juni 2019	28 Juni 2022	3	8,750%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	1.219.500	28 Juni 2019	28 Juni 2024	5	9,000%	idAA+	-	Belum Jatuh Tempo
Jumlah	19.847.000							

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN
(Bursa Pencatatan: Bursa Efek Indonesia)

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi Bank BTN I Tahun 1989	50.000	5 tahun	25 Juli 1994 *)	18,75% tetap
Obligasi Bank BTN II Tahun 1990	50.000	5 tahun	1 Juni 1995 *)	16,25% tetap
Obligasi Bank BTN III Tahun 1991	50.000	5 tahun	11 November 1996 *)	20,00% tetap
Obligasi Bank BTN IV Tahun 1991	100.000	5 tahun	23 Januari 1996 *)	17,00% tetap
Obligasi Bank BTN V Tahun 1993	150.000	5 tahun	31 Juli 1998 *)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995	350.000	5 tahun	21 Desember 2000 *)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo



Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996	200.000	5 tahun	22 Juli 2001 *)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo
Obligasi Bank BTN VIII Tahun 1997	400.000	5 tahun	18 Juli 2002 *)	14,15% tetap
Obligasi Bank BTN IX Tahun 2003	750.000	5 tahun	2 Oktober 2008 *)	12,50% tetap
Obligasi Bank BTN X Tahun 2004	750.000	5 tahun	25 Mei 2009 *)	12,20% tetap
Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005	750.000	5 tahun	6 Juli 2010 *)	12,00% tetap
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	1.000.000	10 tahun	19 September 2016*)	12,75% tetap
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A	300.000	3 tahun	29 Mei 2012 *)	11,75% tetap
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B	300.000	4 tahun	29 Mei 2013 *)	12,00% tetap
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C	900.000	5 tahun	29 Mei 2014 *)	12,25% tetap
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	1.650.000	10 tahun	11 Juni 2020	10,25% tetap
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	1.300.000	10 tahun	28 Juni 2021	9,50% tetap
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	2.000.000	10 tahun	5 Juni 2022	7,90% tetap
Obligasi Berkelanjuta I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	2.000.000	10 tahun	27 Maret 2023	7,90% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A	900.000	3 tahun	8 Juli 2018 *)	9,625% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	500.000	5 tahun	8 Juli 2020	9,875% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	800.000	7 tahun	8 Juli 2022	10,00% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	800.000	10 tahun	8 Juli 2025	10,50% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	1.347.000	3 tahun	30 Agustus 2019*)	8,20% tetap
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	1.653.000	5 tahun	30 Agustus 2021	8,75% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	1.466.000	3 tahun	13 Juli 2020	8,30% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	1.295.000	5 tahun	13 Juli 2022	8,50% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	853.000	7 tahun	13 Juli 2024	8,70% tetap



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA

Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	1.386.000	10 tahun	13 Juli 2027	8,90% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	1.756.500	370 hari	8 Juli 2020	7,750% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.168.000	3	28 Juni 2022	8,750% tetap
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	1.219.500	5	28 Juni 2024	9,000% tetap
Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004	250.000	10 tahun	25 Mei 2014 **)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009.

KRONOLOGIS PENCATATAN *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* YANG JATUH TEMPO DI TAHUN 2019

Jenis NCD	Nominal	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
NCD Tahap IV 2017	540.000.000.000	13 Desember 2017	C	24 bulan	13 Desember 2019	6,60%	60.000.000.000
NCD Tahap I 2018	1.440.000.000.000	3 April 2018	B	12 bulan	2 April 2019	6,20%	610.000.000.000
NCD Tahap II 2018	690.000.000.000	18 Juli 2018	A	6 bulan	15 Januari 2019	7,60%	520.000.000.000
			B	12 bulan	16 Juli 2019	7,70%	170.000.000.000
NCD Tahap III 2018	2.020.000.000.000	5 November 2018	A	6 bulan	7 Mei 2019	8,30%	1.340.000.000.000
			B	9 bulan	2 Agustus 2019	8,40%	170.000.000.000
			C	12 bulan	5 November 2019	8,50%	510.000.000.000
NCD Tahap IV 2018	340.000.000.000	10 Desember 2018	A	3 bulan	12 Maret 2019	8,00%	80.000.000.000
			B	6 bulan	11 Juni 2019	8,40%	260.000.000.000
Jumlah	5.030.000.000.000						3.720.000.000.000

**NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) YANG TELAH DITERBITKAN**

Jenis NCD	Nominal Penerbitan	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
NCD Tahap I	625.000.000.000	5 Desember 2014	A	6 bulan	4 Juni 2015	9,00%	280.000.000.000
			B	12 bulan	27 November 2015	9,25%	45.000.000.000
			C	15 bulan	26 Februari 2016	9,50%	300.000.000.000
NCD Tahap II	1.005.000.000.000	26 Februari 2015	A	6 bulan	26 Agustus 2015	9,00%	470.000.000.000
			B	12 bulan	18 Februari 2016	9,25%	85.000.000.000
			C	15 bulan	19 Mei 2016	9,50%	10.000.000.000
			D	18 bulan	18 Agustus 2016	9,70%	440.000.000.000
NCD Tahap III	500.000.000.000	17 Februari 2015	E	5 bulan	15 Juli 2015	9,00%	500.000.000.000
NCD Tahap IV	1.110.000.000.000	30 April 2015	A	6 bulan	30 Oktober 2015	8,75%	330.000.000.000
			B	12 bulan	2 Mei 2016	9,00%	620.000.000.000
			C	18 bulan	31 Oktober 2016	9,25%	160.000.000.000
NCD Tahap I 2016	740.000.000.000	9 Juni 2016	A	3 bulan	9 September 2016	6,85%	740.000.000.000
NCD Tahap II 2016	1.115.000.000.000	5 Agustus 2016	A	3 bulan	3 November 2016	7,19%	440.000.000.000
			B	6 bulan	1 Februari 2017	7,47%	275.000.000.000
			C	12 bulan	10 Agustus 2017	7,80%	400.000.000.000
NCD Tahap III 2016	371.000.000.000	30 November 2016	A	3 bulan	28 Februari 2017	7,04%	20.000.000.000
			B	6 bulan	29 Mei 2017	7,26%	351.000.000.000
NCD Tahap IV 2016	500.000.000.000	29 Desember 2016	A	3 bulan	29 Maret 2017	7,75%	315.000.000.000
			B	6 bulan	3 Juli 2017	7,74%	185.000.000.000
NCD Tahap V 2016	500.000.000.000	30 Desember 2016		6 bulan	3 Juli 2017	7,73%	500.000.000.000



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA**NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) YANG TELAH DITERBITKAN**

Jenis NCD	Nominal Penerbitan	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
NCD Tahap I 2017	1.735.000.000.000	21 Februari 2017	A	6 bulan	22 Agustus 2017	7,28%	1.195.000.000.000
			B	12 bulan	16 Februari 2018	7,43%	540.000.000.000
NCD Tahap III 2017	550.000.000.000	3 Oktober 2017		12 bulan	2 Oktober 2018	6,50%	550.000.000.000
NCD Tahap II 2017	1.050.000.000.000	5 Oktober 2017	A	6 bulan	3 April 2018	6,00%	230.000.000.000
			B	12 bulan	5 Oktober 2018	6,25%	820.000.000.000
NCD Tahap IV 2017	540.000.000.000	13 Desember 2017	A	6 bulan	12 Juni 2018	5,90%	160.000.000.000
			B	12 bulan	13 Desember 2018	6,20%	320.000.000.000
NCD Tahap I 2018	1.440.000.000.000	3 April 2018	A	6 bulan	2 Oktober 2018	5,90%	830.000.000.000
NCD Tahap II 2018	690,000,000,000	18 Juli 2018	A	6 bulan	15 Januari 2019	7.60%	520,000,000,000
			B	12 bulan	16 Juli 2019	7.70%	170,000,000,000
NCD Tahap III 2018	2,020,000,000,000	5 November 2018	A	6 bulan	7 Mei 2019	8.30%	1,340,000,000,000
			B	9 bulan	2 Agustus 2019	8.40%	170,000,000,000
			C	12 bulan	5 November 19	8.50%	510,000,000,000
NCD Tahap IV 2018	340,000,000,000	10 Desember 2018	A	3 bulan	12 Maret 2019	8.00%	80,000,000,000
			B	6 bulan	11 Juni 2019	8.40%	260,000,000,000
Jumlah	14.831.000.000.000						14.831.000.000.000



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

BANK KUSTODIAN

Nama	: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telp	: +6221 515 2855
Fax	: +6221 5299 1199
E-mail	: helpdesk@ksei.co.id
Situs Web	: www.ksei.co.id
Bentuk Jasa	: Kustodian dan Agen Pembayaran
Periode Penugasan	: Sepanjang umur Efek Bersifat Utang
Biaya	: Rp 10.000.000 (Annual Fee/Efek Bersifat Utang) dan 0,05% dari Bunga Efek Bersifat Utang (Agen Pembayaran)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Nama	: PT Datindo Entrycom
Alamat	: Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120 - Indonesia
Telp	: (021) 350 8077
Fax	: (021) 350 8078
E-mail	: corporatesecretary@datindo.com
Situs Web	: https://www.datindo.com
Bentuk Jasa	: Biro Administrasi Efek untuk Saham
Periode Penugasan	: 9 Desember 2009 – sekarang
Biaya	: Rp263.692.000

WALI AMANAT

Nama	: PT. Bank Mega Tbk
Alamat	: Menara Bank Mega, Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia
Telp	: +6221 7917 5000
Fax	: +6221 7918 7100
E-mail	: waliamanat@bankmega.com
Situs Web	: www.bankmega.com
Bentuk Jasa	: Wali Amanat Obligasi
Periode Penugasan	: Sepanjang Umur Obligasi
Biaya	: Rp 79.000.000



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

Nama	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat	: Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia
Telp	: +6221 5245161
Fax	: +6221 5268201
E-mail	: rmtrustservices@bankmandiri.co.id
Situs Web	: www.bankmandiri.co.id
Bentuk Jasa	: Wali Amanat Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017
Periode Penugasan	: Sepanjang Umur Obligasi
Biaya	: Rp 85.000.000

PEMERINGKAT EFEK

Nama	: PT. Pemeringkat Efek Indonesia
Alamat	: Panin Tower, Senayan City 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia
Telp	: +6221 72782380
Fax	: +6221 7278 2370
E-mail	: -
Situs Web	: www.pefindo.com
Bentuk Jasa	: Pemeringkat
Periode Penugasan	: 1 Maret 2019 s.d. 1 Maret 2020
Biaya	: Rp 192.500.000

Nama	: PT. Fitch Ratings Indonesia
Alamat	: DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 Indonesia
Telp	: +6221 2988 6800
Fax	: +6221 29886822
E-mail	: -
Situs Web	: www.fitchratings.com
Bentuk Jasa	: Pemeringkat
Periode Penugasan	: Sepanjang umur Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
Biaya	: Rp 110.000.000



PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

AKUNTAN PUBLIK

Nama	: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
Alamat	: Gedung Indonesia Stock Exchange, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telp	: 021 52895000
Fax	: 021 52894100
E-mail	: -
Situs Web	: https://www.ey.com/id
Bentuk Jasa	: Audit Laporan Keuangan
Periode Penugasan	: 31 Desember 2019
Biaya	: 2.650.000.000

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR 2014-2019

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Jasa	Fee Audit (Rp)
2019	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No.603/KM.1/2015	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2018	2.650.000.000
2018	Yasir Izin No. AP.0703	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2018	2.367.000.000
2017	Yasir Izin No. AP.0703	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2017	2.290.000.000
2016	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2016	2.175.000.000
2015	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2015	1.967.000.000
2014	Benyanto Suherman Izin No. AP. 0685	Purwantono, Suherman & Surja Izin No. 381/KM.1.2010	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2014 Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2014	1.769.000.000



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**KONSULTAN HUKUM**

Nama	: Assegaf Hamzah & Partners
Alamat	: Capital Place, Level 36 & 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710, Indonesia
Telp	: (021) 2555 7800
Fax	: (021) 2555 7899
E-mail	: info@ahp.id
Situs Web	: https://www.ahp.id
Bentuk Jasa	: Profesi/Lembaga Penunjang RUPS
Periode Penugasan	: Sepanjang kegiatan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019
Biaya	Rp648.381.613

PENILAI

Nama	: Ashoya Ratam, SH. M.Kn
Alamat	: Jl. Suryo No.54, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180
Telp	: (021) 29236060
Fax	: -
E-mail	: notarisgeneralmail@ashoyaratam.com
Situs Web	: -
Bentuk Jasa	: Profesi/Lembaga Penunjang RUPS
Periode Penugasan	: Sepanjang kegiatan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019
Biaya	Rp32.450.000



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



1

Nama Penghargaan
4th Indonesia Living
Legend Companies
Award 2019

Kategori
Living Legend Company
Excellence Housing
Development Initiative

Acara
Indonesia Living
Legend Companies
Award

Penyelenggara
Warta Ekonomi

Tanggal
18 Januari 2019

2

Nama Penghargaan
2nd Satisfaction Loyalty
Engagement Awards
2019

Kategori
Peringkat II Satisfacation
Bank Umum
Konvensional Buku 3

Acara
Satisfaction Loyalty
Engagement Awards

Penyelenggara
Infobank

Tanggal
14 Maret 2019

3

Nama Penghargaan
2nd Satisfaction Loyalty
Engagement Awards
2019

Kategori
Peringkat II Satisfacation
(Teller) Bank Umum
Konvensional Buku 3

Acara
Satisfaction Loyalty
Engagement Awards

Penyelenggara
Infobank

Tanggal
14 Maret 2019

4

Nama Penghargaan
2nd Satisfaction Loyalty
Engagement Awards
2019

Kategori
Peringkat II Satisfacation
(Satpam) Bank Umum
Konvensional Buku 3

Acara
Satisfaction Loyalty
Engagement Awards

Penyelenggara
Infobank

Tanggal
14 Maret 2019

5

Nama Penghargaan
2nd Satisfaction Loyalty
Engagement Awards
2019

Kategori
Peringkat I NPS (Net
Promoter Score) Bank
Umum Konvensional
Buku 3

Acara
Satisfaction Loyalty
Engagement Awards

Penyelenggara
Infobank

Tanggal
14 Maret 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited



6

Nama Penghargaan
Indonesia WOW Brand
2019
Kategori
Gold Champion Category
Mortgage
Acara
Indonesia WOW Brand
Penyelenggara
Markplus, Inc.
Tanggal
14 Maret 2019

7

Nama Penghargaan
8th Anugerah BUMN
2019
Kategori
Big Corporate Kategori
Hubungan dengan
Stakeholder Terbaik I
Acara
Anugerah BUMN
Penyelenggara
BUMN Track
Tanggal
28 Maret 2019

8

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award
Kategori
2nd Best Overall
KPR Bank Umum
Konvensional
Acara
Digital Brand Award
Penyelenggara
Infobank & Isentia
Tanggal
16 Mei 2019

9

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award
Kategori
The Best Digital Brand
2014-2018 KPR Bank
Umum Konvensional
Acara
Digital Brand Award
Penyelenggara
Infobank & Isentia
Tanggal
16 Mei 2019

10

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award
Kategori
Peringkat I Deposito
Bank Umum
Konvensional
Acara
Digital Brand Award
Penyelenggara
Infobank & Isentia
Tanggal
16 Mei 2019



11



12



15



13



14



11

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award**Kategori**
Peringkat I Tabungan
Bank Umum
Konvensional**Acara**
Digital Brand Award**Penyelenggara**
Infobank & Isentia**Tanggal**
16 Mei 2019

12

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award**Kategori**
Peringkat I Kartu
Debit Bank Umum
Konvensional**Acara**
Digital Brand Award**Penyelenggara**
Infobank & Isentia**Tanggal**
16 Mei 2019

13

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award**Kategori**
Peringkat II Wealth Bank
Umum Konvensional**Acara**
Digital Brand Award**Penyelenggara**
Infobank & Isentia**Tanggal**
16 Mei 2019

14

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award**Kategori**
Peringkat I Bank Umum
Konvensional**Acara**
Digital Brand Award**Penyelenggara**
Infobank & Isentia**Tanggal**
16 Mei 2019

15

Nama Penghargaan
8th Digital Brand Award**Kategori**
Top Kredit KPR 2019
Kategori Perbankan
Pilihan Millenial**Acara**
Digital Brand Award**Penyelenggara**
Warta Ekonomi**Tanggal**
28 Juni 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

16 	17 	18 	19 	20 
Nama Penghargaan 7th Properti Indonesia Award 2019 Kategori The Biggest Mortgage Portfolio Acara Properti Indonesia Award Penyelenggara Properti Indonesia Tanggal 10 Juli 2019	Nama Penghargaan Indonesia Enterprise Risk Management Award - III 2019 Kategori 2nd - The Best Risk Management - 2019 Category Bank Company (Buku - III) Acara Indonesia Enterprise Risk Management Award Penyelenggara Economic Review Tanggal 3 Agustus 2019	Nama Penghargaan Indonesia Good Corporate Governance Award 2019 Kategori 3rd The Best Indonesia GCG Implementation - 2019 Kategori Public Bank Company - Buku III (Aset > 100T) Acara Indonesia Good Corporate Governance Award Penyelenggara Economic Review Tanggal 23 Agustus 2019	Nama Penghargaan Top Finance 2019 Kategori Top Bank 2019 Buku III Acara Top Finance Penyelenggara Top Business & Asia Business Research Center Tanggal 28 Agustus 2019	Nama Penghargaan Top Finance 2019 Kategori Top CEO Bank 2019 Acara Top Finance Penyelenggara Top Business & Asia Business Research Center Tanggal 28 Agustus 2019

**21**

Nama Penghargaan
Indonesia Best Issuers Award 2019

Kategori
The Best Issuers 2019 in Finance Sector (Asset Between 100 - 800T)

Acara
Indonesia Best Issuers Award

Penyelenggara
Pikiran Rakyat

Tanggal
29 Agustus 2019

22

Nama Penghargaan
14th Annual Indonesia Property & Bank Award 2019

Kategori
Bank BUMN Penyalur KPR FLPP Terbesar Selama Satu Dekade

Acara
Annual Indonesia Property & Bank Award

Penyelenggara
Properti & Bank

Tanggal
26 September 2019

23

Nama Penghargaan
BHUN Award

Kategori
BUMN Koordinator Tanggap Bencana Tahun 2018

Acara
BHUN Award

Penyelenggara
Kementerian BUMN

Tanggal
6 Oktober 2019

24

Nama Penghargaan
Indonesia Best Brand Award - Best Brand Platinum 2019

Kategori
Indonesia Best Brand Award for 9 Consecutive Years (2010-2019) Product Category KPR

Acara
Indonesia Best Brand Award - Best Brand Platinum

Penyelenggara
Majalah SWA & Mars Indonesia Digital

Tanggal
27 November 2019

25

Nama Penghargaan
Iconomics RRI Financial Awards 2019 "Millenials Choice"

Kategori
Brand Awareness, Brand Image Category Millennial's Admirable Brand in Bank Buku 3

Acara
Iconomics RRI Financial Awards

Penyelenggara
RRI & Iconomics

Tanggal
5 Desember 2019

26

Nama Penghargaan
Indonesia Best Brand Award - Best Brand Platinum 2019

Kategori
Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Acara
Indonesia Best Brand Award - Best Brand Platinum

Penyelenggara
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) & Majalah SWA

Tanggal
11 Desember 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

DAFTAR ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

KANTOR PUSAT



Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta
10130, Indonesia



+62 21 6336789 csd@btn.co.id
+62 21 6346704 www.btn.co.id



KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH 1

Kantor Wilayah Jawa Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 19
Bekasi 17143

Telp : +62 21 88953281, 88953282

Fax : +62 21 8849519

E-mail : kantorwilayah1@btn.co.id

KANTOR WILAYAH 2

Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten

Gedung Yodya Tower Lt. 3

Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003

RW 011, Kel. Cipinang Cempedak

Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Telp : +62 21 2301184, 31901656, 3905775

E-mail : kantorwilayah2@btn.co.id

KANTOR WILAYAH 3

Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara

Jl. Raya Darmo No. 123-125 Surabaya

Jawa Timur 60241

Telp : +62 31 5661704, 5661204

Fax : +62 31 5661696

E-mail : kantorwilayah3@btn.co.id

KANTOR WILAYAH 4

Kantor Wilayah Sumatera

Komplek Perkantoran Batam Center

Jl. Engku Putri No. 1, Kel. Belian,

Kec. Nongsa Batam Center

Telp : +62 778 7711331, 7711215, 7711661

E-mail : kantorwilayah4@btn.co.id

KANTOR WILAYAH 5

Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua

Jl. Sultan Hassanudin No. 1 Makassar

Telp : +62 411 5070760

E-mail : kantorwilayah5@btn.co.id

KANTOR WILAYAH 6

Kantor Wilayah Jawa Tengah & DIY

Jl. M.T. Haryono No. 717

Semarang 50242

Telp : +62 24 8455932

E-mail : kantorwilayah6@btn.co.id

**KANTOR CABANG****KANTOR CABANG KONVENSIONAL
WILAYAH 1****Kantor Cabang Bandung**

Jl. Jawa No. 7 Bandung 40117

Telp : +62 22 4232112, 4241036,
4241034

Fax : +62 22 4204562

E-mail : kc.bandung@btn.co.id

Kantor Cabang BogorJl. Pengadilan No. 13-15
Bogor 16121

Telp : +62 251 8311700

Fax : +62 251 8323007, 8351432

E-mail : kc.bogor@btn.co.id

Kantor Cabang BekasiJl. Jend. Sudirman No. 19
Bekasi 17143

Telp : +62 21 8840649

Fax : +62 21 8849519

E-mail : kc.bekasi@btn.co.id

Kantor Cabang DepokJl. Margonda Raya No. 186
Depok 16423

Telp : +62 21 7751236, 7751237

Fax : +62 21 7772927

E-mail : kc.depok@btn.co.id

Kantor Cabang KarawangJl. Kertabumi No. 29 A-D,
Karawang 41311 Jawa Barat

Telp : +62 267 412282, 412283

Fax : +62 267 412247

E-mail : kc.karawang@btn.co.id

Kantor Cabang CikarangPertokoan Cikarang Center City
Blok B No 2, 3, 5, 6

Jl. Raya Cikarang - Cibirusah, 17750

Kabupaten Bekasi

Telp : +62 21 22180085,
22180086

Fax : +62 21 8936418

E-mail : kc.cikarang@btn.co.id

Kantor Cabang CirebonJl. Siliwangi No. 16
Cirebon 45121

Telp : +62 2 31 209143, 209153

Fax : +62 2 31 209777

E-mail : kc.cirebon@btn.co.id

Kantor Cabang PurwakartaJl. RE. Martadinata No. 1
Purwakarta 41114Telp : +62 264 201024, 210830,
210831, 206637

Fax : +62 264 201591

E-mail : kc.purwakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Cibubur

Ruko Madison Blok B1 No. 6-8

Cibubur Time Square

Jl. Raya Alternatif Transyogi Km. 3

Cibubur-Bekasi 17435

Telp : +62 21 84300071,
84300073

E-mail : kc.cibubur@btn.co.id

Kantor Cabang Harapan Indah Bekasi

Ruko Office Park Harapan Indah

Blok OP Kavling No. OP1-01 & OP1-02

Harapan Indah - Bekasi 17132

Telp : +62 21 88386971(hunting),
88386972, 88386974

Fax : +62 21 88386974

E-mail : kc.harapanindah@btn.co.id

Kantor Cabang TasikmalayaJl. Sutisna Senjaya No. 101
Tasikmalaya 46112

Telp : +62 265 334464, 334465

Fax : +62 265 330884

E-mail : kc.tasikmalaya@btn.co.id

Kantor Cabang CimahiJl. Jend. Amir Machmud/Raya Timur
No. 475 Cimahi 40524

Telp : +62 22 6651644, 6651645

Fax : +62 22 6652586

E-mail : kc.cimahi@btn.co.id

Kantor Cabang SukabumiJl. Jendral Sudirman No. 49,
Kel. Sriwedari, Kec. Gunung Puyuh
Sukabumi - Jawa Barat

Telp : +62 266 223446, 235951

Fax : +62 266 223447

E-mail : kc.sukabumi@btn.co.id

Kantor Cabang Bandung TimurJl. Raya Cinunuk No. 223 A
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung

Telp : +62 22 7816883

Fax : +62 22 7838482, 7816876

E-mail : kc.bandungtimur@btn.co.id

Kantor Cabang CibinongRuko Cibinong City Centre Blok B20-
21 & D20-21 Jl. Tegar Beriman Kel.
Pakansari

Kec. Cibinong - Kab. Bogor

Telp : (021) 83721442

Fax : -

E-mail : kc.cibinong@btn.co.id



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

DAFTAR ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG**KANTOR CABANG KONVENSIIONAL
WILAYAH 2****Kantor Cabang Jakarta Kuningan**

Wisma Budi Lt. 1 & 2
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C6
Jakarta Selatan 12940
Telp : +62 21 52964652
Fax : +62 21 52964974
E-mail : kc.jakartakuningan@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Harmoni

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
Telp : +62 21 6336789, 6332666,
2310490
Fax : +62 21 6386593, 6332676,
6333021
E-mail : kc.jakartaharmoni@btn.co.id

Kantor Cabang Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01
Tangerang 15118
Telp : +62 21 5539363
Fax : +62 21 5537977, 5581186
E-mail : kc.tangerang@btn.co.id

Kantor Cabang Kelapa Gading Square

Gedung Emerald Tower
Jl. Boulevard Barat Blok XB No. 3
Kelapa
Gading - Jakarta Utara 14240
Telp : +62 21 45866883,
45866884
Fax : +62 21 45866885
E-mail : kc.kelapagadingsquare@btn.co.id

Kantor Cabang Ciputat

Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat
Tangerang Selatan 15411
Telp : +62 21 7445145
Fax : +62 21 7490968, 7402731
E-mail : kc.ciputat@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk

Jl. Anggrek No. 01 Kel. Kelapa Dua
Kec. Kebon Jeruk Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11550
Telp : +62 21 53666345
Fax : +62 21 59666344
E-mail : kc.jakartakebonjeruk@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Cawang

Gedung Yodya Tower Lt. 1-2
Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003,
RW 011
Kel. Cipinang Cempedak
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Telp : +62 21 22986826, 22986827
Fax : +62 21 21012381
E-mail : kc.jakartacawang@btn.co.id

Kantor Cabang Cilegon

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49
Cilegon 42414
Telp : +62 254 391766, 392681,
393479
Fax : +62 254 393480
E-mail : kc.cilegon@btn.co.id

Kantor Cabang Bumi Serpong Damai

Kompleks BSD, Ruko Sektor VII E
Blok K No. 8
Jl. Raya Serpong, Tangerang 15310
Telp : +62 21 5372235, 5372237
Fax : +62 21 5372238
E-mail : kc.bumiserpongdamai@btn.co.id

Kantor Cabang Karawaci

Perumnas Karawaci I
Jl. Cendrawasih No. 1, Tangerang
15115
Telp : +62 21 5517849, 5517850
Fax : +62 21 5524367, 5511420
E-mail : kc.karawaci@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Melawai

Jl. Melawai Raya No. 19 C-D,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp : +62 21 27517843, 27517840
Fax : +62 21 27517858
E-mail : kc.jakartamelawai@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Pluit

Jl. Pluit Kencana Raya No. 79, Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telp : +62 21 97115586
Fax : +62 21 66601530
E-mail : kc.jakartapluit@btn.co.id

Kantor Cabang Bintaro Jaya

CBD Bintaro Blok B7 No. A3 - 04A, Kel.
Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan
Telp : +62 21 22215981
Fax : +62 21 22215983
E-mail : kc.bintarojaya@btn.co.id

**KANTOR CABANG KONVENSIIONAL
WILAYAH 3****Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Pemuda No. 50 Surabaya 60271
Telp : +62 31 5353513, 5353519
Fax : +62 31 5345073, 5458002
E-mail : kc.surabaya@btn.co.id

Kantor Cabang Denpasar

Jl. Dewi Sartika No. 2
Denpasar 80114
Telp : +62 361 243811
Fax : +62 361 243815
E-mail : kc.denpasar@btn.co.id

Kantor Cabang Malang

Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4
Malang 65119
Telp : +62 341 323956
Fax : +62 341 323959, 350050
E-mail : kc.malang@btn.co.id

**Kantor Cabang Sidoarjo**

Jl. Ahmad Yani No. 15, Sidoarjo 61212
Telp : +62 31 8929211, 8957949,
8957950
Fax : +62 31 8957951
E-mail : kc.sidoarjo@btn.co.id

Kantor Cabang Mataram

Jl. Pejangik No. 99-101 Cakranegara
Mataram 83121
Telp : +62 370 631186, 638289
Fax : +62 370 634542
E-mail : kc.mataram@btn.co.id

Kantor Cabang Kupang

Jl. Jend. Sudirman No. 87 Kupang
85119
Telp : +62 380 831004
Fax : +62 380 833741
E-mail : kc.kupang@btn.co.id

Kantor Cabang Bangkalan

Jl. Teuku Umar No. 16
Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan
69116
Telp : +62 31 3098929, 3098831,
3098930
Fax : +62 31 3098834
E-mail : kc.bangkalan@btn.co.id

Kantor Cabang Madiun

Jl. Dr. Sutomo No. 38, Madiun 63116
Telp : +62 351 451460,
459034, 459034, 457927,
459500
Fax : +62 351 463510
E-mail : kc.madiun@btn.co.id

Kantor Cabang Jember

Jl. A. Yani No. 05 Jember 68118
Telp : +62 3 31 484611, 489292,
489266
Fax : +62 3 31 484617
E-mail : kc.jember@btn.co.id

Kantor Cabang Kediri

Jl. Diponegoro No. 22 - 24 Kediri
64121
Telp : +62 354 691260, 691262
Fax : +62 354 691265
E-mail : kc.kediri@btn.co.id

Kantor Cabang Gresik

Kompleks Pertokoan Multi Sarana
Plaza
Blok C 01 No. 1
Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118
Telp : +62 31 3973455
Fax : +62 31 3973456
E-mail : kc.gresik@btn.co.id

Kantor Cabang Surabaya Bukit Darmo

Jl. Mayjend HR Muhammad Kav. 399
Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
Telp : +62 31 7323344, 7322146,
7322147
Fax : +62 31 7232899
E-mail : kc.surabayabukitdarmo@
btn.co.id

Kantor Cabang Mojokerto

Jl. Majapahit No. 130 - 134 Blok1-2
Mojokerto 61323
Telp : +62 321 323850, 323853
Fax : +62 321 323853

Kantor Cabang Banyuwangi

Jl. Brawijaya No. B-1 dan B-2
Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi
Kab. Banyuwangi 68418
Telp : +62 333 414490, 415690
Fax : +62 333 415676
E-mail : kc.banyuwangi@btn.co.id

**KANTOR CABANG KONVENSIONAL
WILAYAH 4****Kantor Cabang Medan**

Jl. Pemuda No. 10A Medan 20151
Telp : +62 61 4149777
Fax : +62 61 4158112, 4153203
E-mail : kc.medan@btn.co.id

Kantor Cabang Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 125
Palembang 30128
Telp : +62 711 411175, 410552
Fax : +62 711 410854
E-mail : kc.palembang@btn.co.id

Kantor Cabang Batam

Jl. Engku Putri No.1, Kel. Belian
Nongsa Batam Center
Telp : +62 778 470630, 470625,
470628
Fax : +62 778 457262, 453923
E-mail : kc.batam@btn.co.id

Kantor Cabang Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 393
Pekanbaru 28116
Telp : +62 761 40494, 40185,
40188
Fax : +62 761 32271, 44776
E-mail : kc.pekanbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Padang

Jl. H. R. Rasuna Said No. 3, Jati Baru
Padang Tim, Kota Padang 25129
Telp : +62 751 31903, 32094,
32096
Fax : +62 751 31900, 34938
E-mail : kc.padang@btn.co.id

Kantor Cabang Jambi

Jl. H. M. Yusuf Singadikane No. 146,
Jambi
Telp : +62 741 61793, 61792
Fax : +62 741 62665
E-mail : kc.jambi@btn.co.id

Kantor Cabang Pematang Siantar

Jl. Sutomo No. 5 G-H, Kel. Proklamasi
Kec. Pematang Siantar Barat -
Pematang Siantar
Telp : +62 622 28887
Fax : +62 62224020
E-mail : kc.pematangsiantar@btn.co.id



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

DAFTAR ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG**Kantor Cabang Bandar Lampung**

Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
Bandar Lampung 35215
Telp : +62 721 489253, 489255,
484778, 483256
Fax : +62 721 489252
E-mail : kc.bandarlampung@btn.co.id

Kantor Cabang Bengkulu

Jl. Soeprapto No. 7 - 8, Bengkulu
38223
Telp : +62 736 20875
Fax : +62 736 20874
E-mail : kc.bengkulu@btn.co.id

Kantor Cabang Tanjung Pinang

Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza
Bintan Center Blok Bunga No. 9-12
Tanjung Pinang
Telp : +62 771 7447101, 7447088
Fax : +62 771 7447082
E-mail : kc.tanjungpinang@btn.co.id

Telp Kantor Cabang Pangkal Pinang

Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade
Center B11 - B14 - Pangkal Pinang
Telp : +62 717 423748
Fax : +62 717 488706
E-mail : kc.pangkalpinang@btn.co.id

Kantor Cabang Banda Aceh

Jl. Sri Ratu Afiatuddin No. 19 - 23 ,
Gampong Peunayong, Banda Aceh
Telp : +62 651 35756, 35757
Fax : +62 651 35758
E-mail : kc.bandaaceh@btn.co.id

**KANTOR CABANG KONVENSIONAL
WILAYAH 5****Kantor Cabang Makassar**

Jl. Kajaolalido No. 4 Makassar 90111
Telp : +62 411 316016, 316011
Fax : +62 411 316388
E-mail : kc.makassar@btn.co.id

Kantor Cabang Banjarmasin

Jl. R. E. Martadinata No. 4
Banjarmasin 70111
Telp : +62 511 4368133, 4366669,
4366670
Fax : +62 511 4366492,
43363964
E-mail : kc.banjarmasin@btn.co.id

Kantor Cabang Samarinda

Jl. RE. Martadinata No. 01
Samarinda 75127
Telp : +62 541 736930, 731695,
731510
Fax : +62 541 737698
E-mail : kc.samarinda@btn.co.id

Kantor Cabang Pontianak

Jl. Imam Bonjol No. 29
Pontianak 78122
Telp : +62 561 740163
Fax : +62 561 740168
E-mail : kc.pontianak@btn.co.id

Kantor Cabang Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani Km 33 RT 01 RW 01
Loktabak Utara, Banjarbaru
Kalimantan Selatan 71114
Telp : +62 511 774116, 774171
Fax : +62 511 774116
E-mail : kc.banjarbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Manado

Jl. Wolter Monginsidi No. 56
Manado 95115
Telp : +62 431 868095, 855504,
855505
Fax : +62 431 868013, 863416
E-mail : kc.manado@btn.co.id

Kantor Cabang Jayapura

Jl. Koti No. 22 Jayapura 99111
Telp : +62 967 537970, 537971
Fax : +62 967 533373
E-mail : kc.jayapura@btn.co.id

Kantor Cabang Kendari

Jl. A. Yani , Komplek A. Yani Square
Blok. A6-7 Kendari 93117
Telp : +62 401 322101
Fax : +62 401 322502
E-mail : kc.kendari@btn.co.id

Kantor Cabang Ambon

Jl. Diponegoro No. 75B Ambon
Telp : +62 911 355882, 354471,
348552, 355882
Fax : +62 911 348559
E-mail : kc.ambon@btn.co.id

Kantor Cabang Palu

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Palu 94111
Telp : +62 451 424555, 428555
Fax : +62 451 425993
E-mail : kc.palu@btn.co.id

Kantor Cabang Palangkaraya

Jl. Diponegoro No. 23 Palangkaraya
73111
Telp : +62 536 3223407, 3222698,
3224136
Fax : +62 536 3221020
E-mail : kc.palangkaraya@btn.co.id

Kantor Cabang Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 141, Balikpapan
Telp : +62 542 420333
Fax : +62 542 420896
E-mail : kc.balikpapan@btn.co.id

Kantor Cabang Gorontalo

Jl. Prof. HB. Yasin No. 55, Kel Limba
U2,
Kota Selatan - Gorontalo
Telp : +62 435 830490, 829481
Fax : +62 435 826707, 823943
E-mail : kc.gorontalo@btn.co.id

**Kantor Cabang Ternate**

JL. Pahlawan Revolusi (Samping Kantor Pos Ternate)
Kel. Gamalama, Ternate Tengah - Maluku Utara
Phone : +62 921 3111330
Fax : +62 921 3126968
E-mail : kc.ternate@btn.co.id

Kantor Cabang Panakukang

Jl. Hertasning Blok I No. 2 Makassar 90222
Phone : +62 411 868831, 868833
Fax : +62 411 868833
E-mail : kc.panakukang@btn.co.id

Kantor Cabang Tarakan

Jl. Mulawarman No.10 RT.73
Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
Phone : (0551) 24322
Fax : -
Email : kc.tarakan@btn.co.id

**KANTOR CABANG KONVENSIONAL
WILAYAH 6****Kantor Cabang Semarang**

Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242
Phone : +62 24 312151, 446166
Fax : +62 24 312186
E-mail : kc.semarang@btn.co.id

Kantor Cabang Yogyakarta

Jl. Jend. Sudirman No. 71
Yogyakarta 55223
Phone : +62 274 589898, 581014, 581016
Fax : +62 274 561289
E-mail : kc.yogyakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo 57141
Phone : +62 271 726930
Fax : +62 271 726931
E-mail : kc.solo@btn.co.id

Kantor Cabang Pekalongan

Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan 51113
Phone : +62 285 433883, 433884, 433484, 433917, 413222
Fax : +62 285 433926, 413902
E-mail : kc.pekalongan@btn.co.id

Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Jend. Sudirman No. 431
Purwokerto 53116
Phone : +62 281 641114
Fax : +62 281 638386
E-mail : kc.purwokerto@btn.co.id

Kantor Cabang Tegal

Jl. Gajah Mada No. 33 - Tegal
Phone : +62 283 343050, 343835, 323038
Fax : +62 283 357439
E-mail : kc.tegal@btn.co.id

Kantor Cabang Kudus

Jl. Ahmad Yani No. 45 Kel. Panjunan
Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59312
Phone : +62 291 438732
Fax : +62 291 4250112
E-mail : kc.kudus@btn.co.id

Kantor Cabang Magelang

Jl. Tentara Pelajar No. 40, Magelang
Phone : +62 293 3215983
Fax : +62 293 3215463
E-mail : kc.magelang@btn.co.id

**KANTOR CABANG SYARIAH****Kantor Cabang Syariah Bekasi**

Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A.IV No.5-6 dan
Blok B No. 1 Kel. Kayuringin Jaya
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Phone : +62 21 8893333
Fax : +62 21 88956655
E-mail : kcs.bekasi@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bandung

Jl. Diponegoro No. 8, Bandung
Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan
Bandung 40115
Phone : +62 22 4265472, 4265473, 4265474
Fax : +62 22 4265385
E-mail : kcs.bandung@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bogor

Jl. Jendral Sudirman No. 01,
Kec. Bogor Tengah, Bogor 16121
Phone : +62 251 8327171, 8327575
Fax : +62 251 8324567
E-mail : kcs.bogor@btn.co.id



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

DAFTAR ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG**Kantor Cabang Syariah Cirebon**

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
No. 91 Indramayu Cirebon
Phone : +62 231 235485, 235486,
235488
Fax : +62 231 205790
E-mail : kcs.cirebon@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya

Jl. Yudanegara No. 10
Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya 46112
Phone : +62 265 310612, 7296566,
7296567, 7296568
Fax : +62 265 310613
E-mail : kcs.tasikmalaya@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH WILAYAH 2**Kantor Cabang Syariah Jakarta
Harmoni**

Jl. Suryo Pranoto No. 9 B-D
Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10130
Phone : +62 21 3860617, 3860620,
3864265
Fax : +62 21 3447271, +62 21
3857706
E-mail : kcs.jakartaharmoni@btn.co.id

**Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar
Minggu**

Jl. Ruko Grand Palace Blok G & H,
Jl. Raya Ps. Minggu Km 16
Pancoran - Jakarta Selatan
Phone : +62 21 7993662, 7993015
Fax : +62 21 7993174
E-mail : kcs.pasarminggu@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tangerang

Jl. Serpong Raya, Ruko Villa
Melati Mas Blok. SR-1 No. 23-24
Serpong - Tangerang 15320
Phone : +62 21 5370773
Fax : +62 21 5370744
E-mail : kcs.tangerang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Serang

Jl. Jend Ahmad Yani No. 175, Cipete
Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota
Serang - Banten
Phone : +62 254 7915869
Fax : +62 254 7915900
E-mail : kcs.cilegon@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH WILAYAH 3**Kantor Cabang Syariah Surabaya**

Jl. Diponegoro No. 29 Surabaya 60271
Phone : +62 31 5666363, 5610518
Fax : +62 31 5610519
E-mail : kcs.surabaya@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Malang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87
Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen
Kota Malang 65112
Phone : +62 341 3012469
Fax : +62 341 579777
E-mail : kcs.malang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Mataram

Jl. Pejangik No. 18-19 Kel.
Cakranegara Kab. Mataram
Phone : +62 370 7503646
E-mail : kcs.mataram@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH WILAYAH 4**Kantor Cabang Syariah Batam**

Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29
Pelita - Batam 29432
Phone : +62 778 421921, 437880
Fax : +62 778 422126
E-mail : kcs.batam@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Medan

Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan
Phone : +62 61 4144554
Fax : +62 61 4144546
E-mail : kcs.medan@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur
Kec. Tampan Pekanbaru
Telp : +62 761 7891314
Fax : +62 761 7891313
E-mail : kcs.pekanbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palembang

Jl. Veteran No. 325 - 329,
Palembang 30114
Telp : +62 711 355417, 355963
Fax : +62 711 313366
E-mail : kcs.palembang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jl. Teuku Umar No. 430-432
Kel. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru
Banda Aceh 23236
Telp : +62 651 40330
Fax : +62 651 40331
E-mail : kcs.bandaceh@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH WILAYAH 5**Kantor Cabang Syariah Makassar**

Jl. Slamet Riyadi No. 7 A
Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang
90111
Telp : +62 411 3613399, 3613499
Fax : +62 411 320785
E-mail : kcs.makassar@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Jl. Jend Ahmad Yani KM 5,5 No. 456
Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin
Timur
Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan
Telp : +62 511 3250530, 3250540,
3250560
Fax : +62 511 3260900
E-mail : kcs.banjarmasin@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No. 565 - 566
Balikpapan 76114
Telp : +62 542 742260, 742258
Fax : +62 542 742229
E-mail : kcs.balikpapan@btn.co.id

**Kantor Cabang Syariah Kendari**

Jl. MT Hariyono Desa/Kelurahan
Bende, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara.

Telp : -

Fax : -

E-mail : kcs.kendari@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Semarang

Jl. Achmad Yani No. 181 Kel. Wonodri
Kec. Semarang Selatan, Kota
Semarang

Telp : +62 24 8449918, 8449919

Fax : +62 24 8410825

E-mail : kcs.semarang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palembang

Jl. Veteran No. 325 - 329,
Palembang 30114

Telp : +62 711 355417, 355963

Fax : +62 711 313366

E-mail : kcs.palembang@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH WILAYAH 6**Kantor Cabang Syariah Yogyakarta**

Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru
Gondokusuman Yogyakarta 55224

Telp : +62 274 551055, 512467

Fax : +62 274 551056

E-mail : kcs.yogyakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tegal

Jl. Gajah Mada No. 107, Kel. Pekauman
Kec. Tegal Barat Kota Tegal
Jawa Tengah 52113

Telp : +62 283 342923 ,342933

Fax : +62 283 342913

E-mail : kcs.tegal@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jl. Teuku Umar No. 430-432
Kel. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru
Banda Aceh 23236

Telp : +62 651 40330

Fax : +62 651 40331

E-mail : kcs.bandaceh@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Solo

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332
Solo 57141

Telp : +62 271 712127, 7008978,
7008947

Fax : +62 271 717276

E-mail : kcs.solo@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Kel, Sidomulyo Timur
Kec. Tampan Pekanbaru

Telp : +62 761 7891314

Fax : +62 761 7891313

E-mail : kcs.pekanbaru@btn.co.id



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

JARINGAN MITRA USAHA

Perseroan senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga menjalankan berbagai kemitraan bisnis dalam rangka penyediaan layanan produk perbankan serta kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Perseroan dengan mitra usaha di antaranya sebagai berikut:

Instansi/Lembaga	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Telkomsel	TCASH-BTN
Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	KPR Atlet
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Konstruksi Properti
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kredit Investasi
Blue Bird	Pembiayaan Perumahan
PPDPP	Kredit KPR
PT SMF	Kredit KPR
Grab Indonesia	Kredit KPR
Gojek	Kredit KPR
PNM	Program Kemitraan



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN



Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.btn.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang korporasi Bank BTN, baik itu login *E-Banking* bagi nasabah, informasi seputar korporasi dan produk-produk Perseroan, profil, pengelolaan organisasi dan transparansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan situs web sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	✓	Struktur Grup Perusahaan dalam bentuk tabel, https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami
Isi Kode Etik	✓	https://www.btn.co.id/id/Tata-Kelola pada kanal "Tata Kelola Perusahaan"
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	✓	https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home pada kanal "RUPS"
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	✓	https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home pada kanal "Laporan Perusahaan"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	✓	https://www.btn.co.id/Tentang-Kami pada kanal "Kepemimpinan"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	✓	https://www.btn.co.id/id/Tata-Kelola pada kanal "Tata Kelola Perusahaan"

✓ = tersedia pada situs web Perseroan | ✗ = belum tersedia pada situs web Perseroan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris (Periode Aktif 27 November - 31 Desember 2019)				
Chandra Martha Hamzah (Komisaris Utama/ Independen)	<i>In House</i>	Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 16 Desember 2019	Ikatan Bankir Indonesia
Armand B Arief (Komisaris Independen)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 4 "Credit Risk and Operational Risk Management"	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	-	-	-	-
Eko D Heripoerwanto (Komisaris)	Seminar	"60 th Komisaris Profesional"	Jakarta, 20-21 November 2019	Intipesan
	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 3-4 Juli 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Heru Budi Hartono (Komisaris)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 1 Komisaris "Credit Risk Management"	Jakarta, 16 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Andin Hadiyanto (Komisaris)	<i>In House</i>	Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 16 Desember 2019	Ikatan Bankir Indonesia
Dewan Komisaris (Periode Aktif 1 Januari - 26 November 2019)				
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/ Independen)	-	-	-	-
Asmawi Syam (Komisaris Utama/ Independen)	-	-	-	-
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Seminar	<i>Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0</i>	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	<i>Conference #ECIIA2019</i>	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	<i>2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR"</i>	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	<i>The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0</i>	Denpasar, 5-6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
Lucky Fathul Aziz H (Komisaris Independen)	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	<i>Conference #ECIIA2019</i>	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	<i>2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR"</i>	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	<i>The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0</i>	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	<i>ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System</i>	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
Iman Sugema (Komisaris)	Seminar	<i>Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0</i>	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Sumiyati (Komisaris)	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

**PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	-	-	-	-
Maurin Sitorus (Komisaris)	-	-	-	-
Parman Nataatmadja (Komisaris)	-	-	-	-
Direksi (Periode Aktif 27 November - 31 Desember 2019)				
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Credit Risk and Operational Risk Management"	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Andi Nirwoto (Direktur It & Operation)	<i>In House</i>	Program Refreshment UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)"	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur <i>Collection & Asset Management</i>)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 18 September 2019 & 06 Oktober 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Hirwandi Gafar (Direktur <i>Consumer & Commercial Lending</i>)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 11 Desember 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Jasmin (Direktur <i>Distribution & Retail Funding</i>)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 11 Desember 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Nixon L.P Napitupulu (Direktur <i>Finance Treasury & Strategy</i>)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)"	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	PSAK 71 <i>Impairment Deep Dive In Risk Management Perspective & CSG-CIMB 13Th Annual Indonesia Conference</i>	Bali, 27-28 Juni 2019	Bankers Association for Risk Management
	<i>In House</i>	Pembekalan & Sertifikasi <i>Treasury Dealer Level Advance</i>	Jakarta, 24-30 Agustus 2019	ACI FMA Indonesia
	Seminar	<i>The 1 st ASEAN CPA Conference 2020</i>	Bali, 16-17 Oktober 2019	Institusi Akuntan Manajemen Indonesia
Setiyo Wibowo (Direktur <i>Enterp Risk Mgt, Big Data & Analytic</i>)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Credit Risk and Operational Risk Management"	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Yossi Istanto (Direktur <i>Human Capital Legal & Compliance</i>)	Seminar	<i>Leadership, Entrepreneurship And Innovation In The Global Economy</i>	London, 25-29 Maret 2019	Asean Global Leadership Program
Direksi (Periode Aktif 1 Januari - 26 November 2019)				
Maryono (Direktur Utama)	Workshop	Program Membangun Bangsa Melalui Penguatan Sinergi dan Solidaritas BUMN	Bandung, 10-12 Maret 2019	Kementrian BUMN
	Workshop	Rakor CEO BUMN Tahun 2019	Belitung, 2-3 April 2019	Kementrian BUMN
	Workshop	Auditor's Talk Untuk Penguatan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN	Jakarta, 9 Mei 2019	Kementrian BUMN
Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur <i>Commercial Banking</i>)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)"	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>The 1 st ASEAN CPA Conference 2019</i>	Bali, 16-17 Oktober 2019	Institusi Akuntan Manajemen Indonesia
Budi Satria (Direktur <i>Consumer Banking</i>)	<i>In House</i>	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Jakarta, 14-15 November 2019	Iqtishad
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur <i>Compliance</i>)		<i>International Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification</i>	Moscow, 29 Juni - 27 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
		Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Digital Banking And Fintech (Operational Risk Management Approach)"	Bandung, 23 April 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
		Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta, 27 Juni 2019	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

**PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Komite Audit				
Kamaruddin Sjam	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019 2019 National Conference IIA	France - Luxembourg – Brussel, 16 – 22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	"Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24 – 25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
Lucky Fathul Aziz H	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019 2019 National Conference IIA	France - Luxembourg – Brussel, 16 – 22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	"Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24 – 25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
	Seminar			
Garuda Wiko	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Komite Remunerasi dan Nominasi				
Arie Coerniadi	Seminar	Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0	Barcelona – Milan - Nice, 13 – 23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Kamaruddin Sjam	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg – Brussel, 16 – 22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR	Solo, 24 – 25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
Lucky Fathul Aziz H	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg – Brussel, 16 – 22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR	Solo, 24 – 25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC in Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
Komite Pemantau Risiko	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
	Seminar	Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0	Barcelona – Milan - Nice, 13 – 23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Arie Coerniadi	Seminar	International GRC Workshop in Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

**PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Garuda Wiko	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Sekretaris Perusahaan				
Achmad Chaerul	Seminar	Kehumasan di Era #MO	Jakarta, 11 – 12 September 2019	Rumah Perubahan
	Seminar	Pelatihan Investor Relations Enhancement	Jakarta, 11 – 12 Desember 2019	TAP Kapital Indonesia
	Seminar	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi	Bali, 21 – 22 Maret 2019	Intrinsics
	Seminar	“Risiko Investasi atau Korupsi?”	Bandung, 31 Januari – 01 Februari 2019	Asia Anti-Fraud
Komite Audit				
Kamaruddin Sjam	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA “Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5-6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy



Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Lucky Fathul Aziz H	Seminar	International GRC Workshop in Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC in Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
Garuda Wiko	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Halaman ini sengaja dikosongkan



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, BTN berupaya untuk meminimalkan dampak negatif atas perubahan iklim bisnis eksternal dengan melakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan.





TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

KONDISI EKONOMI POLITIK GLOBAL

Tahun 2019 menjadi tahun penuh tantangan. Meredanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di tahun 2019 menjadi peristiwa besar yang memberikan optimisme bagi perekonomian global; khususnya ketika Tiongkok memutuskan untuk melakukan perdagangan dengan AS di sektor pertanian. Optimisme juga terlihat dari pasar keuangan di berbagai negara yang cenderung positif. Demikian pula dengan kondisi geopolitik di Zona Eropa yang terbelit persoalan Brexit mulai menunjukkan kepastian setelah Inggris semakin menunjukkan kecenderungan untuk mengambil keputusan bulat keluar dari Uni Eropa.

Meskipun kondisi di penghujung tahun 2019 terlihat cukup menggembirakan, situasi perekonomian di sepanjang tahun 2019 masih menunjukkan ketidakpastian. Di awal Januari 2020, Bank Dunia memberikan perhitungan prediksi perekonomian global tahun 2019 hanya mencapai 2,9%, di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 3%. Tak berbeda jauh, International Monetary Fund (IMF) pada awal Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan perekonomian berada di angka 2,9%, terpankas dari proyeksi yang dirilis di bulan Oktober 2019 sebesar 3%. Ketegangan perang dagang yang berdampak pada melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia, tekanan pasar keuangan pada beberapa negara berkembang besar, serta kondisi geopolitik di beberapa kawasan, memberikan situasi ketidakpastian terhadap perekonomian dunia.

Melambatnya perekonomian dunia, yang juga terjadi pada perekonomian AS, membuat Pemerintah AS melalui The Fed, Bank Sentral Amerika, mengambil kebijakan menurunkan suku bunga. Berdasarkan data yang dirilis IMF, di sepanjang tahun 2019 The Fed menurunkan suku bunga kebijakan Federal Funds Rate (FFR) sebanyak 75 bps, dari 2,50% menjadi 1,75%. Selain itu, The Fed juga menerapkan kebijakan yang akomodatif melalui pembelian surat-surat berharga untuk memperketat likuiditas pada sistem keuangan AS.

Kebijakan AS ini kemudian berdampak pada arus modal asing di pasar keuangan negara-negara berkembang. Masuknya arus modal dari luar menyebabkan berbagai negara berkembang memiliki kesempatan untuk menjaga suku bunga acuannya pada level yang diharapkan, termasuk Indonesia.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung mengalami perlambatan, Indonesia justru mampu menjaga pertumbuhannya tidak tergerus ke dalam perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) di awal Februari 2020 merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,02%, sedikit di bawah angka tahun 2018 sebesar 5,17%.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

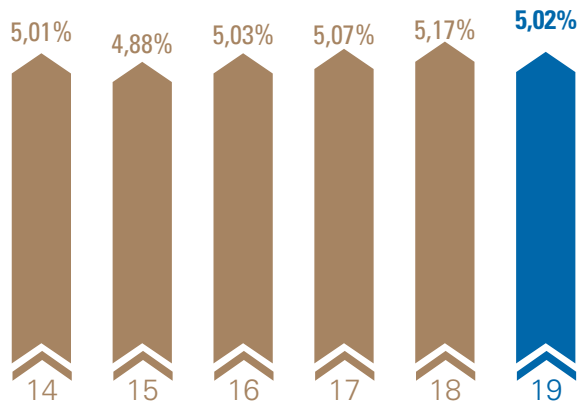


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

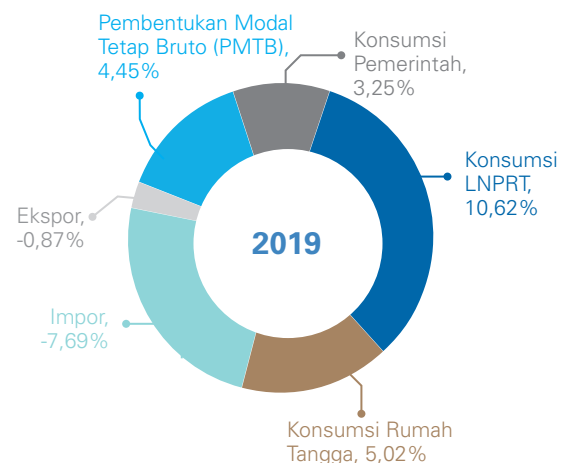
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2014-2019



Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik disebabkan postur pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran sebagian besar ditopang oleh konsumsi dalam negeri, baik itu konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), maupun konsumsi Pemerintah Indonesia melalui penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada sektor pengeluaran impor dan ekspor terjadi pencapaian negatif sejalan dengan defisit neraca perdagangan akibat melemahnya transaksi perdagangan karena perlambatan di berbagai negara tujuan ekspor maupun impor.

Besarnya konsumsi dalam pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terutama karena keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga laju inflasi. Pada awal Januari 2020, BPS merilis angka inflasi di sepanjang tahun 2019 sebesar 2,72%, terendah sejak tahun 1999 dimana laju inflasi pada saat itu berada di angka 2,13%. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menahan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan BBM Bersubsidi merupakan agenda prioritas untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat.

KOMPOSISI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN PENGELUARAN



Daya tarik aset Rupiah juga tercermin dari pergerakan nilai tukar Rupiah yang mencatat volatilitas lebih baik dari tahun sebelumnya. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) di sepanjang tahun 2019 berada pada kisaran Rp13.919 hingga Rp14.525 per USD, berbanding dengan nilai tukar Rupiah di sepanjang tahun 2018 di kisaran Rp13.289 hingga Rp15.238 per USD.

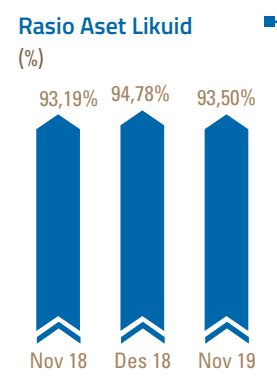
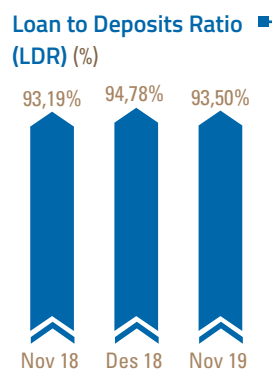
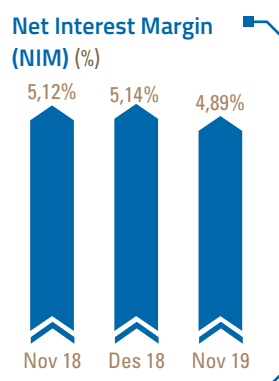
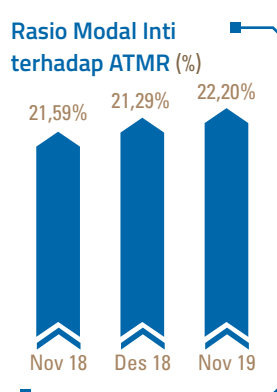
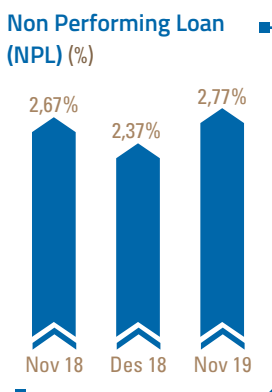
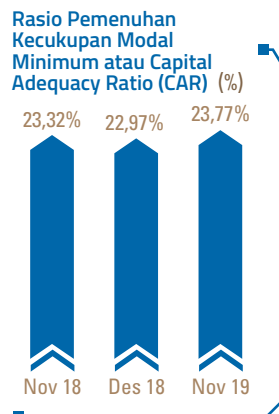
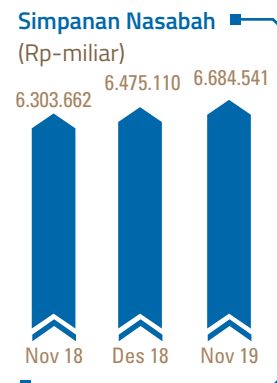
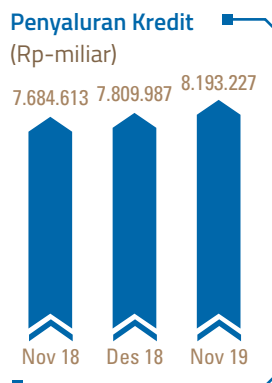
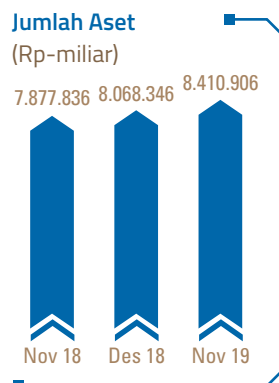
Hal ini memberikan fondasi yang cukup bagi Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan instrumen suku bunga dan rasio makroprudensial. Sepanjang tahun 2019, khususnya pada semester II, Bank Indonesia menurunkan bunga acuannya atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7 DRRR) sebanyak 100 bps, dari 6,0% menjadi 5,0%. Selain itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dengan melonggarkan ketentuan rasio LTV/FTV (*Loan To Value/Financing To Value*) untuk kepemilikan rumah dan kendaraan, serta melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial.



SEKILAS TENTANG PERBANKAN INDONESIA

Berdasarkan data per November 2019 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan Indonesia di sepanjang tahun 2019 memiliki fondasi yang terjaga dengan baik, tercermin dari Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 23,77%, sedikit di atas pada periode

yang sama di tahun sebelumnya sebesar 23,32%. Jumlah Aset mengalami pertumbuhan, dari Rp7.877,84 triliun pada November 2018 menjadi Rp8.410,91 triliun pada November 2019. Penyaluran kredit maupun Simpanan Nasabah dari Dana Pihak Ketiga (DPK) turut mengalami kenaikan pada periode yang sama.



*) data per November 2018



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KEBIJAKAN STRATEGIS 2019

Sesuai dengan roadmap Cetak Biru Transformasi Strategis Bank BTN 2016-2020, Perseroan saat ini sedang menapaki fase transformasi *Digital Banking Period* dan akan segera menuju fase *Global Playership Period* di tahun 2020. Sebagai bentuk strategi pertumbuhan yang berkesinambungan, inisiatif penguatan yang dituju pada *Digital Banking Period* tetap difokuskan untuk memperkuat *positioning* bisnis di sektor perumahan dan perluasannya. Untuk itu, pilar transformasi pada tahapan ini adalah (i) Memperkuat pangsa pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR); (ii) Berperan sebagai *housing market maker*; (iii) dan *Customer Orientation* untuk meningkatkan pertumbuhan pendanaan berbasis *Current Account Saving Account (CASA)*.

PILAR TRANSFORMASI – STRONGER BUSINESS

“Sebagai proses transformasi berkelanjutan, fokus transformasi *Digital Banking Period* tetap diarahkan untuk memperkuat bisnis bank di sektor perumahan”

STRONGER BUSINESS **BTN**



Memperkuat
Pangsa Pasar
KPR, terutama di
segmen Subsidi
dan "Middle-Low"



Meningkatkan
peran sebagai
*Housing Market
Maker*



Customer
Orientation untuk
Pertumbuhan
CASA dan FBI
berbasis transaksi

Sumber: Cetak Biru Transformasi Bank BTN 2016-2020

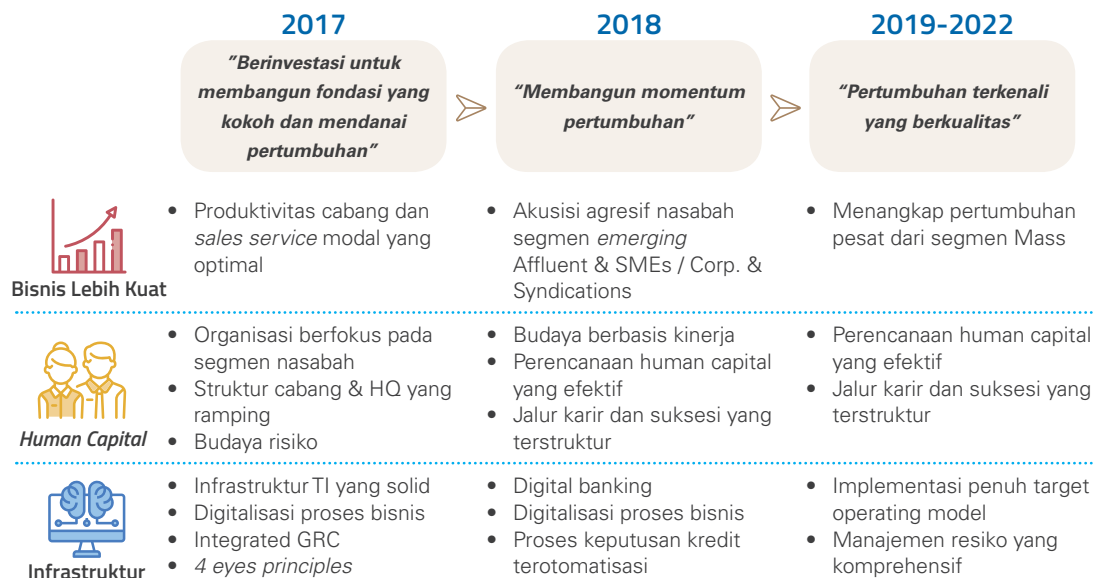
Adapun masing-masing inisiatif pada pilar penguatan bisnis transformasi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat *Positioning* Bisnis *Mortgage* dan *Construction Value Chain*
Penguatan bisnis kredit tetap berfokus pada bisnis inti bank, yaitu sektor perumahan dan perluasannya dengan tetap berpedoman pada mandat utama program pemerintah yakni penyediaan kebutuhan papan bagi MBR. Untuk itu, inisiatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Dominan pada KPR segmen mass (*Subsidized & Non Subsidized*);
 - b. Memperluas kredit segmen *emerging affluent* dan *affluent*;
 - c. Mendorong *supply* dengan meningkatkan kredit konstruksi di segmen UKM dan Komersial; dan
 - d. Mengembangkan segmen komersial dan korporasi
2. Berperan sebagai integrator dan akselerator di bidang perumahan
Upaya Perseroan dalam mempercepat Program Sejuta Rumah dilakukan dengan inisiatif untuk memperkuat peran bank sebagai *housing market maker*, yaitu berperan sebagai integrator dan akselerator di bidang perumahan melalui:
 - a. Meningkatkan peran Bank BTN HFC sebagai lembaga think tank utama perumahan di Indonesia yang memberikan pengaruh dan masukan kepada *stakeholder*; dan
 - b. Mengembangkan inisiatif untuk mendukung pengembangan developer rumah subsidi.



3. *Customer Orientation* untuk memperluas pendanaan berbasis CASA
Inisiatif bidang pendanaan difokuskan untuk memperoleh dana pihak ketiga (DPK) berbasis CASA dengan menawarkan layanan digital banking. Adapun rincian inisiatif yang akan dilakukan meliputi:
- Menyasar segmen *emerging affluent & affluent* yang meliputi keluarga dan kalangan muda (generasi milenial dan digital *savvy*); dan
 - Mengembangkan layanan digital banking untuk memperkuat *image* bank di segmen menengah atas.

INISIATIF TRANSFORMASI TAHAP DIGITAL BANKING PERIOD



Implementasi roadmap transformasi masih sejalan dengan tahapan transformasi awal, yaitu memperkuat bisnis (*stronger business*) dengan fokus penguatan bisnis inti di dua segmen utama yakni segmen *consumer banking* dan *commercial banking*. Pada segmen *consumer banking* Perseroan turut serta mendukung realisasi program sejuta rumah dengan memperkuat peyaluran KPR di segmen mass dan perluasan pada segmen lainnya. Sementara itu, di segmen *commercial banking* pengembangan

bisnis diarahkan untuk mendorong peningkatan *supply* rumah melalui realisasi kredit konstruksi dan perluasan value chain debitur. Dalam rangka mendukung penguatan bisnis inti tersebut, juga dilakukan penguatan pilar enabler yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi dan penerapan manajemen risiko untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen usaha Perseroan tercermin dari penyajian pelaporan operasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2015) tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi pelaporan segmen Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana Perseroan terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Perseroan beroperasi.

Perseroan telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Perseroan terlibat. Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Segmen usaha Perseroan berdasarkan jenis usaha mencakup 2 (dua) segmen utama, yaitu segmen Konvensional dan segmen Syariah.

SEGMENT USAHA BANK BTN BERDASARKAN JENIS USAHA



SEGMENT
KONVENSIONAL

Segmen usaha utama Perseroan sebagai perbankan konvensional.

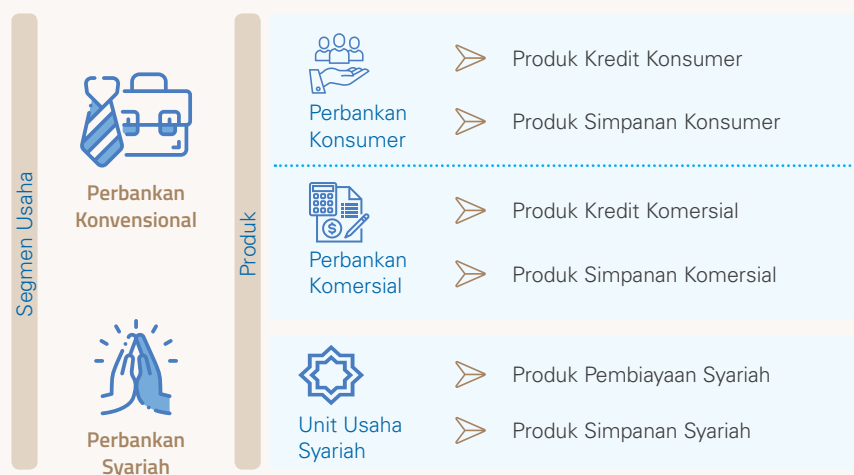


SEGMENT
SYARIAH

Segmen usaha perbankan yang dikembangkan dengan model Syariah

Perseroan merupakan Bank BUMN yang mengembangkan produk dan layanan perbankan khususnya pada penyaluran kredit perumahan. Gambaran tentang produk serta jasa dan layanan Perseroan yang terbagi ke dalam segmen perbankan konvensional dan syariah dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

PENGEMBANGAN PORTOFOLIO PRODUK DAN JASA BANK BTN





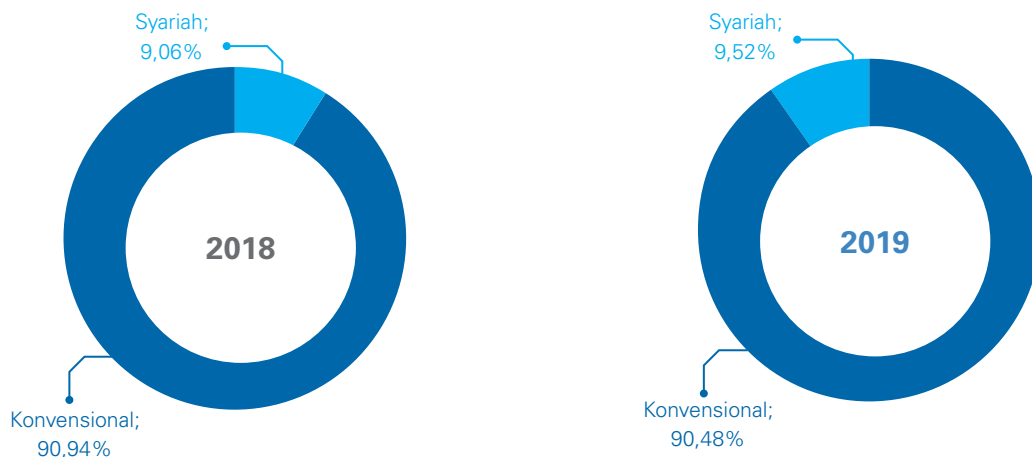
Segmen Konvensional sebagai segmen bisnis utama Perseroan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Perseroan. Sedangkan segmen Syariah yang dikembangkan oleh Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya sejalan dengan berbagai upaya dan inisiatif Perseroan.

Gambaran besar tentang besaran kontribusi segmen usaha terhadap bisnis Perseroan tercermin dari kinerja Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil serta Laba Operasional Perseroan yang dipengaruhi dari masing-masing segmen seperti terlihat di bawah ini:

KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL BANK BTN

Segmen	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Konvensional	23.271.432	90,48%	20.781.512	90,94%	2.489.920	11,98%
Syariah	2.448.442	9,52%	2.070.246	9,06%	378.196	18,27%
Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.719.874	100,00%	22.851.758	100,00%	2.868.116	12,55%

KOMPOSISI PENDAPATAN SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL BANK BTN



KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH LABA OPERASIONAL BANK BTN

Segmen	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Konvensional	283.063	54,25%	3.268.421	90,95%	(2.985.358)	-91,34%
Syariah	238.710	45,75%	325.379	9,05%	(86.669)	-26,64%
Jumlah Laba Operasional	521.773	100,00%	3.593.800	100,00%	(3.072.027)	-85,48%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



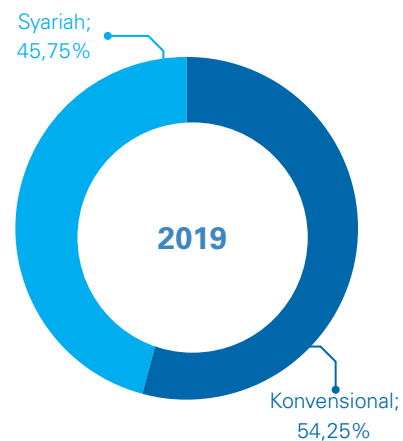
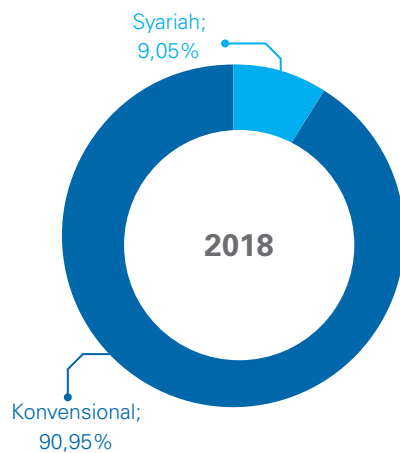
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

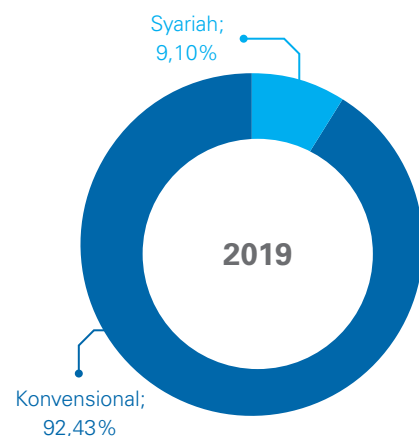
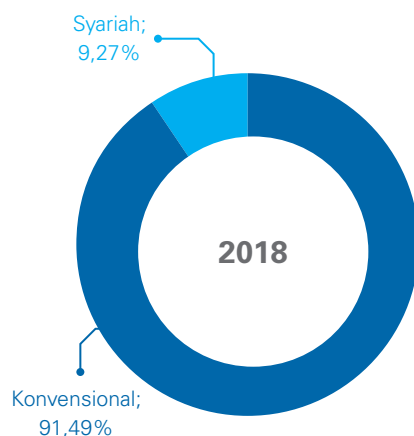
KOMPOSISI LABA OPERASIONAL SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH LABA OPERASIONAL BANK BTN



KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH ASET BANK BTN

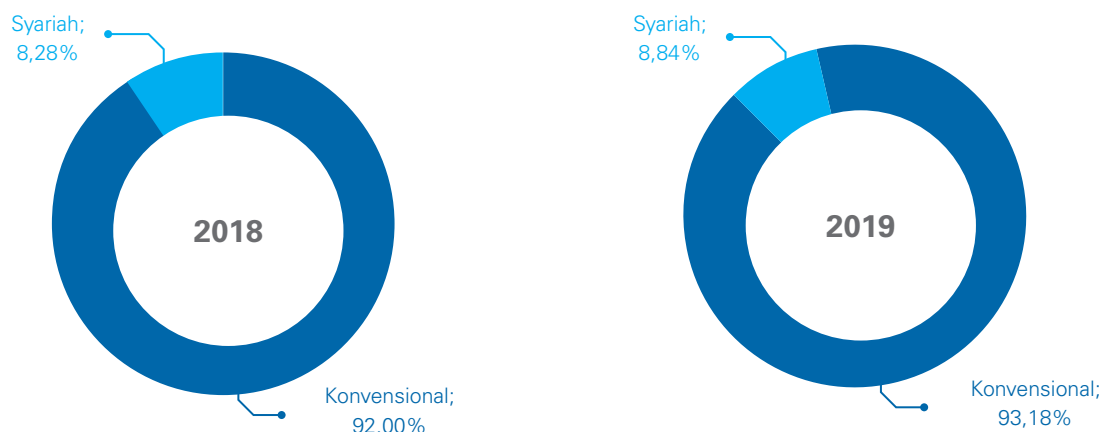
Segmen	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Konvensional	288.173.172	92,43%	280.367.092	91,49%	7.806.079	2,78%
Syariah	28.385.675	9,10%	28.399.275	9,27%	(13.600)	-0,05%
Eliminasi	(4.782.019)	-1,53%	(2.330.173)	-0,76%	(2.451.846)	105,22%
Jumlah Aset	311.776.828	100,00%	306.436.194	100,76%	5.340.633	1,74%

KOMPOSISI LABA OPERASIONAL SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH ASET BANK BTN



**KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER BANK BTN**

Segmen	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Konvensional	268.291.413	93,18%	259.995.522	92,00%	8.295.891	3,19%
Syariah	24.431.238	8,48%	24.930.397	8,82%	(499.159)	-2,00%
Eliminasi	(4.782.019)	-1,66%	(2.330.173)	-0,82%	(2.451.846)	105,22%
Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	287.940.632	100,00%	282.595.746	100,82%	5.344.886	1,89%

KOMPOSISI LABA OPERASIONAL SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER BANK BTN

Dari tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa segmen Konvensional merupakan segmen utama Perseroan dengan kontribusi mencapai 90,94% di tahun 2018 dan 90,48% di tahun 2019 terhadap jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan, serta berkontribusi untuk Jumlah Aset dan Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer di tahun 2019 masing-masing sebesar 92,43% dan 93,18%. Untuk Laba Operasional segmen Konvensional tahun 2019

mengalami penurunan signifikan hingga 85,48% terhadap Laba Operasional tahun 2018, yang disebabkan adanya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 tentang Instrumen Keuangan.

Uraian tentang kinerja masing-masing segmen dapat dilihat di bawah ini:

SEGMENT KONVENSIONAL**KINERJA OPERASI DAN BISNIS SEGMENT KONVENSIONAL**

Sebagai bisnis utama Perseroan, segmen usaha Konvensional menyediakan produk simpanan dan kredit yang bersifat konsumen dan komersial. Kinerja produk dari segmen Konvensional diuraikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Perbankan Konsumen dan Perbankan Komersial.

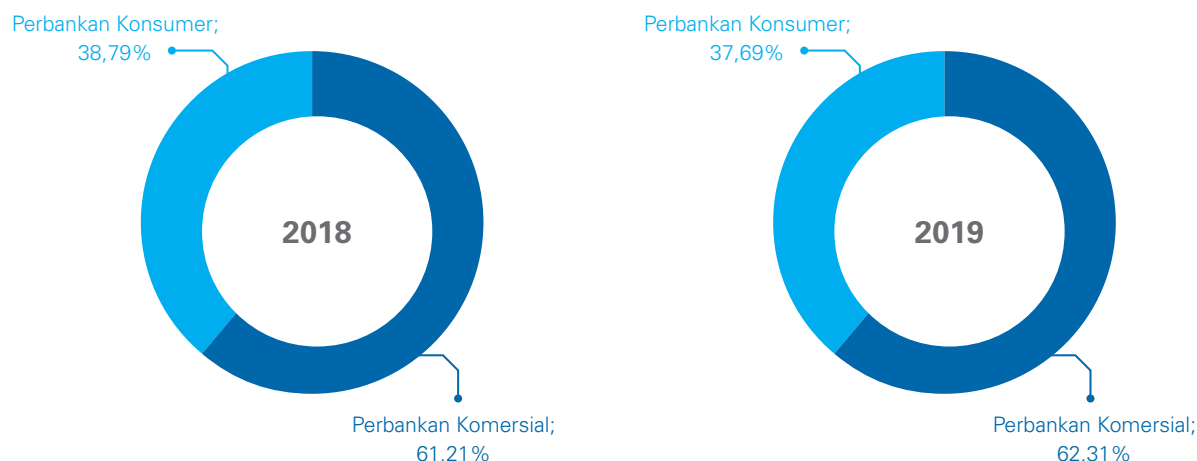
TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA



Sekilas tentang kinerja dari segment Konvensional dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

PERKEMBANGAN PRODUK DARI SEGMENT KONVENSIONAL

Produk Segment Konvensional	Realisasi 2019		Realisasi 2018		Kenaikan (Penurunan) 2018-2019
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	(%)
	(1)		(2)		((1-2)/2)
Perbankan Konsumer	99.107.827	37,69%	111.163.254	38,79%	-10,84%
Perbankan Komersial	163.862.173	62,31%	175.399.041	61,21%	-6,58%
Jumlah Penyaluran Kredit dan Simpanan pada Segment Konvensional	262.970.000	100,00%	286.562.295	100,00%	-8,23%

**KOMPOSISI PRODUK SEGMENT KONVENSIONAL**

Dari komposisi di atas, terlihat bahwa kegiatan bisnis segment Konvensional Perseroan sebagian besar berkontribusi dari Perbankan Komersial yang terdiri dari Kredit Komersial, serta Simpanan Komersial mencakup penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Giro dan Deposito Berjangka Lembaga.

Rincian kinerja masing-masing produk dari segment Konvensional dapat dilihat di bawah ini:

PERBANKAN KONSUMER

Portofolio produk Perseroan pada Perbankan Konsumer terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Konsumer dan Produk Simpanan Konsumer. Nilai dan volume penyaluran produk Perbankan Konsumer dapat dilihat di bawah ini:

NILAI PENYALURAN PRODUK PERBANKAN KONSUMER

Jenis Produk Perbankan Konsumer	Realisasi 2019		Realisasi 2018		Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)			
	(1)		(2)			(3)	(1/3)
Produk Kredit Konsumer	33.439.158	33,74%	49.371.119	44,41%	-32,27%	39.117.787	85,48%
Produk Simpanan Konsumer	65.668.669	66,26%	61.792.135	55,59%	6,27%	63.714.975	103,07%
Jumlah Nilai Produk Perbankan Konsumer	99.107.827	100,00%	111.163.254	100,00%	-10,84%	102.832.762	96,38%



Pendukung Bisnis



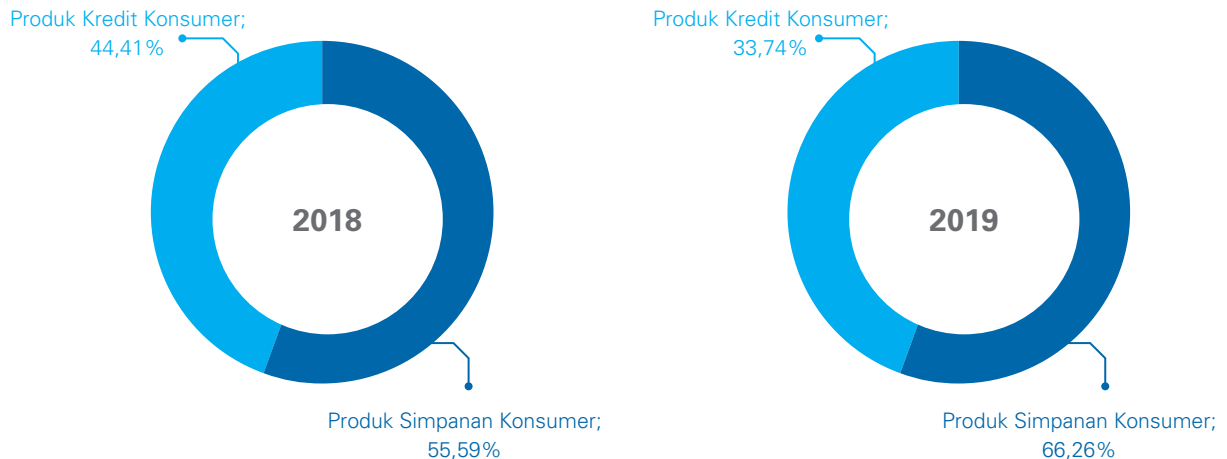
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

KOMPOSISI PRODUK PERBANKAN KONSUMER



VOLUME PENYALURAN PRODUK PERBANKAN KONSUMER

Jenis Produk Perbankan Konsumer	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Produk Kredit Konsumer (unit)	186.760	269.631	-30,73%	192.382	97,08%
Produk Simpanan Konsumer (rekening)	8.116.374	8.145.743	-0,36%	-	-

Rincian masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Produk Kredit Konsumer

Perseroan menyediakan produk Kredit Konsumer yang terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk Kredit Perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit perorangan konsumen disalurkan dalam mata uang Rupiah.

NILAI PENYALURAN PRODUK KREDIT KONSUMER

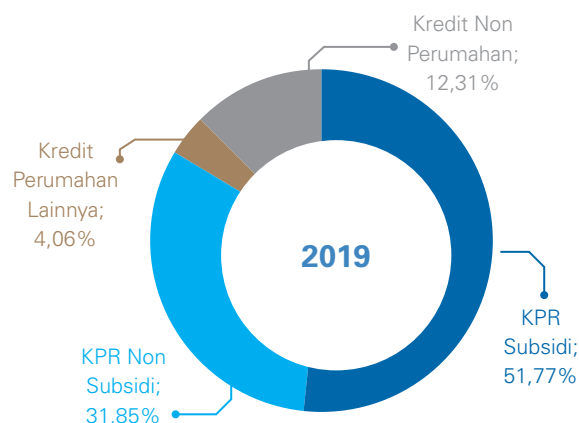
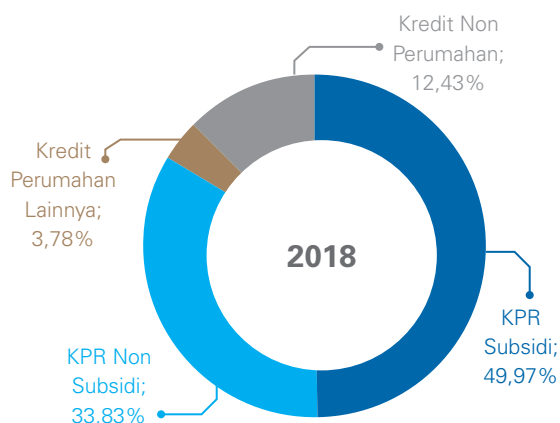
Jenis Kredit Konsumer	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Kredit Perumahan					
KPR Subsidi	17.311.658	24.668.579	-29,82%	16.126.710	107,35%
KPR Non Subsidi	10.651.724	16.700.374	-36,22%	11.197.500	95,13%
Kredit Perumahan Lainnya	1.358.536	1.865.164	-27,16%	2.323.377	58,47%



NILAI PENYALURAN PRODUK KREDIT KONSUMER

Jenis Kredit Konsumer	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Kredit Perumahan	29.321.918	43.234.117	-32,18%	29.647.587	98,90%
Kredit Non Perumahan	4.117.240	6.137.002	-32,91%	4.143.200	99,37%
Jumlah Penyaluran Kredit Konsumer	33.439.158	49.371.119	-32,27%	33.790.787	98,96%

KOMPOSISI PENYALURAN PRODUK KREDIT KONSUMER



Seperti yang terlihat pada bagan di atas, produk KPR Subsidi memberikan kontribusi yang besar terhadap penyaluran Kredit Konsumer Perseroan, dengan besaran kontribusi sebesar masing-masing 49,97% di tahun 2018 dan 51,77% di tahun 2019.

Di tahun 2019, Perseroan menyalurkan kredit konsumer sebesar Rp33,44 triliun, turun 32,27% dari tahun 2018 sebesar Rp49,37 triliun, atau mencapai 98,96% terhadap target tahun 2019 sebesar Rp33,79 triliun. Hal ini terutama disebabkan persaingan yang semakin ketat terkait pricing serta masuknya perbankan pesaing ke dalam segmen Bank BTN.

Pada jumlah unit yang disalurkan, di tahun 2019 Perseroan menyalurkan kredit konsumer sebanyak 186.760 unit, turun 30,73% dari tahun 2018 sebanyak 269.631 unit, atau mencapai 101,75% terhadap target tahun 2019 sebanyak 183.546 unit. Hal ini sesuai dengan *core* bisnis Bank BTN yang fokus pada pembiayaan perumahan. Pasar pembiayaan perumahan masih terbuka dan Bank BTN juga sudah mulai membidik golongan menengah ke atas.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

VOLUME PENYALURAN PRODUK KREDIT KONSUMER

Jenis Kredit Konsumer	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Kredit Perumahan					
KPR Subsidi	135.118	197.728	-31,66%	126.140	107,12%
KPR Non Subsidi	31.103	49.244	-36,84%	30.500	101,98%
Kredit Perumahan Lainnya	6.134	8.283	-25,94%	11.713	52,37%
Jumlah Kredit Perumahan	172.355	255.255	-32,48%	168.353	102,38%
Kredit Non Perumahan	14.405	14.376	0,20%	15.193	94,81%
Jumlah Penyaluran Kredit Konsumer	186.760	269.631	-30,73%	183.546	101,75%

Uraian masing-masing penyaluran kredit dapat dilihat di bawah ini:

KPR Subsidi

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, skema penyaluran KPR Subsidi terus berganti; meski demikian Perseroan tetap konsisten menyalurkan KPR Subsidi. KPR Subsidi merupakan program pemilikan rumah dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. KPR Subsidi ini memberikan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. KPR Subsidi BTN senantiasa menyediakan berbagai kemudahan dan biaya yang ringan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Perseroan pertama kali mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan KPR Subsidi sesuai Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, dengan realisasi KPR pertama berlangsung pada tanggal 10 Desember 1976. Perseroan menyalurkan KPR Subsidi bekerja sama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketentuan mengenai penyaluran KPR Subsidi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Permen PUPR) No. 21/PRT/M/2016 tanggal 14 Juni 2016

tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pembeli rumah pertama kali yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh KPR Subsidi dengan bunga rendah dan tetap selama jangka waktu KPR. Berdasarkan program subsidi Pemerintah saat ini, KPR bersubsidi diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp4 juta per bulan untuk membeli rumah tapak dan maksimal penghasilan sebesar Rp7 juta per bulan untuk pembelian rumah susun. Harga rumah terikat pada batas harga tertentu. Nasabah harus menyampaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada saat pengajuan kredit.

Perseroan menyalurkan KPR subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Perseroan menyalurkan KPR dengan skema SSB.



Adapun ketentuan pemberian KPR SSB Tapak dan KPR SSB Susun adalah sebagai berikut:

1. Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah tapak atau susun dikurangi dengan uang muka.
2. Suku bunga KPR per tahun paling tinggi BI rate atau acuan lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah ditambah 5% yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional antara Bank Pelaksana dengan Pejabat Perbendaharaan Satker.
3. Dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud pada butir (2) lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka suku bunga KPR SSB Tapak dan Susun menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana.
4. Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.
5. Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (4) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
6. Jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
7. Subsidi bunga kredit perumahan yang dibayar Pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud pada butir (4)

Di tahun 2018 dan 2019, Perseroan menyalurkan kredit KPR Subsidi melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. KPR BTN Sejahtera Tapak
2. KPR BTN Sejahtera Susun
3. KPR SSA/SSB Tapak
4. KPR SSA/SSB Susun
5. KPR BTN Mikro
6. KPR BP2BT
7. KPR BTN MBR

Penyaluran kredit KPR Subsidi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KPR SUBSIDI

KPR Subsidi	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
KPR BTN Sejahtera Tapak	9.563.566	1.983.197	382,23%	-	-
KPR BTN Sejahtera Susun	5.418	12.837	-57,79%	-	-
KPR SSA/SSB Tapak	7.446.324	22.654.342	-67,13%	-	-
KPR SSA/SSB Susun	4.943	15.797	-68,71%	-	-
KPR BTN Mikro	145	2.406	-93,97%	-	-
KPR BP2BT	291.023	-	-	-	-
KPR BTN MBR	238	-	-	-	-
Jumlah Penyaluran KPR Subsidi	17.311.658	24.668.579	-29,82%	16.126.710	107,35%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH UNIT PENYALURAN KPR SUBSIDI

KPR Subsidi	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
KPR BTN Sejahtera Tapak	74.076	15.472	378,77%	-	-
KPR BTN Sejahtera Susun	35	102	-65,69%	-	-
KPR SSA/SSB Tapak	57.908	181.964	-68,18%	-	-
KPR SSA/SSB Susun	33	124	-73,39%	-	-
KPR BTN Mikro	4	66	-93,94%	-	-
KPR BP2BT	3.060	-	-	-	-
KPR BTN MBR	2	-	-	-	-
Jumlah Penyaluran KPR Subsidi	135.118	197.728	-31,66%	126.140	107,12%

Di tahun 2019, Perseroan menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp17,31 triliun dengan volume unit sebanyak 135.118 unit perumahan. Nilai penyaluran KPR Subsidi mengalami penurunan 29,82% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp24,67 triliun. Hal ini terutama disebabkan persaingan yang semakin ketat serta masuknya perbankan pesaing ke dalam segmen Bank BTN. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran KPR Subsidi mencatat pencapaian 107,35% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp16,13 triliun.

KPR Non Subsidi

Selain KPR Subsidi, Perseroan juga memiliki berbagai layanan KPR non-subsidi yang menargetkan nasabah berpenghasilan menengah ke atas dengan suku bunga mengambang (*floating*). Jangka waktu yang ditawarkan

maksimal selama 25 tahun untuk KPR Non Subsidi dan maksimal 15 tahun untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Ruko. KPR Non Subsidi Perseroan memberikan layanan untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun take over kredit dari Bank lain. Ketentuan uang muka minimal 15% atau sesuai peraturan Bank Indonesia tentang Rasio *Loan to Value*.

Di tahun 2018 dan 2019, Perseroan menyalurkan kredit KPR Non Subsidi melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. KPR BTN Platinum
2. KPA BTN
3. Kredit Ruko BTN

Penyaluran kredit KPR Non Subsidi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KPR NON SUBSIDI

KPR Non Subsidi	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
KPR BTN Platinum	10.118.137	15.699.958	-35,55%	10.237.500	98,83%
KPA BTN	418.577	854.608	-51,02%	600.000	69,76%
Kredit Ruko BTN	115.010	145.808	-21,12%	260.000	44,23%
Jumlah Penyaluran KPR Non Subsidi	10.651.724	16.700.374	-36,22%	11.197.500	95,13%

**JUMLAH UNIT PENYALURAN KPR NON SUBSIDI**

KPR Non Subsidi	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
KPR BTN Platinum	29.859	46.890	-36,32%	28.550	104,58%
KPA BTN	1.098	2.146	-48,84%	1.550	70,84%
Kredit Ruko BTN	146	208	-29,81%	400	36,50%
Jumlah Penyaluran KPR Non Subsidi	31.103	49.244	-36,84%	30.500	101,98%

Perseroan mencatatkan penyaluran KPR Non Subsidi pada tahun 2019 sebesar Rp10,65 triliun dengan volume unit sebanyak 31.103 unit perumahan. Nilai penyaluran KPR Non Subsidi mengalami penurunan 36,22% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp16,70 triliun. Hal ini disebabkan bahwa jenis kredit non subsidi belum terserap pasar secara optimal, meskipun fokus bisnis Bank BTN masih pada sektor perumahan dengan penyaluran KPR dan sektor pendukungnya. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran KPR Non Subsidi mencatat pencapaian 95,13% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp11,19 triliun.

Kredit Perumahan Lainnya

Perseroan juga menawarkan jenis-jenis kredit perumahan

serta kredit konsumen lainnya, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kredit perumahan lainnya merupakan upaya Perseroan dalam mengembangkan bisnis sekaligus ditujukan untuk membantu konsumen memiliki hunian dengan keuntungan dan kemudahan yang tinggi.

Di tahun 2018 dan 2019, Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Agunan Rumah
2. Kredit Bangun Rumah
3. PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan
4. TBUM Bapertarum

Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN LAINNYA

Kredit Perumahan Lainnya	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Kredit Agunan Rumah	1.353.008	1.847.158	-26,75%	2.112.795	64,04%
Kredit Bangun Rumah	4.937	15.091	-67,29%	210.000	2,35%
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	591	2.755	-78,55%	582	101,53%
TBUM Bapertarum	-	160	-	-	-
Jumlah Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	1.358.536	1.865.164	-27,16%	2.323.377	58,47%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH UNIT PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN LAINNYA

Kredit Perumahan Lainnya	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Kredit Agunan Rumah	6.094	8.170	-25,41 %	11.099	54,91 %
Kredit Bangun Rumah	24	44	-45,45 %	600	4,00 %
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	16	61	-73,77 %	14	114,29 %
TBUM Bapertarum	-	8	-100,00 %	-	-
Jumlah Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	6.134	8.283	-25,94 %	11.713	52,37 %

Di tahun 2019, Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya sebesar Rp1,36 triliun dengan volume sebanyak 6.134 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit Perumahan Lainnya mengalami penurunan 27,16% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp1,86 triliun. Hal ini disebabkan bahwa jenis kredit perumahan lainnya belum terserap pasar secara optimal, meskipun fokus bisnis Bank BTN masih pada sektor perumahan dengan penyaluran KPR dan sektor pendukungnya. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit Perumahan Lainnya mencatat pencapaian 58,47% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp2,32 triliun.

Kredit Non Perumahan

Perseroan memberikan kredit konsumen lainnya, di luar kredit perumahan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah kredit. Perseroan menyalurkan Kredit Non Perumahan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kring BTN
2. Kring BTN Pensiunan
3. Kredit Swadana BTN
4. Kredit Pegawai

Penyaluran Kredit Non Perumahan untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT NON PERUMAHAN

Kredit Non Perumahan	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Kring BTN	891.181	776.884	14,71 %	900.000	99,02 %
Kring BTN Pensiunan	106.565	98.053	8,68 %	247.200	43,11 %
Kredit Swadana BTN	2.429.292	4.368.982	-44,40 %	2.493.000	97,44 %
Kredit Pegawai	690.203	893.084	-22,72 %	503.000	137,22 %
Jumlah Penyaluran Kredit Non Perumahan	4.117.240	6.137.002	-32,91 %	4.143.200	99,37 %

**JUMLAH UNIT PENYALURAN KREDIT NON PERUMAHAN**

Kredit Non Perumahan	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Kring BTN	9.610	7.842	22,55%	9.000	106,78%
Kring BTN Pensiunan	1.007	1.072	-6,06%	3.080	32,69%
Kredit Swadana BTN	1.597	2.670	-40,19%	1.519	105,13%
Kredit Pegawai	2.191	2.792	-21,53%	1.594	137,45%
Jumlah Penyaluran Kredit Non Perumahan	14.405	14.376	0,20%	15.193	94,81%

Perseroan mencatatkan penyaluran Kredit Non Perumahan pada tahun 2019 sebesar Rp4,12 triliun dengan volume sebanyak 14.405 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit Non Perumahan mengalami kenaikan 0,20% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp14,38 triliun. Hal ini disebabkan bahwa jenis kredit non perumahan belum terserap pasar secara optimal, meskipun fokus bisnis Bank BTN masih pada sektor perumahan dengan penyaluran KPR dan sektor pendukungnya. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit Non Perumahan mencatat pencapaian 99,37% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp4,14 triliun.

Produk Simpanan Konsumer

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan simpanan kepada nasabah, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Melalui penyediaan produk tersebut, Perseroan berupaya untuk menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah yang sejalan dengan strategi perusahaan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

JUMLAH DANA SIMPANAN KONSUMER

Simpanan Konsumer	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Tabungan Konsumer	41.486.867	38.349.313	8,18%	-	-
Deposito Berjangka	24.181.802	23.442.822	3,15%	-	-
Jumlah Dana Simpanan Konsumer	65.668.669	61.792.135	6,27%	-	-



Pendukung Bisnis



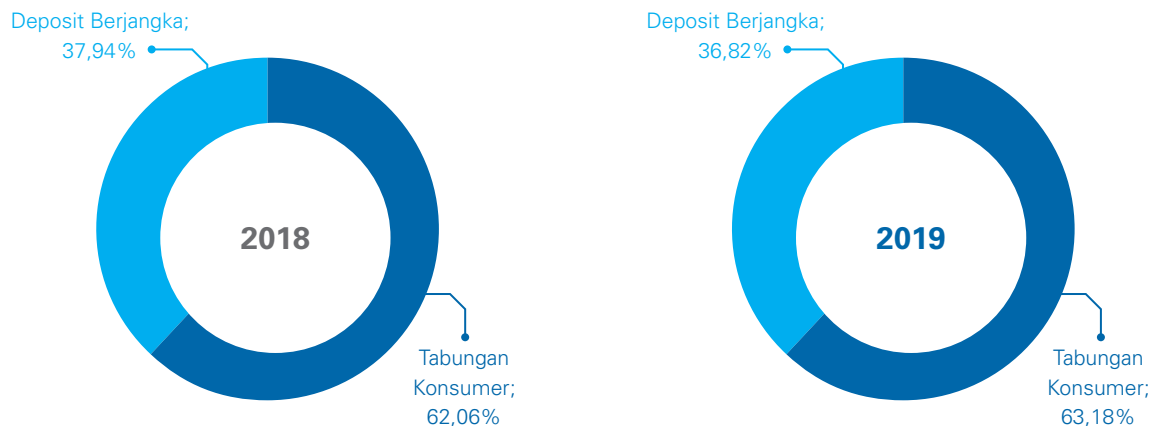
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

KOMPOSISI DANA SIMPANAN KONSUMER



Seperti yang terlihat pada bagan di atas, Tabungan Konsumer Perseroan berkontribusi cukup besar terhadap jumlah Simpanan Konsumer, dengan komposisi 62,06% di tahun 2018 dan 63,18% di tahun 2019.

Di tahun 2019, Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun dalam produk Tabungan Konsumer dan Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp65,67 triliun, meningkat 6,27% dari tahun 2018 sebesar Rp61,79 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Konsumer dan Deposito Berjangka sebanyak 8.114.464 rekening, turun 0,38% dari tahun 2018 sebanyak 8.145.743 rekening.

Dana pihak ketiga belum sesuai proyeksi sehingga perlu dilakukan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang fokus pada dana dengan biaya bunga murah (*low cost funding*), yaitu giro dan tabungan, sementara deposito sebagai penyeimbang tetap dipasarkan.

JUMLAH REKENING SIMPANAN KONSUMER

Simpanan Konsumer	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (rekening)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Tabungan Konsumer	8.025.760	8.071.970	-0,57%	-	-
Deposito Berjangka	88.704	73.773	20,24%	-	-
Jumlah Rekening Simpanan Konsumer	8.114.464	8.145.743	-0,38%	-	-

Uraian masing-masing produk Simpanan Konsumer dapat dilihat di bawah ini.

Tabungan Konsumer

Tabungan konsumer yang dimiliki Perseroan memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi pembelian dan pembayaran melalui channel Bank BTN untuk menunjang aktivitas keuangan konsumen. Tabungan Konsumer Perseroan dikembangkan melalui beberapa

produk sebagai berikut:

1. Tabungan Batara
2. Tabungan BTN Pensiunan
3. Tabungan Batara Pendidik
4. Tabungan Batara Prima



5. Tabungan Batara Tax Amnesty
6. Tabungan BTN Batara RDN
7. Tabungan Lainnya, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan BTN Junior
 - b. Tabungan BTN Juara
 - c. TabunganKu
 - d. Tabungan BTN Simpel
 - e. Tabungan Cermat
 - f. Tabungan BTN Perumahan
 - g. Tabungan BTN Haji Reguler
 - h. Tabungan BTN Haji Plus
 - i. Tabungan BTN Siap !
 - j. Tabungan Felas
 - k. Tabungan Simuda Rumahku
8. Tabungan Pos, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan Tabanas Batara
 - b. Tabungan eBatara Pos

Kinerja masing-masing produk Tabungan Konsumer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH TABUNGAN KONSUMER

Jenis Tabungan Konsumer	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Tabungan Batara	17.772.993	15.706.091	13,16%
Tabungan BTN Pensiunan	136.472	138.876	-1,73%
Tabungan Batara Pendidik	125.612	88.646	41,70%
Tabungan Batara Prima	18.525.172	17.374.048	6,63%
Tabungan Batara Tax Amnesty	1.431	1.731	-17,33%
Tabungan KPR Mass	92.013	-	-
Tabungan BTN Batara RDN	2.238	1.279	74,98%
Tabungan Lainnya			
Tabungan BTN Junior	823.278	828.713	-0,66%
Tabungan BTN Juara	643.413	573.165	12,26%
TabunganKu	776.364	766.031	1,35%
Tabungan BTN Simpel	80.441	63.134	27,41%
Tabungan Cermat	66.745	80.725	-17,32%
Tabungan BTN Perumahan	31.662	39.455	-19,75%
Tabungan BTN Haji Reguler	7.022	108.855	-93,55%
Tabungan BTN Haji Plus	1.098	1.374	-20,09%
Tabungan BTN Siap !	24.856	17.684	40,56%
Tabungan Felas	58.648	28.701	104,34%
Tabungan Simuda Rumahku	256	160	60,00%
	2.513.783	2.507.997	0,23%
Tabungan Pos			
Tabungan Tabanas Batara	30.884	41.892	-26,28%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH TABUNGAN KONSUMER

Jenis Tabungan Konsumer	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Tabungan eBatara Pos	2.287.941	2.488.753	-8,07%
	2.318.825	2.530.645	-8,37%
Jumlah Tabungan Konsumer	41.488.540	38.349.314	8,19%

JUMLAH REKENING TABUNGAN KONSUMER

Jenis Tabungan Konsumer	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Tabungan Batara	2.085.641	2.122.247	-1,72%
Tabungan BTN Pensiunan	11.855	11.557	2,58%
Tabungan Batara Pendidik	36.587	23.696	54,40%
Tabungan Batara Prima	31.595	36.102	-12,48%
Tabungan Batara Tax Amnesty	30	38	-21,05%
Tabungan KPR Mass	98.874	-	-
Tabungan BTN Batara RDN	2.263	2.045	10,66%
Tabungan Lainnya			
Tabungan BTN Junior	1.095.654	1.085.785	0,91%
Tabungan BTN Juara	804.345	1.175.326	-31,56%
TabunganKu	452.446	394.372	14,73%
Tabungan BTN Simpel	716.369	569.257	25,84%
Tabungan Cermat	1.649.514	1.492.710	10,50%
Tabungan BTN Perumahan	3.651	4.044	-9,72%
Tabungan BTN Haji Reguler	33.678	69.616	-51,62%
Tabungan BTN Haji Plus	306	344	-11,05%
Tabungan BTN Siap !	9.710	8.310	16,85%
Tabungan Felas	222	267	-16,85%
Tabungan Simuda Rumahku	195	510	-61,76%
	4.766.090	4.800.541	-0,72%



JUMLAH REKENING TABUNGAN KONSUMER

Jenis Tabungan Konsumer	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Tabungan Pos			
Tabungan Tabanas Batara	11.753	24.684	-52,39%
Tabungan eBatara Pos	982.982	1.051.060	-6,48%
	994.735	1.075.744	-7,53%
Jumlah Tabungan Konsumer	8.027.670	8.071.970	-0,55%

Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Tabungan Konsumer sebesar Rp41,49 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 8.027.670 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Konsumer mengalami peningkatan 8,19% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp38,35 triliun. Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Konsumer sebanyak 8.027.670 rekening, turun 0,55% dari tahun 2018 sebanyak 8.071.970 rekening.

Deposito Berjangka BTN Ritel

Produk deposito berjangka Perseroan memberikan kemudahan kepada konsumen atau nasabah untuk investasi berjangka dengan benefit yang tinggi. Investasi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga yang menarik dan bersaing. Produk Deposito Berjangka BTN Ritel ditawarkan dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan; serta Deposito *On Call*.

Kinerja masing-masing produk Deposito Berjangka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DEPOSITO BERJANGKA

Jenis Deposito Berjangka	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
1 bulan	10.065.397	9.189.971	9,53%
2 bulan	416.830	1.910.496	-78,18%
3 bulan	12.358.227	10.772.359	14,72%
4 Bulan	65.927	-	-
6 bulan	782.190	1.161.032	-32,63%
12 bulan	372.752	334.230	11,53%
24 bulan	25.433	13.818	84,06%
Deposito On Call	95.046	60.916	56,03%
Jumlah Deposito Berjangka	24.181.802	23.442.822	3,15%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

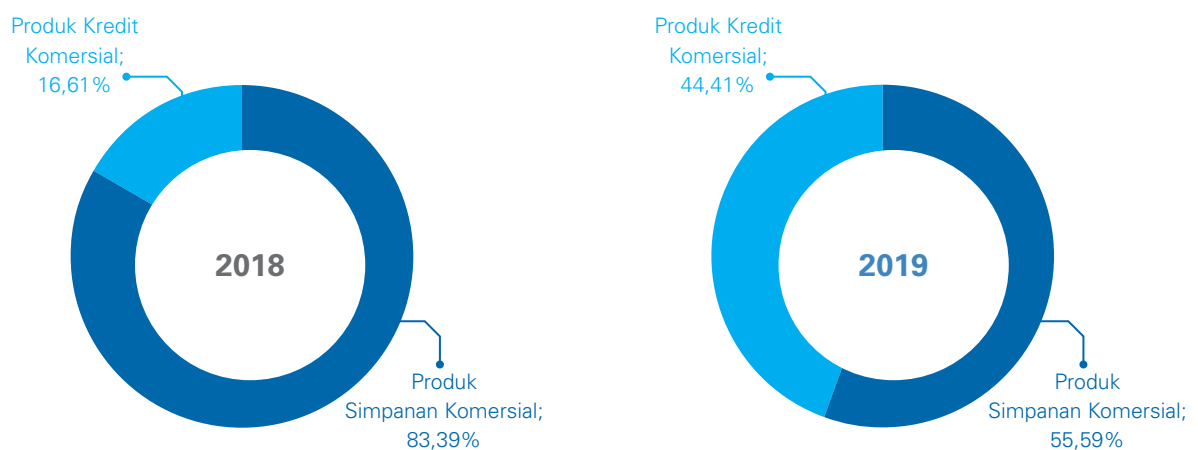
PERBANKAN KOMERSIAL

Portofolio produk Perseroan pada Perbankan Komersial terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Komersial dan Produk Simpanan Komersial. Nilai dan volume penyaluran produk Perbankan Komersial dapat dilihat di bawah ini.

NILAI PENYALURAN PRODUK PERBANKAN KOMERSIAL

Jenis Produk Perbankan Komersial	Realisasi 2019		Realisasi 2018		Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	
	(1)		(2)		
Produk Kredit Komersial	25.962.288	15,84%	29.135.261	16,61%	-10,89%
Produk Simpanan Komersial	137.899.885	84,16%	146.263.780	83,39%	-5,72%
Jumlah Nilai Produk Perbankan Komersial	163.862.173	100,00%	175.399.041	100,00%	-6,58%

KOMPOSISI PRODUK PERBANKAN KOMERSIAL



VOLUME PENYALURAN PRODUK PERBANKAN KOMERSIAL

Jenis Produk Perbankan Komersial	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Produk Kredit Komersial (unit)	10.640	12.136	-12,33%
Produk Simpanan Komersial (rekening)	58.365	55.223	5,69%
Jumlah Volume Produk Perbankan Komersial	69.005	67.359	2,44%



Rincian masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Produk Kredit Komersial

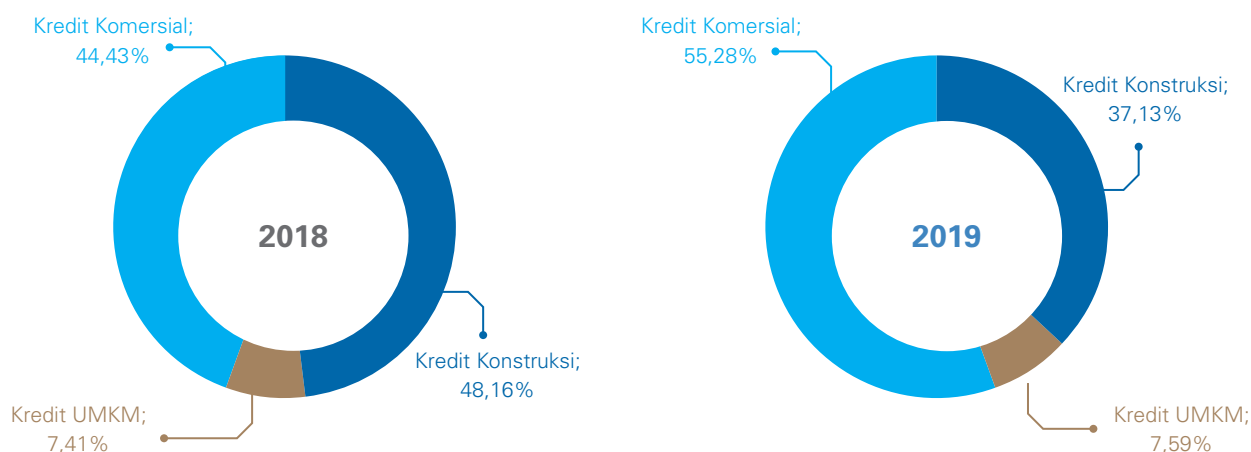
Perseroan menyediakan produk kredit perbankan komersial untuk memberikan beragam solusi bagi konsumen dengan produk yang terdiri dari produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa kredit konstruksi, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari Kredit UMKM dan Kredit Komersial.

Rincian informasi terkait kinerja produk Kredit Komersial Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT KOMERSIAL

Jenis Kredit Komersial	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Kredit Perumahan					
Kredit Konstruksi	9.639.825	14.032.243	-31,30%	13.105.000	73,56%
Kredit Non Perumahan					
Kredit UMKM	1.969.908	2.157.920	-8,71%	3.625.430	54,34%
Kredit Komersial	14.352.555	12.945.098	10,87%	9.643.800	148,83%
Jumlah Penyaluran Kredit Komersial	25.962.288	29.135.261	-10,89%	26.374.230	98,44%

KOMPOSISI KREDIT KOMERSIAL



Dari bagan di atas dapat terlihat adanya perubahan komposisi penyaluran Kredit Komersial. Kredit Konstruksi dan UMKM mengalami penurunan, sedangkan Kredit Komersial justru mengalami pertumbuhan yang mengakibatkan pergeseran komposisi penyaluran Kredit Komersial.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Perseroan mencatatkan penyaluran Kredit Komersial pada tahun 2019 sebesar Rp25,96 triliun dengan volume sebanyak 10.640 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit Komersial mengalami penurunan 10,89% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp29,13 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena tidak tercapainya proyeksi kredit komersial disebabkan tidak tercapainya kredit di sektor Konstruksi serta Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan berkaitan dengan pembiayaan fasilitas KPR

dengan segmen rumah real estate. Mengingat core bisnis Bank BTN adalah pembiayaan KPR, dan pendapatan utama bank adalah pendapatan bunga, maka ekspansi kredit baik KPR, real estate maupun konstruksi akan tetap dijaga dan terus ditingkatkan.

Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit Komersial mencatat pencapaian 98,44% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp26,37 triliun.

VOLUME PENYALURAN KREDIT KOMERSIAL

Jenis Kredit Komersial	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Kredit Perumahan			
Kredit Konstruksi	5.837	7.245	-19,43%
Kredit Non Perumahan			
Kredit UMKM	4.423	4.341	1,89%
Kredit Komersial	380	550	-30,91%
Jumlah Volume Kredit Komersial	10.640	12.136	-12,33%

Uraian masing-masing produk Simpanan Konsumer dapat dilihat di bawah ini:

Kredit Perumahan/Kredit Konstruksi

Perseroan memberikan beragam solusi pembangunan properti dengan banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Perseroan menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang perumahan untuk tujuan modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan apartemen. Untuk jenis kredit ini, Perseroan memberikan kredit maksimal hingga 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi dengan suku bunga mengambang. Fasilitas kredit konstruksi memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan komersial untuk melakukan pengembangan dalam pembangunan bangunan horizontal maupun bangunan vertikal/*high rise building* termasuk sarana dan prasarannya.

Kredit Konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung Program Sejuta Rumah karena penyaluran kredit tersebut mampu menciptakan *supply* rumah. Dalam membuat keputusan untuk membiayai kredit konstruksi, Perseroan memperhitungkan periode jatuh tempo berdasarkan perkiraan masa konstruksi. Kredit konstruksi

dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah.

Nasabah perbankan komersial yang telah mendapatkan Kredit Konstruksi BTN juga dapat memperoleh Kredit Kepemilikan Lahan, dimana Perseroan menyediakan kredit untuk tujuan memperoleh lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian dan apartemen bersubsidi, dalam jumlah sampai dengan 70% dari biaya. Jangka waktu kredit ini mengikuti jangka waktu kredit konstruksinya dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai. dengan tiga tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai.

Perseroan menyalurkan Kredit Konstruksi melalui 2 (dua) produk sebagai berikut:

1. Kredit Konstruksi BTN
2. Kredit Konstruksi Korporasi



Penyaluran Kredit Konstruksi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kinerja masing-masing produk Kredit Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT KONSTRUKSI

Jenis Kredit Konstruksi	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Kredit Konstruksi BTN	9.513.505	13.641.333	-30,26%	11.905.000	79,91 %
Kredit Konstruksi Korporasi	126.320	363.000	-65,20%	337.000	37,48%
Jumlah Penyaluran Kredit Konstruksi	9.639.825	14.004.333	-31,17%	12.242.000	78,74%

VOLUME PENYALURAN KREDIT KONSTRUKSI

Jenis Kredit Konstruksi	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$
Kredit Konstruksi BTN	5.836	5.234	11,50%
Kredit Konstruksi Korporasi	1	2	-50,00%
Jumlah Volume Kredit Konstruksi	5.837	5.236	11,48%

Perseroan mencatatkan penyaluran Kredit Konstruksi pada tahun 2019 sebesar Rp9,64 triliun dengan volume sebanyak 5.837 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit Konstruksi mengalami penurunan 31,17% dibandingkan

pada tahun 2018 sebesar Rp14,01 triliun. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit Konstruksi mencatat pencapaian 78,74% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp12,24 triliun.

Kredit Non Perumahan/Kredit UMKM

Perseroan menyediakan Kredit UMKM sebagai solusi bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bertujuan menyalurkan pembiayaan usaha yang produktif. Perseroan menyalurkan Kredit UMKM melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)
3. Kredit Modal Kerja (KMK)
4. Kredit Investasi UMKM
5. KMK Kontraktor UMKM
6. Linkage Program



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Penyaluran Kredit UMKM untuk masing-masing jenis produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT UMKM

Jenis Kredit UMKM	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
KUR	91.870	111.192	-17,38%	120.000	76,56%
KUMK	1.617.846	1.565.332	3,35%	1.835.830	88,13%
KMK	214.249	408.731	-47,58%	988.400	21,68%
Kredit Investasi UMKM	11.797	17.854	-33,93%	231.000	5,11%
KMK Kontraktor UMKM	31.745	52.388	-39,40%	447.800	7,09%
Linkage Program	2.400	41.300	-94,19%	2.400	100,00%
Jumlah Penyaluran Kredit UMKM	1.969.907	2.196.797	-10,33%	3.625.430	54,34%

VOLUME PENYALURAN KREDIT UMKM

Jenis Kredit UMKM	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
KUR	517	501	3,19%
KUMK	3.639	3.473	4,78%
KMK	229	443	-48,31%
Kredit Investasi UMKM	8	331	-97,58%
KMK Kontraktor UMKM	28	152	-81,58%
Linkage Program	2	91	-97,80%
Jumlah Volume Kredit UMKM	4.423	4.991	-11,38%

Perseroan mencatatkan penyaluran Kredit UMKM pada tahun 2019 sebesar Rp1,97 triliun dengan volume sebanyak 4.423 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit UMKM mengalami penurunan 10,33% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp2,19 triliun. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit UMKM mencatat pencapaian 54,34% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp3,62 triliun.

Kredit Non Perumahan/Kredit Komersial

Perseroan memasarkan Kredit Non Perumahan berupa Kredit Komersial selain dengan memberikan bunga yang kompetitif juga pelayanan prima yang ditawarkan. Kredit Komersial disalurkan Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Investasi
3. KMK Kontraktor



Kinerja masing-masing produk Kredit Komersial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PENYALURAN KREDIT KOMERSIAL

Jenis Kredit Komersial	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
KMK	7.015.557	7.982.148	-12,11%	4.928.600	142,34%
Kredit Investasi	5.238.289	2.489.379	110,43%	1.924.000	272,26%
KMK Kontraktor	2.098.709	2.493.070	-15,82%	2.791.200	75,19%
Jumlah Penyaluran Kredit Komersial	14.352.555	12.964.598	10,71%	9.643.800	148,83%

VOLUME PENYALURAN KREDIT KOMERSIAL

Jenis Kredit Komersial	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$
KMK	188	103	82,52%
Kredit Investasi	67	139	-51,80%
KMK Kontraktor	125	97	28,87%
Jumlah Volume Kredit Komersial	380	339	12,09%

Perseroan mencatatkan penyaluran Kredit Komersial pada tahun 2019 sebesar Rp14,35 triliun dengan volume sebanyak 380 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Kredit Komersial mengalami kenaikan 10,87% dibandingkan pada

tahun 2018 sebesar Rp12,94 triliun. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Kredit Komersial mencatat pencapaian 148,83% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp9,64 triliun.

Produk Simpanan Komersial

Perseroan menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial yang meliputi Giro dan Deposito Berjangka Lembaga. Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Komersial Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

JUMLAH DANA SIMPANAN KOMERSIAL

Jenis Simpanan Komersial	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$
Giro Komersial	48.113.096	53.674.097	-10,36%
Deposito Berjangka Lembaga	89.787.221	92.589.683	-3,03%
Jumlah Dana Simpanan Komersial	137.899.885	146.263.780	-5,72%



Pendukung Bisnis



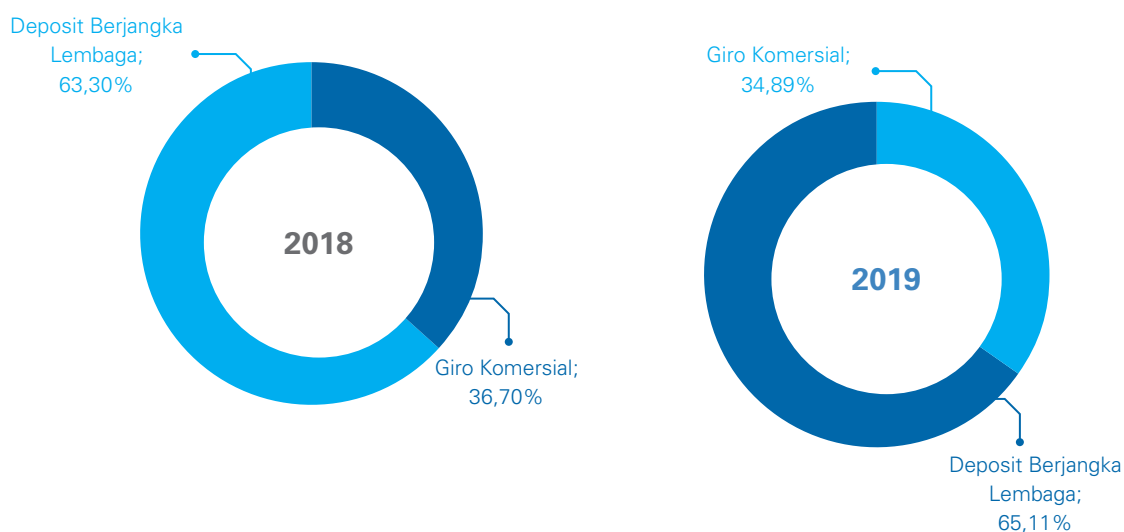
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

KOMPOSISI DANA SIMPANAN KOMERSIAL



Deposito Berjangka Lembaga berkontribusi cukup besar terhadap jumlah Simpanan Komersial, dengan komposisi 63,30% di tahun 2018 dan 65,11% di tahun 2019.

Di tahun 2019, Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun dalam produk Giro dan Deposito Berjangka Lembaga Perseroan sebesar Rp137,89 triliun, turun 5,72% dari tahun 2018 sebesar Rp146,26 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Giro dan Deposito

Berjangka Lembaga sebanyak 58.365 rekening, meningkat 5,69% dari tahun 2018 sebanyak 55.223 rekening.

Secara keseluruhan, dana pihak ketiga belum sesuai proyeksi sehingga perlu dilakukan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang fokus pada dana dengan biaya bunga murah (*low cost funding*), yaitu giro dan tabungan, sementara deposito sebagai penyeimbang tetap dipasarkan. Hal ini sejalan dengan strategi bank untuk meningkatkan CASA (*Current Account Saving Account*).

JUMLAH REKENING SIMPANAN KOMERSIAL

Jenis Simpanan Komersial	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Giro Komersial	48.669	46.463	4,75%
Deposito Berjangka Lembaga	9.696	8.760	10,68%
Jumlah Rekening Simpanan Komersial	58.365	55.223	5,69%



Uraian masing-masing produk Simpanan Komersial dapat dilihat di bawah ini:

Giro Komersial

Perseroan memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Giro melalui Giro FLPP dan Giro Non FLPP. Kinerja masing-masing produk Giro Komersial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DANA GIRO KOMERSIAL

Jenis Giro Komersial	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Giro Non FLPP	26.883.785	33.469.326	-19,68%
Giro FLPP	21.229.311	20.204.771	5,07%
Jumlah Dana Giro Komersial	48.113.096	53.674.097	-10,36%

JUMLAH REKENING GIRO KOMERSIAL

Jenis Giro Komersial	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Giro Non FLPP	48.663	46.457	4,75%
Giro FLPP	6	5	20,00%
Jumlah Rekening Giro Komersial	48.669	46.463	4,75%

Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Giro Komersial sebesar Rp48,11 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 48.669 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Giro Komersial mengalami penurunan 10,36% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp53,67 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Giro Komersial sebanyak 48.669 rekening, meningkat 4,75% dari tahun

2018 sebanyak 46.463 rekening.

Deposito Berjangka Lembaga

Perseroan juga memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Deposito Berjangka Lembaga melalui produk Deposito Berjangka Lembaga dan Deposito *On Call* Lembaga. Kinerja masing-masing produk Deposito Berjangka Lembaga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DANA DEPOSITO BERJANGKA LEMBAGA

Jenis Deposito Berjangka Lembaga	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Deposito Berjangka Lembaga	88.605.059	91.395.169	-3,05%
Deposito On Call Lembaga	1.182.162	1.194.513	-1,03%
Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga	89.787.221	92.589.683	-3,03%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH REKENING DEPOSITO BERJANGKA LEMBAGA

Jenis Deposito Berjangka Lembaga	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Deposito Berjangka Lembaga	9.569	8.666	10,42 %
Deposito On Call Lembaga	127	94	35,11 %
Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga	9.696	8.760	10,68 %

Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Deposito Berjangka Lembaga sebesar Rp89,78 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 9.696 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Deposito Berjangka Lembaga mengalami penurunan 3,03% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp92,59 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Deposito Berjangka Lembaga sebanyak 9.696 rekening, meningkat 10,68% dari tahun 2018 sebanyak 8.760 rekening.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mewajibkan bank umum di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional untuk melaporkan dan mempublikasikan

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam mata uang Rupiah. Ketentuan lain terkait transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah diatur secara lebih rinci pada Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2017.

Perseroan secara berkala memperbaharui SBDK sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan transformasi SBDK untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko kredit. SBDK juga meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK BTN
2018-2019

Periode	Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Segmentasi Kredit				
	Kredit			Kredit Konsumsi	
	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	Non KPR
Tahun 2019	11,00%	11,25%	n/a	10,75%	11,50%
Tahun 2018	11,25%	11,50%	n/a	10,50%	11,50%

**KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT KONVENSIONAL**

Profitabilitas segment Konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**KINERJA KEUANGAN SEGMENT KONVENSIONAL
(SEBELUM ELIMINASI)**

Segment Konvensional	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(1/3)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan segment	23.271.432	20.781.512	2.489.920	11,98%
Beban segment	(15.325.002)	(11.756.380)	(3.568.622)	30,35%
Pendapatan segment - neto	7.946.430	9.025.132	(1.078.702)	-11,95%
Pendapatan operasional lainnya	2.035.424	1.979.067	56.357	2,85%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.099.614)	(1.273.482)	(1.826.132)	143,40%
Beban operasional lainnya	(6.599.177)	(6.462.296)	(136.881)	2,12%
Laba operasional	283.063	3.268.421	(2.985.358)	-91,34%
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(110.461)	126.086	(236.547)	-187,61%
Posisi Keuangan				
Total aset	288.173.171	280.367.092	7.806.079	2,78%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	268.291.413	259.995.522	8.295.891	3,19%

Pendapatan dari segment Konvensional berupa Pendapatan Bunga sebesar Rp23,27 triliun, meningkat 11,98% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,78 triliun. Terdapat kenaikan beban segment dari Beban Bunga sebesar 2,85% yang berdampak terhadap penurunan Pendapatan Segment 11,95% dibandingkan tahun 2018.

Di tahun 2019 Perseroan menerapkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang berdampak terhadap kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan hingga Rp1,83 triliun, atau meningkat

hingga 143,40% terhadap tahun 2018. Hal ini berimbas pada Laba Operasional segment Konvensional yang turun hingga 91,34%, dari Rp3,27 triliun di tahun 2018 menjadi Rp283,06 miliar di tahun 2019.

Total aset segment Konvensional tahun 2019 mencapai Rp288,17 triliun, mengalami peningkatan 2,78% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp280,37 triliun. Sedangkan total liabilitas dan dana syirkah temporer sebesar Rp268,29 triliun, meningkat 3,91% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp259,99 triliun.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

SEGMENT SYARIAH

KINERJA OPERASI DAN BISNIS SEGMENT SYARIAH

Perseroan juga mengembangkan model perbankan dengan menganut sistem Syariah. Segment usaha Syariah menyediakan produk simpanan dan pembiayaan bersifat konsumen dan komersial. Kinerja produk dari segment Syariah diuraikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah, dengan masing-masing uraian sebagai berikut:

PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA PADA SEGMENT SYARIAH

Perbankan
Syariah/
Unit Usaha
SyariahProduk Pembiayaan
Syariah

- Pembiayaan Konsumer
- Pembiayaan Komersial

Produk Simpanan
Syariah

- Giro Syariah
- Tabungan Syariah
- Deposito Syariah

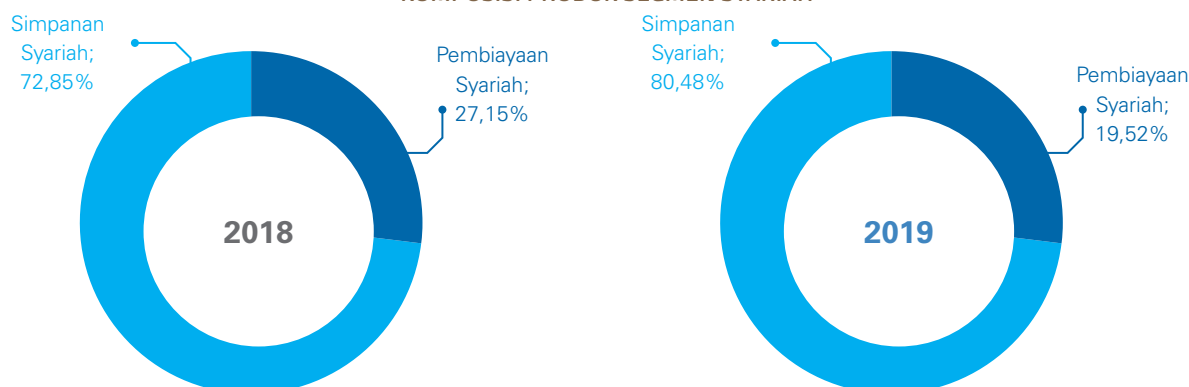
Sekilas tentang kinerja dari segment Syariah dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

PERKEMBANGAN PRODUK DARI SEGMENT SYARIAH

Produk Segment Syariah	Realisasi 2019		Realisasi 2018		Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)			
	(1)		(2)		$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Pembiayaan Syariah	5.302.479	19,52%	8.326.533	27,15%	-36,32%	7.723.475	68,65%
Simpanan Syariah	21.861.284	80,48%	22.342.676	72,85%	-2,16%	32.048.875	89,87%
Jumlah Pembiayaan dan Simpanan pada Segment Syariah	27.163.763	100,00%	30.669.209	100,00%	-11,42%	32.048.875	84,76%



KOMPOSISI PRODUK SEGMENT SYARIAH



Dari komposisi di atas, terlihat bahwa kegiatan bisnis segment Syariah Perseroan sebagian besar berkontribusi dari Simpanan Syariah yang himpunan Dana Pihak Ketiga dari produk Giro, Tabungan dan Deposito Syariah.

Rincian kinerja masing-masing produk dari segment Syariah dapat dilihat di bawah ini.

Produk Pembiayaan Syariah

Perseroan juga melakukan pembiayaan perumahan dan non perumahan melalui mekanisme Syariah, dengan klasifikasi produk pembiayaan Unit Usaha Syariah ke dalam jenis konsumen dan komersial. Rincian informasi terkait kinerja produk Pembiayaan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

JUMLAH PEMBIAYAAN SYARIAH

Jenis Pembiayaan Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Pembiayaan Konsumer	3.879.900	5.671.816	-31,59%	5.056.050	76,74%
Pembiayaan Komersial	1.422.579	2.654.717	-46,41%	2.667.425	53,33%
Jumlah Pembiayaan Syariah	5.302.479	8.326.533	-36,32%	7.723.475	68,65%



Pendukung Bisnis



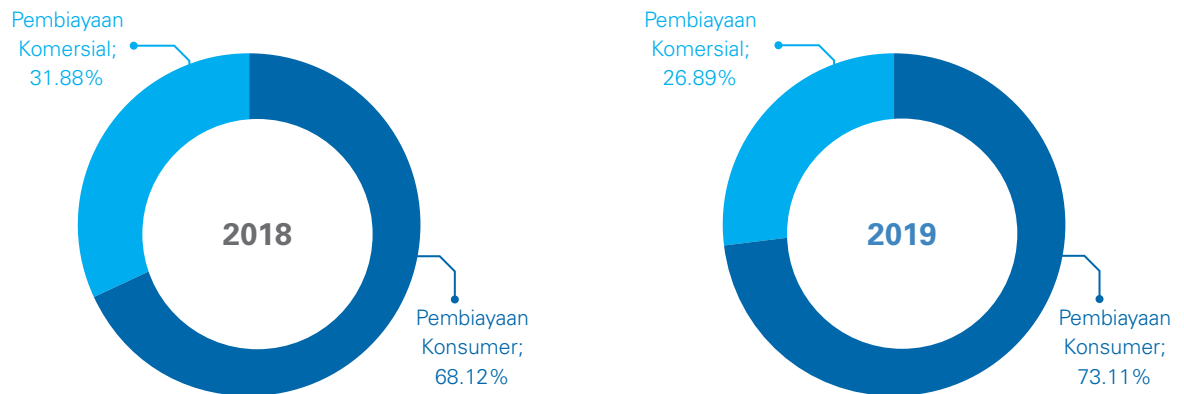
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

KOMPOSISI PEMBIAYAAN SYARIAH



Dari bagan di atas dapat terlihat bahwa Pembiayaan Syariah Konsumer berkontribusi besar terhadap total Pembiayaan Syariah, masing-masing dengan kontribusi 68,12% di tahun 2018 dan 73,17% di tahun 2019.

Perseroan mencatatkan penyaluran Pembiayaan Syariah Konsumer pada tahun 2019 sebesar Rp5,30 triliun dengan volume sebanyak 25.520 pembiayaan. Nilai penyaluran Pembiayaan Syariah Konsumer mengalami penurunan 36,32% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp8,33

triliun. Hal ini terutama disebabkan terbatasnya Kuota KPR Subsidi yang berimbas pada penurunan pembiayaan KPR Subsidi Syariah oleh Perseroan sebesar Rp1,95 triliun dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada Pembiayaan Komersial, penurunan dipengaruhi oleh strategi Unit Usaha Syariah di tahun 2019 yang berfokus pada penyempurnaan bisnis proses, perbaikan kualitas portfolio pembiayaan. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Pembiayaan Syariah Konsumer mencatat pencapaian 68,65% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp7,72 triliun.

VOLUME PEMBIAYAAN SYARIAH

Jenis Pembiayaan Syariah	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Pembiayaan Konsumer	23.271	39.222	-40,67%	29.532	78,80%
Pembiayaan Komersial	2.249	3.134	-28,24%	1.073	209,60%
Jumlah Volume Pembiayaan Syariah	25.520	42.356	-39,75%	30.605	83,38%

Uraian masing-masing produk Pembiayaan Syariah dapat dilihat di bawah ini.

Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan Konsumer Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan, meliputi:
 - a. KPR Subsidi yang disalurkan melalui:

- KPR BP2BT iB
- KPR Sejahtera Tapak iB
- KPR Sejahtera Susun iB
- KPR SSM Tapak iB



- KPR SSM Susun iB
 - b. KPR Non Subsidi yang disalurkan melalui:
 - KPR Platinum iB
 - KPR Indent iB
 - c. Non KPR yang disalurkan melalui:
 - Pembiayaan Bangun Rumah iB
2. Pembiayaan Non Perumahan, meliputi:
- a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB
 - b. Pembiayaan Gadai iB
 - c. Pembiayaan Multijasa iB
 - d. Pembiayaan Multimanfaat iB
 - e. Pembiayaan Emasku

Penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah untuk masing-masing jenis produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Jenis Pembiayaan Konsumer Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)

Pembiayaan Perumahan

KPR Subsidi

• KPR BP2BT iB	136.662	-	-	-	-
• KPR Sejahtera Tapak iB	698.168	449.915	55,18%	-	-
• KPR Sejahtera Susun iB	-	425	-100,00%	-	-
• KPR SSM Tapak iB	1.117.577	3.446.371	-67,57%	-	-
• KPR SSM Susun iB	7.801	13.076	-40,34%	-	-
	1.960.208	3.909.787	-49,86%	2.376.011	82,50%

KPR Non Subsidi

• KPR Platinum iB	1.176.171	1.098.929	7,03%	1.846.318	63,70%
• KPR Indent iB	670.493	550.710	21,75%	700.046	95,78%
	1.846.664	1.649.639	11,94%	2.546.364	72,52%

Non KPR

• Pembiayaan Bangun Rumah iB	6.407	10.199	-37,18%	13.075	49,00%
	6.407	10.199	-37,18%	13.075	49,00%

Pembiayaan Non Perumahan

Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	462	3.227	-85,68%	9.000	5,13%
Pembiayaan Gadai iB	1.067	866	23,21%	10.000	10,67%
Pembiayaan Multijasa iB	6.507	8.939	-27,21%	20.000	32,54%
Pembiayaan Multimanfaat iB	58.501	89.158	-34,39%	81.600	71,69%
Pembiayaan Emasku	84	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Jenis Pembiayaan Konsumer Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
	66.621	102.191	-34,81%	120.600	55,24%
Jumlah Pembiayaan Konsumer Syariah	3.879.900	5.671.816	-31,59%	5.056.050	76,74%

VOLUME PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Jenis Pembiayaan Konsumer Syariah	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Pembiayaan Perumahan					
KPR Subsidi					
• KPR BP2BT iB	1.515	-	-	-	-
• KPR Sejahtera Tapak iB	5.557	3.649	52,29%	-	-
• KPR Sejahtera Susun iB	-	2	-100,00%	-	-
• KPR SSM Tapak iB	8.943	28.371	-68,48%	-	-
• KPR SSM Susun iB	33	61	-45,90%	-	-
	16.048	32.083	-49,98%	18.585	86,35%
KPR Non Subsidi					
KPR Platinum iB	4.197	3.920	7,07%	1.846.318	63,70%
KPR Indent iB	1.761	1.464	20,29%	700.046	95,78%
	5.958	5.384	10,66%	2.546.364	72,52%
Non KPR					
Pembiayaan Bangun Rumah iB	44	65	-32,31%	13.075	49,00%
	44	65	-32,31%	-	-
Jumlah Pembiayaan Perumahan	22.050	37.532	-41,25%	-	-



VOLUME PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Jenis Pembiayaan Konsumer Syariah	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Pembiayaan Non Perumahan					
• Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	5	20	-75,00%	9.000	5,13%
• Pembiayaan Gadai iB	76	96	-20,83%	10.000	10,67%
• Pembiayaan Multijasa iB	133	172	-22,67%	20.000	32,54%
• Pembiayaan Multimanfaat iB	1.005	1.402	-28,32%	81.600	71,69%
• Pembiayaan Emasku	2	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Non Perumahan	1.221	1.690	-27,75%	120.600	55,24%
Jumlah Volume Pembiayaan Konsumer Syariah	23.271	39.222	-40,67%	5.056.050	76,74%

Perseroan mencatatkan penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp3,88 triliun dengan volume sebanyak 23.271 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah mengalami penurunan 31,59% dibandingkan pada tahun 2018

Pembiayaan Komersial

Pembiayaan Komersial Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan
 - Kredit Yasa Griya iB

sebesar Rp5,67 triliun. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah mencatat pencapaian 76,74% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp5,06 triliun.

2. Pembiayaan Non Perumahan
 - UMKM Syariah
 - Pembiayaan Modal Kerja iB
 - Pembiayaan Investasi iB



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah untuk masing-masing jenis produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH PEMBIAYAAN KOMERSIAL SYARIAH

Jenis Pembiayaan Komersial Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Pembiayaan Perumahan					
Kredit Yasa Griya iB	1.341.878	2.259.423	-40,61 %	2.052.425	65,38 %
	1.341.878	2.259.423	-40,61 %	2.052.425	65,38 %
Pembiayaan Non Perumahan					
UMKM Syariah					
Pembiayaan Modal Kerja iB	61.450	355.369	-82,71 %	505.000	12,17 %
Pembiayaan Investasi iB	19.251	39.925	-51,78 %	110.000	17,50 %
	80.701	395.294	-79,58 %	615.000	13,12 %
Jumlah Pembiayaan Komersial Syariah	1.422.579	2.654.717	-46,41 %	2.667.425	53,33 %

JUMLAH PEMBIAYAAN KOMERSIAL SYARIAH

Jenis Pembiayaan Komersial Syariah	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2018 (unit)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (unit)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Pembiayaan Perumahan					
Kredit Yasa Griya iB	2.210	2.980	-25,84 %	872	253,44 %
	2.210	2.980	-25,84 %		
Pembiayaan Non Perumahan					
UMKM Syariah					
• Pembiayaan Modal Kerja iB	18	132	-86,36 %	127	14,17 %
• Pembiayaan Investasi iB	21	22	-4,55 %	74	28,38 %
	39	154	-74,68 %	201	19,40 %
Jumlah Volume Pembiayaan Komersial Syariah	2.249	3.134	-28,24 %	1.073	209,60 %



Perseroan mencatatkan penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp1,42 triliun dengan volume sebanyak 2.249 pembiayaan kredit. Nilai penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah mengalami penurunan 46,41% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp2,65 triliun. Hal ini terutama disebabkan Strategi Unit Usaha Syariah di tahun 2019 berfokus pada penyempurnaan

bisnis proses dan perbaikan kualitas portfolio pembiayaan. Hal ini terlihat dari penurunan realisasi untuk pembiayaan modal kerja iB yang mengalami penurunan signifikan sebesar 82,71%. Jika dibandingkan target, realisasi nilai penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah mencatat pencapaian 53,33% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp2,67 triliun.

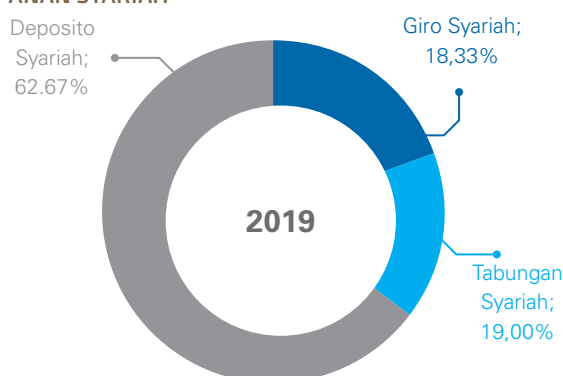
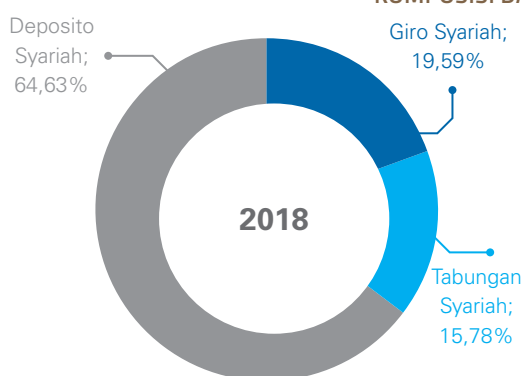
Produk Simpanan Syariah

Perseroan juga melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Unit Usaha Syariah melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito Syariah. Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

JUMLAH DANA SIMPANAN SYARIAH

Jenis Simpanan Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Giro Syariah	4.007.722	4.376.126	-8,42%	4.927.910	81,33%
Tabungan Syariah	4.152.815	3.526.393	17,76%	4.241.482	97,91%
Deposito Syariah	13.699.901	14.440.156	-5,13%	15.182.008	90,24%
Jumlah Dana Simpanan Syariah	21.860.438	22.342.676	-2,16%	24.325.400	89,87%

KOMPOSISI DANA SIMPANAN SYARIAH



Deposito Syariah berkontribusi cukup besar terhadap jumlah Simpanan Syariah, dengan komposisi 64,63% di tahun 2018 dan 62,67% di tahun 2019.

Di tahun 2019, Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun dalam produk Simpanan Syariah sebesar Rp21,86 triliun, menurun 2,15% dari tahun 2018 sebesar Rp22,34 triliun, atau mencapai 89,87% terhadap target tahun 2019 sebesar Rp24,43 triliun. Baik Giro, Tabungan, maupun Deposito Syariah yang dikelola Perseroan mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan strategi unit usaha syariah BTN pada tahun 2019 berfokus menurunkan *Cost of Fund* dengan cara mengurangi volume dan konsentrasi deposito lembaga/Korporasi yang cenderung memiliki *Cost of fund* yang lebih tinggi.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Simpanan Syariah sebanyak 773.747 rekening, meningkat 22,51% dari tahun 2018 sebanyak 631.584 rekening, atau mencapai 110,10%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

terhadap target tahun 2019 sebanyak 702.764 rekening. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tabungan haji dan Umroh BTN iB yang telah melakukan konversi tabungan haji konvensional ke tabungan haji syariah.

JUMLAH REKENING SIMPANAN SYARIAH

Jenis Simpanan Syariah	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (rekening)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Giro Syariah	10.920	9.516	14,75%	10.457	104,42%
Tabungan Syariah	755.479	616.371	22,57%	685.715	110,17%
Deposito Syariah	7.348	5.697	28,98%	6.592	111,47%
Jumlah Rekening Simpanan Syariah	773.747	631.584	22,51%	702.764	110,10%

Uraian masing-masing produk Simpanan Syariah dapat dilihat di bawah ini:

Giro Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Giro diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB. Kinerja masing-masing produk Giro Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DANA GIRO SYARIAH

Jenis Giro Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Giro BTN iB	2.593.010	2.781.854	-6,76%	3.451.748	75,15%
Giro BTN Prima iB	1.414.712	1.594.272	-11,26%	1.476.162	95,84%
Jumlah Dana Giro Syariah	4.007.722	4.376.126	-8,42%	4.927.910	81,33%

JUMLAH REKENING GIRO SYARIAH

Jenis Giro Syariah	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (rekening)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Giro BTN iB	9.136	7.815	16,90%	8.521	107,22%
Giro BTN Prima iB	1.784	1.701	4,88%	1.936	92,15%
Jumlah Rekening Giro Syariah	10.920	9.516	14,75%	10.457	104,42%



Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Giro Syariah sebesar Rp.4,01 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 10.920 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Giro Syariah mengalami penurunan 8,42% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp4,38 triliun. Hal ini terutama disebabkan penurunan Giro BTN iB yang mengalami penurunan sebesar Rp188 miliar. Jika dibandingkan target, realisasi nilai Dana Pihak Ketiga dari Giro Syariah mencatat pencapaian 81,33% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp4,93triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Giro Syariah sebanyak 10.920 rekening, meningkat 14,75% dari tahun 2018 sebanyak 9.516 rekening, atau mencapai 104,42% terhadap target tahun 2019 sebanyak 10.457 rekening. Hal ini terutama disebabkan peningkatan jumlah rekening Giro BTN iB yang merupakan giro ritel sebesar 16,90%.

Tabungan Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Tabungan diberikan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Batara iB
2. Tabungan BTN Prima iB
3. Tabungan BTN Haji iB
4. TabunganKu iB
5. Tabungan BTN Qurban iB
6. Tabungan Simpel BTN iB
7. Tabungan Emas BTN iB

Kinerja masing-masing produk Tabungan Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DANA TABUNGAN SYARIAH

Jenis Tabungan Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	$((1-2)/2)$	(3)	(1/3)
Tabungan BTN Batara iB	780.388	760.378	2,63%	1.159.406	67,31%
Tabungan BTN Prima iB	3.166.824	2.664.925	18,83%	2.641.601	119,88%
Tabungan BTN Haji iB	191.922	92.296	107,94%	269.174	71,30%
TabunganKu iB	5.967	3.805	56,82%	-	-
Tabungan BTN Qurban iB	2.588	2.147	20,54%	171.301	1,51%
Tabungan Simpel BTN iB	3.535	2.141	65,11%	-	-
Tabungan Emas BTN iB	1.591	701	126,96%	-	-
Jumlah Dana Tabungan Syariah	4.152.815	3.526.393	17,76%	4.241.482	97,91%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

JUMLAH REKENING TABUNGAN SYARIAH

Jenis Tabungan Syariah	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)	Target 2019 (rekening)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Tabungan BTN Batara iB	435.594	388.194	12,21 %	431.800	100,88%
Tabungan BTN Prima iB	127.879	120.787	5,87%	136.125	93,94%
Tabungan BTN Haji iB	116.946	39.627	195,12%	42.299	276,47%
TabunganKu iB	11.375	9.733	16,87%	70.390	16,16%
Tabungan BTN Qurban iB	5.235	4.271	22,57%	5.101	102,63%
Tabungan Simpel BTN iB	57.137	53.057	7,69%	-	-
Tabungan Emas BTN iB	1.313	702	87,04%	-	-
Jumlah Dana Tabungan Syariah	755.479	616.371	22,57%	685.715	110,17%

Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Tabungan Syariah sebesar Rp4,15 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 755.479 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Syariah mengalami peningkatan 24,49% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp3,53 triliun. Hal ini terutama disebabkan peningkatan jumlah tabungan Haji dan Umroh BTN iB sebesar 110,17%. Jika dibandingkan target, realisasi nilai Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Syariah mencatat pencapaian 97,91% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp4,24 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Tabungan Syariah sebanyak 755.479 rekening, meningkat 22,57% dari tahun 2018 sebanyak 616.371 rekening, atau mencapai 107,50% terhadap target tahun 2019 sebanyak 702.764 rekening. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tabungan Haji dan Umroh BTN iB yang telah melakukan konversi tabungan haji konvensional ke tabungan haji syariah.

Deposito Syariah

Deposito Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Deposito diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Deposito BTN iB baik untuk perorangan maupun untuk lembaga, serta Deposito On Call iB. Kinerja masing-masing produk Deposito Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JUMLAH DANA DEPOSITO SYARIAH

Jenis Deposito Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Deposito BTN iB (Perorangan)	732.712	597.912	22,54%	1.505.214	48,68%
Deposito BTN iB (Lembaga)	12.898.957	13.805.244	-6,56%	13.637.077	94,59%



JUMLAH DANA DEPOSITO SYARIAH

Jenis Deposito Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018- 2019 (%)	Target 2019 (Rp-juta)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Deposito On Call iB	68.232	37.000	84,41 %	39.717	171,79 %
Jumlah Deposito Giro Syariah	13.669.901	14.440.156	-5,13	15.182.008	90,04 %

JUMLAH REKENING DEPOSITO SYARIAH

Jenis Deposito Syariah	Realisasi 2019 (rekening)	Realisasi 2018 (rekening)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%)	Target 2019 (rekening)	Pencapaian Target 2019 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(3)	(1/3)
Deposito BTN iB (Perorangan)	6.184	4.603	34,35 %	5.350	115,59 %
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.144	1.075	6,42 %	1.231	92,93 %
Deposito On Call iB	20	19	5,26 %	10	200 %
Jumlah Rekening Deposito Syariah	7.348	5.697	28,98 %	6.591	111,49 %

Di tahun 2019, Perseroan menghimpun Deposito Syariah sebesar Rp13,67 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 7.348 rekening. Nilai Dana Pihak Ketiga dari Deposito Syariah mengalami penurunan 5,13% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp14,44 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh strategi Unit Usaha Syariah yang berfokus untuk menurunkan *Cost of Fund* dan mengurangi Deposito Lembaga/Korporasi yang cenderung memiliki Cost of Fund yang tinggi. Jika dibandingkan target, realisasi nilai Dana Pihak Ketiga dari Deposito Syariah mencatat pencapaian

90,39% dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp15,16 triliun.

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2019 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Deposito Syariah sebanyak 7.348 rekening, meningkat 28,98% dari tahun 2018 sebanyak 5.697 rekening, atau mencapai 111,49% terhadap target tahun 2019 sebanyak 6.591 rekening. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya Deposito BTN iB sebesar 34,35% yang merupakan Deposito perorangan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT SYARIAH

Profitabilitas segment Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KINERJA KEUANGAN SEGMENT SYARIAH
(SEBELUM ELIMINASI)

Segment Syariah	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Realisasi 2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)	(1/3)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan segment	2.448.442	2.070.246	378.196	18,27%
Beban segment	(1.433.071)	(1.006.201)	(426.870)	42,42%
Pendapatan segment - neto	1.015.371	1.064.045	(48.674)	-4,57%
Pendapatan operasional lainnya	74.428	92.527	(18.099)	-19,56%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(387.051)	(440.945)	53.894	-12,22%
Beban operasional lainnya	(464.038)	(390.248)	(73.790)	18,91%
Laba operasional	238.710	325.379	(86.669)	-26,64%
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(250)	(109.611)	109.361	-99,77%
Posisi Keuangan				
Total aset	28.385.675	28.399.275	(13.600)	-0,05%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	24.431.238	24.930.397	(499.159)	-2,00%

Pendapatan dari segment Syariah berupa bagi hasil dan margin Unit Syariah sebesar Rp2,45 triliun, tumbuh 18,27% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,07 triliun. Terdapat kenaikan beban segment dari Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah sebesar 42,42% yang berdampak terhadap penurunan Pendapatan Segment 4,57% dibandingkan tahun 2018.



ASPEK PEMASARAN

STRATEGI DAN UPAYA PEMASARAN

Sejalan dengan arah bisnis Bank, strategi bidang perkreditan tetap memperkuat positioning bisnis di sektor perumahan dan mensukseskan Program Sejuta Rumah. Untuk itu, pertumbuhan kredit konsumen difokuskan ekspansif pada segmen mass dan perluasan di segmen lainnya. Sedangkan pertumbuhan kredit komersial diarahkan untuk meningkatkan *supply* perumahan dengan mengoptimalkan *construction value chain* dan *pipeline* debitur konstruksi.



Dominan KPR di
Segmen Mass



Memperluas Kredit Segmen
Emerging Affluent and Affluent



Meningkatkan kredit konstruksi
dalam mendukung supply rumah
yang focus pada segmen UKM
dan Komersial

Bank BTN siap untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah dan
ikut serta mensejahterakan rakyat Indonesia

DOMINAN KPR DI SEGMENT MASS

Segmen mass subsidized

Segmen mass subsidized mengelola pinjaman perumahan subsidi yang ditujukan untuk mendukung program sejuta rumah dimana 700.000 unit diantaranya direalisasikan dalam bentuk hunian bersubsidi. Komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program sejuta rumah, akselerasi program TAPERA serta captive market Bank BTN yang mencapai 97,00% merupakan *competitive advantage* untuk tetap ekspansif pada segmen ini. Pertumbuhan bisnis KPR subsidi sangat tergantung pada alokasi pemerintah, dimana alokasi hunian subsidi tahun 2019 (234.000 unit) lebih rendah dibanding dengan tahun 2018 (267.000 unit).

Segmen mass non subsidized

Sejalan dengan strategi segmen *mass subsidized*, pada segmen mass non subsidized pemberian kredit difokuskan untuk mendukung realisasi program sejuta rumah bagi masyarakat segmen mass yang tidak dikategorikan sebagai penerima subsidi. Pada segmen ini, Bank BTN hadir sebagai solusi masyarakat unbankable khususnya masyarakat sektor informal melalui persyaratan pemberian kredit yang fleksibel, dengan menawarkan proposisi Bank BTN sebagai *One Stop Solution* kebutuhan perbankan bagi *under-served population*. Selain itu, guna memaksimalkan *share of wallet* nasabah yang dimiliki, pada segmen ini penyaluran kredit tidak terbatas pada pemberi KPR namun juga melalui penawaran home equity dan berbagai personal loan lainnya. Segmen ini mengelola pemberian pinjaman dengan batas plafon sebesar Rp 350 Juta.

Inisiatif Strategis Pertumbuhan Segmen Mass

Bank BTN telah menetapkan serangkaian strategi sebagai pedoman penguatan bisnis segmen mass untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Strategi Pertumbuhan Kredit Segmen Mass

1. Memperkuat kontribusi pertumbuhan (SSB, FLPP, BP2BT dan TAPERA)
2. Meningkatkan pertumbuhan KPR Non Subsidi dengan "skema" KPR segmen MBR dan ASN
3. Memperkuat peran BTN HFC
4. Mengembangkan inisiatif yang mendukung pengembangan bisnis developer hunian bersubsidi
5. *Streamlined* proses penyaluran KPR Subsidi
6. Memperluas aliansi strategis dengan developer di luar pulau Jawa
7. Meningkatkan porsi kredit bermargin tinggi (KAR dan Kring) di segmen *payroll* dan pensiunan
8. Mengembangkan model bisnis untuk konsumen mass informal

Memperluas kredit di segmen Emerging Affluent & Affluent

Selain memperkuat *positioning* pada segmen mass, Bank BTN juga memperluas pembiayaan ke segmen *emerging affluent & affluent* sebagai strategi pertumbuhan kredit konsumen. Pertumbuhan populasi *affluent* dan *middle class* yang diproyeksikan tumbuh dari 121 juta jiwa menjadi 141 juta jiwa di tahun 2020 merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh bank dalam melakukan ekspansi pertumbuhan aset ritel di tiga tahun kedepan.

1. Segmen Emerging Affluent

Segmen emerging affluent ditujukan bagi nasabah konsumen dengan batas pinjaman di atas Rp350 juta s.d Rp 1 miliar. Ekspektasi pertumbuhan populasi segmen *emerging affluent* yang mencapai 415.000 jiwa di tahun 2020 dan *ticket size* yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen mass, merupakan potensi bagi bank untuk memperluas pangsa pasar segmen emerging. Strategi perluasan difokuskan untuk memperdalam *share of wallet* melalui pengembangan produk dan mengembangkan *mortgage ecosystem*.

2. Segmen Affluent

Pertumbuhan segmen *affluent* diekspektasikan dapat tumbuh lebih pesat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan program *tax amnesty* dan pertumbuhan populasi segmen *affluent* yang mencapai 6,6 juta jiwa pada tahun 2020 (dari 4,9 juta jiwa di tahun 2015). Selaras dengan bisnis inti bank, strategi yang ditempuh oleh Bank adalah mengembangkan skema pembiayaan perumahan untuk nasabah dengan batas pinjaman di atas Rp1 miliar.

3. Inisiatif Strategis Pertumbuhan Segmen Emerging & Affluent

Dengan ekspektasi pertumbuhan populasi segmen emerging & affluent yang lebih baik di tiga tahun mendatang dan sejalan dengan strategi penguatan bisnis tahun 2019 – 2021, inisiatif pertumbuhan segmen *emerging & affluent* adalah sebagai berikut :

a. Strategi Pertumbuhan Kredit Segmen Emerging Affluent & Affluent

- Menyusun skema KPR Suku Bunga Tunggal, bagi segmen pegawai BUMN dan anak usahanya
- Mengembangkan produk baru (relation based pricing)
- Meningkatkan kapabilitas *cross sell* dan saluran distribusi
- Memperluas pasar ke KPR Sekunder
- Membangun ekosistem KPR Digital
- Mengembangkan skema pembiayaan perumahan untuk dapat memenuhi kebutuhan segmen affluent

b. Memperluas Pangsa Pasar Segmen UKM, Komersial dan Korporasi

Dalam mendukung realisasi program sejuta rumah, strategi pertumbuhan kredit komersial difokuskan untuk meningkatkan *supply* perumahan. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah strategis diarahkan untuk memperkuat *construction value chain* dan pipeline management debitur konstruksi.

• Segmen UKM

Segmen UKM Bank BTN mengelola penyaluran pinjaman sampai dengan Rp10 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup. Pertumbuhan revenue pool segmen UKM yang diperkirakan mencapai 15% pada tiga tahun ke depan dan cakupan bisnis UKM yang hampir menguasai 99% entitas bisnis di Indonesia, merupakan potensi untuk meningkatkan kredit komersial perumahan dan komersial pendukung perumahan di segmen UKM.

• Segmen Komersial

Sejalan dengan strategi segmen UKM, pembiayaan segmen komersial diarahkan untuk memperkuat bisnis mortgage dengan mengoptimalkan *construction value chain* yang terdapat di sektor konstruksi perumahan.



Untuk mendukung hal tersebut, besaran inisiatif yang dilakukan adalah meningkatkan pipeline management debitur konstruksi dan *value chain anchor group* untuk perluasan *supply*. Segmen komersial menangani penyaluran kredit di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp500 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup.

- Segmen Korporasi

Segmen Korporasi mengelola penyaluran kredit di atas Rp500 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup pada perusahaan – perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan – perusahaan Nasional dan Multi Nasional besar di Indonesia. Inisiatif yang difokuskan pada segmen ini adalah:

- Mengidentifikasi dan akuisisi anchor utama korporat dan BUMN
- Ekspansi bisnis sindikasi melalui fokus pembiayaan infrastruktur pemerintah yang mencakup hulu hingga hilir

- Inisiatif Strategis Pertumbuhan Segmen UKM, Komersial dan Korporasi

Bank BTN telah menetapkan serangkaian strategi sebagai pedoman untuk memperluas pangsa pasar segmen UKM, Komersial dan Korporasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

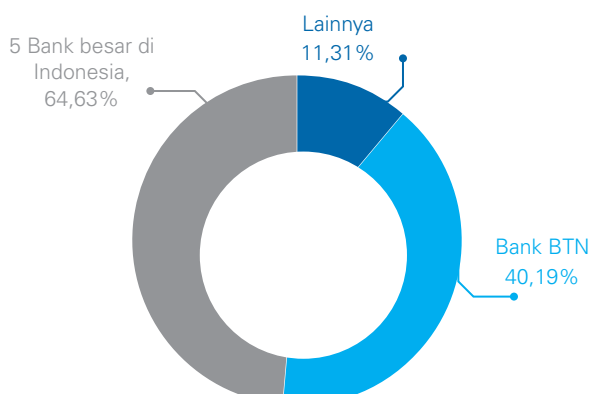
- Strategi Pertumbuhan Kredit Segmen UKM, Komersial dan Korporasi
- Dominan pada KYG Subsidi dan Non Subsidi dengan harga jual sekitar Rp350 Juta
- Menggunakan *anchor* utama untuk menargetkan seluruh *construction value chain*
- Mengembangkan paket bundling sederhana untuk industri konstruksi
- Mengembangkan produk *supply – chain financing*
- Melakukan transformasi penjualan Kantor Pusat dan Kantor Cabang (memperkuat model *RM hunter*)
- Fokus pada proyek – proyek BUMN dan sindikasi yang disponsori oleh pemerintah

PANGSA PASAR

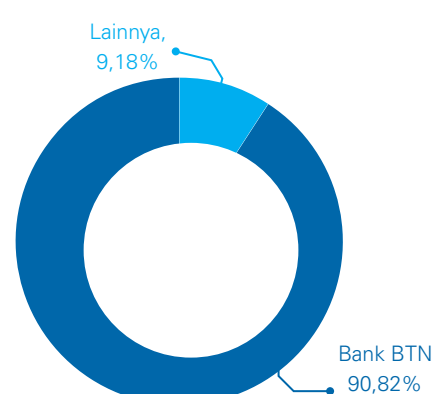
Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi.

Per 31 Desember 2019, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 90,82%; sementara pangsa pasar Perseroan pada keseluruhan pembiayaan KPR per 31 September 2019 mencapai 40,19%.

**PANGSA PASAR KPR
(PER 31 SEPTEMBER 2019)**



**PANGSA PASAR KPR SUBSIDI
(PER 31 DESEMBER 2019)**



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY). Laporan Keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

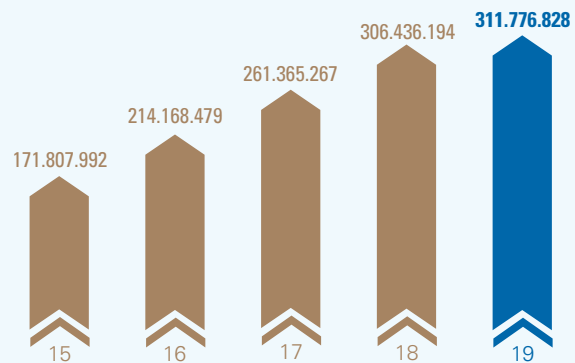
"Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang skala bisnis dan kekuatan permodalan Bank BTN. Di tahun 2019, jumlah Aset Perseroan mencapai Rp311,78 triliun, Liabilitas sebesar Rp269,45 triliun, Dana Syirkah Temporer Rp18,49 triliun dan Ekuitas sebesar Rp23,84 triliun."

Posisi Keuangan	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Aset				
Total Aset	311.776.828	306.436.194	5.340.634	1,74%
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas				
Total Liabilitas	269.451.682	263.784.017	5.667.665	2,15%
Total Dana Syirkah Temporer	18.488.951	18.811.729	(322.778)	-1,72%
Total Ekuitas	23.836.195	23.840.448	(4.253)	-0,02%
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	311.776.828	306.436.194	5.340.634	1,74%



“Total Aset Perseroan tahun 2019 mencapai Rp312,78 triliun, mengalami peningkatan 1,74% dibandingkan Total Aset tahun 2018 sebesar Rp306,44 triliun.”

**TOTAL ASET 2015-2019
(RP-JUTA)**



**ASET
2018-2019**

Aset	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas	1.369.167	1.243.615	125.552	10,10%
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	15.417.862	94.467	0,61%
Giro pada Bank Lain	747.869	1.587.051	(839.182)	-52,88%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	11.097.193	26.464.760	(15.367.567)	-58,07%
Efek-efek	8.084.671	5.848.485	2.236.186	38,24%
Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138	1.660.463	17,68%
Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	-	-
Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah	249.708.993	234.999.600	14.709.393	6,26%
Tagihan Spot Suku Bunga	-	167	(167)	-100,00%
Tagihan Akseptasi	487.052	528.148	(41.096)	-7,78%
Penyertaan Saham	-	-	-	-
Aset Tetap	5.400.658	5.017.694	382.964	7,63%
Bunga yang Masih Akan Diterima	3.210.772	2.959.502	251.270	8,49%
Aset Pajak Tangguhan - Neto	629.105	260.251	368.854	141,73%
Aset Lain-lain	2.600.197	2.715.921	(115.724)	-4,26%
Total Aset	311.776.828	306.436.194	5.340.634	1,74%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



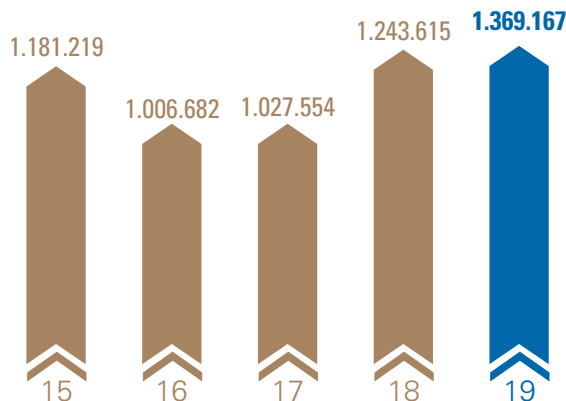
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Total Aset Perseroan di akhir tahun 2019 sebesar Rp311,78 triliun, meningkat 1,74% atau setara dengan Rp5,34 triliun dibandingkan Total Aset tahun 2018 sebesar Rp306,44 triliun.

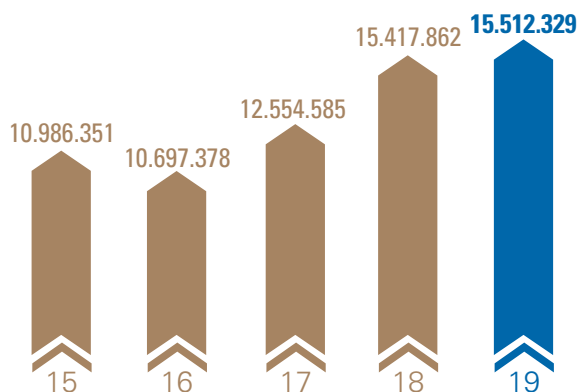
Kas

Kas Perseroan tahun 2019 sebesar Rp1,37 triliun, meningkat 10,10% atau setara dengan Rp125,55 miliar dibandingkan Kas tahun 2018 sebesar Rp1,24 triliun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kas mata uang rupiah sebesar Rp123,25 miliar. Kenaikan ini disebabkan kebijakan Perseroan dalam memperkuat likuiditas.



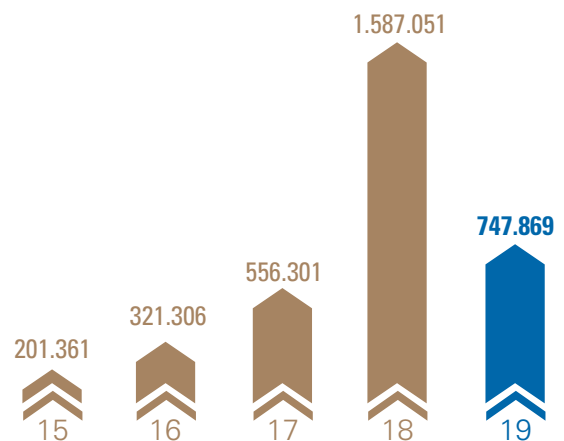
Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2019 sebesar Rp15,51 triliun, meningkat 0,61% atau setara dengan Rp94,46 miliar dibandingkan Giro pada Bank Indonesia tahun 2018 sebesar Rp15,42 triliun. Tidak terdapat peningkatan signifikan pada posisi Giro pada Bank Indonesia di tahun 2019. Perseroan telah memenuhi ketentuan Giro wajib minimum Bank Indonesia.



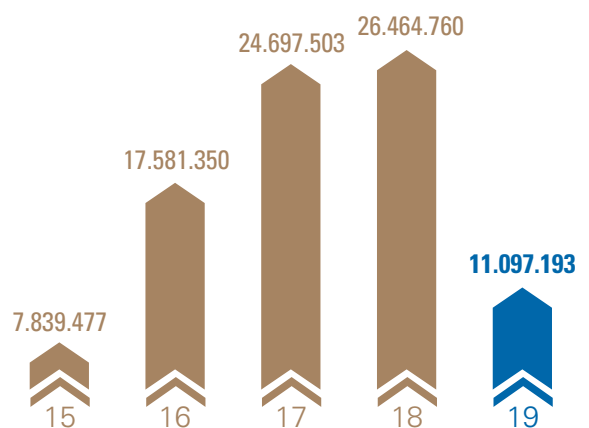
Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank Lain tahun 2019 sebesar Rp747,87 miliar, turun 52,88% dibandingkan Giro pada Bank Lain tahun 2018 sebesar Rp1,59 triliun. Penurunan ini disebabkan penurunan giro pada bank lain mata uang asing sebesar Rp889,51 miliar.



Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

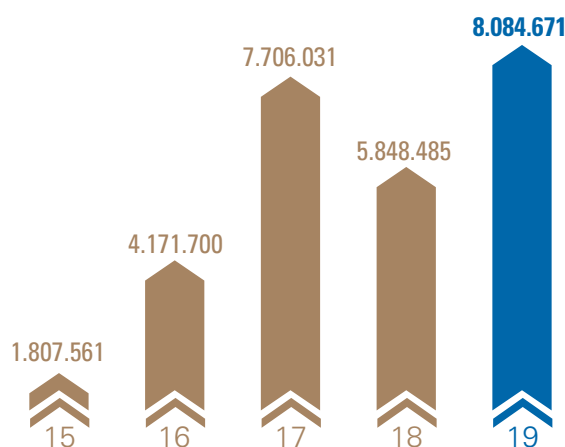
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2019 sebesar Rp11,09 triliun, turun 58,07% dibandingkan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2018 sebesar Rp26,46 triliun. Penurunan ini disebabkan karena jatuh tempo Term Deposit di Bank Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp12,50 triliun. Serta jatuh tempo *Deposit Facility* Syariah Bank Indonesia sebesar Rp2,17 triliun.



**Efek-efek**

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Nilai wajar melalui laba rugi	4.189.398	4.147.137	42.261	1,02%
Tersedia untuk dijual	2.629.347	1.511.624	1.117.723	73,94%
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.293.304	209.897	1.083.407	516,16%
Sub-jumlah	8.112.049	5.868.658	2.243.391	38,23%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.378)	(20.173)	(7.205)	35,72%
Jumlah Efek-efek	8.084.671	5.848.485	2.236.186	38,24%

Efek-efek tahun 2019 sebesar Rp8,08 triliun, meningkat 38,24% atau setara dengan Rp2,24 triliun dibandingkan Efek-efek tahun 2018 sebesar Rp5,85 triliun. Peningkatan efek-efek khususnya berasal dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp1,12 triliun dan efek dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp1,08 triliun.

**Obligasi Pemerintah**

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Nilai wajar melalui laba rugi	1.232.204	2.777.574	(1.545.370)	-55,64%
Tersedia untuk dijual	6.147.729	3.904.235	2.243.494	57,46%
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.673.668	2.711.329	962.339	35,49%
Jumlah Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138	1.660.463	17,68%



Pendukung Bisnis



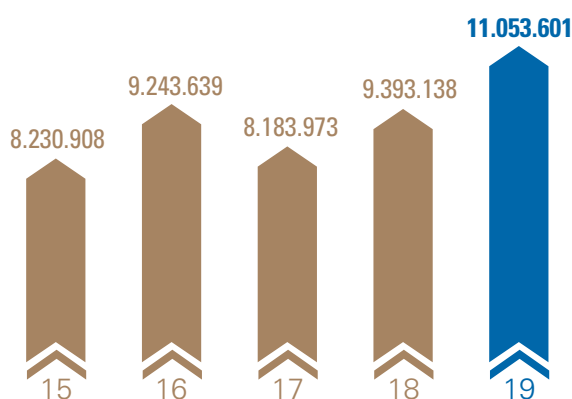
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

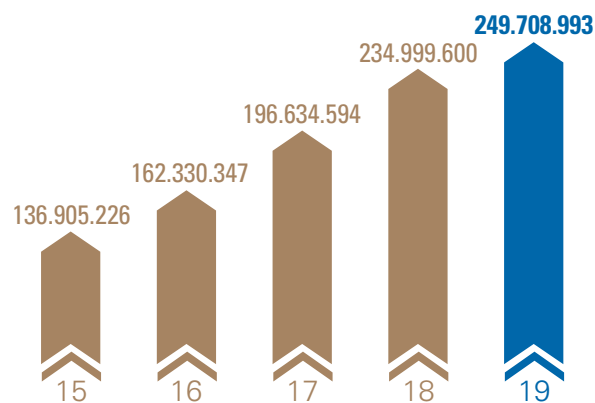
TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Obligasi Pemerintah tahun 2019 sebesar Rp11,05 triliun, meningkat 17,68% atau setara dengan Rp1,66 triliun dibandingkan Obligasi Pemerintah tahun 2018 sebesar Rp9,39 triliun. Peningkatan Obligasi Pemerintah berasal dari Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp2,24 triliun dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo meningkat sebesar Rp962,33 miliar. Dilain pihak Obligasi Pemerintah yang dinilai wajar melalui laba rugi mengalami penurunan sebesar Rp1,55 triliun.

**Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah**

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kredit yang diberikan	232.212.539	216.256.305	15.956.234	7,38%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.425.908)	(2.777.845)	(2.648.063)	95,33%
Jumlah Kredit yang Diberikan	226.786.631	213.478.460	13.308.171	6,23%
Pembiayaan/piutang syariah	23.612.620	22.041.427	1.571.193	7,13%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(690.258)	(520.287)	(169.971)	32,67%
Jumlah Pembiayaan/Piutang Syariah	22.922.362	21.521.140	1.401.222	6,51%
Jumlah Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah	249.708.993	234.999.600	14.709.393	6,26%

Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah tahun 2019 sebesar Rp249,71 triliun, meningkat 6,26% atau setara dengan Rp14,71 triliun dibandingkan Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah tahun 2018 sebesar Rp234,99 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit konvensional khususnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp13,34 triliun. Adapun pembiayaan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp1,57 triliun.

**Tagihan Spot Suku Bunga**

Di tahun 2019 tidak terdapat saldo Tagihan Spot Suku Bunga yang masih belum diselesaikan. Adapun di tahun 2018 terdapat saldo Tagihan Spot Suku Bunga sebesar Rp167 juta.

Tagihan Akseptasi

Tagihan Akseptasi tahun 2019 sebesar Rp487,05 miliar, turun 7,78% dibandingkan Tagihan Akseptasi tahun 2018 sebesar Rp528,15 miliar. Penurunan Tagihan Akseptasi ini khususnya berasal dari Tagihan Akseptasi Rupiah berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp41,01 juta.

Penyertaan Saham

Saldo Penyertaan Saham per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan.

Aset Tetap

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	8.108.086	7.411.526	696.560	9,40%
Akumulasi penyusutan	(2.707.428)	(2.393.832)	(313.596)	-13,10%
Jumlah Aset Tetap	5.400.658	5.017.694	382.964	7,63%

Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp5,40 triliun, meningkat 7,63% atau setara dengan Rp382,96 miliar dibandingkan Aset Tetap tahun 2018 sebesar Rp5,02 triliun. Kenaikan nilai aset tetap terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tanah, bangunan, dan peralatan kantor dan kendaraan bermotor masing-masing sebesar Rp3,97 triliun, Rp1,51 triliun dan Rp2,55 triliun dibandingkan dengan Rp3,63 triliun, Rp1,50 triliun dan Rp2,27 triliun pada periode tahun sebelumnya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

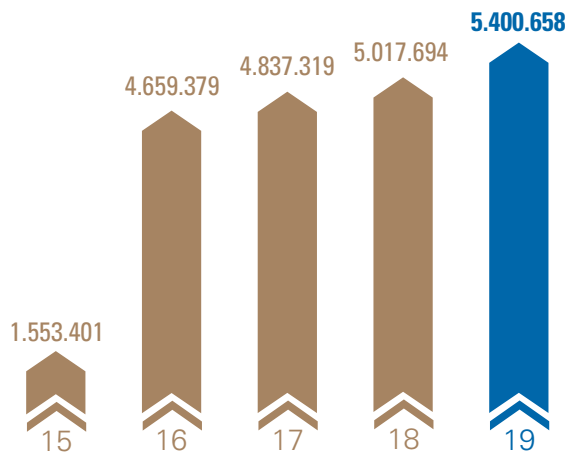


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



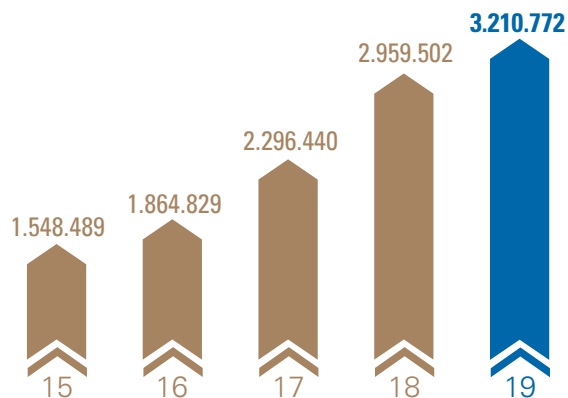
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA



Bunga yang Masih Akan Diterima

Bunga yang Masih Akan Diterima tahun 2019 sebesar Rp3,21 triliun, meningkat 8,49% atau setara dengan Rp251,27 miliar dibandingkan Bunga yang Masih Akan Diterima tahun 2018 sebesar Rp2,96 triliun. Sebagian besar peningkatan pada akun ini berasal dari Bunga Yang Masih Akan Diterima Kredit yang diberikan sebesar Rp0,22 triliun.

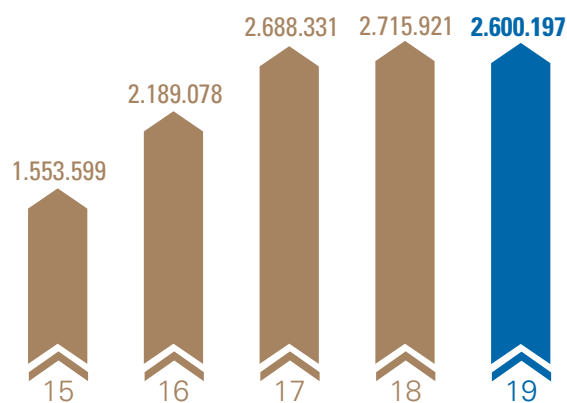


Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset Pajak Tangguhan - Neto tahun 2019 sebesar Rp629,11 miliar, meningkat 141,73% atau setara dengan Rp368,85 miliar dibandingkan Aset Pajak Tangguhan - Neto tahun 2018 sebesar Rp260,25 miliar. Kenaikan ini khususnya disebabkan oleh peningkatan aset pajak tangguhan yang berasal dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan sebesar Rp387,86 miliar.

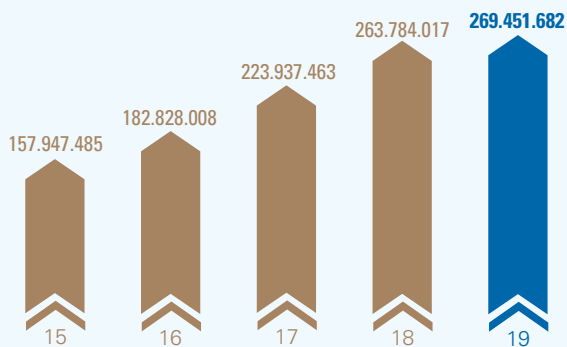
Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp2,60 triliun, menurun 4,26% dibandingkan Aset Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp2,72 triliun. Penurunan ini disebabkan penurunan pada akun tagihan kepada pihak ketiga sebesar Rp115,73 miliar. Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia, tagihan kepada PT Pos Indonesia sehubungan dengan penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos serta tagihan kepada pihak ketiga terkait transaksi ATM.



LIABILITAS

“Total Liabilitas Perseroan tahun 2019 mencapai Rp269,45 triliun, mengalami peningkatan 2,15% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2018 sebesar Rp263,78 triliun. Dari Total Liabilitas tersebut, sebanyak Rp206,90 triliun merupakan Simpanan dari Nasabah.”

TOTAL LIABILITAS 2015-2019
(RP-JUTA)LIABILITAS
2018-2019

Liabilitas	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Liabilitas Segera	1.999.183	2.301.930	(302.747)	-13,15%
Simpanan dari Nasabah	206.905.692	211.034.488	(4.128.796)	-1,96%
Simpanan dari Bank Lain	4.509.238	2.992.579	1.516.659	50,68%
Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	935.000	935.000	-	-
Liabilitas Akseptasi	487.052	528.148	(41.096)	-7,78%
Liabilitas Spot Suku Bunga	-	152	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

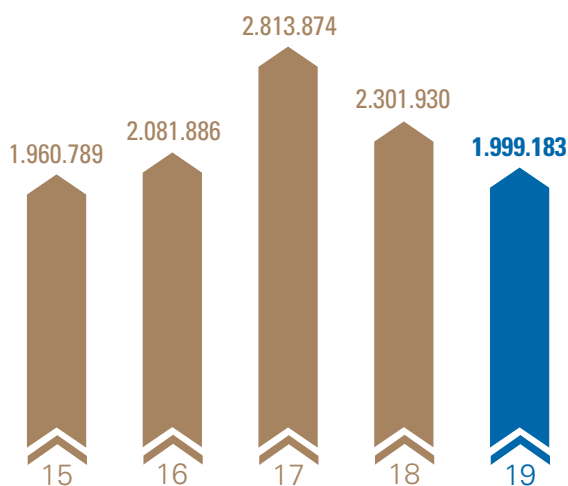
TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Liabilitas	LIABILITAS 2018-2019		Kenaikan (Penurunan)	
	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan	19.783.552	20.644.760	(861.208)	-4,17%
Pinjaman yang Diterima	22.465.657	15.499.493	6.966.164	44,94%
Bunga yang Masih Harus Dibayar	630.002	630.134	(132)	-0,02%
Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain	5.736.637	6.217.814	(481.177)	-7,74%
Pinjaman Subordinasi	5.999.669	2.999.519	3.000.150	100,02%
Total Liabilitas	269.451.682	263.784.017	5.667.665	2,15%

Total Liabilitas Perseroan di akhir tahun 2019 sebesar Rp269,45 triliun, meningkat 2,15 % atau setara dengan Rp5,67 triliun dibandingkan Total Liabilitas tahun 2018 sebesar Rp263,78 triliun.

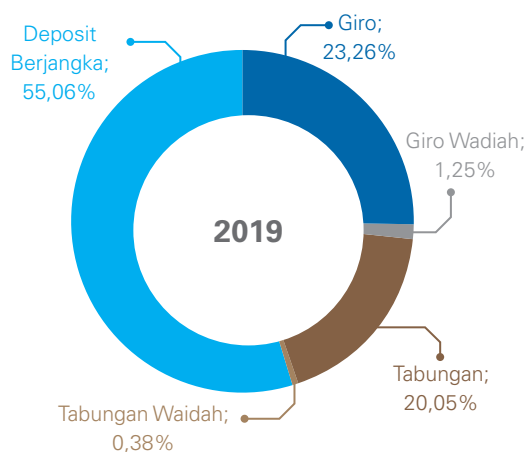
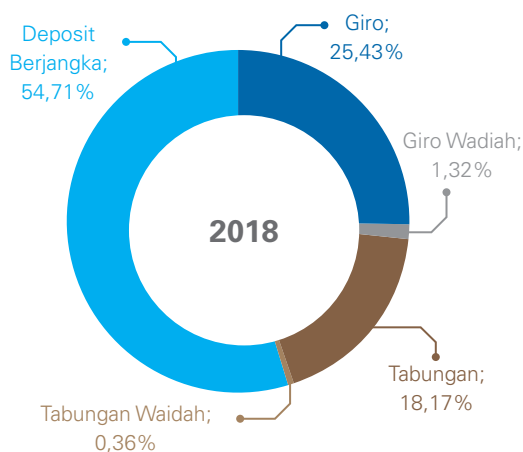
Liabilitas Segera

Liabilitas Segera tahun 2019 sebesar Rp1,99 triliun, menurun 13,15% dibandingkan Liabilitas Segera tahun 2018 sebesar Rp2,30 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena penurunan pada akun kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp240,68 miliar.



**Simpanan dari Nasabah**

Simpanan dari Nasabah	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Simpanan Giro				
Giro	48.108.116	53.673.188	(5.565.072)	-10,37%
Giro Wadiah	2.593.010	2.781.854	(188.844)	-6,79%
Total Simpanan Giro	50.701.126	56.455.042	(5.753.916)	-10,19%
Simpanan Tabungan				
Tabungan	41.484.909	38.350.839	3.134.070	8,17%
Tabungan Wadiah	789.889	766.324	23.565	3,08%
Total Simpanan Tabungan	42.274.798	39.117.163	3.157.635	8,07%
Simpanan Deposito Berjangka	113.929.768	115.462.283	-1.532.515	-1,33%
Total Simpanan dari Nasabah	206.905.692	211.034.488	-4.128.796	-1,96%

KOMPOSISI SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan dari Nasabah tahun 2019 sebesar Rp206,90 triliun, turun 1,96% dibandingkan Simpanan dari Nasabah tahun 2018 sebesar Rp211,03 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada Simpanan Giro Pihak Ketiga sebesar Rp5,75 triliun dan penurunan pada Deposito Berjangka sebesar Rp1,53 triliun. Adapun simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan meningkat sebesar Rp3,16 triliun dari periode tahun sebelumnya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

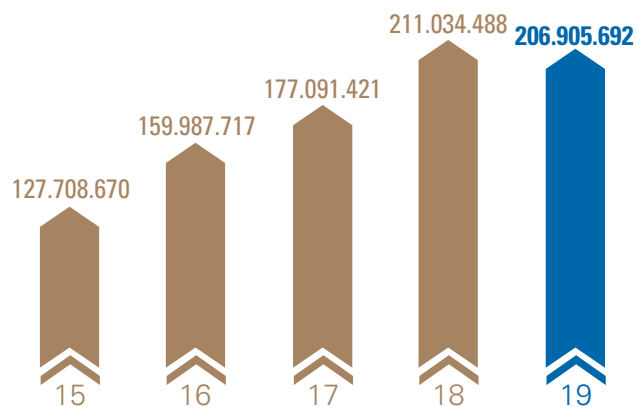


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



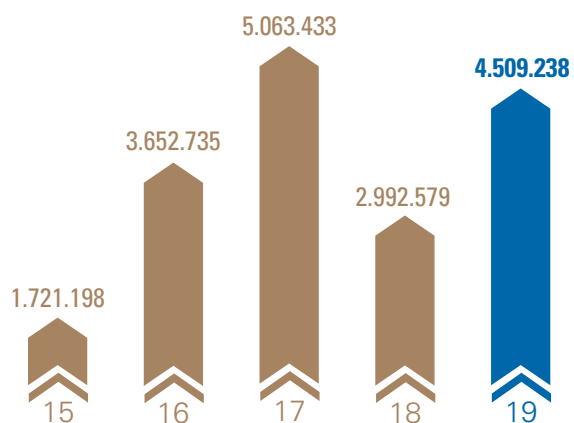
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA



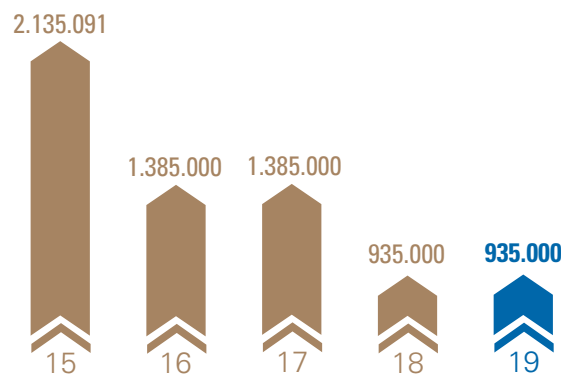
Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain tahun 2019 sebesar Rp4,51 triliun, meningkat 50,68% atau setara dengan Rp1,51 triliun dibandingkan Simpanan dari Bank Lain tahun 2018 sebesar Rp2,99 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada simpanan dari bank lain dalam bentuk Deposito rupiah sebesar Rp1,53 triliun.



Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Nilai Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali tahun 2019 adalah sebesar Rp935 miliar sama dengan Nilai Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli tahun 2018.

**Liabilitas Akseptasi**

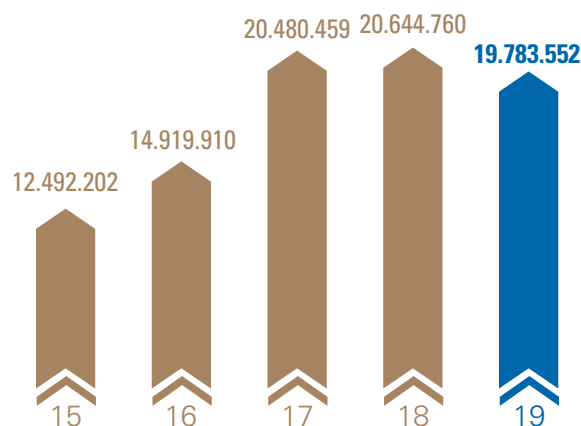
Liabilitas Akseptasi tahun 2019 sebesar Rp487,05 miliar, menurun 7,78% dibandingkan Liabilitas Akseptasi tahun 2018 sebesar Rp528,15 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pihak berelasi sebesar Rp41,10 miliar.

Liabilitas Spot Suku Bunga

Liabilitas Spot Suku Bunga tahun 2019 sebesar Rp0 juta dibandingkan Liabilitas Spot Suku Bunga tahun 2018 sebesar Rp152 juta. Penurunan ini disebabkan tidak terdapat transaksi Spot Suku Bunga di akhir tahun 2019.

Surat-surat Berharga yang Diterbitkan

Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan tahun 2019 sebesar Rp19,78 triliun, turun 4,17% dibandingkan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan tahun 2018 sebesar Rp20,64 triliun. Penurunan ini sebagian besar berasal dari penurunan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan kepada pihak berelasi.

**Pinjaman yang Diterima**

Pinjaman yang Diterima tahun 2019 sebesar Rp22,47 triliun, naik 44,94% atau setara dengan Rp6,97 triliun dibandingkan Pinjaman yang Diterima tahun 2018 sebesar Rp15,50 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan menerima pinjaman dari PT Sarana Multi Griya Financial (Persero) di tahun 2019 dengan nilai bersih sebesar Rp4,72 triliun.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

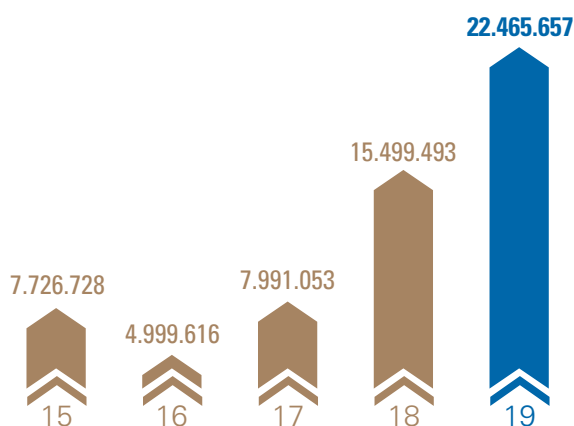


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



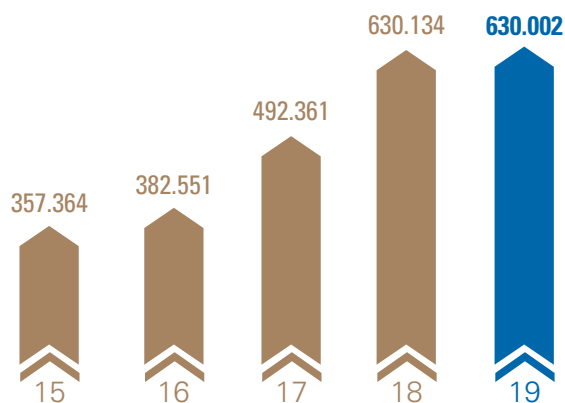
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA



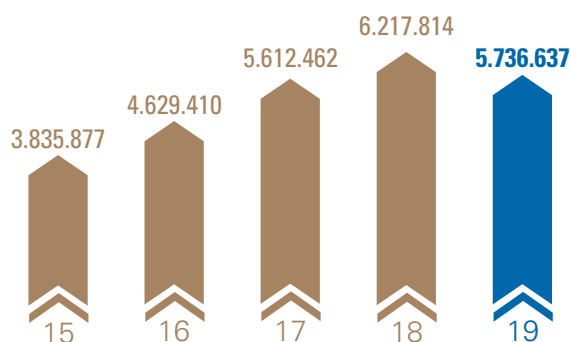
Bunga yang Masih Harus Dibayar

Bunga yang Masih Harus Dibayar tahun 2019 sebesar Rp630,00 miliar, turun 0,02% atau setara dengan Rp0,13 miliar dibandingkan Bunga yang Masih Harus Dibayar tahun 2018 sebesar Rp630,13 miliar. Tidak terdapat penurunan signifikan pada akun Bunga yang Masih Harus Dibayar.



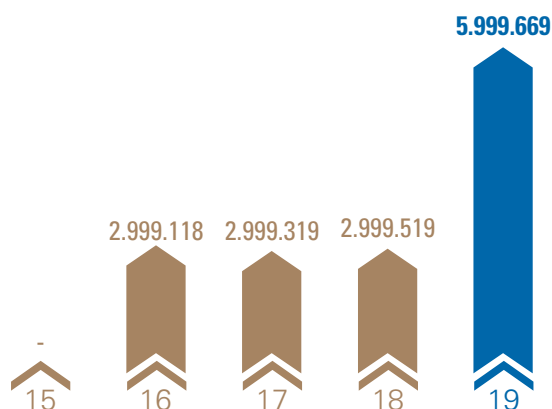
Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp5,74 triliun turun 7,74% dibandingkan Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp6,22 triliun. Penurunan sebagian besar berasal dari penurunan liabilitas lain-lain dana jaminan pengembang sebesar Rp775,56 juta.

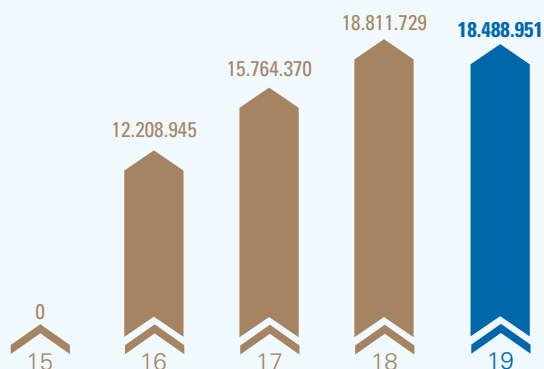


**Pinjaman Subordinasi**

Pinjaman Subordinasi tahun 2019 sebesar Rp6,00 triliun, meningkat 100,02% atau setara dengan Rp3,00 triliun dibandingkan Pinjaman Subordinasi tahun 2018 sebesar Rp3,00 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan pinjaman sebesar Rp3,00 triliun dari PT Sarana Multi Griya Financial (Persero) di tahun 2019.

**DANA SYIRKAH TEMPORER**

“Total Dana Syirkah Temporer Perseroan tahun 2019 mencapai Rp18,49 triliun, mengalami penurunan 1,72% dibandingkan Total Dana Syirkah Temporer tahun 2018 sebesar Rp18,81 triliun.”

**TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER
2015-2019 (RP-JUTA)****DANA SYIRKAH TEMPORER
2018-2019**

Dana Syirkah Temporer	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Simpanan Nasabah	18.477.539	18.794.497	(316.958)	-1,69%
Simpanan dari Bank Lain	11.412	17.232	(5.820)	-33,77%
Total Dana Syirkah Temporer	18.488.951	18.811.729	(322.778)	-1,72%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

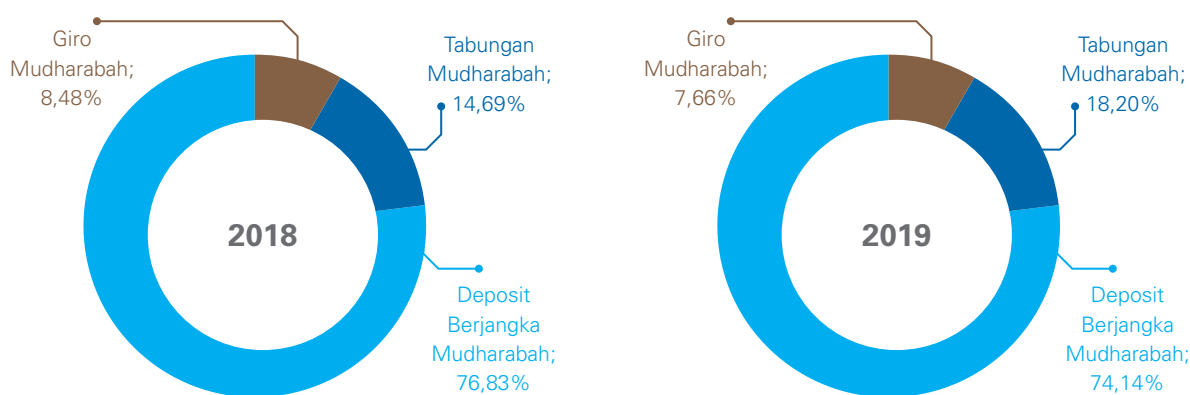
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

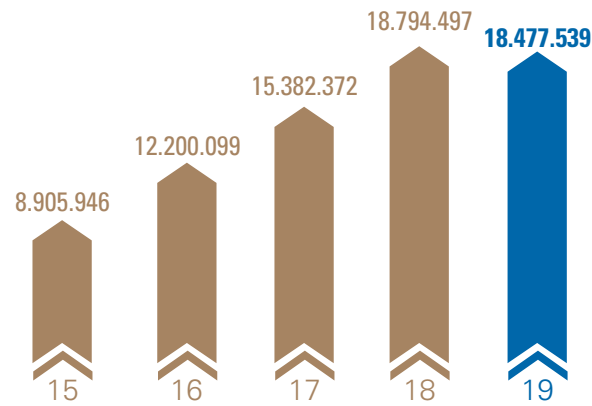
Total Dana Syirkah Temporer Perseroan di akhir tahun 2019 sebesar Rp18,49 triliun, turun 1,72% dibandingkan Total Dana Syirkah Temporer tahun 2018 sebesar Rp18,81 triliun.

SIMPANAN NASABAH

Simpanan Nasabah untuk Dana Syirkah Temporer	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro Mudharabah	1.414.712	1.594.272	(179.560)	-11,26%
Tabungan Mudharabah	3.362.926	2.760.069	602.857	21,84%
Deposito berjangka Mudharabah	13.699.901	14.440.156	(740.255)	-5,13%
Total Simpanan Nasabah untuk Dana Syirkah Temporer	18.477.539	18.794.497	(316.958)	-1,69%

KOMPOSISI SIMPANAN NASABAH UNTUK DANA SYIRKAH TEMPORER

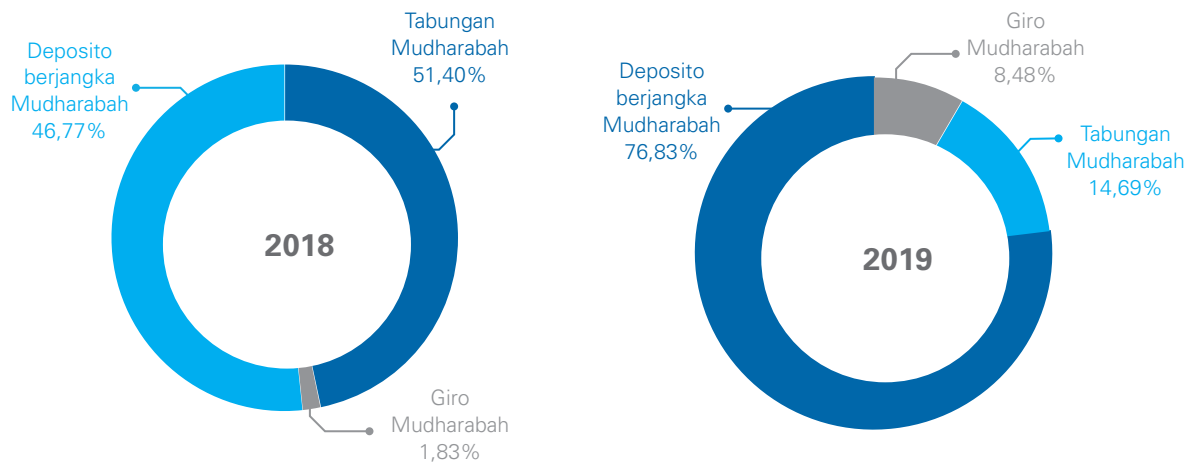
Simpanan Nasabah Dana Syirkah Temporer tahun 2019 sebesar Rp18,48 triliun, turun 1,69% dibandingkan Simpanan Nasabah Dana Syirkah Temporer tahun 2018 sebesar Rp18,79 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena penurunan pada deposito berjangka Mudharabah sebesar Rp740,26 miliar dan penurunan pada Giro Mudharabah sebesar Rp179,56 miliar. Meskipun terdapat peningkatan pada tabungan Mudharabah sebesar Rp602,86 miliar.



Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain untuk Dana Syirkah Temporer	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro Mudharabah	243	315	(72)	-22,86%
Tabungan Mudharabah	3.299	8.857	(5.558)	-62,75%
Deposito berjangka Mudharabah	7.870	8.060	(190)	-2,36%
Total Simpanan dari Bank Lain untuk Dana Syirkah Temporer	11.412	17.232	(5.820)	-33,77%

KOMPOSISI SIMPANAN DARI BANK LAIN UNTUK DANA SYIRKAH TEMPORER





Pendukung Bisnis



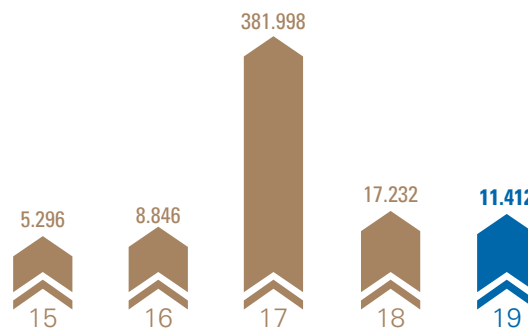
Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

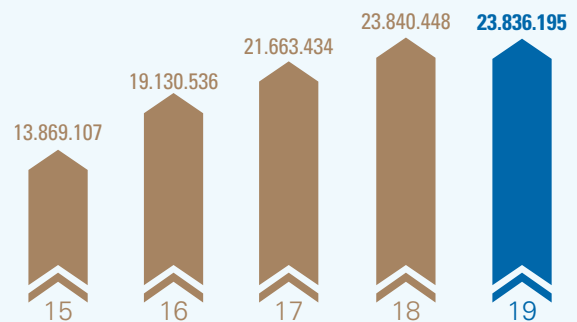
Simpanan dari Bank Lain untuk Dana Syirkah Temporer tahun 2019 sebesar Rp11,41 miliar, menurun 33,77% dibandingkan Simpanan dari Bank Lain untuk Dana Syirkah Temporer tahun 2018 sebesar Rp17,23 miliar. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pada Tabungan Mudharabah sebesar Rp5,56 miliar dan deposito berjangka Mudharabah sebesar Rp190 juta.



EKUITAS



"Total Ekuitas Perseroan tahun 2019 mencapai Rp23,84 triliun, mengalami penurunan 0,02%."

TOTAL EKUITAS 2015-2019
(RP-JUTA)EKUITAS
2018-2019

Ekuitas	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Modal Saham	5.295.000	5.295.000	-	-
Tambahan Modal Disetor	2.054.454	2.054.454	-	-
Kerugian Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan	11.460	(107.430)	118.890	110,67%

**EKUITAS
2018-2019**

Ekuitas	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	(194.707)	(82.886)	(111.821)	134,91 %
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	2.966.991	341.000	11,49 %
Saldo Laba ^{*)}				
Telah Ditentukan Penggunaannya	12.995.995	10.749.657	2.246.338	20,90 %
Belum Ditentukan Penggunaannya	366.002	2.964.662	(2.598.660)	-87,65 %
Total Ekuitas	23.836.195	23.840.448	(4.253)	-0,02 %

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Total Ekuitas Perseroan di akhir tahun 2019 sebesar Rp23,84 triliun, turun 0,02% atau setara dengan Rp4,25 miliar dibandingkan Total Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp23,84 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Modal Saham

Modal Saham tahun 2019 sebesar Rp5,29 triliun, atau setara dengan Modal Saham tahun 2018 sebesar Rp5,29 triliun.

Rp111,82 miliar dibanding posisi kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – Setelah Pajak Tangguhan tahun sebelumnya sebesar Rp82,89 miliar.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor tahun 2019 sebesar Rp2,05 triliun, atau sama dengan Tambahan Modal Disetor tahun 2018 sebesar Rp2,05 triliun.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp3,31 triliun, meningkat 11,49% atau setara dengan Rp341,00 miliar dibandingkan Surplus Revaluasi Aset Tetap tahun 2018 sebesar Rp2,97 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena penambahan Surplus Revaluasi Aset Tanah sebesar Rp334,73 miliar yang di buku pada tahun 2019.

Kerugian Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan

Pada tahun 2019 Bank mencatat Keuntungan Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual, setelah Pajak Tangguhan adalah sebesar Rp11,46 miliar meningkat sebesar 110,67% atau setara dengan Rp118,89 miliar dibandingkan Kerugian Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan, tahun 2018 sebesar Rp107,43 miliar.

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya, yaitu Rp13,00 triliun dan Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya, yaitu sebesar Rp366,00 miliar.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan adalah sebesar Rp194,71 miliar. Meningkat sebesar 134,91% atau setara dengan

Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya tahun 2019 sebesar Rp13,00 triliun, meningkat 20,90% atau setara dengan Rp2,25 triliun dibandingkan Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya tahun 2018 sebesar Rp10,75 triliun. Kenaikan ini berasal dari bagian laba tahun lalu yang dicatat ke dalam saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Sedangkan Saldo Laba yang Belum Ditentukan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

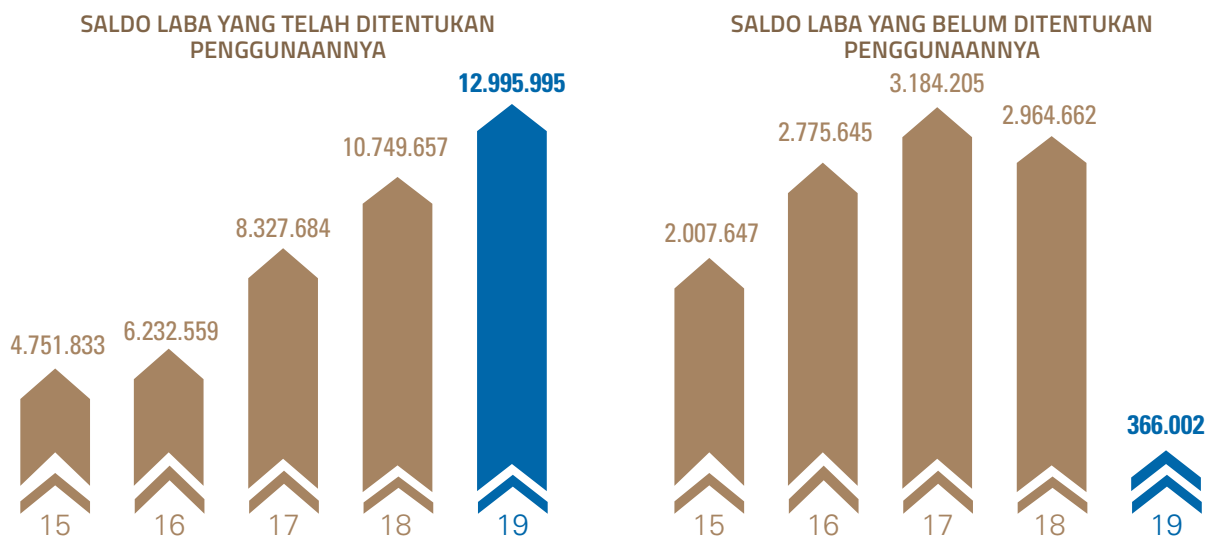
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Penggunaannya tahun 2019 sebesar Rp336,00 miliar, menurun 87,65% dibandingkan Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya tahun 2018 sebesar Rp2,96 triliun. Penurunan ini disebabkan karena pencapaian laba tahun berjalan tidak sebesar pencapaian laba tahun

2018. Hal ini seiring dengan kebijakan Perseroan untuk memperkuat pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.



LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.719.874	22.851.758	2.868.116	12,55%
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(16.758.073)	(12.762.581)	(3.995.492)	31,31%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.961.801	10.089.177	(1.127.376)	-11,17%
Pendapatan Operasional Lainnya	2.109.852	2.071.594	38.258	1,85%



Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan	(3.486.665)	(1.714.427)	(1.772.238)	103,37%
Beban Operasional Lainnya	(7.063.215)	(6.852.544)	(210.671)	3,07%
Laba Operasional	521.773	3.593.800	(3.072.027)	-85,48%
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto	(110.711)	16.475	(127.186)	-771,99%
Laba Sebelum Beban Pajak	411.062	3.610.275	(3.199.213)	-88,61%
Beban Pajak	(201.799)	(802.352)	600.553	-74,85%
Laba Tahun Berjalan	209.263	2.807.923	(2.598.660)	-92,55%
Pendapatan Komprehensif Lain	348.069	(25.416)	373.485	1.469,49%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	557.332	2.782.507	(2.225.175)	-79,97%
Laba per Saham - Dasar (nilai Rupiah penuh)	20	265	(245)	-92,45%

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil terdiri dari Pendapatan Bunga dari segmen usaha Konvensional, dan Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah dari bisnis Perseroan yang dikembangkan melalui segmen usaha Syariah.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan Bunga	23.271.432	90,48%	20.781.512	90,94%	2.489.920	11,98%
Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah	2.448.442	9,52%	2.070.246	9,06%	378.196	18,27%
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.719.874	100,00%	22.851.758	100,00%	2.868.116	12,55%

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan untuk tahun 2019 sebesar Rp25,72 triliun, meningkat 12,55% atau setara dengan Rp2,87 triliun dibandingkan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tahun 2018 sebesar Rp22,85 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2019 sebesar Rp23,27 triliun, meningkat 11,98% atau setara dengan Rp2,49 triliun dibandingkan Pendapatan Bunga tahun 2018 sebesar Rp20,78 triliun. Kenaikan ini disebabkan peningkatan

pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp2,40 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah

Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah tahun 2019 sebesar Rp2,45 triliun, meningkat 18,27% atau setara dengan Rp378,20 miliar dibandingkan Pendapatan Bagi Hasil dan Marjin Unit Syariah tahun 2018 sebesar Rp2,07 triliun. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pendapatan Murabahah sebesar Rp355,78 miliar.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



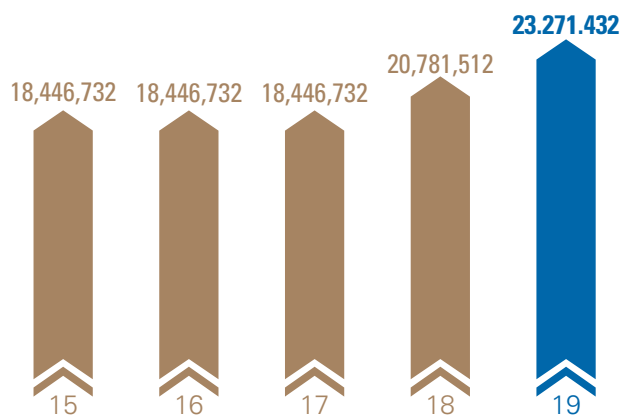
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



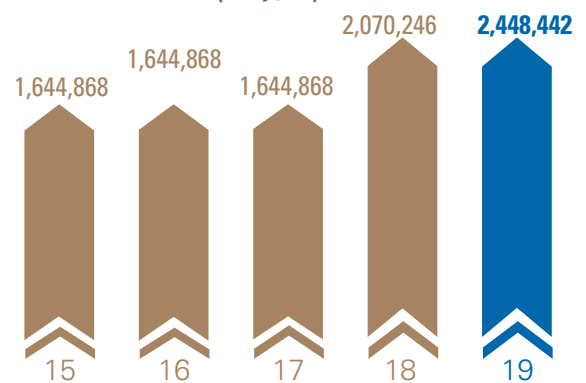
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

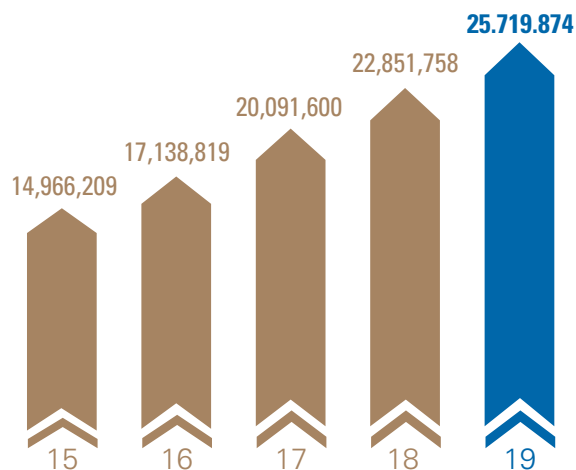
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDAPATAN BUNGA
2015-2019
(RP-JUTA)



PERKEMBANGAN JUMLAH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN
MARJIN UNIT SYARIAH
2015-2019
(RP-JUTA)



PERKEMBANGAN JUMLAH PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL
2015-2019
(RP-JUTA)



Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus

Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus Perseroan terdiri dari beban bunga, beban pendanaan lainnya, bonus simpanan wadiah, serta hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah. Perkembangan jumlah Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Bunga	15.167.294	11.627.554	3.539.740	30,44%
Beban pendanaan lainnya	157.708	128.826	28.882	22,42%
Bonus Simpanan Wadiah ^{*)}	15.641	12.436	3.205	25,77%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah ^{*)}	1.417.430	993.765	423.665	42,63%
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	16.758.073	12.762.581	3.995.492	31,31%

^{*)} Direklasifikasi

Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus tahun 2019 sebesar Rp16,76 triliun, meningkat 31,31% atau setara dengan Rp3,99 triliun dibandingkan Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus tahun 2018 sebesar Rp12,76 triliun. Kenaikan ini disebabkan faktor sebagai berikut:

Beban Bunga

Beban Bunga tahun 2019 sebesar Rp15,17 triliun, meningkat 30,44% atau setara dengan Rp3,54 triliun dibandingkan Beban Bunga tahun 2018 sebesar Rp11,63 triliun. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan peningkatan beban bunga deposito berjangka sebesar Rp2,65 triliun dari sebesar Rp6,12 triliun di tahun 2018 menjadi sebesar Rp8,77 triliun di tahun 2019.

Beban Pendanaan Lainnya

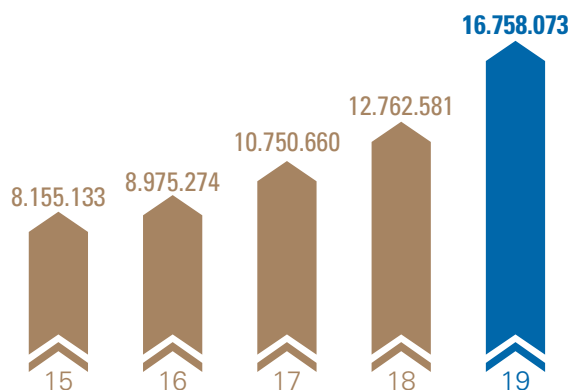
Beban Pendanaan Lainnya tahun 2019 sebesar Rp157,71 miliar, meningkat 22,42% atau setara dengan Rp28,88 miliar dibandingkan Beban Pendanaan Lainnya tahun 2018 sebesar Rp128,83 miliar.

Bonus Simpanan Wadiah

Bonus Simpanan Wadiah tahun 2019 sebesar Rp15,64 miliar, meningkat 25,77% atau setara dengan Rp3,21 miliar dibandingkan Bonus Simpanan Wadiah tahun 2018 sebesar Rp12,44 miliar.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Mudharabah

Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah tahun 2019 sebesar Rp1,42 miliar, meningkat 42,36% atau setara dengan Rp423,67 miliar dibandingkan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah tahun 2018 sebesar Rp993,76 miliar.





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

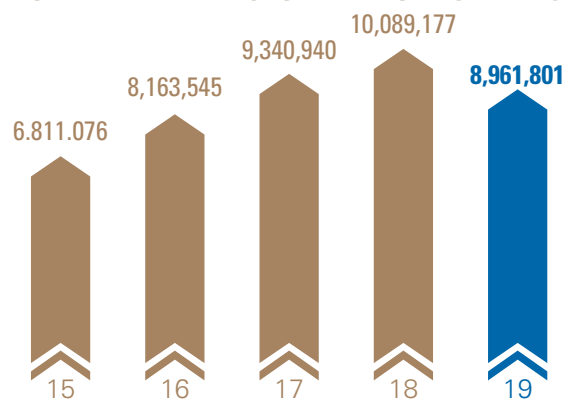
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto**

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto didapatkan dari akumulasi antara Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil serta Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus. Dengan pembukuan pada Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil serta Beban Bunga,

Bagi Hasil dan Bonus seperti yang telah dijelaskan di atas, Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto tahun 2019 sebesar Rp8,96 triliun, menurun 11,17% dibandingkan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto tahun 2018 sebesar Rp10,09 triliun.

PERKEMBANGAN PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL - NETO 2015-2019**Pendapatan Operasional Lainnya**

Pendapatan Operasional Lainnya didapatkan dari pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan, pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan, keuntungan dari penjualan efek-efek -

neto, keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto, keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto, keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi Pemerintah - neto, serta lain-lain.

Perkembangan jumlah Pendapatan Operasional Lainnya per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pendapatan Operasional Lainnya	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	832.556	819.837	12.719	1,55%
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	113.399	130.900	(17.501)	-13,37%
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	478.339	437.553	40.786	9,32%
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	144.553	8.586	135.967	1.583,59%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	20.894	30.316	(9.422)	-31,08%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	1.745	11.999	(10.254)	-85,46%
Lain-lain	518.366	632.403	(114.037)	-18,03%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.109.852	2.071.594	38.258	1,85%



Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2019 sebesar Rp2,11 triliun, meningkat 1,85% atau setara dengan Rp38,26 miliar dibandingkan Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2018 sebesar Rp2,07 triliun. Kenaikan ini sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pungutan Administrasi dan Denda atas Simpanan dan Kredit yang Diberikan

Pungutan Administrasi dan Denda atas Simpanan dan Kredit yang Diberikan tahun 2019 sebesar Rp832,55 miliar, meningkat 1,55% atau setara dengan Rp12,72 miliar dibandingkan Pungutan Administrasi dan Denda atas Simpanan dan Kredit yang Diberikan tahun 2018 sebesar Rp819,84 miliar.

Pendapatan dari Penerimaan Kredit yang Dihapusbukukan

Pendapatan dari Penerimaan Kredit yang Dihapusbukukan tahun 2019 sebesar Rp113,40 miliar, turun 13,37% dibandingkan Pendapatan dari Penerimaan Kredit yang Dihapusbukukan tahun 2018 sebesar Rp130,90 miliar.

Keuntungan dari Penjualan Efek-efek - Neto

Keuntungan dari Penjualan Efek-efek - Neto tahun 2019 sebesar Rp478,34 miliar, meningkat 9,32% atau setara dengan Rp40,79 miliar dibandingkan Keuntungan dari Penjualan Efek-efek - Neto tahun 2018 sebesar Rp437,55 miliar.

Keuntungan dari Penjualan Obligasi Pemerintah - Neto

Keuntungan dari Penjualan Obligasi Pemerintah - Neto tahun 2019 sebesar Rp144,55 miliar, meningkat 1.583,59% atau setara dengan Rp135,97 miliar dibandingkan Keuntungan dari Penjualan Obligasi Pemerintah - Neto tahun 2018 sebesar Rp8,59 miliar.

Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Efek-efek - Neto

Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Efek-efek - Neto tahun 2019 sebesar Rp20,89 miliar, turun 31,08% dibandingkan Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Efek-efek - Neto tahun 2018 sebesar Rp30,32 miliar.

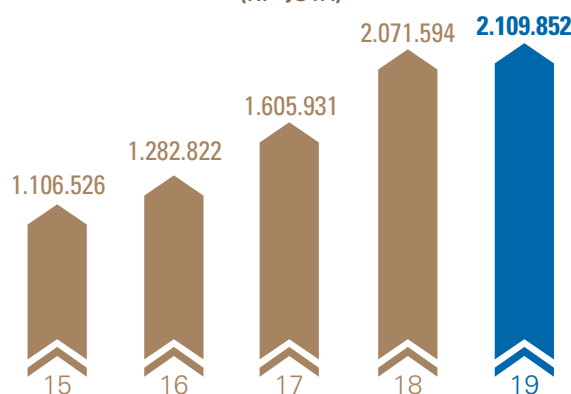
Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Obligasi Pemerintah - Neto

Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Obligasi Pemerintah - Neto tahun 2019 sebesar Rp1,74 miliar, turun 85,46% dibandingkan Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Perubahan Nilai Wajar Obligasi Pemerintah - Neto tahun 2018 sebesar Rp12,00 miliar.

Lain-lain

Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp518,37 miliar, turun 18,03% dibandingkan Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp632,40 miliar.

PERKEMBANGAN PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
2015-2019
(RP-JUTA)





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**Beban Operasional Lainnya**

Beban Operasional Lainnya didapatkan dari beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan karyawan, kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi Pemerintah - neto, premi program penjaminan Pemerintah, serta lain-lain.

Perkembangan jumlah Beban Operasional Lainnya per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Beban Operasional Lainnya	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Umum dan administrasi	3.425.022	3.225.353	199.669	6,19%
Gaji dan tunjangan karyawan	2.863.955	2.876.562	(12.607)	-0,44%
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	-	-	-
Premi program penjaminan Pemerintah	467.791	401.532	66.259	16,50%
Lain-lain	306.447	349.097	(42.650)	-12,22%
Total Beban Operasional Lainnya	7.063.215	6.852.544	210.671	3,07%

Beban Operasional Lainnya tahun 2019 sebesar Rp7,06 triliun, meningkat 3,07% atau setara dengan Rp210,67 miliar dibandingkan Beban Operasional Lainnya tahun 2018 sebesar Rp6,85 triliun. Kenaikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi tahun 2019 sebesar Rp3,42 triliun, meningkat 6,19% atau setara dengan Rp199,67 miliar dibandingkan Beban Umum dan Administrasi tahun 2018 sebesar Rp3,22 triliun.

Gaji dan Tunjangan Karyawan

Gaji dan Tunjangan Karyawan tahun 2019 sebesar Rp2,86 triliun turun 0,44% dibandingkan Gaji dan Tunjangan Karyawan tahun 2018 sebesar Rp2,88 triliun.

Premi Program Penjaminan Pemerintah

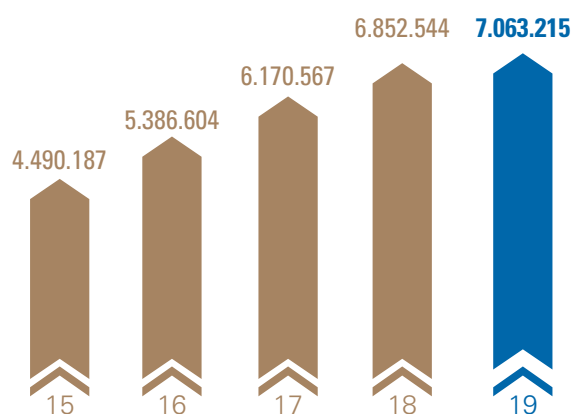
Premi Program Penjaminan Pemerintah tahun 2019 sebesar Rp467,79 miliar, meningkat 16,50% atau setara dengan Rp66,26 miliar dibandingkan Premi Program Penjaminan Pemerintah tahun 2018 sebesar Rp401,53 miliar.

Lain-lain

Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp306,45 miliar, turun 12,22% dibandingkan Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp349,10 miliar.



**PERKEMBANGAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 2015-2019
(RP-JUTA)**



Laba Operasional

Laba Operasional didapatkan dari akumulasi antara Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto, Pendapatan Operasional Lainnya, Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan, serta Beban Operasional Lainnya.

Laba Operasional	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.961.801	10.089.177	(1.127.376)	-11,17%
Pendapatan Operasional Lainnya	2.109.852	2.071.594	38.258	1,85%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan	(3.486.665)	(1.714.427)	(1.772.238)	103,37%
Beban Operasional Lainnya	(7.063.215)	(6.852.544)	(210.671)	3,07%
Laba Operasional	521.773	3.593.800	(3.072.027)	-85,48%

Dengan pembukuan pada Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto, Pendapatan Operasional Lainnya, Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan, serta Beban Operasional Lainnya seperti yang

telah dijelaskan di atas, Laba Operasional tahun 2019 sebesar Rp521,77 miliar turun 85,48% dibandingkan Laba Operasional tahun 2018 sebesar Rp3,59 triliun.



Pendukung Bisnis

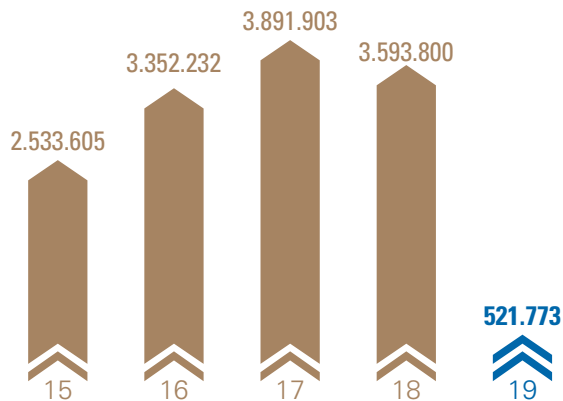


Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

PERKEMBANGAN LABA OPERASIONAL 2015-2019
(RP-JUTA)**Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto**

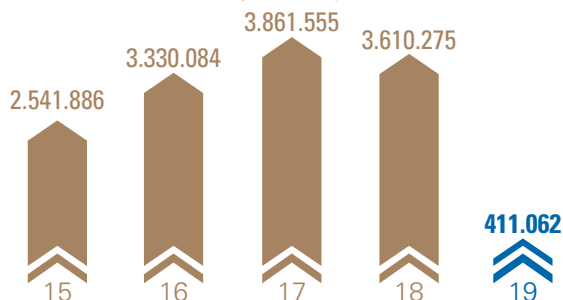
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto tahun 2019 turun 771,99% dibandingkan Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto tahun 2018.

Labanya Sebelum Beban Pajak

Labanya Sebelum Beban Pajak didapatkan dari akumulasi antara Labanya Operasional serta Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto.

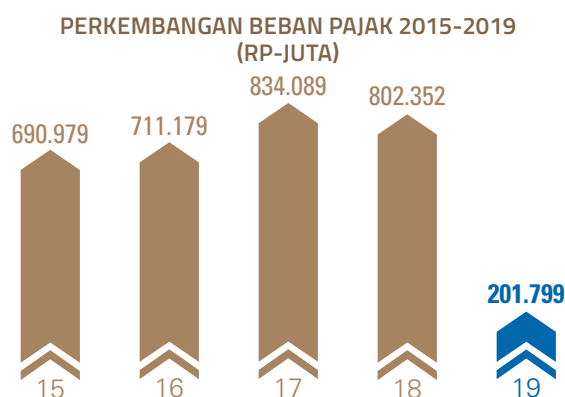
Labanya Sebelum Beban Pajak	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Labanya Operasional	521.773	3.593.800	(3.072.027)	-85,48%
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto	(110.711)	16.475	(127.186)	-771,99%
Labanya Sebelum Beban Pajak	411.062	3.610.275	(3.199.213)	-88,61%

Dengan pembukuan pada Labanya Operasional dan Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto seperti yang telah dijelaskan di atas, Labanya Sebelum Beban Pajak tahun 2019 sebesar Rp411,06 miliar turun 88,61% dibandingkan Labanya Sebelum Beban Pajak tahun 2018 sebesar Rp3,61 triliun.

PERKEMBANGAN LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 2015-2019
(RP-JUTA)

**Beban Pajak**

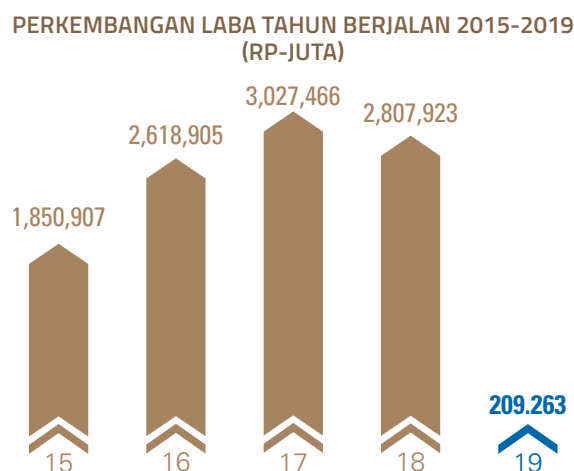
Beban Pajak tahun 2019 turun 74,85% dibandingkan Beban Pajak tahun 2018.

**Laba Tahun Berjalan**

Laba Tahun Berjalan merupakan laba bersih Perseroan yang didapatkan dari akumulasi antara Laba Sebelum Beban Pajak dan Beban Pajak.

Laba Tahun Berjalan	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba Sebelum Beban Pajak	411.062	3.610.275	(3.199.213)	-88,61 %
Beban Pajak	(201.799)	(802.352)	600.553	-74,85 %
Laba Tahun Berjalan	209.263	2.807.923	(2.598.660)	-92,55 %

Dengan pembukuan pada Laba Sebelum Beban Pajak dan Beban Pajak seperti yang telah dijelaskan di atas, Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp209,26 miliar turun 92,55% dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2018 sebesar Rp2,81 triliun.





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**Pendapatan Komprehensif Lain**

Pendapatan Komprehensif Lain didapatkan dari akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, mencakup pengukuran kembali program imbalan pasti, dan pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; serta akun-akun yang akan direklasifikasi

ke laba rugi yang mencakup keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, serta pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

Perkembangan jumlah Pendapatan Komprehensif Lain per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pendapatan Komprehensif Lain	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Revaluasi Aset Tetap	341.000			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(132.869)	80.363	(213.232)	-265,34%
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	21.048	(20.091)	41.139	-204,76%
Sub-jumlah	229.179	60.272	168.907	280,24%
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	148.613	(114.250)	262.863	230,08%
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(29.723)	28.562	(58.285)	204,06%
Sub-jumlah	118.890	(85.688)	204.578	238,75%
Total Pendapatan Komprehensif Lain	348.069	(25.416)	373.485	1.469,49%

Pendapatan Komprehensif Lain tahun 2019 sebesar Rp348,07 miliar, meningkat 1.469,49% atau setara dengan Rp373,48 miliar dibandingkan Pendapatan Komprehensif Lain tahun 2018 sebesar defisit Rp25,42 miliar. Kenaikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

miliar, meningkat 204,76% atau setara dengan Rp41,14 miliar dibandingkan pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun 2018 sebesar defisit Rp20,09 miliar.

Akun-akun yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

- Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti
Pengukuran kembali program imbalan pasti tahun 2019 turun 265,34% dibandingkan pengukuran kembali program imbalan pasti tahun 2018.
- Pajak Penghasilan Terkait Akun-akun yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun 2019 sebesar Rp21,05

Akun-akun yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

- Keuntungan (Kerugian) Neto yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual tahun 2019 sebesar Rp148,61 miliar, meningkat 230,08% atau setara dengan Rp262,86 miliar dibandingkan kerugian neto yang belum direalisasi



atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual tahun 2018 sebesar defisit Rp114,25 miliar.

- Pajak Penghasilan Terkait Akun-akun yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan

direklasifikasi ke laba rugi tahun 2019 sebesar defisit Rp29,72 miliar, turun 204,06% atau setara dengan defisit Rp58,28 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp28,56 miliar.

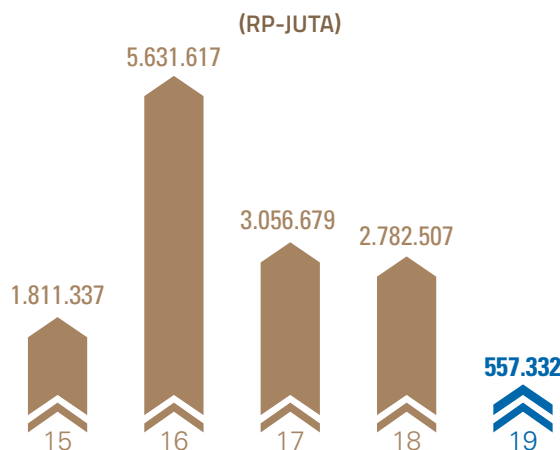
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan didapatkan dari akumulasi antara Laba Tahun Berjalan dan Pendapatan Komprehensif Lain.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba Tahun Berjalan	209.263	2.807.923	(2.598.660)	-92,55%
Pendapatan Komprehensif Lain	348.069	(25.416)	373.485	1.469,49%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	557.332	2.782.507	(2.225.175)	-79,97%

Dengan pembukuan pada Laba Tahun Berjalan dan Pendapatan Komprehensif Lain seperti yang telah dijelaskan di atas, Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar sebesar Rp557,33 miliar, turun 79,97% atau setara dengan defisit Rp2,22 triliun dibandingkan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2018 sebesar Rp2,78 triliun.

PERKEMBANGAN TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2015-2019



“Bank BTN tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. Dengan demikian, laporan laba rugi Bank BTN tidak menyajikan Laba Tahun Berjalan dan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan baik kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non-pengendali.”



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

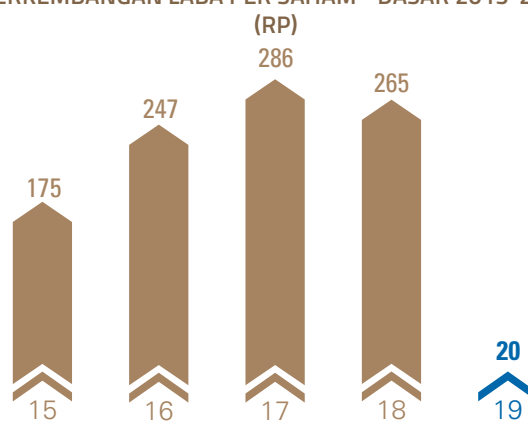
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Laba per Saham - Dasar

Laba per Saham - Dasar sebesar Rp20 per lembar saham, turun 92,45% atau setara dengan defisit Rp245 per lembar saham dibandingkan Laba per Saham - Dasar tahun 2018 sebesar Rp265 per lembar saham.

PERKEMBANGAN LABA PER SAHAM - DASAR 2015-2019



Laporan Arus Kas

Arus Kas	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(14.828.361)	(2.410.430)	(12.417.931)	-515,17%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(7.077.106)	1.689.493	(8.766.599)	-518,89%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.440.369	6.598.304	1.842.065	27,92%
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	(13.465.098)	5.877.367	(19.342.465)	-329,10%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	44.715.006	38.837.639	5.877.367	15,13%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	31.249.908	44.715.006	(13.465.098)	-30,11%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2018-2019
(RP-JUTA)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan margin	25.453.902	22.179.899	3.274.003	14,76%
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	153.997	151.188	2.809	1,86%



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2018-2019 (RP-JUTA)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(16.646.046)	(12.624.698)	(4.021.348)	31,85%
Pembayaran pajak penghasilan badan	(590.027)	(976.956)	386.929	-39,61%
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	6.710	3.941	2.769	70,26%
Pembayaran atas surat ketetapan pajak		-		
Beban operasional lainnya neto	(4.845.107)	(5.163.188)	318.081	-6,16%
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(110.711)	16.475	(127.186)	-771,99%
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	3.422.718	3.586.661	(163.943)	-4,57%
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
• Penempatan pada Bank Lain	(351.800)	-	-	-
• Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	2.452.777	740.954	1.711.823	231,03%
• Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.547.115	(2.350.369)	3.897.484	165,82%
• Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(18.229.537)	(39.554.295)	21.324.758	-53,91%
• Aset lain-lain	300.335	10.680	289.655	2.712,13%
Jumlah perubahan dalam aset operasi	(14.281.110)	(41.153.030)	26.871.920	-65,30%
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				
• Liabilitas segera	(301.002)	(414.568)	113.566	-27,39%
• Simpanan dari nasabah				
- Giro	(5.565.072)	3.653.362	(9.218.434)	-252,33%
- Giro Wadiah	(188.844)	32.528	(221.372)	-680,56%
- Tabungan	3.134.070	132.903	3.001.167	2.258,16%
- Tabungan Wadiah	23.565	143.923	(120.358)	-83,63%
- Deposito berjangka	(1.532.515)	29.980.351	(31.512.866)	-105,11%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2018-2019
(RP-JUTA)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
• Simpanan dari bank lain	1.516.659	(2.070.854)	3.587.513	173,24%
• Liabilitas lain-lain	(734.052)	650.935	(1.384.987)	-212,77%
• Dana Syirkah Temporer	(322.778)	3.047.359	(3.370.137)	-110,59%
Jumlah perubahan dalam liabilitas operasi	(3.969.969)	35.155.939	(39.125.908)	-111,29%
Jumlah perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(18.251.079)	(5.997.091)	(12.253.988)	204,33%
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(14.828.361)	(2.410.430)	(12.417.931)	515,17%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi dipengaruhi penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin; penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan; pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi; pembayaran pajak penghasilan badan; penerimaan dari surat ketetapan pajak; pembayaran atas surat ketetapan pajak; beban operasional lainnya neto; pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto; penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi; serta perubahan dalam aset dan liabilitas operasi.

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi tahun 2019 defisit sebesar Rp14,83 triliun, turun 515,17% atau setara dengan defisit Rp12,42 triliun dibandingkan Kas Neto Dipergunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2018 defisit sebesar Rp2,41 triliun. Penurunan ini seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

Penerimaan Bunga, Bagi Hasil, dan Marjin

Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin tahun 2019 sebesar Rp25,45 triliun, meningkat 14,76% atau setara dengan Rp3,27 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp22,18 triliun.

Penerimaan Kredit yang Telah Dihapusbukukan

Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan tahun 2019 sebesar Rp153,99 miliar, meningkat 1,86% atau setara dengan Rp2,81 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp151,19 miliar.

Pembayaran Bunga dan Bonus, Provisi dan Komisi

Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi tahun 2019 defisit sebesar Rp16,65 triliun, turun 31,85% atau setara dengan defisit Rp4,02 triliun dibandingkan tahun 2018 defisit sebesar Rp12,62 triliun.

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2019 defisit sebesar Rp590,03 miliar, turun 39,61% atau setara dengan defisit Rp386,93 miliar dibandingkan tahun 2018 defisit sebesar Rp976,96 miliar.

Penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak

Penerimaan dari surat ketetapan pajak tahun 2019 sebesar Rp6,71 miliar, meningkat 70,26% atau setara dengan Rp2,77 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3,94 miliar.

Beban Operasional Lainnya - Neto

Beban operasional lainnya - neto tahun 2019 defisit sebesar Rp4,85 triliun, turun 6,16% atau setara dengan Rp318,08 miliar dibandingkan tahun 2018 defisit sebesar Rp5,16 triliun.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional Lainnya - Neto

Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto tahun 2019 defisit sebesar Rp110,71 miliar, turun 771,99% atau setara dengan defisit Rp127,19 miliar dibandingkan pendapatan (beban) bukan operasional lainnya tahun 2018 yang dibukukan sebagai pendapatan sebesar Rp16,47 miliar.

**Penerimaan Kas Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi**

Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi tahun 2019 sebesar Rp3,42 triliun, turun 4,57 % atau setara dengan defisit Rp163,94 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3,59 triliun.

Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi

Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi tahun 2019 defisit sebesar Rp18,25 triliun turun 204,33% atau setara dengan defisit Rp12,25 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar defisit Rp6,00 triliun. Penurunan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Perubahan dalam Aset Operasi

Perubahan dalam aset operasi tahun 2019 dicatat sebagai penurunan defisit sebesar Rp14,28 triliun, turun 65,30% atau setara dengan Rp26,87 triliun dibandingkan tahun 2018 yang dicatat sebagai defisit sebesar Rp41,15 triliun.

2. Perubahan dalam Liabilitas Operasi

Perubahan dalam liabilitas operasi tahun 2019 dicatat sebagai penurunan defisit sebesar Rp3,97 triliun, turun 111,29% atau setara dengan Rp39,12 triliun dibandingkan tahun 2018 yang dicatat sebagai kenaikan sebesar Rp35,16 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 2018-2019
(RP-JUTA)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	36.889	-	-
Pembelian aset tetap	(366.561)	(526.743)	160.182	-30,41 %
Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	(718.350)	1.089.818	(1.808.168)	-165,91 %
Penurunan obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual	(2.085.930)	464.873	(2.550.803)	-548,71 %
Penerimaan dari obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	944.573	-	-
Pembelian obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	(947.963)	(319.917)	(628.046)	196,32 %
Pembelian Efek-efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	(1.083.081)	-	-	-
Pembelian Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	(1.875.221)	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Investasi	(7.077.106)	1.689.493	(8.766.599)	-518,89%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi dipengaruhi oleh penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo; pembelian aset tetap; penurunan efek-efek tersedia untuk dijual; penurunan obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual; penerimaan dari obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo; serta pembelian obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Investasi tahun 2019 defisit sebesar Rp7,08 triliun, turun 518,89% atau setara dengan defisit Rp8,77 triliun dibandingkan Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Investasi tahun 2018 sebesar Rp1,69 triliun.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**Penerimaan Saat Jatuh Tempo dari Efek-efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp0 miliar dibandingkan 2018 sebesar Rp36,89 miliar.

Pembelian Aset Tetap

Pembelian aset tetap tahun 2019 defisit sebesar Rp366,56 miliar, turun 30,41% atau setara dengan Rp160,18 miliar dibandingkan 2018 defisit sebesar Rp526,74 miliar.

Penurunan Efek-efek Tersedia untuk Dijual

Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual tahun 2019 defisit sebesar Rp718,35 miliar, turun 165,91% atau setara dengan defisit Rp1,80 triliun dibandingkan 2018 sebesar Rp1,09 triliun.

Penurunan Obligasi Pemerintah Tersedia untuk Dijual

Penurunan obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual tahun 2019 defisit sebesar Rp2,09 triliun, turun 548,71% atau setara dengan defisit Rp2,55 triliun dibandingkan 2018 sebesar Rp464,87 miliar.

Penerimaan dari Obligasi Pemerintah yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Penerimaan dari obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp0 miliar dibandingkan 2018 sebesar Rp944,57 miliar.

Pembelian Obligasi Pemerintah yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pembelian obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo tahun 2019 defisit sebesar Rp947,96 miliar turun 169,32% atau setara dengan defisit Rp628,05 miliar dibandingkan 2018 defisit sebesar Rp319,92 miliar.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 2018-2019
(RP-JUTA)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	4.144.000	3.660.000	484.000	13,22 %
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(5.122.930)	(3.520.000)	(1.602.930)	-45,54 %
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(450.000)	-	-
Pembayaran dividen	(561.585)	(605.493)	43.908	-7,25 %
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.001.654	7.550.287	3.451.367	45,71 %
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(4.020.720)	(36.490)	(3.984.230)	10.918,69 %
Penerimaan dari pinjaman sub ordinasi	2.999.950	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	8.440.369	6.598.304	1.842.065	27,92 %

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dipengaruhi oleh penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan; pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan; pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali; pembayaran dividen;

penerimaan dari pinjaman yang diterima; serta pembayaran dari pinjaman yang diterima.

Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 Rp8,44 triliun, meningkat 27,92% atau setara dengan



Rp1,84 triliun dibandingkan Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2018 sebesar Rp6,60 triliun. Kenaikan akan diuraikan di bawah ini.

Penerimaan dari Surat-surat Berharga yang Diterbitkan

Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan tahun 2019 sebesar Rp4,14 triliun, meningkat 13,22% atau setara dengan Rp484 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3,66 triliun.

Pembayaran atas Jatuh Tempo Surat-surat Berharga yang Diterbitkan

Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan tahun 2019 defisit sebesar Rp5,12 triliun, turun 45,54% atau setara dengan defisit Rp1,60 triliun dibandingkan tahun 2018 defisit sebesar Rp3,52 triliun.

Pembayaran atas Jatuh Tempo Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali tahun 2019 sebesar Rp0 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp450,00 miliar.

Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen tahun 2019 defisit sebesar Rp561,58 miliar, turun 7,25% atau setara dengan Rp43,91 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp605,49 miliar.

Penerimaan dari Pinjaman yang Diterima

Penerimaan dari pinjaman yang diterima tahun 2019 sebesar Rp11,00 triliun, turun 45,71% atau setara dengan Rp3,45 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp7,55 triliun.

Pembayaran dari Pinjaman yang Diterima

Pembayaran dari pinjaman yang diterima tahun 2019 defisit sebesar Rp4,02 triliun, naik 10.918,69% atau setara dengan defisit Rp3,98 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp36,49 miliar.

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS, SERTA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, serta Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas di sepanjang tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar Rp13,46 triliun. Dengan demikian, Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2019 sebesar Rp31,78 triliun, tumbuh dari akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019 sebesar Rp44,71 triliun.

Perbandingan rincian Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas	1.369.167	4,38%	1.243.615	2,78%	125.552	10,10%
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	49,64%	15.417.862	34,48%	94.467	0,61%
Giro pada bank lain	749.501	2,40%	1.588.769	3,55%	(839.268)	-52,83%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	10.745.393	34,39%	26.364.760	58,96%	(15.619.367)	-59,24%
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.873.518	9,20%	100.000	0,22%	2.773.518	2.773,52%
Total Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	31.249.908	100,00%	44.715.006	100,00%	(13.465.098)	-30,11%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

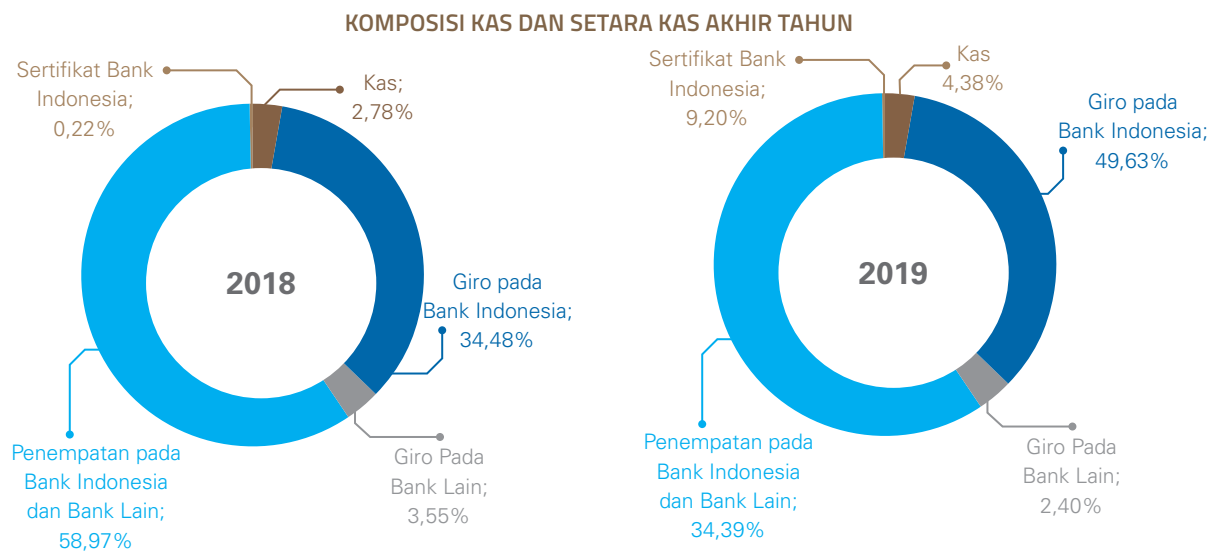


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



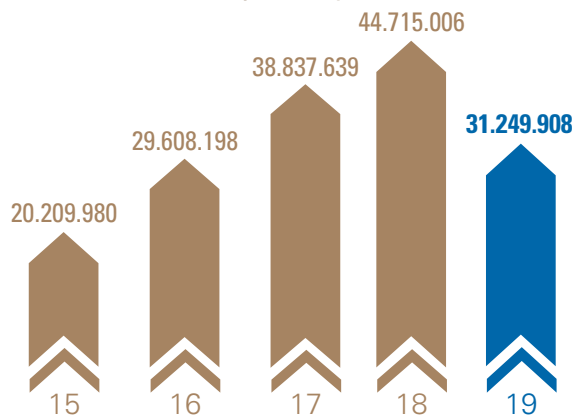
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA



Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

PERKEMBANGAN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2015-2019 (RP-JUTA)



RASIO-RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN

Disamping menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan di Indonesia, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk taat kepada beragam peraturan yang diterbitkan oleh regulator baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejalan dengan ekspansi bisnis berkelanjutan Perseroan yang tetap dijalankan sesuai dengan beragam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tersebut, Perseroan mampu memenuhi ketentuan terkait rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.



Rasio	2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Poin	Persentase (%)
Rasio Kinerja				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	17,32%	18,21%	-0,89%	-4,89%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	4,34%	2,50%	1,84%	73,60%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,42%	2,65%	1,77%	66,79%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,21%	1,30%	0,91%	70,00%
NPL gross	4,78%	2,81 %	1,97%	70,11%
NPL net	2,96%	1,83%	1,13%	61,75%
Return on Asset (ROA)	0,13%	1,34%	-1,21%	-90,30%
Return on Equity (ROE)	1,00%	14,89%	-13,89%	-93,28%
Net Interest Margin (NIM)	3,32%	4,32%	-1,00%	-23,15%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	98,12%	85,58%	12,54%	14,65%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	113,50%	103,49%	10,01%	9,67%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	108,29%	118,83%	-10,54%	-8,87%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	136,31%			
Kepatuhan				
• Persentase Pelanggaran BMPK				
- Pihak Terkait	0,00%	0,00%	-	-
- Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	-	-
• Persentase Pelampauan BMPK				
- Pihak Terkait	0,00%	0,00%	-	-
- Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	-	-
• Giro Wajib Minimum (GWM)				
- GWM Utama Rupiah				
Konvensional	6,19%	6,61 %	-0,42%	-6,35%
Syariah	4,64%	5,30%	-0,66%	-12,45%
- GWM Valuta Asing	8,28%	8,69%	-0,41%	-4,72%
• Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	4,14%	1,55%	2,59%	167,10%

Mengacu kepada rasio-rasio keuangan Perseroan yang disajikan di atas, ketentuan tentang rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan kepatuhan Bank mampu dipenuhi oleh Perseroan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan membayar kewajiban atau utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi parameter bagi Perseroan dalam menghitung kemampuan Perseroan menyediakan cadangan likuiditas.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Rasio likuiditas dipakai untuk mengetahui kemampuan

Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Salah satu parameter utama dalam rasio likuiditas adalah pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Perseroan menjaga GWM Utama dan GWM Sekunder yang pada tahun 2018 telah berubah menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM).

Perseroan secara konsisten mampu memenuhi rasio tersebut melebihi batas minimal yang ditetapkan Bank Indonesia. Pencapaian Perseroan dalam pemenuhan rasio ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Mata Uang		2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	
					Poin	Persentase (%)
Konvensional	Rupiah	Utama	6,19%	6,61%	-0,42%	-6,35%
		PLM	5,24%	5,45%	-0,21%	-3,85%
	Dolar AS		8,28%	8,69%	-0,41%	-4,72%
Syariah	Rupiah		4,64%	5,30%	-0,66%	-12,45%

Parameter berikutnya adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to Funding Ratio (LFR) yang telah diubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) pada tahun 2018. LDR merupakan salah satu parameter untuk mengukur rasio likuiditas yang sehat. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga (simpanan nasabah). LDR Perseroan di tahun 2019 sebesar 113,50%, meningkat dibandingkan rasio tahun 2018 sebesar 103,25%.

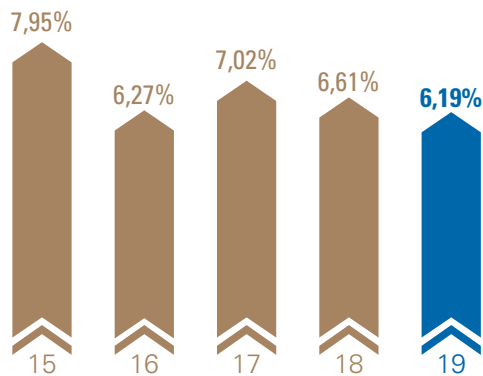
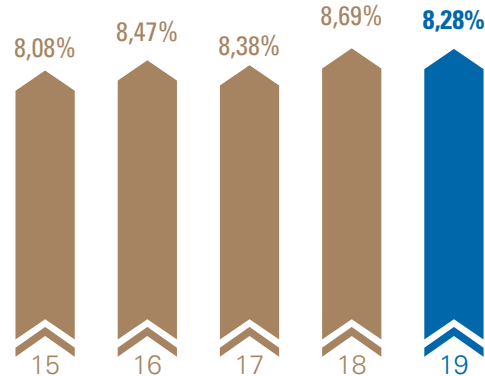
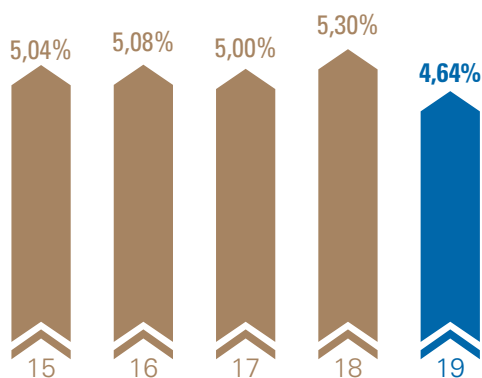
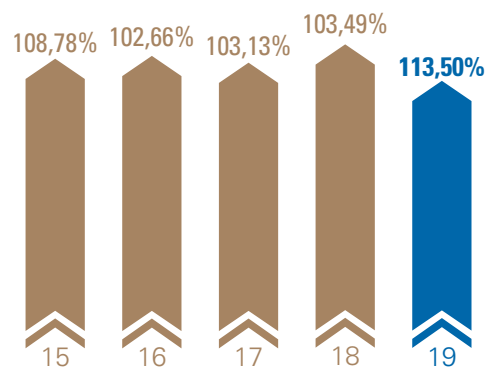
Rasio Intermediasi Makroprudential adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain ditambahkan surat berharga yang dimiliki, terhadap:

1. Dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan,

dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

2. Surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perseroan juga mengelola cadangan likuiditas dalam bentuk *secondary reserve* yang juga menjadi komponen likuiditas dalam bentuk *High Quality Liquid Asset*, yang ditetapkan dalam jumlah optimal dalam rentang di atas batas minimum *secondary reserve* setiap hari sebagai pendukung kebutuhan likuiditas Perseroan dan pemeliharaan GWM dan PLM yg telah di tentukan oleh Bank Indonesia. Posisi *secondary reserve* Perseroan selalu terjaga di atas batas minimum *secondary reserve* selama tahun 2019.

**GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) KONVENSIONAL
RUPIAH****GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) KONVENSIONAL
VALUTA ASING****GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) SYARIAH
RUPIAH****LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)****Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang
Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan bisnis perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sesuai dengan peraturan BI, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)/CAR yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank dengan profil risiko "2" adalah sebesar 9,18%

CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk-Weighted Assets (RWA). Jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II"). Dalam rangka perhitungan

Risiko Pasar, Perseroan dapat memasukkan komponen Modal Pelengkap Tambahan ("Tier III") yaitu Pinjaman Subordinasi berjangka pendek yang memenuhi kriteria tertentu sebagai komponen Modal. Total modal Perseroan di tahun 2019 mencapai Rp23,35 triliun terdiri dari modal inti dan pelengkap masing-masing sebesar Rp21,04 triliun dan Rp2,31 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi total modal tahun 2018 yang mencapai Rp23,33 triliun dengan modal inti dan pelengkap masing-masing senilai Rp20,46 triliun dan Rp2,87 triliun.

Dengan membandingkan total modal dengan ATMR Perseroan sebesar Rp138,84 triliun di tahun 2019, rasio CAR adalah sebesar 17,32% lebih rendah dibandingkan dengan rasio CAR tahun 2018 sebesar 18,21%. Sementara itu, CAR untuk modal inti sebesar 15,60% di tahun 2019, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 15,97%.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



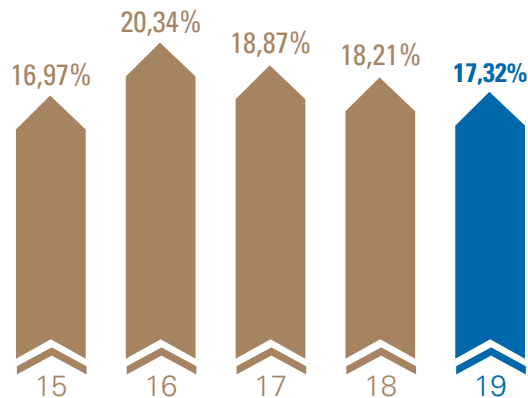
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



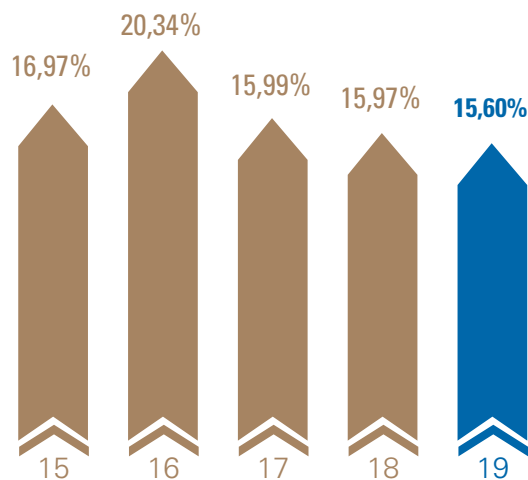
Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)/CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)



KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)/CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) UNTUK MODAL INTI



Selain itu, obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan telah mendapatkan peringkat idAA+ dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi Bank BTN	Peringkat	Lembaga Pemeringkat
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)



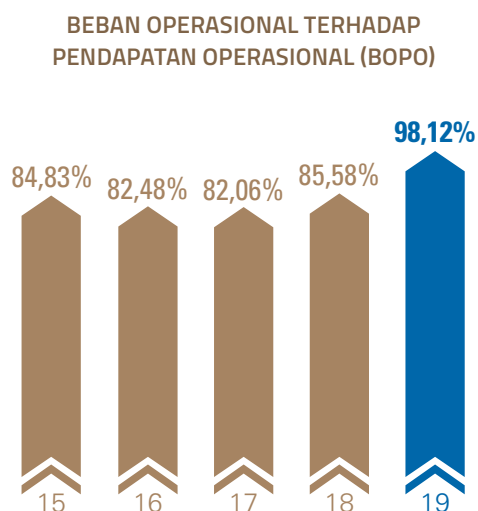
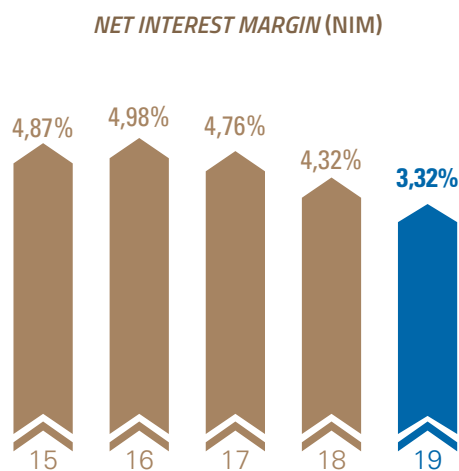
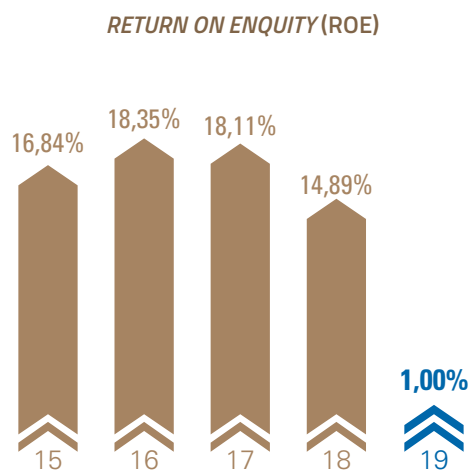
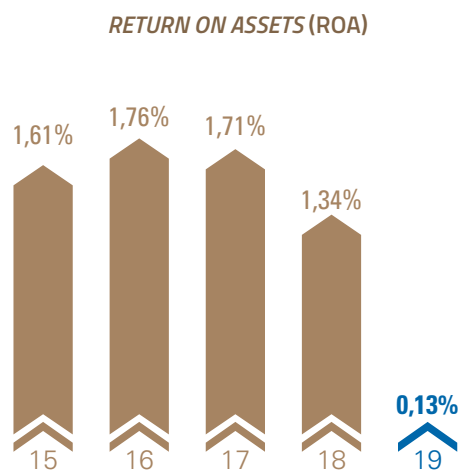
Disamping peringkat obligasi tersebut di atas, Perseroan memiliki peringkat perusahaan idAA+ yang diterbitkan oleh Pefindo dan peringkat nasional jangka panjang AA(idn) serta peringkat nasional jangka pendek AA(idn).

Rasio Profitabilitas dan Efisiensi

Untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja Perseroan, rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh

perbankan adalah Laba sebelum pajak terhadap Aset atau *Return On Assets* (ROA), Laba setelah pajak terhadap Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE), Marjin Bunga Bersih atau *Net Interest Margin* (NIM), dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Uraian BOPO, ROA, ROE, dan NIM, perbandingan kenaikan/penurunan 2018-2019.



Tingkat Kolektibilitas Piutang



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Perseroan memiliki komitmen menjaga kualitas aset produktif ditengah ekspansi kredit dan bisnis perbankan lainnya. Per 31 Desember 2019, rasio NPL gross sebesar 4,78% sedangkan rasio NPL net 2,96%. Kedua rasio Perseroan ini pada tahun 2018 masingmasing sebesar 2,81% dan 1,83%. Kolektibilitas aset produktif Perseroan pada nilai tercatatnya sebelum cadangan kerugian penurunan disajikan dalam tabel di bawah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk meminimalkan jumlah kredit macet di tahun 2019 di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit dan pembiayaan atas kredit baru, 2. Melakukan pembinaan dan penagihan atas debitur non performing, termasuk restrukturisasi debitur yang masih memiliki potensi bisnis, 3. Melakukan eksekusi agunan atas debitur non performing dengan melakukan lelang agunan dan Mencari mitra strategis dalam pengelolaan aset Perseroan.

**TABEL KOLEKTIBILITAS ASET PRODUKTIF 2018
(DALAM RP JUTA)**

	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Penempatan pada bank lain	1.386.987	-	-	-	1.632	1.388.619
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga	17.417.831	60.632	6.070	6.432	64.781	17.555.746
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	1.071.864	-	-	-	-	1.071.864
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1.875.221	-	-	-	-	1.875.221
Tagihan Akseptasi	487.052	-	-	-	-	487.052
Kredit & Pembiayaan	217.344.415	26.250.510	3.087.668	1.395.628	7.746.938	255.825.159
Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	270	270
Komitmen dan kontinjensi	15.690.188	1.800.299	250.322	126.791	90.304	17.957.904
Aset yang diambil alih	-	-	-	77.591	-	77.591

**KOLEKTIBILITAS ASET PRODUKTIF 2018
(DALAM RP JUTA)**

	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
Penempatan pada bank lain	1.831.609	-	-	-	1.718	1.833.327
Tagihan spot dan derivatif	167	-	-	-	-	167
Surat Berharga	13.816.260	72.382	6.922	10.952	54.831	13.961.347
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	1.059.534	-	-	-	-	1.059.534
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi	528.148	-	-	-	-	528.148
Kredit	210.776.397	20.282.599	569.932	473.366	5.655.380	237.757.674
Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	270	270
Komitmen dan kontinjensi	23.881.178	1.644.480	52.211	14.238	110.778	25.702.885
Aset yang diambil alih	-	-	77.591	-	-	77.591

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL SERTA DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN**Kebijakan dan Penentu Kebijakan Struktur Modal**

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, disamping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama-sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data-data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Bank sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Disamping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, modal Perseroan terdiri dari:

1. Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier – CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).

2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti Perseroan di tahun 2019 adalah sebesar Rp21,04 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,46 triliun. Sedangkan jumlah modal pelengkap Perseroan di tahun 2019 sebesar Rp2,31 triliun lebih rendah dibanding modal pelengkap tahun 2018 sebesar Rp2,87 triliun.

Struktur Permodalan

Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Modal inti (Tier 1) memiliki peran vital terhadap komposisi permodalan Perseroan dengan kontribusi di tahun 2019 mencapai 90,09% atau setaradengan Rp21,04 triliun; sedangkan modal pelengkap Perseroan sebesar Rp2,31 triliun. Tabel berikut menyajikan laporan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) pada periode 2018-2019.

	Satuan	2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Nominal	Persentase (%)
I. Modal inti (Tier 1)	Rp-juta	21.037.417	20.460.086	577.331	2,82%
1. Modal Inti Utama (Common Equity Tier - CET 1)	Rp-juta	21.037.417	20.460.086	577.331	2,82%
1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	Rp-juta	5.295.000	5.295.000	-	-
1.2. Cadangan Tambahan Modal	Rp-juta	16.371.522	16.020.750	350.772	2,19%
1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	Rp-juta	-	-	-	-
1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	Rp-juta	(629.105)	(855.664)	226.559	-26,48%
2. Modal Inti Tambahan (Additional Tier - AT 1)	Rp-juta	-	-	-	-
2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	Rp-juta	-	-	-	-



	Satuan	2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Nominal	Persentase (%)
2.2. Agio/Disagio	Rp-juta	-	-	-	-
2.3. Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	Rp-juta	-	-	-	-
II. Modal Pelengkap (Tier 2)	Rp-juta	2.313.208	2.868.360	-555.152	-19,35%
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	Rp-juta	999.719	1.499.519	-599.800	-40,00%
2. Agio/Disagio	Rp-juta	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	Rp-juta	1.413.489	1.368.841	44.648	3,26%
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	Rp-juta	-	-	-	-
Total Modal	Rp-juta	23.350.625	23.328.446	22.179	0,10%
Aset Tertimbang Menurut Risiko					
• ATMR untuk risiko kredit	Rp-juta	113.079.144	109.507.283	3.571.861	3,26%
• ATMR untuk risiko pasar	Rp-juta	801.774	1.007.249	-205.475	-20,40%
• ATMR untuk risiko operasional	Rp-juta	20.963.355	17.623.217	3.340.138	18,95%
Total ATMR	Rp-juta	134.844.273	128.137.749	6.706.524	5,23%
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko	%	9.18%	9,16%	0,02%	0,22%
Rasio CET 1	%	15.60%	15,97%	-0,37%	-2,32%
Rasio Tier 1	%	15.60%	15,97%	-0,37%	-2,32%
Rasio Tier 2	%	1.72%	2,24%	-0,52%	-23,21%
Rasio KPMM	%	17.32%	18,21%	-0,89%	-4,89%

Selain modal inti, Perseroan mendapatkan fasilitas Pinjaman Subordinasi yang diperhitungkan sebagai modal pelengkap. Pinjaman subordinasi ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT

Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3 triliun dengan suku bunga 9,00% dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan pencairan. Pencairan tahap ke-1



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

pada 30 Mei 2016 sebesar Rp1,5 triliun dan tahap ke-2 pada 20 Juni 2016 sebesar Rp1,5 triliun. Jangka waktu Pinjaman Subordinasi adalah 5 tahun (60 bulan) yang akan jatuh tempo masing-masing pada 30 Mei 2021 dan

20 Juni 2021. Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Realisasi Investasi Barang Modal

Untuk mendukung ekspansi bisnis berkelanjutan, perseroan sampai dengan tahun 2019 telah melakukan investasi barang modal sebesar Rp8,1 triliun. Investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan aset yang masih dalam penyesuaian berupa bangunan.

Berikut rincian tabel investasi barang modal perseroan di tahun 2019.

Investasi Barang Modal	Tujuan	Nilai (Rp-juta)
Tanah	Pengadaan tanah untuk Kantor	7.111
Bangunan	Pembangunan dan/atau Renovasi Gedung/Bangunan	129.068
Mesin Kantor	Pembelian Peralatan Kantor berupa Server Komputer, Notebook, Printer dan lain sebagainya	36.611
Perabot Kantor	Pembelian Peralatan Kantor berupa Furniture, Genset, UPS, AC dan lain sebagainya	89.182
Perabot Rumah Dinas	Pembelian Furniture untuk Rumah Dinas	1.879

Tabel Investasi Barang Modal dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya.

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Realisasi Investasi Barang Modal	8.108.086	7.411.526	696.560	9,40%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada tanggal 23 Januari 2020, Perseroan telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar ASD300 juta atau equivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,2% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Sampai dengan tanggal laporan ini, bank masih menunggu persetujuan dari OJK untuk dapat memperhitungkan obligasi ini sebagai komponen modal inti tambahan dalam perhitungan rasio kewajiban penyedia modal minimum.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp17,65 miliar dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

**PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020**

Tabel perbandingan realisasi tahun 2019, target tahun 2019, dan proyeksi tahun 2020.

TABEL PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2019, TARGET TAHUN 2019, DAN PROYEKSI TAHUN 2020

	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2019	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019	Proyeksi 2020
Total Asset	306,436	311,777	8% - 10%	1.74%	6% - 8%
Total Loan & Financing	238,298	255,825	8% - 10%	7.36%	8% - 10%
Total Deposits	230,264	225,401	8% - 10%	-2,11%	13% - 15%
Equity	23,84	23,836	2% - 4%	-0,02%	
Net Profit	2,808	209	Rp1,12 T	-92,55%	around Rp3T
Earning per Share (IDR)	265	20		-92,55%	
CAR (Tier 1)	15,97%	15,60%		-0,37%	
CAR (BI)	18,21%	17,32%	17% - 19%	-0,89%	16% - 17%
NPL (Gross)	2,81%	4,78%	3.1% - 3.2%	1,97%	3% - 3.5%
NPL (Nett)	1,83%	2,96%	2.2% - 2.3%	1,13%	1.5% - 1.7%
NIM	4,32%	3,32%	around 3.7%	-1,00%	3.7% - 3.8%
CIR	52,28%	58,08%	56% - 58%	5,80%	54% - 57%
COVERAGE RATIO	49,24%	50,01%	> 70%	0,77%	> 130%
ROE	14,89%	1,00%	5.1% - 5.3%	-13,89%	19% - 20%
ROA	1,34%	0,13%	0.5% - 0.7%	-1,21%	1.2% - 1.5%
LDR	103,49%	113,50%	102% - 104%	10,01%	105% - 107%
LCR	108,99%	136,31%		27,32%	

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DAN TINGKAT KESEHATAN BANK**Key Performance Indicator**

Key Performance Indicator (KPI) merupakan suatu ukuran kinerja secara kuantitatif untuk menilai tingkat pencapaian terhadap target yang disetujui sebelumnya oleh manajemen. Pencapaian KPI mencerminkan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. KPI perseroan mencakup 4 (empat) perspektif yang terdiri dari aspek keuangan dan non keuangan.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian kondisi perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil

penilaian berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (Empat) faktor yaitu:

1. Profil Risiko
2. Tata Kelola
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Peringkat kesehatan perseroan posisi Desember 2019 (*self assessment*) berada pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN**Dasar Kebijakan Pembagian Dividen**

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen di antaranya adalah tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari rups perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Besarnya dividen perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja perseroan.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tanggal 17 Mei 2019, Pemegang Saham memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp2.807.921.063.074,00 sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 20% atau Rp561.584.212.615,00 ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus Dividen bagian pemerintah Indonesia atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp336.950.527.569,00, akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% atau Rp2.246.336.850.459,00 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dimana pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp561.584.212.615,00 atau sebesar Rp.53,029671 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, di bawah ini disajikan informasi tindak lanjut perseroan terkait jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2018.

Pembagian Dividen Tahun 2019 Dan Historikalnya**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Mei 2019 29 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	28 Mei 2019 31 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Record Date</i>)	29 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	12 Juni 2019



Realisasi Pembagian Dividen Saham Di Tahun 2019 Untuk Dividen Tahun Buku 2018 Sebagai Berikut:

Laba Tahun Berjalan tahun buku 2018	Rp2.807.921.063.074
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp)	Rp561.584.212.615
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih tahun sebelumnya yang dibagikan sebagai dividen) (%)	20%
Nilai dividen per lembar saham (Rp/lembar saham)	Rp53,03
Jumlah saham yang berhak atas dividen (lembar saham)	10.590.000.000
Tanggal pengumuman	17 Mei 2019
Tanggal pembayaran	12 Juni 2019

Pembagian dan pembayaran dividen tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun Pembagian	Tahun Buku Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)	Rasio Pembagian Dividen (%)
2019	2018	17 Mei 2019	12 Juni 2019	561,58	53,03	20%
2018	2017	26 Maret 2018	24 April 2018	605,49	57,18	20%
2017	2016	20 Maret 2017	13 April 2017	523,78	49,46	20%

PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI NEGARA

Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada negara sekaligus menunaikan kewajiban terkait perpajakan. Berikut disampaikan kontribusi perseroan melalui pembayaran pajak di tahun 2019.

KONTRIBUSI PAJAK KEPADA NEGARA

Pajak	Periode s.d Des 2019 (Rp)
PPh (PPh Badan)	590.026.490.800
PPH 21 Perorangan	264.042.095.496
PPN	17.366.799.311
PPnBM	-
PBB	12.028.977.874
Pajak Lainnya	1.655.702.144.770
Total	2.539.166.508.251



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)**

Program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan/atau Pegawai Atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) merupakan pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel perseroan, sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana. Pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) Dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (Tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap pertama jumlah hak opsi yang diterbitkan

sebesar maksimum 40% dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2010.

2. Tahap kedua jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2011.

3. Tahap ketiga jumlah hak opsi yang diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2012.

Adapun persyaratan pegawai dan/atau manajemen yang berhak berpartisipasi dalam program MESOP tersebut adalah pegawai yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, sekretaris dewan komisaris dan anggota komite audit.

PELAKSANAAN MESOP BANK BTN

MESOP	Masa Berlaku	Tahun Berakhir Hak Opsi	Jumlah Opsi	Harga Opsi (Rp/Saham)
MESOP 1	Februari 2011 - Agustus 2014	2014	145.234.500	855
MESOP 1	Februari 2012 - Agustus 2015	2015	108.925.500	1.297,44
MESOP 1	Februari 2013 - Agustus 2016	2016	108.925.500	1.098,36
Jumlah			363.085.500	

Realisasi ketiga program mesop disajikan dalam tabel berikut:

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009

MESOP Tahap I						
No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-



KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009

MESOP Tahap I						
No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	1.354.000	1.354.000	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	138.500	138.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
8	Oni Febriarto R.	-	65.000	65.000	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

MESOP Tahap II						
No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	855.500	855.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	109.000	109.000	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
8	Oni Febriarto R.	-	51.000	51.000	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015



MESOP Tahap III						
No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	828.500	828.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	108.500	108.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
8	Oni Febriarto R.	-	54.500	54.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016

Program MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016. ketiga tahap program MESOP tersebut telah dilaksanakan dengan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh direksi Bank BTN dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak dilaksanakannya MESOP seperti yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 yang diterbitkan pada 28 Juni 2019. Memuat uraian mengenai:

1. Total perolehan dana;
Hasil Penawaran sebesar Rp4.144.000.000.000 (empat triliun seratus empat puluh empat miliar rupiah), Total biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan obligasi tersebut adalah sebesar Rp5.929.932.400,- (Lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

- ribu empat ratus rupiah), Sehingga jumlah dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi, menjadi sebesar Rp4.138.070.067.600 (empat triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- Rencana penggunaan dana;
Sesuai Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 25 Juni 2019, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut seluruhnya telah digunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit
 - Realisasi penggunaan dana;
Per 31 Juli 2019, Perseroan telah menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.138.070.067.600 (empat triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disampaikan dalam prospektus, dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi dimaksud setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.
 - Saldo dana;
Per-31 Juli 2019, Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III adalah Nihil atau dengan kata lain sudah disalurkan 100% dari dana yang diperoleh.
 - Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana
Tidak ada perubahan penggunaan dana atas Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III BTN.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di tahun buku, khususnya yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi

Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Perseroan tidak melakukan kegiatan ekspansi sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Informasi Material Mengenai Penggabungan Usaha

Perseroan tidak melakukan kegiatan Penggabungan Usaha sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Perseroan tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang/modal sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perseroan memiliki komitmen dan kontijensi yang dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Komitmen				
Liabilitas Komitmen				
- Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum Ditarik	15.865.327	21.892.927	-6.027.600	-27,53%



	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kontinjensi				
Tagihan Kontinjensi				
- Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	2.793.877	2.818.535	-24.658	-0,87%
Liabilitas Kontinjensi				
- Garansi yang Diterbitkan	(2.009.682)	(3.793.965)	1.784.283	-47,03%
Kontinjensi - Neto	784.195	(975.430)	1.759.625	-180,39%

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Informasi Tentang Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2019 Perseroan tidak mendapatkan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Transaksi Pihak Berelasi: Ketentuan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan bank jika:

1. Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:
 - a. Mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perseroan.
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas perseroan.
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas perseroan.
2. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan perseroan.
3. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana perseroan sebagai venturer.
4. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci perseroan.
5. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d).

6. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).
7. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas terkait perseroan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan perseroan telah memenuhi peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam catatan 44 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara perseroan dan pemerintah negara republik indonesia dan entitas lain yang berelasi dengan perseroan diungkapkan juga pada catatan 44.

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA**Nama Pihak Berelasi Yang Melakukan Transaksi, Sifat Hubungan Berelasi Dan Tujuan Transaksi**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Nama Pihak Berelasi	Sifat Transaksi/Hubungan	Jenis dan Sifat Transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Kepemilikan sebagai pemegang saham utama	Obligasi Pemerintah
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Bank Mandiri Taspen Pos	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain
PT BRI Agroniaga Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang Diterbitkan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain
PT Utama Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Indonesia Power	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Timah (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek
Perum Perumnas	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT PP Properti Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Beton Precast Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Tagihan Akseptasi
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah



Nama Pihak Berelasi	Sifat Transaksi/Hubungan	Jenis dan Sifat Transaksi
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT HK Realtindo	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Indah Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Jasamarga Bali Tol	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT PNM Ventura Syariah	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Permodalan Nasional Madani	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Peruri Properti	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT PP Urban	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Taspen (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Virama Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Bumi Wira	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Nama Pihak Berelasi	Sifat Transaksi/Hubungan	Jenis dan Sifat Transaksi
PT Waskita Karya Realty	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Realty	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Wisma Seratus Sejahtera	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jiwa Brigin dan Sejahtera	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT AXA Mandiri Financial Services	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Jasaraharja Putera	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Pertamina Bina Medika	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Tugu Pratama Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi
Perum Damri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
Perum Jasa Tirta I	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Asei Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Barata Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT LEN Railway Systems	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan



Nama Pihak Berelasi	Sifat Transaksi/Hubungan	Jenis dan Sifat Transaksi
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Patra Trading	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pos Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Peruri Digital Security	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang	Hubungan pengendalian kegiatan Perseroan	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syirkah Temporer

Tujuan Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perseroan dengan pihak berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis perseroan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perseroan dengan pihak berelasi.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Realisasi Saldo Dan Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi Dengan Pihak Berelasi Karena Hubungan Kepemilikan Dengan Pemerintah Republik Indonesia

Akun	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)
Aset		
Giro pada bank lain-neto	357.624	870.392
Penempatan pada BI & bank lain-net	101.078	3.644
Efek-efek	2.126.461	877.112
Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	200.000	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	17.289.222	11.483.694
Tagihan Akseptasi	487.052	528.148
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	31.615.038	23.156.128
CKPN dari pihak-pihak berelasi	(11.060)	(2.153)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi-neto	31.603.978	23.153.975
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	10,14%	7,56%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Akun	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)
Liabilitas		
Simpanan nasabah	93.053.060	83.098.406
Liabilitas akseptasi	487.052	528.148
Surat-surat berharga yang diterbitkan	5.377.572	6.925.026
Pinjaman diterima	13.784.289	8.069.151
Pinjaman subordinasi	5.999.669	2.999.519
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	118.701.642	101.620.250
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	44,05%	38,52%
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah	588.030	534.702
Tabungan Mudharabah	134.558	81.973
Deposito Mudharabah	2.034.644	5.623.470
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	2.757.232	6.240.145
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	14,91%	33,17%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Penempatan pada BI dan bank lain	18.351	10.154
Efek-efek	151.664	57.921
Obligasi Pemerintah	475.846	413.742
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.347	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.004.323	461.592
Total pendapatan bunga untuk pihak-pihak berelasi	1.653.531	943.409
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	6,43%	4,13%
Beban Bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	4.762.165	1.111.531
Surat-surat Berharga	1.207.510	588.407
Pinjaman yang diterima	860.282	423.810
Pinjaman Subordinasi	273.167	270.200
Giro Mudharabah	4.978	3.264
Tabungan Mudharabah	3.792	5.625
Deposito Mudharabah	49.426	30.364
Total beban bunga untuk pihak-pihak berelasi	7.161.320	2.433.201



Akun	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	42,73%	19,07%
Komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif		
Garansi yang diberikan	364.059	834.470
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	18,12%	22,00%

Transaksi Dengan Manajemen Kunci

Akun	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)
Aset		
Kredit yang diberikan	119.470	125.193
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(18)	(19)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	119.452	125.174
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	0,04%	0,04%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	68.494	100.338
Kompensasi karyawan kunci	210.427	216.319
Total liabilitas dari manajemen kunci	278.921	316.657
Persentase terhadap total liabilitas	0,10%	0,12%
Dana Syirkah Temporer		
Tabungan Mudharabah	2.019	2.316
Deposito Mudharabah	3.857	2.483
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	5.876	4.799
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	0,03%	0,03%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan	7.591	6.155
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,03%	0,03%
Beban Bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	3.182	2.914
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	0,02%	0,02%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Akun	2019 (Rp-juta)	2018 (Rp-juta)
Beban gaji dan tunjangan		
Direksi	72.567	85.289
Dewan Komisaris	32.033	36.673
Karyawan Kunci	362.575	145.555
Total	467.175	267.517
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	16,31 %	9,30 %

Kebijakan Bank Terkait Dengan Mekanisme Review Atas Transaksi

Mekanisme *review* perseroan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan Dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), serta pemenuhan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP BANK**Permen BUMN No.PER-8/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019**

Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Permen BUMN No.PER-8/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Dampak Terhadap Perseroan	:	Penyesuaian proses pengadaan barang dan jasa termasuk peraturan internal direvisi ulang untuk penyesuaiannya

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI****PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”**

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas tidak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) “Pajak Penghasilan”, menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan dari pada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas tidak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas tidak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

ISAK 34: “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. ISAK ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas tidak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.



TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Berikut adalah ikhtisar beberapa pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019:

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
2. PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku sejak 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antar Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
3. PSAK 73: sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.
4. Amendemen PSAK 62: kontrak asuransi tentang menerapkan psak 71 instrumen keuangan dengan psak 62 kontrak asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020. Amendemen ini mengizinkan asurandur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari psak 71 (*Deferral Approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*Overlay Approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
5. Amendemen PSAK 1: penyajian laporan keuangan tentang definisi material dan amendemen PSAK 25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan tentang definisi material, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Amendemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Amendemen tersebut juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks *over disclosure* karena perubahan ambang batas (*thresholds*) dari definisi material tersebut. Secara garis besar, amendemen PSAK 1 dan PSAK 25:
 - a. Menambahkan istilah "*obscuring*" (pengaburan), Penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut;
 - b. Mengubah istilah "Dapat Mempengaruhi" menjadi "Diperkirakan Cukup Dapat Mempengaruhi" dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama;
 - c. Mengubah istilah "Pengguna" menjadi "Pengguna Utama" dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut.
6. Amendemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021. Amendemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan *output*, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amendemen.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen melakukan *assessment* terhadap hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha melalui metode SWOT, atau *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) terhadap kondisi Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022. Analisis SWOT dan Matriks TOWS yang disusun pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika ekonomi makro yang berdampak terhadap perubahan asumsi makro, isu eksternal yang mempengaruhi bisnis bank, positioning Bank BTN di antara Top 10 Perbankan Nasional dan potret kinerja hingga Oktober 2019. Secara rinci, analisis SWOT dan *Matriks* TOWS Bank BTN pada Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

ANALISIS SWOT

Strength

- *Positioning* yang kuat pada bisnis perumahan, terutama segmen Subsidi dan *Middle Income*
- Kontributor utama dalam Program Sejuta Rumah Pemerintah
- Peluang nasabah *captive* dengan KPR, KYG dan Dana Lembaga sebagai *entry point* utama
- Implementasi inisiatif Transformasi (*Regional Processing Center* dan *Branch Activity*)
- Dipercaya Pemerintah sebagai *Tink-Tank* dalam mengembangkan skema pembiayaan Perumahan segmen MBR

Weakness

- *Image* Tabungan sebagai transaksional dan penetrasi *mobile banking* masih rendah
- Keterbatasan infrastruktur (EDC, Penempatan *Outlet*, Fitur dan Kerjasama *Merchant*) untuk mendukung *transaksional banking*
- Kredit dominan pada kredit perumahan, memberikan *yield* tidak terlalu tinggi namun berisiko (NPL)
- Tren kenaikan NPL
- Organisasi, penempatan SDM dan budaya menjual masih dominan pada *Aset Side*
- Keterlambatan SDM IT, sehingga penyelesaiannya *project* sangat dominan pada *managed service*

Opportunity

- Penurunan suku bunga acuan menjadi 4,50% di 2020
- Rencana Relaksasi LTV dan tambahan relaksasi untuk hunian berwawasan berkelanjutan
- Bonus demografi di awal 2020 (generasi *millennial* mendominasi angkatan kerja), merupakan peluang segmen *first home buyer* yang merupakan segmen utama Bank BTN
- Pelaku dan Penetrasi *E-commerce* yang meningkat signifikan merupakan peluang untuk meningkatkan bisnis *digital* dan *e-payment*

Threat

- Likuiditas ketat perbankan masih berlanjut
- Pertumbuhan DPK terbatas pada BUKU 4 dan untuk memenuhi likuiditasnya, BUKU 4 semakin agresif
- Di 2019, BUKU 4 menyerap pertumbuhan DPK dari Deposito, artinya DPK di pasar semakin terbatas
- Alokasi KPR Subsidi Pemerintah semakin terbatas

INTERNAL FACTOR

EXTERNAL FACTOR

Memperhatikan analisis SWOT tersebut di atas, telah disusun analisis TOWS yang menggambarkan *Growth Strategy* (*Strength – Opportunity*), *Combination Strategy* (*Strength – Weakness*), *Stability Strategy* (*Weakness – Opportunity*), dan *Sustainable Strategy* (*Weakness – Threat*) sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Informasi Kelangsungan Usaha

ANALISIS TOWS

SO Strategy

- Mengembangkan KPR MBR Non Subsidi untuk memperkuat *positioning* pasar KPR di segmen mass
- Mengembangkan layanan *mobile banking* dan kerjasama *merchant* untuk meningkatkan penetrasi akuisisi dan usage *mobile banking*
- Mengembangkan produk pendanaan yang mendukung transaksional *banking*
- Membentuk anak usaha untuk memperluas bisnis di sektor perumahan dan *vehicle* mendukung inisiatif bisnis

T Strategy

- Mengembangkan program penjualan *bundling* produk (BTN@Work) pada nasabah komersial dalam meningkatkan bisnis
- Mendukung implementasi *reengineering* proses bisnis kredit konsumen
- Melanjutkan implementasi perbaikan proses bisnis pada proses kredit komersial dan *collection*

WO Strategy

- Rekomposisi dana *wholesale* dengan DPK dan *wholesale* baru dengan bunga yang lebih rendah
- Menurunkan komposisi Deposito lembaga dan *special rate*
- Fokus pada pemenuhan SDM IT dan menentukan klasifikasi untuk proyek *managed service*
- Program sales untuk meningkatkan kontribusi DPK Ritel
- Relokasi *outlet* dan ATM, dengan prioritas *merchant* dan lembaga yang sudah berkerjasama
- Meningkatkan kontribusi kredit bermajin tinggi

WT Strategy

- Membentuk organisasi yang fokus pada pengelolaan DPK Ritel dan transaksional *banking*
- Melakukan *talent mapping* dan akuisisi *talent* (*internal/ experienced/ professional hired*) untuk mengelola organisasi Ritel *Funding* dan *Transaksional Banking*
- *Skema pricing* kredit, dengan memperhitungkan eksposur risiko (pencadangan CKPN)

Mempertimbangkan analisa SWOT dan perkembangan ekonomi domestik, maka landasan strategi bisnis Perseroan di tahun 2020 difokuskan untuk meningkatkan kualitas bisnis dengan 3 (tiga) prioritas utama yaitu meningkatkan profitabilitas, perbaikan proses dan kualitas kredit dan pembenahan infrastruktur IT dan SDM.

FOKUS PERBAIKAN KUALITAS BISNIS

Strategi Pendanaan

- Rekomposisi pendanaan dan meningkatkan kontribusi DPK Ritel
- Rekomposisi sebagai dana *wholesale* jatuh tempo dengan DPK dan *wholesale* baru dengan rate yang lebih rendah
 - Meningkatkan kontribusi Deposito Ritel
 - Mengembangkan CASA berbasis transaksional

Strategi Perkreditan

- Meningkatkan Kontribusi Kredit Marjin Tinggi, Perbaikan Proses dan Kualitas
- Meningkatkan KPR Non Subsidi di segmen MBR untuk mengurangi ketergantungan pada KPR Subsidi
 - Meningkatkan kredit bermargin tinggi
 - Melanjutkan perbaikan proses bisnis dan pembenahan dokumen kredit
 - Fokus pada penurunan NPL dan kolektibilitas

Strategi Fee Based Income

- Mengembangkan *Fee Based Income* berbasis transaksi dan layanan
- Mengembangkan *fee* dari transaksi elektronik *channel*
 - Meningkatkan *fee treasury* & mengembangkan sumber FBI baru
 - Meningkatkan FBI melalui strategi anaroganik

Corporate Action: Action Permodalan dan Transaksi Anak Usaha untuk Mengembangkan Bisnis

SDM: Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Organisasi untuk Meningkatkan Produktivitas

IT: Mengembangkan otomatisasi proses *back-end*, Implementasi *Digital Banking* dan Ekosistem KPR Digital

Manajemen Risiko: Memperkuat penerapan Manajemen Risiko pada proses Bisnis dan Operasional



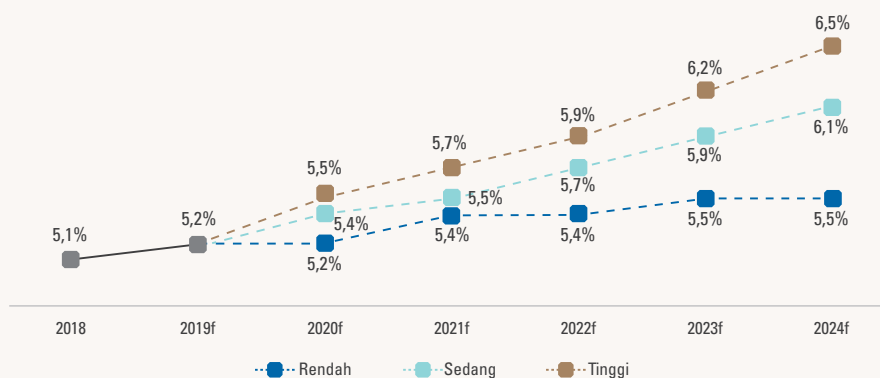
PROSPEK USAHA TAHUN 2020

DAN RENCANA STRATEGIS

DINAMIKA MAKRO DAN TANTANGAN LIKUIDITAS KETAT PERBANKAN MASIH BERLANJUT

Sepanjang tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan stagnan di 3,6% - 3,8% per tahunnya, akibat perubahan ekonomi global yang terus bergerak. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan volume ekspor, penurunan harga komoditas utama Indonesia (minyak kelapa sawit dan batu bara) dan ketahanan nilai tukar Rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga tahun mendatang tetap berada pada kisaran 5%.

SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RPJMN 2020 – 2024



Source: Ministry of National Development Planning Agency, the National Medium-Term Development Plan 2020 – 2024

“Pada ketiga skenario, Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 – 2022 berada pada kisaran 5%, yang lebih disebabkan oleh tekanan global”

Untuk mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi dan intermediasi perbankan, Bank Indonesia diprediksi akan kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 days repo. Tingkat inflasi yang stabil di bawah 4% dan penurunan Fed Rate yang berlanjut, merupakan pertimbangan utama Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI 7 days repo di tahun 2020.

Namun demikian, upaya BI untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dihadapi tantangan tren pengetatan likuiditas perbankan yang akan berlanjut di 2020. Ketidakpastian global dan penyerapan obligasi Pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur menggeser penempatan dana dari DPK Perbankan ke instrumen yang lebih aman dan memberikan yield yang lebih tinggi.

Hal ini ditujukan dengan peningkatan surat berharga sebagai sumber pendanaan dan tren kenaikan LDR (Loan to Deposit Ratio) Perbankan. Per Agustus 2019, penghimpunan dana perbankan dari surat berharga tumbuh 21,72% (yoy), lebih tinggi dari Agustus 2018 sebesar -2,67% (yoy). Sementara, DPK tumbuh 7,62% (yoy) dan rasio LDR menjadi 94,66% naik dari Agustus 2018 sebesar 93,81%.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



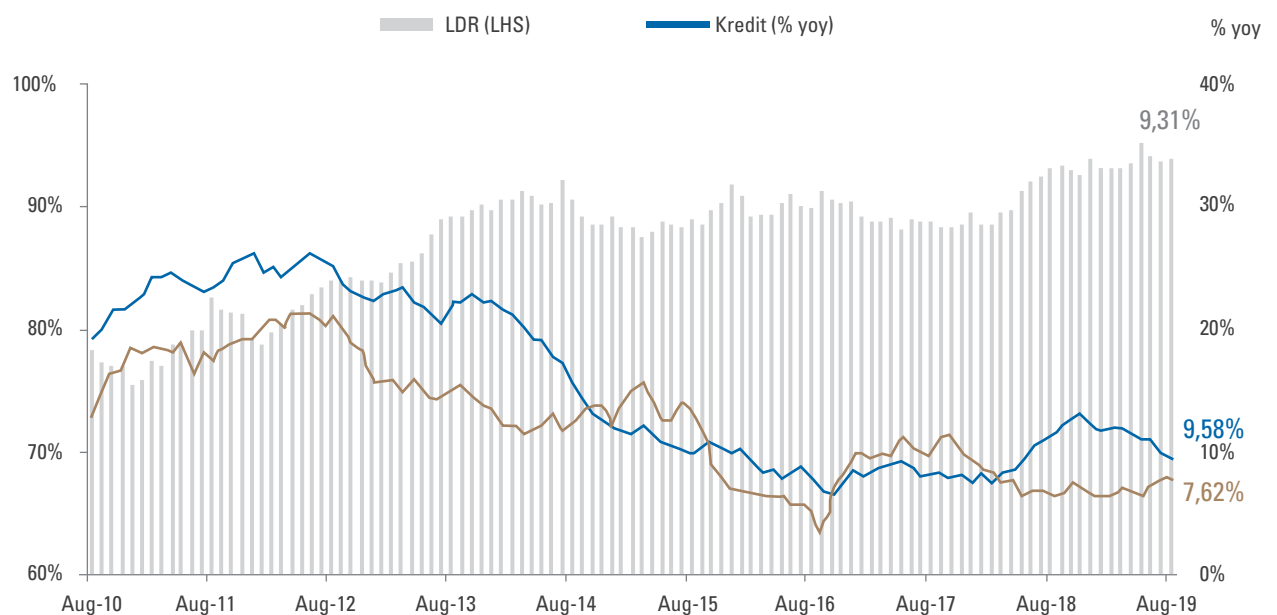
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS

PERKEMBANGAN LDR PERBANKAN NASIONAL



Sumber : SPI OJK, Agustus 2019

Berdasarkan dinamika makro dan prospek kinerja perbankan tersebut, fokus BTN pada jangka menengah adalah mengendalikan pertumbuhan kredit dan mengembangkan kapasitas dalam menghimpun pendanaan untuk mendukung rencana bisnis.

PROSPEK SEKTOR PERUMAHAN DAN PELUANG PERTUMBUHAN SEGMENT EMERGING AFFLUENT

Sektor perumahan memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian negara. Di tahun 2018, rasio KPR terhadap PDB Indonesia adalah 3,0% masih lebih kecil dibanding negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina (3,8%), Thailand (22,3%), Malaysia (38,4%) dan Singapura (44,8%), yang artinya sektor perumahan Indonesia masih jauh dari jenuh dan berpotensi untuk dikembangkan.

Program Sejuta Rumah Pemerintah untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang masih tinggi, merupakan peluang bagi Bank BTN untuk memperkuat positioning bisnis perumahan di segmen Subsidi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

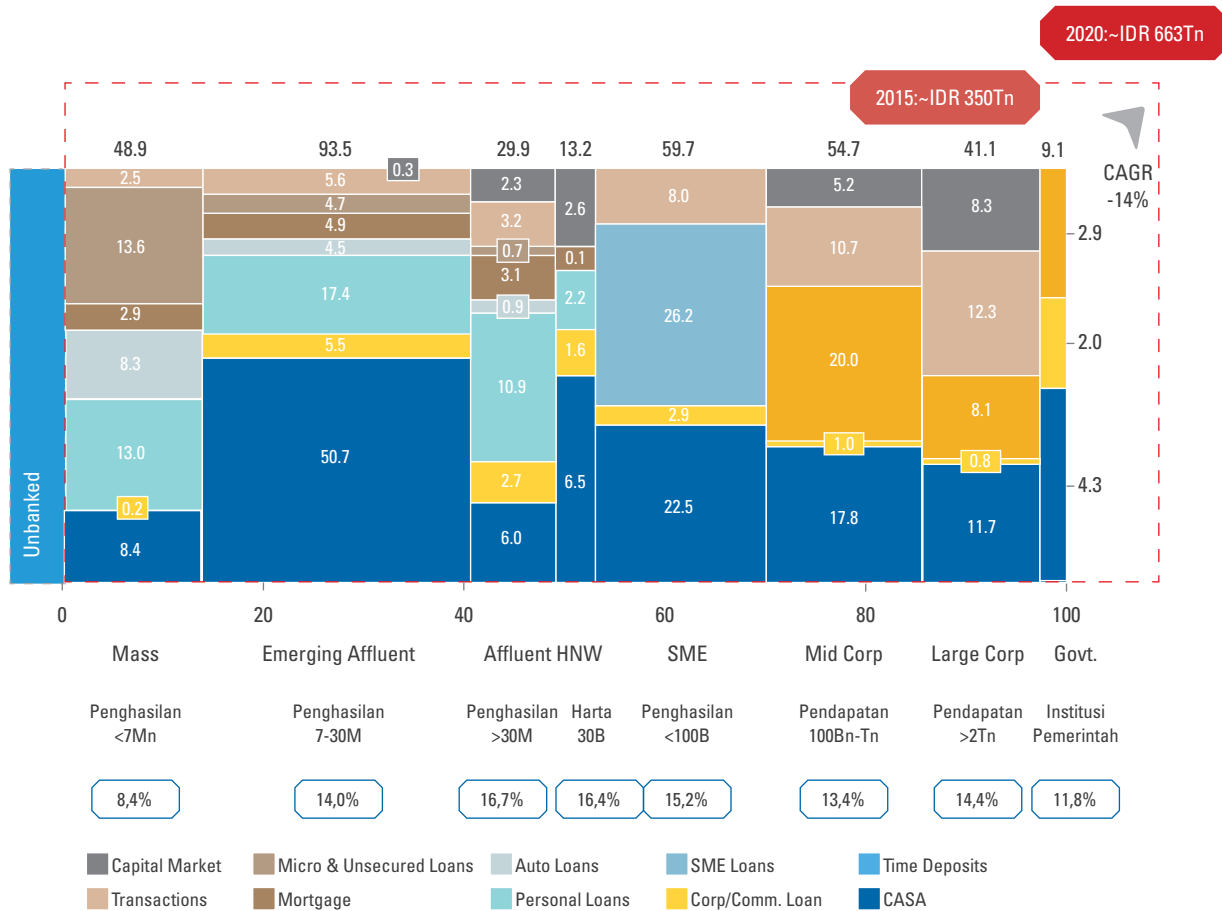
Selain itu, dukungan kebijakan LTV (loan to value) dan bonus demografi berupa pertumbuhan segmen emerging

affluent yaitu masyarakat kelas menengah dengan umur 25 tahun – 45 tahun yang berpenghasilan Rp7 Juta – Rp30 Juta per bulannya merupakan peluang Bank BTN untuk mengembangkan bisnis di segmen menengah. Sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2018, segmen emerging affluent merupakan segmen dengan pertumbuhan paling pesat yakni 178% dan diproyeksikan terus tumbuh menjadi ±125 juta jiwa di tahun 2020.

Sebagai segmen yang didominasi oleh Profesional, Pelajar dan Keluarga Muda menjadikan segmen ini memiliki revenue pool terbesar di sektor perbankan. Hal ini tidak terlepas dari kriteria segmen ini yang notabene adalah masyarakat yang membutuhkan perencanaan keuangan, memiliki mobilitas tinggi, dan digital savvy.



REVENUE POOL PERBANKAN TAHUN 2020



Sumber : Cetak Biru Transformasi 2016 – 2020

Untuk memenangkan persaingan pada segmen ini, Bank BTN harus terus berinovasi untuk mengembangkan layanannya. Persaingan yang tidak terbatas pada Bank namun juga dengan para pelaku sharing economy (e-economy) yang mengadopsi teknologi dalam mengoperasikan bisnisnya menuntut Bank untuk merubah pola layanan yang lebih mengadopsi layanan keuangan berbasis digital.

Mempertimbangkan hal tersebut, untuk memenangkan persaingan emerging affluent, Bank BTN akan membangun proposisi digital dengan mengembangkan digital banking dan ekosistem KPR digital sebagai strategipengembangan bisnis di jangka menengah – panjang.

Menjadi Housing Market Maker

Sejak diimplementasikan di tahun 2015, secara gradual Program Sejuta Rumah Pemerintah telah berhasil menurunkan angka backlog perumahan, kendati demikian, masih terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah keterbatasan pendanaan Pemerintah untuk menyalurkan Program KPR Subsidi. Sementara, alternatif pendanaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan pembiayaan KPR MBR Non APBN seperti KPR BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) masih membutuhkan waktu dalam implementasinya.

Hal ini terlihat dari tren penurunan alokasi KPR Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

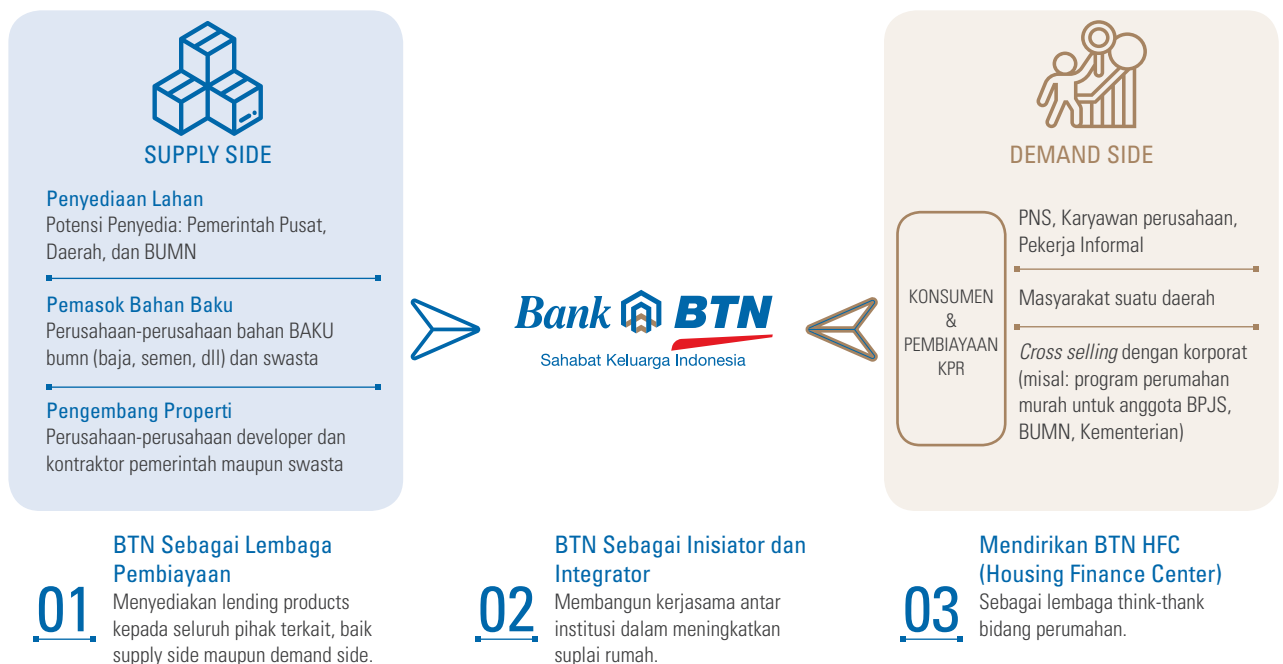
PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS

Pada APBN 2017, Pemerintah mengalokasikan Program KPR Subsidi sebanyak 279 ribu unit rumah kemudian turun di 2018 menjadi 267 ribu unit, 234 ribu unit di 2019 dan 110 ribu unit di 2020.

Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai Bank Fokus yang mengemban mandat utama Program Sejuta Rumah, pada Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022, Bank BTN akan memperluas skema pembiayaan KPR Non Subsidi untuk menjangkau segmen MBR dan mengembangkan skema pendanaan jangka panjang untuk mendanai kredit perumahan.

Selain itu, untuk memperkuat perannya di sektor Perumahan Bank BTN juga melakukan transformasi bisnis untuk mengembangkan peran yang tidak terbatas pada pembiayaan perumahan, namun juga sebagai *housing market maker* yaitu lembaga yang berperan sebagai integrator antara sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*) yang diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas bank sebagai lembaga tawaran Pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelesaian *backlog* perumahan.

PERAN BANK BTN SEBAGAI HOUSING MARKET MAKER



Sumber : Cetak Biru Transformasi 2016 – 2020

Secara garis besar strategis Bank BTN sebagai *housing market maker* adalah sebagai berikut:

- Berperan sebagai Lembaga Pembiayaan Menyediakan *lending products* baik *supply side* maupun *demand side*.
- Berperan Sebagai Inisiator dan Integrator Membangun kerjasama antar institusi dalam meningkatkan supply rumah.
- Pusat Informasi dan Keahlian melalui Digital Intermediary Mengembangkan kapabilitas sebagai lembaga "*housing finance*" sebagai sumber *research*, *learning*, dan *advisory* terkait sektor perumahan yang terdepan di Indonesia



MANAJEMEN RISIKO

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, Perseroan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif atas perubahan iklim bisnis eksternal dengan melakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Perseroan juga senantiasa melandasi setiap aktivitas bisnis dengan memiliki struktur modal yang kuat serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk memastikan bahwa Perseroan akan terus bertumbuh. Oleh karena itu, struktur permodalan dan penerapan manajemen risiko turut berperan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh proses bisnis Bank.

STRUKTUR MODAL

Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan. Kebutuhan permodalan tersebut direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis. Perseroan memiliki Rencana Permodalan yang disusun berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Direksi menyusun Rencana Permodalan sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan kebijakan manajemen terkait permodalan bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki modal dan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha dan mempertahankan kelangsungan pengembangan bisnis Perseroan pada masa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Selaras dengan Peraturan Bank Indonesia, modal Perseroan terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:

1. Modal Inti

Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier – CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (*agio*, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).
2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti)

Modal pelengkap meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan. Di tahun 2019, Perseroan memiliki jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp23,35 triliun, lebih tinggi dibandingkan modal inti dan modal pelengkap tahun 2018 sebesar Rp23,33 triliun.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO: DASAR PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan mengelola permodalan guna menjaga kecukupan modal sesuai profil risiko Bank secara menyeluruh dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Besarnya modal yang dikelola Perseroan harus dapat meng-cover risiko yang timbul dari aktivitas Perseroan namun tidak terbatas pada rencana ekspansi bisnis dan aktivitas lain. Perhitungan kecukupan modal mengacu pada Peraturan Regulator yang berlaku.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah dengan konsisten melaporkan kecukupan permodalan kepada regulator dan publik melalui laporan KPMM dan mencantumkan rasio KPMM pada Laporan Publikasi Bank. Rasio KPMM menunjukkan bahwa Modal Bank (CAR 18,21%) dapat meng-cover risiko (potensi kerugian) yang timbul dari aktivitas Perseroan saat ini dan yang akan datang.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.
3. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan:
 - a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan.
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Komisaris.
 - d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.
4. Direksi telah melakukan pengawasan dengan:
 - a. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko.
 - b. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui prosedur sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
 - c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
 - d. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
 - e. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Enterprise Risk Management Division (RMD) termasuk laporan mengenai profil Risiko.
 - g. Memastikan seluruh Risiko yang material dan menimbulkan dampak yang buruk telah ditindaklanjuti dan pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
 - h. Memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan kegiatan usaha Perseroan yang ditemukan oleh Internal Audit Division (IAD).
 - i. Mengembangkan budaya peduli risiko termasuk budaya *anti fraud* pada seluruh jenjang organisasi.
 - j. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
 - k. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara RMD dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan limit dalam menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur

dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang di-review dan dikkinikan secara berkala



untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Dalam menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Perseroan mempertimbangkan strategi manajemen risiko,

tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta limit yang memperhatikan kemampuan modal Perseroan untuk dapat menyerap eksposur risiko.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*), profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat.

Bank memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang direview dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Dalam menetapkan kerangka manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur dan limit, Bank BTN memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

PENETAPAN LIMIT

Limit risiko ditetapkan dengan mengacu kepada tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. Prosedur dan penetapan limit mencakup akuntabilitas dan jenjang

delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bisnis bank yang memiliki eksposur risiko.

IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan juga senantiasa memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan atas proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

1. Identifikasi

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko, peristiwa Risiko dan dampak Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran

Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan risk appetite Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

3. Pemantauan

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup antara



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

lain pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh RMD.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian Risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap

potensi kerugian.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan serta adaptif terhadap perubahan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, dipastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perseroan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta IAD. Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Perseroan menerapkan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) antara unit kredit dengan unit manajemen risiko, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di bidang perkreditan dengan adanya unit kerja *Credit Risk Desk*.
3. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:
 - a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
 - c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;

- d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
 - e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perseroan;
 - h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perseroan berdasarkan hasil audit;
 - j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perseroan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling kurang setiap tahun oleh RMD dan IAD.



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menerapkan manajemen risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.



RISIKO KREDIT: PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Bank sedang mereview kebijakan Internal *Credit Rating* antara unit bisnis bersama dengan Credit Risk Division (CRD) untuk kredit komersial dalam menganalisa dari segi risiko kredit. CRD terdiri dari CRD di Kantor Pusat, RCRH (*Regional Credit Risk Head*) di Kantor Wilayah dan BCRH (*Branch Credit Risk Head*) dan BCRA (*Branch Credit Risk Analyst*) di Kantor Cabang dan saat ini Bank telah menerapkan Four Eyes Principle. Selain itu telah dibentuk Departemen Monitoring pada *Commercial Lending Division* (CMLD) yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti). Berbeda dengan

kredit komersial, proses pengendalian risiko kredit untuk kredit konsumen dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yaitu melengkapi aplikasi tersebut dengan *Credit Scoring Model* (CSM). Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Consumer Collection and Remedial Division (CCD) yang dilengkapi unit *Desk Call* dan unit *Consumer Collection and Remedial Unit* (CCRU) di Kantor Cabang. Penagihan debitur-debitur menunggak > 360 hari (kredit konsumen & Komersial), pengalihan debitur (Novasi, Cessie) dan lelang dikelola oleh *Asset Management Division* (AMD).

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi, serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain ^{*)}	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	38.958.285	-	-	-	38.958.285
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.339.189	250.140	-	-	3.589.329
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.790.167	19.943	340	27	2.810.477
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	80.152.465	49.882.191	32.628.363	32.872.192	195.535.211
6	Kredit Beragun Properti Komersial	12.234.661	6.505.065	2.442.192	2.083.431	23.265.349
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	678.704	469.099	238.079	247.271	1.633.153
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1.640.195	1.230.662	597.989	1.340.471	4.809.317
9	Tagihan Kepada Korporasi	17.358.013	2.831.219	1.038.499	761.397	21.989.128
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.845.938	1.668.021	791.117	1.124.163	5.429.239
11	Aset Lainnya	6.686.348	2.602.220	964.821	1.437.288	11.690.677
Total		165.683.965	65.458.560	38.701.400	39.866.240	309.710.165

*) Lain-lain terdiri dari terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain*	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	48.436.894	-	-	-	48.436.894
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4.396.793	32.721	-	-	4.429.514



No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain*	Total
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.289.693	36.566	231	26	2.326.516
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	73.888.564	46.489.642	29.496.132	30.608.861	180.483.199
6	Kredit Beragun Properti Komersial	12.762.100	7.025.289	2.731.995	2.706.805	25.226.189
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	635.411	441.782	227.676	240.080	1.544.949
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1.593.127	1.438.857	687.896	1.366.592	5.086.472
9	Tagihan Kepada Korporasi	14.843.223	4.612.722	1.116.771	1.304.477	21.877.193
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.179.554	1.010.470	662.954	1.091.326	3.944.304
11	Aset Lainnya	6.815.693	2.322.784	697.224	1.137.669	10.973.370
	Total	166.841.052	63.410.833	35.620.879	38.455.836	304.328.600

*) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	34.956.151	1.078.463	635.960	2.287.711	-	38.958.285
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.469.443	1.331.159	657.427	131.300	-	3.589.329
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.577.608	94.849	138.020	-	-	2.810.477



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	388.191	2.615.800	6.615.737	185.915.483	-	195.535.211
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.251.239	10.620.005	7.767.197	626.908	-	23.265.349
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	3.619	40.402	115.438	1.473.694	-	1.633.153
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	543.237	678.550	650.407	2.937.123	-	4.809.317
9	Tagihan Kepada Korporasi	6.618.928	3.885.836	1.573.627	9.910.737	-	21.989.128
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.566.503	748.209	289.408	2.825.119	-	5.429.239
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	11.690.677	11.690.677
Total		52.374.919	21.093.273	18.443.221	206.108.075	11.690.677	309.710.165

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	43.610.741	3.011.337	363.665	1.451.151	-	48.436.894
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.673.335	1.107.124	600.887	48.168	-	4.429.514
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.832.091	494.425	-	-	-	2.326.516
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	155.711.328	2.435.328	6.259.200	16.077.343	-	180.483.199



No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
6	Kredit Beragun Properti Komersial	5.793.389	11.086.660	8.346.140	-	-	25.226.189
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.417.185	40.634	87.130	-	-	1.544.949
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.628.566	778.525	611.415	67.966	-	5.086.472
9	Tagihan Kepada Korporasi	15.691.460	4.349.719	1.736.503	99.511	-	21.877.193
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.072.487	530.199	235.455	106.163	-	3.944.304
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	10.973.370	10.973.370
Total		233.430.582	23.833.951	18.240.395	17.850.302	10.973.370	304.328.600

TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
31 Desember 2019						
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	166.169	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	79.419	-	-	
6	Konstruksi	-	2.560.745	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	591.667	-	392.388	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	30.743	-	-	
10	Perantara Keuangan	29.435.517	-	-	2.418.089	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	2.658	2.689	6.286	-
	-	-	-	421	3.582	2.805	-
	-	-	-	334	17.989	24.746	-
	-	-	-	12.338	40.320	32.523	-
	-	-	-	6.693	1.552.782	4.062	-
	-	22.080.950	-	447.919	7.261.377	1.647.061	-
	-	7.123	-	130.302	2.896.820	151.252	-
	-	-	-	16.429	396.387	24.388	-
	-	-	-	7.280	4.405.329	5.275	-
	-	-	-	12.623	350.785	22.405	-

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	127.863	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	32.723	-	-	
20	Lainnya	9.522.768	-	-	-	
	Total	38.958.285	3.589.329	-	2.810.477	
31 Desember 2018						
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	8.337	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	1.176.626	-	26.157	1.855.367	148.604	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	14.126	220.821	21.927	-
	-	-	-	9.562	371.679	4.425	-
	-	650	-	8.258	1.425.128	127.230	-
	-	-	-	5.386	3.216	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	17.924	173.198	28.380	-
	195.535.211	-	1.633.153	4.068.588	1.011.659	3.177.870	-
	-	-	-	22.319	-	-	11.690.677
	195.535.211	23.265.349	1.633.153	4.809.317	21.989.128	5.429.239	11.690.677
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2.373	4.644	14.355	-
	-	-	-	1.420	1.538	2.650	-
	-	-	-	9.055	68.538	8.933	-
	-	-	-	17.123	93.632	32.161	-

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
5	Listrik, Gas dan Air	-	186.573	-	-	
6	Konstruksi	-	1.775.413	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	1.251.608	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	538.945	-	-	
10	Perantara Keuangan	43.581.917	54.707	-	2.326.516	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	581.210	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	7.796	81.213	1.204	-
	-	23.082.548	-	433.781	10.386.550	1.175.779	-
	-	-	-	152.595	2.414.204	144.807	-
	-	-	-	16.048	699.269	22.040	-
	-	-	-	9.379	687.628	9.061	-
	-	-	-	23.311	877.773	20.575	-
	-	2.143.641	-	29.445	2.276.819	17.691	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	17.730	282.937	12.496	-
	-	-	-	12.496	383.508	17.646	-
	-	-	-	46.117	337.748	139.789	-
	-	-	-	4.037	7.120	-	-

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	32.721	-	-	
20	Lainnya	4.854.977	-	-	-	
	Total	48.436.894	4.429.514	-	2.326.516	

TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
1	Tagihan	158.074.117	64.674.544	38.606.653	40.451.343	301.806.657
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	7.000.721	2.476.519	575.704	1.748.126	11.801.070
	a. Belum jatuh tempo	6.217.850	2.080.736	300.763	694.937	9.294.286
	b. Telah jatuh tempo	782.871	395.783	274.941	1.053.189	2.506.784
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	1.593.542	711.297	347.167	1.330.368	3.982.374
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	780.133	624.529	336.400	422.010	2.163.072
5	Tagihan yang dihapusbuku	127.472	215.272	174.743	184.623	702.110



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	22.730	475.526	33.649	-
	180.483.199	-	1.544.949	4.268.710	2.798.546	2.291.468	-
	-	-	-	12.326	-	-	10.973.370
	180.483.199	25.226.189	1.544.949	5.086.472	21.877.193	3.944.304	10.973.370



No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
1	Tagihan	158.310.825	62.004.555	35.538.043	38.344.849	294.198.272
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	2.820.702	912.494	312.185	924.055	4.969.436
	a. Belum jatuh tempo	2.669.054	808.535	227.556	858.123	4.563.268
	b. Telah jatuh tempo	151.648	103.959	84.629	65.932	406.168
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	584.175	268.557	117.900	374.875	1.345.507
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	721.854	420.703	344.860	487.369	1.974.786
5	Tagihan yang dihapusbuku	230.846	199.721	176.736	179.898	787.201



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2019							
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	16.417	-	1.111	1.111	3.732	9.404
2	Perikanan	8.806	-	-	-	2.000	-
3	Pertambangan dan Penggalian	54.306	10.947	5.959	6.855	4.383	3.161
4	Industri Pengolahan	294.456	765	43.300	31.202	12.125	24.773
5	Listrik, Gas dan Air	1.652.650	2.900	6.281	9.292	894	-
6	Konstruksi	35.277.545	7.392.607	1.386.853	2.730.464	800.810	332.267
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.377.730	82.985	186.191	163.681	81.881	214.124
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	727.889	509.849	32.240	177.055	2.807	31.590
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.486.130	16.482	29.198	34.736	4.191	269
10	Perantara Keuangan	32.281.561	-	27.607	24.406	43.327	2.356
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.726.329	1.170.185	332.969	319.194	30.214	11.855
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	273.056	10.621	4.004	6.706	9.754	1.535



**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	412.765	35.400	2.004	15.979	11.464	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	1.669.350	-	22.460	9.400	100.101	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	14.423	5.020	-	5.821	1	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	227.229	-	120	120	8.139	-
19	Bukan Lapangan Usaha	206.940.840	56.525	426.487	446.352	1.047.249	70.776
20	Lainnya	9.365.175	-	-	-	-	-
Total		301.806.657	9.294.286	2.506.784	3.982.374	2.163.072	702.110

31 Desember 2018

1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	32.443	-	9.377	5.098	6.051	28.036
2	Perikanan	7.218	-	-	-	1.616	-
3	Pertambangan dan Penggalian	93.175	9.402	-	1.418	5.243	11.019
4	Industri Pengolahan	193.356	4.577	24.720	26.032	17.654	2.205
5	Listrik, Gas dan Air	279.069	2.900	-	2.212	96	-
6	Konstruksi	34.557.960	3.267.293	268.419	949.160	732.745	328.596
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.165.798	112.606	26.504	104.474	110.171	196.252



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

**TABEL PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	797.715	437.799	31.793	54.527	6.067	72.058
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.274.581	25.013	270	21.737	8.646	15.915
10	Perantara Keuangan	46.924.317	10.802	4.111	12.980	47.258	10.518
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.132.235	590.970	15.735	79.007	19.628	18.946
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	322.062	4.712	1.535	3.354	5.775	17
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	433.539	35.900	-	12.282	8.288	31.449
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	570.212	-	-	-	88.583	7
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	12.826	5.380	-	1.670	1	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	540.872	-	-	-	10.878	-
19	Bukan Lapangan Usaha	192.375.750	55.913	23.704	71.556	906.086	72.183
20	Lainnya	6.485.144	1	-	-	-	-
	Total	294.198.272	4.563.268	406.168	1.345.507	1.974.786	787.201



**TABEL PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Keterangan	31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	1.347.507	1.972.786
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	3.032.089	495.174
	• Pembentukan CKPN pada periode berjalan	3.032.089	495.174
	• Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(397.222)	(304.888)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	3.982.374	2.163.072

No	Keterangan	31 Desember 2018	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	347.902	2.024.974
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	1.244.838	489.781
	• Pembentukan CKPN pada periode berjalan	1.244.838	489.781
	• Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-247.233	-539.969
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	1.345.507	1.974.786

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

halaman ini sengaja dikosongkan



**TABEL TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019**

31 Desember 2019

No	Kategori	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA	[Idr]A+ s.d [Idr] A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		80.157	-	-	8.744.289	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		209.438	-	54.675	212.568	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		717.525	66.319	52.512	116.008	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	30.133.839	38.958.285
	-	-	-	-	-	-	-	3.112.648	3.589.329
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.858.113	2.810.477
	-	-	-	-	-	-	-	195.535.211	195.535.211
	-	-	-	-	-	-	-	23.265.349	23.265.349
	-	-	-	-	-	-	-	1.633.153	1.633.153
	-	-	-	-	-	-	-	4.809.317	4.809.317
	-	-	-	-	-	-	-	21.989.128	21.989.128
	-	-	-	-	-	-	-	5.429.239	5.429.239
	-	-	-	-	-	-	-	11.690.677	11.690.677



31 Desember 2018							
No	Kategori	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	42.419.586	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		282.634	-	4.884	101.709	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		1.212.506	-	51.057	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	6.017.308	48.436.894
	-	-	-	-	-	-	-	4.040.287	4.429.514
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.062.953	2.326.516
	-	-	-	-	-	-	-	180.483.199	180.483.199
	-	-	-	-	-	-	-	25.226.189	25.226.189
	-	-	-	-	-	-	-	1.544.949	1.544.949
	-	-	-	-	-	-	-	5.086.472	5.086.472
	-	-	-	-	-	-	-	21.877.193	21.877.193
	-	-	-	-	-	-	-	3.944.304	3.944.304
	-	-	-	-	-	-	-	10.973.370	10.973.370



Sedangkan untuk Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Transaksi Derivatif *Over the Counter*

Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per

2. Transaksi Repo

Uraian terkait Transaksi Repo dijabarkan dalam tabel berikut:

**TABEL TRANSAKSI REPO PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.947.820	(946.852)	2.000.968	1.000.484
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		2.947.820	(946.852)	2.000.968	1.000.484

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1.059.534	947.579	111.955	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank				
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		1.059.534	947.579	111.955	-

3. Transaksi Reverse Repo

Perseroan tidak memiliki transaksi Reverse Repo per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre-screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisa dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara legal. Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit. Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut:



TABEL TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	Per 31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	36.957.317	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	378.916	131.664	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.258.749	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	120.004.447	33.535.873	41.994.891	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	165.018	221.980	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.504.883	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	664.590	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.369.168	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	41.375.302	123.281.430	33.535.873	41.994.891	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3.078.594	-	-	-	-	1.565.630	143.412
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	551.728	-	-	-	-	727.614	66.649
	-	-	-	-	-	-	47.083.070	4.312.809
	-	-	-	23.237.603	-	-	23.237.601	2.128.564
	-	1.633.153	-	-	-	-	816.577	74.798
	-	-	4.398.577	-	-	-	3.343.329	306.249
	-	-	-	17.302.393	-	-	17.302.393	1.584.899
	-	-	-	2.343.688	2.420.961	-	6.108.047	559.497
	-	-	-	10.243.918	77.591	-	10.360.304	949.004
	-	5.263.475	4.398.577	53.127.602	2.498.552	-	110.544.565	10.125.881
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	156	-	-	-	-	78	7
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	27.746	-	-	27.746	2.542
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	23.742	-	-	-	17.806	1.631
	-	-	-	2.181.852	-	-	2.181.852	199.858



TABEL TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019 (RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	Per 31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.000.968	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Total Counterparty Credit Risk	2.000.968	-	-	-	-	

No	Kategori Portofolio	Per 31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	48.324.939	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	32.680	282.634	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.239.641	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	105.241.996	37.676.914	37.564.289	-	



No	Kategori Portofolio	Per 31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	334.967	150.199	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.335.427	3.194	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	372.405	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.243.616	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	52.271.629	108.290.069	37.676.914	37.564.289	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	111.955	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Total Counterparty Credit Risk	111.955	-	-	-	-	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	25.190.990	-	-	25.190.990	2.307.495
	-	1.544.949	-	-	-	-	772.474	70.759
	-	-	4.579.978	-	-	-	3.465.024	317.396
	-	-	-	15.739.311	-	-	15.739.950	1.441.779
	-	-	-	1.865.224	1.706.675	-	4.499.718	412.174
	-	-	-	9.652.163	77.591	-	9.768.548	894.799
	-	5.745.888	4.579.978	52.447.688	1.784.266	-	105.656.758	9.678.159
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	137	-	-	-	-	68	6
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	35.199	-	-	35.199	3.224
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	21.329	-	-	-	15.997	1.465
	-	-	-	3.799.261	-	-	3.799.261	348.012
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	137	21.329	3.834.460	-	-	3.850.525	352.707
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**TABEL TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIS MITIGASI RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	35%	Asuransi Kredit	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	36.957.317	-	-	-	-	36.957.317
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.589.174	378.915	-	-	-	3.210.259
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.810.477	-	-	-	-	2.810.477
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	195.535.211	-	-	103.829.588	-	91.705.623
6	Kredit Beragun Properti Komersial	23.237.603	-	-	-	-	23.237.603
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.633.153	-	-	-	-	1.633.153
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.785.575	165.018	-	221.980	-	4.398.577
9	Tagihan Kepada Korporasi	19.807.276	2.504.883	-	-	-	17.302.393
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5.429.239	-	-	664.590	-	4.764.649
11	Aset Lainnya	11.690.677	-	-	-	-	11.690.677
	Total Eksposur Neraca	305.475.702	3.048.816	-	104.716.158	-	197.710.728
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	156	-	-	-	-	156
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

TABEL TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIS MITIGASI RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	35%	Asuransi Kredit	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	27.746	-	-	-	-	27.746
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	23.742	-	-	-	-	23.742
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.181.852	-	-	-	-	2.181.852
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		2.233.496	-	-	-	-	2.233.496
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.000.968	-	-	-	-	2.000.968
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Counterparty Credit Risk		2.000.968	-	-	-	-	2.000.968



No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	35%	Asuransi Kredit	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	48.324.939	-	-	-	-	48.324.939
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4.429.378	32.680	-	-	-	4.396.698
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.326.516	-	-	-	-	2.326.516
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	180.483.199	-	-	88.636.110	-	91.847.089
6	Kredit Beragun Properti Komersial	25.190.990	-	-	-	-	25.190.990
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.544.949	-	-	-	-	1.544.949
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.065.144	334.966	-	150.200	-	4.579.978
9	Tagihan Kepada Korporasi	18.077.932	2.335.428	-	3.193	-	15.739.311
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.944.304	-	-	372.405	-	3.571.899
11	Aset Lainnya	10.973.370	-	-	-	-	10.973.370
	Total Eksposur Neraca	300.360.721	2.703.074	-	89.161.908	-	208.495.739
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	137	-	-	-	-	137
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	35%	Asuransi Kredit	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	35.199	-	-	-	-	35.199
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	21.329	-	-	-	-	21.329
9	Tagihan Kepada Korporasi	3.799.261	-	-	-	-	3.799.261
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		3.855.926	-	-	-	-	3.855.926
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	111.955	-	-	-	-	111.955
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Counterparty Credit Risk		111.955	-	-	-	-	111.955



RISIKO KREDIT: SEKURITISASI ASET

Tujuan Perseroan melakukan sekuritisasi adalah mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/securities yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* – ABS atau Efek Beragun Aset – EBA). Sekuritisasi Aset KPR dilakukan Perseroan antara lain sebagai upaya untuk mitigasi maturity mismatch, alternative sumber pendanaan KPR, dan peningkatan *lending capacity*. Fungsi yang dijalankan oleh Perseroan dalam transaksi sekuritisasi meliputi Originator, Servicer, dan Investor.

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah (“kumpulan tagihan”), Perseroan telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi KPR (efek beragun aset), Perseroan mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Perseroan telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Perseroan menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan tersebut.

Uraian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

**TABEL SEKURITISASI ASET, PERINGKAT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT
(RP-JUTA)**

No	Tahun Sekuritisasi	Seri Surat Berharga	Nilai Sekuritisasi	Senior Class	Junior Class	Peringkat - Senior Class	Lembaga Pemeringkat
1	2019	SP BTN 05	2.000.000	17.160.000 24.000 (M Class)	260.000	idAAA id A M (Class)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
2	2018	SP BTN 04	2.000.000	1.824.000	176.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
3	2017	SP BTN 03	1.000.000	913.000	87.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
4	2016	SP BTN 02	1.000.000	913.000	87.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
5	2015	SP BTN 01	200.000	181.600	18.400	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
6	2014	KIK DBTN 05	1.500.000	1.371.000	129.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
7	2013	KIK DBTN 04	1.000.000	928.000	72.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
8	2012	KIK DBTN 03	1.000.000	925.000	75.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
9	2011	KIK DBTN 02	703.450	645.000	58.450	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
10	2010	KIK DBTN 01	750.000	688.500	61.500	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

TABEL SEKURITISASI ASET, PERINGKAT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT
(RP-JUTA)

No	Tahun Sekuritisasi	Seri Surat Berharga	Nilai Sekuritisasi	Senior Class	Junior Class	Peringkat - Senior Class	Lembaga Pemeringkat
11	2009	KIK DSMF II	391.305	360.000	31.305	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
12	2009	KIK DSMF I	111.111	100.000	11.111	AAA	PT Moody's Indonesia
			11.655.866				

Uraian Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi – Perseroan bertindak sebagai kreditur asal dijabarkan sebagai berikut:

TABEL TRANSAKSI SEKURITISASI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)

31 Desember 2019							
No	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Tagihan Beragun Rumah Tinggal	11.655.866	-	-	-	307.096	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
a.	Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-
b.	Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	11.655.866	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian	-	-	-	-	-	-

**TABEL TRANSAKSI SEKURITISASI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)**

31 Desember 2019							
No	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. <i>Senior tranche</i>						
	• Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. <i>Junior tranche</i>						
	• Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
31 Desember 2018							
No	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Tagihan Beragun Rumah Tinggal	9.655.866	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
	• Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-
	• Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	9.655.866	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian	-	-	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

31 Desember 2018						
No	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo		
6	Bank bertindak sebagai Pemodal					
	a. Senior tranche					
	• Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
	b. Junior tranche					
	• Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	595.415

TABEL RINGKASAN AKTIVITAS SEKURITISASI - PERSEROAN BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR ASAL
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

No	Underlying Asset	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.655.866	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	9.655.866	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
	Total	11.655.866	-	9.655.866	-



Uraian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

Eksposur Aset di Neraca

**TABEL EKSPOSUR ASET DI NERACA
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	36.957.317	-	-	48.324.939	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.589.174	1.755.087	1.565.630	4.429.378	2.129.899	2.113.559
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.810.477	727.614	727.614	2.326.516	491.366	491.366
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	195.535.211	59.812.420	47.083.070	180.483.199	54.955.803	43.615.129
6	Kredit Beragun Properti Komersial	23.237.603	23.237.603	23.237.601	25.190.990	25.190.990	25.190.990
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.633.153	816.577	816.577	1.544.949	772.474	772.474
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.785.575	3.589.182	3.343.329	5.065.144	3.798.858	3.465.024
9	Tagihan Kepada Korporasi	19.807.276	19.807.276	17.302.393	18.077.932	18.077.932	15.739.950
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5.429.239	6.642.657	6.108.047	3.944.304	4.800.402	4.499.718
11	Aset Lainnya	11.690.677	10.360.304	10.360.304	10.973.370	9.768.548	9.768.548
Total		305.475.702	126.748.719	110.544.565	300.360.721	119.986.271	105.656.758

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

**TABEL EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	156	78	78	137	68	68



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

TABEL EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF
(RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	27.746	27.746	27.746	35.199	35.199	35.199
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	23.742	17.806	17.806	21.329	15.997	15.997
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.181.852	2.181.852	2.181.852	3.799.261	3.799.261	3.799.261
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		2.233.496	2.227.483	2.227.483	3.855.926	3.850.525	3.850.525

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

TABEL EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN
(COUNTERPARTY CREDIT RISK)
(RP-JUTA)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.000.968	-	-	111.955	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-



**TABEL EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN
(COUNTERPARTY CREDIT RISK)
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		2.000.968	-	-	111.955	-	-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*) Perseroan tidak memiliki risiko kredit akibat kegagalan setelmen per 31 Desember 2019 dan 2018.

**TABEL EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK)
(RP-JUTA)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non-Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

Eksposur Sekuritisasi

TABEL EKSPOSUR SEKURITISASI
(RP-JUTA)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	307.096	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		-	307.096	-	-

Total Pengukuran Risiko Kredit

TABEL PENGUKURAN RISIKO KREDIT
(RP-JUTA)

No		31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Total ATMR Risiko Kredit	113.079.144	109.507.283
2.	Total Faktor Pengurang Modal	-	467.227

**RISIKO PASAR**

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan stress testing untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi spot. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat derivative. Dalam perhitungan KPM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut:

TABEL RISIKO PASAR MENGGUNAKAN METODE STANDAR
(RP-JUTA)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Bank		Bank	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	30.070	375.874	33.503	418.790
	a. Risiko Spesifik			-	-
	b. Risiko Umum	30.070	375.874	33.503	418.790
2	Risiko Nilai Tukar	34.072	425.900	47.077	588.459
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
Total		64.142	801.774	80.580	1.007.249

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat

disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko

Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Uraian terkait Risiko Operasional dijabarkan sebagai berikut:

**TABEL RISIKO OPERASIONAL
(RP-JUTA)**

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	11.180.456	1.677.068	20.963.355	11.180.456	1.677.068	17.623.217

Uraian Profil Maturitas Rupiah dan Valas dijabarkan sebagai berikut:

TABEL PROFIL MATURITAS RUPIAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

No	Pos - pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
I	Neraca						
	A. Aset						
1.	Kas	1.363.762	1.363.762	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21.520.714	21.168.914	236.800	-	115.000	-
3.	Penempatan pada bank lain	800.100	579.150	76.984	-	143.966	-



TABEL PROFIL MATURITAS RUPIAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

No	Pos - pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
4.	Surat Berharga	16.462.233	13.258.911	279.106	248.779	1.534.185	1.141.252
5.	Kredit yang diberikan	255.825.159	4.895.096	3.097.664	2.181.395	6.088.075	239.562.929
6.	Tagihan lainnya	2.362.543	2.362.543	-	-	-	-
7.	Lain-lain	5.695.286	5.695.286	-	-	-	-
Total Aset		304.029.797	49.323.662	3.690.554	2.430.174	7.881.226	240.704.181
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	201.519.876	159.879.613	25.087.533	2.133.063	10.965.305	3.454.362
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	4.509.238	4.503.938	5.300	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	19.783.552	-	-	2.134.416	3.184.556	14.464.580
5.	Pinjaman yang Diterima	12.797.246	-	-	5.000.000	1.797.577	5.999.669
6.	Kewajiban lainnya	1.422.052	142.780	65.159	161.253	1.052.860	-
7.	Lain-lain	42.505.569	42.505.569	-	-	-	-
Total Kewajiban		282.537.533	207.031.900	25.157.992	9.428.732	17.000.298	23.918.611
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		21.492.264	(157.708.238)	(21.467.438)	(6.998.558)	(9.119.072)	216.785.570
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	-	-	-	-	-	-
2.	Kontinjensi	10.844.287	10.844.287	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		10.844.287	10.844.287	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

TABEL PROFIL MATURITAS RUPIAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

No	Pos - pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	1. Komitmen	15.948.221	15.948.221	-	-	-	-
	2. Kontinjensi	1.969.793	1.969.793	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	17.918.014	17.918.014	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(7.073.727)	(7.073.727)	-	-	-	-
	Selisih [(IIA-IB)+(IIA-IIB)]	14.418.537	(164.781.965)	(21.467.438)	(6.998.558)	(9.119.072)	216.785.570
	Selisih Kumulatif	14.418.537	(164.781.965)	(21.467.438)	(6.998.558)	(9.119.072)	216.785.570

No	Pos - pos	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
I	Neraca						
	A. Aset						
	1. Kas	1.240.510	1.240.510	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	38.951.379	38.851.379	25.000	-	-	75.000
	3. Penempatan pada bank lain	258.234	258.234	-	-	-	-
	4. Surat Berharga	12.402.226	9.218.508	559	35.594	856.962	2.290.603
	5. Kredit yang diberikan	237.757.674	5.969.746	2.246.973	3.142.422	6.521.652	219.876.881
	6. Tagihan lainnya	528.418	270	362.388	165.760	-	-
	7. Lain-lain	10.716.645	10.716.645	-	-	-	-
	Total Aset	301.855.086	66.255.292	2.634.920	3.343.776	7.378.614	222.242.484



No	Pos - pos	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	226.861.029	175.382.370	35.325.012	5.087.263	1.412.801	9.653.583
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	3.514.194	3.514.194	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	20.140.377	-	2.221.227	4.227.380	13.691.770	-
5.	Pinjaman yang Diterima	18.499.012	-	-	7.799.922	3.312.372	7.386.718
6.	Kewajiban lainnya	1.463.148	-	-	528.148	-	935.000
7.	Lain-lain	9.087.156	9.087.156	-	-	-	-
Total Kewajiban		279.564.916	187.983.720	37.546.239	17.642.713	18.416.943	17.975.301
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	22.290.170	(121.728.428)	(34.911.319)	(14.298.937)	(11.038.329)	204.267.183
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	57.687	57.687	-	-	-	-
2.	Kontinjensi	10.108.195	10.108.195	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		10.165.882	10.165.882	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1.	Komitmen	21.908.920	21.908.920	-	-	-	-
2.	Kontinjensi	3.712.682	3.712.682	-	-	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif		25.621.602	25.621.602	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

No	Pos - pos	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(15.455.720)	(15.455.720)	-	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	6.834.450	(137.184.148)	(34.911.319)	(14.298.937)	(11.038.329)	204.267.183
	Selisih Kumulatif	6.834.450	(137.184.148)	(34.911.319)	(14.298.937)	(11.038.329)	204.267.183

TABEL PROFIL MATURITAS VALAS PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)

No	Pos - pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
I	Neraca						
	A. Aset						
1.	Kas	5.405	5.405	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.987.730	4.987.730	-	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	588.517	588.517	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	2.165.379	1.490.180	267.897	-	-	407.302
5.	Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	7.747.031	7.071.832	267.897	-	-	407.302
	B. Kewajiban						
	Dana Pihak Ketiga	5.403.100	5.067.705	323.905	11.371	119	-
	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-

TABEL PROFIL MATURITAS VALAS PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019
(RP-JUTA)

No	Pos - pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	5.403.100	5.067.705	323.905	11.371	119	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	2.343.931	2.004.127	(56.008)	(11.371)	(119)	407.302
II Rekening Administratif							
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	Komitmen	-	-	-	-	-	-
	Kontinjensi	15.756	15.756	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	15.756	15.756	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	Komitmen	-	-	-	-	-	-
	Kontinjensi	39.890	39.890	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	39.890	39.890	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(24.134)	(24.134)	-	-	-	-
	Selisih [(IIA-IB)+(IIA-IIB)]	2.319.797	1.979.993	(56.008)	(11.371)	(119)	407.302
	Selisih Kumulatif	2.319.797	1.979.993	(56.008)	(11.371)	(119)	407.302



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

No	Pos - pos	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
I	Neraca						
	A. Aset						
1.	Kas	3.105	3.105	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.927.599	2.927.599	-	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	1.478.034	1.478.034	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	700.788	549.561	-	-	27.674	123.553
5.	Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	5.109.526	4.958.299	-	-	27.674	123.553
	B. Kewajiban						
1.	Dana Pihak Ketiga	3.030.830	2.643.307	375.896	-	11.627	-
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	3.030.830	2.643.307	375.896	-	11.627	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	2.078.696	2.314.992	(375.896)	-	16.047	123.553



No	Pos - pos	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			<= 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
II	Rekening Administratif						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontinjensi	130.569	130.569	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	130.569	130.569	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	Komitmen	-	-	-	-	-	-
	Kontinjensi	81.283	81.283	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	81.283	81.283	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	49.286	49.286	-	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	2.127.982	2.364.278	(375.896)	-	16.047	123.553
	Selisih Kumulatif	2.127.982	2.364.278	(375.896)	-	16.047	123.553

RISIKO HUKUM

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Enterprise Risk Management Division bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* dengan mengevaluasi efektivitas

implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerja sama dengan *counterparty*.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

MANAJEMEN RISIKO

RISIKO STRATEJIK

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah; atau
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank.



PENDUKUNG BISNIS

BTN memiliki komitmen yang tinggi untuk terus membudayakan integritas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM. BTN meyakini bahwa dengan integritas, organisasi Perseroan akan dapat mencapai visinya, dan menjadi pelaku usaha industri perbankan terkemuka di Indonesia.





HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN



Perseroan memandang *Human Capital* sebagai faktor terpenting dalam mencapai keunggulan bersaing sekaligus memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam kegiatan usaha Perseroan. Industri perbankan yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan pelayanan membutuhkan kompetensi, integritas dan profesionalisme di seluruh unsur usaha. Pengelolaan *Human Capital* yang baik menjadi fondasi dalam menggerakkan kinerja Perseroan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Karena itu, Perseroan secara serius menempatkan *Human Capital* sebagai mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan menjalankan strategi pengelolaan *Human Capital* dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk merespon tantangan dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan industri Perbankan yang dinamis, termasuk di dalamnya menjadi yang terdepan dalam *digital banking*. Selain itu, Perseroan juga senantiasa melakukan pengelolaan *Human Capital* sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah disusun mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Melalui Direktorat *Strategic Human Capital*, Perseroan menyelenggarakan organisasi yang efektif dan efisien dengan memperhatikan beberapa faktor mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, sistem manajemen kinerja, desain jabatan dan karir, remunerasi dan *benefit*, analisa produktivitas serta hal terkait lainnya dengan *Human Capital*. Direktorat tersebut dipimpin oleh Direktur *Strategic Human Capital* sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi No.04/DIR/KD/TMO/2018 tanggal 30 April 2018. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan *Human Capital*, Direktorat *Strategic Human Capital* menjalankan melalui tiga Divisi yaitu *Human Capital Management*, *Human Capital Strategy* dan *Learning Center Division*.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

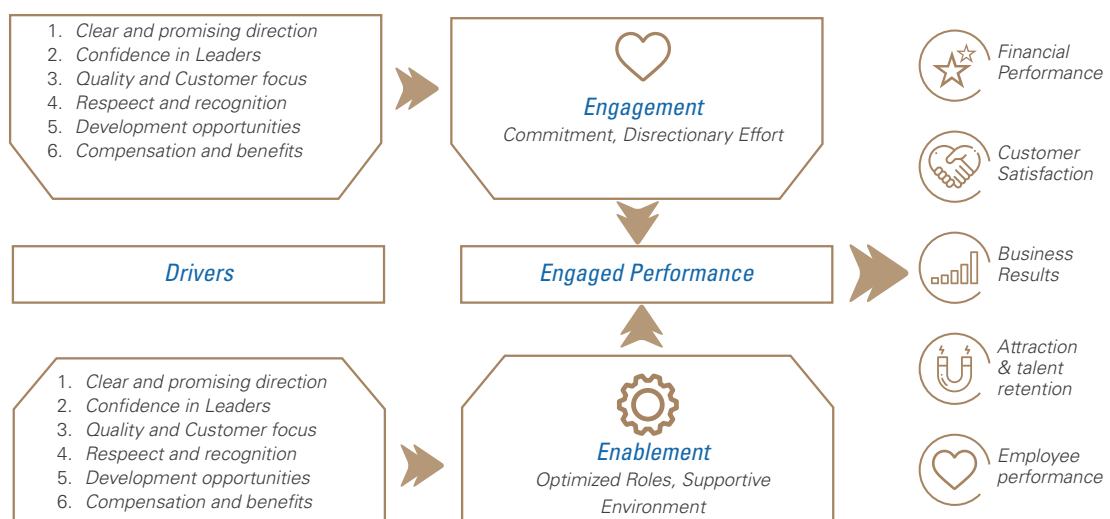


“Tentang profil dan demografi SDM Bank BTN dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.”

KEBIJAKAN DAN STRATEGI *HUMAN CAPITAL*

Di tahun 2019 Perseroan menjalankan kebijakan strategis dalam bidang Human Capital sebagai berikut:

1. Implementasi transformasi struktur organisasi.
2. Acceleration career path dan succession planning untuk membangun kompetensi pegawai yg selaras dengan industri 4.0.
3. Digital workforce planning.
4. Pengembangan performance management yang mendorong talent management system.
5. Menjalankan tata kelola sistem remunerasi sesuai best practice.
6. Memperkuat budaya perusahaan menuju era global playership.
7. Optimalisasi employee communication & social media network untuk meningkatkan EVP Bank.
8. Penyempurnaan tata kelola human capital dan alignment talent mobility dengan anak perusahaan & perusahaan terafiliasi.
9. Integrasi human capital information system untuk memperkuat people analytics.
10. Learning & Development yang fokus pada Pengembangan Integrated Talent Management System.



Disamping pelaksanaan kebijakan strategis, Perseroan juga menjalankan inisiatif dalam bidang *human capital* tahun 2019 yakni meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai. Adapun pencapaian dari inisiatif yang telah dijalankan yaitu:

1. Mengembangkan kompetensi pegawai di bidang bisnis.
2. Mengembangkan kompetensi pegawai di bidang *operation* dan *support*.
3. Implementasi TNA untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Mengembangkan leadership program untuk *top talent* (Star dan Potensial).
5. Implementasi pembelajaran via *Virtual Learning*.



MANPOWER PLANNING

Perseroan menerapkan rancangan organisasi serta jumlah pegawai yang efektif dan efisien agar selaras dengan strategi serta sasaran bisnis jangka pendek dan jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko melalui penyusunan *Manpower Planning* setiap tahun. *Manpower Planning* melibatkan seluruh unit kerja untuk mengidentifikasi jumlah dan kebutuhan rekrutmen pegawai, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kinerja sesuai dengan standar formasi dalam mendukung

pelaksanaan strategi bisnis Perseroan. Proses ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan pertumbuhan bisnis dan kondisi Perseroan.

Di tahun 2019, pelaksanaan *Manpower Planning* mampu memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja Perseroan dengan tingkat rekrutmen untuk pemenuhan pegawai mencapai 100% dari target rekrutmen sebesar 410 pegawai baru.

REKRUTMEN HUMAN CAPITAL

Perseroan melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan. Proses rekrutmen didasarkan pada kebutuhan usaha, kualitas dan kompetensi yang dimiliki kandidat. Karena itu, Perseroan menerapkan strategi dan sistem rekrutmen dengan memastikan mendapatkan talenta-talenta terbaik sebagai aset *human capital*, baik melalui jalur internal maupun eksternal.

Rekrutmen internal dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di suatu unit kerja melalui proses promosi maupun rotasi pegawai. Perseroan memberikan kesempatan kepada pegawai agar dapat bekerja di unit kerja lainnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengalaman maupun pengembangan karir sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Perseroan menjaring kandidat rekrutmen eksternal menggunakan beragam jalur perekrutan, seperti pengumuman iklan di berbagai media cetak maupun

elektronik (radio dan media sosial), kuliah/seminar umum, *job fair*, *talent scouting* atau *job searching* bekerja sama dengan beberapa universitas. Rekrutmen eksternal dilakukan dengan metode *direct hire* (rekrutmen dilakukan secara langsung oleh pihak Perseroan) dan alih daya (rekrutmen dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga). Metode alih daya digunakan untuk merekrut pegawai dengan jabatan non organik dengan sifat pekerjaan *non core*. Sistem rekrutmen berbasis *web (e-recruitment)* dan kerja sama dengan situs rekrutmen profesional terkait dengan program *employee branding* telah digunakan oleh Perseroan sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efisien.

Di tahun 2019, proses rekrutmen dikelola dengan baik dan menghasilkan SDM yang mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan. Dari sisi kuantitas, Perseroan telah menyelenggarakan proses rekrutmen pegawai baru sebanyak 410 orang pada tahun 2019.

KESETARAAN DAN KESEMPATAN KERJA

Perseroan berkomitmen membuka kesempatan kerja kepada para kandidat terbaik untuk bergabung dan membangun karir berdasarkan prinsip serta asas kesetaraan tanpa membedakan aspek gender, suku, ras dan agama sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik di internal maupun peraturan-peraturan eksternal. Setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk

berkontribusi dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan tanpa diskriminasi individu. Wujud atas penerapan asas-asas kesetaraan dilakukan sejak proses rekrutmen, seleksi dan penempatan kerja termasuk hal-hal yang terkait dengan pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, pelatihan dan lain-lain.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *HUMAN CAPITAL*

Perseroan meyakini bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian dan kesempatan yang tersedia. Oleh karena itu, Perseroan mengembangkan kapabilitas dan kompetensi *human capital* menggunakan pendekatan terintegrasi yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pegawai, organisasi dan sasaran bisnis. Pendidikan dan pelatihan pegawai juga diselaraskan dengan strategi dan kebijakan dalam bidang *human capital* secara efisien dan efektif, guna mendukung peningkatan kinerja *Human Capital*.

Perseroan memberikan tanggung jawab kepada *Learning Center Division* untuk mengembangkan kapabilitas dan kompetensi pegawai melalui program *Learning & Development*. Program *Learning & Development* berorientasi pada 3 (tiga) *School* yaitu:

1. *School of Leadership*
School yang fokus untuk pengembangan *leadership*, antara lain *Supervisor Development Program*, *Officer Development Program*, *Management Development Program*, *Senior Management Development Program*, *Vice President Development Program* dan *Executive Development Program*.
2. *School of Business Banking*
School yang fokus untuk pengembangan pelatihan mengenai produk dan layanan Perseroan yaitu Kredit Perumahan Rakyat, *funding*, *treasury*, *collection*, *sales and service* dan lainnya.
3. *School of Operational Banking*
School yang fokus untuk pengembangan pelatihan mengenai kegiatan operasional untuk mendukung unit bisnis, yaitu *Information Technology*, *Finance*, *Risk*, *Human Capital*, Legal dan lainnya.

Perseroan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai dengan mengacu pada kebijakan/manajemen dan hasil *Training Need Analysis* (TNA). Melalui kedua hal tersebut, Perseroan mengidentifikasi setiap pegawai yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Pasca pelatihan dilaksanakan evaluasi melalui *Form Evaluasi Pasca Training* untuk mengukur *Return of Training Investment* yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk jenjang karir dan tingkat kebutuhan *training* lanjutan pegawai. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan untuk peserta, namun demikian juga pada instruktur dan penyelenggaranya.

Di tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diikuti sebanyak 56.258. peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.632 peserta mengikuti *school of business*, 5.936 peserta mengikuti *school of leadership* dan 37.690 peserta mengikuti *school of operational banking*. Investasi atau biaya yang dikeluarkan Perseroan pada program pendidikan dan pelatihan pegawai sepanjang tahun 2019 mencapai Rp95,71 miliar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp138,27 miliar. Realisasi penggunaan biaya pendidikan tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018 karena Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yang menggabungkan online learning dan classroom sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan.



JENIS, TUJUAN, DAN PESERTA/LEVEL JABATAN PELATIHAN

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Level Jabatan	Jumlah Peserta	
			2019	2018
<i>Leadership</i>	Fokus untuk pengembangan leadership untuk menciptakan <i>talent</i> yang berkualitas	• Junior Staff • Staff • Senior Staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Sr. Vice President • Exec. Vice President • Director & Commissioner	5.936	4.893
<i>Business</i>	Fokus untuk mengembangkan kompetensi pegawai di bidang kredit/ pembiayaan yang berkualitas dan di bidang <i>service & sales</i>	• Junior Staff • Staff • Senior Staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Sr. Vice President • Exec. Vice President • Director & Commissioner	12.632	10.153
<i>Operational Banking</i>	Fokus untuk mengembangkan kompetensi pegawai bidang operation dan <i>support</i> untuk membangun budaya <i>supervisory</i>	• Junior Staff • Staff • Senior Staff • Assistant Manager • Manager • Senior Manager • Ass. Vice President • Vice President • Sr. Vice President • Exec. Vice President • Director & Commissioner	37.690	13.781

BEASISWA DALAM NEGERI

Universitas	Jumlah Penerima	Gelar Akademik
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari	1	Sarjana (S1)
STMIK Bina Sarana Global	1	Sarjana (S1)
Universitas Swadaya Gunung Jati	1	Sarjana (S1)
Binus University	1	Sarjana (S1)
STIE Atma Bhakti	1	Sarjana (S1)



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN**BEASISWA DALAM NEGERI**

Universitas	Jumlah Penerima	Gelar Akademik
STIE Indonesia	1	Sarjana (S1)
STIE Kusuma Negara	1	Sarjana (S1)
STIE Persada Bunda	1	Sarjana (S1)
STIE Urip Sumoharjo	1	Sarjana (S1)
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon	1	Sarjana (S1)
Universitas Balikpapan	2	Sarjana (S1)
Universitas Batam	2	Sarjana (S1)
Universitas Esa Unggul	1	Sarjana (S1)
Universitas Kuningan	2	Sarjana (S1)
Universitas Mercu Buana	1	Sarjana (S1)
Universitas Muhammadiyah Gresik	1	Sarjana (S1)
Universitas Muhammadiyah Mataram	1	Sarjana (S1)
Universitas Pasundan	1	Sarjana (S1)
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	3	Sarjana (S1)
Universitas Widyatama	2	Sarjana (S1)
Universitas Gadjah Mada	10	Magister (S2)
Institut Teknologi Bandung	10	Magister (S2)

BEASISWA LUAR NEGERI

Universitas	Jumlah Penerima	Gelar Akademik
Malaya University	1	Magister (S2)
Cardiff University	2	Magister (S2)
Monash University	2	Magister (S2)
Ihs. Erasmus Rotterdam	1	Magister (S2)
Birmingham University	1	Magister (S2)
Melbourne University	1	Magister (S2)
Salford University	1	Magister (S2)
Greenwich University	1	Magister (S2)



PENGELOLAAN KARIER

Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan jenjang karier yang jelas dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai. Untuk itu, Perseroan telah menerapkan sistem pengelolaan karir bagi pegawai sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pemangku jabatan yang cakap pada posisi-posisi kunci. Penerapan sistem ini telah diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 26/DIR/HCD/2014 tentang Perencanaan Karier Pegawai. Penerapan pengelolaan karier pegawai dilakukan untuk menempatkan pegawai terbaik pada jabatan yang kosong serta mengidentifikasi potensi dan memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kariernya.

Perseroan telah menerapkan pola karir untuk seluruh pegawai sebagai berikut:

1. *Fast Track*

Pola karier *Fast Track* adalah pergerakan karir yang sangat dipercepat, dimana pegawai dapat direkomendasikan untuk promosi setelah memiliki masa kerja 1 s.d. 2 tahun sejak menduduki *Personal Grade* terakhir. Adapun pegawai yang mendapatkan kesempatan melalui Jalur Karir ini adalah pegawai yang termasuk dalam kategori Star berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*.

2. *Middle Track*

Pola karir *Middle Track* adalah pergerakan karir yang dipercepat, dimana pegawai dapat direkomendasikan untuk promosi setelah memiliki masa kerja 2 s.d. 3 tahun sejak menduduki *Personal Grade* terakhir. Adapun pegawai yang mendapatkan kesempatan melalui Jalur Karir ini adalah pegawai yang termasuk dalam kategori *Potentials* berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*.

3. *Normal Track*

Pola karier Normal Track adalah pergerakan karier yang mengikuti aturan umum, dimana pegawai dapat direkomendasikan untuk promosi setelah memiliki masa kerja 3 s.d. 4 tahun sejak menduduki *Personal Grade* terakhir. Adapun pegawai yang mendapatkan kesempatan melalui Jalur Karier ini adalah pegawai yang termasuk dalam kategori *Average* dan *Need to Develop* pada Kelompok Talent 7 berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*.

4. *Slow Track*

Pola karir *Slow Track* adalah pergerakan karier dimana pegawai dapat direkomendasikan untuk promosi setelah memiliki masa kerja 4 s.d. 5 tahun sejak menduduki *Personal Grade* terakhir. Adapun pegawai yang mendapatkan kesempatan melalui Jalur Karier ini adalah pegawai yang termasuk dalam kategori *Need to Develop* pada Kelompok *Talent* 3 dan *Slow Starter* pada Kelompok Talent 4 berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*.

5. *Non Track*

Pegawai yang masuk ke dalam pola karier ini belum dapat direkomendasikan untuk promosi. Adapun pegawai yang masuk ke dalam kategori *Non-Track* adalah pegawai yang termasuk ke dalam kategori *Slow Starter* pada Kelompok *Talent* 2 dan Unfit berdasarkan hasil Pemetaan *Talent*.

Pola karier tersebut dilakukan melalui beberapa jalur dengan mempertimbangkan aspek-aspek di antaranya kebutuhan dan perkembangan organisasi serta penilaian sistem manajemen kinerja dalam tiga tahun terakhir. Jalur karir pegawai tersebut antara lain:

1. Promosi

Jalur karir menuju golongan jabatan yang lebih tinggi dan diatur dengan mekanisme promosi. Pegawai yang berhak menjadi kandidat untuk dipromosikan adalah mereka yang termasuk dalam pola karir *fast track*, *middle track*, *normal track* dan *slow starter* sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pola karier pegawai.

2. Rotasi

Jalur karier ke golongan jabatan yang sama dan diatur dalam mekanisme rotasi. Rotasi dilakukan apabila terdapat jabatan lowong akibat dilakukan perputaran atau promosi dari jabatan setara atau pemangku jabatan berhalangan tetap.

3. Jalur Karier ke Jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah

Jalur karier ke golongan jabatan yang lebih rendah terjadi karena permintaan pegawai sendiri dengan beberapa alasan yaitu ingin meniti karir pada bidang



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN

pekerjaan atau keluarga jabatan yang berbeda, namun harus memulai dari golongan jabatan yang lebih rendah; ingin berpindah ke lokasi kerja yang berbeda dimana posisi yang tersedia atau terpenuhi persyaratan jabatannya merupakan jabatan dengan golongan jabatan yang lebih rendah daripada jabatannya saat ini. Selain itu, pergerakan ke jabatan dengan golongan jabatan yang lebih rendah juga bisa disebabkan karena sanksi sebagaimana diatur dalam mekanisme Demosi pada Kebijakan mengenai Peraturan dan Sanksi Disiplin.

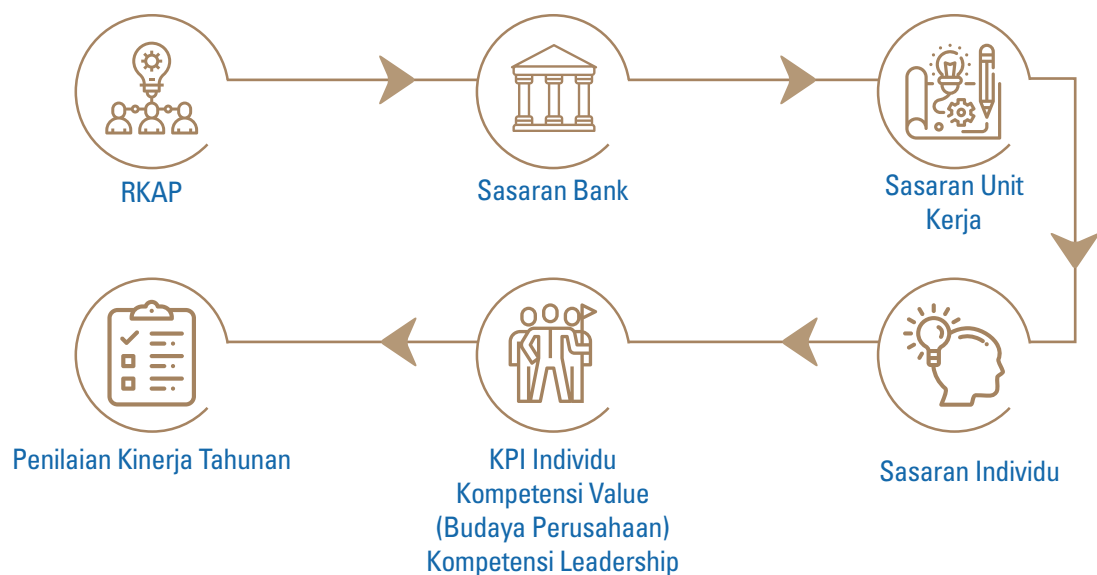
Penentuan karier pegawai dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan non diskriminatif. Perseroan telah menerapkan praktik pengelolaan karir tersebut berdasarkan mekanisme yang telah diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di tahun 2018, program promosi telah dilakukan pada 1.081 pegawai dan rotasi telah dilakukan pada 6.555 pegawai. Di tahun 2019, program promosi telah dilakukan pada 1.003 pegawai dan rotasi telah dilakukan pada 17,656 pegawai

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Perseroan mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang dapat mendorong peningkatan produktivitas pegawai serta memotivasi pegawai untuk menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas pegawai dan menggerakkan iklim pekerjaan yang terbuka, positif dan progresif. Dalam setiap tahunnya, Perseroan

menyusun dan menetapkan target yang didistribusikan kepada seluruh Unit Kerja untuk selanjutnya diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai. Setiap pegawai memiliki KPI Individu sebagai sasaran kerja yang diturunkan dari KPI Unit Kerja.

SKEMA PROSES PENETAPAN KPI INDIVIDU



Pada akhir alur sistem manajemen kinerja, Perseroan melakukan penilaian kinerja pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Kinerja

individu direncanakan, ditetapkan, di-review dan dinilai menggunakan Formulir Manajemen Kinerja yang mencakup 3 sasaran penilaian kinerja yang meliputi Sasaran Kerja



Individu pada tahun penilaian kinerja berjalan, Kompetensi *Value* (Budaya Perusahaan) yang mencakup implementasi perilaku Budaya Perusahaan dan Kompetensi *Leadership* yang dipersyaratkan pada jabatan individu yang dinilai dan ditunjukkan.

Selain itu, Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga diimplementasikan dengan Metode 4DX (*Four Disciplines of Execution*) sebagai dasar penetapan sasaran/perencanaan kinerja dan pelaksanaan *monitoringnya*. Pada metode ini, KPI Perseroan ditetapkan sebagai sasaran

terpenting dan menjadi komponen sistem manajemen kinerja individu, sedangkan KPI Unit Kerja ditetapkan sebagai Lag KPI yang menjadi tanggung jawab jabatan dan mendorong pencapaian KPI Korporat. Selanjutnya, KPI Individu ditetapkan sebagai *Lead* KPI yaitu aktifitas yang merupakan *Lead Measures* untuk mendorong pencapaian KPI Unit Kerja. Selanjutnya untuk pelaksanaan *monitoring*, Perseroan menggunakan *Scoreboard* dan pelaksanaan *Wig Session* secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta pelaksanaan *coaching & mentoring* untuk memastikan pencapaian sasaran setiap individu.

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Perseroan menerapkan penghargaan dan Hukuman sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada pegawai untuk terus berkembang dan menciptakan berbagai inovasi melalui pemberian beberapa jenis penghargaan antara lain:

1. Penghargaan atas Prestasi Kerja yang luar biasa
Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang menunjukkan hasil pemikiran dan karya cipta yang dapat menguntungkan Perseroan. Piagam Penghargaan Karya Utama diberikan dalam bentuk pemberian uang karya utama sebesar 3 kali gaji dasar pegawai yang bersangkutan dan cuti ekstra 5 hari kerja.
2. Penghargaan Masa Kerja
Pegawai dengan masa kerja 15, 20, 25, 30 dan 35 tahun berhak mendapatkan penghargaan karya Satya Bhakti berupa piagam penghargaan dan, uang Karya Satya Bhakti dengan jumlah yang proporsional berdasarkan masa kerja dan cuti ekstra 5 hari kerja.
3. Penghargaan Setelah Masa Kerja
Penghargaan ini terdiri dari tiga jenis yaitu penghargaan Karya Purna Bakti, penghargaan Karya Satya Abdi dan penghargaan akhir masa bakti. Pegawai yang pensiun mendapatkan penghargaan Karya Purna Bakti. Sementara itu, pegawai yang meninggal dunia ketika melaksanakan tugas demi menjaga nama baik, keamanan, keutuhan harta serta kepentingan Perseroan mendapatkan penghargaan Karya Satya Abdi berupa piagam yang diberikan kepada ahli waris dan bantuan uang duka. Penghargaan akhir masa bakti

diberikan kepada pegawai tetap yang diberhentikan dengan hormat dan meninggal dunia sebelum pensiun.

4. Penghargaan Khusus
Penghargaan ini diberikan oleh Direksi secara khusus kepada mantan pegawai Perseroan atau instansi TNI/POLRI di tingkat Pusat dan Daerah, lembaga internasional serta swasta yang dianggap telah berjasa atau mempunyai andil besar atau bekerja sama dengan baik kepada Perseroan.
5. Penghargaan dengan Penugasan ke Luar Negeri
Penghargaan ini diberikan kepada Divisi/*Desk*/ Kantor Wilayah/Kantor Cabang yang mencapai target tertentu.

Perseroan memberikan penghargaan kepada pegawai, baik bersifat finansial maupun non finansial disesuaikan dengan kemampuan Perseroan dan implementasinya mengacu pada Surat Edaran Direksi SE No. 44/DIR/HCOD/2018. Setiap tahun *financial reward* dievaluasi dan diperbaiki untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan.

Di sisi lain, Perseroan juga memberikan hukuman kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atas kode etik maupun ketentuan terkait lainnya. hukuman diterapkan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan budaya Perseroan. Beberapa jenis sanksi yang diberikan antara lain sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN

SANKSI KATEGORI RINGAN

1. Teguran Lisan (TL)
2. Teguran Tertulis (TT)
3. Pernyataan Tidak Puas (PTP)

SANKSI KATEGORI SEDANG

1. Tidak mendapatkan uang cuti (TMUC)
2. Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala (TMPGB)
3. Penurunan *grade* sebanyak 1 *grade* (gaji dasar menyesuaikan) (PG1)

SANKSI KATEGORI BERAT

1. Penurunan grade sebanyak minimal 2 grade (gaji dasar menyesuaikan) (PG2)
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
3. Pemutusan Hubungan Kerja dan Dilaporkan kepada Pihak yang berwajib (PHKPYB)

KESEJAHTERAAN PEGAWAI: REMUNERASI

Perseroan menerapkan sistem remunerasi guna memotivasi dan mempertahankan pegawai-pegawai terbaik serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan *Human Capital* yang berkualitas. Untuk mendukung strategi Perseroan dan mendorong kinerja yang optimal dan berkesinambungan. Perseroan menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko yang mengacu pada kinerja karyawan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik

dalam bidang ketenagakerjaan maupun otoritas terkait dalam industri perbankan.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, berbasis risiko serta senantiasa memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima remunerasi di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

PROGRAM PENSIUN

Perseroan memberikan perhatian atas kesejahteraan pegawai menjelang pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Program tersebut diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. MPP diselenggarakan selama 12 bulan sebagai kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan sehingga diharapkan dapat mendukung keberlangsungan hidup selepas pensiun. Pada tahun 2019, sebanyak 92 pegawai tetap mengikuti program pelatihan dalam MPP, yaitu:

Batch	Tanggal	Peserta (pegawai)
1	11-15 Februari 2019	24
2	08-12 April 2019	15
3	08-12 Juli 2019	26
4	04-08 November 2019	27
Jumlah		92

Pelaksanaan program pensiun merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai tetap atas kontribusinya di Perseroan. Pegawai tetap yang telah mencapai usia pensiun normal yaitu 56 tahun dan pegawai tetap dengan status teller staff, *customer service staff* dan sekretaris yang berusia 36 tahun berhak mendapatkan manfaat pensiun. Perseroan menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terdiri dari Program Manfaat Pasti dan Program luran Pasti sebagai hak pegawai tetap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun. Pada program Manfaat Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun sedangkan pada Program luran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan, 7,5% dari Perseroan dan hasil pengembangannya. Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Dapen BTN).



HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan industrial sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara pegawai dan Perseroan. Hubungan yang harmonis dibutuhkan untuk memastikan terwujudnya produktivitas pegawai dan terpenuhinya perlindungan terhadap kepentingan, hak serta kewajiban semua pihak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan industrial, Perseroan menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra strategis dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi secara berkala dan berkesinambungan. Kondisi ini mendorong Perseroan untuk melakukan pengelolaan hubungan industrial karena pekerja yang produktif akan berkontribusi besar terhadap kinerja Perseroan.

Faktor kunci terwujudnya hubungan industrial yang harmonis adalah komunikasi yang baik antara Manajemen dan pegawai. Oleh karena itu, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja sama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Perseroan yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank

BTN (SP-BTN). Perseroan dengan SP-BTN telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Perseroan bersama Serikat Pekerja secara berkala melakukan pertemuan baik formal maupun informal untuk membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban pegawai maupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran. Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk membangun dan menjaga komunikasi yang berkesinambungan. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja di lingkungan Perseroan yang bernama Serikat Pekerja Bank BTN.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan bersama Serikat Pekerja telah melaksanakan pertemuan formal sebanyak 2 (dua) kali melalui kegiatan Pembahasan awal PKB antara Perseroan dengan Serikat Pekerja (SP) BTN yang akan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja tanggal 2 April 2019 dan Silaturahmi antara Perseroan dengan SP tanggal 15 Mei 2019. Melalui serangkaian pertemuan tersebut, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat terbangun lingkungan kerja aman dan nyaman mendukung kelancaran kegiatan operasional sehingga semakin produktif.

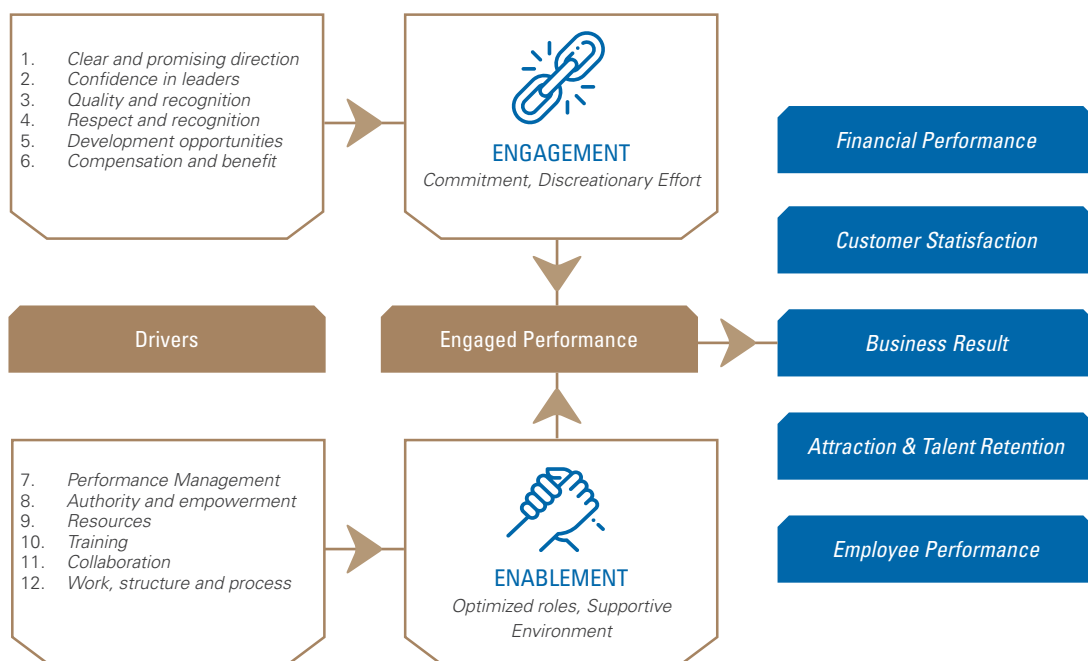
EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY (EES)

Perseroan melakukan survei terhadap tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai secara berkala dengan *Employee Engagement Survey* (EES). Survei tersebut melibatkan seluruh pegawai pada semua level organisasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterikatan pegawai kepada Perseroan. Dalam pelaksanaan survei ini, pegawai dapat mengungkapkan pendapatnya secara jujur mengenai hal-hal yang telah berjalan secara baik dan yang harus ditingkatkan di Perseroan. Melalui hasil EES survei, Perseroan dapat memperoleh gambaran mengenai kekuatan yang dimiliki Perseroan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan, hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menyusun langkah-langkah peningkatan guna mendukung

pencapaian kinerja Perseroan yang lebih baik, serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif guna mendorong peningkatan produktivitas pegawai.

Di tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan EES melalui kerja sama dengan pihak konsultan independen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini yaitu penyebaran kuesioner ke seluruh pegawai tetap Perseroan secara online. Kuesioner terdiri dari pertanyaan yang mencakup dua aspek yaitu *Engagement Questions* dan *Driver Questions*. Secara umum metode perumusan keterikatan pegawai ditunjukkan dalam skema berikut:

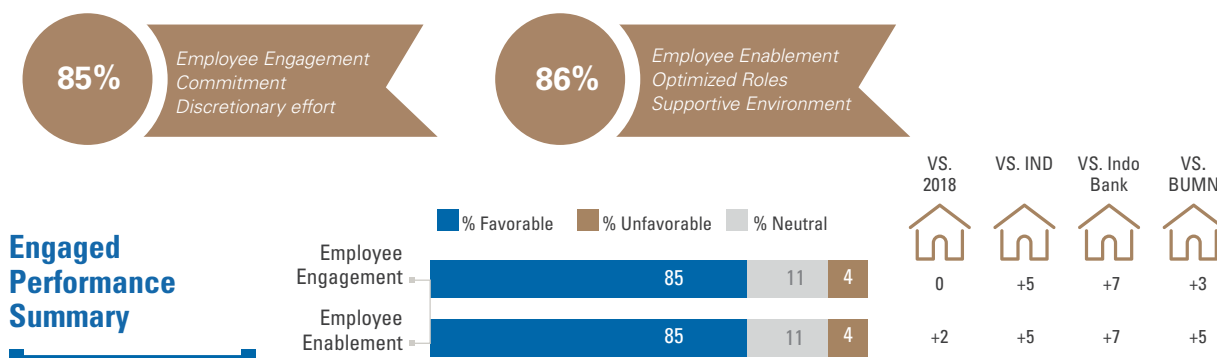
HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN



Skor EES Perseroan menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 85.5%. Hasil EES tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai dengan Perseroan mengalami peningkatan. Perseroan menindaklanjuti hasil survei tersebut dengan melaksanakan sosialisasi dan *impact plan* untuk merancang perbaikan-perbaikan pada organisasi.

Usulan-usulan perbaikan tersebut kemudian dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada periode tahun berikutnya.

Secara rinci, hasil EES Perseroan pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan pada skema berikut:





PENGELOLAAN KEGIATAN INFORMAL PEGAWAI

Dalam rangka menyediakan wadah untuk kegiatan informal pegawai di luar jam kantor. Perseroan memberikan kemudahan bagi pegawai untuk menyalurkan hobi dan kreativitasnya dalam bidang olah raga, kesenian, sosial dan kerohanian. Kegiatan informal ini juga sebagai bentuk kepedulian Perseroan untuk menciptakan work-life balance bagi pegawai yang antara lain meliputi:

1. Kegiatan Religi
Kegiatan keagamaan dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik melalui organisasi Bapekis (Islam) dan Bapekris (Kristen)
2. Kegiatan Olahraga
Kegiatan olahraga dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik melalui komunitas-komunitas olah raga yang ada antara lain:
 - a. Sepeda melalui BCC (Batara Cycle Community)
 - b. Lari melalui BTN Runners
 - c. Futsal dan sepak bola melalui PS Batara
 - d. Golf melalui Batara Golf
 - e. Bowling melalui Perkumpulan Bowling BTN
3. Kegiatan Seni
 - a. Photography melalui BTN Photography
 - b. Tari melalui Lenggang Harmoni
 - c. Musik melalui Batara Music Club

ROADMAP PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Pencapaian pertumbuhan usaha Perseroan yang optimal dapat dicapai dengan penyelarasan pengembangan strategis di semua unsur usaha, termasuk pengembangan *human capital*. Memandang kedepan, Perseroan telah menyusun *Roadmap* Pengembangan human capital hingga 2020 sebagai dasar pengelolaan human capital selaras dengan *roadmap* transformasi Perseroan tahap Digital Banking. Roadmap Pengembangan human capital Perseroan berfokus pada 7 inisiatif utama sebagai berikut:

1. Menerapkan rencana suksesi dan manajemen karier yang jelas untuk mengidentifikasi risiko ketersediaan pegawai di posisi kunci;
2. Menyusun *strategic Manpower Planning* untuk menentukan kesenjangan di jangka panjang dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan;
3. Mengembangkan *employer value proposition* dan kampanye rekrutmen untuk menarik talenta terbaik ke Perseroan;
4. Meningkatkan dan menerapkan manajemen kinerja Perseroan untuk membangun perilaku yang diinginkan dan meningkatkan *engagement* pegawai;
5. Mengembangkan program *top talent* bagi pegawai Perseroan berkinerja tinggi untuk menciptakan suksesi yang tepat;
6. Mendorong perubahan melalui dukungan dan dukungan top management; dan
7. Penerapan budaya berbasis kinerja dan risiko untuk menjaga kesuksesan yang berkelanjutan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

HUMAN CAPITAL: PENGELOLAAN MODAL INSANI BANK BTN

ROADMAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2016-2020





TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



Perseroan menyadari bahwa pengelolaan Teknologi Informasi memegang peranan strategis untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan keamanan pengolahan data dan informasi. Selain itu, pengelolaan Teknologi Informasi yang baik juga dapat memberikan peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan digital banking. Menyadari hal tersebut, Perseroan memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi. Di sisi lain, pengembangan Teknologi Informasi secara berkelanjutan juga dapat menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki Perseroan berjalan dengan efektif.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI



VISI

“Menyinerjikan Strategi Bisnis dan Teknologi Informasi dengan Menyediakan Layanan Teknologi Informasi kelas Dunia untuk Mencapai Kemenangan pada Era Digital”



MISI

“Menjadi mitra bisnis handal yang menyediakan layanan responsif dan akurat melalui teknologi mutakhir dan sistem integrasi terkemuka.”



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang Layanan Berbasis Digital ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. Secara berkala, Perseroan meninjau kebijakan yang telah disusun guna memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi sehingga mampu memberikan solusi pada layanan keuangan yang semakin efisien dan mudah diakses bagi nasabah. Kebijakan-kebijakan Perseroan dalam pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. Pedoman Manajemen Sistem (PMS) Teknologi Informasi pada Peraturan Direksi No. 01/PD/DIR/PPD/2019 tentang Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi.
2. Surat Edaran Direksi No.64/DIR/ITPD/2017 tentang Pedoman Keamanan Informasi.
3. Surat Edaran Direksi No.59/DIR/ITPD/2017 tentang Standarisasi Teknologi Informasi.
4. Surat Edaran Direksi No.26/DIR/ICTD/2017 tentang Perjanjian Kerahasiaan Informasi (NonDisclosure Agreement).
5. Kebijakan *Business Continuity Plan* TI meliputi Surat Edaran Direksi No. 01/DIR/DTI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operating Procedure Disaster Recovery Center (DRC), Surat Edaran Direksi No. 23/DIR/ICTD/2011 tentang Pedoman Penerapan Business Continuity Plan, dan Surat Edaran Direksi No. 35/DIR/ICTD/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disaster Recovery Plan (DRP) dan Surat Edaran Direksi No. 18/DIR/RMD/2017 tentang Kebijakan Business Continuity Management (BCM) dan Standard Operating Procedure (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP).
6. Surat Edaran Direksi No.02/DIR/ICTD/2014 tentang Petunjuk Operasional Penyelesaian Laporan Master Error.
7. Surat Edaran Direksi No.41/DIR/ICTD/2011 tentang Pedoman Penerapan IT Risk Management.
8. Surat Edaran Direksi No.33/DIR/ICTD/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Teknologi Informasi.
9. Surat Edaran Direksi No.23/DIR/ICTD/2011 tentang Pedoman Penerapan Business Continuity Plan.
10. Surat Edaran Direksi No.17/DIR/DTI/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengamanan Password/Cryptographic Key/Karakteristik Personal

(Sidik Jari, Retina, Suara)/PIN.

11. Surat Edaran Direksi No.01/DIR/DTI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operating Procedure Disaster Recovery Center (DRC).
12. Surat Edaran Direksi No.05/DIR/DTI/1999 tentang Pedoman Operasi Backup Data.
13. Surat Edaran Direksi No.04/DIR/DTI/1999 tentang Pedoman Operasi Aplikasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
14. Surat Keputusan Direksi No.01/SK/DIR/ITPD/2019 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).
15. Peraturan Direksi No. 12/PD/ICTD/2016 tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016-2018.

Dalam rangka mendukung kebijakan serta mencapai target roadmap Teknologi Informasi yang telah ditetapkan, Perseroan menerapkan beberapa strategi pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. *End-to-end Process Digitalisation and Automation*
 - a. Layanan Bank dilakukan dengan menggunakan channel digital;
 - b. Otomasi pada proses *end-to-end business process*;
 - c. Pengadaan dan pengembangan integrasi open API internal dan eksternal yang mempermudah konektivitas.
2. *Customer 360°*
 - a. Informasi nasabah ritel dan korporat tersedia secara terpusat untuk semua bagian operasi bisnis (*front, middle, back office*);
 - b. Perencanaan strategi portofolio nasabah ritel dan korporat tersaji secara menyeluruh sehingga mampu memberikan *customer behaviour analytics* yang akurat.
3. *IT Service Excellence*
 - a. Organisasi TI mampu beroperasi dan mendukung transformasi Bank melalui proses, prosedur, dan model kepatuhan yang *well-defined*;
 - b. Pelaksanaan service management IT yang optimal;
 - c. Partnership antara TI dan bisnis yang kolaboratif.



PROGRAM KERJA DAN INISIATIF INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2019

Dalam mendukung pencapaian 3 (tiga) fokus strategi di atas, Teknologi Informasi BTN dijalankan dengan menetapkan 4 (empat) besaran Program, meliputi:

1. *Digital and Experience Enablement*, bagaimana Bank dapat meningkatkan layanan bisnis terhadap nasabah melalui pengalaman digital secara lebih mudah dan cepat.
2. *Customer Profiling & Data Analytics*, bagaimana Bank dapat melakukan Analisa data nasabah secara terintegrasi yang tersegmentasi untuk mengetahui perilaku dan aspirasi kebutuhan nasabah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas produk dan kepuasan nasabah.
3. *Process Improvement & Automation*, bagaimana Bank dapat mempercepat tata kelola dan proses pekerjaan secara lebih efisien dan efektif melalui automasi sistem.
4. *Distribution Channel & Open Banking*, bagaimana Bank dapat meningkatkan utilitas dan konektifitas channel khususnya berbasis transaksi kepada nasabah secara lebih handal dan cepat.

Program pengembangan dan percepatan IT tersebut didukung oleh beberapa sub program atau inisiatif utama yang akan dijalankan dalam jangka waktu 2019-2021:

1. *Digital and Experience Enablement: Inisiatif Digital Platform Implementation*. Pada tahun 2019, telah dilakukan Pengembangan BTN Properti berbasis *Cloud System*, yang diharapkan masih akan berevolusi mengikuti kebutuhan bisnis di tahun 2020-2021.
2. *Customer Profiling & Data Analytics*:
 - a. *Implementasi CRM (Customer Relationship Management)*, sejak 2019 telah dikembangkan melalui aplikasi BTN Smart, sebagai Lead Management System yang membantu penilaian kinerja salesforce di Kantor Cabang. BTN Smart diharapkan berlanjut melalui rangkaian pengembangan mengikuti kebutuhan bisnis ke depannya.
 - b. *Wealth Management System Enhancement*. Pada tahun 2019, telah dilakukan enhancement sistem *iWealth*, berfungsi dalam monitoring portofolio dan transaksi nasabah prioritas.
 - c. *EDW & Analytics Platform Assessment and Implementation*: Pada tahun 2019, banyak daftar subinisiatif yang masuk dalam kategori EDW dan yang akan berjalan di tahun 2020-2021.
 - d. *Master Data Management Enhancement*
 - e. *Big Data Capability*

ROADMAP DAN RENCANA STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (RSTIK)

Tabel berikut merupakan *Roadmap* Implementasi IT tahun 2019-2021 yang tercantum pada dokumen RSTI 2019-2021. *Roadmap* inisiatif dilengkapi *timeline* yang direncanakan dengan asumsi ideal pelaksanaan proyek

ROADMAP IMPLEMENTASI

Daftar Inisiatif	PPT			2019		2020				2021			
	People	Process	Tech	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Digital Capability & Customer Focus													
DC01- Digital Platform Implementation													
DC02- Transaction Channel Optimization													
DC03- CRM Implementation													
Funding													



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

ROADMAP IMPLEMENTASI

Daftar Inisiatif	PPT			2019		2020				2021			
	People	Process	Tech	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>FD01-Loan Origination Enhancement</i>		○	○										
<i>FD02-E-money Implementation</i>		○	○										
<i>Lending</i>													
<i>LD01-Loan Origination Enhancement</i>		○	○										
<i>LD02-Credit Card System Implementation</i>		○	○										
<i>LD03- RPA Capability Establishment</i>		○	○										
<i>Transaction Banking</i>													
<i>TB01-Treasury System Enhancement</i>			○										
<i>TB02-Branch System Re-alignment</i>		○	○										
<i>TB03-Cash Management System Enhancement</i>			○										
<i>TB04-Supply Chain Finance Implementation</i>		○	○										
<i>TB05-Trade Finance System Implementation</i>		○	○										
<i>Operations and Enablers - People</i>													
<i>OE01-IT People Workload Analysis</i>	○												
<i>OE02- Agile & DevSecOps Assessment and Implementation</i>	○	○	○										
<i>OE03-HC System Enhancement</i>			○										
<i>Operations and Enablers - People</i>													
<i>OE04- IT People Capability Development</i>	○												



ROADMAP IMPLEMENTASI

Daftar Inisiatif	PPT			2019		2020				2021			
	People	Process	Tech	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
OE05-IT Sourcing Strategy Optimization	○	○											
OE06-IT Organization Function Effectiveness Enhancement	○	○											
OE07-Succession Planning	○												
<i>Operations and Enablers - IT Accelerators</i>													
OE08- PMO Assistance Implementation	○												
OE09- Project Management Optimization		○											
OE10- SDLC Process Optimization		○											
OE11- Enterprise Integration & Open API			○										
OE12- Core Banking Enhancement		○	○										
OE13- Data Centers Assesment	○	○	○										
OE14- Server & Storage Enhancement and Modernisation			○										
OE15- Integrated IT Monitoring Implementation			○										
OE16- ITSM Assessment and Implementation	○	○	○										
OE17- IT EA Assessment and Implementation	○	○	○										
OE18- Enterprise Data Warehouse (EDW) & Analytics Platform Assessment	○	○	○										
OE19- Master Data Management Enhancement			○										
OE20- Advanced Big Data Capability			○										



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

ROADMAP IMPLEMENTASI

Daftar Inisiatif	PPT			2019		2020				2021			
	People	Process	Tech	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
OE21-Network & Security Assessment and Implementation	○	○	○										
<i>Operations and Enablers - Risk & Compliance</i>													
OE22- Enterprise Risk Management & Legal Application Enhancement			○										
OE23- Anti-Fraud System Enhancement		○	○										
OE24- Integrated IT Risk Assessment		○											
OE25- IT Procedure Development		○											
OE26- Identity & Access Manageent Enhancement	○	○	○										
<i>Operations and Enablers - Procurement & Finance</i>													
OE27- Payment System Intergration and Automation	○	○	○										
OE28- BPC System Implementation	○	○	○										
OE29- Procurement & Asset System Enhancement			○										
<i>Operations and Enablers - Others</i>													
OE30- Document Managemnet System Enhancement			○										
OE31- Content Management System Implementation	○	○	○										
OE32- Syariah Spin Off Assessment	○	○	○										

Transform/New Capability
 Enhancement
 Operational Support (System N/A)



SDM TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan terus mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis juga disertai dengan dukungan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Teknologi Informasi.

Di tahun 2019 Perseroan telah merekrut dan mengembangkan kompetensi SDM internal di bidang Teknologi Informasi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik secara internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut:

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI

Materi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara
<i>Seminar "Cyber Crime: Threats and Countermeasure"</i>	1	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)
<i>Business Analysis Body of Knowledge</i>	3	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
<i>Certified Information Security Manager (CISM)</i>	1	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i>	1	PT Duta Kuningan
<i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	1	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>Certified International Project Manager (IAPM)</i>	1	Expertindo Training & Consulting
<i>Cisco CCNP Security SIMOS</i>	1	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>COBIT 5 Foundation</i>	8	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>Training IT IL Foundation</i>	10	PT Global Edu International
<i>Training IT IL Foundation</i>	14	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
<i>Training AIX Administrator (AN12)</i>	3	PT Global Edu International
<i>Training Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT)</i>	1	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>Training DevOps Practitioner</i>	9	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
<i>Training IT PM Based on PMBOK</i>	4	PT Integrasindo Mitra Infotama
<i>Training NodeJS</i>	2	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
<i>Training Prince 2 Foundation</i>	5	PT Smartindo Manajemen Informatika
<i>Vmware Vsphere (V6.7)</i>	2	PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Selain mengarah pada kegiatan operasional bisnis, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Perseroan juga mengarah pada pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini tata kelola teknologi informasi. Perseroan menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi di seluruh proses kerja. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Perseroan terus ditingkatkan dari sisi *Policy and Procedure* dengan mengadopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank

Indonesia, Peraturan Pemerintah, *International Best Practice* serta memitigasi adanya risiko dan ancaman baru berdasarkan perkembangan teknologi.

IT Strategic Planning Development Division (ITPD) senantiasa memastikan fungsi Teknologi Informasi berada di arah yang benar dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada kerangka Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

halaman ini sengaja dikosongkan



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

POJK 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum				
SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum				
PKTKP 01/DIR/KD/PPD/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP)				
MANAJEMEN	PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN	OPERASI TEKNOLOGI INFORMASI	JARINGAN KOMUNIKASI	
PMS TI 01/PD/DIR/PPD/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi				
PD No. 12/PD/ICTD/2016 Tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016-2018				
SE No. 41/DIR/ICTD/2011 Perihal Pedoman Penerapan IT Risk Management & Lampirannya		SE No. 59/DIR.ITPD/2017 Perihal Standarisasi Sistem Teknologi Informasi		
DOMAIN		SE No. 02/DIR/ICTD/2014 Perihal Petunjuk Operasional Penyelesaian Laporan Master Error		
		SE NO. 05/DIR/DTI/1999 Perihal Pedoman Operasi Backup Data PT Bank Tabungan Negara Tbk		
		SE No. 04/DIR/DTI/1999 Perihal Pedoman Operasi Aplikasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
Surat Direksi No.33/DIR/ICTD/2011 Perihal Standard Operating Procedure (SOP) Technology Information PT Bank Tabungan Negara (Persero)				
SK DIR No.01/SL/DIR/ITPD/2019 Tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)				



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

	PENGAMANAN INFORMASI	RENCANA PEMULIHAN BENCANA	LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK	PENGUNAAN PIHAK PENYEDIA JASA TI	PENYEDIAAN JASA TI OLEH BANK
		SE No. 18/DIR/RMD/2017 Perihal Kebijakan Business Continuity Management (BCM) dan Standard Operating Procedure (SOP) Business Continuity Plan (BCP)			
	SE No. 64/DIR/ITPD/2017 Perihal Pedoman Keamanan Informasi	SE No. 35/DIR/ICTD/2013 Perihal Pelaksanaan Disaster Recovery Plan (DRP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
	SE No. 25/DIR/ICTD/2017 Perihal Perjanjian Kerahasiaan Informasi (Non Disclosure Agreement)	SE No. 23/DIR/ICTD/2011 Perihal Pedoman Penerapan Business Continuity Plan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
	SE No. 17/DIR/DTI/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengamanan Password/ Cryptographic Key/ Karakteristik Personal (Sidik Jari, Retina, Suara)/PIN	SE No. 01/DIR/DTI/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operating Procedure Disaster Recovery Center (DRC)			



TATA KELOLA PERUSAHAAN

BTN terus meningkatkan kepercayaan dan rasa aman investor atas investasi dalam era ekonomi global saat ini dengan menjalankan governance process yang efektif dan dapat diandalkan.





Sebagai bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sebagai perusahaan publik, Perseroan menerapkan seluruh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban semata, namun merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG terlihat dari internalisasi *governance principles* ke dalam *governance framework* yang terdiri dari *governance structure* dan *governance process* yang efektif, sehingga menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan, sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Pada proses jalannya *governance structure*, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Adapun Direksi menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan Bank secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kepercayaan dan rasa aman investor atas investasi dalam era ekonomi global saat ini dengan menjalankan *governance process* yang efektif dan dapat diandalkan. Keseluruhan upaya tersebut mampu membawa Perseroan memperoleh *governance outcome* yang baik dan tercermin dalam hasil kinerja keuangan maupun operasional yang memuaskan, menjadikan Perseroan memiliki reputasi yang baik, serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan telah menjadi kebutuhan guna mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*; yaitu Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik. Selanjutnya penerapan GCG yang konsisten disertai dengan inovasi yang tiada henti baik dari sisi produk dan pelayanan akan menjamin kepercayaan seluruh pemangku kepentingan serta menumbuhkan budaya kerja yang dapat membuahkan hasil kinerja terbaik.

Pengakuan implementasi GCG juga tercermin dari adanya beberapa penghargaan bidang GCG yang berasal dari beberapa lembaga independen dan *expertise* GCG. Perseroan senantiasa mengikuti rating dan *survey Corporate Governance Perception Index* (CGPI) selama 8 tahun berturut-turut yang dinilai oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA sebagai lembaga riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance*. Pada ajang CGPI 2019, Perseroan kembali berhasil memperoleh sebagai *Most Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Di samping itu Perseroan juga memperoleh *3rd Best Indonesia GCG Implementation* 2019 kategori *Public Bank Company* Buku III (Aset > 100T) yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.



DASAR, TUJUAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

DASAR PENERAPAN GCG

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman-pedoman GCG yang diterbitkan oleh institusi nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard* yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



TUJUAN PENERAPAN PRINSIP GCG

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Hal tersebut akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Implementasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, dalam rangka menjadikan Perseroan sebagai bank lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Perseroan mengembangkan struktur

GCG yang meliputi GCG *structure* dan GCG *infrastructure* guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan usaha Perseroan, diharapkan akan mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan; menghasilkan kesinambungan usaha dalam jangka panjang; meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

PENERAPAN PRINSIP GCG DI LINGKUP BANK BTN

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan termuat juga dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

DASAR, TUJUAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

5 (LIMA) PRINSIP GCG



TRANSPARANSI

PENJELASAN

Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan dan non keuangan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham.
- Kebijakan Perseroan bersifat tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak.
- Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan kode etik bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemanfaatan situs web untuk transparansi kepada publik dengan mengacu kepada *Asean Corporate Governance Scorecard*.



AKUNTABILITAS

PENJELASAN

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Target dan sasaran yang ditetapkan Perseroan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
- Perseroan menggunakan metode manajemen risiko dan audit internal serta auditor publik dalam pengelolaan dan pengawasan.
- Perseroan menetapkan ukuran kinerja kepada seluruh jajaran dengan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan Nilai Budaya Perusahaan yang disebut "SIIPS" dengan *tagline* "BTN Terdepan, GCG Rumahku", sasaran usaha dan strategi serta memiliki *rewards and punishment system*.
- Perseroan menekankan pentingnya budaya anti korupsi, yang disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders*. Salah satunya upaya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



RESPONSIBILITAS

PENJELASAN

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Perseroan memberikan definisi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing organ yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi.
- Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Perseroan sebagai *good corporate citizen* mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.



INDEPENDENSI

PENJELASAN

Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

Perseroan memiliki sejumlah perangkat kepatuhan yang diterapkan dengan tujuan memberikan batas yang wajar terhadap dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).



KEWAJARAN DAN
KESETARAAN

PENJELASAN

Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



KOMITMEN PENERAPAN GCG

Dalam perjalanannya, Perseroan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan guna mencapai visi dan keberlanjutan usaha. Bagi Perseroan, penerapan GCG menjadi alat yang digunakan Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

Perseroan juga menyadari, perjalanan bisnis dari masa ke masa terus dihadapkan pada berbagai risiko yang semakin kompleks sehingga meningkatkan pula kebutuhan akan praktik terbaik penerapan GCG oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus meningkatkan penerapan tata kelola bank dengan perkembangan regulasi antara lain terkait dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Upaya penerapan GCG yang berkesinambungan juga dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*, upaya Perseroan untuk menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG yang dimulai dengan penyediaan sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik. Selanjutnya, komitmen penerapan GCG yang konsisten dan berkesinambungan dilakukan Perseroan disertai dengan inovasi yang tiada henti baik dari sisi produk dan pelayanan guna menjamin kepercayaan setiap pemangku kepentingan. Hingga akhir periode tahun buku, penerapan GCG di lingkungan Perseroan memiliki manfaat yang besar, sehingga Bank memiliki pedoman

dalam menjalankan roda bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*.

Keyakinan bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan membuahkan hasil yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian penting Perseroan sepanjang tahun 2019 dengan pencatatan kinerja yang cukup memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diperoleh. Perseroan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan.

Pengakuan implementasi Tata Kelola juga tercermin dari adanya beberapa penghargaan bidang Tata Kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) yang berasal dari beberapa lembaga independen dan *expertise* GCG. Perseroan senantiasa mengikuti rating dan *survey Corporate Governance Perception Index* (CGPI) selama 8 tahun berturut-turut yang dinilai oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA sebagai lembaga riset dan pemeringkatan penilaian kualitas corporate governance. Pada ajang CGPI 2019, Perseroan kembali berhasil memperoleh sebagai *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Di samping itu Perseroan juga memperoleh *3rd Best Indonesia GCG Implementation 2019* kategori *Public Bank Company* Buku III (Aset > 100T) yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.

Keselarasannya antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

ROADMAP TATA KELOLA BANK BTN

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan atas implementasi GCG, tidak hanya berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berdasarkan *best practice* yang berlaku internasional, antara lain berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Perseroan telah menyusun *Roadmap* GCG dalam rangka melakukan penguatan GCG dari waktu ke waktu yang meliputi 4 (empat) pilar GCG yaitu *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Mechanism* dan *Governance Outcome*. Penerapan ke-4 pilar GCG tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

PILAR GCG BANK BTN



Pada periode 2019-2022, Perseroan telah menyusun *roadmap* Tata Kelola Bank yang selaras dengan rencana jangka panjang transformasi Perseroan, yaitu mempertimbangkan penerapan inisiatif *Integrated Governance Risk & Compliance* (iGRC), adanya rencana implementasi konglomerasi keuangan melalui pembentukan anak perusahaan serta rencana aksi keuangan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, *Roadmap* Tata Kelola tersebut akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan Perseroan, dengan sasaran akhir menjadi salah satu perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik di masa mendatang.

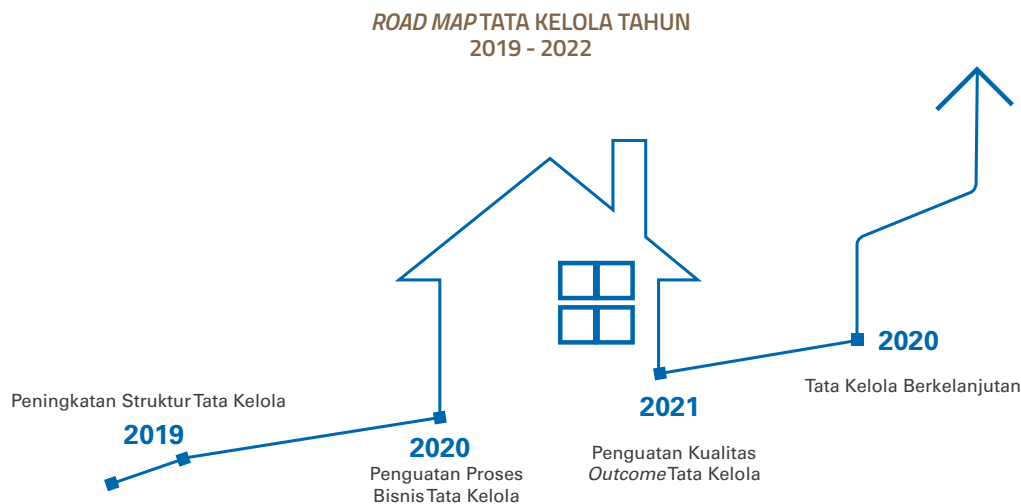
Roadmap Tata Kelola diawali pada tahun 2019 melalui peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola. Perseroan melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan pada level organ utama berupa Piagam Komite Dewan Komisaris. Adapun revisi dan penyempurnaan Piagam yang dilakukan sepanjang 2019 berupa Piagam Komite Audit, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Disamping itu, Perseroan juga melakukan pemetaan sumber daya manusia, rekrutmen, pendidikan serta pelatihan, penyesuaian struktur organisasi, penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur yang baru guna menerapkan *governance*, *risk* dan *compliance* secara komprehensif dan terintegrasi.

Tahap selanjutnya adalah optimalisasi proses bisnis melalui penerapan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) di setiap unit kerja Perseroan yang mencakup komponen GCG, *Risk Management*, *Compliance*, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (*Code of Conduct*), dan *Anti-Fraud*, sehingga Bank dapat beroperasi secara efektif maupun efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas/unggul.



Tujuan akhir *Roadmap* yakni Tata Kelola yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan transformasi bisnis secara prudent melalui pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur. Efektivitas sistem dan governansi Perseroan diharapkan mampu menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi.

Adapun tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perseroan 2019-2022 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



FOKUS IMPLEMENTASI GCG TAHUN 2019

Di tahun 2019, Perseroan menitikberatkan pada peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola serta penyesuaian struktur organisasi, penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur yang baru guna menerapkan *governance*, *risk* dan *compliance* secara komprehensif dan terintegrasi.

Adapun implementasi GCG tahun 2019 yang sejalan dengan *Roadmap* GCG Perseroan dilakukan melalui penerapan 3 Pilar GCG sebagai berikut:

Governance Structure

Review dan Penyempurnaan Kebijakan:

1. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan level organ utama (Piagam Komite Audit, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan Piagam Komite Pemantau Risiko);
2. Pengembangan organisasi yang memisahkan fungsi kebijakan, *operation* dan *sales*; dan
3. Pengembangan Model Operasi Baru seperti BPI, *Network & Distribution Design* dan *Organization Design*.

Governance Process

1. Pembangunan *People Capability* yang mencakup:
 - *Employee Engagement* khususnya untuk pegawai Millennial;
 - *Strong Leadership & Capability* untuk tingkat *top* dan *middle management* (L1 dan L2);
 - *Empower the Core* untuk *middle management* dan pegawai di bawahnya (L3)
2. *Excellent Process* yang mencakup: *Business Process Improvement* (BPI); Penerapan *Compliance checklist*; Pelaksanaan GRC Indeks; Pelaksanaan program budaya perusahaan (SIIPS); dan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dalam APU PPT
3. *Product Competitiveness* yang mencakup: *Customer centric: Mass, Emerging affluent*, UKM & Corp & *Syndications* dan Penyederhanaan produk tabungan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

Governance Outcome

1. *Review* struktur organisasi tata kelola baru;
2. *Governance Training Programme*;
3. Hasil *Self Assessment* tata kelola berdasarkan OJK dengan hasil peringkat 2 (kategori baik);
4. Penilaian Tata Kelola berdasarkan *Third Party Assessment*:
 - CGPI -> *Indonesian Most Trusted Company*; dan
 - Economic Review -> *3rd Best Indonesia GCG Implementation 2019 ASEAN Risk Award*.

PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA KELOLA

Perseroan terus melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan baik pada level organ utama maupun organ pendukung. Beberapa kebijakan pada level organ utama antara lain Piagam Komite Dewan Komisaris yaitu Piagam Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Piagam Komite Pemantau Risiko. Disamping itu, Perseroan juga sedang melakukan penyusunan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sedangkan kebijakan tata kelola pada organ pendukung, Perseroan telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola perusahaan berupa Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) sebagai acuan utama dalam menerapkan praktik kebijakan tata kelola perusahaan yang mencakup 21 bab dari seluruh kebijakan proses bisnis bank.

PENGUATAN IMPLEMENTASI PEDOMAN TATA KELOLA OJK DAN ASEAN CG SCORECARD

Perseroan telah menerapkan sebagian besar rekomendasi OJK yang terdiri dari 25 rekomendasi dalam 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan dalam rangka penguatan penerapan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta prinsip-prinsip ASEAN CG Scorecard. Perseroan juga

telah meningkatkan kualitas aspek keterbukaan informasi yang dilakukan antara lain melalui penyampaian informasi penting mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada situs Perseroan, sehingga pemegang saham dan investor dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan.

PROGRAM ZERO TOLERANCE TO FRAUD & ZERO DEFECT

Untuk menjamin setiap upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko terjadinya *fraud* berjalan efektif, maka Perseroan terus meningkatkan kepedulian Insan BITNIZ tentang aspek kepatuhan melalui sosialisasi secara berkesinambungan program *Anti fraud* dan membentuk Tim *Anti Fraud*. Strategi *Anti Fraud* didukung oleh implementasi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Lebih jauh lagi, komitmen *anti fraud* juga ditunjukkan dengan penyampaian surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada seluruh *stakeholders* Perseroan. "Komitmen Bersih" mencakup bersih dari suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan praktek pungutan liar (pungli), *mark up* dan segala perbuatan lain yang mengarah KKN.

INISIATIF IMPLEMENTASI INTEGRATED GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (IGRC)

Guna menciptakan bisnis Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kuat, sejak tahun 2018 Perseroan telah menerapkan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) yang merupakan kolaborasi antara beberapa unit kerja. Perseroan mengoptimalkan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) di setiap unit kerja

yang mencakup komponen GCG, *Risk Management*, *Compliance*, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (*Code of Conduct*) dan *Anti Fraud*, sehingga Perseroan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas unggul.



Dalam upaya penerapan iGRC, Perseroan menghadapi beberapa tantangan:

1. Mengoptimalkan pemahaman SOP yang komprehensif dalam mengintegrasikan iGRC bagi seluruh unit kerja.
2. Mengoptimalkan peran supervisi dalam mengintegrasikan fungsi GRC bagi seluruh unit kerja.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisien GRC bagi seluruh unit kerja.

Dengan menerapkan iGRC, Perseroan diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pencapaian kinerja unggul dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
2. Mengeliminasi *silo* antar unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan kontrol yang memadai.
3. Menghilangkan redundansi data maupun aktifitas serupa dengan tujuan mengoptimalkan aktifitas sehingga lebih efisien.
4. Dorongan menjadi lebih maju dalam memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri.
5. Pelaksanaan manajemen perbankan yang baik sehingga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.

Perseroan mengimplementasi iGRC dengan melakukan pengukuran dari berbagai parameter yang berangkat dari

tantangan dalam mengintegrasikan fungsi GRC untuk meningkatkan kinerja berkualitas/unggul, parameter yang diintegrasikan terdiri dari pengelolaan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur internal, mendukung program *Zero Fraud*, *index* budaya (*Culture Assessment Index*), serta pengelolaan risiko-risiko secara efektif dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilandasi perilaku jujur & disiplin serta inovasi.

Dalam rangka mengukur keberhasilan setiap unit kerja dalam menerapkan iGRC, maka target dan indikator unit-unit kerja tersebut akan dinilai berdasarkan kinerja keuangan, peningkatan skor KPKU, frekuensi dan signifikansi *fraud*, serta signifikansi dan penyelesaian temuan audit. Dalam hal ini, unit-unit kerja akan dinilai berdasarkan parameter penilaian Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas sebagai berikut:

1. Kantor wilayah/Kantor Cabang /Kantor Cabang Syariah: Tata Kelola, Profil dan Rentabilitas, *Branch Activity* dan Indikator BPI
2. Divisi: KPI Divisi, tingkat keberhasilan inisiasi Divisi dalam program transformasi *index* budaya (*Culture Assessment Index*), dan penyelesaian temuan audit.

Peran iGRC sangat penting untuk dapat memastikan bahwa kantor pusat, wilayah, dan cabang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan terintegrasi. iGRC juga sangat penting untuk memastikan proses bisnis dan risk management berjalan dengan seharusnya dan didukung oleh human capital dengan kompetensi yang memadai.

KERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PROGRAM PROFESIONAL BERINTEGRITAS (*PROFIT*)

Semangat untuk menjalankan GCG secara lebih serius mendorong Bank merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengendalikan praktik Gratifikasi dan suap di lingkungan Bank. Hal ini merupakan bukti keseriusan untuk mendukung Indonesia bersih dari Korupsi dan menjadikan Perseroan merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama

KPK. Sebagai bentuk komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank, maka Bank wajib mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank. Sistem ini akan menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN



“BTN merupakan Bank BUMN pertama yang mengadopsi dan menerapkan panduan Cegah Korupsi (CEK) dan program Profesional Berintegritas (PROFIT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan bukti keseriusan Bank BTN untuk mendukung Indonesia bersih dari korupsi.”

Bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh KPK, Perseroan memperoleh penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018. Adapun yang menjadi kriteria penilaian antara lain adanya kelengkapan perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi termasuk komitmen, aturan dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Inovasi sosialisasi internal, eksternal dan proses pelaporan serta mutu pengelolaan; kuantitas laporan gratifikasi serta kualitas laporan.

Perseroan telah menerapkan kerangka sistematis pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengadopsi Panduan Cegah Korupsi (CEK) yang

diterbitkan KPK. Untuk mendukung hal tersebut Perseroan juga melakukan kerjasama dengan KPK dalam hal program pencegahan korupsi melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.



Perseroan bekerja sama dengan KPK dalam hal Anti Korupsi dan Gratifikasi melalui beberapa program:

1. Keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangunan Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.
3. *Self Assessment* atas *checklist* prosedur pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi (Program 'CEK' dan 'PROFIT')

Manfaat yang didapat oleh Perseroan dengan Program CEK PROFIT ini adalah dengan praktik penerapan bisnis

yang bersih dari korupsi di lingkungan Perseroan, maka diharapkan Perseroan terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial, risiko hukum maupun reputasi.

Perseroan adalah lembaga Perbankan pertama khususnya di HIMBARA yang mengadopsi Panduan pencegahan korupsi yang disusun oleh KPK serta melakukan kerjasama dengan KPK dalam gerakan PROFIT.

INISIATIF DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan juga menjalankan berbagai kebijakan pendukung dalam rangka memenuhi prinsip keuangan berkelanjutan, yang terdiri dari: (1) Prinsip investasi bertanggung jawab; (2) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; (3) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; (4) Prinsip tata kelola; (5) Prinsip komunikasi yang informatif; (6) Prinsip inklusif; (7) Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan (8) Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Pendekatan Perseroan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan telah tercermin dalam salah satu misi Perseroan yakni "Mempedulikan Kepentingan Masyarakat Sosial dan Lingkungan secara Berkelanjutan". Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang (*long-term value creation*) tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan

bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perseroan telah mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat.

Perseroan telah merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ke dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan sasaran target waktu dalam jangka 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun (periode 2019-2023). Program-program yang dirumuskan dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bank BTN meliputi perancangan dan penyusunan *Sustainability Policy & Strategy* (kebijakan dan penyesuaian struktur serta peran organisasi), penyesuaian dan peluncuran *Green Finance Product & Index*, serta pelaksanaan berbagai program keberlanjutan dan inisiatif lainnya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

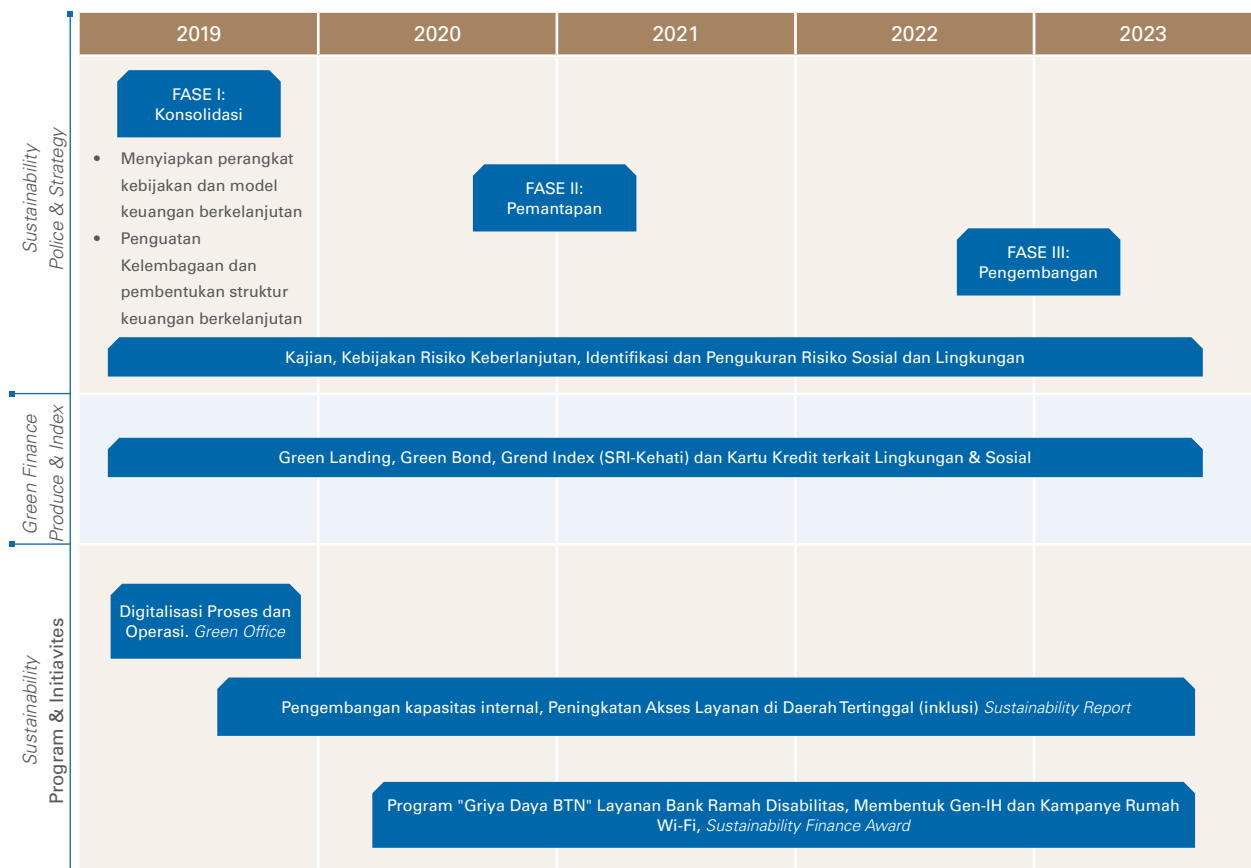


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN



PENERAPAN ASPEK, PRINSIP, DAN *BEST PRACTICE* TATA KELOLA PERUSAHAAN LAINNYA

Salah satu upaya lain yang dijalankan Perseroan dalam rangka mengimplementasikan GCG yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan aspek dan prinsip tata kelola yang berlaku secara internasional. Beberapa prinsip tersebut di antaranya *Guidelines of Corporate Governance*

Principles for Banks yang diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision mencakup 12 prinsip *corporate governance*, *ASEAN CG Scorecard*, CGPI, OECD, *ASEAN Risk Award*, dan praktik terbaik lainnya.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut

mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS

1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<i>Comply</i>	1. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs Perseroan. 2. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 2. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. 3. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. 4. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 5. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.
2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Comply</i>	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<i>Comply</i>	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relation</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK <i>E-reporting</i> , yakni pada tanggal 17 Mei 2019 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

4	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting</i> , <i>public expose</i> , <i>investor meeting</i> , Laporan Tahunan dan sebagainya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Perseroan.	Comply	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

6	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
7	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

8	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs Perseroan.
9	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
10	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian kebijakan suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

12	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Perseroan.	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.
14	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	Pada periode 2019, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: - Pendidikan - S1 Teknik Mesin ITB - S2 <i>Accounting and Finance</i> Universitas of Birmingham UK - Pengalaman Kerja - Treasury Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (tahun 1992 – 1995) - Deputy General Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1995 – 1996) - General Manager (CE) Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1996 – 1997) - Wakil kepala urusan keuangan dan jasa Bank PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1998 – 1999) - General Manager (CEO) Cabang Singapore PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 1999 – 2001) - Department Head UP3 Financial Institution & Overseas Network (FION) group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2001 – 2002) - Department Head Correspondent Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2002 – 2003) - Department Head FI Credit Risk and Product Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2003 – 2006) - Departement Head Credit Recovery II group dan Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2006) - Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) setingkat Group Head untuk International Banking and Capital Market Services Group (IBCMS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) - Group Head IBCMS Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) - Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2010 – 2013) Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.

Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
15	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs Perseroan (www.btn.co.id) menu <i>Investor Relation-GCG- Crossreference ASEAN CG Scorecard-SKB</i> .
16	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.
17	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.

18	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations sebagaimana yang dapat dilihat di situs Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.
19	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	<i>Comply</i>	Pelaksanaan penerapan <i>anti fraud</i> di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi No.22/DIR/ IAD/2014 Tentang <i>Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud</i> Perseroan. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/ CMPD/2017.



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
20	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor. Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database</i> vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.
21	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak- hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: 1. Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. 2. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. 3. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2019, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.
22	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>Whistle Blowing</i> .	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Surat Edaran No. 21/DIR/IAD/2014 Perihal <i>Standard Operating Procedure Whistle Blowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistle Blowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> dimaksud pada periode 2019 diuraikan pada bagian <i>Whistle Blowing System</i> Laporan Tahunan ini.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
23	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Perseroan pada Laporan Tahunan ini. Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis <i>variable</i> yang ditanggungkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dan Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2019, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

24	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Perseroan sebagai media keterbukaan informasi.	Comply	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui situs Perseroan, selain itu dapat juga diakses melalui media sosial yaitu: Youtube Bank BTN Facebook BankBTNcoid Twitter @BankBTNcoid Instagram @bankbtn LinkedIn PT Bank Tabungan Negara Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui e-mail, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM Channel Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>.
25	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG TAHUN 2020

Pada tahun 2020, upaya peningkatan GCG memasuki tahap penguatan proses bisnis tata kelola. Pada fase ini, Perseroan akan mengoptimalkan penerapan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) yang mencakup pengelolaan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur internal, mendukung program *Zero Fraud*, index budaya (*Culture Assessment Index*), serta pengelolaan risiko-risiko secara efektif dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilandasi perilaku jujur dan disiplin serta inovasi. Dengan optimalisasi peran iGRC maka Perseroan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas unggul.



PENILAIAN GCG BANK BTN

SELF-ASSESSMENT TATA KELOLA BANK

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* secara berkala dalam setiap tahunnya pada akhir bulan Juni dan Desember. Standar penerapan tata kelola selain mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga telah mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi *audit intern*;
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis bank.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

HASIL PENILAIAN

Informasi perkembangan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

TABEL HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA)
TAHUN 2015 - 2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil <i>Self Assessment</i> Tata kelola Perusahaan	2	2	2	2	2



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Pada penilaian Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2019, hasil penilaian sendiri *Self Assessment* penerapan tata kelola Perseroan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA) SEMESTER I 2019

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kemudian, pada Desember 2019, Perseroan kembali melaksanakan *Self Assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan perolehan hasil penilaian sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA) SEMESTER II 2019

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA)

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
- Bank BTN telah memiliki struktur tata kelola dan infrastruktur yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Struktur Tata Kelola telah lengkap terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja dengan jumlah anggota yang sesuai dan kompetensi yang memadai.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan (*Direktur Compliance*) walaupun sampai saat ini masih dalam proses *Fit and Proper Test*.
- Bank telah memiliki Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance & Governance Division*) yang terpisah dan independen terhadap satuan kerja perencanaan strategik.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal berada pada organisasi yang terpisah dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
- Bank BTN telah melakukan penyempurnaan peraturan kebijakan tentang pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan POJK terbaru.
- Bank BTN telah memiliki kebijakan & prosedur aktivitas Bank yang memadai untuk menunjang penerapan Tata Kelola Bank, seperti tata tertib untuk Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan *anti fraud*, kebijakan manajemen risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan tata kelola Bank dan kebijakan treasury. Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dilakukan pengkinian/penyempurnaan sejalan dengan diterbitkannya peraturan OJK dan BI yang terkait pada tahun 2018 dan 2019.
- Bank BTN memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan transparansi kondisi keuangan serta non keuangan.
- Bank BTN telah menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang selaras dengan visi dan misi.

b. Faktor-faktor Negatif

- Pada tanggal 27 November 2019 diadakan RUPSLB dimana terjadi perubahan pengurus anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tidak dapat langsung efektif bekerja karena wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris baru 1 (satu) yang sudah *Fit and Proper Test* dan 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris lainnya masih menunggu proses tahap *Fit and Proper Test*.
 - Anggota Direksi baru 3 (tiga) yang sudah *Fit and Proper Test* dan 5 (lima) Anggota Direksi lainnya masih menunggu proses *Fit and Proper test*.
- Berdasarkan RUPSLB tanggal 27 November 2019 telah ditunjuknya susunan Dewan Komisaris baru dimana untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan, telah ditetapkan PIC untuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi secara lisan, namun belum terdapat keputusan secara tertulis sampai dengan keputusan persetujuan OJK atas *Fit & Proper Test*.

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Terdapat 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris dan 5 (lima) orang Direksi yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

d. Kekuatan

Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Pengambilan keputusan strategis diambil melalui Rapat Direksi. Setiap Rapat Direksi telah dilengkapi dengan notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Data Posisi 31 Desember 2019 Direksi telah melakukan Rapat Internal Direksi sebanyak 281 kali dan Rapat Internal Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 51 kali.
- Keputusan Rapat Direksi telah diimplementasikan dengan membuat Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi yang mencakup pengaturan di bidang perkreditan, pendanaan, pelaksanaan *risk management*, operasional serta kebijakan kepegawaian untuk mendukung aktivitas usaha Bank sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi sebanyak 93 ketentuan.
- Meningkatkan kompetensi dan *skill* pegawai melalui pelaksanaan *training*/sosialisasi/seminar baik internal maupun eksternal. Salah satu *concern* peningkatan kompetensi pegawai adalah terkait analisa penyelamatan kredit (analisis *cashflow*), melalui pemberian pendidikan/*refreshment* pegawai serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan proses novasi. Sampai dengan 31 Desember 2019 metode pembelajaran dengan *Classroom* sebanyak 28.171 pegawai, metode pembelajaran *E-Learning* sebanyak 50,780 pegawai dan sertifikasi UKMR sebanyak 2073.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan dibantu oleh Komite-komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Direksi berkomitmen menjalankan kepengurusan perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap lini usaha. Untuk tahun 2019, penguatan program budaya kerja ditekankan pada internalisasi perilaku Integritas (jujur, konsisten dan disiplin dalam bekerja), Inovasi (kreatif dan penyempurnaan yang bernilai tambah) dan *Leadership* (*role model*, budaya supervisi dan *coaching*).
- Satuan Kerja *Audit Intern* senantiasa menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Satuan Kerja *Audit Intern* telah melakukan perbaikan melalui:
 - Pemeriksaan/*Audit General* terhadap permasalahan peningkatan kredit berkualitas rendah, restrukturisasi berulang, restrukturisasi *balloon payment*, proses debitur FLPP, Novasi Kredit, permasalahan ketidaksesuaian angsuran atau minimnya penerimaan angsuran dan tingginya LAT.
 - Melakukan *rootcause analysis*, Audit Tematik (skala prioritas), telaah awal maupun dilakukan investigasi (Audit Khusus).
 - Peningkatan intensitas pemeriksaan area kritis.
 - Melaksanakan audit tematik tahun 2019 dengan fokus kualitas kredit, pembiayaan Syariah, IT, Human Capital, Pendanaan, CASA dan *Fee Based Income*.
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada Komite Disiplin.
- *Audit Eksternal* dilaksanakan dengan profesional, tanpa intervensi, dan dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan terlisensi oleh OJK.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu *concern* penguatan kepada pihak terkait melalui mekanisme ketentuan POJK.
- Atas temuan OJK, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan proses tata kelola perkreditan diantaranya pengelolaan portofolio kredit bank, upaya penyelesaian kredit bermasalah, pembaharuan ketentuan kewenangan restrukturisasi berulang, novasi, penyempurnaan petunjuk akuntansi perlakuan *deferred interest*, kebijakan pembentukan kecukupan CKPN, jumlah penyelesaian dokumen pokok yang lewat ambang toleransi (LAT) dan penyelesaian permasalahan *Fraud* Internal dan Eksternal, Penutupan Menu 32 untuk aktifitas restrukturisasi, *enhancement* dan *launching* aplikasi BDS.
- Komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah tindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

b. Faktor-faktor Negatif

Pengendalian Internal perlu peningkatan fungsi supervisi serta *risk awareness* dan *risk awareness*, untuk mengurangi temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan *fraud*. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- Budaya risiko dan budaya kepatuhan dalam seluruh aspek operasional Bank masih perlu ditingkatkan.
- Perlu adanya pemenuhan kuantitas SDM sesuai kebutuhan organisasi saat ini dan masa mendatang sesuai rencana bisnis Bank.
- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM diantaranya melalui peningkatan kompetensi teknis operasional dan fungsi supervisi pada setiap aktivitas pengelolaan operasional Bank.
- Perlu adanya optimalisasi fungsi *Risk Management*, *Compliance*, dan *Internal Audit*.
- Meningkatkan Pemahaman terhadap ketentuan/SOP dan masih lemahnya supervisi atasan serta *risk awareness* dan *compliance culture* yang masih rendah.



d. Kekuatan

- Bank BTN berkomitmen untuk menciptakan budaya risiko dan budaya kepatuhan melalui program-program budaya perusahaan yang telah diimplementasikan.
 - Bank BTN berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan operasional bank, baik melalui pemenuhan kebutuhan jumlah, kompetensi, kemampuan supervisi SDM serta perbaikan proses bisnis bank (*Business Process Improvement*).
 - Bank BTN berkomitmen untuk *Governance Risk and Compliance* (iGRC) *framework* dengan mengoptimalkan fungsi *Three Lines of Defence*.
 - Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal, tersebut melalui : *Training*/sosialisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, Pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM. menyempurnakan Tata Kelola Perusahaan salah satunya melalui *implementasi Integrated*
-

3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Hasil Tata Kelola secara umum Memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas serta mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
- Bank telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
- Bank telah melaksanakan *assessment/audit* secara obyektif.
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, Peraturan Pasar Modal, Perpajakan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Peraturan Perundangan lainnya.
- Bank telah melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen.

b. Faktor-faktor Negatif

- Masih terdapat denda, terkait laporan eksternal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat kepada BI/OJK dimana nilainya makin meningkat akibat keterlambatan pelaporan, kesalahan pelaporan dan tidak melakukan pelaporan eksternal, data posisi Desember 2019 adalah Rp. 291.830.600,- meningkat sebesar 382,97% dari tahun 2018 sebesar Rp. 60.423.548.-
- Terdapat kasus *Fraud* yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara komprehensif. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah *fraud* sebanyak 39 kasus dibandingkan tahun 2018 sebanyak 24 kasus.
- Permasalahan hukum pada Tahun 2019 sebanyak 568 kasus yang terdiri dari 358 kasus perdata, 206 kasus pidana dan 4 kasus hubungan industrial.
- Kinerja secara umum belum memenuhi target.

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- Kualitas data dan dukungan teknologi manajemen sistem informasi Bank yang masih perlu ditingkatkan.
- Perlu optimalisasi strategi *anti fraud* melalui sinergi *three lines of defence*, terutama dalam pilar pencegahan berupa *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
- Perlu evaluasi pelaksanaan dan perbaikan serta penyempurnaan strategi dan proses bisnis untuk menjamin kinerja Bank sesuai dengan rencana bisnis Bank.

d. Kekuatan

- Memperkuat pertumbuhan dan profitabilitas bisnis.
 - Memperkuat *positioning* bisnis KPR di segmen *mass*, pada tahun 2019 penyaluran KPR sebesar Rp. 27.964 M tercapai sebesar 97.71% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar Rp. 27.325 M
 - Memaksimalkan potensi bisnis nasabah eksisting.
 - Pertumbuhan CASA sebesar 43.37% tercapai sebesar 98.33% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar 44,11% dan FBI sebesar Rp. 2.125 M tercapai 86.57% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar Rp. 2.455 M.
-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

- Mendukung pengembangan digital banking dan digitalisasi proses untuk proses yang lebih efisien.
 - *Funding* : BTN *Mobile Banking*, BTN *Internet Banking*, BTN *Cash Management System*, E-retribusi pasar BTN, Fitur *QR Pay*.
 - *Lending* : BTN Properti (www.btn.co.id), Rumah Murah (www.rumahmurahbtn.co.id), *Smart Collection*.
- Mengedepankan prinsip GCG pada proses bisnis.
- Perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan membangun budaya menghadapi *disruptive innovation*.
 - Membangun manajemen *top talent* dan suksesi.
 - Menyusun *strategic man power planning* dengan strategi alokasi pareto.
 - Memperkuat *employer branding* melalui program rekrutmen yang terarah untuk mendapatkan *top talent*.
 - Penguatan manajemen berbasis kinerja.
 - Program budaya yang mendorong peningkatan kinerja.
- Bank BTN telah menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang selaras dengan visi dan misi Bank.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, di antaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index*

selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum.

RATING GCG - CGPI AWARD 2019

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a. *Self Assessment*; dan
 - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan *Assessment*

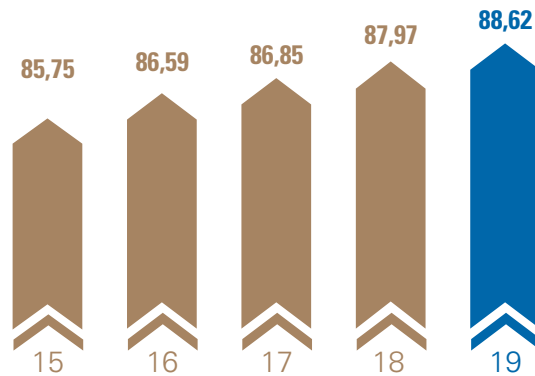
Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2019 sebesar 88,62 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Adapun hasil penilaian CGPI selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



SKOR PENILAIAN GCG CGPI 2015-2019



REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Struktur Tata Kelola	
Direkomendasikan Perseroan memperhatikan dan mengelola hak Pemegang Saham minoritas dengan mengakomodasi aspirasi Pemegang Saham Minoritas dalam pemilihan Komisaris Independen.	Dalam RUPS, seluruh pemegang saham yang hadir berhak memberikan suara untuk agenda pemilihan.
Direkomendasikan Perseroan perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi.	Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Pemegang Saham dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan Memperhatikan keberagaman dari sisi independensi, keahlian/Pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin serta mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Organ Pendukung Dewan Komisaris sesuai dengan perkembangan peraturan dan pedoman yang berlaku serta dinamika bisnis.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya mengatur terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.
Direkomendasikan Perseroan perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Perseroan telah mencanangkan transformasi yang didukung oleh pengembangan model operasi baru yang mencakup: 1. <i>Business Process Improvement</i>. 2. <i>Network & Distribution Design</i>. 3. Menyempurnakan <i>organisation design</i> seperti meningkatkan peran risk management dan peningkatan kapasitas human capital.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Direkomendasikan Perseroan perlu menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris berdasarkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait pada pembagian tugas Direksi sesuai kebutuhan secara komprehensif dan efektif.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya mengatur terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait pada pembagian tugas Direksi.
Proses Tata Kelola	
Direkomendasikan Perseroan mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang memberikan nilai tambah pada Pemegang Saham perusahaan.	Perseroan senantiasa telah menyempurnakan <i>Standard Operating Procedure Corporate Secretary</i> yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan RUPS.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Perseroan senantiasa telah menyempurnakan pengembangan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian intern perusahaan yang komprehensif, melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya serta melaporkannya secara berkala.	Evaluasi atas efektivitas system pengendalian internal (<i>Risk Control</i>) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui komite audit.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia (<i>human capital information system</i>) secara terintegrasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan system informasi sumber daya manusia secara integrasi melalui IBES.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala termasuk pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan.	Perseroan senantiasa selalu melakukan evaluasi dan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan secara berkala.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala termasuk pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan.	Perseroan senantiasa selalu melakukan evaluasi dan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan secara berkala.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan standarisasi terhadap produk/jasa dan sistem manajemen/kerja berdasarkan standarisasi nasional (seperti SNI) dan global (seperti ISO) maupun sektoral (Basel).	Perseroan sudah mengembangkan standarisasi seperti ISO 90001 : 2015
Direkomendasikan Perseroan perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah yang tidak hanya secara individual tapi juga di tingkatan perusahaan seperti inovasi yang bersifat <i>quantum leap/breakthrough</i> untuk perusahaan.	Perseroan senantiasa meningkatkan inovasi yang dari insan bisnis yang dapat dikembangkan di tingkat perusahaan.
Perseroan senantiasa meningkatkan inovasi yang dari insan bisnis yang dapat dikembangkan di tingkat perusahaan.	Perseroan telah melakukan analisis dan evaluasi atas pemetaan perencanaan strategis bisnis perusahaan kepada stakeholder.



TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan kebijakan, sistem dan program keuangan berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>) perbankan.	Perseroan senantiasa membuat rancangan kebijakan, prosedur dan sistem serta menerapkan program <i>sustainable finance</i> . Selain itu Bank BTN telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2019 yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi implementasi Keuangan Berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>).
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pemantapan budaya perusahaan serta evaluasi pengukuran implementasi budaya perusahaan.	Perseroan senantiasa mengembangkan budaya kerja perusahaan pada tahun 2019 dengan menyusun program kerja budaya Bank BTN dan dilakukan evaluasi pada setiap bulan.

Hasil Tata Kelola

Dari tren kinerja keuangan Bank BTN selama 5 tahun terakhir didapati mengalami peningkatan dan penurunan, oleh karena ini Bank BTN perlu melakukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan <i>review</i> secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku guna mendukung strategi pertumbuhan kinerja.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan	Perseroan senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses bisnis guna menghindari permasalahan hukum. Bank BTN juga memiliki unit khusus penanganan masalah hukum baik ditingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
Direkomendasikan Perseroan meningkatkan komunikasi dan pemahaman karyawan terhadap pedoman etika untuk mengurangi terjadinya pelanggaran etika.	Perseroan senantiasa konsisten mengadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait pedoman etika.

PENILAIAN GCG BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di wilayah ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard meliputi:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Praktik Tata Kelola yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard diperoleh melalui *Third Party Assessment*. Salah satu lembaga independen yang melakukan penilaian ASEAN CG Scorecard adalah ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Skor Penilaian

Hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk tahun 2019 sampai dengan penyusunan Laporan Tahunan ini belum dipublikasikan oleh ACMF. Adapun hasil penilaian pada tahun 2018, Perseroan berhasil meraih TOP 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs) dan TOP 3 PLCs Indonesia pada ajang Corporate Governance Awards 2018 dari ASEAN Corporate Governance dan ACMF.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

Uraian Pernyataan Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman *Corporate Governance* berdasarkan ASEAN CG Scorecard sebagai berikut:

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
Level 1			
Bagian A Hak-hak Pemegang Saham			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	Comply	-
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental.	Comply	-
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	Comply	-
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan.	Comply	-
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	Comply	-
Bagian B Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham			
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	Comply	-
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	Comply	-
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	Comply	-
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran.	Comply	-
Bagian C Peran Pemangku Kepentingan			
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	Comply	-
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	Comply	-
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	Comply	-



Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	Comply	-

Bagian D Transparansi Dan Pengungkapan

D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Comply	-
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	Comply	-
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	Comply	-
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Comply	-
D.6	Media Komunikasi	Comply	-
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan	Comply	-
D.8	Situs Perseroan	Comply	-
D.9	Hubungan Investor	Comply	-

Bagian E Tanggung Jawab Dewan

E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Comply	-
E.2	Struktur Dewan	Comply	-
E.3	Proses Dewan	Comply	-
E.4	Posisi Dewan	Comply	-
E.5	Kinerja Dewan	-	Perseroan belum mengungkapkan penilaian, proses penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual.

Pada penilaian Bonus, beberapa item yang dapat dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
Level 2			
(B)C.1.1.	Perseroan mengadopsi kerangka Laporan Berkelanjutan yang berbasis internasional (seperti GRI, Integrated Reporting, SASB).	Comply	-
(B)D.1.1.	Jangka waktu diumumkannya laporan keuangan yang diaudit dalam waktu 60 hari terhitung dari akhir tahun buku.	Comply	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
(B)E.2.2.	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan <i>strategy map</i> yang ada.	Comply	-
(B)E.6.1.	Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko yang terpisah dari Dewan Komisaris.	Comply	-

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dari hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* di tahun 2018, terdapat beberapa rekomendasi dari pihak assessor terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

Tabel Rekomendasi dan Tindak lanjutnya

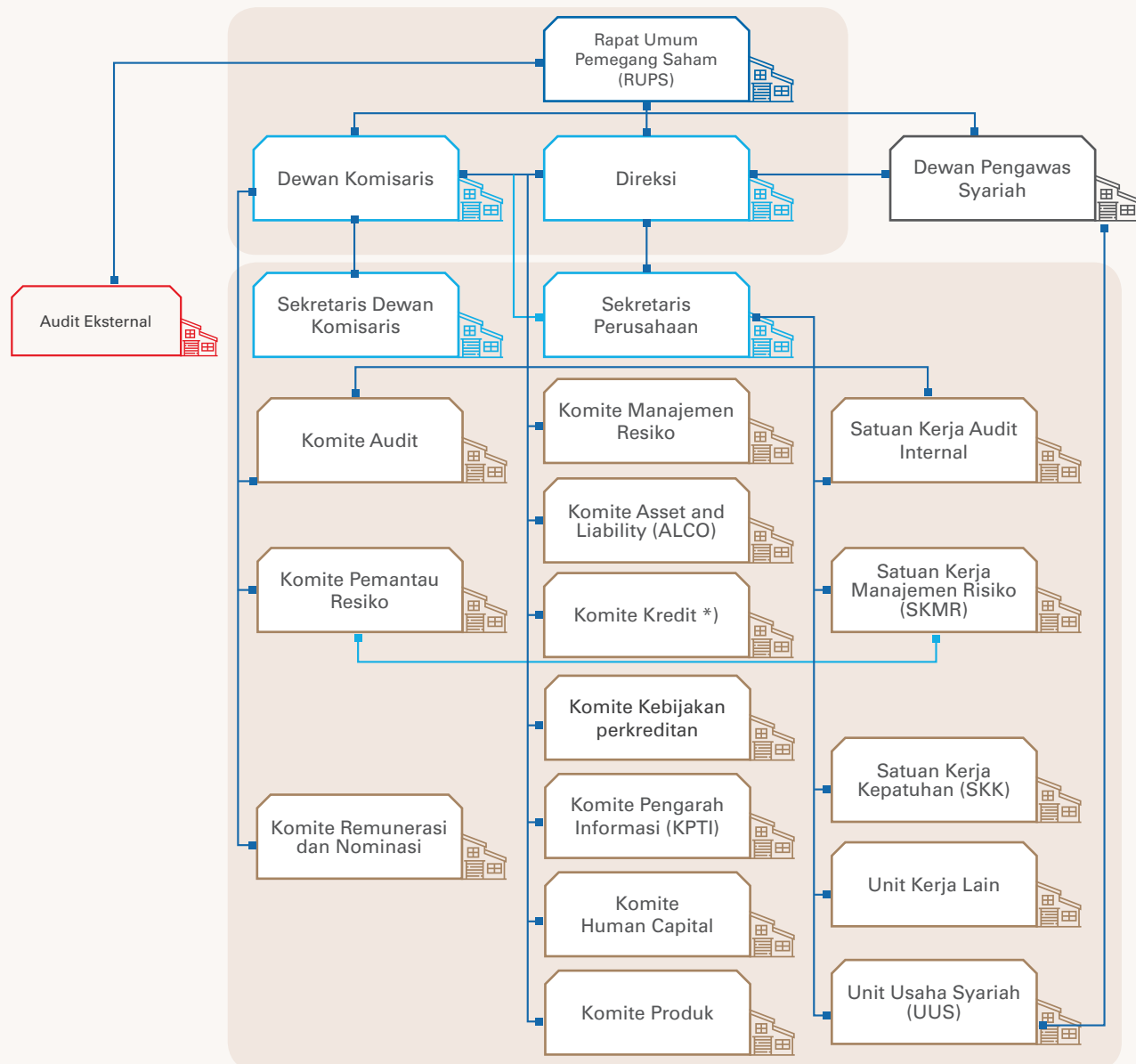
No.	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Perseroan agar mengungkapkan informasi Auditor eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS	Pada RUPS Tahunan 2019, Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai auditor eksternal pada Pemanggilan RUPS Tahunan.
2.	Perseroan diharapkan mempunyai kebijakan yang mengatur tugas Komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan <i>review</i> atas transaksi pihak terkait.	Perseroan telah melakukan <i>review</i> kebijakan Piagam Komite terkait ketentuan tersebut.
3.	Jumlah Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris > 50%	Pada tahun buku 2018, Perseroan telah memiliki komposisi Komisaris Independen dengan jumlah 5 orang dari total 9 orang anggota Dewan Komisaris.



STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA

Berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



*) Komite kredit telah dibuat dalam struktur organisasi Perseroan melalui ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/SIPD/2017 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat. Pada tingkat operasional, fungsi Komite Kredit tetap berjalan melalui pelaksanaan Rapat Direksi yang membawahi bidang kredit.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan tata kelola yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun best practices. *Governance Mechanism* dapat tercermin dalam berbagai kebijakan pokok GCG (*soft-structure* GCG) yang dimiliki Perseroan dalam implementasi GCG yang akan menjadi *living document* bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi Bank.

Desain kebijakan tata kelola Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/PPD/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang

disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2017 sebagai pembaharuan Board Manual yang menjadi pedoman kerja sebelumnya;

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/ CMPD/2017 sebagai pembaharuan Board Manual yang menjadi pedoman kerja sebelumnya;
4. Tata Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2017;
5. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/ CMPD/2015;
6. Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Edaran No. 68/DIR/CMPD/2017; dan
7. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistle Blowing System* – WBS) dan *Anti Fraud* yang telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi SE No. 21/DIR/ IAD/2014.

HUBUNGAN STRUKTUR, MEKANISME DAN HASIL TATA KELOLA



Governance Structure

- Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris, Komite- Komite dan satuan kerja cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- Tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi organ Perseroan memadai dan dilengkapi dalam kebijakan, pedoman dan tata tertib, prosedur dan sistem informasi telah tersedia dan mendukung kegiatan operasional.



Governance Process

- Pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab organ-organ Perseroan memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara *arm's length*.
- Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola.



Governance Outcome

- Kinerja Perseroan yang positif mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan.
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan situs *website* Perseroan yang informatif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen.
- Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.



MEKANISME TATA KELOLA

Mekanisme GCG merupakan proses penerapan prinsip yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan, sehingga menghasilkan yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Proses penerapan melekat pada struktur organ tata kelola yang meliputi RUPS,

Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit Eksternal dan Fungsi Manajemen Risiko.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

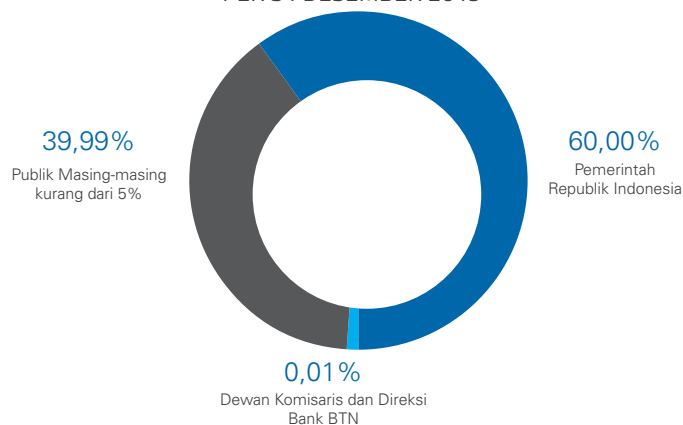
DEFINISI PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI BANK BTN

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sebagai pemilik modal, pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya atas dasar prinsip kewajaran (*fairness*) sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha Perseroan.

Sebagai bank Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan

adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 10.590.000.000 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham Seri B.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK BTN PER 31 DESEMBER 2019



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam tata kelola Perseroan yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk

mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan, serta dilakukan secara wajar dan transparan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

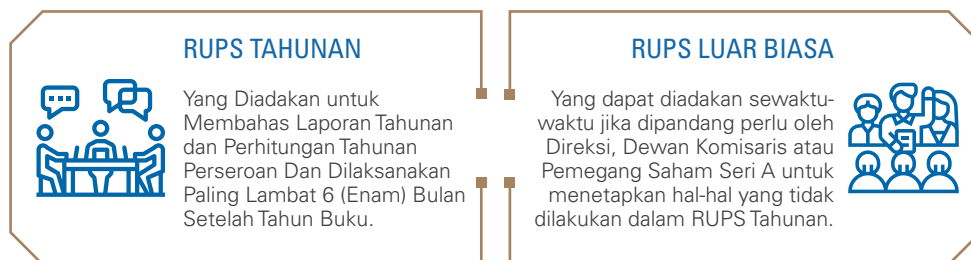
STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

DASAR HUKUM, DEFINISI, DAN JENIS RUPS

RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan/atau Anggaran Dasar. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

JENIS RUPS BERDASARKAN ANGGARAN DASAR BANK BTN



KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Hingga akhir tahun 2019, kegiatan komunikasi kepada pemegang saham

dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham. Kebijakan tersebut meliputi pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal secara terbuka.

HAK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

HAK DAN WEWENANG ISTIMEWA PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - Persetujuan perubahan Permodalan;
 - Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Persetujuan penggunaan laba; dan
 - Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
- Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; dan
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan.

Di luar hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama.



HAK YANG SAMA PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA DAN PEMEGANG SAHAM SERI B

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS;
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya; dan
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.

Mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah plafon (limit) hapus tagih;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang dilakukan tidak dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
4. Menyetujui tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

5. Menyetujui transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
6. Menyetujui untuk melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
7. Melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor;
8. Melakukan perubahan Anggaran Dasar; dan
9. Memutuskan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran.

Adapun tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham antara lain untuk:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perbankan; dan
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

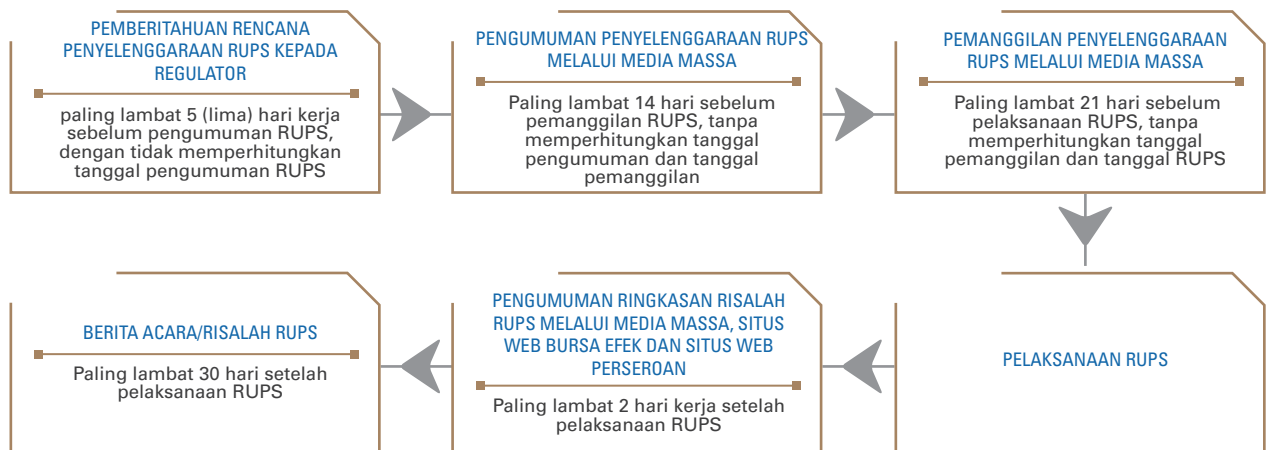
STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPATUHAN PENYELENGGARAAN RUPS BAGI PERUSAHAAN PUBLIK

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta peraturan perubahannya melalui POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan POJK No. 32/POJK.04/2014. Adapun

tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta peraturan perubahannya melalui POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS BAGI PERUSAHAAN PUBLIK



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan melakukan pengumuman ringkasan risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

KUORUM RUPS

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

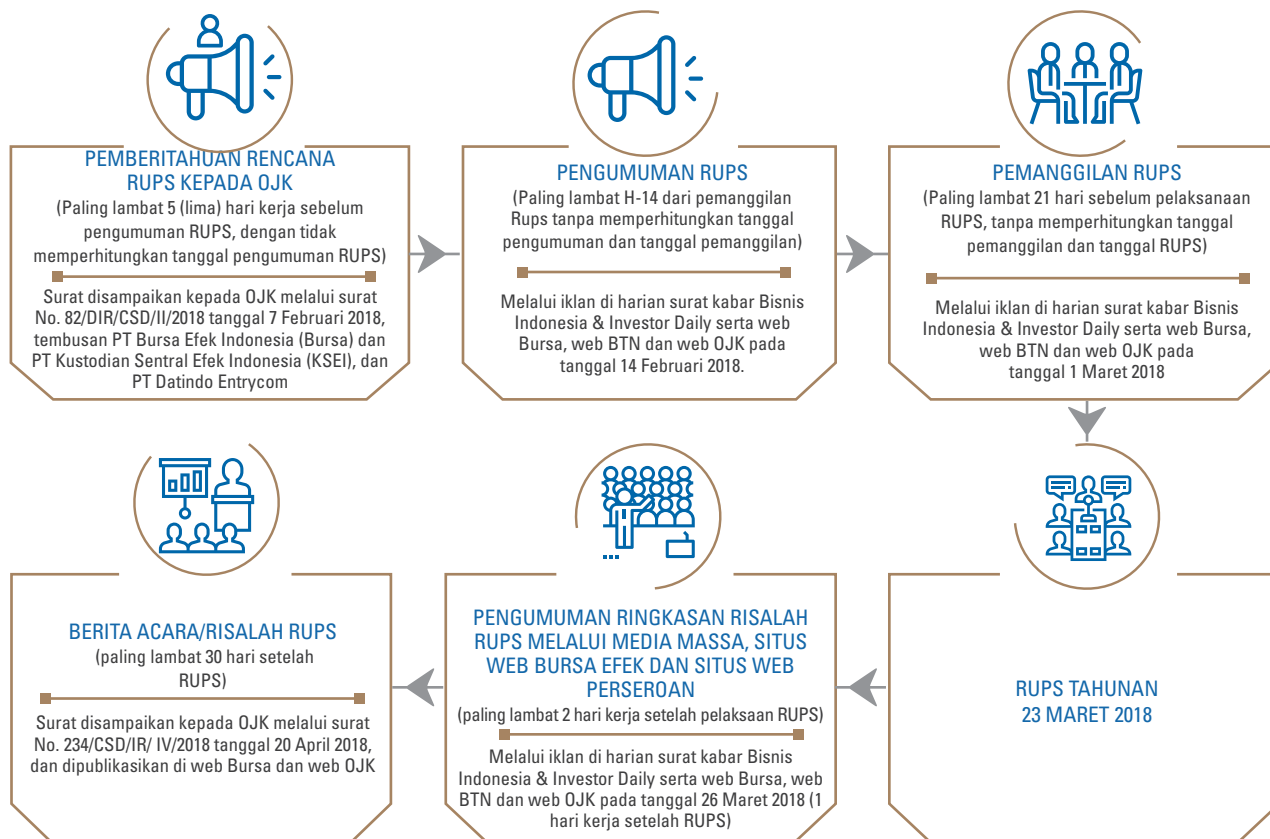
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan secara wajar dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan.

**PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018 DAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL RUPS TAHUN 2018**

Di sepanjang tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan untuk pertanggungjawaban Tahun Buku 2017 pada tanggal 23 Maret 2018.

RUPS Tahunan 2018

Hari/Tanggal	: Jumat, 23 Maret 2018
Waktu	: Pukul 14:51 WIB s.d 17:37 WIB
Tempat	: Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2018

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit
Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2018 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Perseroan No. 42/KOM/BTN/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Pimpinan RUPST 2018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, RUPS Tahunan 2018 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite Audit Perseroan dengan rincian sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS TAHUNAN 2018**

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/Independen	✓
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	✓
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	✓
Garuda Wiko	Komisaris Independen	✓
Sumiyati	Komisaris	✓
Maurin Sitorus	Komisaris	✓
Iman Sugema	Komisaris	✓
Maryono	Direktur Utama	✓
Iman Nugroho Soeko	Direktur Finance & Treasury	✓
Adi Setianto	Direktur IT & Operation	✓
Oni Febriarto Rahardjo	Direktur Commercial Banking	✓
Budi Satria	Direktur Consumer Banking	✓
R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Strategy, Compliance & Risk	✓
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Collection, Asset Management & Legal	✓
Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	✓
Kamaruddin Sjam	Ketua Komite Audit	✓
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota Komite Audit	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota Komite Audit	✓
Garuda Wiko	Anggota Komite Audit	✓
Sondang Gayatri	Anggota Komite Audit	✓
Rachmat Supratman	Anggota Komite Audit	✓
Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	✓

✓ = hadir | ✗ = tidak hadir

2. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.985.474.653 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 84,85% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat,

yaitu sejumlah 10.590.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 10.589.999.999 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.



3. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat kedelapan dilakukan pemungutan suara secara terbuka dimana Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan mata acara Rapat kesepuluh dan kesebelas dilakukan pemungutan suara secara tertutup dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara

dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas pada saat registrasi, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik. Untuk mata acara Rapat kesembilan, tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

4. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKn.

5. Akta Hasil Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPSTahunan 2018 telah dituangkan melalui Akta "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", No. 91/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, MKn., Notaris di Jakarta.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Hasil keputusan RUPS Tahunan 2018 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan dapat dilihat di bawah ini.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahunan 2018, 23 Maret 2018	Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS
1	a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5666/PSS/2018 tanggal 14 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. b. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5817/PSS/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. c. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquite at de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Telah direalisasikan
2	Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp3.027.466.149.252 sebagai berikut: a. Dividen sebesar 20% atau Rp605.493.229.850,40 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp363.295.937.910,24 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah Nomor: 502.000000980 di Bank Indonesia. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sebesar 80% atau Rp2.421.972.919.401,60 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.	Telah direalisasikan



KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahunan 2018, 23 Maret 2018	Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS
3	a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	Telah direalisasikan
4	a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.	Telah direalisasikan
5	Menyetujui dokumen Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.	Telah direalisasikan
6	a. Menyetujui Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan minimal sebesar 107% (seratus tujuh persen). b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan peningkatan manfaat pensiun dan/atau pemberian manfaat lain atas dasar dan dengan memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut: • Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain sebagaimana dimaksud pada nomor 1. • Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan beban/kewajiban akuntansi PSAK No.24 bagi Perseroan.	Telah direalisasikan
7	a. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.	Telah direalisasikan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahunan 2018, 23 Maret 2018	Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS
8	a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan Rapat. b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	Telah direalisasikan
9	Mata acara Rapat kesembilan bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.	Telah direalisasikan
10	a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan: • Sdr. Ahmad Nazri Adlani sebagai Ketua • Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota • Sdr. Muhammad Syakir Sula sebagai Anggota Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. b. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah: • Sdr. M. Quraish Shihab sebagai Ketua • Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota • Sdr. Muhammad Gunawan Yasni sebagai Anggota Dengan ketentuan bahwa pengangkatan yang bersangkutan kecuali Sdr. Mohamad Hidayat akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. c. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. d. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.	Telah direalisasikan



KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahunan 2018, 23 Maret 2018	Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS

- 11
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur IT & Operation, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
 - Merubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Collection, Asset Management & Legal	Direktur Collection & Asset Management
	Direktur Strategic Human Capital
 - Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L.P. Napitupulu yang semula Direktur Collection, Asset Management & Legal menjadi Direktur Collection & Asset Management dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sejak keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
 - Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Operation;
 - Sdr. Yossi Istanto sebagai Direktur Strategic Human Capital.
 - Mengangkat Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Perseroan.
 - Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4 dan 5 maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Sdr. Maryono
Direktur Finance & Treasury	Sdr. Iman Nugroho Soeko
Direktur IT & Operation	Sdr. Andi Nirwoto
Direktur Commercial Banking	Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking	Sdr. Budi Satria
Direktur Strategy, Compliance & Risk	Sdr. R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection & Asset Management	Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Distribution & Network	Sdr. Dasuki Amsir
Direktur Strategis Human Capital	Sdr. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahunan 2018, 23 Maret 2018	Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS
Komisaris		Telah direalisasikan
Jabatan	Nama	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Sdr. I Wayan Agus Mertayasa	
Komisaris	Sdr. Iman Sugema	
Komisaris	Sdr. Maurin Sitorus	
Komisaris	Sdri. Sumiyati	
Komisaris	Sdr. Parman Nataatmadja	
Komisaris Independen	Sdr. Arie Coerniadi	
Komisaris Independen	Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata	
Komisaris Independen	Sdr. Kamaruddin Sjam	
Komisaris Independen	Sdr. Garuda Wiko	
h. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) terhadap calon-calon Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp605.493.229.850,40 atau sebesar Rp57,175942 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, di bawah ini disajikan informasi tindak lanjut Perseroan terkait jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2017.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017
(REALISASI HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KE-2 RUPS TAHUNAN 2018, 23 MARET 2018)

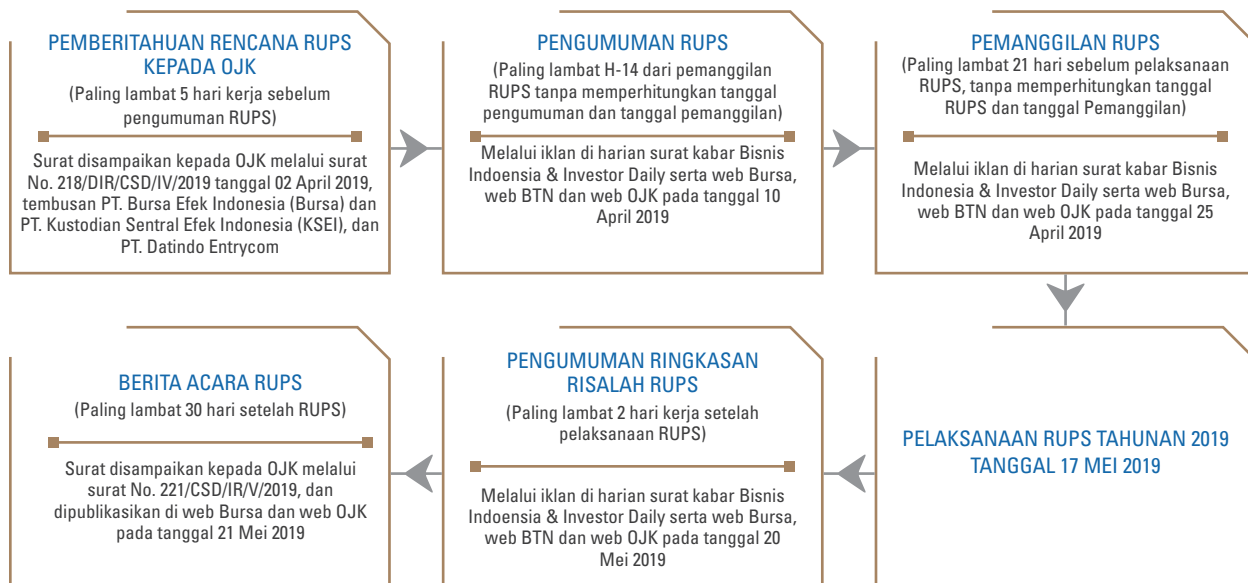
No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	2 April 2018 5 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	3 April 2018 6 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Record Date</i>)	5 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	24 April 2018

**PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL RUPS TAHUN 2019**

Di tahun 2019, Perseroan melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk pertanggungjawaban Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019, dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019 dan 27 November 2019.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019, 17 Mei 2019

Hari/Tanggal	: Jumat, 17 Mei 2019
Waktu	: Pukul 14:30 WIB s.d 16:56 WIB
Tempat	: Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2019

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit
Rapat dipimpin oleh I Wayan Agus Mertayasa selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2019 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 58/KOM/BTN/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Pimpinan RUPS Tahunan 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS TAHUNAN 2019

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/Independen	✓
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	✓



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS TAHUNAN 2019**

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	✓
Garuda Wiko	Komisaris Independen	✓
Sumiyati	Komisaris	✓
Maurin Sitorus	Komisaris	✓
Iman Sugema	Komisaris	✓
Maryono	Direktur Utama	✓
Iman Nugroho Soeko	Direktur Finance & Treasury	✓
Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	✓
Oni Febriarto Rahardjo	Direktur Commercial Banking	✓
Budi Satria	Direktur Consumer Banking	✓
R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Strategy, Compliance & Risk	✓
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Collection & Asset Management	✓
Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	✓
Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	✓
Kamaruddin Sjam	Ketua Komite Audit	✓
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota Komite Audit	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota Komite Audit	✓
Garuda Wiko	Anggota Komite Audit	✓
Rachmat Supratman	Anggota Komite Audit	✓
Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	✓

✓ = hadir | ✗ = tidak hadir

Dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir yaitu Parman Nataatmadja dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank BRI Syariah Tbk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BRI Syariah Tbk tanggal 29 April 2019 sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Perseroan sebanyak 8 (delapan) orang.

2. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.651.824.525 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 81,70% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 saham yang terdiri dari:



- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
 - b. 10.589.999.999 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.
3. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan, kecuali untuk mata acara Rapat kelima tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.
 4. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat, serta mata acara Rapat keenam pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat. Khusus untuk mata acara Rapat ketujuh, pemungutan suara dilakukan secara tertutup, Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas Rapat pada saat registrasi sebelumnya, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.
 5. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKn.
 6. Akta Hasil Keputusan RUPS
Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019 telah dituangkan melalui Akta "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", No. 97 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, MKn., Notaris di Jakarta.

Hasil keputusan RUPS Tahunan 2019 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan dapat dilihat di bawah ini:

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Jumlah Penanya:

1 (satu) orang

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju : 8.632.763.529 (99,78%)
Tidak Setuju : Nihil
Abstain : 19.060.996 (0,22%)

Keputusan:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/07/07032/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. 00654/2.1032/AU.2/10/0703-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Telah terealisasi.

Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju : 8.643.826.120 (99,91%)
Tidak Setuju : 7.621.100 (0,09%)
Abstain : 377.305 (0,00%)

Keputusan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.807.921.063.074,00 sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 20% atau Rp561.584.212.615,00 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp336.950.527.569,00, akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% atau Rp2.246.336.850.459,00 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

**KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019****Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat****Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp561.584.212.615,00 atau sebesar Rp53,029671 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, di bawah ini disajikan informasi tindak lanjut Perseroan terkait jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2018.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Mei 2019 29 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	28 Mei 2019 31 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Record Date)	29 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	12 Juni 2019

Mata Acara 3:

Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat penanya

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju : 8.610.196.157 (99,52%)
Tidak Setuju : 40.648.463 (0,47%)
Abstain : 979.905 (0,01%)

Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Surat Dewan Komisaris No. 083/KOM/BTN/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara 4:

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat penanya

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	: 8.189.716.596 (94,66%)
Tidak Setuju	: 385.321.593 (4,45%)
Abstain	: 76.786.336 (0,89%)

Keputusan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) telah ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019 melalui PKS Nomor 24/SPP/PGSD/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Mata Acara 5:

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

Keputusan:

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja serta mengingat perlunya persetujuan dari Regulator, untuk itu Perseroan akan melakukan kajian kembali terhadap rencana pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan, maka untuk Mata Acara Kelima dari Rapat tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Perseroan mempertimbangkan adanya rencana strategis Kementerian BUMN untuk menyatukan Dana Pensiun yang dikelola masing-masing perusahaan BUMN sehingga Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan tidak ditindaklanjuti.

**KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019****Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat****Mata Acara 6:**

Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management.

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju : 6.887.596.349 (79,61%)
 Tidak Setuju : 1.550.036.176 (17,92%)
 Abstain : 214.192.000 (2,47%)

Keputusan:

- Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PNM") dalam PT PNM Investment Management ("PNMIM"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 85% atau setara dengan 93.500 lembar saham yang akan dilaksanakan secara bertahap.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan saham PNM dalam PNMIM, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Rencana pembelian tahap I sebesar 30% saham PNM pada PT.PNMIM masih dalam proses menunggu persetujuan OJK.

Mata Acara 7:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju : 7.081.219.844 (81,85%)
 Tidak Setuju : 1.550.490.976 (17,92%)
 Abstain : 20.113.705 (0,23%)

Keputusan:

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Iman Nugroho Soeko sebagai Direktur Finance & Treasury, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Strategy, Compliance & Risk	Direktur Compliance
Direktur Finance & Treasury	Direktur Finance, Treasury & Strategy



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN 17 MEI 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

- Mengalihkan penugasan Sdr. R. Mahelan Prabantarikso yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dari semula sebagai Direktur Strategy, Compliance & Risk menjadi Direktur Compliance dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan tersebut, serta menugaskan Sdr. Nixon L.P Napitupulu untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Finance, Treasury & Strategy selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Collection & Asset Management sampai dengan diangkatnya Direktur Finance, Treasury & Strategy yang definitif.
- Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Sdr. Maryono

Direktur Commercial Banking: Sdr. Oni Febriarto R.

Direktur Consumer Banking: Sdr. Budi Satria

Direktur Compliance: Sdr. R. Mahelan Prabantarikso

Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy: Sdr. Nixon L.P Napitupulu

Direktur Distribution & Network: Sdr. Dasuki Amsir

Direktur Strategic Human Capital: Sdr. Yossi Istanto

Direktur IT & Operation: Sdr. Andi Nirwoto

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat Ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Sdr. I Wayan Agus Mertayasa sebagai Komisaris Utama/Independen
 - Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Komisaris
 - Sdr. Maurin Sitorus sebagai Komisaris

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

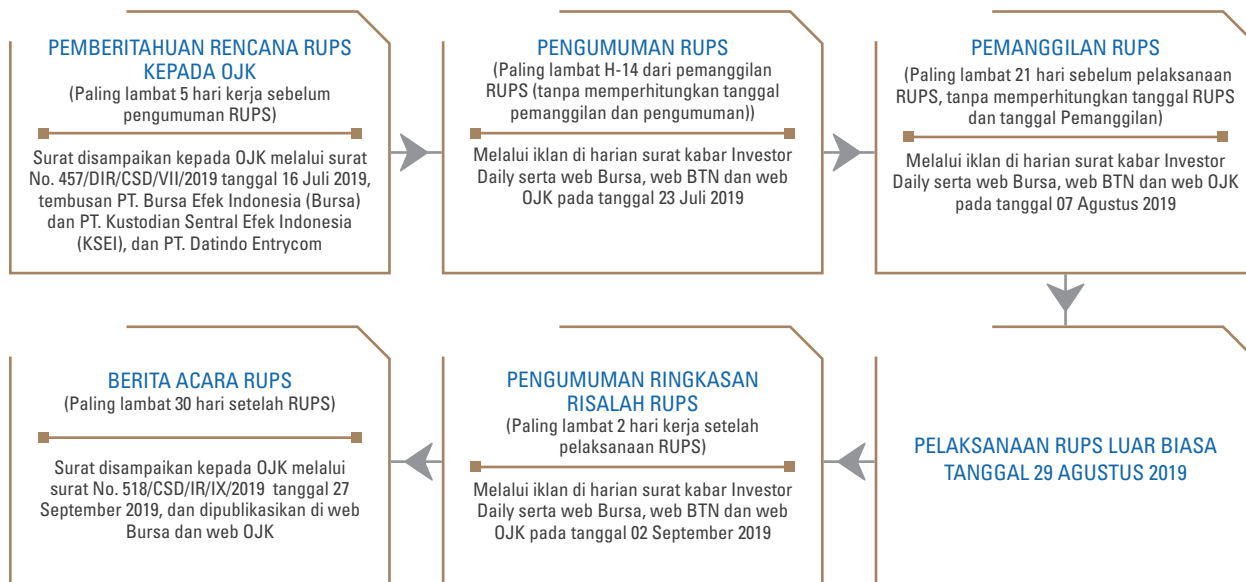
- Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Sdr. Asmawi Syam sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris
- Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Asmawi Syam
 - Komisaris : Iman Sugema
 - Komisaris : Eko D. Heripoerwanto
 - Komisaris : Sumiyati
 - Komisaris Independen: Garuda Wiko
 - Komisaris Independen: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
 - Komisaris Independen: Kamaruddin Sjam
 - Komisaris Independen: Arie Coerniadi
- Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Telah terealisasi.

**Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019**

Hari/Tanggal	: Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu	: Pukul 15:35 WIB s.d 17:04 WIB
Tempat	: Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit
Rapat dipimpin oleh Sdr. Kamaruddin Sjam selaku Komisaris Independen yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 113/KOM/BTN/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pimpinan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
Asmawi Syam	Komisaris Utama/Independen	✓
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	✓
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	✓



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019**

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
Garuda Wiko	Komisaris Independen	✓
Sumiyati	Komisaris	✓
Iman Sugema	Komisaris	✓
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	✓
Maryono	Direktur Utama	✓
Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	✓
Oni Febriarto Rahardjo	Direktur Commercial Banking	✓
Budi Satria	Direktur Consumer Banking	✓
R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Compliance	✓
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy	✓
Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	✓
Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	✓
Kamaruddin Sjam	Ketua Komite Audit	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota Komite Audit	✓
Garuda Wiko	Anggota Komite Audit	✓
Rachmat Supratman	Anggota Komite Audit	✓
Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	✓

- Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.725.174.686 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 82,39% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 saham yang terdiri dari:
 - 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 10.589.999.999 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.
- Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan

Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara tertulis setelah pembahasan mata acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara, kecuali untuk mata acara Rapat pertama tidak dilakukan sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk mata acara Rapat pertama tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan. Untuk mata acara Rapat kedua pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta



mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat. Untuk mata acara Rapat ketiga, pemungutan suara dilakukan secara tertutup, Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas Rapat pada saat registrasi sebelumnya, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.

4. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo

Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKn.

5. Akta Hasil Keputusan RUPS
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019 telah dituangkan melalui Akta "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", No. 457/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan dapat dilihat di bawah ini.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya

Mata Acara 1:

Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Jumlah Penanya, Hasil Penghitungan Suara, dan Keputusan:

Tidak dilakukan sesi tanya jawab, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Tidak diperlukan.

Mata Acara 2:

Rencana Pembelian Saham Perusahaan Modal Ventura Secara Bertahap.

Jumlah Penanya:

Terdapat 5 (lima) penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	: 7.112.342.637 (81,51%)
Tidak Setuju	: 1.594.711.649 (18,28%)
Abstain	: 18.120.400 (0,21%)

Keputusan:

- Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT Sarana Papua Ventura ("SPV"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 90% yang akan dilaksanakan secara bertahap.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan saham SPV, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Masih dalam proses negosiasi dengan PT Bahana Arta Ventura sebagai pemegang saham PT SPV.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya

Mata Acara 3:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya:

Terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	: 7.110.989.746 (81,50%)
Tidak Setuju	: 1.595.911.930 (18,29%)
Abstain	: 18.273.010 (0,21%)

Keputusan:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sumiyati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Sdr. Marwanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
Pengangkatan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Asmawi Syam
Komisaris	: Iman Sugema
Komisaris	: Eko D. Heripoerwanto
Komisaris	: Marwanto
Komisaris Independen	: Garuda Wiko
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maryono sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L.P Napitupulu yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017 yang semula sebagai Direktur Collection & Asset Management menjadi Direktur Finance, Treasury, & Strategy, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - b. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Collection & Asset Management.

**KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA 29 AGUSTUS 2019****Mata Acara Rapat dan Keputusannya**

4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama: Suprajarto
 - b. Direktur Strategic Human Capital: Yossi Istanto
 - c. Direktur Consumer Banking: Budi Satria
 - d. Direktur Commercial Banking: Oni Febriarto R.
 - e. Direktur Collection & Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti
 - f. Direktur IT & Operation: Andi Nirwoto
 - g. Direktur Distribution & Network: Dasuki Amsir
 - h. Direktur Finance, Treasury, & Strategy: Nixon L.P Napitupulu
 - i. Direktur Compliance: R. Mahelan Prabantarikso
5. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Direksi Perseroan menerima surat pengunduran diri Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan tertanggal 29 Agustus 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, mengacu Pasal 12 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan menunjuk Sdr. Oni Febriarto R., Direktur Commercial Banking, bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menjalankan tugas-tugas Direktur Utama Perseroan. Mengacu pasal 11 ayat (22) huruf a, Perseroan menyelenggarakan RUPS tanggal 27 November 2019 untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Sdr. Suprajarto.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 27 November 2019

Hari/Tanggal	: Rabu, 27 November 2019
Waktu	: Pukul 15:18 WIB s.d 16:07 WIB
Tempat	: Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130



Pendukung Bisnis

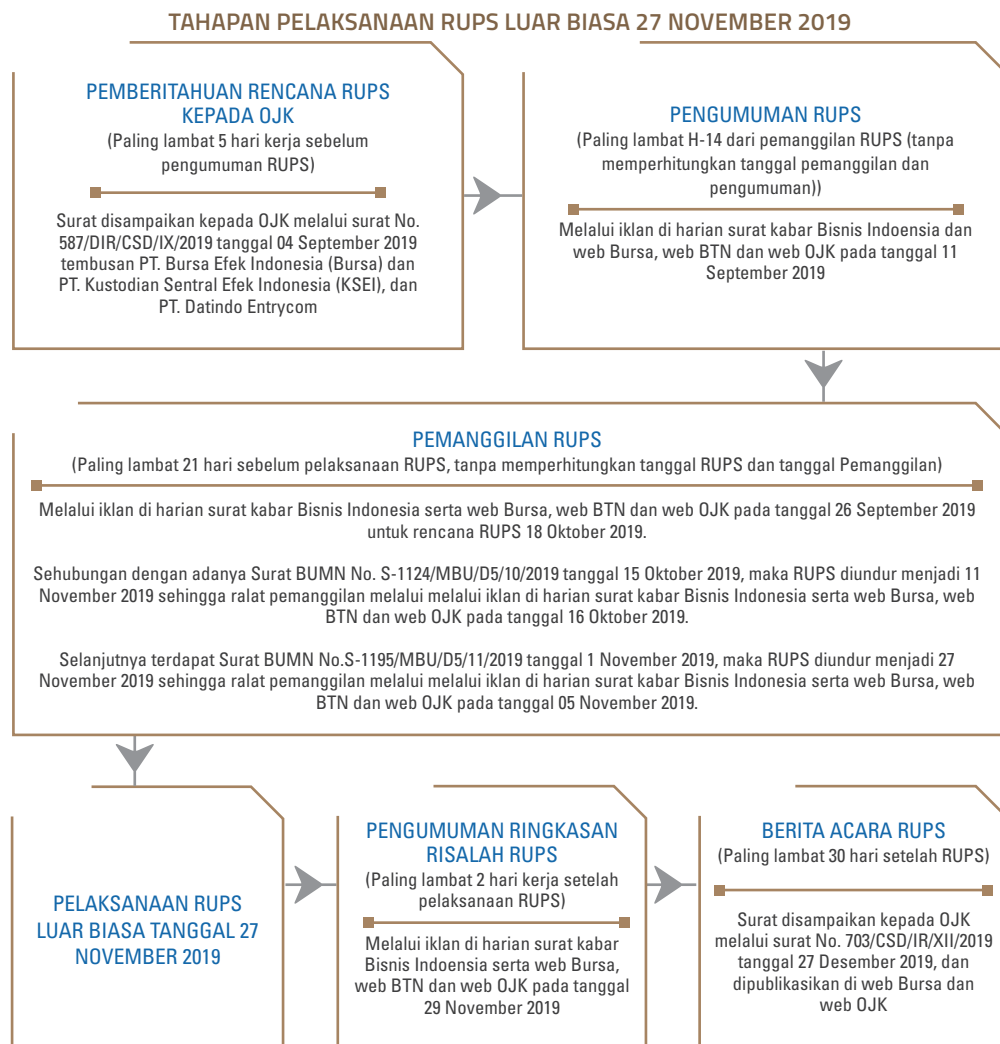


Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 27 November 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit
Rapat dipimpin oleh Sdr. Asmawi Syam selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 166/KOM/BTN/XI/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Pimpinan RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 27 November 2019, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS LUAR BIASA 27 NOVEMBER 2019

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
Asmawi Syam	Komisaris Utama/Independen	✓
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	✓
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	✓

**KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PADA RUPS LUAR BIASA 27 NOVEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Hadir/Tidak Hadir
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	✓
Garuda Wiko	Komisaris Independen	✓
Iman Sugema	Komisaris	✓
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	✓
Marwanto Harjowiryo	Komisaris	✓
Oni Febriarto Rahardjo	Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking	✓
Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	✓
Budi Satria	Direktur Consumer Banking	✓
R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Compliance	✓
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Finance, Treasury & Strategy	✓
Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	✓
Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	✓
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Collection & Asset Management	✓
Kamaruddin Sjam	Ketua Komite Audit	✓
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota Komite Audit	✓
Garuda Wiko	Anggota Komite Audit	✓
Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	✓
Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	✓

✓ = hadir | ✕ = tidak hadir

2. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.547.248.173 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 71,27% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 10.589.999.999 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 November 2019 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.

3. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara tertulis setelah pembahasan mata acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup yaitu dengan cara mengisi kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

4. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI, MKn.
5. Akta Hasil Keputusan RUPS
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019 telah dituangkan melalui Akta "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", No. 97 tanggal 27 November 2019 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI, MKn., Notaris di Jakarta.

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan dapat dilihat di bawah ini:

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA 27 NOVEMBER 2019

Mata Acara Rapat dan Keputusannya

Mata Acara:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Jumlah Penanya:
Terdapat 2 (dua) penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	: 7.544.433.283 (99,96%)
Tidak Setuju	: 2.421.000 (0,03%)
Abstain	: 393.890 (0,01%)
Total Setuju	: 7.544.827.173 (99,97%)

Keputusan:

1. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Budi Satria sebagai Direktur Consumer Banking;
 - b. Oni Febriarto R. sebagai Direktur Commercial Banking;
 - c. Dasuki Amsir sebagai Direktur Distribution & Network;
 - d. R. Mahelan Prabantarikso sebagai Direktur Compliance;
 - e. Asmawi Syam sebagai Komisaris Utama;
 - f. Iman Sugema sebagai Komisaris;
 - g. Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris;
 - h. Garuda Wiko sebagai Komisaris Independen;
 - i. Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris Independen;
 - j. Kamaruddin Sjam sebagai Komisaris Independen; dan
 - k. Arie Coerniadi sebagai Komisaris Independen.



3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1	Direktur Consumer Banking	Direktur Consumer and Commercial Lending
2	Direktur Commercial Banking	-
3	Direktur Finance, Treasury & Strategy	Direktur Finance, Planning and Treasury
4	Direktur Strategic Human Capital	Direktur Human Capital, Legal and Compliance
5	Direktur Compliance	-
6	Direktur Collection & Asset Management	Direktur Remedial and Wholesale Risk
7	Direktur IT & Operation	Direktur Operation, IT and Digital Banking
8	Direktur Distribution & Network	Direktur Distribution and Retail Funding
9	-	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No	Nama	Semula	Menjadi
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Finance, Treasury & Strategy	Direktur Finance, Planning and Treasury
2	Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	Direktur Human Capital, Legal and Compliance
3	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Collection & Asset Management	Direktur Remedial and Wholesale Risk
4	Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	Direktur Operation, IT and Digital Banking

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2016, RUPS Tahun Buku 2017, dan RUPSLB Tahun 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama;
- Hirwandi Gafar sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending;
- Jasmin sebagai Direktur Distribution and Retail Funding;
- Setiyo Wibowo sebagai Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics;
- Chandra M.Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen;
- Heru Budi Hartono sebagai Komisaris;
- Andin Hadiyanto sebagai Komisaris;
- Armand B. Arief sebagai Komisaris Independen; dan
- Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, serta pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - Direktur Utama: Pahala Nugraha Mansury
 - Direktur Consumer and Commercial Lending: Hirwandi Gafar
 - Direktur Finance, Planning and Treasury: Nixon L.P Napitupulu
 - Direktur Human Capital, Legal and Compliance : Yossi Istanto
 - Direktur Remedial and Wholesale Risk: Elisabeth Novie Riswanti
 - Direktur Operation, IT and Digital Banking: Andi Nirwoto
 - Direktur Distribution and Retail Funding: Jasmin
 - Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics: Setiyo Wibowo
 - b. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen: Chandra M.Hamzah
 - Komisaris: Eko D. Heripoerwanto
 - Komisaris: Heru Budi Hartono
 - Komisaris: Andin Hadiyanto
 - Komisaris Independen: Armand B. Arief
 - Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah terealisasi.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan untuk memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen.

DASAR HUKUM

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi. Referensi hukum lainnya yang menjadi dasar pembentukan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
3. PBI No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/

POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
7. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
9. Anggaran Dasar Bank.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Perseroan memiliki kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen, tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Di sepanjang tahun 2019, jumlah, komposisi dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sejalan dengan hasil keputusan RUPS, dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/ Independen)	-	-	-	I Wayan Agus Mertayasa tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	-	Kamaruddin Sjam tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	-	Arie Coerniadi tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	-	Lucky Fathul Aziz Hadibrata tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Garuda Wiko (Komisaris Independen)	-	Garuda Wiko tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Sumiyati (Komisaris)	Sumiyati (Komisaris)	-	-	Sumiyati tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 29 Agustus 2019.
Maurin Sitorus (Komisaris)	-	-	-	Maurin Sitorus tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Iman Sugema (Komisaris)	Iman Sugema (Komisaris)	Iman Sugema (Komisaris)	-	Iman Sugema tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Parman Nataatmadja (Komisaris)	-	-	-	Parman Nataatmadja tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
-	Asmawi Syam (Komisaris Utama/Independen)	Asmawi Syam (Komisaris Utama/Independen)	-	Asmawi Syam diangkat melalui Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019, namun tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Eko D. Heripoerwanto diangkat melalui Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019

**KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2019**

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
-	-	Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	-	Marwanto Harjowiryo diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019, namun tidak lagi menjabat sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Chandra M. Hamzah*) (Komisaris Utama/ Independen)	Chandra M. Hamzah diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Armand B. Arief*) (Komisaris Independen)	Armand B. Arief diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Ahdi Jumhari*) Luddin (Komisaris Independen)	Ahdi Jumhari Luddin diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Heru Budi Hartono*) (Komisaris)	Heru Budi Hartono diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Andin Hadiyanto*) (Komisaris)	Andin Hadiyanto diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Hingga akhir periode 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 6 (enam) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah ini mengalami perbedaan dibandingkan di awal tahun 2019,

dimana Perseroan memiliki 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 4 (empat) Komisaris.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Berikut susunan Dewan Komisaris yang menjabat di akhir tahun 2019:

**SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan*	Periode Menjabat
Chandra M.Hamzah ^{*)}	Komisaris Utama/ Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Armand B. Arief ^{*)}	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Ahdi Jumhari Luddin ^{*)}	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Heru Budi Hartono ^{*)}	Komisaris	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Andin Hadiyanto ^{*)}	Komisaris	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum

menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilaksanakan tersebut mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik serta kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

**DAFTAR KOMPETENSI SERTA UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Kompetensi/ Keahlian	Penyelenggara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Menjabat Efektif	Masa Jabatan	Status
Chandra M.Hamzah ^{*)}	Komisaris Utama/ Independen	Hukum	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Armand B. Arief ^{*)}	Komisaris Independen	Perbankan, Keuangan, Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Ahdi Jumhari Luddin ^{*)}	Komisaris Independen	Perbankan, Keuangan, Hukum, <i>Compliance</i>	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Planologi, Perumahan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Otoritas Jasa Keuangan	20 Desember 2019	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 - RUPS Tahun 2024	Telah mendapatkan persetujuan dari OJK
Heru Budi Hartono ^{*)}	Komisaris	Keuangan, Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Andin Hadiyanto ^{*)}	Komisaris	Keuangan, Makro Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Hingga akhir tahun 2019 dan periode penyusunan laporan tahunan, terdapat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris yang belum mendapatkan persetujuan dari OJK atas *fit and proper test* yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2017. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Secara ringkas, isi yang terkandung dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**CAKUPAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS**

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Landasan Hukum
Bab III	Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan
Bab IV	• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris berisikan: • Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris; • Persyaratan Anggota Dewan Komisaris; • Kriteria tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen; • Rangkap Jabatan; • Pengangkatan dan Pemberhentian; • Masa Jabatan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Kewajiban; • Hak dan Wewenang;
Bab V	• Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang berisikan: • Ketentuan Umum; • Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris; • Pemeriksaan Dewan Komisaris di Tempat Perseroan;
Bab VI	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
Bab VII	Mekanisme Perubahan
Bab VIII	Penutup

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara lengkapnya dapat dilihat di situs web Perseroan dengan alamat www.btn.co.id (menu *Investor Relation* – kebijakan tata kelola).

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan mengangkat anggota Dewan Komisaris berdasarkan pada, antara lain, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Melalui RUPS, Perseroan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and*

proper test) yang mengacu pada PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan. Selain itu, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dengan alasan yang tepat demi kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan pasal 71 POJK No. 55/POJK.03/2016.



KETENTUAN MASA JABATAN

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPSTahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak

dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan

sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Dalam hal terjadi potensi benturan kepentingan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam

situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan Lembaga keuangan dan Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Perseroan.

3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS serta yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Komisaris Utama

1. Memastikan fungsi Dewan Komisaris berjalan baik;
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris;
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan agenda rapat Dewan Komisaris secara efektif termasuk kebijakan

dan isu-isu strategis;

4. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
5. Memastikan penyampaian informasi yang benar dan sesuai antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
6. Memberikan saran dan memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

Tanggung Jawab Utama Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan

**STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**

- pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan serta melakukan tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS;
- Menyusun pembagian tugas di antara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris;
 - Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *Stakeholders*.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen perkreditan yang sehat dan penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan Implementasi GCG.
 - Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi;
 - Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan;
 - Melakukan tindakan Pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
 - Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Fokus atau pembidangan tugas pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan pada pembagian peran sebagai Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Berikut adalah pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

- Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

BIDANG FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Fokus Pengawasan
Chandra M.Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	Bidang Remunerasi dan Nominasi
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	Manajemen Risiko dan Compliance
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	Audit Internal dan Audit Eksternal

**BIDANG FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris	Fokus Pengawasan
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Manajemen Risiko dan Compliance
Heru Budi Hartono (Komisaris)	Bidang Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto (Komisaris)	Audit Internal dan Audit Eksternal

Program Orientasi atau Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum.

Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja

keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tanggal 4 Desember 2019, Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program pengenalan kepada Dewan Komisaris dengan materi sebagai berikut:

1. *Overview* peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta manajemen risiko
3. Hasil audit Perseroan
4. Penerapan budaya perusahaan
5. *Overview* bisnis Perseroan

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019**Pelaksanaan Tugas Pengawasan**

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap:
 - a. Rencana Bisnis Bank 2018-2021 dan realisasinya
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan dan realisasinya
 - c. Evaluasi pencapaian Kinerja Bulanan
 - d. Cetak Biru Transformasi Perseroan
 - e. Peraturan perundang-undangan, pertaturan internal

untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank.

2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundangundangan, ketentuan Bank Indonesia dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - b. Mengawasi efektivitas penerapan Tata Kelola pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, *compliance* dan Internal Audit.
 - c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

- d. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan
- e. Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
- f. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RJP, RBB dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- g. Memantau dan mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi.
4. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Melaksanakan *review* atas struktur organisasi.
9. Melaksanakan *review* atas budaya kerja perusahaan
10. Memberikan arahan dan saran-saran kepada Direksi atas pemberian kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SECARA TERTULIS

Dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris kepada Direksi, selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyampaikan 144 surat kepada Direksi yang berisi keputusan, konsultasi kredit, saran dan nasihat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Publikasi Laporan Keuangan
2. Penyusunan RKAP Tahun 2020
3. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021
4. *Performance Review* Bulanan
5. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)
6. Keikutsertaan Bank BTN dalam Proses Penjajakan Kepemilikan Saham Lotus Putra
7. Telaah Awal Internal Audit Tentang Indikasi Tindakan Fraud oleh Pegawai
8. Saran Dewan Komisaris atas Pegawai *Pro Hire*
9. Konsultasi Kredit
10. Batas Wewenang Memutus Kredit
11. Penanganan dan Klarifikasi atas Keluhan Pihak Eksternal
12. Kesesuaian Kolektibilitas Debitur
13. Program Pendidikan Restrukturisasi dan Novasi Kredit
14. Prinsip Kehati-hatian Bank
15. *Monitoring* Kredit Komersial
16. Batas Wewenang Memutus Restrukturisasi Kredit Komersial termasuk Restrukturisasi Kredit Komersial Melalui Debitur Novasi
17. Pelaporan Profil Risiko Bank
18. Usulan Bakal Calon Pengurus Perseroan
19. Data *Talent Pool*
20. Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi tahun Buku 2018
21. Realisasi BTN QR Payment Merchant
22. Perubahan Bidang Tugas Direktur
23. Kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2019
24. Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Pelanggaran Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUI)
25. Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019
26. Rencana Penyertaan Modal Pada PT Permodalan Nasional Madani Investment Management
27. Arahan Strategic Plan Teknologi Informasi
28. Strategi dan Tindak Lanjut Penurunan NPL Secara Berkala
29. Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
30. Rencana Penyertaan Modal pada PT Asuransi Jiwasraya Putra (Lotus Putra)

Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris

Perseroan senantiasa melakukan monitor tindak lanjut penyelesaiannya atas setiap keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat



pada setiap Rapat berikutnya. Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan persetujuan antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi Dewan Komisaris
 - a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Bank.
 - b. Rencana Penyertaan Modal Bank pada Perusahaan Anak.
 - c. Batasan dan Kriteria perbuatan Direksi yang tidak memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
 - d. Rekomendasi dan Penilaian Calon Pengurus Perseroan.
 - e. Rekomendasi Perubahan Bidang Tugas Direktur
 - f. Rekomendasi Program Pendidikan Restrukturisasi dan Novasi Kredit.
2. Persetujuan Dewan Komisaris
 - a. Persetujuan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2019.
 - b. Persetujuan Penetapan Ranking I KAP Tahun buku 2019.
 - c. Persetujuan Batasan dan Kriteria atas Korporasi yang harus mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit.
 - e. Persetujuan Rencana Audit Tahunan Tahun 2019.
 - f. Persetujuan Pemberian Manfaat Lain Bagi Pensiunan Program Pensiun Manfaat Pasti.
 - g. Persetujuan Pemenang Pengadaan Kantor akuntan Publik (KAP) Pelaksana Jasa General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
 - h. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 - 2021.
 - i. Persetujuan Annual Plan dan anggaran Kegiatan Internal Audit Division Tahun 2019.
 - j. Persetujuan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).
 - k. Persetujuan Penyediaan Dana pihak terkait.
 - l. Persetujuan Impmenetasi IRRBB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - m. Persetujuan Pembentukan SEVP Funding & Retail Transaction.
 - n. Persetujuan Deokumen Recovery Plan Tahun 2019.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka meningkatkan peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris selama tahun 2019 dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Rapat menjadi bagian penting bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada Direksi. Tentang pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 terkait dengan frekuensi, agenda, dan peserta Rapat dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris sendiri, kinerja terhadap Direksi baik secara individual maupun kolegal dan kinerja terhadap masing-masing Komite sebagai organ penunjang Dewan Komisaris. Penilaian kinerja tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat yang efektif.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Di samping itu, Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN, yaitu penilaian *Self Assessment* sesuai dengan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016, serta *Assessment* pihak ketiga dengan menggunakan standar internasional yaitu *ASEAN CG Scorecard*.

Rincian penilaian kinerja Dewan Komisaris dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja terhadap Direksi ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan oleh Direksi yang tercantum pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar dan Amanat Pemegang Saham yang dituangkan dalam tolok ukur kriteria penilaian kinerja Direksi dan masing-masing Direksi, selanjutnya laporan penilaian kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham. Proses penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dalam RUPS. Meski demikian, sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris yang menjalankan tugas atas pengawasan Perseroan menilai bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perseroan dengan sangat baik, sejalan dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Rincian pencapaian KPI Direksi dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2019, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris menganalisa data bakal calon anggota Direksi serta mengidentifikasi calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat serta mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun buku Komite-Komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Pencapaian KPI masing-masing Komite dapat dilihat pada pembahasan masing-masing Komite pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



KOMISARIS INDEPENDEN

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan jalannya kegiatan usaha yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga “fairness” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan kriteria independensi masing-masing Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kriteria Independensi	Komisaris Independen		
	Chandra M.Hamzah	Armand B. Arief	Ahdi Jumhari Luddin
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan	✓	✓	✓

✓ = sesuai | ✗ = belum sesuai

JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2019 Perseroan memiliki Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang dari total jumlah Komisaris sebanyak 6 (enam) orang, atau sebesar 50% dari jumlah keanggotaan Dewan Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan komposisi jumlah Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris

Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara rinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercatum di bawah ini:



DIREKSI

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
4. PBI No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
8. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10. POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
11. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
12. Anggaran Dasar Bank.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2019

Di sepanjang tahun 2019, jumlah, komposisi dan susunan Direksi Perseroan mengalami perubahan sejalan dengan hasil keputusan RUPS, dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Maryono (Direktur Utama)	Maryono (Direktur Utama)	-	-	Maryono tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019.
Iman Nugroho Soeko (Direktur Finance & Treasury)	-	-	-	Iman Nugroho Soeko tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI SEPANJANG TAHUN 2019**

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Oni Febriarto Rahardjo (Direktur Commercial Banking)	Oni Febriarto Rahardjo (Direktur Commercial Banking)	Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking)	-	- Pada 2 September, Direksi menunjuk Oni Febriarto Rahardjo bertindak sebagai Plt. Direktur Utama. - Oni Febriarto Rahardjo tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	-	Budi Satria tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Strategy, Compliance & Risk)	R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)	R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)	-	R. Mahelan Prabantarikso tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Collection & Asset Management)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Treasury & Strategy)	Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	-
Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	-	Dasuki Amsir tidak lagi menjabat sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Yossi Istanto (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto (Direktur Strategic Human Capital)	Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	-
		Suprajarto (Direktur Utama)		Suprajarto diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019, kemudian mengundurkan diri.

**KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI SEPANJANG TAHUN 2019**

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
-	-	Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Collection & Asset Management)	Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	Elisabeth Novie Riswanti diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019
-	-	-	Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	Pahala Nugraha Mansury diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
-	-	-	Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	Hirwandi Gafar diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
-	-	-	Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	Jasmin diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019
-	-	-	Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	Setiyo Wibowo diangkat melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019

Pada akhir periode 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 8 (delapan) Direksi, dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur Utama. Jumlah ini mengalami perbedaan dibandingkan di awal tahun 2019, dimana Perseroan memiliki 9 (sembilan) Direksi, dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur Utama. Perubahan ini sejalan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.

Berikut susunan Direksi yang menjabat di akhir tahun 2019:

**SUSUNAN DIREKSI
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Menjabat
Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT and Digital Banking	Keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 23 Maret 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2023	Pertama
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Finance, Planning and Treasury	Keputusan RUPS Tahunan 2017 tanggal 17 Maret 2017	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2022	Pertama
Yossi Istanto**)	Direktur Human Capital, Legal and Compliance	Keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 23 Maret 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2023	Pertama
Elisabeth Novie Riswanti*)	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Hirwandi Gafar*)	Direktur Consumer and Commercial Lending	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**SUSUNAN DIREKSI
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Menjabat
Jasmin ^{*)}	Direktur Distribution and Retail Funding	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama
Setiyo Wibowo ^{*)}	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	RUPS Tahun 2019 - RUPS Tahun 2024	Pertama

^{*)} Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

^{**)} Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pengangkatan seluruh anggota Direksi berdasarkan pada kualifikasi personil sebagaimana diatur POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum

menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilaksanakan tersebut mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik serta kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

**DAFTAR KOMPETENSI SERTA UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Penyelenggara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Menjabat Efektif	Masa Jabatan	Status
Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama	<i>Finance</i>	Otoritas Jasa Keuangan	10 Februari 2020	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Telah mendapatkan persetujuan dari OJK
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT and Digital Banking	<i>Operation IT</i>	Otoritas Jasa Keuangan	10 September 2018	RUPST 23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023	Telah mendapatkan persetujuan dari OJK
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Finance, Planning and Treasury	<i>Perkreditan Collection Asset Management</i>	Otoritas Jasa Keuangan	25 Juli 2017	RUPST 17 Maret 2017 - RUPS Tahun 2022	Telah mendapatkan persetujuan dari OJK
Yossi Istanto ^{**)}	Direktur Human Capital, Legal and Compliance	Hukum Perkreditan	Otoritas Jasa Keuangan	10 September 2018 [*]	RUPST 23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023	Telah mendapatkan persetujuan dari OJK

**DAFTAR KOMPETENSI SERTA UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Kompetensi/ Keahlian	Penyelenggara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Menjabat Efektif	Masa Jabatan	Status
Elisabeth Novie Riswanti ^{*)}	Direktur Remedial and Wholesale Risk	<i>Asset Management</i>	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 29 Agustus 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Hirwandi Gafar ^{*)}	Direktur Consumer and Commercial Lending	Perkreditan	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Jasmin ^{*)}	Direktur Distribution and Retail Funding	Bisnis	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK
Setiyo Wibowo ^{*)}	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	<i>Credit Risk & Analytics Data</i>	Otoritas Jasa Keuangan	-	RUPSLB 27 November 2019 - RUPS Tahun 2024	Belum mendapatkan persetujuan dari OJK

^{*)} Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

^{**)} Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur dalam:

1. Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Direksi sebagai perubahan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris No. 01-DEKOM-BTN/2016 dan Direksi No. SKB- 01/DIRBTN/2016 tentang Panduan Tata Kerja Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
2. Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Tujuan dibentuknya Pedoman Kerja Direksi ini guna pelaksanaan tugas Direksi akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Direksi. Aspek yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan Bab Direksi meliputi hal-hal di bawah ini:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**CAKUPAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PADA BAB DIREKSI**

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Nilai-Nilai
Bab III	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi berisikan: • Struktur dan Komposisi Direksi • Persyaratan Anggota Direksi • Kriteria Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan • Rangkap Jabatan Direksi • Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi • Masa Jabatan Direksi • Tugas dan Tanggung Jawab Direksi • Kewajiban Direksi • Hak dan Wewenang Direksi • Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Memerlukan • Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi • Larangan • Transparansi • Etika Kerja • Waktu Kerja • Pengaturan Rapat • Kepemimpinan • Evaluasi Kinerja Direksi • Pelaporan dan Pertanggungjawaban • Komite

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi secara lengkapnya dapat dilihat pada *website* Perseroan dengan alamat www.btn.co.id (menu *Investor Relation* – kebijakan tata kelola).

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan senantiasa memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana Komite Remunerasi dan Nominasi mengajukan rekomendasi calon-calon anggota Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pengendali untuk diajukan kepada RUPS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016.

Berdasarkan Anggaran Dasar, pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan adalah apabila Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan. Selain alasan di atas, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Direksi dengan alasan yang tepat demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

KETENTUAN MASA JABATAN

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi

jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki Direksi khususnya terkait pengambilan setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukan agar tetap sesuai dengan tujuan dan semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Direksi yang menjabat disyaratkan tidak memiliki hubungan afiliasi terkait keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, serta hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan saham sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.



Selain itu, Direksi yang menjabat tidak diperbolehkan memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan;

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length* basis);
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain; dan
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keladuan dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Kepuluan RUPS.
2. Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Direksi;
 - b. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
 - c. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
 - d. Memelihara hubungan dan soliditas antar Sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
 - e. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

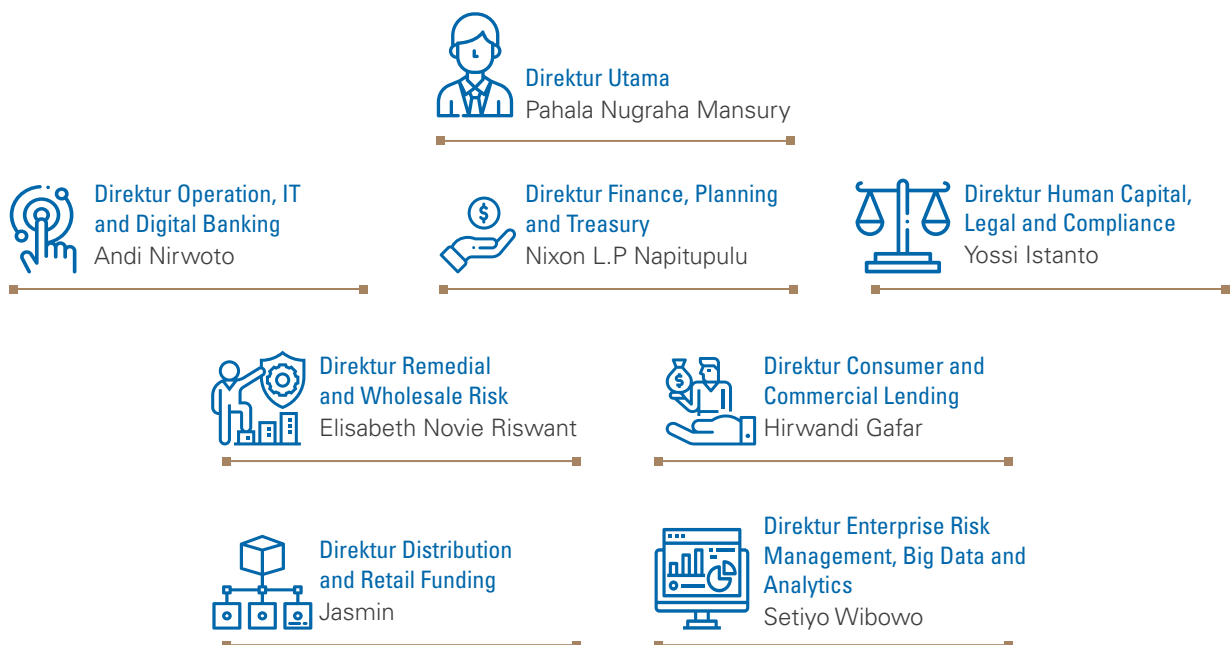
STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

- pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan

- dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi Perseroan senantiasa mengelola Perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan keputusan Direksi mengenai *Job Description* Direksi. Pembidangan tugas Direksi mengacu kepada Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.





Penjelasan masing-masing tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Internal Audit (IAD)</i> , <i>Corporate Secretary (CSD)</i> dan <i>Marketing Communication (MCD)</i> .
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Digital Channel (DCD)</i> , <i>Credit Operation (COD)</i> , <i>Operation & Business Support (OBSD)</i> , <i>IT Strategic Planning & Development (ITPD)</i> dan <i>IT Opeation (ITOD)</i> .
Nixon L.P Napitulupulu	Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Treasury Division (TRSD)</i> , <i>Instituional Banking (IBD)</i> , <i>Corporate Strategy & Planning (CSPD)</i> , <i>Finance & Accounting (FAD)</i> , <i>Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)</i> dan <i>Investor Relations & Research (IRRD)</i> .
Yossi Istanto**	Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Human Capital Strategy (HCSD)</i> , <i>Human Capital Management (HCMD)</i> , <i>Learning Center (LCD)</i> , <i>Legal (LGD)</i> dan <i>Compliance and Governance (CMGD)</i> .
Elisabeth Novie Riswanti*	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Commercial Credit Risk (CRD)</i> , <i>Retail Risk (RRD)</i> , <i>Commercaill Asset Management 1 (CAMD1)</i> , <i>Commercaill Asset Management 2 (CAMD 2)</i> dan <i>Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)</i> .
Hirwandi Gafar*	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Corporate Syndication & Transaction Banking (CSTD)</i> , <i>Commercial Banking (CMBD)</i> , <i>SME Banking (SMBD)</i> , <i>Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD)</i> , <i>Subsidized Mortgage Lending (SMD)</i> dan <i>Sharia Business (SHAD)</i>
Jasmin*	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Corporate & Commercial Funding (CMFD)</i> , <i>Wealth Management (WMD)</i> , <i>Retail Funding & Services (RFSD)</i> , <i>Service Quality & Distribution (SQND)</i> dan <i>Regional Officer (RO)</i>
Setiyo Wibowo*	Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics</i>	Melaksanakan supervisi terhadap <i>Enterprise Risk Management (ERMD)</i> , <i>Transformation & Partnership Management (TPMD)</i> , <i>Policy, Procedurs & Bussines Process Reengineering (PPBD)</i> dan <i>Data Managemengt & Analytics (DMD)</i> .

* Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Berlaku efektif sebagai anggota Direksi sejak tanggal 10 September 2018, namun menjalankan tugas fungsi kepatuhan setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

PROGRAM PENGENALAN ATAU ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

Menindaklanjuti pengangkatan anggota Direksi yang baru, maka Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 28 November 2019. Tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi Perseroan agar anggota Direksi dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda.

Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. *Overview* peran, tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil audit Perseroan
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. *Overview* bisnis Perseroan

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2019

Pelaksanaan Tugas Kepengurusan dan Pelaporan Pertanggungjawaban

Sepanjang tahun 2019, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*.
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Laporan pemenuhan Fungsi kepatuhan.
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
5. Laporan Tindak lanjut Temuan Audit.

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG *Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan *Annual Report & Sustainability Report*.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Secara berkala, Perseroan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/*workshop/seminar* dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi selama tahun 2019 dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Rapat menjadi bagian penting bagi Direksi khususnya dalam mengambil kebijakan strategis dan hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan bersama, baik di antara Direksi maupun dengan Dewan Komisaris. Tentang pelaksanaan Rapat Direksi selama tahun 2019 terkait dengan frekuensi, agenda, dan peserta Rapat dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri dengan judul Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Keputusan-keputusan Direksi

Selain rapat Direksi yang sudah diagendakan dan menghasilkan sejumlah keputusan, sepanjang tahun 2019 juga Direksi telah menerbitkan berbagai Keputusan antara lain meliputi:



No.	Perihal	Keputusan
1.	Perkreditan	Persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai kewenangan Direksi
2.	Pendanaan	Peluncuran Produk, Jasa dan Aktivitas Baru
3.	Transformasi	<i>Pilot Project Transformation, Roll Out</i> Nasional Transformasi Strategis
4.	Jaringan/ <i>Network</i>	Penambahan outlet Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas Konvensional dan Syariah serta jaringan mesin ATM
5.	Sumber Daya Manusia	Promosi dan Mutasi Pegawai
6.	Manajemen Risiko	Penyusunan <i>Recovery Plan, Business Continuity Management</i>
7.	Rencana Strategis	RKAP 2020 dan RBB 2020-2022

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Direksi ditentukan berdasarkan rencana kerja Komite yang terkait dengan rencana kerja Perseroan. Pelaksanaan kerja Komite tercermin dalam rapat kerja Komite dan hasil keputusan Rapat Komite.

Secara keseluruhan pelaksanaan rapat Komite Direksi dinilai efektif sepanjang tahun 2019. Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan beberapa hal, di antaranya

1. Jumlah rapat yang diadakan
2. Kehadiran Direksi
3. Risalah Rapat
4. Pengambilan keputusan yang diambil saat pembahasan rapat

Penilaian kinerja Komite-Komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan Komite yang memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau

jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management (ALMA)* Perseroan. Sepanjang tahun 2019 ini, ALCO telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan Komite yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan. Selama tahun 2019 ini Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan Komite yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Selama tahun 2019 ini Komite Kredit telah melaksanakan 70 (tujuh puluh) kali agenda rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Produk

Komite Produk memiliki tugas untuk membantu Direksi yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan perkembangan produk di Perseroan dan bertanggung jawab kepada Direksi dan secara berkala memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Divisi yang mengelola produk. Selama tahun 2019 ini Komite Produk telah melaksanakan 3 (tiga) kali agenda rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Personalia

Komite Personalia memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2019 ini Komite Personalia telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali agenda rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Perseroan. Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Di sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan perannya dengan baik, dan telah melakukan pengelolaan atas pemenuhan ketersediaan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga telah melakukan pemenuhan kepatuhan peraturan terkait Pasar Modal, dan telah melaksanakan penyampaian informasi yang materil dan relevan tentang Perseroan kepada *stakeholders*.

Penilaian Kinerja Fungsi Kepatuhan

Perseroan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dalam memperkuat penerapan fungsi kepatuhan di lingkungan Perseroan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan telah berjalan cukup baik, dalam rangka memperkuat budaya kepatuhan di semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Di tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah meluncurkan sistem informasi manajemen yakni *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) dalam rangka monitoring terhadap komitmen yang di buat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Selain itu, pengelolaan risiko kepatuhan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis Bank, dan setiap jenjang organisasi Perseroan, juga telah berjalan dengan baik, upaya ini sekaligus dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan Bank secara berkesinambungan.

Penilaian Kinerja Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di lingkup Perseroan yang dijalankan oleh Enterprise Risk Management Division telah berjalan dengan baik. Di sepanjang tahun 2019, *Enterprise Risk Management Division* telah melaksanakan berbagai inisiatif dan program serta kegiatan dalam rangka menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Keberhasilan *Enterprise Risk Management Division* dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko di lingkup Perseroan, diwujudkan dengan berbagai penghargaan yang berhasil di raih di sepanjang tahun 2019, salah satunya adalah juara kategori *ASEAN Public Risk* dalam ajang *ASEAN Risk Awards* oleh *Enterprise Risk Management Academy (ERMA)* Tahun 2019.

Penilaian Kinerja Audit Internal

Fungsi audit internal yang dijalankan oleh Internal Audit Division yang merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG di lingkup Perseroan, telah berjalan dengan cukup baik.

Dimana pada tahun 2019, Internal Audit Division telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit baik dari hasil audit tahun 2018 maupun tahun 2019, dengan status penyelesaian dari masing-masing temuan mencapai 100%. Sepanjang tahun 2019, Perseroan menilai bahwa pelaksanaan kegiatan IAD telah berjalan sangat efektif yang dibuktikan dengan nilai tambah yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan berbagai capaian kinerja Perseroan dan penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2019.

KINERJA, PENCAPAIAN DAN TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2019

TATA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Salah satu upaya mewujudkan efektivitas penerapan GCG dicapai melalui pengaturan mekanisme kerja antar organ tata kelola, khususnya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut ditunjukkan dengan adanya pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan system dan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.02/DEKOM- BTN/2017 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris Direksi merupakan petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Cakupan Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi di antaranya meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Laporan Direksi Kepada Dewan Komisaris
3. Pemeriksaan Dewan Komisaris di Tempat Perseroan
4. Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi
5. Perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris
6. Mekanisme Pengajuan Permohonan Persetujuan Kepada Dewan Komisaris
7. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS dengan sebelumnya memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris
8. Mekanisme Pengajuan Permohonan Tanggapan kepada Dewan Komisaris
9. Perbuatan Direksi yang memerlukan Konsultasi dengan Dewan Komisaris
10. Rapat Bersama terdiri dari Rapat Direksi bersama Anggota Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Anggota Direksi
11. Evaluasi Kinerja terdiri dari:
 - a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
 - b. Penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
 - c. Pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun dengan semangat saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi selalu melakukan koordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan teladan bagi jajaran di bawahnya.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perseroan. Penyelenggara rapat berkala ini untuk membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah Rapat.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang selain mayoritas memiliki latar belakang perbankan, juga memiliki kompetensi dan pengalaman yang bervariasi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja Perseroan. Komposisi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat penting dalam memastikan proses pengambilan keputusan yang kuat dan pengurusan Perseroan yang efektif, sesuai dengan kebutuhan serta diselaraskan dengan strategi utama, visi dan misi Perseroan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Pemegang Saham dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang optimal.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota wanita dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian antara lain bidang akuntansi, keuangan, hukum dan bisnis.
3. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman Dewan Komisaris terhadap perkembangan industri perbankan baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Selain itu, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman juga menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi komposisi yang optimal pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

Pada tahun 2019 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama dan Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Keahlian
Dewan Komisaris					
Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/ Independen)	Laki-laki	52 tahun	Bachelor in law, University of Indonesia (1995).	1. <i>Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm</i> (2012-sekarang) 2. Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 3. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Hukum
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	Laki-laki	67 tahun	Master of Business Administration, Curry College, Massachusetts, Amerika Serikat (1982)	1. Komisioner dan <i>Senior Consultant of Dunamis Organization Services</i> (2016-sekarang) 2. Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia 3. Direktur Utama PT Bank UOB Buana 4. Deputy CEO PT Bank International Indonesia	Perbankan, Keuangan, Ekonomi
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	Laki-laki	65 tahun	Master of Science Policy Economics, University of Illinois, Chicago, Amerika Serikat (1989)	1. Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk (2019-sekarang) 2. Komisaris Independen PT Bank DKI 3. Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan, Keuangan, Hukum, <i>Compliance</i>
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Laki-laki	58 tahun	PhD bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (2009)	1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang) 2. Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR 3. Asdep Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR	Planologi, Perumahan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama dan Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Keahlian
Heru Budi Hartono (Komisaris)	Laki-laki	54 tahun	Magister Manajemen Universitas Krisna Dwipayana (1998)	- Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang) - Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara - Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta	Keuangan, Ekonomi
Andin Hadiyanto (Komisaris)	Laki-laki	55 tahun	Doctor of Philosophy Nagoya University, Jepang (2000)	- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang) - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	Keuangan, Makro Ekonomi
Direksi					
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	Laki-laki	49 tahun	MBA Finance Leonard N. Stern School of Business New York, Amerika Serikat (1999)	- Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Finance
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	Laki-laki	56 tahun	Master of Finance, Universitas Gadjah Mada/University of Lexington Kentucky, Amerika Serikat (1997)	- General Manager Operational Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - General Manager Divisi Solusi & Security Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) - General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Deputi General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Operation IT



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama dan Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	Laki-laki	50 tahun	Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1994)	1. Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos 2. Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3. Head of Priority Project Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4. Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5. Pj Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6. Group Head Micro Network Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7. Pj Group Head Micro Network Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	• Perkreditan • <i>Collection</i> • Asset • <i>Management</i>
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	Laki-laki	46 tahun	Magister Hukum Bisnis dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (2004)	1. Kepala Legal Division Bank BTN 2. Kepala Legal & Loan Document Desk Bank BTN	Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	Perempuan	52 tahun	Sarjana Hukum bidang Perdata dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991)	1. Asset Management Division Head Bank BTN 2. Small & Medium Lending Division Head Bank BTN 3. Commercial Housing Loan Department Head Bank BTN	<i>Asset Management</i>
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	Laki-laki	52 tahun	Sarjana Teknik/Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung (1992)	1. Head of Subsidized Mortgage Lending Division Bank BTN 2. Head of Subsidized Mortgage Division Bank BTN 3. Head of Business Development Subsidized Mortgage Department Bank BTN	Perkreditan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama dan Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Keahlian
Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	Laki-laki	54 tahun	Master International Bussiness dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998)	1. SEVP Consumer & Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. Regional CEO IV/JKT 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3. Regional Manager IV-JKT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bisnis
Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	Laki-laki	43 tahun	MBA in Finance & Banking, KDI School of Public Policy and Management, Korea Selatan (2009)	1. Group Head Consumer Credit Risk & Analytics PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. Group Head Credit Portfolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3. Group Head Consumer Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Credit Risk & Analytics Data

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bank BUMN berstatus perusahaan publik, Perseroan memiliki mekanisme penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, baik penilaian kinerja mengacu kepada ketentuan Kementerian BUMN maupun peraturan dan ketentuan terkait perbankan serta kepatuhan lainnya. Berikut disampaikan penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan Umum mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penyampaian laporan kinerja Dewan Komisaris yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPS merupakan rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/

atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Penilaian *Self Assessment* sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 Dewan Komisaris telah merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: aspek pengawasan dan pengarahan, aspek pelaporan serta aspek dinamis (lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris),
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016, dan
3. *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu *ASEAN CG Scorecard*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Bank berdasarkan ketentuan BI/OJK dan *ASEAN CG Scorecard* diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Perseroan Berkelanjutan pada Laporan Tahunan ini.

**Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/

SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak yang Melakukan Penilaian Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Pencapaian Indikator Kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Indikator Kinerja menunjukan bahwa secara keseluruhan Dewan Komisaris berhasil mencapai target yang ditetapkan.

KPI DEWAN KOMISARIS 2019 DAN REALISASINYA

No	Program Kerja dewan Komisaris	2019			Nilai		Rentang Nilai Terbobot (6) (3)x(5)	Keterangan
		Target KPI (1)	Realisasi KPI (2)	Bobot (3)	% (4) (21):(1)	Nilai (5) *) Perhitungan Nilai		
Aspek Pengawasan dan Arahan				75	265			
1.	Review dan Tanggapan Pelaksanaan RBB dan RKAP	6 kali	6	10	100%	3	30	- Melalui surat tertulis kepada Direksi - Rapat Internal Dewan Komisaris Pembahasan RBB & RKAP - Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi RBB & RKAP
2.	Review dan Evaluasi atas Kinerja dan GCG Bank	12 kali	12	20	100%	3	60	Dilakukan tiap bulan dalam Rapat Bersama Dewan komisaris dan Direksi dengan agenda khusus <i>Performance Review</i>
3.	ReviewTindak lanjut hasil/temuan Audit Internal/Eksternal	6 kali	8	5	133%	3	15	- Melalui surat tertulis kepada Direksi - Rapat Internal Dewan Komisaris Pembahasan Audit Internal, Audit Khusus, Audit Eksternal - Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Audit Internal, Audit Khusus, Audit Eksternal
4.	Rapat Dewan Komisaris	12 kali	91	20	758%	4	80	- Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 51 kali - Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 41 kali
5.	Memberi Tanggapan/ Nasihat/Persetujuan/ Saran/Arahan kepada Direksi	6 kali	145	20	2417%	4	80	Melalui sarana tertulis kepada Direksi



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KPI DEWAN KOMISARIS 2019 DAN REALISASINYA

No	Program Kerja dewan Komisaris	2019			Nilai		Rentang Nilai Terbobot (6) (3)x(5)	Keterangan
		Target KPI (1)	Realisasi KPI (2)	Bobot (3)	% (4) (2/1)x(1)	Nilai (5) (*) Perhitungan Nilai		
Aspek Pelaporan					20		60	
II	1. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan	1 kali	1	5	100%	3	15	Program Kerja Dewan Komisaris yang disusun Komite dengan PIC Koreno dan Disahkan Dewan Komisaris pada awal tahun
	2. Menyampaikan Laporan/pendapat kepada Pemegang Saham/RUPS	4 kali	4	10	100%	3	30	- Laporan Pengawasan semesteran kepada OJK - Laporan Pengawasan Triwulan kepada Kementerian BUMN
	3. Menyampaikan Laporan Tentang Tugas Pengawasan (Regulator)	2 kali	2	5	100%	3	15	
Aspek Dinamis/Lain-lain				5			15	
III	1. Peningkatan Kompetensi Pengawasan Bank	2 kali	2	5	100%	3	15	Masing-masing Dewan Komisaris yang telah mengikuti <i>Training/Workshop</i> baik di dalam dan luar negeri
Total Nilai				100			340	
NILAI							Sangat Baik	

*) Perhitungan Nilai

Hasil	Nilai	Rentang Nilai Kinerja Terbobot	Kategori
>110%	4	351 – 400	Istimewa
> 95% – < 110%	3	281 – 350	Sangat Baik
> 85% – < 95%	2	101 – 280	Baik
> 75% – < 85%	1	0 – 100	Cukup

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum dimana Direksi melaporkan dan mempertanggung-jawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham berdasarkan Kontrak Kinerja Manajemen, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan kinerja terhadap masing-masing Komite sebagai organ penunjang Direksi.

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pada tolok ukur penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi.

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa kriteria dan alat ukur di antaranya:

1. *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi
Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya di-review oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi.

Kinerja individu Direksi dapat dilihat secara khusus pada KPI individu yang terdiri dari KPI Bersama dan KPI Direktorat. KPI individu masing-masing Direksi di tahun 2019 dapat dilihat di bawah ini:

Perspektif	KPI Korporat				
		Direktur Utama	Commercial Banking	Consumer Banking	
Financial	Rp (Laba) juta	⬢	⬢	⬢	
	Rasio Finansial Korporat	⬢	⬢	⬢	
	Rp. <i>Growth asset</i>				
	Rp. <i>Growth kredit</i>	⬢	⬢		
	Rp. <i>Growth DPK</i>	⬢	⬢		
	% CASA	⬢	⬢		
	Rp. <i>Wholesale funding</i>				
	Rp. <i>Fee based income</i> (miliar)	⬢	⬢	⬢	
	% NPL Konsumer		⬢		
	% NPL Komersial	⬢			
	% NPL Nasional			⬢	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Direktur						
	<i>Distribution & Network</i>	<i>Collection & Asset Man.</i>	<i>IT & Operation</i>	<i>Finance, Treasury & Strategy</i>	<i>Compliance</i>	Strategic Human Capital
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
						●
			●			
			●			
			●			
				●		
	●			●		
	●	●	●	●	●	●



Perspektif	KPI Korporat				
		Direktur Utama	Commercial Banking	Consumer Banking	
Customer	* % Δ Market share KPR	✖		✖	
	*MRI			✖	
	% Kolektibilitas 1				
	Penyelesaian kredit bermasalah				
Business Process	Growth tabungan debitur KPR/A				
	Jumlah transaksi kartu		✖		
	Pengembangan jaringan produk dan jasa		✖	✖	
	Skor KPKU		✖	✖	
	Tingkat Kesehatan Bank				
	ASEAN GCG Scorecard				
	Implementasi kepatuhan sesuai regulator	✖	✖	✖	
	% Realisasi PKBL	✖			
	% DRBM via CSM				
	Rp. Laba per karyawan (juta)				
Learning & Growth	Employee Engagement Index				
	Formation Completion				
	Pengembangan IT				
	% Implementasi ICT Himbara				
	Agent of Development & Supervisi Divisi & RO	✖	✖	✖	
Agent of Development	Sinergi antar BUMN		✖	✖	
	Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu				
	Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai	✖			
	Penugasan Pemerintah	✖			
	Program Transformasi	✖	✖	✖	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Direktur						
	<i>Distribution & Network</i>	<i>Collection & Asset Man.</i>	<i>IT & Operation</i>	<i>Finance, Treasury & Strategy</i>	<i>Compliance</i>	Strategic Human Capital
	●	●	●	●	●	●
	●					
		●				
		●				
		●				
	●			●		
	●			●		
					●	
					●	
	●	●	●	●	●	●
					●	
						●
						●
			●			●
			●			●
	●	●	●	●	●	●
	●		●			
			●	●		
				●		
	●	●	●	●	●	●



Perspektif	KPI Korporat				
		Direktur Utama	Commercial Banking	Consumer Banking	
Jumlah		12	14	14	
Total		100	100	100	



KPI Kolegial



KPI Unit

2. Rencana Kerja Direksi

Direksi telah menyusun Rencana Kerja 2019 sebagai sasaran atau fokus Perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan Perusahaan dan melaksanakan penugasan Pemegang Saham dan memenuhi target KPI yang telah disusun, yang terdiri dari:

No	Bidang	Kegiatan
1	Perkreditan	Memperkuat positioning bisnis di sektor perumahan dan mensukseskan Program Sejuta Rumah.
2	Kualitas Kredit dan implementasi PSAK 71	Perbaikan kualitas kredit difokuskan pada perbaikan proses perkreditan dan meningkatkan efektivitas <i>collection</i> .
3	Pendanaan	Melakukan peningkatan DPK <i>Low Cost</i> sebagai upaya untuk mendukung target pertumbuhan dan perbaikan profitabilitas
4	<i>Fee Based Income</i> dan Pembentukan Anak Usaha	Meningkatkan NOA dan memperluas aktivitas korporat banking dan treasury dengan mengembangkan transaksi targeted nasabah komersial dan Lembaga.
5	Bisnis Syariah	Mengoptimalkan model <i>leveraging</i> yang salah satunya adalah mirroring fitur layanan BTN Syariah dengan layanan BTN Induk dan optimalisasi jaringan induk dalam menjual produk-produk syariah
6	Permodalan	Meningkatkan profitabilitas bank dan melakukan pinjaman/obligasi
7	Human Capital	Meningkatkan Produktivitas Pegawai untuk Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan diselaraskan dan dilandasi perkembangan era digitalisasi untuk memperkuat dan meningkatkan proses bisnis human capital.
8	Infrastruktur IT	Mempersiapkan Teknologi Informasi arsitektur yang mendukung strategi bisnis bank dalam meningkatkan pendanaan murah berbasis transaksi, efektivitas dan efisiensi operasional
9	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Risk Management</i> , dan <i>Compliance</i>	Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan <i>Good Corporate Governance</i> untuk meningkatkan <i>shareholder value</i>
10	Pengembangan Jaringan (<i>Delivery Channel</i>)	Penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Direktur						
	<i>Distribution & Network</i>	<i>Collection & Asset Man.</i>	<i>IT & Operation</i>	<i>Finance, Treasury & Strategy</i>	<i>Compliance</i>	Strategic Human Capital
	13	10	14	13	10	12
	100	100	100	100	100	100



3. Penilaian GCG Direksi

Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu Direksi memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN dengan kriteria: a) Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN; b) *Self-Assessment* GCG Bank, dan; c) ASEAN CG Scorecard.

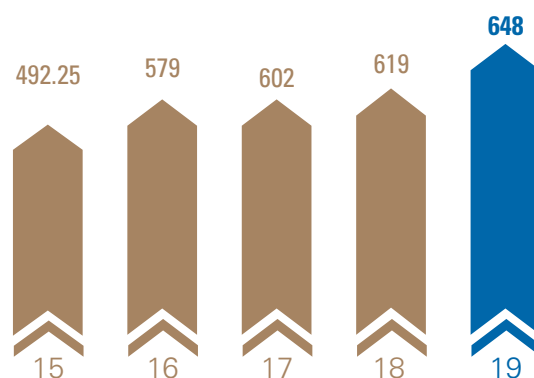
a. Penilaian Kinerja Direksi dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada Surat Kementerian BUMN No. S-153/S-MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dan surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan KPKU pada BUMN; yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*". Perseroan melakukan penilaian kinerja Direksi dengan Prosedur Pelaksanaan *Assessment* KPKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kementerian BUMN membentuk Forum Ekselen BUMN (FEB) yang bertugas untuk melaksanakan *Assessment*.
- Kementerian BUMN menyampaikan kepada Perseroan Tim FEB sebagai personil yang melaksanakan *Assessment* di Perseroan.
- Direksi menunjuk unit kerja *Corporate Strategic & Performance Management Division* (CSPD) sebagai *Liason Officer* dan sekaligus mengkoordinir semua unit kerja untuk melaksanakan *Assessment*.
- Tim FEB melakukan *Assessment* dan membuat kesimpulan atau hasil *Assessment*.
- Tim FEB menyampaikan hasil *Assessment* kepada Kementerian BUMN untuk dapat disetujui.
- Kementerian BUMN menetapkan hasil *Assessment*.

Kriteria penilaian KPKU terdiri atas 7 (tujuh) kategori yang terdiri dari Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Operasi dan Hasil. Selain dari penilaian atas 7 (tujuh) kategori tersebut, penilaian evaluasi kinerja BUMN juga berdasarkan pada dua dimensi penilaian; yaitu (1) Dimensi Proses, melalui faktor-faktor *Approach*, *Deployment*, *Learning*, dan *Integration* (ADLI) dan (2) Dimensi Hasil, melalui faktor-faktor *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

PENCAPAIAN SKOR KPKU BANK BTN 5 TAHUN TERAKHIR
2015-2019



Bank BTN terus meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dengan peningkatan skor KPKU secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, skor KPKU berada pada angka 648 yang menandakan Bank BTN telah berada pada posisi *emerging industry leader* (rentang skor 576-675).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

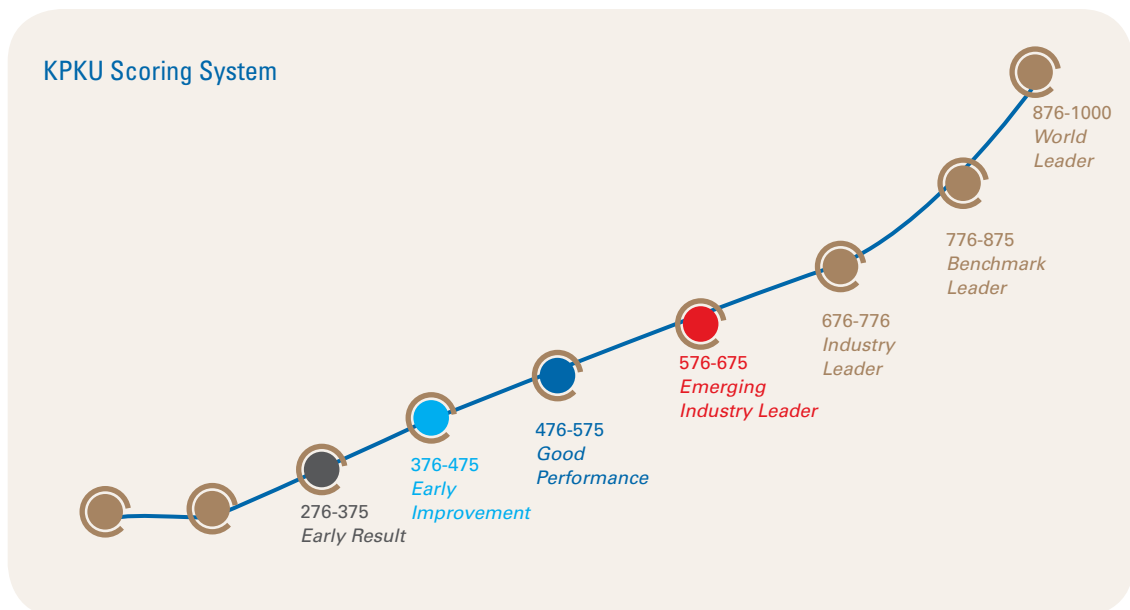


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



b. Self-Assessment GCG Bank

Dalam melakukan penilaian Direksi Perseroan secara *Self Assessment* GCG, penilaian kinerja Direksi mengacu pada target-target RKAP yang telah ditetapkan di awal periode dan dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) Direksi yang berdasarkan pertanggung jawabannya pada aspek pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Perseroan aspek Direksi berdasarkan ketentuan BI/OJK diuraikan pada bagian Penilaian GCG Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

c. ASEAN CG Scorecard

Penilaian kinerja Direksi juga memperhitungkan *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu *ASEAN CG Scorecard*. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian ASEAN CG Scorecard diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Bank.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2019, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Selain penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui RUPS, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan BI/OJK, KPKU dan *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu *ASEAN CG Scorecard*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Bank berdasarkan ketentuan BI/OJK dan *ASEAN CG Scorecard* diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Bank.



TATA KELOLA REMUNERASI DAN TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan memiliki kebijakan tata kelola remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai baik yang bersifat wajib maupun tambahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola remunerasi tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan human capital yang berkualitas. Tata kelola remunerasi Perseroan tidak terlepas dari kemampuan Perseroan untuk senantiasa menjalankan kebijakan berlandaskan pada asas kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan menggunakan jasa konsultan eksternal untuk menjaga remunerasi tetap kompetitif.

Dasar Kebijakan Serta Prosedur dan Mekanisme Penetapan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Tata kelola remunerasi Perseroan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis risiko serta pemberlakukan remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No. 16/SE/DIR/HCSD/2019 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek,

antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variable maupun material risk takers. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

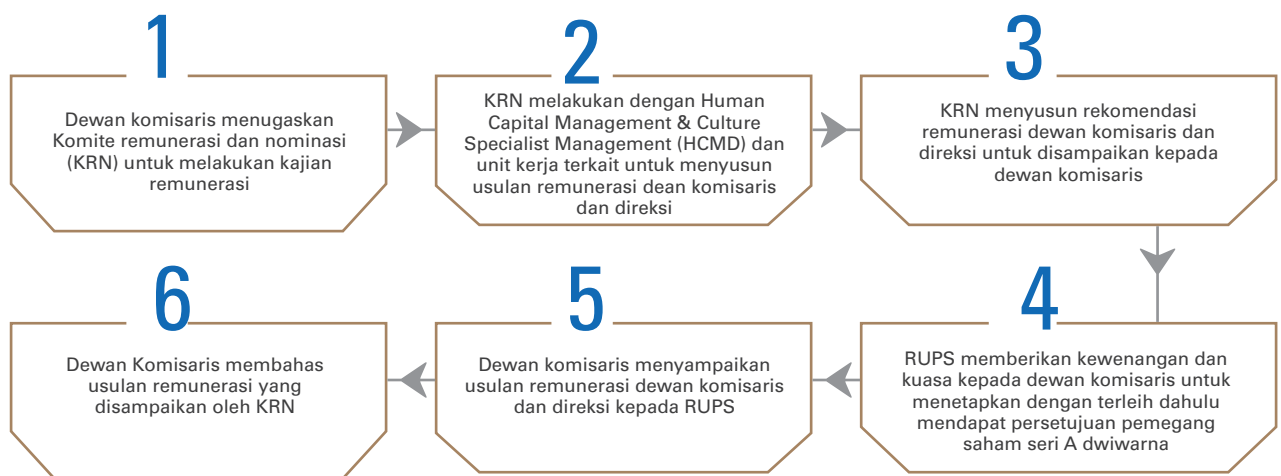


Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, meliputi:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. MRT dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
 - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variable antara MRT dan pegawai non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Pembenahan strategi remunerasi meliputi kajian terhadap kebijakan remunerasi berbasis kinerja dan risiko, pemberdayaan melalui implementasi system remunerasi

serta peningkatan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program manfaat. Pengkajian sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hal-hal antara lain kinerja keuangan Bank, Kompetensi dan kinerja pegawai, dan praktik remunerasi yang berlaku di pasar.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan



menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.

- b. Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
- c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
- e. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 40,5% dari gaji Direktur Utama.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis kantor cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk

daerah-daerah tertentu.

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (long term insentif/LTI).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat tetap dan *variable*, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Opsi Saham yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian shares option dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30%

atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Peserta program MESA dan MESOP adalah pegawai yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit. Jumlah Shares Option yang Diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009**MESOP TAHAP I**

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	1.354.000	1.354.000	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	138.500	138.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
8	Oni Febriarto R.	-	65.000	65.000	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014



KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009

MESOP TAHAP II

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		

Dewan Komisaris

1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-

Direksi

1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	855.500	855.500	1.297,44	Feb 2011 - Ags 2015
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	109.000	109.000	1.297,44	Feb 2011 - Ags 2015
8	Oni Febriarto R.	-	51.000	51.000	1.297,44	Feb 2011 - Ags 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2011 - Ags 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2011 - Ags 2015

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009

MESOP Tahap III

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		

Dewan Komisaris

1	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN SHARES OPTION TAHUN 2009

MESOP Tahap III

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
3	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Maryono	-	-	-	-	-
2	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	828.500	828.500	1.098,36	Feb 2011 - Ags 2016
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7	Sulis Usdoko	-	108.500	108.500	1.098,36	Feb 2011 - Ags 2016
8	Oni Febriarto R.	-	54.500	54.500	1.098,36	Feb 2011 - Ags 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2011 - Ags 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2011 - Ags 2016

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016. Sejak saat itu Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

FAKTOR DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Berbasis Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat *variable* yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi bank
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung

maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan

Implementasi Malus akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi bank yang signifikan atau berdampak negative terhadap finansial bank maupun kesempatan bisnis bank



2. Menyebabkan kerugian keuangan bank yang signifikan
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur bank secara sengaja
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau *industry*
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia bank kepada pihak eksternal secara sengaja

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja
Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu
Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi Budaya Perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan

bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi

Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan Perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok pegawai tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang pegawai tetap yang bersangkutan.

Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang tercermin dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Hubungan antara Remunerasi dengan Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam Peraturan Direksi No. 02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris menyebutkan bahwa jenis remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah tantiem/insentif kinerja, yang merupakan penghargaan atas peningkatan kinerja perusahaan dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Konsultan Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi

Agar penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan eksternal.

Nama Konsultan	: Korn Ferry Indonesia
Lingkup Pekerjaan	: • Kajian gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dibandingkan dengan Pasar • Kajian tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018. • Kajian <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 dan sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2019****Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019**

Persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Adapun uraian jenis dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Dewan Komisaris (orang)	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun (Rp-juta)
Remunerasi		
• Honorarium	17 ^{*)}	11.249
• Tunjangan Rutin (Tunjangan Sandang dan Tunjangan Pajak Penghasilan)	17 ^{*)}	5.253
• Tunjangan Hari Raya	7 ^{**)}	864
• Tantiem	9 ^{**)}	12.842
Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
• Yang dapat dimiliki		
- Asuransi Purna Jabatan	7 ^{**)}	1.826
• Tidak dapat dimiliki		
- Tunjangan Perumahan	-	-
- Tunjangan Kesehatan	-	-
- Tunjangan Transportasi	17 ^{*)}	2.438
- Tunjangan Komunikasi	-	-
Jumlah		34.472

Keterangan:

^{*)} Terdiri dari:

- 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPST tanggal 17 Mei 2019.
- 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada RUPSLB tanggal 27 November 2019.
- 11 (sebelas) orang anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019; RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019 serta RUPSLB tanggal 27 November 2019.

^{**)} Terdiri dari: anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019, RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019 serta RUPSLB tanggal 27 November 2019.



TRANSPARANSI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2019

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun (Rp-juta)
Remunerasi		
• Gaji	14 ^{*)}	25.763
• Tunjangan Rutin (Tunjangan Sandang dan Tunjangan Pajak Penghasilan)	14 ^{*)}	11.183
• Tunjangan Hari Raya	9 ^{**)}	2.355
• Tantiem	10 ^{***)}	27.158
Fasilitas lain dalam bentuk natura		
• Yang dapat dimiliki		
- Asuransi Purna Jabatan	9 ^{**))}	6.362
• Tidak dapat dimiliki		
- Tunjangan Perumahan	9 ^{**))}	684
- Tunjangan Kesehatan	-	-
- Tunjangan Transportasi	14 ^{*)}	2.073
- Tunjangan Komunikasi	14 ^{*)}	356
Jumlah		75.935

Keterangan:

^{*)} terdiri dari:

- 3 (tiga) orang anggota Direksi eksisting.
- 6 (enam) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019, RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019 serta RUPSLB tanggal 27 November 2019.
- 1 (satu) orang anggota Direksi yang diangkat pada RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019.
- 4 (empat) orang anggota Direksi yang baru diangkat pada RUPSLB tanggal 27 November 2019.

^{**))} terdiri dari:

- 3 (tiga) orang anggota Direksi eksisting.
- 6 (enam) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019, RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019 serta RUPSLB tanggal 27 November 2019.

^{***)} terdiri dari:

- 3 (tiga) orang anggota Direksi eksisting.
- 6 (enam) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019, RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019 serta RUPSLB tanggal 27 November 2019.
- 1 (satu) orang anggota Direksi yang menjabat pada periode 2017 namun tidak menjabat lagi setelah RUPST 2018 tanggal 23 Maret 2018.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TRANSPARANSI REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL (TOTAL)

Jumlah Diterima Tahun 2019					
Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai *)	
Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta
10	27.158	9	12.842	11.803	214.144

Jumlah Diterima Tahun 2018					
Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai *)	
Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta
12	42.389	8	17.816	10.478	407.616

Keterangan: *) terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi dan Individual Insentif

JUMLAH REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PER ORANG DALAM 1 TAHUN

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun*)	2019		2018	
	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
> Rp2 miliar	9	9	11	8
> Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	1	2	3	1
> Rp500 juta s.d Rp1 miliar	1	-	-	-
< Rp500 juta	4	6	-	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Informasi Tentang Opsi Saham Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Terkait Opsi Saham yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, seperti yang telah dijelaskan di atas, baik program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016 dan sejak periode 2017 tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai. Di sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perseroan berupaya agar tidak terdapat kesenjangan yang terlalu tinggi terkait dengan remunerasi yang diberikan. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2019 adalah sebagai berikut.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2019

Uraian	Rasio 2019	Rasio 2018	Rasio 2017
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	21,82 : 1	20,96 : 1	18,64 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1	1,18 : 1	1,1 : 1

**RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2019**

Uraian	Rasio 2019	Rasio 2018	Rasio 2017
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,11 : 1	1,1 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,09 : 1	2,95 : 1	2,99 : 1

JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	2019 (orang)	2018 (orang)
Di atas Rp1 miliar	3	-
Di atas Rp500 juta s.d 1 miliar	7	14
Rp500 juta ke bawah	5	-

JUMLAH REMUNERASI BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

Tahun 2019 (Rp-juta)		Tahun 2018 (Rp-juta)	
Tunai	517	Tunai	1.059
Saham	2.289	Saham	4.961

Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang akan dibayarkan selama 3 tahun baru diimplementasikan untuk kinerja tahun buku 2017 (pembayaran di tahun 2018) yang akan dibayarkan (*release*) dalam 3 tahun mulai tahun 2019.

Informasi Kuantitatif Remunerasi Lainnya

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Perseroan kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Perseroan tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi

yang Bersifat Variable (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala melakukan pertemuan melalui forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi dalam rangka menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting yang menyangkut kelangsungan usaha Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOMBTDN/2017

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tanggal 10 Agustus 2017. Sedangkan pelaksanaan rapat Dewan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Komisaris bersama Direksi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 November 2017. Sesuai dengan pedoman tersebut rapat Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris merupakan rapat yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan, akan tetapi apabila perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota

Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi.

2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan sekurang-kurangnya membahas agenda meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - b. Performance Review (termasuk pembahasan tentang APU PPT).
 - c. Pelaksanaan GCG dan Tindak Lanjut temuan Audit Intern maupun Ekstern.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi dilakukan dalam Rapat Terjadwal Dewan Komisaris dan wajib dihadiri oleh minimal $(1/2) + 1$ dari jumlah anggota yang sudah dinyatakan efektif.

Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun pihak terkait apabila diperlukan. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Keputusan yang diambil dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota

Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 51 kali dan Rapat Bersama Direksi sebanyak 41 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT

Dewan Komisaris	Masa Menjabat di Tahun 2019	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/Independen)	1 Januari - 17 Mei 2019	20	20	100.00	17	17	100.00
Asmawi Syam (Komisaris Utama/Independen)	17 Mei - 27 November 2019	27	25	92.59	23	22	95.65



REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT

Dewan Komisaris	Masa Menjabat di Tahun 2019	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	27 November - tutup tahun 2019	4	4	100.00	1	1	100.00
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	1 Januari - 27 November 2019	47	44	93.62	40	36	90.00
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	1 Januari - 27 November 2019	47	44	93.62	40	36	90.00
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	1 Januari - 27 November 2019	47	43	91.49	40	36	90.00
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	1 Januari - 27 November 2019	47	27	57.45	40	19	47.50
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	27 November - tutup tahun 2019	4	4	100.00	1	1	100.00
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	27 November - tutup tahun 2019	4	4	100.00	1	1	100.00
Maurin Sitorus (Komisaris)	1 Januari - 17 Mei 2019	20	19	95.00	17	17	100.00
Sumiyati (Komisaris)	1 Januari - 29 Agustus 2019	35	22	62.86	29	16	55.17
Iman Sugema (Komisaris)	1 Januari - 17 Mei 2019	47	25	53.19	40	22	55.00
Parman Nataatmadja (Komisaris)	1 Januari - 17 Mei 2019	20	6	30.00	17	4	23.53
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	17 Mei - tutup tahun 2019	31	16	51.61	24	13	54.17
Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	29 Agustus - 27 November 2019	12	12	100.00	11	11	100.00
Heru Budi Hartono (Komisaris)	27 November - tutup tahun 2019	4	4	100.00	1	1	100.00
Andin Hadiyanto (Komisaris)	27 November - tutup tahun 2019	4	4	100.00	1	1	100.00
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat		83.01%					



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 8 Januari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Review Kinerja Dewan Komisaris 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata	4. Garuda Wiko 5. Kamaruddin Sjam 6. Maurin Sitorus
Selasa, 15 Januari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata 4. Iman Sugema	5. Kamaruddin Sjam 6. Maurin Sitorus 7. Parman Nataatmadja
Selasa, 22 Januari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Audit Non Dewan Komisaris Atas Hasil Audit TW IV 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata 4. Kamaruddin Sjam	5. Maurin Sitorus 6. Parman Nataatmadja 7. Sumiyati
Rabu, 30 Januari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Surat Masuk Dewan Komisaris 3. Pembahasan Performance Review bulan Desember 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata	4. Kamaruddin Sjam 5. Maurin Sitorus
Rabu, 6 Februari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini : Kajian Hukum Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Finance and Treasury Sdr. Iman Nugroho Soeko 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Kamaruddin Sjam	4. Garuda Wiko 5. Maurin Sitorus
Selasa, 12 Februari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Kamaruddin Sjam 4. Garuda Wiko	5. Iman Sugema 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati
Selasa, 19 Februari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati
Selasa, 26 Februari 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Review Komite Audit Terhadap Performance 4. Review Bulan Januari 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Iman Sugema 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati
Selasa, 5 Maret 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Review Komite Audit Atas Hasil Telaah Awal Kasus 4. Indikasi Fraud	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati

**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 12 Maret 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Konsultasi Kredit	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Parman Nataatmadja
Selasa, 19 Maret 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini: Keluhan Koperasi Karya Griya Nusantara atas Proses KPR Subsidi BTN" 3. Review Komite Non Dekom atas Biaya Promosi BTN 2017 - 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati
Selasa, 26 Maret 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Review Komite Non Dekom atas Biaya Promosi BTN 2017 - 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Iman Sugema 6. Sumiyati 7. Parman Nataatmadja
Selasa, 2 April 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Audit Mengenai POJK No.1/POJK/03/2019 Tentang Penerapan 4. Fungsi Audit Intern pada Bank Umum 5. Konsultasi Kredit	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz	4. Kamaruddin Sjam 5. Maurin Sitorus
Selasa, 9 April 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini Status Dewan Komisaris 3. Paparan Koreno Atas Remunerasi 4. Pengurus Perusahaan, ITMS 5. Perkenalan Kepala Internal Audit Division	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz	4. Kamaruddin Sjam 5. Maurin Sitorus 6. Sumiyati
Selasa, 16 April 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Pemantau Resiko aas Konsultasi Kredit 4. Paparan Komite Audit: a. Implementasi POJK No. 1/ POJK/03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum b. Hasil Review Temuan Internal Audit/Eksternal Audit Serta Tindak Lanjutnya 5. Paparan Komite Remunerasi dan Nominasi atas Rencana Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP) Bank BTN Tahun 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Garuda Wiko 6. Iman Sugema 7. Maurin Sitorus 8. Parman Nataatmadja	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 23 April 2019	- Surat Masuk Dewan komisaris - Isu Terkini - Paparan Komite Pemantau Resiko atas Konsultasi Kredit - Paparan Komite Audit: - Publikasi Laporan Keuangan Bulan Maret 2019 Un audited - Penetapan KAP Tahun Buku 2019 - Pembahasan Penyesuaian RBB Bank BTN Tahun 2019 - 2021	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Maurin Sitorus - Sumiyati	
Selasa, 30 April 2019	- Surat Masuk Dewan Komisaris - Isu Terkini - Laporan Triwulan 1 Komite Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan komisaris Trwulan 1 Kepada Kementrian BUMN - Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan 2019 - Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Maurin Sitorus - Sumiyati	
Selasa, 7 Mei 2019	- Surat Masuk Dewan Komisaris - Isu Terkini - Paparan Komite Audit atas implementasi POJK No. 01/POJK/03/2019 tentang Persiapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum - Konsultasi Kredit - Pembahasan Implementasi Transformasi BTN dan Permasalahannya	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Maurin Sitorus - Sumiyati	
Selasa, 14 Mei 2019	- Surat Masuk Dewan Komisaris - Isu Terkini - Mengikuti Acara Gladi Bersi RUPS Tahunan 2019 (pada pukul 14.00 WIB)	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam	- Garuda Wiko - Iman Sugema - Maurin Sitorus - Sumiyati
Jumat, 17 Mei 2019	- Penggantian Akuntan Publik - Isu Terkini	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam	- Garuda Wiko - Iman Sugema - Maurin Sitorus - Sumiyati
Selasa, 21 Mei 2019	- Perkenalan Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris baru - Isu Terkini - Surat Masuk - Laporan masing-masing Komite Dewan Komisaris baru - Arahan Komisaris Utama	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Sumiyati	

**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 28 Mei 2019	1. Surat masuk 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite audit a. Performance Review Bulan April 2019 b. Review Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter)	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz	5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam 7. Iman Sugema 8. Sumiyati
Selasa, 18 Juni 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Audit: Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan Audited 2018	1. Eko D. Heripoerwanto 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Iman Sugema	
Kamis, 20 Juni 2019	Pembahasan Usulan Revisi RBB Tahun 2019 -2021 dan RKAP Tahun 2019	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi	4. Lucky Fathul Aziz 5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema
Selasa, 25 Juni 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Pemantau Risiko: Konsultasi Kredit 4. Paparan Komite Audit: Performance Review Bulan Mei 2018	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Iman Sugema 6. Sumiyati	
Selasa, 2 Juli 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi	4. Garuda Wiko 5. Iman Sugema 6. Sumiyati
Selasa, 9 Juli 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz	4. Garuda Wiko 5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema
Selasa, 16 Juli 2019	Performance Review Bulan Mei 2019 dan Revisi RBB Tahun 2019 -2021	1. Asmawi Syam 2. Lucky Fathul Aziz 3. Garuda Wiko	4. Kamaruddin Sjam 5. Sumiyati
Selasa, 23 Juli 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Mekanisme dan Penetapan Kriteria Calon Pengurus	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi	4. Lucky Fathul Aziz 5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam
Jumat, 26 Juli 2019	Pembahasan Draft Publikasi Laporan Keuangan Per 30 Juni 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Arie Coerniadi 2. Lucky Fathul Aziz	3. Kamaruddin Sjam 4. Sumiyati



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa 30 Juli 2019	- Isu Terkini - Surat Masuk - Profil Risiko Semester I 2019 - Mekanisme Dan Penetapan - Calon Pengurus Perusahaan Pembahasan Struktur Organisasi	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Sumiyati
Selasa, 6 Agustus 2019	- Surat Masuk - Isu Terkini - Paparan Komite Audit atas Temuan Pemeriksaan OJK - Penetapan Calon Pengurus Perseroan	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko	- Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Sumiyati
Selasa, 13 Agustus 2019	Pembahasan Calon Pengurus Perusahaan	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko	- Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Sumiyati
Selasa, 20 Agustus 2019	- Surat Masuk - Isu Terkini - Paparan Komite Audit Atas Performance Review Bulan Juli 2019	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema	
Selasa, 27 Agustus 2019	- Surat Masuk - Isu Terkini - Paparan Komite Audit Atas Temuan Audit	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Kamaruddin Sjam	- Iman Sugema - Sumiyati
Selasa, 3 September 2019	- Surat Masuk - Isu Terkini - Surat Pengunduran Diri Sdr Suprajarto Sebagai Direktur utama - Kick Off Meeting PSS EY Atas Pelaksanaan Limited Review dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 - Surat Direksi untuk Melakukan Audit Khusus Kredit BSP - Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi - Perubahan Susunan Komite Dewan komisaris	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 10 September 2019	- Surat Masuk - Isu Terkini	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Marwanto Harjowiryo

**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 17 September 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Tekini 3. Paparan Komite Audit Kasus Temuan Internal Audit Triwulan II 2019 4. Permohonan persetujuan Dewan komisaris Atas Penugasan Direktur UUS BTN	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko 5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 24 September 2019	1. Surat Masuk Dewan komisaris 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Audit Atas Kasus Temuan internal Audit Triwulan II 2019 4. Paparan Komite Audit Atas Kasus Performance Review BTN s/d Agustus 2019	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz 5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam 7. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 9 Oktober 2019	1. Surat Masuk Dewan Komisaris 2. Isu Terkini 3. Penunjukkan Pimpinan RUPSLB BTN Tanggal 18 Oktober 2019	1. Asmawi Syam 2. Lucky Fathul Aziz 3. Kamaruddin Sjam	4. Iman Sugema 5. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 9 Oktober 2019	1. Monitoring Progress NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN dan Startegi Likuiditas dalam rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 2. Perkembangan Rencana Penyertraan Modal pada lotus putra 3. Update Kuota FLPP	1. Asmawi Syam 2. Lucky Fathul Aziz 3. Kamaruddin Sjam 4. Iman Sugema 5. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 15 Oktober 2019	1. Surat Masuk Dewan Komiaris 2. Isu Terkini	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz	5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam 7. Iman Sugema 8. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 22 Oktober 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Masa Jabatan Komite Dewan Komisaris	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko	5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 29 Oktober 2019	1. Surat Masuk 2. isu Terkini 3. Masa Jabatan Komite Dewan Komisaris	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz	4. Kamaruddin Sjam 5. Iman Sugema 6. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 5 November 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Paparan Komite Atas Draft Piagam Komite Dewan Komisaris	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz	5. Kamaruddin Sjam 6. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 12 November 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Wawancara Calon Anggota Komite Dewan Komisaris	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko	5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 19 November 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Paparan Hasil Limited Review EY atas Laporan Keuangan dan Laba Rugi Posisi September 2019 4. Presentasi dan Persetujuan Piagam Komite-Komite PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 26 November 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Laporan Kinerja Bank BTN s.d Oktober 2019 4. Dokumen Recovery Plan 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko	5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 3 Desember 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Perkenalan Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris 4. Komposisi Dewan Komisaris Berdasarkan Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 27 November 2019	1. Chandra M.Hamzah 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Armand B. Arief 4. Ahdi Jumhari Luddin 5. Heru Budi Hartono 6. Andin Hadiyanto	
Selasa, 11 Desember 2019	1. Surat Masuk 2. Isu Terkini 3. Koordinasi Komite Dewan Komisaris	1. Chandra M.Hamzah 2. Armand B. Arief 3. Ahdi Jumhari Luddin	4. Heru Budi Hartono 5. Andin Hadiyanto
Selasa, 18 Desember 2019	1. Surat Masuk 2. Informasi Terkini 3. Resume Komite Audit atas Temuan OJK	1. Chandra M.Hamzah 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Armand B. Arief	4. Ahdi Jumhari Luddin 5. Heru Budi Hartono 6. Andin Hadiyanto
Senin, 23 Desember 2019	1. Surat Masuk 2. Informasi Terkini 3. Pendalaman Kasus BTN oleh Komite Audit	1. Chandra M.Hamzah 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Armand B. Arief	4. Ahdi Jumhari Luddin 5. Heru Budi Hartono 6. Andin Hadiyanto

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Rabu, 30 Januari 2019	Performance Review bulan Desember 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata	4. Kamaruddin Sjam 5. Maurin Sitorus
Selasa, 12 Februari 2019	Laporan Keuangan Audit 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Kamaruddin Sjam 4. Garuda Wiko	5. Iman Sugema 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati

**RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Rabu, 13 Februari 2019	Laporan Keuangan Audit 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Kamaruddin Sjam	4. Garuda Wiko 5. Maurin Sitorus 6. Sumiyati
Selasa, 19 Februari 2019	1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Khususnya Cakupan Tugas Dalam Kontrak Kantor Akuntan Publik 2. Progress Laporan Keuangan Audited Tahun 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati	
Jumat, 22 Februari 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Audit 2018 dengan EY (lanjutan). Rapat yang semula dijadwalkan tgl 19 Februari 2019 atas permintaan KAP EY di undur menjadi tanggal 22 Februari 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz Hadibrata 4. Kamaruddin Sjam 5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus	
Selasa, 26 Februari 2019	Performance Review Bulan Januari 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Iman Sugema 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati
Selasa, 12 Maret 2019	Progress Laporan Keuangan Audited Tahun 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Parman Nataatmadja
Rabu, 13 Maret 2019	Progress Laporan Keuangan Audit Tahun 2018	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Lucky Fathul Aziz	3. Kamaruddin Sjam 4. Maurin Sitorus
Selasa, 19 Maret 2019	1. Paparan Direksi atas Tindak Lanjut Temuan OJK Dalam Perbaikan Proses Bisnis Unit Usaha Syariah 2. Evaluasi, Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tahun 2019	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Garuda Wiko 6. Maurin Sitorus 7. Sumiyati	
Selasa, 26 Maret 2019	Performance Review Bulan Februari 2019 (termasuk Performance UUS Secara Terpisah)	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam	5. Iman Sugema 6. Sumiyati 7. Parman Nataatmadja
Selasa, 2 April 2019	Perkembangan dan Prospek Bisnis Syariah Ditinjau dari Arah kebijakan Organisasi, Sistem, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Insani	1. I Wayan Agus Mertayasa 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Kamaruddin Sjam 5. Maurin Sitorus	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 9 April 2019	- Status Anggota Dewan Komisaris - Remunerasi Pengurus Perusahaan - Paparan Direksi atas Kredit Grup Binakarya - Strategi yang Menyeluruh Terkait Mitigasi Fraud	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Maurin Sitorus - Sumiyati	
Selasa, 16 April 2019	Paparan Direksi atas Perkembangan Rencana Penyertaan Modal BTN pada PT Permodalan Nasional Madani <i>Investment Management</i>	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam	- Garuda Wiko - Iman Sugema - Maurin Sitorus - Parman Nataatmadja
Selasa, 23 April 2019	Penyesuaian RBB Bank BTN Tahun 2019 - 2021	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Maurin Sitorus - Sumiyati
Selasa, 25 April 2019	- Pembahasan Lanjutan Penyesuaian Rencana bisnis Bank Tahun 2019 2021 - Pembahasan Lanjutan <i>Draft</i> Laporan Tahunan 2018	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Maurin Sitorus - Sumiyati	
Selasa, 30 April 2019	- Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan 2019 - Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Iman Sugema - Maurin Sitorus - Sumiyati
Selasa, 7 Mei 2019	Pembahasan Implementasi Transformasi BTN dan Permasalahannya	- I Wayan Agus Mertayasa - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Kamaruddin Sjam - Maurin Sitorus - Sumiyati
Selasa, 28 Mei 2019	- Performance Review Bulan April 2019 - Laporan CKPN 2018 dan Rencana Pembentukan CKPN 2019 - Piagam internal Audit	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko	- Iman Sugema - Kamaruddin Sjam - Sumiyati
Selasa, 18 Juni 2019	- Program Tindak Lanjut Temuan Audit OJK - Laporan CKPN 2018 dan Rencana Pembentukan CKPN 2019	- Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema	
Jumat, 21 Juni 2019	Persetujuan Usulan Revisi Revisi RBB 2029-2021 Dan RKAP 2019	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema

**RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Salasa, 25 Juni 2019	- Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit OJK <i>Performance Review</i> Bulan Mei 2019	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Sumiyati
Selasa, 2 Juli 2019	<i>Strategic Plan</i>: Teknologi Informasi - Inisiatif Transformasi BTN	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi	- Garuda Wiko - Iman Sugema - Sumiyati
Selasa, 9 Juli 2019	- Perubahan Struktur Organisasi Bank BTN - Penyertaan Modal PNMIM	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema
Selasa, 16 Juli 2019	<i>Performance Review</i> Bulan Mei 2019 dan Revisi RBB Tahun 2019 -2021	- Asmawi Syam - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko	- Kamaruddin Sjam - Sumiyati
Selasa, 23 Juli 2019	Monitoring Kualitas Kredit, Outstanding NPL dan Kecukupan Pemenuhan CKPN dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019 - 2021	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi	- Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam
Selasa, 30 Juli 2019	- Profil Risiko Semester I 2019 - Mekanisme dan Penetapan Calon Pengurus Perusahaan - Pembahasan Struktur Organisasi	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz	- Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Sumiyati
Selasa, 6 Agustus 2019	- Progress Rencana Kerjasama Strategis dan Penyertaan modal pada PT Asuransi Jiwasraya Putra (Lotus) <i>Monitoring Progress</i> NPL dan Kecukupan Pemenuhan CKPN dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 - Strategi <i>Consumer Funding</i> dan <i>Commercial Funding</i> dalam Rangka Menjaga Likuiditas	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Sumiyati	
Selasa, 20 Agustus 2019	<i>Performance Review</i> Bulan Juli 2019 <i>Monitoring Progress</i> NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, dan Strategis Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Sumiyati	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 27 Agustus 2019	Monitoring Progress NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, dan Strategis Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Kamaruddin Sjam 5. Iman Sugema 6. Sumiyati	
Selasa, 3 September 2019	Monitoring Progress NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz	5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam 7. Iman Sugema 8. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 10 September 2019	1. Persiapan RUPS LB Tanggal 18 Oktober 2019 2. Monitoring Program NPL Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 3. Perkembangan Aspek Legal Penanganan Kasus BTN	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz 5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 17 September 2019	Monitoring Progress NPL Kecukupan Pemenuhan CKPN Strategi Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz 5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 24 September 2019	1. Performance Review BTN s/d Agustus 2019 2. Monitoring Progress NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN dan Strategis Likuiditas Dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Arie Coerniadi 4. Lucky Fathul Aziz 5. Garuda Wiko 6. Kamaruddin Sjam 7. Iman Sugema 8. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 9 Oktober 2019	1. Monitoring Progress NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN dan Strategi Likuiditas dalam rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 2. Perkembangan Rencana Penyertaan Modal pada lotus putra 3. Update Kuota FLPP	1. Asmawi Syam 2. Lucky Fathul Aziz 3. Kamaruddin Sjam 4. Iman Sugema 5. Marwanto Harjowiryo	

**RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Selasa, 22 Oktober 2019	<i>Performance Review</i> Bulan September 2019 <i>Monitoring Progress</i> NPL Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas dalam Rangka Pencapaian target Revisi RBB 2019 - 2021 - Pendalaman Performance dan Aktivitas Unit Usaha Syariah	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Marwanto Harjowiryo
Selasa, 29 Oktober 2019	<i>Monitoring Progress</i> NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 - Pendalaman Performance dan Aktivitas Unit Usaha Syariah - Strategi dan langkah-Langkah Optimalisasi CASA - Rencana Penyertaan Modal pada Lotus Putra	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Iman Sugema - Marwanto Harjowiryo
Selasa, 5 November 2019	- Penjelasan Penundaan Rencana RUPS LB BTN <i>Monitoring Progress</i> NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 - Pendalaman Performance dan Aktivitas Unit Usaha Syariah - Strategi dan langkah-Langkah Optimalisasi CASA	- Asmawi Syam - Eko D. Heripoerwanto - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Kamaruddin Sjam - Marwanto Harjowiryo
Selasa, 12 November 2019	- Proses Rekrutmen SEVP Funding - Dukungan IT Terhadap Proses Bisnis Bank Khususnya Optimalisasi CASA <i>Monitoring Progress</i> NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021	- Asmawi Syam - Arie Coerniadi - Lucky Fathul Aziz - Garuda Wiko - Kamaruddin Sjam - Marwanto Harjowiryo



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
Selasa, 19 November 2019	1. <i>Monitoring Progress</i> NPL, Kecukupan Pemenuhan CKPN, Strategi Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas dalam Rangka Pencapaian Target Revisi RBB 2019-2021 2. Presentasi Prognosa dan Deviasi Pencapaian target atas Dasar Penyesuaian Revisi RBB 2019-2020	1. Asmawi Syam 2. Arie Coerniadi 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko 5. Kamaruddin Sjam 6. Marwanto Harjowiryo	
Selasa, 26 November 2019	1. <i>Recovery Plan</i> 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2. Laporan Kinerja Bank BTN s.d Oktober 2019	1. Asmawi Syam 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Lucky Fathul Aziz 4. Garuda Wiko	5. Kamaruddin Sjam 6. Iman Sugema 7. Marwanto Harjowiryo
Selasa, 3 Desember 2019	Perkenalan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 27 November 2019	1. Chandra Hamzah 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Armand B. Arief	4. Ahdi Jumhari Luddin 5. Heru Budi Hartono 6. Andin Hadiyanto

Rencana Rapat Dewan Komisaris 2020

Berdasarkan keputusan pada Rapat Internal Dewan Komisaris, telah disepakati bahwa Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2020 akan dilaksanakan 1 kali tiap bulan setiap hari Rabu dan sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat Internal bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

1. Membahas Isu Terkini
2. *Review/Kajian* terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya
3. Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai *review/kajian* yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
4. Untuk minggu ke-3 terdapat tambahan agenda berupa Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank.
5. Dewan Komisaris juga melakukan Rapat Bersama dengan Direksi sekurang-kurangnya dengan agenda Paparan Direksi mengenai kinerja Bank.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris

Dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dilakukan evaluasi tindak lanjut hasil-hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya kemudian dilanjutkan pembahasan surat-surat masuk Dewan Komisaris periode setelah rapat sebelumnya sampai dengan rapat hari yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Komite secara aktif memonitor apakah tindak lanjut atas arahan-arahan dan nasihat dalam rapat yang telah disampaikan kepada Direksi baik melalui surat maupun secara lisan telah ditindaklanjuti.

Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi, pelaksanaannya mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan pasal 13 yaitu Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi, serta mengacu pada Ketetapan Direksi No. 07/DIR/ KD/ CMPD/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 28 September 2017.

Sesuai dengan pedoman tersebut, Direksi wajib mengadakan Rapat:

1. Rapat Direksi (Rapat Internal Direksi) merupakan rapat Direksi yang hanya dihadiri oleh anggota Direksi dan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal



Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris merupakan rapat Direksi yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan guna Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI



Agenda Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. *Performance Review* (termasuk pembahasan tentang APU PPT); dan
3. Pelaksanaan GCG dan Tindak Lanjut temuan Audit Intern maupun Ekstern.

Untuk pelaksanaan Rapat Bersama yaitu Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Di sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 282 kali dan Rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT

Direksi	Masa Menjabat di Tahun 2019	Rapat Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Maryono (Direktur Utama)	1 Januari - 29 Agustus 2019	176	163	92,61	3	3	100,00
Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking)	1 Januari - 27 November 2019	264	234	88,64	3	3	100,00
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	27 November - tutup tahun 2019	19	18	94,74	1	1	100,00



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT

Direksi	Masa Menjabat di Tahun 2019	Rapat Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Iman Nugroho Soeko (Direktur Finance & Treasury)	1 Januari - 17 Mei 2019	118	97	82,20	2	1	50,00
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	1 Januari - tutup tahun 2019	282	257	91,13	4	4	100,00
Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	1 Januari - 27 November 2019	265	225	84,91	3	2	66,67
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)	1 Januari - 27 November 2019	264	239	90,53	3	3	100,00
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	1 Januari - tutup tahun 2019	282	271	96,10	4	2	50,00
Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	1 Januari - 27 November 2019	264	214	81,06	3	3	100,00
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	1 Januari - tutup tahun 2019	282	255	90,43	3	3	100,00
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	29 Agustus - tutup tahun 2019	108	97	89,81	1	1	100,00
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	27 November - tutup tahun 2019	19	18	94,74	1	1	100,00
Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	27 November - tutup tahun 2019	19	18	94,74	1	1	100,00
Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	27 November - tutup tahun 2019	19	18	94,74	1	1	100,00
Rata-rata Kehadiran Direksi dalam Rapat				90,47%			



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
3 Januari 2019	Internal Direksi (JP)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
7 Januari 2019	Monitoring Penyelesaian Temuan KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Dasuki Amsir	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
	Document I-Docs (Tindak Lanjut Temuan OJK)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Budi Satria; Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
9 Januari 2019	Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP) Bank BTN	1. Maryono 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto; Yossi Istanto
	Rencana Strategis Bidang Kredit Tahun 2019	1. Maryono 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Anggaran Promosi Tahun 2019	1. Maryono 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
10 Januari 2019	Laporan 5 KC Percontohan & Persiapan Roll Out Nasional TransformasiTransformasi	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto
	Rencana Strategis Bidang Dana Tahun 2019	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto;
14 Januari 2019	Monitoring Penyelesaian Temuan KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Yossi Istanto
	Monitoring Tindak Lanjut Temuan OJK	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
15 Januari 2019	Komite Manajemen Risiko Triwulan IV	1. Iman Nugroho Soeko 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto; Yossi Istanto
	Komite Sanksi Disiplin Pegawai (Hasil Audit Khusus KC Samarinda)	1. Iman Nugroho Soeko 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria; Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Update Progres PSAK 71	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
16 Januari 2019	PT Pilar Artha Mandiri - Apartemen El Centro Bogor (Restrukturisasi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	PT Cahaya Bandung Jaya - Apartemen Landmark Residence Bandung (Restrukturisasi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir; Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	PT MAM Energindo - Pembelian Condotel Tower C Titanium Square (Kredit Investasi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	PT Wahana Ekonomi Semesta - Proyek Intermark Mixed Used Building	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
17 Januari 2019	ALCO	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto
	RKK – AMD (Sisipan)	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto
	Pengembangan Usaha Asuransi (Lotus Putra)	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto
	Internal (Sisipan)	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
20 Januari 2019	Pembahasan RBB - RKAP 2019 (Persiapan Pertemuan dengan OJK)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Strategi Ekspansi Kredit Tahun 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Dasuki Amsir	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
23 Januari 2019	Kolaborasi Tabungan & Digital Payment Transaction	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	RKK - PT Adhi Persada Properti - Kredit Investasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	RKK - PT Angkasa Pura 1 - Permohonan Waiver	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Pembahasan Mutasi Pegawai	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
24 Januari 2019	Persiapan RUPST 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Strategi Ekspansi Kredit	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Revisi RBB	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
25 Januari 2019	Draft Temuan Kantor Akuntan Publik	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
31 Januari 2019	Penyelesaian LAT/DAT & Pembebanan Biaya	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto
	Internal Direksi (Ehaps)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
4 Februari 2019	Tindak Lanjut Temuan KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Update Program Kerja & Eksekusinya (Team Kolaborasi Funding & Digital Banking)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
6 Februari 2019	RKK - PT Blauran Cahayamulia - Restrukturisasi Kredit Investasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu; Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	RKK - PT MAM Energindo - Permohonan Baru Kredit Investasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
8 Februari 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Yossi Istanto
	Tindak Lanjut Temuan KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
11 Februari 2019	RKK - PTPN VIII - Kredit Investasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	RKK - PT Graha Mapan Lestari - Restrukturisasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
19 Februari 2019	Klaim Bank Garansi CV Jaya Bersama - PT Indosat	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Persetujuan Prinsip Line Facility PT Angkasa Pura I	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Persetujuan Prinsip Line Facility PLN	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
20 Februari 2019	Revisi Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK)	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	RKK - PT PPA - Pendanaan Kepada PT LSS	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	RKK - PT PPA - Pendanaan Kepada End User (Refinancing)	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Kewenangan Memutus Kredit Konstruksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Kewenangan Memutus Kredit Konsumer & Komersial	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
24 Februari 2019	Tindak lanjut Temuan KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
25 Februari 2019	Pertanggungjawaban Kinerja Laporan Keuangan Dana pensiun BTN per 31 Desember 2018	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Prognosa Kinerja Februari 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
26 Februari 2019	ALCO	1. Iman Nugroho Soeko 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Dasuki Amsir; Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
27 Februari 2019	PT Malioboro Ensui - Restrukturisasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT Tri Tirta Permata - Restrukturisasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT Sipoa Group - Penunjukan Pengelola Proyek	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	PT Blauran Cahaya Mulia & PT Dipta Wimala Bahagia - Banding Pasal	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	PT Istiajaya Gunaperkasa - KYG	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT Balikpapan Skylink Property - KYG & KPL	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT Gaperi Prima - Banding Pasal DADAKAN	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
3 Maret 2019	PT MAM Energindo - Banding Pasal DADAKAN	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Finalisasi Audit KAP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
6 Maret 2019	Permohonan KAR - Laurence DADAKAN	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT. PLN - Corporate Loan (KI)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT. Patra Jasa - Corporate Loan (KI)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Rencana Penyertaan Modal pada PNM-IM	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto
13 Maret 2019	Internal Direksi (Sisipan)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Prognosa Kinerja Maret 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Yossi Istanto
	ALCO	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Yossi Istanto
	PT. Perkebunan Nusantara VIII (banding syarat dan ketentuan pada SP2K)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
15 Maret 2019	Prognosa Kinerja Maret 2019 (Pending Matters)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
18 Maret 2019	Program Kerja Kantor Wilayah	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria; Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
19 Maret 2019	Prognosa Kinerja Maret 2019 (Perubahan)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto
	PT Patra Jasa (Review Putusan Notula Rapat Fasilitas Kredit Korporasi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
	PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (ijin prinsip dlm Kredit Sindikasi) SISIPAN	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
	PT PP Tbk (Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond - Line Facility)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
20 Maret 2019	ISPI (Kredit Konstruksi dan PRK Siaga)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
	PT Pollux Aditama Kencana (Penambahan Plafond - Kredit Konstruksi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
	PT Fanindo Pasar (Refinancing Pasar Plaza Botania 2 - Kredit Investasi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
	PT Tri Tirta Permata (Banding Persetujuan Restrukturisasi - Kredit Konstruksi)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir
22 Maret 2019	Strategi Pemenuhan Target dan Prognosa Maret 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Prognosa Kinerja Maret 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto
25 Maret 2019	Persiapan MOU / PKS dengan BUMN Perumahan	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto
	Rencana Penjualan Asset Debitur Macet dan Hapus Buku Kepada Debitur Prima	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto
	Persiapan RUPST 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
26 Maret 2019	Tindaklanjuti Hasil Audit OJK	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto
	Overview Kinerja 2018	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto
1 April 2019	Review Target Maret	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Update Penyelesaian LAT & DAT	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto; Yossi Istanto
4 April 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
9 April 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Revisi RBB	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Budi Satria 7. Yossi Istanto
10 April 2019	Materi HCMD	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Laporan Proses Transformasi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi SatriaDasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
15 April 2019	ALCO	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Rencana Penyertaan Modal Bank BTN pada PNM-IM	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir; Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Permasalahan Novasi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
16 April 2019	Materi HCMD	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Budi Satria; Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Usulan Penyesuaian RBB	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Budi Satria; Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
18 April 2019	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Iman Nugroho Soeko 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Task Force DPK Ritel	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Task Force NPL / CKPN	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria; 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Update Agenda dan Persiapan RUPST	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
22 April 2019	Penerbitan Global Bond	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Yossi Istanto
	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank BTN Tahun 2018	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Persiapan Analyst Meeting	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Task Force DPK Ritel	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Materi KPI	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso	5. Nixon L.P Napitupulu 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
30 April 2019	Progress Implementasi PSAK 71	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
6 Mei 2019	Internal Direksi (Ehaps)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
7 Mei 2019	Performance Review	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
8 Mei 2019	PT. Angkasa Pura 1 (Persero) (Corporate Loan)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PT. Sipoa Group (PELAPORAN TERKAIT penunjukan kuasa Sdr.Jefri suryono utk Sipoa Group)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	PNRI (Laporan TL Permohonan KMK PNRI)	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
13 Mei 2017	Internal Direksi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	ALCO	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Prognosa NPL Mei - Juni 2019	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
16 Mei 2019	ALCO	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
	Klaim Bank Garansi PT Pertamina EP	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto
17 Mei 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Iman Nugroho Soeko 3. Oni Febriarto Rahardjo 4. R. Mahelan Prabantarikso 5. Nixon L.P Napitupulu	6. Budi Satria 7. Dasuki Amsir 8. Andi Nirwoto 9. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
20 Mei 2019	Prognosa Mei 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
24 Mei 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
29 Mei 2019	Materi HCMD	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
10 Juni 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
11 Juni 2019	ALCO	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Revisi RBB	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Perubahan Nomenklatur & Supervisi Divisi, Progres Report Anak Usaha	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Usulan Susunan Alternate Direktur	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
12 Juni 2019	Performance Review dan Prognosa	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
18 Juni 2019	Pembahasan Evaluasi dan Penutupan Kantor Kas	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
24 Juni 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Prognosa Kinerja Juni 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Yossi Istanto
25 Juni 2019	Struktur Organisasi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
1 Juli 2019	Cash Management System (CMS)	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Struktur Organisasi Kantor Cabang	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Monitoring Perkembangan Realisasi NPL Terhadap Target Akhir Tahun	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
3 Juli 2019	Monitoring Kinerja NPL Juni Dibandingkan Target Revisi Akhir Tahun	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Budi Satria	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
5 Juli 2019	ALCO	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir
	Rapat Komite Kredit : Restrukturisasi Sipoa Group	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir 6. Yossi Istanto
8 Juli 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Yossi Istanto
10 Juli 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Yossi Istanto
	Monitoring NPL	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Yossi Istanto
	Kerjasama Strategis dengan Asuransi Lotus Putera	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir 6. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
15 Juli 2019	Komite Manajemen Risiko	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Yossi Istanto
	Rencana Penerbitan Junior Global Bond 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Update Agenda RUPSLB	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
17 Juli 2019	ALCO	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Performance Review Juni	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
22 Juli 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Materi HCMD	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Prognosa Kinerja Juli 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
25 Juli 2019	Persiapan Analyst Meeting	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Dasuki Amsir 5. Yossi Istanto
29 Juli 2019	Laporan Implementasi PSAK 71 & 73	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
	Prognosa NPL dan DPK Ritel	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Internal Direksi	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
31 Juli 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Budi Satria 6. Andi Nirwoto
1 Agustus 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
5 Agustus 2019	Presentasi RSTI 2019 -2021	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Dasuki Amsir	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
	Prognosa NPL Agustus 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	DPK Ritel	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
6 Agustus 2019	Update agenda RUPSLB & Prognosa NPL Agustus	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Budi Satria 5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto
7 Agustus 2019	ALCO	1. Maryono 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Dasuki Amsir	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
	Update Implementasi PSAK 71 & 73	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir 6. Yossi Istanto
	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso	4. Nixon L.P Napitupulu 5. Dasuki Amsir 6. Yossi Istanto
12 Agustus 2019	Prognosa NPL Agustus 2019	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Optimalisasi CMS	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
15 Agustus 2019	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
19 Agustus 2019	Update Kinerja NPL	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Update Skenario RUPSLB	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
20 Agustus 2019	Update NPL Konsumer	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Proses Bisnis KPR Non Subsidi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
21 Agustus 2019	ALCO	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Update Pricing Feebased Income Admin dan Layanan	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
27 Agustus 2019	Nilai Bisnis dan Valuasi PT Lotus Putera	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	Update PSAK 71	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
	Rencana Strategis IT BTN	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto
	Internal Direksi	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto
28 Agustus 2019	RKK : PT. Urban Jakarta Propertindo	1. Maryono 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. R. Mahelan Prabantarikso 4. Nixon L.P Napitupulu	5. Budi Satria 6. Dasuki Amsir 7. Andi Nirwoto 8. Yossi Istanto



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
30 Agustus 2019	Internal Direksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Bahama Development	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Binakarya Bangun Propertindo	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Warna Warni Investama	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Dipanaru Rucitra	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Visi Investama	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Tri Tirta Permata	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	PT Blauran Cahayamulia	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
2 September 2019	PT Borneo Delapan Enam	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
	Internal Direksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
4 September 2019	Materi HCMD	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	Perubahan Kebijakan Kredit Komersial dan Konsumer	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Realisasi NPL Agustus 2019	1. Nixon L.P Napitupulu 2. Budi Satria 3. Dasuki Amsir	4. Yossi Istanto 5. Elisabeth Novie Riswanti
	ALCO	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti
9 September 2019	Progress Update Rencana Kerjasama Strategis dan Penyertaan Modal Pada PT. Asuransi Jiwasaraya Putra (Lotus Putra)	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
11 September 2019	Perubahan RBB 2019 - 2021	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	Pembahasan Lotus Putra	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso	3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria
	Materi HCMD	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto: Elisabeth Novie Riswanti
16 September 2019	Pognosa NPL September	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	DPK ritel	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria 4. Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
18 September 2019	Evaluasi Proses Bisnis KPR Subsidi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	ALCO	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
23 September 2019	Internal Direksi (Media Handling)	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	Program KPR Subsidi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	Lotus Putra	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
25 September 2019	PT Satwika Permai Indah	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Properti Bali Benoa	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria; Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Bumi Daya Makmur	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria; Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Benoa Nusantara	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Menara Perkasa Margahayuland	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria; Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
25 September 2019	PT Mega Pesanggrahan Indah	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Totalindo Eka Persada	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Kuala Jaya Realty	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Binakarya Bangun Propertindo	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
26 September 2019	PT Cahaya Raga	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria 4. Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Titanium Property	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria 4. Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
26 September 2019	PT Griya Karunia Sejahtera	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria 4. Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Tirta Persada Development	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria Dasuki Amsir	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti
27 September 2019	PT Tri Tirta Permata	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Malioboro Ensu	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti
	PT Megatama Putra	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto 8. Elisabeth Novie Riswanti



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
30 September 2019	Kinerja NPL	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti
	Internal Direksi	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Yossi Istanto 5. Elisabeth Novie Riswanti
2 Oktober 2019	Proses Bisnis KPR Subsidi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Dasuki Amsir 6. Andi Nirwoto 7. Yossi Istanto
	DPK Ritel	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Limited Review Laporan Keuangan Juli 2019	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
7 Oktober 2019	ALCO	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Elisabeth Novie Riswanti
	Lotus Putra	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Elisabeth Novie Riswanti
7 Oktober 2019	DPK Ritel	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Andi Nirwoto 5. Elisabeth Novie Riswanti
	Realisasi NPL Oktober 2019	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Elisabeth Novie Riswanti
	Persiapan RUPSLB 2019	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Elisabeth Novie Riswanti
	Pembahasan Permasalahan Hukum di Kejaksaan Agung	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria 4. Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
11 Oktober 2019	Pembahasan Draft PKS EY	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
14 Oktober 2019	Performance Review September 2019	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Dasuki Amsir	
16 Oktober 2019	Komite Manajemen Risiko	1. R. Mahelan Prabantarikso 2. Budi Satria Dasuki Amsir 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto 5. Elisabeth Novie Riswanti	
	Persiapan CGPI	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria Andi Nirwoto	
	Strategi Low Cost Funding	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria Andi Nirwoto	
	Laporan BPI Wave II	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria Andi Nirwoto	
21 Oktober 2019	PT Wijaya Karya	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	
	PT Jababeka PP Properti	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	
	PT Duta Paramindo Sejahtera	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	
21 Oktober 2019	PT Graha Mutiara Raya	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	
	PT Ciptaruang Persada Property	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	
	Rapat Komite Kredit : Kebijakan Perkreditan	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
24 Oktober 2019	ALCO	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Project Lotus Putra	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
28 Oktober 2019	Strategi <i>Low Cost Funding</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Pending Matters <i>Limited Review</i> September 2019	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Internal Direksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
31 Oktober 2019	PT Anugrah Duta Sejati	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
4 November 2019	Internal Direksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	<i>Update Lapkeu per 30 Sept'19</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	<i>Update Rencana Penerbitan Junior Global Bond</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	<i>Progres Implementasi PSAK 71 & 73</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Budi Satria	4. Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
4 November 2019	<i>Low Cost Funding</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Komite Manajemen Risiko	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
6 November 2019	ALCO	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto 7. Elisabeth Novie Riswanti
7 November 2019	Materi HCMD	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria; Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto 6. Elisabeth Novie Riswanti
	<i>Closing Meeting Limited Review</i>	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Yossi Istanto 5. Elisabeth Novie Riswanti
11 November 2019	Hasil <i>Limited Review</i> Juni & September 2019	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Materi RBB	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Materi HCMD	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
	Materi RSTIK	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto
13 November 2019	<i>Performance Review</i> Oktober 2019	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Andi Nirwoto 6. Elisabeth Novie Riswanti



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
18 November 2019	Materi HCMD	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto: 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Update Corporate Action	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto: 7. Elisabeth Novie Riswanti
	Internal Direksi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu 4. Budi Satria Dasuki Amsir	5. Andi Nirwoto 6. Yossi Istanto: 7. Elisabeth Novie Riswanti
21 November 2019	Pengesahan Program Kerja dan Anggaran Dana Pensiun BTN Tahun 2020	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Dasuki Amsir 5. Yossi Istanto
25 November 2019	BLR KPR Subsidi	1. Oni Febriarto Rahardjo 2. R. Mahelan Prabantarikso 3. Nixon L.P Napitupulu	4. Budi Satria Andi Nirwoto 5. Yossi Istanto
28 November 2019	Internal Direksi	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto:	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
29 November 2019	Perubahan Nomenklatur & Supervisi Divisi	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	RKAP 2020 RBB 2020 - 2022	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Hirwandi Gafar 6. Setiyo Wibowo 7. Jasmin
1 Desember 2019	Perubahan Nomenklatur & Supervisi Divisi	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
2 Desember 2019	Materi HCMD	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
3 Desember 2019	Supervisi Direksi dan Alternate Direksi	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin



RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
9 Desember 2019	Materi HCMD	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar Setiyo Wibowo 7. Jasmin
	Proyeksi Kinerja, Kualitas Kredit, CKPN, dan Laba Bersih	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar Setiyo Wibowo 7. Jasmin
	<i>Progress Update</i> Audit BPK 2019	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
16 Desember 2019	ALCO	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	Materi KPI	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar Setiyo Wibowo 7. Jasmin
18 Desember 2019	RKK - PT. Taspen	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
19 Desember 2019	<i>Corporate Plan</i> 2020 - 2025	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Hirwandi Gafar 6. Setiyo Wibowo 7. Jasmin



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**RISALAH RAPAT DIREKSI DAN KEHADIRAN DIREKSI**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
30 Desember 2019	Internal Direksi (Materi HCMD)	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	Penerbitan Junior Global Bond	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	Koordinasi Likuiditas	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	Prognosa 2019 dan Dampaknya terhadap RKAP 2020	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
	Materi HCMD	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Nixon L.P Napitupulu 3. Andi Nirwoto 4. Yossi Istanto	5. Elisabeth Novie Riswanti 6. Hirwandi Gafar 7. Setiyo Wibowo 8. Jasmin
31 Desember 2019	Rapat Komite Kebijakan Perkreditan	1. Nixon L.P Napitupulu 2. Andi Nirwoto 3. Yossi Istanto	4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Setiyo Wibowo 6. Jasmin

RISALAH RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DIREKSI

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Selasa, 19 Maret 2019	1. Paparan Direksi atas Tindak Lanjut Temuan OJK Dalam Perbaikan Proses Bisnis Unit Usaha Syariah 2. Evaluasi, Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tahun 2019	Maryono; Iman Nugroho Soeko; Oni Febriarto Rahardjo; R. Mahelan Prabantarikso; Nixon L.P Napitupulu; Budi Satria; Dasuki Amsir; Andi Nirwoto
25 April 2019	Rapat Direksi Komisaris	Maryono; Oni Febriarto Rahardjo; R. Mahelan Prabantarikso; Dasuki Amsir; Andi Nirwoto; Yossi Istanto
Kamis, 20 Juni 2019	Pembahasan Usulan Revisi RBB Tahun 2019 -2021 dan RKAP Tahun 2019	Maryono; Oni Febriarto Rahardjo; R. Mahelan Prabantarikso; Budi Satria; Dasuki Amsir; Andi Nirwoto; Yossi Istanto
11 Desember 2019	Rapat Direksi Komisaris - Performance Review Nov 2019	Pahala Nugraha Mansury; Nixon L.P Napitupulu; Andi Nirwoto; Yossi Istanto; Elisabeth Novie Riswanti; Hirwandi Gafar; Setiyo Wibowo; Jasmin

**Rencana Rapat Direksi 2020**

Telah diprogramkan yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali, yang akan dilaksanakan setiap hari Senin dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris minimal 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun rencana rapat Direksi terjadwal untuk tahun 2020 antara lain terkait agenda :

1. ALCO dan Performance Review 1 (satu) kali dalam sebulan;
2. Komite Manajemen Risiko 4 (empat) kali dalam setahun;
3. Komite Kebijakan Kredit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
4. Tingkat Kesehatan Bank 2 (dua) kali dalam setahun.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Direksi

Keputusan rapat Direksi yang dituangkan dalam notula rapat Direksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan divisi yang terkait untuk melakukan tindak lanjut, dan selanjutnya akan diimplementasikan dalam tataran kebijakan operasional Bank. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Divisi *Corporate Secretary* menyampaikan hasil keputusan rapat Direksi kepada unit kerja terkait.
2. Unit kerja pelaksana dan unit kerja terkait lainnya wajib melaksanakan hasil keputusan rapat Direksi dengan sebaik-baiknya.
3. Unit kerja pelaksana wajib melaporkan hasil kerja secara tertulis kepada Direksi.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti pendidikan/pelatihan/*workshop*/seminar baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kepada Dewan Komisaris, masing-masing anggota Komisaris diberikan kesempatan untuk

merencanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan/atau seminar baik di dalam maupun di luar negeri.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi selama periode Januari- Desember 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE AKTIF 27 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2019**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris				
Chandra Martha Hamzah (Komisaris Utama/ Independen)	<i>In House</i>	Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 16 Desember 2019	Ikatan Bankir Indonesia
Armand B Arief (Komisaris Independen)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 4 " <i>Credit Risk and Operational Risk Management</i> "	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE AKTIF 27 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2019

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Eko D Heripoerwanto (Komisaris)	Seminar	"60 th Komisaris Profesional "	Jakarta, 20-21 November 2019	Intipesan
	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 3-4 Juli 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Heru Budi Hartono (Komisaris)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 1 Komisaris "Credit Risk Management"	Jakarta, 16 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Andin Hadiyanto (Komisaris)	<i>In House</i>	Program Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 16 Desember 2019	Ikatan Bankir Indonesia
Direksi				
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Credit Risk and Operational Risk Management"	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Andi Nirwoto (Direktur It & Operation)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 "Fintech (Operational Risk Management Approach)"	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Collection & Asset Management)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 18 September 2019 & 06 Oktober 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer & Commercial Lending)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 11 Desember 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Jasmin (Direktur Distribution & Retail Funding)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 11 Desember 2019	Sandra Chalik (Perorangan)



**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE AKTIF 27 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2019**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance Treasury & Strategy)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 " <i>Fintech (Operational Risk Management Approach)</i> "	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	PSAK 71 Impairment Deep Dive in <i>Risk Management Perspective</i> & CSG-CIMB 13 th Annual Indonesia Conference	Bali, 27-28 Juni 2019	<i>Bankers Association for Risk Management</i>
	<i>In House</i>	Pembekalan & Sertifikasi <i>Treasury Dealer Level Advance</i>	Jakarta, 24-30 Agustus 2019	ACI FMA Indonesia
	Seminar	The 1 st ASEAN CPA Conference 2020	Bali, 16-17 Oktober 2019	Institusi Akuntan Manajemen Indonesia
Setiyo Wibowo (Direktur Enterp Risk Mgt, Big Data & Analytic)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 " <i>Credit Risk and Operational Risk Management</i> "	Jakarta, 18 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Yossi Istanto (Direktur Human Capital Legal & Compliance)	Seminar	<i>Leadership, Entrepreneurship and Innovation in The Global Economy</i>	London, 25 – 29 Maret 2019	<i>Asean Global Leadership Program</i>

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 26 NOVEMBER 2019**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris				
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	Seminar	<i>Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0</i>	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>International GRC Workshop in Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Asmawi Syam (Komisaris Utama/ Independen)	-	-	-	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 26 NOVEMBER 2019

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Eko D Heripoerwanto (Komisaris)	Seminar	"60 th Komisaris Profesional"	Jakarta, 20-21 November 2019	Intipesan
	In House	Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Jakarta, 3-4 Juli 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	Seminar	<i>International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/ Independen)	-	-	-	-
Iman Sugema (Komisaris)	Seminar	<i>Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0</i>	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>International GRC Workshop in Russia Batch IX - GRC Master Class</i>	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	<i>Conference #ECIIA2019</i>	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5-6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy



**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 26 NOVEMBER 2019**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Lucky Fathul Aziz H (Komisaris Independen)	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September–4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16–22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24–25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5–6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	-	-	-	-
Maurin Sitorus (Komisaris)	-	-	-	-
Parman Nataatmadja (Komisaris)	-	-	-	-
Sumiyati (Komisaris)	Seminar	International GRC Workshop in Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September–4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Direksi				
Maryono (Direktur Utama)	Workshop	Program Membangun Bangsa Melalui Penguatan Sinergi dan Solidaritas BUMN	Bandung, 10–12 Maret 2019	Kementrian BUMN
	Workshop	Rakor CEO BUMN Tahun 2019	Belitung, 2–3 April 2019	Kementrian BUMN
	Workshop	Auditor's Talk Untuk Penguatan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN	Jakarta, 9 Mei 2019	Kementrian BUMN



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 26 NOVEMBER 2019

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Andi Nirwoto (Direktur IT & Operation)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 “Fintech (Operational Risk Management Approach)”	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	<i>In House</i>	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Jakarta, 14-15 November 2019	Iqtishad
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	<i>In House</i>	Pembekalan UKMR Level 5	Jakarta, 18 September 2019 & 06 Oktober 2019	Sandra Chalik (Perorangan)
Iman Nugroho Soeko (Direktur Finance & Treasury)	<i>Workshop</i>	Program Membangun Bangsa Melalui Penguatan Sinergi dan Solidaritas BUMN	Jakarta, 26-27 Maret 2019	Kementrian BUMN
	<i>Workshop</i>	Auditor's Talk Untuk Penguatan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN	Jakarta, 9 Mei 2019	Kementrian BUMN
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 “Fintech (Operational Risk Management Approach)”	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	PSAK 71 Impairment Deep Dive In Risk Management Perspective & CSG-CIMB 13Th Annual Indonesia Conference	Bali, 27-28 Juni 2019	Bankers Association for Risk Management
	<i>In House</i>	Pembekalan & Sertifikasi <i>Treasury Dealer Level Advance</i>	Jakarta, 24-30 Agustus 2019	ACI FMA Indonesia
	Seminar	<i>The 1st ASEAN CPA Conference 2020</i>	Bali, 16-17 Oktober 2019	Institusi Akuntan Manajemen Indonesia
Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking)	<i>In House</i>	Program <i>Refreshment</i> UKMR Level 5 “Fintech (Operational Risk Management Approach)”	Jakarta, 23 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	<i>The 1st ASEAN CPA Conference 2019</i>	Bali, 16-17 Oktober 2019	Institusi Akuntan Manajemen Indonesia



**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 26 NOVEMBER 2019**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)		International Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification	Moscow, 29 Juni - 27 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
		Program Refreshment UKMR Level 5 "Digital Banking And Fintech (Operational Risk Management Approach"	Bandung, 23 April 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
		Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta, 27 Juni 2019	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	Seminar	<i>Leadership, Entrepreneurship and Innovation In The Global Economy</i>	London, 25-29 Maret 2019	Asean Global Leadership Program

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Ketentuan rangkapan jabatan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dimana Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan Lembaga keuangan dan Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Perseroan.

Ketentuan Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap Jabatan Direksi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, dimana Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
6. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain; dan
7. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.

- b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Namun tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Berdasarkan ketentuan di atas, berikut disampaikan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2019.

Nama dan Jabatan	Rangkap Jabatan
Dewan Komisaris	
Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	Tidak memiliki rangkap jabatan
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	Tidak memiliki rangkap jabatan
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	Tidak memiliki rangkap jabatan
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang)
Heru Budi Hartono (Komisaris)	Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang)
Andin Hadiyanto (Komisaris)	Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang)
Direksi	
Tidak terdapat rangkap jabatan pada Direksi	

Rangkap jabatan yang dimiliki Komisaris Eko D. Heripoerwanto, Heru Budi Hartono, dan Andin Hadiyanto tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSPARANSI HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, 60,00% saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dimana 1 (satu) lembar saham diantaranya adalah Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak

istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Sisanya yaitu Saham Seri B dimiliki publik masing-masing kurang dari 5% sebanyak 40,00% yang didapatkan dari mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian, pemegang saham utama/pengendali



Perseroan adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perseroan.

Transparansi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Tahun 2019
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa

menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali selama periode tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama dan Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Dewan Komisaris						
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama/Independen)	x	x	x	x	x	x
Asmawi Syam (Komisaris Utama/Independen)	x	x	x	x	x	x
Chandra M.Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	x	x	x	x	x	x
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x
Garuda Wiko (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Nama dan Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Maurin Sitorus (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Sumiyati (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Iman Sugema (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Parman Nataatmadja (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Marwanto Harjowiryo (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Heru Budi Hartono (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Andin Hadiyanto (Komisaris)	x	x	x	x	x	x
Direksi						
Maryono (Direktur Utama)	x	x	x	x	x	x
Oni Febriarto Rahardjo (Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking)	x	x	x	x	x	x
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	x	x	x	x	x	x
Iman Nugroho Soeko (Direktur Finance & Treasury)	x	x	x	x	x	x
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	x	x	x	x	x	x
Budi Satria (Direktur Consumer Banking)	x	x	x	x	x	x
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Compliance)	x	x	x	x	x	x



Nama dan Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Dasuki Amsir (Direktur Distribution & Network)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	✕	✕	✕	✕	✕	✕

✓ = terdapat hubungan afiliasi | ✕ = tidak terdapat hubungan afiliasi

Per 31 Desember 2019, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, serta hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Demikian pula bagi Direksi, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Oleh karena itu Perseroan berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap setiap ketentuan yang berlaku dan menjaga independensi setiap Direksi yang menjabat, salah satunya dengan mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank

dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Perseroan menyampaikan secara berkala kepada regulator terkait Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi.

Hingga periode 31 Desember 2019, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PER 31 DESEMBER 2019

Nama dan Jabatan	Persentase Kepemilikan Saham			
	Bank BTN ("BBTN")	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Dewan Komisaris				
Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Armand B. Arief (Komisaris Independen)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Eko D. Heripoerwanto (Komisaris)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Heru Budi Hartono (Komisaris)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Andin Hadiyanto (Komisaris)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi				
Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama)	453.100 lembar; 0,0042786%	Nihil	Nihil	Nihil
Andi Nirwoto (Direktur Operation, IT and Digital Banking)	70.200 lembar; 0,0006629%	Nihil	Nihil	Nihil
Nixon L.P Napitupulu (Direktur Finance, Planning and Treasury)	236.600 lembar; 0,0022342%	Nihil	Nihil	Nihil
Yossi Istanto (Direktur Human Capital, Legal and Compliance)	70.200 lembar; 0,0006629%	Nihil	Nihil	Nihil
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Remedial and Wholesale Risk)	25.000 lembar; 0,0002361%	Nihil	Nihil	Nihil
Hirwandi Gafar (Direktur Consumer and Commercial Lending)	56.000 lembar; 0,0005288%	Nihil	Nihil	Nihil
Jasmin (Direktur Distribution and Retail Funding)	-	Nihil	Nihil	Nihil
Setiyo Wibowo (Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics)	-	Nihil	Nihil	Nihil

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih, baik saham di Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lain, sehingga sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.03 2016.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 34, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 5 dan 34 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris diamanahkan kepada Siti Fauziyah melalui Keputusan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 116/KOM/BTN/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dan Surat Keputusan Direksi No. 573/DIR/2017 tanggal 1 Oktober 2017 (berlaku efektif 1 November 2019).



Siti Fauziyah

Sekretaris Dewan Komisaris

Masa Jabatan 1 November 2019 - 1 November 2022, Periode Pertama

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	46 tahun
Domisili	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan	Magister (S2) Ekonomi dari UPI YAI, Jakarta (2016).
Pengalaman Kerja	• Kepala Sub Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila.1 (7 Juli 2017 – sekarang) • Kepala Sub Bidang Layanan SDM (22 Desember 2014 – 6 Juli 2017) • Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat SDM Eksekutif BUMN, (9 Mei 2014 – 21 Desember 2014) • Kepala Sub Bidang Usaha Industri Primer Ib2, (7 Okt 2010 – 8 Mei 2014) • Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi, (22 Mei 2006 – 6 Okt 2010)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	• <i>Leader as a Coach</i> (2019) • <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO) L1, (2019) • Penerapan PSAK 71, 72, 73 (2019)



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**Struktur Organisasi Sekretaris Dewan Komisaris**

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi, Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan dibantu oleh 1 (satu) staf Sekretariat Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam mendukung setiap kegiatannya yang mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris senantiasa di-review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan atau terkait regulasi lain yang berlaku. Pedoman kerja Sekretaris Dewan Komisaris sudah dikaji ulang dan tidak berubah mengingat masih relevan dengan kondisi Perseroan saat ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan di antaranya meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk Penyusunan undangan rapat, Penyusunan bahan-bahan rapat, Pendokumentasian surat-surat dan Penyusunan risalah rapat.

3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui sekretaris perusahaan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Program Pelatihan Sekretaris Dewan Komisaris

Perseroan senantiasa mendukung Sekretaris Dewan Komisaris untuk melakukan update knowledge melalui kegiatan pelatihan maupun pengembangan skill. Di tahun 2019 Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti pelatihan maupun pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Sumber Daya Manusia	Leader as A Coach	Jakarta, 22-23 Juli 2019	Kementerian BUMN – Coaching Indonesia
Manajemen Risiko	Sertifikasi CRMO	Jakarta, 6-9 Agustus 2019	Kementerian BUMN- LPPM, dan LSPMR
Akuntansi	Penerapan PSAK 71, 72, 73	Jakarta, 26-27 September 2019	Kementerian BUMN- Enterprise InstituteOf Indonesia

**Laporan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2019**

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan peran sebagai pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan Dewan Komisaris menjalankan praktik GCG sesuai dengan peraturan yang ada. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris seperti administrasi surat masuk dan surat keluar serta risalah rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya menyiapkan undangan rapat, materi rapat, pembuatan surat-surat keluar berdasarkan keputusan rapat.
3. Menyusun risalah Rapat Internal Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan dan konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan Sekretaris Perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi melalui Sekretaris Perusahaan.
5. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
8. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

9. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite Dewan Komisaris di lingkungan Dewan Komisaris.
10. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara, penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan yang terdiri dari honorarium maksimal sebesar 15% dari gaji Direktur Utama Perusahaan. Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk periode jabatan berikutnya.

KOMITE AUDIT

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

6. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2019

Di tahun 2019 terdapat perubahan jumlah dan susunan keanggotaan Komite Audit, sejalan dengan pergantian Dewan Komisaris yang menjabat pada Komite Audit, serta pergantian anggota Komite Audit dari pihak eksternal.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT SEPANJANG TAHUN 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 18 November 2019	Periode 19 November - 27 November 2019	Periode 28 November - 31 November 2019	Keterangan
Kamaruddin Sjam (Ketua Komite Audit)	Kamaruddin Sjam (Ketua Komite Audit)	Kamaruddin Sjam (Ketua Komite Audit)		Jabatan Kamaruddin Sjam pada Komite Audit berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
I Wayan Agus Mertayasa (Anggota Komite Audit)				Jabatan I Wayan Agus Mertayasa pada Komite Audit berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota Komite Audit)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota Komite Audit)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota Komite Audit)		Jabatan Lucky Fathul Aziz Hadibrata pada Komite Audit berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Garuda Wiko (Anggota Komite Audit)	Garuda Wiko (Anggota Komite Audit)	Garuda Wiko (Anggota Komite Audit)	-	Jabatan Garuda Wiko pada Komite Audit berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Rachmat Supratman (Anggota Komite Audit)	Rachmat Supratman (Anggota Komite Audit)	-	-	Rachmat Supratman tidak lagi menjabat sejak 7 November 2019.
Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	-
-	-	Peter Eko Budi Darwito (Anggota Komite Audit)	Peter Eko Budi Darwito (Anggota Komite Audit)	Peter Eko Budi Darwito diangkat sejak 19 November 2019
-	-	-	Ahdi Jumhari Luddin*) (Komisaris Independen)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Ahdi Jumhari Luddin ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit sampai menunggu hasil keputusan Efektif dari OJK
-	-	-	Andin Hadiyanto*) (Komisaris)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit sampai menunggu hasil keputusan Efektif dari OJK

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

**SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ahdi Jumhari Luddin ^{*)}	Ketua Komite Audit	November 2019 – November 2022
Andin Hadiyanto ^{*)}	Anggota Komite Audit	November 2019 – November 2022
Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	September 2018 – September 2021
Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	November 2019 – November 2022

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Profil Komite Audit**Ahdi Jumhari Luddin^{*)}**

Ketua Komite Audit

Periode Jabatan November 2019 – November 2022

Keahlian

Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**Andin Hadiyanto^{*)}**

Anggota Komite Audit

Periode Jabatan November 2019 – November 2022

Keahlian

Keuangan dan Ekonomi Makro

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



Adi Prakoso

Anggota Komite Audit

Periode Jabatan November 2018 – November 2021

Warga Negara Indonesia Lahir di Jakarta, Usia 53 tahun, Domisili di Depok, Jawa Barat. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran tahun 1989.

Keahlian

Audit, Perbankan dan Akuntansi.

Pengalaman Kerja

Menjabat sebagai Section Head di Urusan Administrasi Keuangan PT Bank Dagang Negara (Okt 1991-Jan 1996), Ketua Tim Audit Intern Bank Dagang Negara (1996-1997), Quality Assurance Auditor Bank Dagang Negara (1997-1999), Tim Merger Internal Audit Bank Mandiri (1999), Senior Investigator di Special Audit Department Bank Mandiri (1999-2010), Team Leader di Wholesale Banking Audit Department dan selanjutnya di Counterpart Relation Bank Mandiri (2010-2012), Kepala Internal Audit PT PANN Pembiayaan Maritim/ Anak Perusahaan BUMN (2013 - 2018) dan sejak 13 Maret 2018 bertugas sebagai Anggota Komite Audit Non Komisaris PT Bank Tabungan Negara.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner, USA, Qualified Internal Auditor (QIA) dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor, Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia, Sertifikat Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Sertifikat Risk Management Level 1 dan 2 dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)



Peter Eko Budi Darwito

Anggota Komite Audit

Periode Jabatan 19 November 2019 – 18 November 2022

Warga negara Indonesia, tempat lahir Sukoharjo, 27 Juli 1963, usia 56 tahun, berdomisili di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

Keahlian

Perbankan, Audit dan Keuangan

Pengalaman Kerja

Menjabat sebagai Inspektur / Kepala Audit Intern Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019), Menjabat sebagai Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015 – 2018), Menjabat sebagai Group Head/ Kabag Kredit BRI kantor Cabang Khusus (2009 – 2014), Menjabat sebagai Group Head/Kabag Kredit Program Kanpus BRI (2005 – 2008)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Fraud Skimming, e-learning di Corporate University Kanpus BRI 2019, Pendidikan Pembekalan Lateral Joiner Audit Internal BRI tahun 2019, Sertifikat Risk Management Level 3 dari LSPI BARA, Jakarta tahun 2017

Pedoman Kerja Komite Audit

Pedoman kerja Komite Audit merujuk pada Piagam Komite Audit yang Piagam Komite Audit tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 tentang Pembaharuan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 19 November 2019.

Cakupan Piagam Komite Audit:

1. Ketentuan Umum, tujuan pembentukan Piagam Komite
2. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit;
3. Pelaporan Komite;
4. Masa Tugas;
5. Kewajiban Komite Audit;
6. Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang;



7. Akses dan Kerahasiaan Informasi;
8. Anggaran Komite;
9. Struktur, Pengangkatan dan Pemberhentian Komite;
10. Penghasilan Anggota Komite;
11. Persyaratan Anggota Komite;
12. Penutup; dan
13. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite.

Secara lengkap, Piagam Komite Audit dapat dilihat melalui website Perseroan (www.btn.co.id) pada menu Investor Relation pada Kebijakan Tata Kelola.

Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan Komite Audit Perseroan mengacu pada No. 01/DEKOM-BTN/2019 tentang Pembaharuan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 19 November 2019 pasal 7 tentang Struktur Pengangkatan dan Pemberhentian Komite.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Audit, serta dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 27 November 2019 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, beranggotakan

Komisaris Independen dan anggota profesional lainnya berasal dari luar Perseroan. Berdasarkan RUPS LB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 27 November 2019 terjadi Perubahan Pengurus Perseroan yang membuat Kosongnya Posisi Jabatan Ketua Komite Audit Periode 27 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan aktif kepada Kinerja Direksi Perseroan serta Fungsi Komite Audit sebagai Organ pendukung Dewan Komisaris, Dewan Komisaris sepakat menunjuk Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen yang ditetapkan dalam RUPS LB 27 November 2019) sebagai Ketua Komite Audit dan Andin Hadiyanto (Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS LB 27 November 2019) sebagai Anggota Komite Audit sampai terdapat keputusan *Fit and Proper* OJK.

Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit adalah 100% dari jumlah anggota Komite Audit. Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 41 ayat 4 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% dari jumlah anggota Komite Audit.

Selain itu, seluruh anggota Komite Audit Perseroan dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi	Ahdi Jumhari Luddin*) (Ketua)	Andin Hadiyanto*) (Anggota)	Adi Prakoso (Anggota)	Peter Eko Budi Darwito (Anggota)
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	×	×	×	×
Memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	×	×	×	×



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Aspek Independensi	Ahdi Jumhari Luddin*) (Ketua)	Andin Hadiyanto*) (Anggota)	Adi Prakoso (Anggota)	Peter Eko Budi Darwito (Anggota)
Memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✗	✗	✗	✗

✓ = memiliki | ✗ = tidak memiliki

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit tidak boleh memiliki rangkap jabatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.02/DEKOM-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada pasal 7- Persyaratan Keanggotaan Komite Audit ayat 10, 11 dan ayat 12. yaitu:

1. Ayat 10 "bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai

Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir"

2. Ayat 11 "bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen"
3. Ayat 12 "tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank"

Komite Audit	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Instansi lain
Ahdi Jumhari Luddin*) (Ketua Komite Audit)	-
Andin Hadiyanto*) (Anggota Komite Audit)	Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	-
Peter Eko Budi Darwito (Anggota Komite Audit)	-

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan 31 Desember 2019, susunan rangkap jabatan Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua Komite pada lebih dari dua (2) Komite pada Bank yang sama.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang

dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau



pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, penunjukan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup dan *fee* audit.
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit laporan keuangan oleh KAP.
11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit berwenang untuk melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Komite berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Komite berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
3. Komite berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Komite berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Realisasi Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sebagai bentuk tanggung jawab Komite Audit, setiap

tahunnya Komite Audit diwajibkan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern:
 - a. Melakukan pembahasan dan pemantauan atas realisasi Annual Audit Plan 2019.
 - b. Melakukan pembahasan atas temuan-temuan pemeriksaan Internal Audit Division (IAD)
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
3. Melakukan penelitian dan penelaahan atas kesesuaian laporan keuangan yang dipublikasikan Perseroan dengan standar laporan keuangan yang berlaku.
4. Memantau pelaksanaan dan penyelesaian komitmen Perseroan atas rekomendasi hasil pemeriksaan IAD maupun Auditor Eksternal (Bank Indonesia, OJK, KAP, BPK-RI).
5. Memberikan masukan atas isu-isu strategis dalam rangka pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019 untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite.
8. Mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi anggota Komite.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit, hal tersebut sesuai dengan Piagam Komite Audit dan Rencana Kerja Komite Audit. Keputusan yang Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali rapat yang di antaranya selalu dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk Komisaris

Independen dan Pihak Independen. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal	Agenda
23 Januari 2019	Annual Audit Plan 2019
06 February 2019	Pembahasan Persetujuan Penetapan Ranking 1 Terkait Pengadaan KAP untuk Jasa Audit Tahun Buku 2019
19 February 2019	Pembahasan Rekomendasi Pengangkatan Kepala IAD/Kepala SKAI
26 Maret 2019	Pembahasan Persetujuan Draft Publikasi Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
18 April 2019	Pembahasan Persetujuan Draft Publikasi laporan keuangan Per 31 Maret 2019 (<i>unaudited</i>)
23 April 2019	Pembahasan Persetujuan Penetapan Pemenang KAP untuk Jasa Audit Tahun Buku 2019
30 April 2019	Pembahasan Persetujuan Annual Audit Plan IAD Tahun 2019
17 Mei 2019	Pembahasan Penggantian Akuntan Publik Pelaksana Jasa General Audit Laporan Keuangan dan PKBL Tahun Buku 2019
28-Mei-19	Pembahasan Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>)
18 Juni 2019	Pembahasan Hasil Evaluasi Komite audit terhadap Pemberian jasa audit atas Informasi Keuangan Tahun Buku 2018
26 Juli 2019	Pembahasan Persetujuan Draft Publikasi Laporan Keuangan Per 30 Juni 2019
04 September 2019	<i>Kick Off Meeting Audit Limited Review</i> per 31 Juli 2019 dan Audit Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2019

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Komite Audit senantiasa melaksanakan program pelatihan dan pengembangan Komite sebagai bentuk *update knowledge* dan pemahaman isu-isu terkini mengenai tugas maupun program-program yang dijalankan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Komite Audit untuk membantu tugas pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris. Perseroan telah memfasilitasi dengan menyediakan anggaran yang diambilkan dari anggaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Sepanjang tahun 2019, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:



Nama	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Kamaruddin Sjam	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
Lucky Fathul Aziz H	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5-6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors : Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director
Garuda Wiko	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September – 04 Oktober 2019	CRMS Indonesia

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Kinerja Komite Audit Perseroan senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat

kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Rencana Kerja Komite Audit 2020

Komite Audit dalam setiap tahunnya selalu menyusun Rencana Kerja Komite Audit. Penyusunan Rencana Komite Audit berdasarkan pada *Committee Audit Charter* serta masukan dari Dewan Komisaris. Rencana Kerja Komite Audit tahun 2020 meliputi:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

- Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Bank.
- Rapat Komite Audit.
- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit.
- Review* atas tindak lanjut temuan pemeriksaan internal maupun eksternal.
- Menyampaikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan jasa audit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas KAP terkait jasa audit laporan keuangan Perseroan.

Untuk rapat, sesuai dengan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2020, Komite Audit telah merencanakan rapat tahun 2020 minimal sebanyak 18 kali dengan agenda utama evaluasi bulanan realisasi **Annual Audit Plan 2020** dan Evaluasi Jasa Audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta rapat insidental dengan divisi terkait.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan organ tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Negara BUMN perihal Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Di tahun 2019 terdapat perubahan jumlah dan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sejalan dengan pergantian Dewan Komisaris yang menjabat pada Komite Pemantau Risiko.

Kronologi Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2019

DATA PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE DI SEPANJANG 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus 2019 - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Arie Coerniadi (Ketua Komite Pemantau Risiko)	Arie Coerniadi (Ketua Komite Pemantau Risiko)	Arie Coerniadi (Ketua Komite Pemantau Risiko)	-	Jabatan Arie Coerniadi pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
I Wayan Agus Mertayasa (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-	-	-	Jabatan I Wayan Agus Mertayasa pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019.



DATA PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE DI SEPANJANG 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus 2019 - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
Sumiyati (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Sumiyati (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-	-	Jabatan Sumiyati pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019.
Garuda Wiko (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Garuda Wiko (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Garuda Wiko (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-	Jabatan Garuda Wiko pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Iman Sugema (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Iman Sugema (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Iman Sugema (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-	Jabatan Iman Sugema pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	Asmawi Syam (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris menunjuk Asmawi Syam sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test OJK. Jabatan Asmawi Syam pada Komite Pemantau Risiko berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Armand B. Arief ^{*)} (Ketua Komite Pemantau Risiko)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Armand B. Arief ditunjuk sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan berlaku efektif setelah fit & proper test OJK
-	-	-	Eko D. Heripoerwanto (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Eko D. Heripoerwanto ditunjuk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan berlaku efektif tanggal 20 Desember 2019
Heru Ratna Azimada (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Heru Ratna Azimada (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Heru Ratna Azimada (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Heru Ratna Azimada (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-
Yuki Noviani Kohar (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Yuki Noviani Kohar (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Yuki Noviani Kohar (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Yuki Noviani Kohar (Anggota Komite Pemantau Risiko)	-

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PER 31 DESEMBER 2019

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Armand B. Arief *)	Ketua Komite Pemantau Risiko	Desember 2019 – Desember 2022
Eko D. Heripoerwanto	Anggota Komite Pemantau Risiko	Desember 2019 – Desember 2022
Heru Ratna Azimada	Anggota Komite Pemantau Risiko	November 2019 – November 2021
Yuki Noviani Kohar	Anggota Komite Pemantau Risiko	November 2019 – November 2021

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Profil Komite Pemantau Risiko



Armand B. Arief*)

Ketua Komite Pemantau Risiko

Periode Jabatan Desember 2019 – Desember 2022 pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

Keahlian

Perbankan, *Risk Management*, Bisnis Administrasi

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.



Eko D. Heripoerwanto

Anggota Komite Pemantau Risiko

Periode Jabatan Desember 2019 – Desember 2022

Keahlian

Perencanaan Kota dan Wilayah, Perumahan

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**Heru Ratna Azimada**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Periode Jabatan 30 November 2019 – 29 November 2021

Warga Negara Indonesia Lahir di Magelang, Usia 69 Tahun. Domisili Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lulusan Sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Ekonomi Jurusan Perusahaan..

KeahlianPerbankan, *Risk Management***Pengalaman Kerja**

Menjabat sebagai EVP/Staf Ahli Direksi Bidang *Human Resources* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003), *Executive Vice President Training Group* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001-2003); *EVP Coordinator (SEVP) Bidang Corporate, Government, Commercial* dan *Restructuring* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000-2001); *Executive Vice President Corporate Banking* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999); Direktur di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (1998-1999).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Workshop Risk Modelling in Financial Institution yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pada September 2017, *Senior Executives Forum IV* tahun 2002 di Australia; *Asia Pacific Economic Summit* tahun 2000 di Australia; *Asian Banker Summit* tahun 200 di Singapura; *Asian Pacific Non Performing Loan* tahun 2000 di Korea Selatan; *The Asian Banker Summit* tahun 2000 di Australia; *Treasury Management* tahun 1996 di Singapura; *Asset Liability Management* tahun 1996 di Singapura.

**Yuki Noviani Kohar**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021

Warga Negara Indonesia Lahir di Bandung, Usia 57 Tahun. Domisili Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lulus pendidikan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran pada tahun 1986.

Keahlian

Perbankan, Kredit

Pengalaman Kerja

Menjabat sebagai *Vice President – Deputy GM Commercial Credit Division* PT Bank BNI (Persero) Tbk (2010-2015); Sebagai *Vice President, Group Head of Commercial Business Development* Bank Niaga (2007-2009); *Special Assignment* sebagai *Team Merger CIMB Niaga Representative Commercial Banking* (2007-2009)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta pada tahun 2014; *Account Management & Relationship by Michigan University Ross Scholl of Business* di Hongkong pada tahun 2005; *Financial for senior Management- London Business School* di London, UK pada tahun 2015.

^{*)} Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan serta diperbarui berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Cakupan Piagam Komite Pemantau Risiko	
1. Maksud dan Tujuan	2. Tugas, Wewenang
3. Tanggung Jawab Komite	4. Kewajiban Komite
5. Akses dan Kerahasiaan Informasi	6. Struktur.

Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yaitu “Memiliki keahlian dalam bidang keuangan, manajemen risiko, ekonomi makro, strategi manajemen, perbankan dan kredit”. Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berhenti atau diberhentikan berdasarkan Pasal yang menyatakan Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Piagam Komite Pemantau Risiko serta dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota

Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 42 ayat 4.

Aspek Independensi	Armand B. Arief *) (Ketua)	Eko D. Heripoerwanto (Anggota)	Heru Ratna Azimada (Anggota)	Yuki Noviani Kohar (Anggota)
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	✗	✗	✗	✗

✓ = memiliki | ✗ = tidak memiliki

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh memiliki rangkap jabatan sebagaimana telah dipersyaratkan di dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/XII/2013 tanggal 18 Desember

2013 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada pasal 7- Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko ayat 9 dan 10 yaitu:

1. Ayat 9 “bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau



mengendalikan kegiatan Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris”

2. Ayat 10 “tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota

Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain”

Komite Pemantau Risiko	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Instansi lain
Armand B. Arief *)	-
Eko D. Heripoerwanto	Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR
Heru Ratna Azimada	-
Yuki Noviani Kohar	-

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi berkenaan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Memberikan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
3. Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan manajemen risiko pada Bank BTN.

4. Melakukan kajian/review atas hal-hal yang memerlukan persetujuan atau konsultasi Dewan Komisaris sesuai dengan Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan Regulator.
5. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
6. Menyusun Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali
7. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris.

REALISASI RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugas-tugas dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya terkait manajemen risiko. Kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 khususnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko melalui:
 - a. Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank secara berkala (triwulan)
 - b. Pembahasan mengenai Tingkat Kesehatan Bank secara berkala

- c. Pembahasan *performance review* setiap bulan
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Konsultasi kredit sesuai batas wewenang
 - b. Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
 - c. Batasan dan kriteria perbuatan Direksi yang tidak perlu mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris
 - d. Penerapan kebijakan baru atau produk baru
 - e. Rencana penyertaan modal dalam rangka pertumbuhan anorganik
3. Melakukan analisa atas kualitas kredit dengan melakukan *review* terhadap:
 - a. Kelonggaran tarik yang terjadi pada debitur inti
 - b. Progress pelaksanaan atas kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris

**STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**

- c. Tindak lanjut atas kegiatan hapus buku tahun sebelumnya.
 - d. Mekanisme "*backtesting*" untuk mengetahui akar permasalahan dalam hal terjadi penurunan kualitas kredit.
 4. Melakukan analisa atas kesesuaian Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko sejalan dengan kegiatan Bisnis Bank.
 5. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Perusahaan terkait dengan:
 - a. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
 - b. Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/ MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-04/ MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017
 - c. Due Diligence & Rencana Penyertaan Modal pada PT Permodalan Nasional Madani Investment Managemen
 - d. Peraturan Direksi tentang Pengelolaan Pengaduan Nasabah , telah sesuai dengan:
 - POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - SEOJK No.2/POJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pelaku Jasa Keuangan
 - SEBI No.7/24/DPNP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko**
1. Komite mengadakan Rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 2. Rapat Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
 3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan
 - a. Surat Kuasa;
 - b. Teknologi telekonferensi;
 - c. Cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.
 4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
 5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).
 6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.
 7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 8. Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
 9. Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau Pihak Lain sebagai narasumber.
 10. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.



Sepanjang tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 17 kali rapat. Berikut disampaikan agenda rapat Komite Pemantau Risiko.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tanggal	Agenda
Kamis, 28 Februari 2019	Restrukturisasi debitur selama tahun 2018
Selasa, 12 Maret 2019	Konsultasi Kredit PT HK & PT APP
Selasa, 02 April 2019	Konsultasi Kredit PT SIP
Selasa, 9 April 2019	Batas Wewenang Memutus Kredit Komersial dan Batas Wewenang Memutus Restrukturisasi Kredit Komersial Termasuk Restrukturisasi Kredit Komersial Melalui Alih Debitur/Novasi
Selasa, 16 April 2019	Konsultasi Kredit PT PLN & PT. PP
Senin, 22 April 2019	Pembahasan tentang Profil Risiko Triwulan I/2019
Selasa, 23 April 2019	Konsultasi Kredit PT PAK & PT FCP
Selasa, 14 Mei 2019	Konsultasi Kredit PT FCP
Selasa, 21 Mei 2019	Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Tabungan Negara (Persero Tbk Tahun 2019)
Selasa, 25 Juni 2019	Konsultasi Kredit PT WSBP & PT AP I
Selasa, 7 Mei 2019	Konsultasi Kredit PT AK
Selasa, 18 Juni 2019	Konsultasi Kredit PT TEP & PT PP
Selasa, 30 Juli 2019	Evaluasi atas Profil Risiko Tw II/2019
Selasa, 6 Agustus 2019	Tingkat kesehatan Bank (RBBR) Semester I/2019
Selasa, 19 November 2019	Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) BTN Tahun 2020
Senin, 18 November 2019	Pembahasan Usulan Risk Appetite & Risk Tolerance 2020 BTN
Selasa, 26 November 2019	Recovery Plan BTN

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka membantu tugas pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris. Untuk itu Komite Pemantau Risiko senantiasa melaksanakan program pelatihan dan pengembangan Komite sebagai bentuk *update knowledge* dan pemahaman isu-isu terkini mengenai tugas maupun program-program yang dijalankan.

**STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**

Sepanjang tahun 2019, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Arie Coerniadi	Seminar	Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Garuda Wiko	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja Komite Pemantau Risiko serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2020

Kegiatan Rutin

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yang terdiri atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi
2. Melakukan kegiatan pemantauan Profil Risiko, Peringkat Kesehatan Bank, Kebutuhan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Giro Wajib Minimum (GWM), Legal Lending Limit
3. Melakukan kajian ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), apabila hasil kaji ulang tidak ada perubahan maka cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, guna memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris

5. Kegiatan penelaahan hasil kinerja atau Performance Review, yang terkait dengan tingkat pencapaian RKAB dan RBB serta pengelolaan Risiko, hasil penelaahan tersebut digunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka:
 - a. Tanggapan Dewan Komisaris Atas Kinerja Triwulanan Perseroan kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
 - b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (Semesteran)
6. Review pedoman dan tata tertib kerja Komite (charter) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali

Kegiatan Non Rutin

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemberian persetujuan dan konsultasi untuk melaksanakan Anggaran dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, akta no 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, khususnya pasal 12 ayat 7 (huruf a, b, e, f, g h dan i) dan pasal 8, antara lain:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan Batas wewenang Memutus Kredit (BWMK)
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemberian persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait
2. Membuat laporan mengenai kegiatan Komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi



- perhatian Dewan Komisaris
3. Melaksanakan kunjungan kerja (bila diperlukan) untuk memantau pelaksanaan pengelolaan risiko oleh unit-unit operasional
 4. Menghadiri kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Profesi Perbankan dan/atau Institusi Perbankan
 5. Mengikuti seminar, pelatihan profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja bahu membahu dengan Bidang-Bidang *Human Capital Division* dan *Learning Center Division* sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan human capital sebagai strategic assets dan *strategic partners*, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
2. PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 mengenai Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
11. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
14. Anggaran Dasar Bank No. 90 tanggal 21 Juni 2017, dan Perubahannya No. 66 tanggal 23 Maret 2018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
15. Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
16. Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017, Tanggal 10 Agustus 2017, Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

17. Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No.02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 01/DIR-BTN/2017, Tanggal 24 November 2017, Tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
18. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No.03/ DEKOM-BTN/XII/2013 dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. SKB-03/DIR- BTN/XII/2013 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk tanggal 18 Desember 2013 dan perubahannya sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 03/DEKOM-BTN/2016 dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. SKB-03/DIR-BTN/2016, tanggal 18 Juli 2016.
19. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/DEKOM-BTN/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Piagam Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

Di tahun 2019 terdapat perubahan jumlah dan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, sejalan dengan pergantian Dewan Komisaris yang menjabat pada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kronologi Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Sepanjang Tahun 2019**DATA PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE DI SEPANJANG 2019**

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei - 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus 2019 - 27 November 2019	Periode 27 November - 31 Desember 2019	Keterangan
I Wayan Agus Mertayasa (Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	-	-	Jabatan I Wayan Agus Mertayasa pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi)	Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	Jabatan Lucky Fathul Aziz Hadibrata pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Arie Coerniadi (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Arie Coerniadi (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Arie Coerniadi (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	Jabatan Arie Coerniadi pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
Kamaruddin Sjam (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Kamaruddin Sjam (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Kamaruddin Sjam (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	Jabatan Kamaruddin Sjam pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.



DATA PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE DI SEPANJANG 2019

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei – 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus 2019 - 27 November 2019	Periode 27 November – 31 Desember 2019	Keterangan
Maurin Sitorus (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	-	-	Jabatan Maurin Sitorus pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019.
-	-	Asmawi Syam (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	-	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris menunjuk Asmawi Syam sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus <i>fit & proper test</i> OJK. Jabatan Asmawi Syam pada Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sejalan dengan tidak lagi menjabat pada Dewan Komisaris, sejak Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.
-	-	-	Chandra M. Hamzah ^{*)} (Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Chandra M. Hamzah ditunjuk sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku efektif setelah <i>fit & proper test</i> OJK
-	-	-	Heru Budi Hartono ^{*)} (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku efektif setelah <i>fit & proper test</i> OJK
-	-	-	Ahdi Jumhari Luddin ^{*)} (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Ahdi Jumhari Luddin ditunjuk sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku efektif setelah <i>fit & proper test</i> OJK
-	-	-	Armand B. Arief ^{*)} (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Armand B. Arief ditunjuk sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku efektif setelah <i>fit & proper test</i> OJK
I Nengah Rentaya (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	I Nengah Rentaya (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	I Nengah Rentaya (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	I Nengah Rentaya ^{*)} (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**DATA PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE DI SEPANJANG 2019**

Periode 1 Januari - 17 Mei 2019	Periode 17 Mei – 29 Agustus 2019	Periode 29 Agustus 2019 – 27 November 2019	Periode 27 November – 31 Desember 2019	Keterangan
Eko Waluyo (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ex-Officio)	Eko Waluyo (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ex-Officio)	Eko Waluyo (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ex-Officio)	Eko Waluyo (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ex-Officio)	

*) Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

**SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PER 31 DESEMBER 2019**

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Chandra M. Hamzah*)	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Desember 2019 – Desember 2022
Heru Budi Hartono*)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Desember 2019 – Desember 2022
Ahdi Jumhari Luddin*)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Desember 2019 – Desember 2022
Armand B. Arief*)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Desember 2019 – Desember 2022
I Nengah Rentaya	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	November 2019 – November 2021
Eko Waluyo	Anggota Ex-Officio	Juni 2017 – Juni 2020

*)Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi**Chandra M. Hamzah*)**Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021**Keahlian**
Keuangan

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**Heru Budi Hartono*)**Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021**Keahlian**
Perencanaan Kota dan Wilayah, Perumahan

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**Ahdi Jumhari Luddin*)**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021

Keahlian

Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**Armand B. Arief*)**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021

KeahlianPerbankan, *Risk Management*, Bisnis Administras

Riwayat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Keahlian Dapat Dilihat Pada Bagian Profil Dewan Komisaris Dalam Laporan Tahunan Ini.

**I Nengah Rentaya**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Periode Jabatan 07 November 2019 – 06 November 2021

Warga Negara Indonesia Lahir di Tabanan, Bali, Usia 60 Tahun. Domisili di Jakarta. Lulusan Program Strata 1 (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1987 dan Master of International Affairs in Economic Policy and Management dari Columbia University, NYC, USA pada tahun 1993. Certificate Program in Treasury Management dari New York University, School of Continuing Education, NYC, USA, Summer Session Programme 1994.

KeahlianEkonomi Moneter, Perbankan, *Human Capital Management and Learning Development*.**Pengalaman Kerja**

Senior Vice President–Group Head of Learning Center (Corporate University) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, periode 2007-2014, Senior Vice President–Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, periode 2006-2007, Senior Vice President–Deputy Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, periode 2003-2006

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Train the Trainer Methodology and Tool Delivery Program Bank Mandiri (2013), Training Certificate and Coaching Program 60 hours, by ICF, USA (2013), Service Excellence for Senior Manager Program, by SQC, Singapura (2012), The 4 Disciplines of Execution (4DX), Manager Certification Program–Gold Certificate, by Franklin Covey and Dunamis Indonesia, 2012, Human Resources Management in ASIA PASIFIC Programme, by INSEAD, Singapore, 27 Nov' - 01 Dec' 2000, Achieving Outstanding Performance programme, by INSEAD, Fontainebleau, France, 7 – 12 April 2002, Human Performance Improvement (HPI) Certification Program (Six Moduls), dari ASTD, USA, 2001, Certificate in Using Assessment Center to Grow Your Future Leader, Advance Level, by DDI Indonesia 2001, Certified Interviewer of Targeted Selection (TS) by DDI Indonesia, 2000, Human Resources Executive Program, by Michigan Ross School of Business, Hongkong, 2008, Strength Based Performance Coach, by Gallup University, Singapore, 2009, Train The Trainer Execution Focus (4DX) Program, by Dunamis Indonesia, 2012., Human Resource Skills in Banking and Finance, by Euromoney Training, London, 2002



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



Eko Waluyo

Anggota Ex-Officio Komite Remunerasi dan Nominasi
Kepala Divisi Human Capital Management Division
Periode Jabatan 06/06/2017 – 06/06/2020

Warga Negara Indonesia Lahir di Temanggung, Usia 48 Tahun. Menamatkan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada tahun 1995 serta meraih gelar Magister Manajemen (MM) di bidang finance dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Kentucky USA tahun 2004.

Keahlian
Keuangan

Pengalaman Kerja

Kepala Corporate Secretary Division, periode 2015-2017
Departement Head Investor Relation, periode 2013-2015,
Manager Investor Relation, periode 2011-2013, Manager
Investor Communication, periode 2010-2011, Kepala Seksi
Tim Sekuritas KPR, periode 2006-2010, Dep. Manager Risk
Management PT Sarana Multigriya Finansial, periode 2006,
Auditor Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), periode
2006-2007

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Investor Relations Masterclass, Executive Workshop, the Investor
Relations Society, United Kingdom (UK) (2013);, Sertifikat
Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, 3 dan 4 oleh
Lembaga Sertifikasi
Profesi Perbankan (LSPP) (2011, 2012 dan 2014), Workshop
ASEAN Corporate Governance Scorecard, Indonesian Institute for
Corporate Directorship (IICD), Jakarta (2015), Workshop Peran dan
Fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Kementerian
BUMN, Bandung,
Indonesia (2015), The First ASEAN Marketing Summit, Markplus
Institute, Jakarta (2015), The 1st Corporate Secretary Leadership
Forum, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Bangkok, Thailand (2015),
The Workshop Making Small-Scale Savings Work for Everyone
in a Digitised World, The World Savings Bank Institute (WSBI),
Washington DC, USA (2015).
Workshop Direksi & Manager SDM BUMN, Jakarta (2017);
The Second Indonesia Human Capital Summit 2017, Jakarta
(2017); Workshop Manajemen Talent BUMN berkelas Dunia, Bali
(2017).

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu
pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam
Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan

senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan
serta diperbarui berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
No. 03/DEKOM-BTN/XI/2019 tanggal 19 November 2019
tentang Piagam Remunerasi dan Nominasi PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk .

Cakupan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Ketentuan Umum;	9. Persyaratan Keanggotaan;
2. Pengertian dan Tujuan Pembentukan Komite;	10. Rapat Komite;
3. Tugas Komite;	11. Anggaran Kegiatan;
4. Tanggung Jawab dan Laporan Kegiatan;	12. Penghasilan Anggota Komite;
5. Wewenang Komite;	13. Pendidikan;
6. Ruang Lingkup Tugas dan Mekanisme Kerja;	14. Tenaga Penunjang;
7. Akses dan Kerahasiaan Informasi;	15. Penutup.
8. Komposisi dan Struktur;	



Pada tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi pedoman remunerasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer grup, dan sasaran serta strategi jangka panjang Perseroan.

Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.03/DEKOM-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOMBTN/2017, Tanggal 10 Agustus tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan telah mempertimbangkan aspek integritas, akhlak dan moral, independensi, pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession planning Human Capital Management.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi serta dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Jumlah Komisaris Independen dalam susunan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 43 ayat 4 bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah ^{*)} (Ketua)	Heru Budi Hartono ^{*)} (Anggota)	Ahdi Jumhari Luddin ^{*)} (Anggota)	Armand B. Arief ^{*)} (Anggota)	I Nengah Rentaya (Anggota)	Eko Waluyo (Anggota Ex-Officio)
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = memiliki | ✗ = tidak memiliki

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Transparansi Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan pihak independen Perseroan telah mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No.01/DEKOM- BTN/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta Keputusan RUPS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 27 Maret 2013. Demikian pula telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

jawab Dewan Komisaris. Adapun perincian Rangkap jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi, disajikan pada tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Instansi lain
Chandra M. Hamzah ^{*)}	-
Heru Budi Hartono ^{*)}	Kepala Sekretariat Presiden
Ahdi Jumhari Luddin ^{*)}	-
Armand B. Arief ^{*)}	-
I Nengah Rentaya	-
Eko Waluyo	-

^{*)}Berlaku efektif setelah pengangkatan yang bersangkutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 8 bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

A. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf A, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

B. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Dalam pelaksanaan fungsi Remunerasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf B, Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, wajib:

1. Melakukan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tersebut di atas, dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum Pasal 49, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

- b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi:

Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai Ruang Lingkup Tugas sbb:

1. Lingkup Remunerasi bertugas menyusun dan merekomendasikan sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Lingkup Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memastikan terbentuknya talent pool, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan



STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

5. Memberikan jaminan/kepastian kepada Dewan Komisaris dengan melakukan review secara berkelanjutan terhadap SOP (prosedur) terkait dengan penyebaran informasi yang akan dikeluarkan perusahaan
6. Memastikan setiap keputusan Dewan Komisaris dan RUPS telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengevaluasi dan secara periodik merevisi Surat Kesepakatan Bersama (*Board Manual*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan, ketentuan dan perundangan yang berlaku.
8. Memastikan kebijakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, telah mengikuti alur komunikasi yang ditetapkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (*Board Manual*) Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris memeriksa transaksi-transaksi material yang diduga mengandung kecurangan dan perbuatan yang merugikan Perusahaan.
10. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis praktik GCG dan melaporkannya bila terdapat penyimpangan.

Hak dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

1. Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Satuan Unit Internal Bank, laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas

terhadap catatan, karyawan, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Melaksanakan haknya bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Kepatuhan, dan/atau dengan Satuan Kerja Lainnya.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak Independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.

Mekanisme Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengikuti mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Melakukan telaah atas kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
2. Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kriteria nominasi dan sistem remunerasi di Perseroan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan Standard Operating Procedure Perseroan yang berlaku.

Akses dan Kerahasiaan Reformasi :

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris.

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

**Realisasi Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019**

Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Agenda	Risalah/Memo/Surat	Keputusan/Arahan/Hasil
1	Pembahasan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2019	Risalah Rapat Komite No.01/N/KRN/BTN/II/2019 Surat Dewan Komisaris kpd Direksi No. 03/KOM/BTN/I/2019, tanggal 30 Januari 2019.	Menyetujui usulan Rencana Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 Menyetujui usulan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
2	Pembahasan Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Iman Nugroho Soeko (INS)	Risalah Rapat Komite No.02/N/KRN/BTN/II/2019. Risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 07/KOM/BTN/II/2019. Rabu tanggal 6 Februari 2019.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris, menyetujui hasil kajian hukum yang direkomendasikan Komite yakni berakhirnya masa tugas Dir Finance and Treasury pada saat pelaksanaan RUPST 2019.
3	Pembahasan Calon Kepala Divisi Internal Audit (IAD)	Risalah Rapat Komite No.03/N/KRN/BTN/II/2019, tanggal 26 Februari 2019.	Memutuskan Sdr. Hertanta sebagai Kepala Divisi Internal Audit/Satuan Kerja Audit Internal Bank, berlaku efektif terhitung tanggal 28 Februari 2019, sekaligus merekomendasikan kepada Direksi agar yang bersangkutan segera diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan/atau Sertifikasi Profesi Audit yang relevan terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Divisi IAD/SKAI.
4	Merekomendasikan penyelenggaraan Program Pendidikan Peningkatan Kompetensi Re-strukturisasi dan Novasi Kredit, sebagai tindak lanjut dari amanat pertemuan Dewan Komisaris dengan OJK terkait evaluasi Pengawasan Bank.	Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 02/KOM/BTN/ II/2019 tanggal 13 Maret 2019.	Arahan Dewan Komisaris terkait dengan temuan OJK dan Evaluasi kinerja Bank, khususnya di bidang kompetensi perkreditan.
5	Pembahasan Kajian Remunerasi, Tantiem dan LTI BOD dan BOC	Risalah Rapat Komite No.04/N/KRN/BTN/IV/2019 tanggal 9 April 2019.	Menyetujui rekomendasi usulan kenaikan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kementerian BUMN.
6	Mengusulkan Rekomendasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 kepada Menteri BUMN.	Surat Dewan Komisaris No. 039/KOM/BTN/IV/2019 tanggal 12 April 2019.	Tindaklanjut Keputusan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
7	Mengkaji ketentuan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Rektor Universitas.	Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 041/KOM/BTN /IV/2019, tanggal 16 April 2019.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan kajian hukum yang berlaku, melibatkan Divisi Legal.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

No.	Kegiatan/Agenda	Risalah/Memo/Surat	Keputusan/Arahan/Hasil
8	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam rangka RUPS Tahunan 17 Mei 2019	Risalah Rapat Komite No.05/N/KRN/BTN/V/2019 tanggal 30 April 2019.	Komite merekomendasikan Bakal Calon Pengurus Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan untuk diusulkan kepada Menteri BUMN dlm rangka RUPST 2019 sesuai dengan kriteria persyaratan yang berlaku.
9	Membahas Rekomendasi KORENO Perihal Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris dalam rangka persiapan RUPST 2019.	Risalah Dewan Komisaris No. 36/KOM/ BTN/IV/2019, tanggal 30 April 2019.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perihal Rekomendasi Bakal Calon Pengurus Perseroan disampaikan kpd Kementerian BUMN.
10	Menyampaikan Rekomendasi Bakal Calon Pengurus Perseroan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN dalam rangka RUPST Mei 2019.	Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN No. 055/KOM/ BTN/V/2019, tanggal 2 Mei 2019.	Rekomendasi Bakal Calon Pengurus Perseroan dari Internal Bank untuk Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi (BOD-1).
11	Membahas dan mengkaji Nominasi Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Calon <i>Talent</i> Internal Bank sebagai persyaratan direkomendasikan sebagai Peserta <i>Talent Pool - Integrated Talent Management System</i> (ITMS) Kementerian BUMN.	Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN No. 063/KOM/ BTN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 Perihal Permintaan <i>Data Talent Pool</i> .	Rekomendasi Peserta <i>Talent Pool</i> Sistem ITMS Kementerian BUMN, disampaikan sesuai dengan permintaan Kementerian BUMN No. SR-279/MBU/D5/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
12	Membahas, mengevaluasi Kinerja Anggota Direksi sebagai persyaratan direkomendasikan sebagai Peserta <i>Talent Pool - Integrated Talent Management System</i> (ITMS) Kementerian BUMN.	Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN No. 056/KOM/ BTN/V/2019, tanggal 8 Mei 2019, sesuai Surat Kementerian BUMN No. SR-279/MBU/D5/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.	Melengkapi Rekomendasi Peserta <i>Talent Pool</i> dari Anggota Direksi sesuai Surat Dekom No. 063/KOM/BTN/ V/2019 tanggal 7 Mei 2019 sebelumnya.
13	Melakukan evaluasi bidang tugas Direktorat Kepatuhan, Strategi dan <i>Transformation</i> , sebagai tindak lanjut Temuan OJK, antara lain untuk memperkuat fungsi Direktorat Compliance.	Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN No. 068/KOM/ BTN/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Direktur Kepatuhan.	Memperkuat Peran Direktorat Kepatuhan (<i>Compliance</i>) agar lebih fokus melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya memperkuat fungsi <i>Compliance</i> , mencakup Kebijakan dan Implementasinya.
14	Menindaklanjuti Persetujuan Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019, oleh Kementerian BUMN.	Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No.083/KOM/BTN/ V/2019 tanggal 31 Mei 2019.	Mencakup Penetapan Remunerasi: Gaji/Honorarium, Tantiem dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris.
15	Merevisi Piagam (<i>Charter</i>) Komite Remunerasi Dan Nominasi bersama Divisi <i>Compliance</i> .	Draft awal Revisi Piagam (<i>Charter</i>) Komite Remunerasi dan Nominasi selesai tanggal 10 Juni 2019.	Draft Revisi Piagam Komite disampaikan kepada Unit Compliance untuk mendapatkan persetujuan prinsip Direksi dan Dewan Komisaris (Telah dibahas dgn Divisi Legal, dan <i>Compliance</i>)
16	Melaksanakan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris sebagai kelengkapan dokumen persyaratan mengikuti Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.	Surat Dekom kpd Direksi No. 088/ KOM/BTN/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, Perihal Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris.	Dikoordinasikan dengan Corporate Secretary untuk dilaporkan kepada OJK.



No.	Kegiatan/Agenda	Risalah/Memo/Surat	Keputusan/Arahan/Hasil
17	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam rangka penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019.	Risalah Rapat Komite No.07/N/KRN/ BTN/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.	Merekomendasikan Kandidat Bakal Calon Pengurus Perseroan dari internal Bank kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
18	Pembahasan lebih lanjut mekanisme penetapan Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam rangka penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tgl 29 Agustus 2019.	Risalah Rapat DEKOM dan Direksi No. 64/KOM/BTN/ VII/2019, tgl 30 Juli 2019, Perihal Mekanisme dan Penetapan Bakal Calon Pengurus Perseroan. Risalah Rapat Komite No.08/N/KRN/BTN/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.	Merekomendasikan Bakal Calon Pengurus Perseroan dari internal Perseroan sesuai dengan Area Kompetensi dan Potensial Job Fit masing-masing sesuai Potensi dan Kapabilitasnya.
19	Membahas lebih lanjut Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam forum Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite KORENO dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB tgl 29 Agustus 2019.	Risalah Rapat DEKOM No. 66/KOM/ BTN/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019.	Rekomendasi DEKOM perihal Area Penugasan Bakal Calon Pengurus sesuai dengan Kompetensi dan Potensi Job Fit masing-masing.
20	Membahas 3 Aspek/Kriteria Penilaian Kinerja Direksi dan Rekomendasi Bakal Calon Pengurus Perseroan berdasarkan masukan data Hasil Audit Internal Bank, dan laporan WBS terkini.	Risalah Komite Komite No. 09/N/ KRN/BTN/VIII/2019, Selasa tanggal 13 Agustus 2019, Sari Pan Pacific Thamrin.	Merekomendasikan 3 Aspek/ Kriteria Penilaian Kinerja Direksi dan Rekomendasi Nominasi Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam rangka RUPS LB.
21	Membahas Bakal Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dgn Kementerian BUMN dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2019 tgl 29 Agustus 2019 dan menyusun Surat Kuasa serta Berita Acara Penetapan Calon Pengurus Perseroan.	Risalah Rapat Komite No.10/N/KRN/BTN/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Surat Kuasa Dewan Komisaris No. 02/KOM/BTN/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.	Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi menyepakati nama-nama Calon Pengurus Perseroan yang akan diusulkan dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019.
22	Membahas Kriteria Seleksi dan Nominasi Bakal Calon Direktur Utama Perseroan dari internal Bank dalam rangka persiapan RUPSLB tgl 18 Oktober 2019. (ditunda menjadi tgl 27 November 2019).	Risalah Rapat Komite No.11/N/KRN/ BTN/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Risalah Rapat DEKOM No. 82/KOM/BTN/IX/2019, tanggal 24 September 2019.	Melakukan penilaian dan merekomendasikan Bakal Calon Direktur Utama Perseroan berdasarkan Penilaian terhadap faktor Integritas, Kinerja, Kompetensi, Kepemimpinan dan Kematangan Pengalaman Kerja.
23	Membuat Surat Dewan Komisaris kpd Kementerian BUMN perihal Rekomendasi Usulan Bakal Calon Pengurus Perseroan dalam rangka persiapan RUPSLB tanggal 18 Oktober 2019.	Surat Dewan Komisaris No. 144/KOM/ BTN/IX/2019, tanggal 24 September 2019.	Usulan Rekomendasi Bakal Calon Direktur Utama Perseroan dari internal Bank.
24	Melaksanakan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai kelengkapan dokumen persyaratan mengikuti Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.	Surat DEKOM kpd Direksi No. 142/ KOM/BTN/IX/2019, tanggal 24 September 2019, Prhl Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

No.	Kegiatan/Agenda	Risalah/Memo/Surat	Keputusan/Arahan/Hasil
25	Menyusun kriteria seleksi dan proses Seleksi Calon Anggota Komite Audit Dewan Komisaris serta tindak lanjut keputusan seleksinya.	Risalah Rapat Komite No.12/N/KRN/BTN/XI/2019 tanggal 12 November 2019.	Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan 3 (tiga) Orang Kandidat Calon Anggota Komite Audit berdasarkan peringkat terbaik yang selanjutnya diputus dalam Rapat Dewan Komisaris yang terbaik.
26	Membahas Bakal Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2019 tgl 27 November 2019 dan tindaklanjutnya kepada Kementerian BUMN.	Risalah Rapat Komite No.13/N/KRN/BTN/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dan menyusun Surat Kuasa Dekom kepada Ketua Komite dan Berita Acara Penetapan Calon Pengurus Perseroan.	Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi menyepakati nama-nama Calon Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang akan diusulkan dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, rapat sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun dan dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite

Remunerasi dan Nominasi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat, dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Selama tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali rapat, dan di antaranya selalu dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat-rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tanggal	Agenda
30 Januari 2019	Pembahasan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2019
30 Januari 2019	Pembahasan Berakhirnya Masa Jabatan Direktur INS
26 Februari 2019	Pembahasan Calon Kepala Divisi Internal Audit (IAD)
09 April 2019	Pembahasan Remunerasi, Tantiem dan LTI BOD dan BOC
30 April 2019	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan RUPST 2019
30 Juli 2019	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan
06 Agustus 2019	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan
13 Agustus 2019	Pembahasan Penilaian anggota Direksi
29 Agustus 2019	- Evaluasi Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2019 tgl 29 Agustus 2019 - Lain-lain

**AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Tanggal	Agenda
24 September 2019	Pembahasan Bakal Calon Pengurus Perseroan
12 November 2019	Wawancara Seleksi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris
27 November 2019	- Evaluasi Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2019 tgl 27 November 2019 - Lain-lain

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2019, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut.

Nama	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Arie Coerniadi	Seminar	Enterprise Risk Management and Its Challenges in Industrial Revolution 4.0	Barcelona - Milan - Nice, 13-23 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
Kamaruddin Sjam	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5-6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Nama	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Lucky Fathul Aziz H	Seminar	International GRC Workshop In Russia Batch IX - GRC Master Class	Moscow - Saint Petersburg, 29 September - 4 Oktober 2019	CRMS Indonesia
	Seminar	Conference #ECIIA2019	France - Luxembourg - Brussel, 16-22 September 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	2019 National Conference IIA "Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	Solo, 24-25 Juli 2019	Institute of Internal Auditors Indonesia
	Seminar	The Next Generations Embracing GRC In Industry 4.0	Denpasar, 5 – 6 Desember 2019	Enterprise Risk Management Academy
	Seminar	ASEAN CG Scorecard Plus Quality Reporting System	Jakarta, 31 Oktober 2019	Indonesian Institute for Corporate Director

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris Perusahaan setiap triwulan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian Program Kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Remunerasi dan Nominasi serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota

Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

Kebijakan Remunerasi

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2019 kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif, dalam tabel berikut.

Komite Remunerasi dan Nominasi	Periode	Jumlah Remunerasi (Rp)
I Nengah Rentaya	1 Januari – 31 Desember 2019	689.404.764

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Komite Remunerasi dan Nominasi setiap tahunnya selalu menyusun Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Komite Remunerasi dan Nominasi 2020 mengacu pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta arahan prioritas Program Strategis Dewan Komisaris.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2020 meliputi:

1. Menyusun kriteria dan prosedur seleksi serta nominasi bagi Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan melaksanakan seleksi serta kajian hasil assessment Kompetensi/*Personality* Bakal Calon Pengurus Perseroan.
2. Menyusun dan merekomendasikan sistem kebijakan



- Remunerasi dan pemberian Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta sistem Kebijakan Jasa Produksi (Jasprod) kepada Pegawai Bank.
- Me-review Kebijakan Sistem *Job Grading* Jabatan dalam Struktur Organisasi Bank dan merekomendasikan Kebijakan Program Akselerasi Promosi Pegawai *Top Talent* secara selektif serta Perencanaan Suksesi (*Succession Planning*) Bank hingga Jabatan Strategis 2 (dua) level di bawah Direksi.
 - Merekomendasikan Kebijakan Jalur Karir (*Career Path*) dan Kebijakan Jalur Karir Lintas Rumpun Bidang Pekerjaan sesuai dengan Struktur Organisasi baru selaras dengan upaya pengembangan *Talent Bank* yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan era transformasi digital Bank.
 - Melaksanakan kajian Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja untuk mendukung pencapaian target Bank mengacu pada prinsip SMART-CC dan kebijakan Best Practice Sistem Remunerasi yang kompetitif di Pasar.
 - Melakukan kajian terhadap penerapan Budaya Perusahaan dan *Program Engagement* yang telah berjalan hingga tahun 2019.
 - Melaksanakan *review* terhadap Program Pelatihan Pegawai dan *Program School* yang ada, khususnya yang terkait dengan bidang kompetensi perkreditan: Commercial, Mortgage dan Consumer Banking serta Leadership.
 - Mengkaji dan merekomendasikan *Program Coaching, Mentoring* dan *Project* Khusus Program Akselerasi Promosi dan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai dengan kategori kinerja STAR dan POTENSIAL secara selektif untuk dipersiapkan menempati Jabatan Strategis 2 (dua) level di atas *Grade*-nya.
 - Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan atau rekomendasi Dewan Komisaris.
 - Melakukan pengembangan kompetensi anggota melalui kegiatan pelatihan, seminar dan *workshop* serta sertifikasi yang relevan dengan bidang Tugas dan Tanggung Jawab Komite.

Adapun rincian Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan sebagai berikut:

Rencana Kegiatan Tahun 2020	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Menyusun kriteria dan prosedur seleksi serta nominasi bagi Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan melaksanakan seleksi serta kajian hasil assessment Kompetensi/ <i>Personality</i> Bakal Calon Pengurus Perseroan.				
2. Menyusun dan merekomendasikan sistem kebijakan Remunerasi dan pemberian Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta sistem Kebijakan Jasa Produksi (Jasprod) kepada Pegawai Bank.				
3. Me-review Kebijakan Sistem Job Grading Jabatan dalam Struktur Organisasi Bank dan merekomendasikan Kebijakan Program Akselerasi Promosi Pegawai <i>Top Talent</i> secara selektif serta Perencanaan Suksesi (<i>Succession Planning</i>) Bank hingga Jabatan Strategis 2 (dua) level di bawah Direksi.				
4. Merekomendasikan Kebijakan Jalur Karir (<i>Career Path</i>) dan Kebijakan Jalur Karir Lintas Rumpun Bidang Pekerjaan sesuai dengan Struktur Organisasi baru selaras dengan upaya pengembangan <i>Talent Bank</i> yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan era transformasi digital Bank.				
5. Melaksanakan kajian Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja untuk mendukung pencapaian target Bank mengacu pada prinsip SMART-CC dan kebijakan Best Practice Sistem Remunerasi yang kompetitif di Pasar.				
6. Melakukan kajian terhadap penerapan Budaya Perusahaan dan <i>Program Engagement</i> yang telah berjalan hingga tahun 2019.				



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Rencana Kegiatan Tahun 2020	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
7. Melaksanakan <i>review</i> terhadap Program Pelatihan Pegawai dan <i>Program School</i> yang ada, khususnya yang terkait dengan bidang kompetensi perkreditan: <i>Commercial</i> , <i>Mortgage</i> dan <i>Consumer Banking</i> serta <i>Leadership</i> .				
8. Mengkaji dan merekomendasikan <i>Program Coaching</i> , <i>Mentoring</i> dan <i>Project</i> Khusus Program Akselerasi Promosi dan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai dengan kategori kinerja STAR dan POTENSIAL secara selektif untuk dipersiapkan menempati Jabatan Strategis 2 (dua) level di atas <i>Grade</i> -nya.				
9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan atau rekomendasi Dewan Komisaris.				
10. Melakukan pengembangan kompetensi anggota melalui kegiatan pelatihan, seminar dan workshop serta sertifikasi yang relevan dengan bidang Tugas dan Tanggung Jawab Komite.				

Sesuai dengan Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi untuk tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah merencanakan rapat untuk tahun 2020 minimal sebanyak 8 kali dengan agenda utama:

1. Menyusun kriteria dan prosedur seleksi serta nominasi bagi Bakal Calon Pengurus Perseroan.
2. Menyusun dan merekomendasikan sistem kebijakan Remunerasi dan pemberian Tantiem bagi Pengurus Perseroan.
3. Me-review Kebijakan Sistem Job Grading Jabatan dan Kebijakan Program Akselerasi Promosi Pegawai Top Talent.
4. Mengkaji Kebijakan Jalur Karir (*Career Path*) dan Kebijakan Jalur Karir Lintas Rumpun Bidang Pekerjaan.
5. Mengkaji Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja dan kebijakan *Best Practice* Sistem Remunerasi.
6. Mengkaji penerapan Budaya Perusahaan dan Program Engagement Bank.
7. Me-review Program Pelatihan Pegawai dan Program School-School Bank terkait bidang kompetensi perkreditan dan *Leadership*.
8. Mengkaji *Program Coaching*, *Mentoring* dan Project Khusus Program Akselerasi Karir *Top Talent*.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Remunerasi dan Nominasi

serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

KEBIJAKAN SUKSESI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perencanaan Suksesi: Program Pemetaan *Talent*

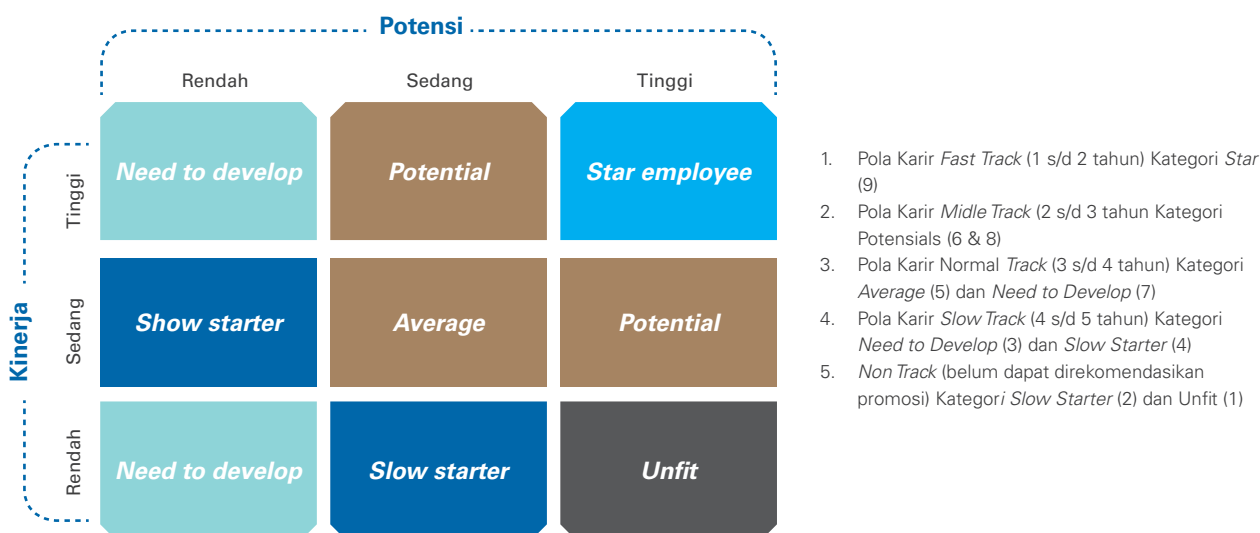
Perseroan melalui Human Capital Management Division melaksanakan Talent Management System (TMS) untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dalam rangka mempersiapkan kader pegawai sebagai bakal calon Direksi melalui Program Pemetaan Talent, yaitu, Proses identifikasi dan/atau nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diawali dengan melaksanakan proses dan aktivitas pengelolaan dan penempatan Pegawai dengan melaksanakan program Pemetaan Talent (*Talent Mapping*). Perseroan menyakini bahwa pengelolaan dan penempatan Pegawai merupakan kunci sukses peningkatan kinerja Perseroan. Perseroan menetapkan suatu metode dan tata cara untuk mengelola segenap Pegawai agar manajemen dapat menempatkan mereka pada jabatan yang tepat, utamanya jabatan-jabatan strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian target-target utama sehingga selaras dengan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.



Metode Pemetaan Talent dilakukan dengan tujuan:

1. Menentukan program pengelolaan dan pengembangan bagi para Pegawai.
2. Penempatan Pegawai di Jabatan yang tepat.
3. Melakukan langkah-langkah pembenahan dan penyelerasan untuk memaksimalkan kinerja Bank.
4. Pemetaan Talent ini adalah suatu proses asesmen yang menilai aspek Kinerja dan Potensi Pegawai yang dituangkan dalam matriks “9 Boxes” sebagaimana ilustrasi gambar, seperti di bawah ini.

TALENT MAPPING PEGAWAI



Berdasarkan hasil asesmen, terdapat 9 (sembilan) kelompok Pegawai yang mencerminkan perbedaan karakteristik dari kedua aspek yang dinilai, sebagai berikut:

1. Kelompok Talent 9 (*Star*): Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Tinggi.
2. Kelompok Talent 8 (*Potential*): Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Sedang.
3. Kelompok Talent 7 (*Need to Develop*): Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Rendah.
4. Kelompok Talent 6 (*Potential*): Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Tinggi.
5. Kelompok Talent 5 (*Average*): Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Sedang.
6. Kelompok Talent 4 (*Slow Starter*): Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Rendah.
7. Kelompok Talent 3 (*Need to Develop*): Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Tinggi.
8. Kelompok Talent 2 (*Slow Starter*): Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Sedang.
9. Kelompok Talent 1 (*Unfit*): Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Rendah.

Program Suksesi

Berdasarkan program pemetaan talent tersebut, Perseroan selanjutnya melaksanakan program perencanaan suksesi. Perseroan menetapkan suatu kebijakan dan mekanisme untuk pengisian jabatan-jabatan strategis (hingga ke level top manajemen) yang memegang peranan kunci untuk dapat mewujudkan sasaran-sasaran strategis Perseroan secara selaras (*aligned with the company's strategic directions*) sehingga Visi dan Misi Bank dapat terwujud.

Sejalan dengan usaha menciptakan sustainable value kepada Shareholder dan sesuai dengan Rencana Pengembangan Strategis Bisnis Bank dalam Era Digitalisasi Banking, Perseroan telah berupaya berbagai inisiatif strategi pertumbuhan pengembangan bisnis Bank, dan berbagai inovasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan distinctive competencies kepada Pegawai,



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

hususnya kompetensi di bidang bisnis perumahan kepada seluruh insan BTN (Bitniz). Direksi juga telah menetapkan Kebijakan Umum Direksi (KUD) yang difokuskan pada pertumbuhan berkelanjutan dan berkualitas yang didukung SDM, Infrastruktur IT dan penerapan manajemen risiko dengan Tema: "Pertumbuhan terkendali dengan bisnis yang lebih prudent dan berkualitas, didukung oleh produktivitas

SDM, Infrastruktur IT dan manajemen Risiko yang optimal", sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019-2021, sekaligus dalam rangka mencapai tujuan VISI baru Bank yakni "Terdepan dan Terpercaya dalam Memfasilitasi Sektor Perumahan dan Jasa Layanan Keuangan Keluarga", sebagai akselerator dan integrator di bidang perumahan serta mitra keuangan keluarga. Sebagai pembawa mandat utama dalam pelaksanaan Program Pemerintah terkait perumahan, Perseroan mempunyai aspirasi untuk memperkuat peran menjadi housing market maker dengan berperan sebagai integrator baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*).

Direksi juga telah menetapkan arah kebijakan Manajemen di bidang pengembangan SDM dalam usaha menciptakan *Sustainable Value* kepada *Shareholders* dimaksud yaitu:

1. Membangun manajemen *Top Talent* dan Suksesi yakni:
 - a. Melakukan evaluasi manajemen karir dan job family;
 - b. Menyusun rencana suksesi dan handover;
2. Menyusun *strategic man power planning* dengan strategi alokasi pareto;
3. Memperkuat internalisasi *Employer Value Proposition* (EVP) melalui aktivitas rekrutmen terarah untuk menarik top talent;
4. Penguatan manajemen berbasis kinerja:
 - a. Memperkuat sistem manajemen kinerja;
 - b. Mendesain mekanisme kompensasi yang menarik dan untuk seluruh segmen bisnis.
5. Penguatan budaya berkinerja tinggi:
 - a. Internalisasi budaya kerja yang kolaboratif dan fokus pada wawasan eksternal untuk transformasi digital;
 - b. Meningkatkan kapabilitas unit Human Capital untuk melaksanakan eksekusi inisiatif strategis penguatan budaya kerja dengan dukungan top management.

Mekanisme Program Suksesi Perseroan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Komite Perencanaan suksesi membuat rencana suksesi untuk setiap jabatan yang dituju berdasarkan hasil seleksi calon suksesor;

2. Komite perencanaan suksesi mendiskusikan rencana suksesi dengan manajemen, atasan langsung, pegawai dan pihak yang terlibat untuk memfinalisasi rencana suksesi agar disetujui bersama;
3. Suksesor dan atasan langsung atau mentor yang ditunjuk melakukan analisa hasil assessment dan membuat rencana pengembangan untuk kesenjangan kompetensi baik teknis maupun perilaku; dan
4. Atasan langsung atau mentor yang ditunjuk merekomendasikan Program Pengembangan yang spesifik bagi masing-masing suksesor kemudian didiskusikan dengan Komite Perencanaan Suksesi.

Perseroan secara berkala wajib melakukan evaluasi atas program perencanaan suksesi yang telah diselenggarakan dengan cara:

1. Mereview dan merevisi strategi dan rencana sesuai dengan perkembangan individu maupun organisasi;
2. Komite Perencanaan Suksesi setiap tahun melakukan *review* dan merevisi strategi dan rencana suksesi sesuai dengan perkembangan individu maupun kebutuhan organisasi.

Program Suksesi Direksi dan Komisaris

Program Pemetaan *Talent* dan Program Suksesi, sebagaimana uraian di atas dijadikan dasar oleh manajemen Perseroan untuk menentukan calon anggota Direksi yang berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris. Kriteria yang ditetapkan Perseroan untuk para Pegawai yang menjadi suksesor atau calon anggota Direksi adalah kelompok "Star" berdasarkan hasil pemetaan *talent*.

Pemetaan *Talent* yang dilaksanakan oleh manajemen Perseroan menjadi pertimbangan utama bagi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk pemilihan calon anggota Direksi yang diselenggarakan dengan kebutuhan kompetensi mereka untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan Perseroan. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugasnya dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, di antaranya adalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS maka rekomendasi Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Proses Pengajuan Bakal Calon Direksi**

Skema proses pengajuan bakal calon Direksi dapat dilihat di bawah ini.



Proses Pengusulan ke Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMN berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas:
 - a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN; dan
5. Sumber Lain dari Pejabat BUMN lain dan sumber lainnya.

Untuk itu, tahapan yang dilakukan pada proses pengusulan Talenta BUMN sebagai Bakal Calon Direksi ke Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan bakal calon Direksi kepada Kementerian BUMN (Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) sebagai Talenta BUMN dari internal Perseroan.
2. Bila Kementerian BUMN memiliki bakal calon lain, Kementerian BUMN meminta Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap bakal calon yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat Dewan Komisaris mengusulkan kepada Kementerian BUMN.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

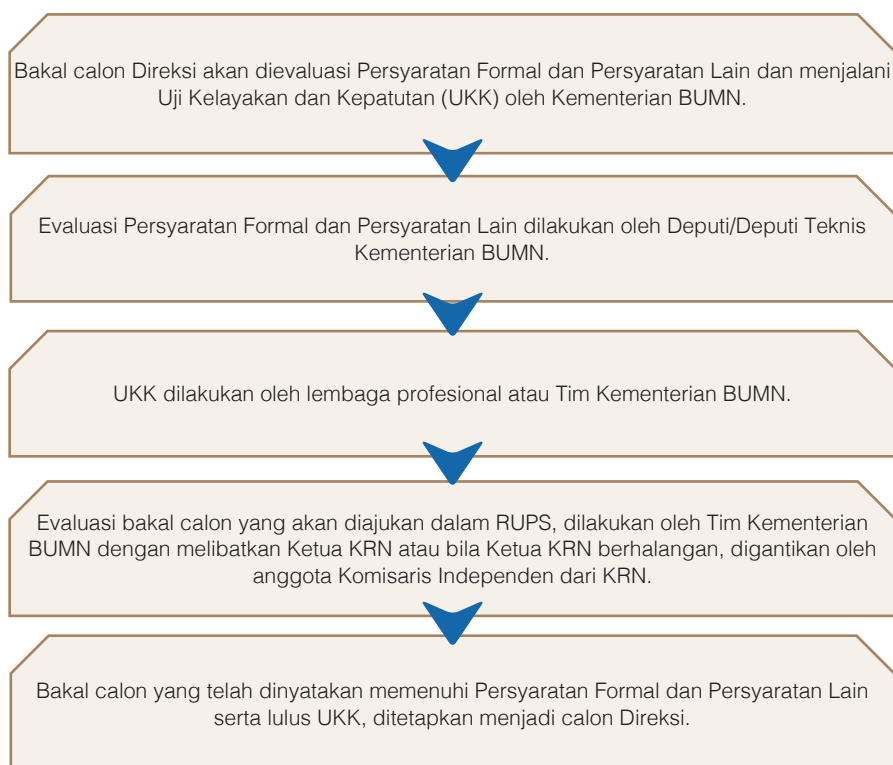


Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Proses Seleksi/Pengujian

Skema proses seleksi/pengujian calon Direksi dapat dilihat di bawah ini.



Proses Seleksi/Pengujian

Kuasa atau Perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan penetapan nama calon Direksi (beserta daftar riwayat hidup) kepada Pimpinan RUPS untuk diputuskan sebagai Direksi pada RUPS yang bersangkutan.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah monitoring dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit^{*)}
5. Komite Produk
6. Komite Personalia
7. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

^{*)} Struktur, kebijakan dan keanggotaan Komite Kredit sedang dalam proses Keputusan Direksi. Adapun tugas dan fungsinya dijalankan oleh Rapat Direksi yang membahas bidang kredit.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10/SK/DIR/RMD/2019 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Enterprise Risk Management Division Head
Anggota Tetap	Direksi 1. Direktur Distribution & Retail Funding 2. Direktur Finance, Planning & Treasury 3. Direktur Operation, IT & Digital Banking 4. Direktur Consumer & Commercial Banking 5. Direktur Remedial & Wholesale Risk 6. Direktur Human Capital, Legal & Compliance Division Head 1. Internal Audit Division Head 2. Compliance & Governance Division Head
Anggota Tidak Tetap	Division Head Seluruh Kepala Divisi selain ERMD Head, CMGD Head dan IAD Head.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi :

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan *Division/Desk Head* unit kerja operasional dan Enterprise Risk Management Division Head.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (Irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tanggal	Agenda
15 Januari 2019	Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018
18 April 2019	• Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2019 • Usulan Risk Appetite dan Risk Tolerance 2019
15 Juli 2019	• Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2019 • Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
16 Oktober 2019	Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2019
4 November 2019	Usulan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Recovery Plan Trigger Level 2020

Asset and Liability Committee (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Asset and Liability Committee (ALCO) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 2/PD/TRSD/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) Perseroan dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:



Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Treasury</i>
Anggota Tetap	- Seluruh Direktur (khusus Direktur Kepatuhan menjadi anggota tetap namun hanya memberikan opini kepatuhan) - Kepala Divisi yang mengelola <i>funding</i> - Kepala Divisi yang mengelola <i>Lending</i> - Kepala Divisi Syariah - Kepala Divisi Institutional Banking - Kepala Divisi <i>Corporate & Loan Syndication</i> - Kepala Divisi <i>Finance and Accounting</i> - Kepala Divisi <i>Strategy and Performance Management</i> - Kepala Divisi Consumer Collection and Remedial - Kepala Divisi <i>Asset Management</i> - Kepala Divisi <i>Risk Management</i> - Kepala Divisi <i>Compliance and Governance</i> - Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i>
Anggota Tidak Tetap	Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab *Asset and Liability Committee* (ALCO) adalah menyusun strategi pengelolaan asset dan liability dalam rangka memaksimalkan profitabilitas Bank dan menjaga struktur neraca Perseroan melalui manajemen aktiva produktif, pengurangan biaya dana dan pengelolaan risiko suku bunga serta risiko likuiditas.

Pelaksanaan Tahun 2019

Tugas Asset and Liability Committee (ALCO) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Asset and Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan rapat sebanyak 17 kali dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Tanggal	Agenda
17 Januari 2019	- Menetapkan komitmen surplus DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemenuhan rasio likuiditas. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan terkait debitur KPR Subsidi yang tidak lolos verifikasi BPKP. - Menetapkan kebijakan pemberian suku bunga kredit diluar ketentuan. - Menetapkan penyesuaian suku bunga outstanding KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Januari 2019.
26 Februari 2019	- Menetapkan komitmen surplus DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan <i>tier</i> saldo & suku bunga produk Tabungan BTN Batara - Mass KPR. - Memutuskan kebijakan skema suku bunga counter Kring BTN khusus PNS, BUMN/BUMD, TNI & POLRI. - Memutuskan margin/bagi hasil pembiayaan komersial syariah. - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 28 Februari 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

AGENDA RAPAT ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Tanggal	Agenda
13 Maret 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan terkait penetapan target/KPI Kantor Cabang - Memutuskan kebijakan suku bunga realisasi baru untuk KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Komersial Group BUMN, dan KUMK KMK Kemitraan. - Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan konsep CPA. - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Maret 2019.
15 April 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan terkait penetapan target/KPI Kantor Cabang - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 30 April 2019.
13 Mei 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Mei 2019.
16 Mei 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka.
11 Juni 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan suku bunga realisasi baru untuk KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Komersial Group BUMN, dan KUMK KMK Kemitraan. - Menetapkan penyesuaian suku bunga kredit <i>outstanding</i> KPR/KPA, KAR/KBR, Kredit Ruko, Kredit Konstruksi (KYG), KMK/KMK Kontraktor/KI/Kredit <i>linkage</i> - Menetapkan kewenangan restrukturisasi kredit konsumen konvensional & syariah. - Memutuskan usulan skema Kredit Manfaat langsung Tambahan (MLT) BPJS TK kepada BPJS Ketenagakerjaan. - Memutuskan pemberian Persetujuan Ijin Prinsip Penerbitan Obligasi Subordinasi. - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 30 Juni 2019.
5 Juli 2019	- Memutuskan strategis yang dilakukan untuk menjaga rasio likuiditas. - Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka.
17 Juli 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan perubahan strata saldo dan suku bunga <i>counter</i> Tabungan e'Batarapos, BTN Perumahan, & BTN Batara Pensiunan. - Memutuskan kebijakan terkait penyaluran KPR Subsidi BP2BT. - Menetapkan penyesuaian suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Juli 2019.

**AGENDA RAPAT ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)**

Tanggal	Agenda
7 Agustus 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan terkait restrukturisasi kredit konsumen konvensional & syariah Kategori <i>Performing Loan</i>.
21 Agustus 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan terkait produk KPR pengganti KPR Subsidi (FLPP/SSB). - Menetapkan penyesuaian suku bunga outstanding KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Agustus 2019.
4 September 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan strategi yang diambil terkait pertumbuhan posisi DPK. - Memutuskan kebijakan terkait posisi <i>Secondary Reserve</i> (SR) untuk memenuhi rasio likuiditas bank. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka.
18 September 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan suku bunga realisasi baru untuk KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Komersial Group BUMN, dan KUMK KMK Kemitraan. - Menetapkan penyesuaian suku bunga outstanding KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 30 September 2019.
7 Oktober 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan strategi mendukung pertumbuhan DPK Ritel (<i>low cost</i>). - Memutuskan sinergi antara ERMD & <i>Chief Economist</i> dalam melakukan kajian dampak kondisi ekonomi global & makro ekonomi. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka.
24 Oktober 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan agar divisi <i>funding</i> bekerjasama dengan divisi terkait menyusun strategi pertumbuhan dana murah. - Memutuskan kebijakan penempatan dana terkait penawaran dari PTBA - Memutuskan agar divisi kredit, CCO, AMO, & SPO menyampaikan kajian terkait peningkatan kualitas kredit. - Memutuskan agar CMLO & AMO menyampaikan kajian dampak habisnya kuota KPR Subsidi. - Menetapkan penyesuaian suku bunga outstanding KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBOK) 31 Oktober 2019.
6 November 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka.
16 Desember 2019	- Menetapkan target pertumbuhan DPK & pertumbuhan posisi kredit. - Memutuskan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Memutuskan kebijakan suku bunga realisasi baru untuk KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Komersial Group BUMN, dan KUMK KMK Kemitraan. - Mengukuhkan keputusan dana talangan atas penambahan dana FLPP 2019. - Memutuskan kebijakan agar SMD & divisi terkait membuat kajian tentang Program KPR Subsidi 2020. - Memutuskan kebijakan kerjasama dengan PT. SMF. - Menetapkan penyesuaian suku bunga outstanding KPR SSB, SSB IOBP, SUM, KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR & KBR. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 31 Desember 2019.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**Komite Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan**

Komite Kebijakan Perkreditan berperan dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan dibidang perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 1/PD/PPD/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Supervisi Policy and Procedure
Anggota (voting member)	Seluruh Direktur Kecuali Direktur Supervisi Compliance
Anggota (non voting member)	Direktur Supervisi Compliance
Peserta Rapat Tambahan	1. Kepala Divisi Supervisi Collection and Asset Management 2. Kepala Divisi Supervisi Legal 3. Kepala Divisi Supervisi Compliance and Governance 4. Kepala Divisi Supervisi Credit Risk 5. Kepala Divisi Supervisi Kredit/Pembiayaan sesuai segmennya 6. Kepala Divisi Supervisi Internal Audit 7. Kepala Divisi/unit lainnya sesuai kebutuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
- Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
- Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyaliran penghapusan kredit atau pembiayaan.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
- Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah.

**Pelaksanaan Tahun 2019**

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Tanggal	Agenda
20 Februari 2019	Kewenangan Memutus Kredit Konstruksi
20 Februari 2019	Kewenangan Memutus Kredit Konsumer & Komersial
04 September 2019	Perubahan Kebijakan Kredit Komersial dan Konsumer
31 Desember 2019	Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk dalam rangka memutuskan kredit sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kredit telah ditetapkan dalam struktur organisasi Perseroan melalui Ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/SIPD/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat. Pada tingkat operasional, fungsi Komite Kredit tetap berjalan melalui pelaksanaan Rapat Direksi yang membawahi bidang kredit. Adapun struktur dan keanggotaan Komite Kredit sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Supervisi Credit Risk
Anggota (voting member)	Seluruh Direktur kecuali Supervisi Compliance
Anggota (non voting member)	Direktur Supervisi Compliance
Peserta Rapat Tambahan	1. Kepala Divisi supervisi Collection and Asset Management 2. Kepala Divisi supervisi Legal 3. Kepala Divisi supervisi Compliance and Governance 4. Kepala Divisi supervisi Policy and Procedure 5. Kepala Divisi supervisi Kredit/Pembiayaan sesuai segmennya 6. Kepala Divisi supervisi Internal Audit 7. Kepala Divisi/unit lainnya sesuai kebutuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumer sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Pelaksanaan Tahun 2019

Tugas Komite Kredit dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sebanyak 70 kali dengan agenda sebagai berikut.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**AGENDA RAPAT KOMITE KREDIT**

Tanggal	Agenda
16 Januari 2019	Restrukturisasi kredit
16 Januari 2019	Restrukturisasi kredit
16 Januari 2019	Kredit Investasi
16 Januari 2019	Restrukturisasi kredit
17 Januari 2019	Rapat Komite Kredit (RKK)
23 Januari 2019	Kredit Investasi
23 Januari 2019	Permohonan Waiver
6 Februari 2019	Restrukturisasi Kredit Investasi
6 Februari 2019	Permohonan baru Kredit Investasi
11 Februari 2019	Kredit Investasi
11 Februari 2019	Restrukturisasi Kredit
19 Februari 2019	Persetujuan Prinsip Line Facility
19 Februari 2019	Persetujuan Prinsip Line Facility
20 Februari 2019	Pendanaan
20 Februari 2019	Pendanaan kepada End User
27 Februari 2019	Restrukturisasi Kredit
27 Februari 2019	Restrukturisasi Kredit
27 Februari 2019	Penunjukan Pengelola Proyek
27 Februari 2019	Banding Pasal
27 Februari 2019	Kredit Yasa Griya (KYG)
27 Februari 2019	Kredit Kepemilikan Lahan (KPL)
27 Februari 2019	Banding Pasal
27 Februari 2019	Banding Pasal
6 Maret 2019	Permohonan Kredit Agunan Rumah (KAR)
6 Maret 2019	Corporate Loan (Kredit Investasi)
6 Maret 2019	Corporate Loan (Kredit Investasi)
13 Maret 2019	Banding syarat dan ketentuan pada SP2K
20 Maret 2019	Review Putusan Notula Rapat Fasilitas Kredit Korporasi
20 Maret 2019	Ijin Prinsip dalam kredit Sindikasi
20 Maret 2019	Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond-Line Facility
20 Maret 2019	Kredit Konstruksi dan PRK Siaga
20 Maret 2019	Penambahan Plafond-Kredit Konstruksi



AGENDA RAPAT KOMITE KREDIT

Tanggal	Agenda
20 Maret 2019	<i>Refinancing</i> - Kredit Investasi
20 Maret 2019	Banding Persetujuan Restrukturisasi - Kredit Konstruksi
8 Mei 2019	<i>Corporate Loan</i>
8 Mei 2019	Pelaporan terkait penunjukan kuasa
8 Mei 2019	Laporan Tindak Lanjut Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK)
5 Juli 2019	Restrukturisasi Kredit
28 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT UJP
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BD
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BBP
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT WWI
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT DR
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT VI
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TTP
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BC
30 Agustus 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BDE
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT SPI
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT PBB
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BDM
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BN
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT MPM
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT MPI
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TEP
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT KJR
25 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT BBP
26 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT CR
26 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TP
26 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT GKS
26 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TPD
27 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TTP
27 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT ME
27 September 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT MP
21 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT WK



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**AGENDA RAPAT KOMITE KREDIT**

Tanggal	Agenda
21 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT JPP
21 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT DPS
21 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT GMR
21 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT CPP
21 Oktober 2019	Kebijakan Perkreditan
31 Oktober 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT ADS
18 Desember 2019	Rapat Komite Kredit (RKK) PT TP

KOMITE PRODUK

Komite Produk bertugas membantu Direksi yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan perkembangan produk di Perseroan dan bertanggung jawab kepada Direksi dan secara berkala memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Divisi yang mengelola produk.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Produk telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No.02/PD/PPD/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Komite Produk dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Supervisi Policy and Procedure
Anggota (voting member)	Seluruh Direktur Kecuali Direktur Supervisi Compliance
Anggota (non voting member)	Direktur Supervisi Compliance
Peserta Rapat Tambahan	- Kepala Divisi Supervisi IT Planning and Development - Kepala Divisi Supervisi IT Operations - Kepala Divisi Supervisi Legal - Kepala Divisi Supervisi Kepatuhan - Kepala Divisi Supervisi Risk Management - Kepala Divisi/unit lainnya sesuai kebutuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan fungsi Komite Produk adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

- Memastikan kesesuaian antara Pengembangan Produk dan aktivitas dengan kebutuhan serta tujuan bisnis Bank.
- Melakukan pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan Pengembangan Produk dan aktivitas baru dan penerapannya dalam jangka panjang.
- Menentukan arah Pengembangan Produk dan aktivitas jangka panjang.
- Menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan/Bank yang

terkait dengan Pengembangan Produk dan aktivitas.

- Memantau dan membahas sebagai berikut:
 - Kemajuan dalam pelaksanaan produk dan aktivitas baru yang sudah dibuat;
 - Rencana-rencana pengembangan dan penerapan produk dan aktivitas;
 - Masalah-masalah strategis yang ditemui dalam pengembangan dan penerapan produk dan aktivitas;
 - Teknologi dan standar yang perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan penerapannya di lingkungan Bank.
- Komite bertanggung jawab atas keputusan dan/atau rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Direksi ini yang selanjutnya akan diputus



melalui mekanisme Rapat Direksi.

7. Komite Produk bertanggungjawab menyampaikan laporan tertulis kepada Direksi, mengenai:
 - a. Pokok-pokok Kebijakan Pengembangan Produk dan Aktifitas yang telah ditetapkan sebagai pedoman Bank dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Produk dan aktivitas;
 - b. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Aktifitas Bank;
 - c. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengembangan Produk dan

aktivitas serta melaporkan kepada Direksi.

8. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengembangan Produk dan aktivitas serta melaporkan kepada Direksi.

Pelaksanaan Tahun 2019

Tugas Komite Produk dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Produk telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT KOMITE PRODUK

Tanggal	Agenda
23 Januari 2019	Kolaborasi Tabungan & <i>Digital Payment Transaction</i>
4 Februari 2019	Update Program Kerja & Eksekusinya (Team Kolaborasi Funding & Digital Banking)
1 Juli 2019	<i>Cash Management System (CMS)</i>

KOMITE PERSONALIA

Komite Personalia berperan dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Personalia Pusat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2014 tentang Komite Personalia dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Koordinator	Direktur Utama
Sekretaris	Human Capital Management & Culture Specialist Division Head
Anggota Tetap	Direktur yang melakukan supervisi Human Capital dan Direksi lain terkait human capital pada unit yang supervisinya sedang dibahas
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi lain yang diundang berdasarkan keperluan
Supporting Group	Department Head Human Capital bersama dengan Unit Human Capital Career & Development pada Human Capital Management & Culture Specialist Division

Keanggotaan Kepala Divisi dalam Komite Personalia Pusat tidak dapat diwakilkan sehingga dalam hal yang bersangkutan berhalangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Personalia, maka perannya tidak dapat didelegasikan kepada pemangku jabatan lain di unit kerjanya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Personalia Pusat adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan human capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

- human capital agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan human capital.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang independen bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/penggunaan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait human capital di luar Nomor 1 s/d Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam review sistem/ kebijakan Human Capital Management.

Pelaksanaan Tahun 2019

Tugas Komite Personalia dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Personalia telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT KOMITE PERSONALIA

Tanggal	Agenda
24 Januari 2019	Usulan Mutasi Pegawai Evaluasi L 1 Kantor Cabang dan Kantor Wilayah
10 April 2019	Usulan Mutasi Pegawai Pemenuhan Posisi <i>Layer</i> 1
16 April 2019	Usulan Bakal Calon Anggota Direksi BUMN
29 Mei 2019	Usulan Mutasi Evaluasi Pegawai Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
22 Juli 2019	Usulan Bakal Calon Anggota Direksi BUMN
4 September 2019	Usulan Mutasi Pejabat <i>Layer</i> 1
11 November 2019	Usulan Mutasi Evaluasi Pejabat <i>Layer</i> 1 Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
18 November 2019	Usulan Mutasi Evaluasi Pejabat <i>Layer</i> 1 Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
2 Desember 2019	Presentasi tentang Talent Management- Human Capital Division Pemilihan Kandidat untuk pengisian posisi Kepala Divisi pada Commercial Lending Division dan Learning Center Division
9 Desember 2019	Penetapan Kepala Divisi Commercial Lending Division (CMLD)

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI

Komite Pengarah Teknologi Infomasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Pengarah Teknologi Infomasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 05/PD/ICTD/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 18/PD/CMO/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:



Ketua	Direktur IT & Operation (ex-officio) Dalam hal Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi maka Direktur Utama bertindak sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi
Sekretaris	Information Technology Operation Division Head (ex-officio)
Anggota Tetap Sesuai 05/PD/ICTD/2014	1. Direktur Strategy, Compliance & Risk (ex-officio) 2. Direktur Distribution & Network (ex-officio) 3. Direktur Consumer Banking (ex-officio) 4. Enterprise Risk Management Division Head (ex-officio) 5. Operation and Business Support Division Head (ex-officio) 6. Sharia Division Head (ex-officio) 7. Regional Office I Head (ex-officio)
Anggota Tetap	1. Direktur Strategy, Compliance & Risk (ex-officio) 2. Direktur Commercial Banking (ex-officio) 3. Direktur Consumer Banking (ex-officio) 4. Direktur Distribution & Network (ex-officio) 5. Information Technology Operation Division Head (ex-officio) 6. Enterprise Risk Management Division Head (ex-officio) 7. Operation & Business Support Division Head (ex-officio) 8. Sharia Division Head (ex-officio) 9. Corporate Strategy & Performance Management Division Head (ex-officio) 10. Compliance & Governance Division Head (ex-officio) 11. Internal Audit Division Head (ex-officio) 12. Service Quality & Distribution Division Head (ex-officio)
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya dan Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Roadmap terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah- langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - b. Sumber data yang dibutuhkan;
 - c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian core banking application, *server production* dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam service level agreement. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur.
10. Komite bertanggung jawab atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme rapat Direksi.

Pelaksanaan Tahun 2019

Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rapat. Sepanjang tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 kali dengan agenda sebagai berikut.

AGENDA RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI

Tanggal	Agenda
Jumat, 13 September 2019	Penyampaian Finalisasi RSTI BTN 2019-2021
Jumat, 27 Desember 2019	1. Penjabaran dan Usulan Strategi Perencanaan Inisiatif IT Tahun 2020 2. Arahan Direksi Tahun 2020

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berperan dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Sekretaris Perusahaan berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders.

Sebagai pejabat penghubung, Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders. Selain itu, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Direksi Perseroan telah menetapkan Achmad Chaerul sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 812/DIR/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui surat No. 180/KOM/BTN/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan Usulan Calon Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Achmad Chaerul sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 555/CSD/IR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta dimuat informasinya pada situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (www.spe.ojk.go.id) dan situs web Bank BTN (www.btn.co.id).

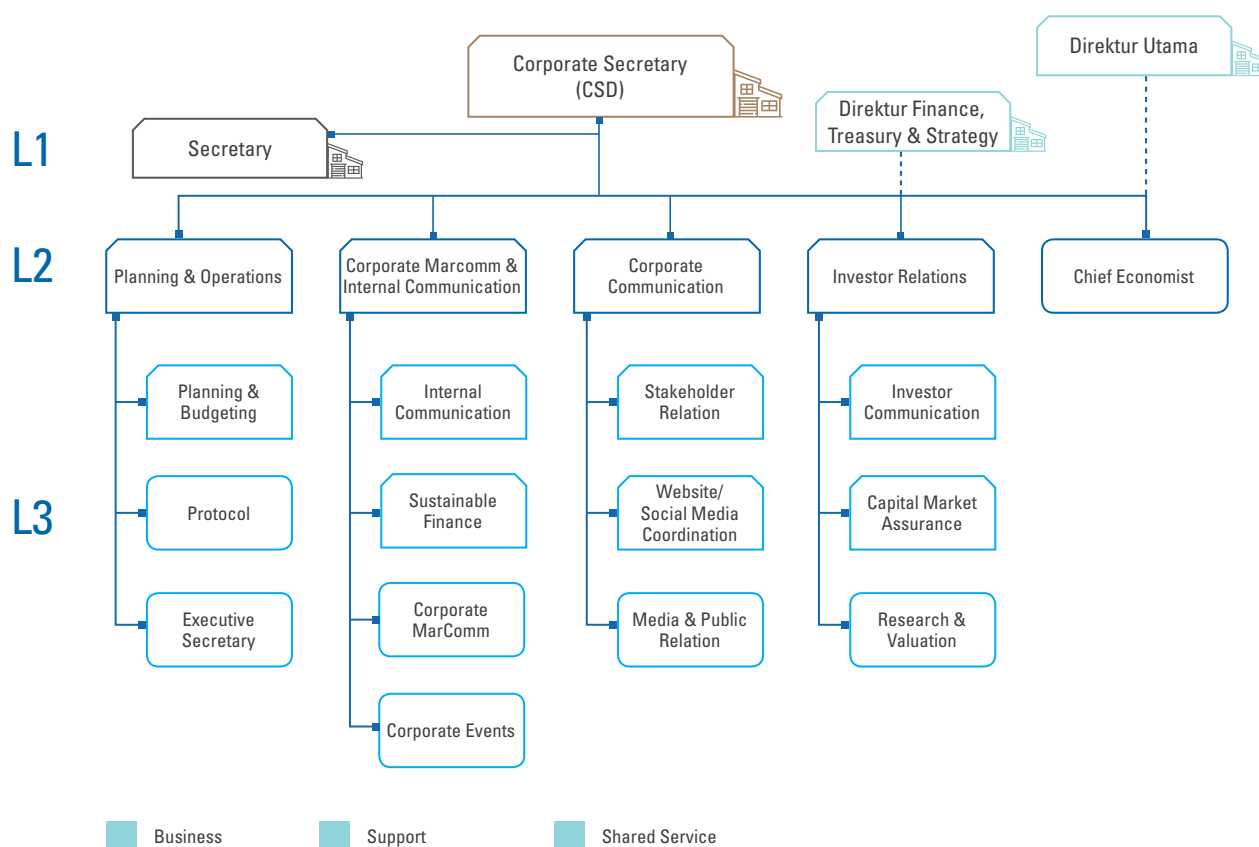
Penunjukan Pejabat Sekretaris Perusahaan di atas telah dilaporkan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

**Achmad Chaerul**

Sekretaris Perusahaan

Menjabat sejak 30 Oktober 2018

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	49 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Meraih gelar Magister (S-2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2002).
Pengalaman Kerja	Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997, dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Makassar (2016), Kepala Kantor Wilayah 5 (2017) dan Kepala Divisi Compliance & Governance (2018).
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Sertifikasi UKMR level 4 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan di Jakarta (2018), Sertifikasi Kredit yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan di Jakarta (2018).





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan atau *Corporate Secretary* dibantu oleh Manager/Senior Manager yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja di antaranya *Investor Relations*, *Corporate Communication* dan *Planning, Budgeting & Protocol*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan

3. Komisariss Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2019, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Seminar	Kehumasan di Era #MO	Jakarta, 11-12 September 2019	Rumah Perubahan
Seminar	Pelatihan Investor Relations Enhancement	Jakarta, 11-12 Desember 2019	TAP Kapital Indonesia
Seminar	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	Bali, 21-22 Maret 2019	Intrinsics
Seminar	"Risiko Investasi atau Korupsi?"	Bandung, 31 Januari - 1 Februari 2019	Asia Anti-Fraud

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari: Sekretaris perusahaan secara rutin menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pasar modal, yang terdiri dari:
 - a. Adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau peraturan yang diupdate oleh Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris adalah:



No.	Peraturan	Sosialisasi kepada Direksi
1.	SE OJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Pasar Modal	Workshop Penerapan Program APU dan PPT tanggal 04 Desember 2019

- b. Perkembangan saham BBTN, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (unusual market activities). Selama tahun 2019 laporan perkembangan saham BBTN di antaranya:

No.	Uraian	Penyampaian kepada Direksi
1.	Laporan Kinerja Saham BBTN Tahun 2018	Memo No. 533/M/CSD/IR/IV/2019 tanggal 15 April 2019
2.	Usulan Kegiatan Komunikasi kepada Pasar Modal Triwulan I 2019	Memo No. 548/M/CSD/IR/IV/2019 tanggal 22 April 2018
3.	Laporan Perjalanan Non Deal Roadshow di Singapore dan Hong Kong	Memo No. 650/M/CSD/IR/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
4.	Penyampaian Analisa Kondisi Makro Ekonomi dan Prospek Pasar Modal di Semester 2 Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2020	Memo No. 1170 /M/CSD/IR/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019
5.	Hasil Komunikasi dengan Analis Terkait Perkembangan Harga Saham BBTN	Memo no. 1229/M/CSD/IR/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019

- c. Masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan. Penyampaian masukan dan tanggapan dari investor tersebut biasanya disampaikan setelah Perseroan melakukan pertemuan dengan investor, melalui forum *Investor Conference* dan *Non-Deal Roadshow*.

No.	Kegiatan	Penyampaian kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
1.	Undangan <i>Annual Review Meeting</i> dengan Moodys	Memo No. 625/M/CSD/IR/V/2019 tanggal 8 Mei 2019
2.	Laporan Perjalanan <i>Non Deal Roadshow</i> di Singapore dan Hong Kong	Memo No. 650/M/CSD/IR/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
3.	Undangan <i>Annual Review Meeting</i> dengan Fitch Ratings	Memo No. 824/M/CSD/IR/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
4.	Undangan <i>Annual Review Meeting</i> dengan Moodys	Memo No. 1714/M/CSD/IR/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019

2. Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan, yaitu secara: Sekretaris perusahaan secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, rating agency dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan sebagai berikut:
- Memberikan *update* kepada pemegang saham dan komunitas pasar modal mengenai perkembangan bisnis, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta target-target yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
 - Meningkatkan kinerja saham BBTN, baik likuiditas/ volume perdagangan dan valuasi yang wajar (*fair valuation*).
 - Meningkatkan reputasi dan menjaga hubungan baik dengan *long-term investors*.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

- d. Memperluas *investor base* dan *coverage* terhadap BBTN dengan mengembangkan program marketing kepada investor-investor potensial.
- e. Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang telah secara rutin menulis report tentang Perseroan dan memberikan rekomendasi yang baik atas saham BBTN.

Prinsip dasar yang digunakan oleh Sekretaris Perusahaan dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

- a. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.

- b. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan, adalah sebagai berikut:

- a. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Road Show*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.
- b. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, *Press Release*, *Website*, *Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, Media Online), *Social Media*, dan *E-mails*.

Berikut adalah program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Perseroan selama tahun 2019:

Tanggal	Lokasi	Acara
09 Januari 2019	Singapura	JP Morgan's ASEAN Bank Forum Teleconference
31 Januari–1 Februari 2019	Jakarta	Mandiri Investment Forum 2019
19 Februari 2019	Kuala Lumpur	Maybank-KimEng Indonesia Corporate Day
20 Februari 2019	Singapore	Maybank-KimEng Indonesia Corporate Day
4–6 Maret 2019	Jakarta	UBS Indonesia Conference
24–25 April 2019	Singapore	Non Deal Roadshow
26 April 2019	Hong Kong	Non Deal Roadshow
27–28 Juni 2019	Bali	CGS-CIMB Asia Pacific Conference
19 Agustus 2019	Jakarta	Public Expose
26–28 Agustus 2019	Singapore	Macquarie ASEAN Conference

Selain menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2019 Perseroan juga melayani permintaan *meeting*, *conference call* dan *site visit* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit *Investor Relations*.

	Analisis	Investor		Rating Agency	Site Visit	Total
		Lokal	Asing			
Jumlah	94	22	41	4	1	162

- 3. Keterbukaan Sekretaris Perusahaan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur di antaranya dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh



Emiten atau Perusahaan Publik

- b. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

Selama tahun 2019 Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa sebanyak 112 (seratus dua belas) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinir penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan atau transaksi saham BBTN. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2019, Perseroan menerima 7 (tujuh) kali permintaan penjelasan dari Bursa.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
Komunikasi dengan stakeholders Perseroan menggunakan kebijakan satu pintu (one door policy), yaitu dikoordinir melalui Sekretaris Perusahaan. Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi. Selain publikasi melalui media massa, publik juga mendapatkan informasi mengenai Perseroan melalui website Perseroan (www.btn.co.id), serta media sosial yang terdiri dari facebook (BankBTNCoid),

twitter (@BankBTNCoid), youtube (officialBankBTN) dan instagram (officialBankBTN).

Perseroan konsisten untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik yaitu dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan press release yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, CSR dan operasional Perseroan.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017. Selama tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019, RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019, dan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.

Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Penyampaian Informasi Terkait Penyelenggaraan RUPS Tahunan 17 Mei 2019	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK, BEI dan KSEI	2 April 2019
Pengumuman RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	10 April 2019
Pemanggilan RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	25 April 2019
Pelaksanaan RUPS	17 Mei 2019
Pengumuman ringkasan risalah RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	20 Mei 2019
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK dan BEI	21 Mei 2019

Penyampaian Informasi Terkait Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK, BEI dan KSEI	16 Juli 2019
Pengumuman RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	23 Juli 2019
Pemanggilan RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	7 Agustus 2019
Pelaksanaan RUPS	29 Agustus 2019
Pengumuman ringkasan risalah RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	2 September 2019
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK dan BEI	27 September 2019

Penyampaian Informasi Terkait Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 27 November 2019	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK, BEI dan KSEI	4 September 2019
Pengumuman RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	11 September 2019
Pemanggilan RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	5 November 2019
Pelaksanaan RUPS	27 November 2019
Pengumuman ringkasan risalah RUPS di Surat Kabar, web OJK, BEI dan Bank BTN	29 November 2019
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK dan BEI	27 Desember 2019

7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya mengacu pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Tugas Sekretaris Perusahaan dalam penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut:

- Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
- Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan POJK tersebut di atas.
- Membuat risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir.



- d. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan 281 (dua ratus delapan puluh satu) kali Rapat Direksi dan 4 (empat) Rapat Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris.

FUNGSI KEPATUHAN

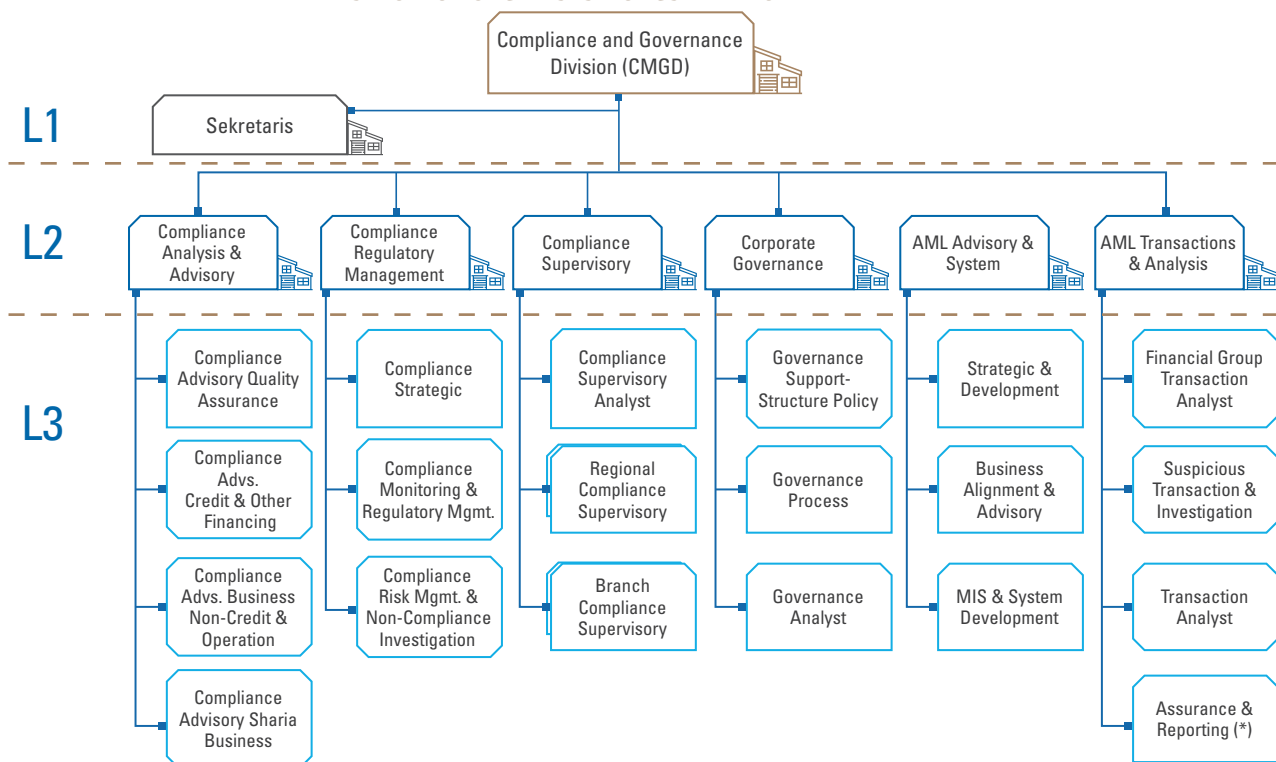
Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan

prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; mengelola Risiko Kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Keorganisasian Fungsi Kepatuhan

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN BANK BTN



(*) Dapat Memiliki Layer 4 (L4)

Struktur organisasi pelaksana Fungsi Kepatuhan ditetapkan dalam Ketetapan Direksi No. 04/DIR/KD/TMO/2018 tanggal

30 April 2018 dan terakhir diubah melalui Ketetapan Direksi No. 06/DIR/KD/TMO/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal



STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Bank.
4. *Compliance and Governance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Managing Director Human Capital, Legal and Compliance. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui Fit and Proper Test sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat

pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Yossi Istanto sebagai Direktur Human Capital, Legal and Compliance. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Yossi Istanto telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan namun hingga 31 Desember 2019 Belum mendapatkan persetujuan dari OJK formal dari OJK.

Agar Fungsi Kepatuhan tetap dapat dijalankan di lingkup Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib menunjuk Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatur pada Pasal 9 Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Untuk itu, Direksi Perseroan telah menunjuk Sdr. Yossi Istanto untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan terhitung efektif sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan adanya persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan Direktur Kepatuhan Perseroan.



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan;
9. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah; dan
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Bank untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh *Compliance and Governance Division*, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/SIPD/2017 tanggal 20 April 2017 dan terakhir diubah melalui Ketetapan Direksi No. 04/KD/DIR/SIPD/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Struktur Organisasi Kantor Pusat, *Compliance and Governance Division* berada di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/ jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian *Compliance and Governance Division Head* selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



R. Wahyu B. Witjaksono

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Menjabat sejak 10 Desember 2018

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	49 tahun
Domisili	Jakarta, Indonesia
Pendidikan	Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004).
Pengalaman Kerja	Sebelum menjadi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan telah menduduki berbagai posisi kunci di Perseroan, yaitu sebagai Senior App Development-Business Analyst (2011-2014), System Development Audit Department Head (2014-2017), Wakil Kepala Divisi Internal Audit (2017-2018).
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	• Pelatihan In House "Executive Development Program", Jakarta, 10 April - 13 September 2019, oleh Daya Dimensi Indonesia. • Seminar "Kesiapan Perbankan dalam Menghadapai MEA", Jakarta, 27 Juni 2019, oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. • Pelatihan In House "Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Angkatan 71", Jakarta, 5 Agustus - 20 September 2019, oleh Lembaga Pengembang Perbankan Indonesia. • Pelatihan In House "General Baking Level 3", Jakarta, 21 September 2019, oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. • Sertifikasi profesi: Certified International Auditor (CIA) (2016), Certified Information System Auditor-CISA (2017), Sertifikasi Manajemen Risiko LSPP (2018).

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Compliance and Governance Division dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada
3. peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan



agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
 - c. Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

Realisasi Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan *review* dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola

Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuanketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.

4. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, selama periode 2019 Perseroan telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang meliputi:
 - a. Mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan langkah untuk mengharmonisasikan antara kepentingan komersial Perseroan dengan ketaatan terhadap ketentuan eksternal yang antara lain meliputi ketentuan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, termasuk terhadap Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut:
 - Sosialisasi ketentuan regulator kepada unit kerja terkait. Ketentuan regulator baru terbit yang telah disosialisasikan oleh *Compliance and Governance Division* kepada unit kerja operasional, baik secara tertulis maupun melalui media tatap muka sekaligus melakukan diskusi dengan unit terkait dalam rangka memperoleh pemahaman bersama atas Ketentuan regulator yang baru terbit.
 - Melakukan kajian aspek kepatuhan terhadap rancangan peraturan internal Perseroan serta rencana kebijakan bisnis dan operasional yang akan dijalankan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta ketentuan regulator yang berlaku lainnya. Dalam ketentuan Perseroan tentang Tata Urutan Peraturan Internal mengatur bahwa setiap rancangan peraturan internal wajib melalui kajian



STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

dan *review* aspek kepatuhan dari Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan.

- Melakukan kajian aspek kepatuhan terhadap rencana pengembangan dan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta ketentuan regulator yang berlaku.
- Selain terhadap rancangan peraturan internal Perseroan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan *review* terhadap peraturan internal eksisting dalam rangka memastikan konsistensi kecukupan kebijakan. Fokus *review* terhadap peraturan internal eksisting di tahun 2019 adalah peraturan perkreditan di antaranya Kebijakan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kebijakan tentang Penilaian Kualitas Aset, Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta peraturan tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
- b. Melakukan penilaian kepatuhan melalui Peta Kepatuhan terhadap seluruh unit Perseroan yang terdiri atas Divisi Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Peta Kepatuhan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat *compliance awareness* di masing-masing unit serta mengetahui area-area yang akan menjadi fokus perhatian dan pembinaan untuk peningkatan aspek kepatuhan di Perseroan secara keseluruhan dan per masing-masing unit secara khusus.
- 5. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Bank melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU dan PPT.
- 6. Peningkatan efektivitas kepatuhan Kantor Cabang. Bank berkomitmen untuk mengoptimalkan *Compliance and Governance Division* pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Kantor Cabang dalam rangka optimalisasi penerapan *Internal Control System* terhadap *Compliance Awareness*, yaitu melalui *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) yang merupakan organ *Compliance and Governance Division* yang ditempatkan di setiap Kantor Cabang. Tugas dan fungsi utama BCSO adalah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan

dan kesesuaian operasional pada Kantor Cabang dan Kantor dibawahnya (Konvensional maupun Syariah), baik operasional yang bersifat transaksi maupun non transaksi terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya BCSO memonitor dan mengevaluasi secara sampling atas pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat di Kantor Cabang. Hasil pelaksanaan evaluasi disampaikan kepada *Compliance and Governance Division* dan ditembuskan kepada *Branch Manager* dan organ Satuan Kerja Audit Internal di Kantor Wilayah disertai dengan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh BCSO antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan operasional Kantor Cabang dengan menggunakan sistem *Compliance Control Application* (CCA).
- b. Melakukan monitoring terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Bank di Kantor Cabang yang dibuat oleh Kantor Pusat.

Selain terhadap rancangan peraturan internal Perseroan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan *review* terhadap peraturan internal eksisting dalam rangka memastikan konsistensi kecukupan kebijakan. Fokus *review* terhadap peraturan internal eksisting di tahun 2019 adalah peraturan perkreditan di antaranya Kebijakan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Kebijakan tentang Penilaian Kualitas Aset; penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan Piagam Komite Audit.

Guna mendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan meluncurkan sistem informasi manajemen yakni *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) yang memiliki fitur, antara lain:

1. Sebagai database ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis, dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka



memitigasi risiko kepatuhan Bank secara berkesinambungan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Salah satu dampak yang timbul akibat tereksposnya risiko kepatuhan adalah pengenaan sanksi berupa denda dari pihak regulator baik pada unit Konvensional maupun Syariah. Sepanjang tahun 2019 komposisi jenis pelanggaran secara frekuensi sebagian besar merupakan sanksi kesalahan dalam pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), Laporan Bank Umum (LBU) dan Lalu Lintas Devisa (LLD).
2. Berdasarkan penilaian risiko dan data historis, Bank masih memiliki potensi risiko kepatuhan dengan risiko tertinggi yang cukup signifikan adalah terkait aktifitas pelaporan informasi debitur, laporan berkala Bank kepada regulator dan pelaporan Lalu Lintas Devisa terkait transaksi mata uang asing.
3. Sehubungan potensi denda sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan telah menetapkan langkah-langkah preventif dan korektif yang efektif dalam rangka memitigasi potensi risiko kepatuhan yaitu pengenaan denda SID, LBU dan LLD yang signifikan dari Bank Indonesia pada periode berikutnya, antara lain:
 - a. Pelaporan informasi debitur yang pada tahun 2019 telah melalui sistem SLIK-OJK telah dilakukan secara sentralisasi di kantor pusat sehingga verifikasi dan kontrol data sebelum dikirimkan kepada regulator dapat secara standar dan senantiasa terpantau.
 - b. Telah dibangun suatu sistem aplikasi monitoring untuk mengidentifikasi kelengkapan data-data nasabah/debitur dari setiap cabang yang menjadi obyek monitoring Kantor Pusat kepada cabang-cabang sebagai pemilik data. Data yang telah dipastikan kelengkapannya melalui sistem aplikasi tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada regulator.
 - c. Melakukan *review* dan perubahan terhadap struktur organisasi dan perubahan *Job Description* pada Divisi yang mengelola Pelaporan Informasi Debitur Kepada Regulator di Kantor Pusat dengan menambahkan unit khusus dengan tugas terkait monitoring dan Pelaporan Informasi Debitur SLIK kepada OJK.
 - d. Melakukan analisa kecukupan personil pada unit khusus Pelaporan Informasi Debitur di Kantor Pusat serta upaya pemenuhan SDM sesuai hasil analisa

kecukupan, sehubungan laporan telah dilakukan secara sentralisasi yang mencakup dari seluruh debitur pada kantor cabang Perseroan.

- e. Mengoptimalkan internal control dalam proses pembinaan petugas yang dapat dilakukan dalam bentuk teguran, *coaching* dan pendampingan kepada Kantor Cabang baik konvensional maupun syariah yang masih terdapat kesalahan dalam pembuatan pelaporan SID/LBU/LSMK.
- f. Melakukan data mapping kelengkapan persyaratan *mandatory* kredit dalam pelaporan SID/LBU oleh unit bisnis dan dikoordinasikan oleh unit *supporting*.
4. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebagai alat *monitoring* terhadap kewajiban laporan unit kerja terkait kepada Regulator guna memitigasi risiko kepatuhan atas keterlambatan pelaporan serta pengkinian database regulasi pada CRMS.

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

1. Dalam rangka melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan (*continuous improvement*), Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah melakukan standadisasi proses bisnis mengacu pada standar internasional dalam rangka melakukan penyempurnaan dan perubahan pada proses bisnis. Proses standarisasi internasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja Audit Internal Perseroan adalah mengikuti Resertifikasi ISO dalam rangka pembaharuan Sertifikasi ISO 9001:2008 menjadi Sertifikasi ISO 9001:2015.
2. Perseroan meningkatkan kualitas penerapan *Combine Assurance* yang diinisiasi *Control Unit* (*Risk Management Division, Compliance and Governance Division* dan *Internal Audit Division*) serta unit kerja lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi internal *control* di seluruh aspek operasional Bank melalui program *Zero Tolerance to Fraud and Zero Defect* yang berpedoman pada Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Implementasi program *Zero Tolerance to Fraud and Zero Defect* pada tahun 2018



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

adalah pencegahan melalui kegiatan *awareness* atau sosialisasi program *Zero Tolerance to Fraud and Defect* di Cabang dan Kantor Wilayah. Kegiatan *awareness* atau sosialisasi program *Zero Tolerance to Fraud and Defect* pada tahun 2018 telah dilaksanakan pada beberapa Cabang dengan prioritas urutan pelaksanaan berdasarkan pertimbangan potensial risiko operasional dan risiko fraud (berdasarkan data historis).

3. Penerapan Integrated GRC (*Governance Risk and Compliance*) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Bank yaitu mencapai integrated GRC dengan pelaksanaan praktik-praktik *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap (*waves*) yaitu: *Wave 1* Implementasi Awal *Integrated GRC*, *Wave 2* Perbaikan *Integrated GRC*, dan *Wave 3* *GRC Mature*.

Sebagai penerapan di tahun 2019, langkah-langkah yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan implementasi inisiatif *Governance, Risk, Compliance*, budaya perusahaan dan anti fraud.
2. Sosialisasi bersama oleh Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal serta unit yang mengelola Sumber Daya Manusia ke Kantor Cabang.
3. Penilaian GRC Index dan penilaian kembali kebutuhan konteks, budaya perusahaan dan stakeholder.

Dalam Penilaian GRC Index, akan dilaksanakan suatu metode assessment kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator*, *Key Risk Indicator*, dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Index yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2019, pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan fungsi kepatuhan Perseroan di antaranya:

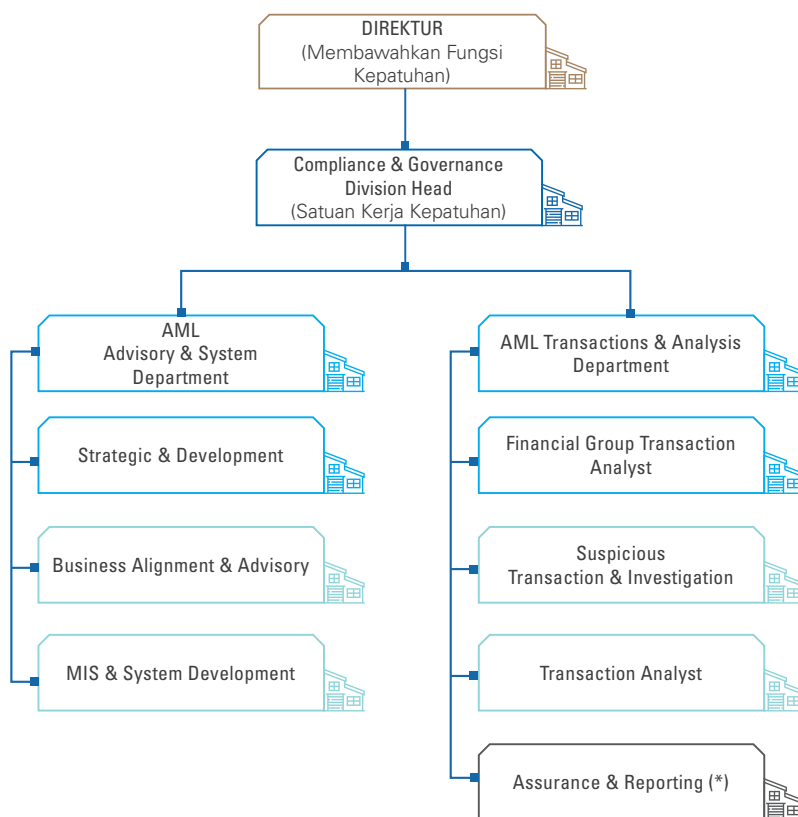
1. Audit Command Language (ACL) Training
2. English Conversation For Executives Training
3. Governance Risk and Compliance (GRC) Strategy Workshop
4. Integrating GRC (Governance Risk and Compliance) Workshop
5. Workshop Comparison of Corporate Governance Methodology
6. Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan melalui Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR)
7. Manager Development Program (MDP)
8. Senior Manager Development Program (SMDP)
9. Executive Development Program (EDP) - Strategic Leadership Experience
10. Executive Development Program (EDP) - Mastering Innovation Leadership
11. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard Workshop
12. Training In-House New IRRBB Framework Modelling Implementation
13. Training ISO 37001 Anti Bribery Management System
14. Training ISO 9001:2015 Quality Management System
15. Focus Group Discussion Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
16. Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan melalui Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR)

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Perseroan senantiasa melaksanakan penerapan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU dan PPT**

Pelaksanaan program APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank BTN dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk mencapai penerapan program APU PPT dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU PPT di Kantor Pusat, pelaksanaan program APU PPT di Regional Office dan Kantor Cabang menjadi tanggungjawab masing-masing Regional Office Head dan Branch Manager.

Program Penerapan APU dan PPT

Mengacu pada Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang telah

diubah terakhir melalui Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019, maka Bank BTN telah melakukan penerapan Program APU PPT, berlandaskan atas 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU PPT, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Internal;
4. Sistem Informasi Manajemen; serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.



STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Program-program APU PPT yang telah dan saat ini masih dilaksanakan oleh Bank BTN antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU PPT antara lain sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Direksi atas penetapan Divisi Kepatuhan sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT;
 - b. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kebijakan APU dan PPT;
 - c. Laporan berkala terkait kewajiban pelaporan dan implementasi Program APU dan PPT kepada Direksi
 - d. Persetujuan Direksi atas Laporan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah;
2. Kebijakan dan Prosedur
 - a. *Compliance & Governance Division* selaku UKK pada Bank BTN telah menyusun Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT yang secara berkala dilakukan *review/updating/penyempurnaan* sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
 - b. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris turut aktif berperan memberikan pengawasan antara lain memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi.
 - c. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan Parameter Nasabah Kriteria Risiko Tinggi menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko/Risk Based Approach (RBA) yang berdampak pada Parameter Unusual Customer Transaction (UCT). Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat tentang penilaian risiko yang disampaikan oleh POJK No. No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
3. Pengendalian Internal
 - a. Sebagai bentuk pelaksanaan pengendalian internal dalam penerapan program APU PPT, secara berkala Satuan Kerja Audit Internal Bank melakukan General Audit baik pada UKK di Kantor Pusat maupun terhadap pelaksanaan APU PPT di Kantor Cabang.
 - b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian intern sebagai salah satu prinsip utama penerapan program APU dan PPT, telah dilaksanakan beberapa aktivitas dengan tujuan agar pelaksanaan Audit terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (termasuk Outlet) dapat berjalan lebih efektif. Aktivitas tersebut berupa peningkatan pemahaman pegawai Audit Internal dengan mengadakan pelatihan Penerapan Program APU dan PPT yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan secara proaktif berkoordinasi kepada Audit Internal untuk menyampaikan critical point pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT di seluruh unit kerja yang perlu dibenahi.
 - c. Dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan Program APU dan PPT, Bank memberikan dukungan kepada PPATK yang melakukan kunjungan ke Kantor Cabang (*onsite visit*) untuk melakukan Penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut terkait Transaksi Keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Sistem Informasi Manajemen
Untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dalam rangka Penerapan Program APU dan PPT telah dilakukan koordinasi dengan Unit pengelola IT Bank dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi AML - CFT.
 - b. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi AML - CFT dalam rangka mendukung implementasi



pelaporan kepada PPAK melalui aplikasi goAML.

- c. Melakukan penambahan database, pemantauan transaksi dan profil Nasabah secara berkesinambungan meliputi:

- Daftar Terduga Teroris dan organisasi Teroris (DTTOT)
- Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Proliferasi WMD)
- Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank telah dan secara berkesinambungan melakukan pelatihan yang terkait program APU dan PPT dengan metode-metode sebagai berikut:

- Tatap muka kepada Department Head (pejabat layer 2 di Kantor Pusat), Pegawai pada Satuan Kerja Internal Audit, Pejabat layer 2 di Cabang (DRM Support, Deputy Service Manager), Unit Head di Bidang Operasional, Commercial dan Consumer Funding Unit serta Priority Banking Officer di beberapa Kantor Cabang.
- Melakukan Sharing Modul Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Knowledge Management System (KMS) yang dapat diakses seluruh Pegawai, seperti Media Awareness APU dan PPT berupa Komik, Video AML Story, Infografis dan Videografis.
- Melakukan Pembelajaran dan Evaluasi E-Learning APU dan PPT kepada unit kerja khususnya pada unit kerja yang berhadapan langsung dengan Customer yaitu Customer Service Head, Customer Service, Teller Service Head, Teller Service, Priority Banking Manager, Priority Banking Officer, Kepala Outlet dan Consumer Loan Service.

Pelaporan

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perseroan telah menyampaikan laporan antara lain:

1. Laporan Pengkinian Data APU dan PPT kepada OJK yang dilaporkan dalam Laporan Direktur Kepatuhan Semester II.
2. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
3. Pelaporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL)/International Fund Transfer Instruction Report

(IFTI) kepada PATK.

4. Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT) kepada PATK.
5. Pelaporan Kepada Aparat Penegak Hukum dan Regulator.

Penghargaan

Terkait Penelitian, pemeriksaan dan pemenuhan permintaan sampai dengan kasus selesai, Bank BTN telah menerima beberapa kali penghargaan dan apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan sangat baik selama kegiatan pemeriksaan berlangsung.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko di lingkup Perseroan dilakukan dengan mengembangkan keorganisasian berbasis struktur yang menempatkan fungsi manajemen risiko secara khusus. Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian nomenklatur jabatan dengan salah satu direktorat adalah Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics. Berdasarkan keputusan pada kesempatan RUPS yang sama, Sdr. Setiyo Wibowo dipercaya untuk menjabat Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance.

Sejak Desember 2015, ERMD dalam pelaksanaan kegiatan operasional kerja dan manajemen telah menerapkan ISO 9001:2008 dan mendapatkan upgrade sertifikasi ISO 9001:2015 pada bulan Mei 2018. ERMD berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

ISO 9001: 2015 sendiri saat ini telah digunakan oleh jutaan organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi Perseroan menjadi lebih *resilient*.

Credit Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit. Fungsi *Market Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, *Operational Risk Management Department* berfungsi memastikan

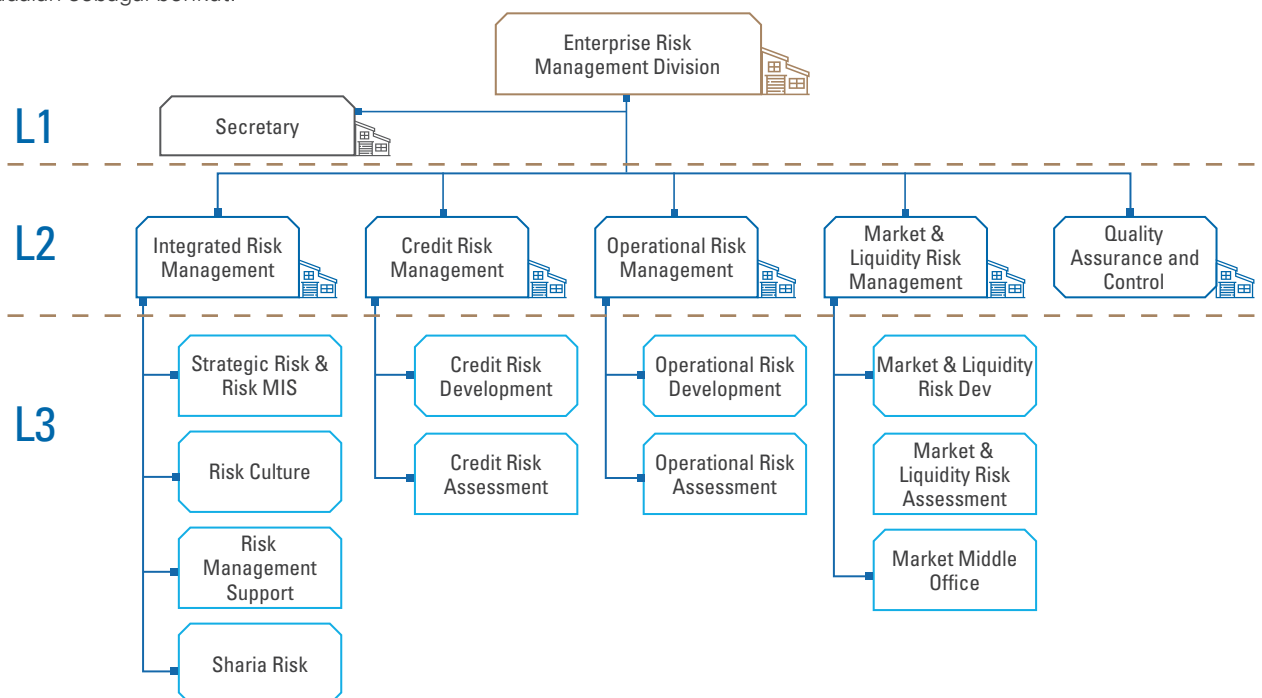
efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Integrated Risk Management Department berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan shareholder value, meningkatkan investor confidence, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Quality Assurance secara umum berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko dikelola tetap sesuai dengan Standar Mutu manajemen ISO 9001:2015, selain itu unit ini juga berperan melakukan backtesting untuk memastikan kelayakan setiap pemodelan yang dipakai.

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Struktur organisasi Enterprise Risk Management Division merujuk pada Ketetapan Direksi No. 04/KD/DIR/TMO/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:





Credit Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit, *Market Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, *Operational Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Setiap Departement Head dibantu oleh Unit kerja *Development* dan Unit kerja *Assessment*.

Integrated Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan mengkoordinasikan serta memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal serta *Quality Assurance & Control* berfungsi memastikan kualitas kinerja ERMD secara keseluruhan termasuk dalam memberikan kajian/masukan kepada Divisi terkait.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah karyawan yang tergabung dalam Enterprise Risk Management Division sebanyak 24 orang.

Jabatan	Jumlah
Kepala Enterprise Risk Management Division	1
Sekretaris	1
Kepala <i>Integrated Risk Management Department</i>	1
<i>Strategic Risk & Risk MIS</i>	3
<i>Risk Management Support</i>	-
<i>Sharia Risk</i>	-
Kepala <i>Credit Risk Management</i>	1
<i>Credit Risk Development</i>	2
<i>Credit Risk Assessment</i>	2
Kepala <i>Operational Risk Management</i>	1
<i>Operational Risk Development</i>	2
<i>Operational Risk Assessment</i>	3
Kepala <i>Market & Liquidity Risk Management</i>	1
<i>Market & Liquidity Risk Development</i>	1
<i>Market & Liquidity Risk Assessment</i>	2
<i>Quality Assurance & Control Coordinator</i>	1
<i>Quality Assurance & Control</i>	2
Jumlah	24

Kepala Enterprise Risk Management Division

Kepala *Enterprise Risk Management Division* sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Sahat Sihombing berdasarkan SK Direksi No. 353/DIR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang menjabat hingga Mei 2019, kemudian digantikan dengan Erwin Dwi Kusuma berdasarkan SK Direksi No. 479/DIR/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan menjabat sampai dengan sekarang.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



Erwin Dwi Kusuma

Kepala Enterprise Risk Management Division
Menjabat sejak 24 Mei 2019

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	40 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Sarjana (S1) Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2002).
Pengalaman Kerja	Memulai karir di Bank BTN sejak September 2017 sebagai Retail Risk Division Head, kemudian menjabat Kepala Enterprise Risk Management Division Head Sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang. Sebelumnya berkarir sebagai Risk Management Division Head Bank Mandiri-Taspen pada September 2015 s.d September 2017, dan sebagai Consumer Credit Collection Head Jawa 3 – Bank Mandiri pada Desember 2009 sampai dengan September 2015. Memulai karir profesional di Bank Mandiri sejak tahun 2003 melalui jalur <i>Officer Development Program</i> .
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	• Certified Enterprise Risk Governance (CERG) penyelenggara ERMA Singapura (2019), • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP (2019), • Surveillance ISO 9001:2015 oleh Robere & Associates (2019). • Sertifikasi Kredit Level 3 Oleh LSPP (2018)

Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai job specification) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 dan bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa *level job title* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap

mengacu Kajian *job title* pegawai yang berhak mengikuti sertifikasi UKMR oleh ERMD.

Perseroan juga melakukan in-house training dan melakukan pre-test sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan).

Program Sertifikasi Sdm Enterprise Risk Management Division

Perseroan memenuhi kompetensi SDM *Enterprise Risk Management Division* melalui program pelatihan atau sertifikasi dibidang manajemen risiko sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen risiko. Berikut program pelatihan atau sertifikasi SDM *Enterprise Risk Management Division*.

**PROGRAM SERTIFIKASI TAHUN 2019**

Program Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah Peserta
UKMR Level 1	LSPP	2
UKMR Level 2	LSPP	6
Certified Enterprise Risk Governance (CERG)	ERMA	1
Train the Trainer Tahun 2019	Sarel Sentra Inspira	4

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2019

Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
Pelatihan Sustainable Finance Awareness	LPPI	16 April 2019
Executive Development Program Fase-2	Daya Dimensi Indonesia	3-5 Juli 2019
Executive Development Program Fase-3	Daya Dimensi Indonesia	10-13 September 2019
"Why Should Anyone Be Led by You?"	Kinerja Unggul Nusantara	20-21 Agustus 2019
"Cyber Crime : Threats and Counter Measure"	LPPI	26 Agustus 2019
Managerial Development Program (MDP)	Markplus Indonesia	11-16 November 2019
Pelatihan PSAK 73 - Sewa	Deloitte Indonesia	23 Agustus 2019
Aplikasi Monitoring Tenaga Alih Daya	BTN	25 Januari 2019
Pembahasan Kebijakan Peraturan & Sanksi	BTN	8-9 Agustus 2019
Training Aplikasi Likuiditas	BTN	22-23 Agustus 2019
Training Aplikasi PPDigital	BTN	3 September 2019
Pelatihan Credit Cycle	BTN	22-23 Oktober 2019
Workshop "Fraud Risk Management"	ACFE	30-31 Januari 2019
Workshop IRRBB	United Tren-Ning	1 Maret 2019
Workshop "Integrating GRC"	Asia Anti Fraud	28-29 Maret 2019
PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management	BARa Risk Forum	28-29 Maret 2019
PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management	BARa Risk Forum	27-28 Juni 2019
IFRS 9 (PSAK 71) Credit Risk Modelling	ISEI	30-31 Juli 2019
Workshop Effective Fraud Mitigation	Asia Anti Fraud	2-3 September 2019
ALM Strategic & Fund Transfer Pricing In Bank	Lentera Pro	17-19 September 2019
Risk Assesment, Based Approach & Simulation	RMG	19-20 September 2019
Sosialisasi APU & PPT	BTN	12 Agustus 2019
Workshop Strategic Workforce Planning	BTN	25-26 Agustus 2019
Penyusunan Kompetensi Teknis Job Family	BTN	26 Juni 2019
Penyusunan Rencana Keuangan Berkelanjutan	BTN	4-5 November 2019



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2019

Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
Workshop Business Acquiring BTN	BTN	11-13 Desember 2019
Konsep Pembelajaran & Pengembangan 2020	BTN	18 Desember 2019

Berikut disampaikan komposisi karyawan yang memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko.

Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	Jumlah Karyawan yang Memiliki	Persentase Terhadap Jumlah Keseluruhan Karyawan
Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Level 1	-	-
Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Level 2	18	75%
Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Level 3	4	16,67%
Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Level 4	1	4,16%
Certified Enterprise Risk Governance (CERG)	1	4,16%

Pelaksanaan Tugas Enterprise Risk Management Division Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, *Enterprise Risk Management Division* melaksanakan berbagai inisiatif dan program serta kegiatan, yaitu:

- Mengelola struktur *asset liabilities* untuk meminimalisasi munculnya *negative gap* antara *Rate Sensitive Asset* (RSA) dan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL) yang mengharuskan bank tetap berhati-hati terhadap pengaruh risiko suku bunga pada *banking book*;
- Memonitor risiko konsentrasi dana melalui laporan pemantauan risiko likuiditas dan laporan nasabah inti (top 50);
- Melakukan *review* skoring/*rating* internal kredit konsumen dan komersial guna penyempurnaan skoring/*rating*, penyempurnaan implementasi *Four Eyes Principle* pada proses kredit serta melakukan transformasi *process bussiness* (BPI);
- Melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dari risiko operasional, hukum, kepatuhan & reputasi serta merekomendasikan penanganan risiko (*risk treatment*) untuk risiko operasional, hukum, kepatuhan & reputasi
- Menerapkan (mengelola) perangkat manajemen risiko operasional seperti BTN-LED (*Loss Event Database*) dan RCSA (*Risk and Control Self Assessment*)
- Merekomendasikan kepada satuan kerja bisnis dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* serta limit-limit risiko operasional, hukum, kepatuhan & reputasi.
- Menyusun kajian risiko atas rencana produk dan/atau aktivitas baru Bank.
- Melakukan review kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) serta implementasinya seperti:
 - Mapping* potensi bencana
 - Simulasi
- Melakukan evaluasi secara komprehensif untuk penguatan pilar risiko pada proses pembukaan rekening dana (giro, tabungan dan deposito) yang terdapat di kantor cabang dan outlet dengan melakukan *pilot project* di beberapa outlet;
- Memperkuat monitoring aktivitas operasional yang terdapat di outlet melalui penguatan peran supervisi kepala outlet;
- Memperkuat pilar-pilar risiko operasional dengan melakukan evaluasi *job description* dan Manajemen Teknologi Sistem Informasi (MTSI) yang terdapat di kantor cabang dan outlet;
- Melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan dalam bidang teknologi informasi (TI) termasuk pengelolaan status kolektibilitas nasabah di dalam sistem aplikasi;
- Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif, termasuk mendukung proses *monitoring* dan pengendalian proses bisnis, bank melakukan beberapa hal yaitu:
 - Integrasi dan implementasi *Operational Risk Tools* sebagai perangkat *monitoring* risiko operasional di seluruh unit kerja;



- b. Meningkatkan peran *Enterprise Risk Management* dalam program *Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect*.

14. *Monitoring Recovery Plan*

Monitoring Recovery Plan dilakukan secara bulanan dan disampaikan pada forum *Performance Review* dan Rapat ALCO bulanan. Selain itu, Bank akan melakukan pengkinian atas dokumen *Recovery Plan* paling lambat bulan November 2019 dan disampaikan kepada OJK dan Kementerian BUMN selaku PSP apabila terdapat perubahan trigger level dan opsi pemulihan.

15. Implementasi Penerapan Basel III pada Bank

a. Penguatan Kerangka Permodalan Global

- Meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan
Bank telah dengan konsisten melaporkan kecukupan permodalan kepada regulator dan publik melalui laporan KPMM dan mencantumkan rasio KPMM pada Laporan Publikasi Bank.
- Mengurangi *procyclicality* dan meningkatkan *conservation buffer & countercyclical buffer*
Dalam menghitung kecukupan permodalan, Bank telah ikut memperhitungkan tambahan penyangga (buffer) yaitu Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019, Capital Countercyclical Buffer sebesar 0% mulai 1 Januari 2016 (sampai dengan tahun 2019 masih 0% dan akan direview oleh BI) dan Capital Surcharge untuk Bank Sistemik sebesar 1% untuk bucket 1 (sesuai bucket yang ditetapkan OJK).

b. Pengukuran Risiko Likuiditas

- Bank telah menghitung dan melaporkan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan kepada OJK dan dipantau secara harian. Rasio LCR per Desember 2019 sebesar 158,73% masih melebihi ketentuan LCR (POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum yaitu minimal 100 % sejak 31 Desember 2018 untuk Bank BUKU 3.
- Bank telah menghitung dan melaporkan Kertas Kerja dan *Laporan Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara triwulanan sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil

Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. Hasil Rasio NSFR per Desember 2019 sebesar 108,29 %. Sejak Januari 2018, dilakukan pemantauan rasio NSFR secara bulanan dan pengungkapan di *website* Bank telah dimulai pada bulan Maret 2018.

Prestasi dan penghargaan Enterprise Risk Management Division sampai dengan tahun 2019 adalah:

1. ISO 9001:2008
2. Surveillance ISO 9001:2015
3. Juara Kategori Asean GRC Award dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2017
4. Juara Kategori Asean Public Risk dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
5. Runner Up Kategori Asean Risk Educator dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
6. Runner Up Kategori Asean GRC Award dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
7. Nominator Kategori Public Initiative dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
8. Juara Kategori Asean Public Risk dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2019
9. Nominator Kategori Asean Risk Educator dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2019

FUNGSI AUDIT INTERNAL

Fungsi audit internal merupakan strategic business partner bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan dan memberikan assurance serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh *Internal Audit Division* (IAD) di antaranya dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based* audit secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management*, *control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan stakeholders, pemahaman terhadap pokok permasalahan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

(*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/SIPD/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah dimutakhirkan dalam Ketetapan Direksi No.02/DIR/KD/HCOD/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang perubahan atas ketetapan Direksi No. 04/ KD/ SIPD/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selain itu, Kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada Bab II Pasal 3 Struktur dan Kedudukan IAD Pasal 3 yaitu:

1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

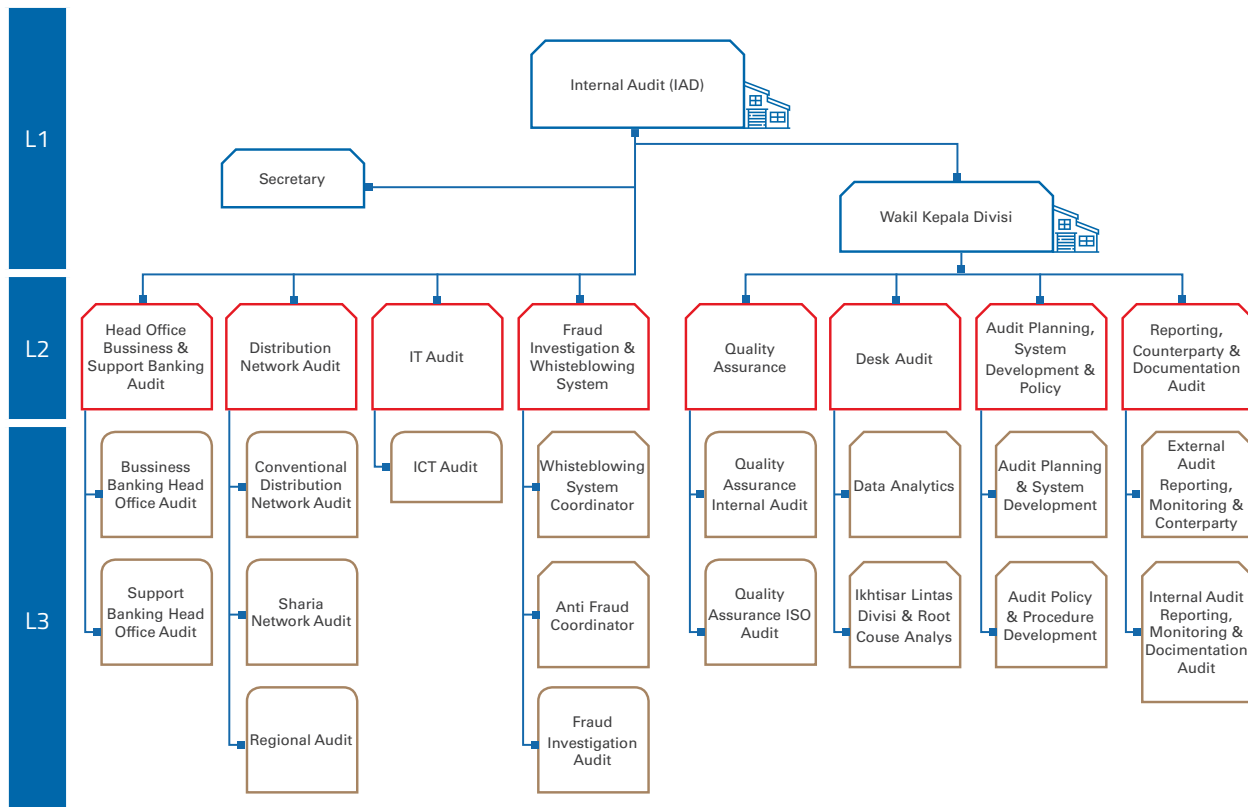
Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Audit Internal Perseroan adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak di maksud, adalah sebagai berikut:

1. Direktur melakukan fit and proper test kepada calon Kepala Satuan Kerja Audit Internal.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI.
4. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.



Struktur Organisasi Audit Internal



Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal saat ini adalah Hertanta, yang menjabat efektif sejak tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 227/DIR/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan telah memperoleh persetujuan

Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 11/KOM/BTN/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division (IAD)/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN



Hertanta

Kepala Audit Internal

Menjabat sejak 8 Maret 2019

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	55 tahun
Domisili	Jakarta
Pendidikan	Sarjana (S1) Pertanian/Agri Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (1998), dan Magister (S2) Manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (2005).
Pengalaman Kerja	Memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1991, pernah menjabat sebagai Kepala Enterprise Risk Management Division (2015-2017), Kepala Commercial Risk Division (2017-2018), Kepala Human Capital Strategy Division (2018-2019).
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	- Sertifikasi Risk Management GRC yang diselenggarakan Banker Association for Risk Management (BARa) di Bandung pada tahun 2015 - Sekolah Staff dan Pimpinan Bank angkatan 65 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta pada tahun 2016 - Sertifikasi Dasar Bidang Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun di Jakarta pada tahun 2018 - Seminar Nasional Internal Audit yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Audit di Palembang dan Bali pada tahun 2019 - Konferensi ECIAA 2019 di Luxembourg pada tahun 2019, Sertifikasi UKMR level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan di Jakarta pada tahun 2019.

Profil Personil Audit Internal

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit *Division* dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit *Division* berjumlah 101 orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Audit *Coordination Head*, 6 (enam) orang Quality Assurance, 6 (enam) orang pada *Audit System Development Departement*, 7 (tujuh) orang pada *Reporting*

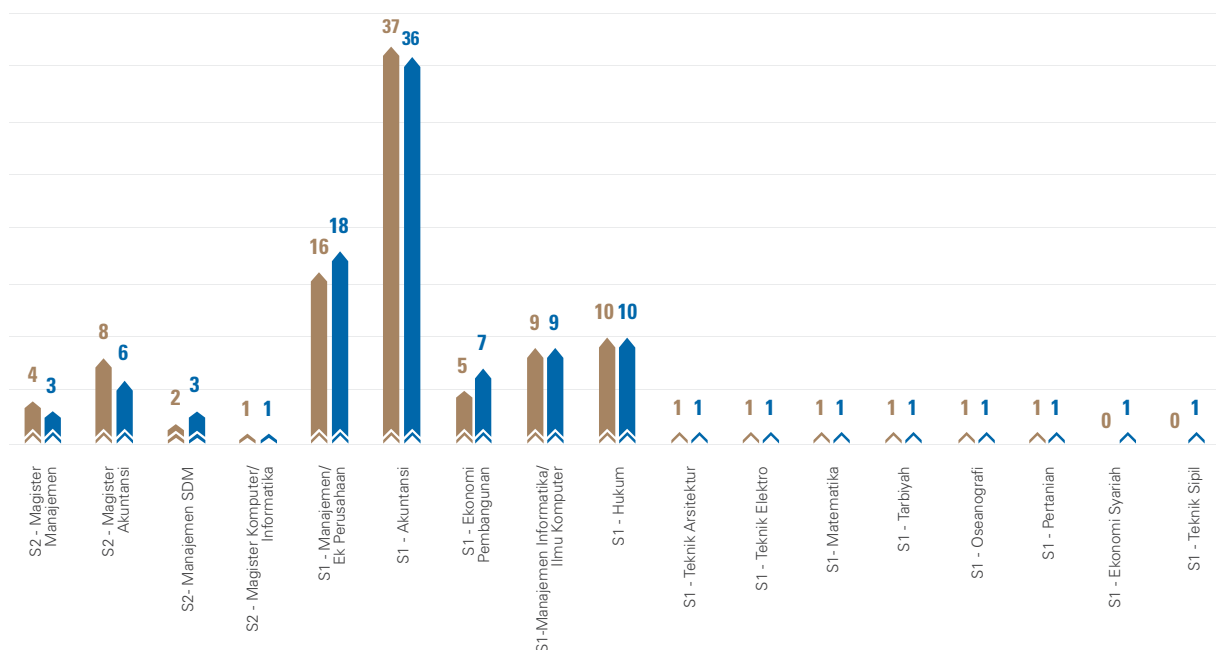
Counterparty Documentation Audit Departement, 48 orang pada Conventional General Auditor, 8 (delapan) orang pada Sharia General Auditor, 13 (tiga belas) orang pada Special & Investigation Auditor, 6 (enam) orang pada *Information Communication Technology Auditor*, 4 (empat) orang pada Strategi Anti Fraud & Whistleblowing System.



Komposisi personel Internal Audit Division berdasarkan pendidikan formal dapat dilihat pada diagram berikut:

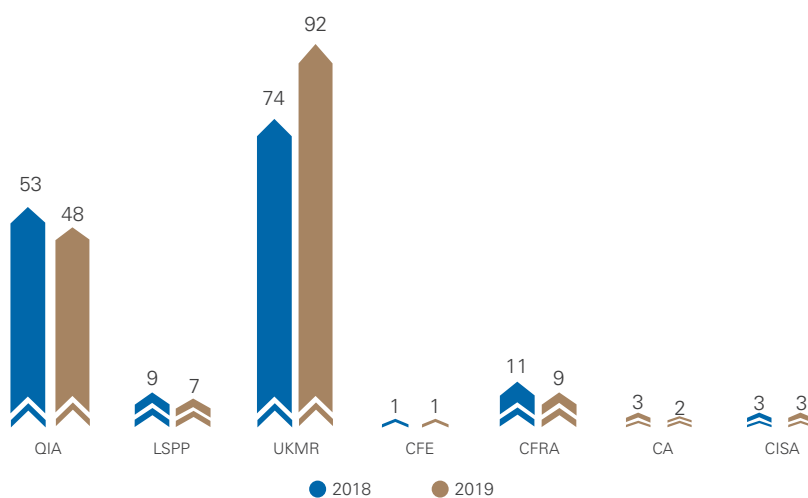
KOMPOSISI PERSONIL INTERNAL AUDIT DIVISION BERDASARKAN PENDIDIKAN

● Tahun 2018 ● Tahun 2019



Sementara itu, secara keseluruhan jumlah sertifikasi personel Internal Audit Division dapat dilihat pada diagram berikut:

SERTIFIKASI PERSONIL INTERNAL AUDIT DIVISION



Keterangan: QIA (*Qualified Internal Audit*), LSPP/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (mensertifikasi kompetensi auditor untuk level auditor sampai dengan *assessor*), UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko), CFE (*Certified Fraud Examiner*), CFRA (*Certified Forensic Auditor*), CA (*Certified Accountant*) dan CISA (*Certified Information Systems Auditor*).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Selain itu, Perseroan juga membentuk tim audit yang ditugaskan untuk masing-masing unit bisnis dan operasional. Penyusunan dan penetapan jumlah personil setiap tim audit dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian risiko (*risk assessment*) atas 14 proses bisnis dan aktivitas pengelolaan ICT, kualifikasi Auditor (jabatan dan fokus

kompetensi), serta kelas Cabang/Divisi/Desk. Penetapan dan kecukupan jumlah personil juga akan mempunyai dampak pada hari audit dan penyusunan anggaran biaya audit IAD. Komposisi tim audit yang ditugaskan untuk masing-masing unit bisnis adalah sebagai berikut.

TIM AUDIT

Unit Bisnis	Ketua Tim			Anggota Tim		
	AS	SAA	AA	SA	AG-14	AG-13
Audit Umum						
Kantor Pusat – Divisi	1			1	2	
Kantor Wilayah	1			1	2	
Kantor Cabang						
Kelas Utama	1			1	2	
Kelas I		1		1	2	
Kelas II		1		1	1	1
Kelas III			1	1	1	1
Unit Syariah			1	1	1	1
Audit ICT						
Aplikasi : Divisi/Desk Kantor dan DT I		1	1	1	1	
Aplikasi : Sampling Kantor Cabang		1	1	1	1	
Audit Khusus						
Fraud Investigation	1			1		
Special Review		1		1		
Audit Khusus						
Surveillance ISO pada Unit Kerja IAD			1	1		
Surveillance ISO pada Group Auditor			1	1		
Audit ISO 1-5-1 Penyaluran Kredit			1	2		

Catatan: AS= Audit Superintendent (Set. Department Head - Grade 18), SAA = Senior Associate Auditor (Set. Department Head - Grade 17), AA = Associate Auditor (Set. Manager - Grade 16), SA = Senior auditor (Set. Manager Grade 15), A = Auditor (Set. Assistant Manager Grade 14 atau Assistant Manager Grade 13)

**Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2019**

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan di antaranya dengan cara *knowledge sharing* diantara Kepala IAD, Direksi dan para auditor

terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2019 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONIL INTERNAL AUDIT DIVISION

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
A. Program Dalam Negeri			
Sertifikasi			
1	<i>Qualified</i> Internal Auditor Dasar (I & II)	YPIA	15
2	<i>Qualified</i> Internal Auditor Lanjutan (I & II)	YPIA	19
3	Manajemen Risiko Level 1	LSPP	4
4	Manajemen Risiko Level 2	LSPP	45
5	Manajemen Risiko Level 3	LSPP	4
6	<i>Refreshment</i> UKMR Level 3 dan 4	LCD	1
7	<i>Training</i> ISO 9001:2015 Auditor/ <i>Lead Auditor Course</i> (IRCA Cert. Course No.A17977)	PT SGS Indonesia	2
8	Sertifikasi <i>Certified Forensic</i> Auditor (CFrA)	LPFA	1
9	Pendidikan Dasar Penilai 1	MAPI	5
Pelatihan dan Workshop			
1	Pendidikan Proses Bisnis	LCD	99
2	APU PPT dan PPATK	LCD	99
3	Pelatihan Senior <i>Management Development</i> Program (SMDP)	LCD	2
4	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	LCD	18
5	Internal <i>Training for Facilitators Game-Based Learning</i>	LCD	2
6	<i>Training for Trainer</i>	LCD	2
Seminar dan Konferensi			
1	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) Tahun 2019	YPIA	2
2	National <i>Conference the Institute of Internal Auditor</i> (IIA) Tahun 2019	IIA	3
3	National <i>Anti Fraud Conference</i> 2019	ACFE	3
4	Internal <i>Control</i> Berbasis COSO 2013 dan Standar Audit & Kode Etik Profesi	YPIA	1



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONIL INTERNAL AUDIT DIVISION

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
B. Program Luar Negeri			
Seminar dan Konferensi			
1	ECIIA Conference 2019 Luxembourg	IIA	1
2	ACIIA Conference 2019 Jepang	IIA	1

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Audit Intern

Dalam rangka memperluas wawasan & pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Bank telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, diantaranya sebagai pengurus, anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) – BUMN/BUMD
Menyertakan anggota IAD sebagai pengurus maupun anggota dan berpartisipasi aktif baik sebagai peserta atau panitia penyelenggara dalam even-even yang di inisiasi oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern.
2. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)
Internal Audit Bank juga menyertakan Auditornya sebagai anggota dan pengurus di dalam kegiatan Perhimpunan Profesi Auditor Intern Perbankan. Seluruh Auditor Intern Bank telah diikutsertakan (terdaftar) sebagai anggota Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB). Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi untuk level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive (CAE)* IAD maupun untuk level Auditor berupa teknik audit, metodologi audit dan audit sistem dan Audit ICT diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam perkumpulan *Benchmarking Internal Audit* yang diadakan melalui inisiatif IAIB ini.
3. Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) & Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebagian anggota Internal Auditor juga telah menjadi anggota Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) & Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

4. The *Institute of Internal Auditor (IIA)* dan *Association Certified Fraud Examiner (ACFE)* – Indonesia Chapter. Selanjutnya anggota internal audit juga di dorong untuk menjadi membership of The *Institute of Internal Auditor (IIA)* dan *Association Certified Fraud Examiner (ACFE)* –Indonesia Chapter.

Pedoman Audit Internal (Piagam Audit)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Internal Audit Charter (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Internal Audit Charter juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, Internal Audit Charter disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari Internal Audit Charter adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi
2. Struktur dan Kedudukan
3. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang
4. Independensi Serta Larangan Perangkapan Tugas & Jabatan Auditor Internal
5. Kode Etik dan Persyaratan Standar Profesional Auditor Internal
6. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern
7. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern Dengan Auditor Ekstern Ahli Hukum
8. Lain-lain



Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Perseroan dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan dalam kerangka penerapan tata kelola Perseroan yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.

Cakupan Pelaksanaan Audit Internal

Dalam Peraturan Direksi No. 09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Kebijakan Audit Intern PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Bab III Ruang Lingkup dan Metodologi Audit Poin 3.1 Lingkup Pekerjaan Audit diatur bahwa pada dasarnya lingkup pekerjaan audit harus dapat , memberikan kepastian bahwa:

1. Sistem manajemen risiko berfungsi secara efektif;
2. Sistem pengendalian intern berfungsi secara efisien dan efektif; dan
3. Proses tata kelola berfungsi secara efektif melalui penetapan nilai dan tujuan/sasaran, pemantauan aktivitas dan kinerja, serta pendefinisian pengukuran akuntabilitasnya.

Aktivitas tersebut dilakukan melalui proses audit sebagai berikut:

1. Audit Umum yang berfokus pada Aspek Keuangan, Aspek Ketaatan dan Aspek Operasional.
2. Audit Teknologi Sistem Informasi yang meliputi evaluasi

risiko dan pengendalian pada lingkungan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI).

3. Audit Khusus yang difokuskan pada penyimpangan/ pelanggaran pada ketaatan, indikasi kecurangan (fraud).

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2019

Pada tahun 2019, Internal Audit Division (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program Kerja tersebut mencakup sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi personil IAD, penilaian risiko dan pengembangan personil IAD.

Rencana Kerja Audit Internal

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2019 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.35/M/IAD/ASD/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Penyampaian Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2019 dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama pada Maret 2019.

Disamping itu sesuai regulasi POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 035/KOM/BTN/IV/2019 tanggal 9 April 2019, perencanaan audit umum (konvensional dan syariah), audit ICT, audit khusus & investigasi serta pelaksanaan audit ISO 9001:2015 yang terjadwal sebagai berikut.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2018	2019	+/-	%	
A. Audit Umum (AU)	135	141	6	4,44%	
A.1. AU Konvensional	111	115	4	3,60%	
A.2. AU. Syariah	24	26	2	8,33%	
B. Audit ICT	17	17	0	0,00%	Obyek audit ICT tahun 2019 difokuskan pada area : 1. LHPK SKNBI, BI-RTGS, BI-ETP, BI-SSSS, KPDHN pada Konvensional dan Syariah. 2. <i>Business Continuity Management</i> . 3. Aplikasi BDS. 4. <i>Loan Restructuring</i> . 5. <i>Loan Origination, Monitoring & Collection</i> . 6. <i>ITM Switching</i> . 7. General Audit ITOD. 8. General Audit ITPD.
C. Audit Khusus & Investigasi	0	0	0	0,00%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/ investigasi untuk periode 2019, akan mengikuti penugasan dari <i>stakeholders</i> dan <i>whistleblowing system</i> .
D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2015	20	22	2	10,00%	
E. Audit Regional Office Auditor	413	-	-413	-100,00%	
Jumlah Objek Audit	585	180	-405	-69,23%	Obyek Audit

Pelaksanaan Program Kerja Audit Internal

Internal Audit Division melaksanakan kegiatan audit dengan obyek audit mencakup Audit General (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Tematik, Audit ISO dan Audit Khusus sepanjang tahun 2019 dengan rincian objek audit sebagai berikut:

REALISASI PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

No	Keterangan	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi
A	Audit Umum (General Audit)	141	141	100,00%
	1. Konvensional	115	115	100,00%
	2. Syariah	26	26	100,00%
B	Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)	17	20	117,65%
C	Audit Khusus & Investigasi	-	32	100,00%
D	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2008	22	25	113,64%

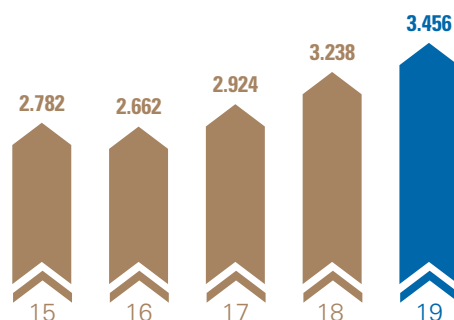


REALISASI PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

No	Keterangan	Target 2019	Realisasi 2019	Realisasi
E	Audit Regional Office Auditor	-	-	-
F	Surprise Audit	-	4	100,00%
Jumlah		180	222	123,33%

Kegiatan audit sepanjang tahun 2019 menghasilkan temuan audit sebanyak 3.456 temuan. Angka ini mengalami kenaikan, sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut.

TEMUAN AUDIT INTERNAL



Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh auditee. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada auditee dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "pending item" diminta untuk diselesaikan

oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2018 maupun tahun 2019 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SESUAI TANGGAL JATUH TEMPO PENYELESAIAN

No	Jenis Audit	Tahun 2018						
		Jumlah Temuan	Status Jatuh Tempo				Status Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo	
			Belum Jatuh Tempo		Telah Jatuh Tempo			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Audit Umum - Kantor Pusat	314	-	-	314	100%	314	100%
2	Audit Umum - Kantor Cabang	1.959	-	-	1.959	100%	1.959	100%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SESUAI TANGGAL JATUH TEMPO PENYELESAIAN

No	Jenis Audit	Tahun 2018						
		Jumlah Temuan	Status Jatuh Tempo				Status Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo	
			Belum Jatuh Tempo		Telah Jatuh Tempo			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
3	Audit Umum - Kantor Cabang Syariah	570	-	-	570	100%	570	100%
4	Audit ICT (Information & Communication Technology Audit)	395	-	-	395	100%	395	100%
5	Audit Mutu Internal (AMI)	-	-	-	-			
6	Audit Khusus	-	-	-	-			

No	Jenis Audit	Tahun 2019						
		Jumlah Temuan	Status Jatuh Tempo				Status Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo	
			Belum Jatuh Tempo		Telah Jatuh Tempo			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Audit Umum - Kantor Pusat	319	53	16.61 %	266	83%	266	100%
2	Audit Umum - Kantor Cabang	2,097	111	5.29%	1,986	95%	1,986	100%
3	Audit Umum - Kantor Cabang Syariah	565	43	7.61%	522	92%	522	100%
4	Information & Communication Technology Audit	475	11	2.32%	464	97.68%	461	100%
5	Audit Mutu Internal (AMI)	-	-	-	-	-	-	-
6	Audit Khusus	-	-	-	-	-	-	-

**INTERNAL FRAUD**

Selama tahun 2019, terdapat penyimpangan internal sebanyak 38 kasus dengan penjelasan sebagai berikut.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) SELAMA TAHUN 2019

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah <i>internal fraud</i>	-	-	24	38	-	1
Telah diselesaikan	-	-	24	22	-	1
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	16	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	4	5	-	-

ASSURANCE REVIEW TERHADAP AUDIT INTERNAL

Audit Internal Perseroan telah di-review secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu ISO 9001: 2015 setiap tahun, dan pada bulan Desember 2017 Internal Audit Division Perseroan berhasil melakukan upgrading standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

PELAKSANA *SURVEILLANCE* AUDIT UNTUK SERTIFIKASI ISO 9001:2008 DAN ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2014	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2015	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2016	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
4	PT SGS	2017	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
5	PT SGS	2018	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
6	PT SGS	2019	Pelaksanaan <i>surveillance</i> audit untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun review (*assessment*) untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi charter audit internal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari fungsi Audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya berdasarkan best practice telah dilakukan oleh konsultan *assessor* independen dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN**ASSESSOR INDEPENDEN TERKAIT PENILAIAN ATAS PELAKSANAAN AUDIT**

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT PricewaterhouseCoopers (PWC)	2015	Pelaksanaan proses <i>review</i> gap analysis kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2	PT Deloitte Touche Tohmatsu (DELOITTE)	2018	Pelaksanaan proses <i>review</i> gap analysis kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2019, Perseroan menilai bahwa pelaksanaan kegiatan IAD telah berjalan sangat efektif yang dibuktikan dengan nilai tambah yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan berbagai capaian kinerja Perseroan dan penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2019.

Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan audit sebagaimana diatur dalam kebijakan Audit Internal Perseroan berdasarkan risk-based audit telah diimplementasikan sejak tahun 2004 dan kemudian disahkan dalam Peraturan Direksi No. 09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 tentang

Kebijakan Audit Intern Perseroan dengan perubahan terakhir pada Peraturan Direksi No. 08/PD/IAD/2013 tanggal 5 Desember 2013, merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Kegiatan audit dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar, serta terpenuhinya kepentingan Perseroan dan masyarakat dalam hal pengelolaan dana secara baik.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Perseroan menunjuk Auditor Eksternal dan menjalankan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2019. Auditor eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akurat, independen dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Auditor Eksternal

Melalui RUPS, Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender terbatas pengadaan jasa audit umum, dengan peserta tender sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi).
2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional.
3. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun.
4. Manager memiliki pengalaman mengaudit Bank Umum dan PKBL minimal 3 (tiga) tahun.
5. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di BI, OJK dan BPK.
6. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggungjawab) yang sama oleh KAP paling lama



- dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, dan dalam 2 tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan Akuntan Publik yang bersangkutan.
7. Dalam perjanjian kerja wajib dicantumkan ruang lingkup audit sesuai SE OJK No. 36 tahun 2017.
 8. AP, KAP, dan orang dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independent selama periode audit dan periode penugasan professional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum penugasan professional dimulai.
 9. Akuntan Publik terdaftar di OJK sekurang-kurangnya dengan ruang lingkup pemberian jasa keuangan perbankan.
 10. Partner memiliki pengalaman sebagai Akuntan Publik lebih dari 10 tahun.
 11. Manager memiliki pengalaman dan penugasan General Audit minimal 3 (tiga) tahun terhadap Bank Umum dan PKBL.
 12. Mempunyai sedikitnya satu orang tenaga ahli yang bersertifikat CISA dan perbankan atau Akuntansi Syariah.
 13. Memiliki keahlian sekurang-kurangnya: *Quality Assurance, Computer Audit Specialist, Tax Specialist*.
 14. Memiliki Kompetensi dan pengalaman dalam pemeriksaan perbankan syariah.
 15. Tidak terkena sanksi oleh OJK.

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - Ernst & Young sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2019. Legalitas penugasan general audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk Tahun Buku 2019 telah tertuang dalam Surat Penunjukan No. 505/PGSD/PROC/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Surat Penunjukan.

Akuntan, Kantor Akuntan Publik dan Fee Audit

Informasi mengenai Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit serta Fee Audit dalam 5 tahun terakhir termasuk di dalamnya Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Ruang Lingkup Audit	Opini Audit	Fee Audit
2019	Muhammad Kurniawan Izin No. AP0240	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) 3. Laporan PSA 62 4. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Tahun 2019	Dalam proses audit	Rp2.650.000.000
2018	Yasir Izin No. AP0703	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp2.367.000.000
2017	Yasir Izin No. AP0703	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp2.290.000.000
2016	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp2.175.000.000



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

STRUKTUR, SERTA KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA BTN

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Ruang Lingkup Audit	Opini Audit	Fee Audit
2015	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp1.967.000.000

Jasa Lain yang Diberikan

Pada periode 2019, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan dan PKBL pada tahun buku 2019, sehingga tidak terdapat informasi *fee* jasa audit lainnya.

Auditor Eksternal Lainnya dan Jasa yang Diberikan

Selain Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdapat auditor eksternal lain yang melakukan audit di Perseroan pada tahun buku 2019 yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan PT. SGS terkait pelaksanaan *surveillance* audit untuk sertifikasi ISO 9001:2015.

Temuan dan Tidak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal

Perseroan senantiasa menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit eksternal dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir temuan-temuan yang mungkin muncul. Jumlah temuan audit eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Perseroan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Hasil Audit	Jumlah Temuan	Selesai Ditindaklanjuti		Belum Selesai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
OJK					
Audit Posisi Januari 2019	168	168	100%	0	0%
Market Conduct 2018	18	18	100%	0	0%
Action Plan 2018	30	30	100%	0	0%
KHP Umum Posisi 31 Januari 2018	120	120	100%	0	0%
KAP (EY)					
ML 2019	43	35	81,4%	8	18,6%
BPK					
KUR 2014	38	29	76,3%	9	23,7%
KUR Subsidi 2017	22	19	86,3%	3	13,6%



Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank Terhadap Ketentuan Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia

Dalam rangka menjaga pelaksanaan audit berjalan efektif, Perseroan senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan agar berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Perseroan. Komite Audit secara rutin melakukan koordinasi dengan Internal Audit Division (IAD) untuk melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti.

Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2018 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. SE BI No.3/31/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan tahunan Bank Umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
4. PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah sebagian melalui PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan terakhir diubah sebagian melalui PBI No. 14/14/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang terakhir diubah sebagian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

Adapun strategi audit adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Komunikasi dengan regulator.
 - b. Berkoordinasi dengan BTN untuk mengembangkan perencanaan audit.
 - c. Penyusunan strategi dan perencanaan audit yang rinci.
 - d. Melakukan pelatihan internal untuk tim penugasan.
2. Audit Intern
 - a. Memahami proses bisnis, risiko dan pengendalian internal.
 - b. *Review* proses tutup buku.
 - c. Identifikasi dan menyelesaikan isu akunting dan auditing.
 - d. Pengujian pengendalian internal di Kantor Pusat dan di cabang-cabang.
 - e. *Review* kolektibilitas dan kecukupan CKPN dan KYD.
3. Tindak lanjut hasil intern
 - a. Update pemahaman atas pengendalian internal.
 - b. Tindak lanjut hasil intern.
 - c. Presentasi hasil intern audit.
4. Audit akhir tahun
 - a. Review subsequent event
 - b. Roll forward prosedur substantif.
 - c. Review tutup buku 31 Desember 2019.
 - d. Finalisasi penyesuaian audit.
 - e. Menerbitkan laporan hasil penugasan.
5. Laporan Penyelesaian PKBL, management letter, laporan evaluasi kinerja dan PSA 62.

Hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Audit atas Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Audit atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Tahun 2019.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan *review* secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menciptakan Perseroan yang sehat. Fungsi Manajemen Risiko juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam sistem pengendalian internal Perseroan khususnya terkait komponen *risk assessment* dalam *internal control framework* COSO. Selain itu, penerapan Fungsi Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang juga menjadi acuan manajemen risiko Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. *Review* terhadap PKMR telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyempurnakan panduan kebijakan manajemen risiko. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan gap analysis serta mengakomodasi best practices yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PERSEROAN

Penerapan sistem manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value. Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko-risiko secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip manajemen risiko yang paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Strategi pengelolaan manajemen risiko juga disesuaikan dengan strategi Bisnis Perseroan. Strategi tersebut dilaksanakan guna mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depan di antaranya melalui:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Perseroan serta pada fungsi Ex Ante dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dan *enhancement Risk and Control Self Assessment* (RCSA) untuk risiko operasional.



4. Pelaksanaan stress testing untuk Risiko Kredit telah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, stress testing Risiko Pasar 2 (dua) kali dalam setahun dan stress testing Risiko Likuiditas dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun guna menilai ketahanan Perseroan terhadap skenario stress/krisis.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan evaluasi secara berkala atas laporan profil risiko (triwulanan) dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Komisaris dan Komite Pemantau Risiko secara semesteran sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. Profil risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
 - a. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen

Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- b. SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*), termasuk Dokumen *Recovery Plan*.
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
 - a. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .
 - b. SE Direksi No. 58/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko Bank.
 - c. SE Direksi No. 61/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - d. SE Direksi No.26/SE/DIR/RMD/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam Banking Book.
 - e. SE Direksi No. 25/SE/DIR/RMD/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Prosedur Validasi model Risiko
 - f. SE Direksi No. 21/DIR/RMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*.
 - g. SE No. 30/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi BTN-Loss Event Database (BTN-LED Tool).
 - h. SE Direksi No. 48/DIR/RMD/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 30/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi BTN-LED.
 - i. SE Direksi No. 41/DIR/RMD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.
 - j. SE Direksi No.60/DIR/RMD/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar.



- k. SE Direksi No. 10/DIR/RMD/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Budaya Risiko.
- l. SE Direksi No. 11/DIR/RMD/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Kebijakan dan Prosedur Risk and Control Self Assessment (RCSA).
- m. SE Direksi No. 18/DIR/RMD/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP).
- n. SK Direksi No. 08/SK/DIR/RMD/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Risk Appetite dan Risk Tolerance Konsentrasi Kredit 50 Debitur Inti Tahun 2017.
- o. SE Direksi Nomor 45/DIR/RMD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah
- p. SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*)
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
 - a. Direksi telah menetapkan limit risiko dan maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia/OJK, dan praktek prudential banking yang baik.
 - b. Penetapan limit risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan di mohonkan keputusan kepada Direksi.
 - c. Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
 - d. Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan transaksi treasury per level jabatan.
 - e. Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
 - a. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .
 - b. SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*)
 5. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - a. KD No. 6/KD/DIR/TMO/2018 tanggal 04 Juli 2018 Tentang Perubahan Atas Ketetapan Direksi Nomor 04/DIR/KD/TMO/2018 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - c. SK No. 10/DIR/RMD/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).
 - d. Direksi telah menetapkan mengenai organisasi manajemen risiko yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko dan Divisi-Divisi yang mendukung penerapan manajemen risiko yaitu ERMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, fungsi pengendalian intern oleh IAD, *Credit Risk Division* sebagai upaya perbaikan proses bisnis kredit komersial melalui penerapan *four eyes principle*, terbentuknya *Retail Risk Division*, fungsi kepatuhan dilakukan oleh CMGD sebagai Satuan Kerja Kepatuhan termasuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing satuan unit kerja, Komite Manajemen Risiko (KOMAR) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko (KOPAR) memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Penerapan Manajemen Risiko.
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;
 7. Sebagai bagian dari tanggung jawab, Direksi memberikan arahan antara lain pada laporan-laporan yang disampaikan oleh ERMD, yaitu :
 - a. Profil Risiko Bank yang disampaikan secara triwulanan.
 - b. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara harian.
 - c. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas



- disampaikan secara pekanan.
- d. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara bulanan.
 - e. Laporan Hasil Pemantauan Eksposur Risiko Kredit yang disampaikan bulanan.
 - f. Laporan Pemantauan evaluasi surat berharga (MTM) disampaikan secara harian.
 - g. Stress Testing Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui Laporan Profil Risiko kepada OJK yaitu pada Triwulan IV/2018, Triwulan I/2019, Triwulan II/2019, Triwulan III/2019.
 - h. Stress Testing Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan telah dilakukan sebanyak 1 kali pada bulan Mei 2019, dan telah disampaikan kepada OJK.
 - i. Laporan *Bottom Up stress testing* risiko kredit, likuiditas, dan pasar dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun disampaikan kepada OJK.
 - j. Laporan *Recovery Plan* dilakukan 1 (satu) bulan sekali disampaikan pada saat rapat ALCO.
 - k. Laporan data kerugian akibat risiko operasional (LED) disampaikan triwulanan.
 - l. Laporan data dan melakukan pengukuran potensi risiko operasional melalui aplikasi (BTN-RCSA) disampaikan triwulanan.
8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - a. Berdasarkan profil risiko Bank, jenis risiko yang bersifat signifikan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Melalui laporan profil risiko Bank, laporan pemantauan posisi dan risiko likuiditas serta laporan hasil pemantauan eksposur risiko kredit, Direksi memastikan bahwa unit-unit kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan tersebut sehingga dengan demikian risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas dapat dikelola dengan lebih baik.
 - b. Perkembangan profil risiko yang signifikan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme Penyampaian Laporan Profil Risiko Bank secara triwulanan.
 9. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;
 - a. Direksi telah memastikan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank melalui:
 - Pemberian arahan pada Laporan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern/intern yang disampaikan IAD secara periodik kepada Direksi.
 - Mengevaluasi hasil tindak lanjut audit tahun sebelumnya pada *exit meeting* Audit
 - Rapat Komite Audit
 - b. Sebagai bagian dari mengembangkan budaya manajemen risiko, Direksi memastikan antara lain adanya:
 - Sertifikasi manajemen risiko dan program refreshment sertifikasi kepada pegawai dan pejabat Perseroan.
 - Pemberian pelatihan manajemen risiko pada pegawai baru.
 10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - a. Melakukan upaya internalisasi budaya manajemen risiko kepada seluruh pegawai sesuai Surat Edaran Direksi No. 10/DIR/RMD/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Budaya Risiko.
 - b. Laporan Pelaksanaan Program Risk Culture 2018 kepada Managing Director Strategic, Compliance & Risk melalui Memo RMD no. 113/M/RMD/ERM/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang isinya melaporkan program-program Budaya Risiko yang dijalankan RMD selama tahun 2018 dan dilaporkan satu tahun sekali.
 - c. Sosialisasi Budaya Risiko melalui pelatihan mengenai overview dan penerapan manajemen risiko dalam pelatihan *Operation Academy*, *Loan Academy*, pelatihan *General Banking Staff*, Pelatihan ODP, pelatihan *supporting Staff*, pelatihan *asset management*, *Coaching Branch Manager*, dan *Consultative Selling*.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

- d. Sosialisasi *risk awareness* melalui program sosialisasi *corporate culture* Bank BTN
 - e. Sosialisasi mengenai pentingnya tingkat kesehatan bank dan profil risiko melalui aplikasi telegram dalam kegiatan budaya yaitu Kulgram
 - f. Dukungan Manajemen terhadap Peran *Change Agent* dalam *Program Risk Culture* 2019 yaitu bahwa seluruh jajaran Manajemen Divisi/*Desk*, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang wajib untuk mendukung peran *Change Agent* dan turut aktif menumbuhkan budaya sadar risiko serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencapai kinerja unggul.
 - g. Kerjasama lintas Divisi antara IAD, CMGD, RMD, LCD, HCMD, HCSD dalam pembentukan Tim Budaya sebagai langkah awal pembentukan *corporate culture* dalam mendukung aktivitas budaya.
 - h. Satuan kerja manajemen risiko menginisiasi strategi untuk meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai Bank BTN dengan menggunakan metode gamifikasi dengan *menggagas Board Game* bernama Paradiso dan *Saved by Our SOP*.
 - i. Menyiapkan materi *risk awareness*, anti *fraud*, *whistleblowing system* dan budaya kepatuhan yang berkoordinasi dengan Internal Audit dan *Compliance* yang disosialisasikan oleh *Change Agent* dan disertai dengan pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) di setiap unit kerja selama 1 (satu) bulan sekali.
11. Menyusun *risk awareness* program yang mencakup;
 - a. Sosialisasi oleh pimpinan unit kerja mengenai SE No. 10/DIR/RMD/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Budaya Risiko.
 - b. Memasukkan materi manajemen risiko sebagai materi wajib dalam setiap pelatihan pegawai
 - c. Menyampaikan pesan-pesan mengenai kesadaran risiko melalui SMS dan *email corporate*
 - d. Mensosialisasikan *risk management* melalui buletin BITNIZ/majalah Paras
 - e. Mengembangkan perangkat-perangkat manajemen risiko sebagai praktik pengelolaan risiko oleh unit-unit kerja.
 - f. Mensosialisasikan *risk management* dalam aktivitas budaya Kulgram
 - g. Program *corporate culture* yang mendukung prinsip *governance* dan *risk awareness*
 12. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; Direksi telah memastikan kecukupan keuangan/anggaran melalui persetujuan pada RKAP 2019.
 - a. Bank telah memiliki rumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan tingkat toleransi (*risk tolerance*) yang telah diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank (sebagaimana dikemukakan pada Rencana Bisnis Bank 2019-2021 serta RKAP 2019). *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* risiko strategik telah dirumuskan dalam ketentuan internal Bank tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. memberikan arahan atas Revisi RKAP Tahun 2019 dan Revisi RBB Tahun 2019-2021 dalam penyusunan dokumen Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021 dan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 agar memperhatikan arahan OJK yang tertuang dalam Surat OJK.
 - c. Target-target kinerja yang tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021 dan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 didukung dengan kertas kerja yang komprehensif dan terukur ketercapaiannya.
 - d. Pertumbuhan bisnis harus dalam koridor prinsip kehati-hatian Bank, penerapan *risk management* yang baik, dan *Good Corporate Governance*.
 - e. Dalam memberikan arahan RKAP dan RBB, Direksi telah mempertimbangkan rencana-rencana strategis untuk tahun 2019. Beberapa arahan yang diberikan yaitu meningkatkan pertumbuhan giro dan tabungan transaksional sejalan dengan target *fee based income*, meningkatkan produktivitas *Funding People* di KC dan *outlet*, serta menetapkan tema KUD 2019 yaitu Pertumbuhan Terkendali dengan bisnis yang lebih prudent dan berkualitas didukung oleh produktivitas SDM, Infrastruktur IT dan Manajemen Risiko yang Optimal.
 - f. Dalam rangka pencapaian target RKAP 2019, Direksi memberikan arahan fokus kinerja 2019 terhadap 4 hal yaitu Peningkatan DPK murah yang lebih sustain, Perbaikan kualitas kredit yang lebih masif, Penurunan LAT/DAT secara lebih cepat dan Penghematan biaya operasional (efisiensi). Atas fokus kinerja tersebut khususnya penghematan



biaya operasional (efisiensi), Direksi menghimbau adanya peningkatan koordinasi dalam program-program yang melibatkan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

- g. Memberikan arahan melalui Surat No. 104/KOM/ BTN/VI/2018 perihal Optimalisasi Pengendalian Internal Unit Kerja yaitu peningkatan pengelolaan SDM dari sisi integritas dan profesionalisme kerja dalam rangka mitigasi risiko dan peningkatan internal control, langkah-langkah untuk mendeteksi *fraud* lebih awal, peran BCSO dalam proses *internal control*, sosialisasi *awareness* terhadap *fraud*.
- h. Menyusun rencana strategik Bank, memberikan arahan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021 serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Direksi telah mengevaluasi dan memberikan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 terkait pencapaian bisnis dan mitigasi risiko strategik:
 - Memperkuat pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan segmen mass, pertumbuhan dana *low cost* dan utilisasi *digital banking*.
 - Meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis perkreditan sebagai bagian dari implementasi PSAK 71.
 - Fokus strategi *enabler* untuk mendukung pertumbuhan tahun 2019 yaitu penguatan bidang SDM, Manajemen Risiko dan IT

- Mendukung percepatan pengembangan *digital banking* dan inisiatif digitalisasi proses untuk peningkatan efisiensi

13. Memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi
 - a. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. Direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen terhadap satuan kerja bisnis dan satuan kerja internal audit. ERMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan fungsinya sebagai *Risk Manager* yang terus melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan satuan kerja bisnis atau satuan kerja operasional sebagai *Risk Owner* wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja tersebut kepada ERMD.
 - c. Keputusan Direksi No. 6/KD/DIR/TMO/2018 tanggal 04 Juli 2018 Tentang Perubahan Atas Ketetapan Direksi Nomor 04/DIR/KD/TMO/2018 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan

Enterprise Risk Management Division secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Bank BTN, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank BTN termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank. Uraian lengkap tentang Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris - Komite Pemantau Risiko dalam bab Tata Kelola Perusahaan di laporan tahunan ini.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang

diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Uraian lengkap tentang Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Organ dan Komite di Bawah Direksi - Komite-Komite di Bawah Direksi - Komite Manajemen Risiko dalam bab Tata Kelola Perusahaan di laporan tahunan ini.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertugas berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan mengkoordinasikan serta memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan shareholder value, meningkatkan investor confidence, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Sejak 4 Februari 2016, *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dalam pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar

mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian lengkap tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Organ dan Komite di Bawah Direksi - Fungsi Manajemen Risiko dalam bab Tata Kelola Perusahaan di laporan tahunan ini.

JENIS RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

Terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi Perseroan, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas yang dapat merugikan Bank. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi *banking book*.



RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk fraud yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan

dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

RISIKO STRATEJIK

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank sebagai berikut:

1. kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
2. hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

UPAYA MENGELOLA RISIKO

Perseroan sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI Rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Perseroan merupakan salah satu Bank Sistemik. Sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, khususnya terhadap permasalahan Bank Sistemik (*Systemically Important Bank*) maka Perseroan harus dapat menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 dan peraturan intern Bank SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Perseroan telah menyusun Dokumen *Recovery Plan* yang di dalamnya memuat *Trigger Level* (untuk tujuan pencegahan, pemulihan dan perbaikan). Untuk setiap indikator Opsi Pemulihan yang dicantumkan dalam *Recovery Plan* telah mencakup antara lain: Indikator Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset.

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit.

Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Perseroan sedang melakukan pilot *project* atas implementasi *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam menganalisa dari segi risiko kredit di 3 (tiga) kantor cabang. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada Commercial Banking Division yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit komersial yang berfungsi untuk melakukan proses monitoring kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Sedangkan pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM). Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja Consumer *Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.

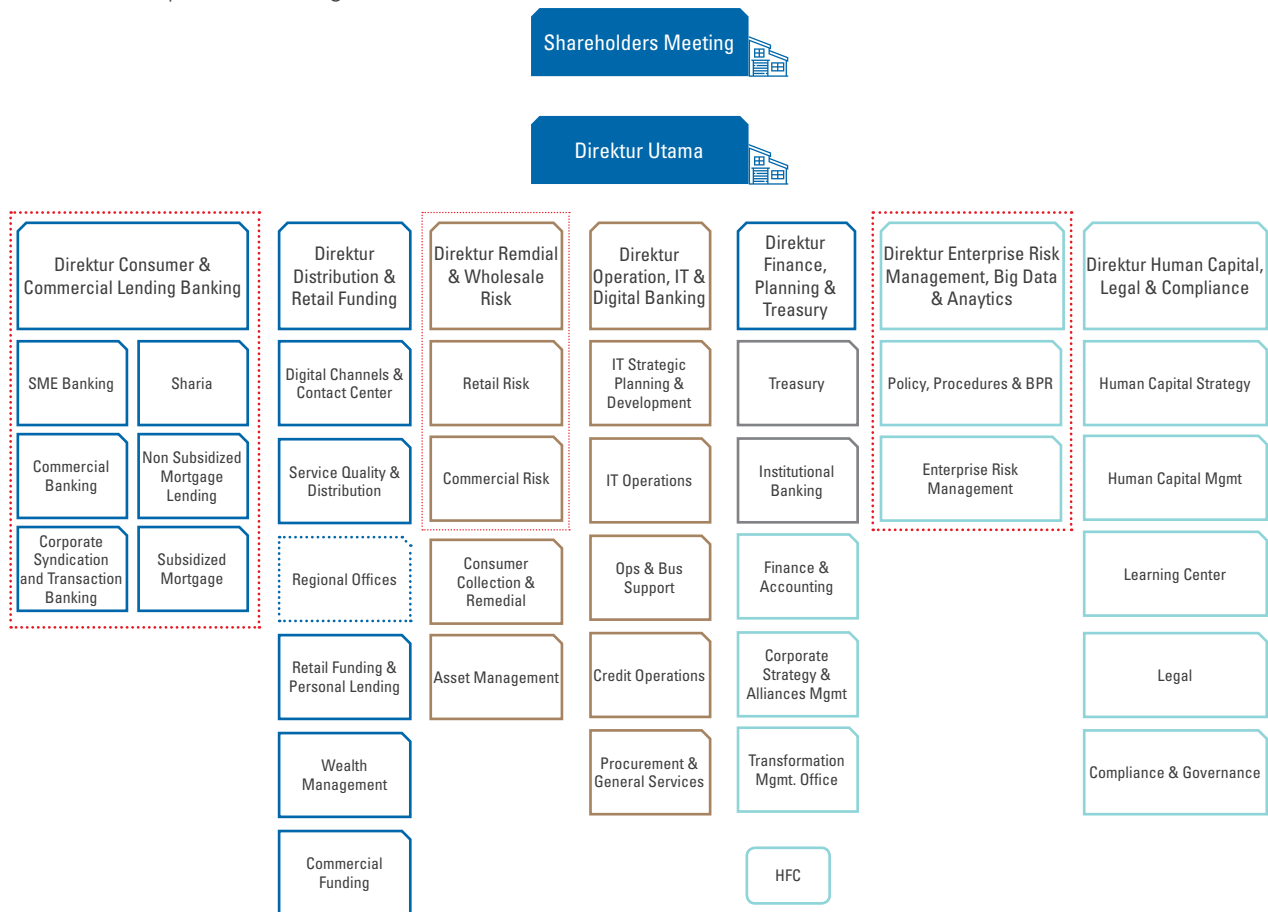
Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan Standardized Approach sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.

Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.



Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Bank yang telah memisahkan fungsi credit risk dan risk taking unit serta enterprise risk management :



PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, yang dilakukan oleh Unit bisnis dan/atau *Enterprise Risk Management Division*. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) dimana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas Perseroan. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan.

Khusus untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang dalam SE



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi No.26/SE/DIR/RMD/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum, Perseroan telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut, Bank telah menyusun kebijakan IRRBB dan sedang mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan stress testing guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal Perseroan. Untuk skenario internal Perseroan, setiap awal tahun *Enterprise Risk Management Division* berkoordinasi dengan *Working Group Stress Test* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan telah menetapkan Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, *limit dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam PBI 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 2 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Bank.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh *Treasury Division* (TRSD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD). Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan stress testing. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Bank dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur gap likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun *trend* kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan stress testing menggunakan skenario Bank *specific crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) stress test, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Bank memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. *Enterprise Risk Management Division* berkoordinasi dengan *Stress Test Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario



dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, pekanan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh ERMD yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan monitoring indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka mengimplementasikan proses manajemen risiko khususnya risiko operasional, bank memiliki aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED) yang berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang dengan menggunakan kriteria kejadian risiko berdasarkan *Basel II (seven risk event types)*. Aplikasi BTN LED ini berbasis web sehingga dalam pelaporannya Kantor Cabang dapat mengirimkan data *loss event* secara *online* setiap bulan. *Output* dari BTN LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *near miss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan

melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

Perseroan juga telah memiliki aplikasi *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA System) yang digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja Bank.

Pendekatan yang digunakan pada aplikasi RCSA adalah ISO 31000:2009 dimana risiko dapat didefinisikan sebagai dampak ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

Untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Perseroan melakukan proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dalam bentuk video dan melakukan uji coba atau simulasi secara periodik. Laporan hasil uji coba atau simulasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan perbaikan berkesinambungan.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) bersama-sama *Legal Division* (LGD) dan *Credit Operation Division* (COD). Dari pengukuran yang dilakukan LGD diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

hukum yang terjadi, sedangkan dari COD diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (LAT).

Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian dokumen perkreditan. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Perseroan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh ERMD dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerja sama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk website dan digunakan sebagai register serta monitoring terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Bank dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Bank dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor

Cabang Syariah.

5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya.

PENGLOLAAN RISIKO STRATEJIK

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh *Corporate Strategy & Alliance Management Division* (CSAD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh *Corporate Strategy & Performance Management Division* (SPD) secara berkala dengan memonitor pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM.

Selanjutnya, *Enterprise Risk Management Division* memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, *Corporate Strategy & Alliance Management Division* (CSAD) berfungsi menganalisis gap antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

PENGLOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Perseroan telah memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai BTN dalam mengakses seluruh ketentuan internal Perseroan. Selain itu, untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Perseroan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bernama *Compliance and Governance*



Division (CMGD) yang melakukan pemantauan risiko kepatuhan dengan membuat daftar kewajiban-kewajiban Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan *review* ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku.

Perseroan telah menempatkan *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) di Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Perseroan apakah sesuai dengan peraturan, ketentuan, maupun SOP yang berlaku. CMGD memantau dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perseroan baik sewaktu-waktu maupun secara berkala pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai first-line dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional

dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM. Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Bank BTN memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. *Digital Channels and Contact Center Division* (DCCD) sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi Perseroan dikelola oleh unit kerja *Corporate Secretary Division* (CSD) yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan *Digital Channels and Contact Center Division* (DCCD) yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) Perseroan berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari CSD dan DCCD berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Dalam pengendalian Risiko Reputasi, *Corporate Secretary Division* bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, DCCD menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Perseroan didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditambah lagi Bank BTN secara dominan membantu pemerintah dalam Program Sejuta Rumah, dalam rangka Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko, salah satu cara yang dilakukan adalah peningkatan budaya manajemen Risiko, Satuan kerja manajemen risiko menginisiasi strategi untuk meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai Perseroan antara lain dengan menggunakan metode :

1. *Risk Management in Training.*
Pelatihan terkait overview dan penerapan manajemen risiko yang di dalamnya terdapat materi wajib tentang budaya risiko, antara lain pelatihan GBS dan ODP dengan menerapkan Gamification, dengan menggunakan perangkat Fun Risk Quiz Kahoot dan *Board Game Risk*. Enterprise Risk Management Division juga turut aktif dalam mendukung Learning Center untuk Pelatihan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) pegawai Bank BTN secara bertahap. Untuk kalangan Millenial, ERMD juga berpartisipasi aktif dalam Kulgram (Kuliah Telegram) guna memaparkan tentang manajemen risiko khususnya Tingkat Kesehatan Bank.
2. Menjadi Salah satu program Budaya Perusahaan dalam *Risk, Governance & Compliance*
Enterprise Risk Management Division menjadi salah satu tim budaya perusahaan dan mendorong kegiatan sosialisasi mengenai manajemen risiko menjadi salah satu penilaian dalam Laporan Budaya Perusahaan di seluruh unit kerja misalnya sosialisasi dan pengisian RCSA dan Sosialisasi iGRC.
3. *Risk Awareness Blasting*
Bertujuan untuk Memberikan pesan kepada seluruh pegawai untuk selalu aware terhadap risiko (email blast dan sms blast), bekerja sama dengan CMPD, HMCD dan IAD. Selama tahun 2019 ERMD telah menyebarkan *Risk Awareness*.
4. *Risk Culture Policy & Procedure Socialization & Quiz*
Merupakan program yang mewajibkan setiap pegawai di setiap unit kerja di Bank BTN untuk memahami peraturan-peraturan intern yang dapat memperkuat *risk awareness* yang mencakup materi risiko operasional, strategi anti fraud, kepegawaian, *Business Continuity Management* (BCM), *Know Your Employee* (KYE), APU-PPT dan Sistem Pengendalian Intern.

TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Perseroan serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. PD No. 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*)
 - c. *On Progress Review* Surat Edaran Direksi No. No. 18/DIR/RMD/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP) (tahun 2020)
 - d. Pelaksanaan stress testing guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario stress/krisis:
 - *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2018, Triwulan I/2019, Triwulan II/2019 dan Triwulan III/2019.
 - *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pelaporan Bottom Up Stress Testing (BUST) yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Maret 2019 dan *Reverse Stress Testing Recovery Plan* yang telah dilakukan update untuk kebutuhan pelaporan Dokumen Recovery Plan pada bulan September 2019.
 - e. SE No. 77/DIR/RMD/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Credit Scoring Model (CSM).
 - f. SE No. 62/DIR/RMD/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Internal Credit Rating (ICR).



PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan mengantisipasi penerapan Basel II khususnya pilar 1, Bank telah mengimplementasikan :

1. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Kredit, Bank menerapkan pendekatan standar (*standardized approach*) sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 sebagaimana diubah dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
2. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Pasar, Bank menerapkan penggunaan metode standar (*Standard Method*) sesuai dengan SE OJK No 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Untuk implementasi Basel III Perseroan telah menerapkan yaitu:

1. Menghitung *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara bulanan dan triwulanan sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Perseroan senantiasa penilaian profil risiko Perseroan melalui penilaian peringkat risiko *inherent* dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk menentukan peringkat risiko Perseroan. Penilaian Risiko Inherent merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

2. Menghitung dan melaporkan uji coba *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara triwulanan kepada regulator sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
3. Menghitung dan melaporkan uji coba perhitungan *Leverage Ratio* (LR) kepada regulator secara triwulanan sesuai *Consultative Paper* LR.
4. Menghitung dan melaporkan penyampaian laporan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book
5. Memperhitungkan *buffer* dalam perhitungan kecukupan modal minimum yaitu :
 - a. *Conservation Buffer* sesuai dengan pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - b. *Countercyclical Buffer* sesuai PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*
 - c. *Capital Surcharge* bagi Bank Sistemik sesuai POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* serta adanya surat penetapan bucket Bank Sistemik yang disampaikan regulator.

merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

**SISTEM MANAJEMEN RISIKO**

Pada tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian Perseroan secara *Self Assessment* Profil Risiko Perseroan sebagai berikut:

No	Profil Risiko	Triwulan IV/2019			Triwulan IV/2018		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
1	Risiko Kredit	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Moderate</i> (3)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low</i> (1)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low</i> (1)
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i> (3)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Moderate</i> (3)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Strong</i> (1)	<i>Low</i> (1)
6	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low</i> (1)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low</i> (1)
7	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)
8	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)
Peringkat Komposit		<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory</i> (2)	<i>Low to Moderate</i> (2)

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Enterprise Risk Management Division sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko secara rutin per triwulan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan menggunakan tools profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank.

Penilaian Risiko *Inheren* merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi

mempengaruhi posisi keuangan Bank. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas database risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu. Saat ini Perseroan sedang mengembangkan *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dan enhancement *Loss Event Database*



(LED) yang membantu mengumpulkan informasi loss event yang terjadi di Kantor Cabang sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi di KC dan dapat ditindaklanjuti dengan memitigasinya.

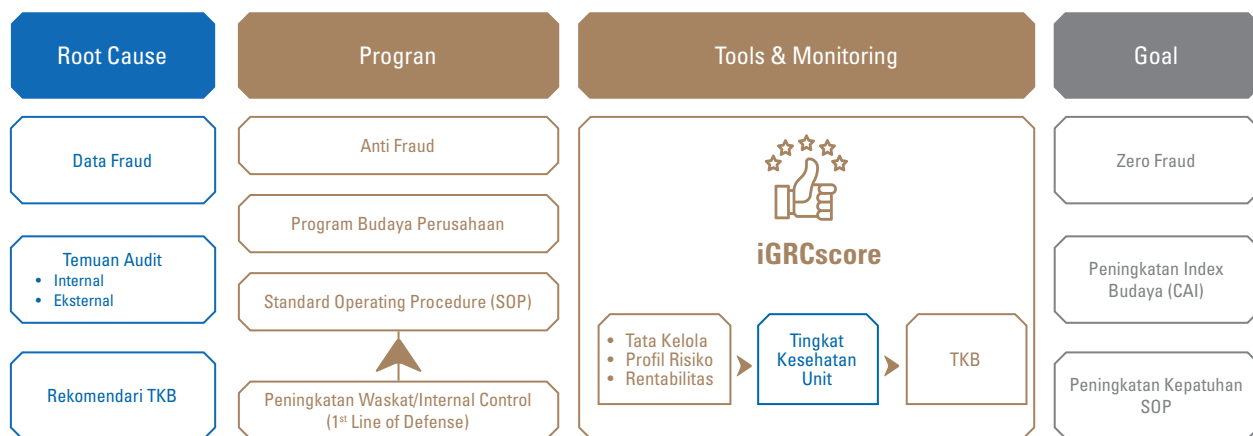
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen

Risiko dalam hal ini ERMD yang memiliki unit kerja assessment and measurement untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan.

PENERAPAN INTEGRATED GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE (GRC) YANG KOMPREHENSIF

Sesuai Cetak Biru Transformasi Bank BTN, dalam rangka membangun pilar strategis Bank untuk pertumbuhan bisnis, maka Bank BTN perlu mengimplementasikan fungsi GRC secara terintegrasi dan komprehensif. Integrated GRC diharapkan dapat meningkatkan potensi pencapaian kinerja unggul didukung penerapan prinsip GCG dan manajemen risiko yang baik. Target Keberhasilan iGRC pada *milestone* awal adalah Zero Fraud, Peningkatan Indeks Budaya dan Peningkatan Kepatuhan Pegawai terhadap SOP yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Rencana program kerja *Integrated Governance, Risk & Compliance* yang Komprehensif adalah sebagai berikut :

- Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - Penyusunan Aplikasi Integrated Risk Management (*Enterprise Risk Dashboard*); dan
 - Enhancement* sistem Operational Risk Tools
- Satuan Kerja Kepatuhan
 - Melakukan asesmen kepatuhan unit kerja (*compliance mapping*) secara periodik;
 - Pelaksanaan Joint Audit;
 - Memperkuat program APU PPT yang sejalan dengan APU PPT *Compliance Mandatory Regulatory*;
 - Memperkuat Program Pengendalian Anti Korupsi dan Gratifikasi;
 - Implementasi Program Profit Cek Kerjasama KPK;
- Satuan Kerja Audit Internal
 - Pelaksanaan Audit (General, ICT dan Investigasi);
 - Mengkoordinasikan penerapan Strategi Anti Fraud/SAF (Sosialisasi SAF, Email Blast dan SMS Blast); dan
 - Meningkatkan efektivitas Whistle Blowing System
- Meningkatkan kapabilitas corporate governance berdasarkan :
 - Standard Corporate Governance* menurut Regulator;
 - Standard Corporate Governance* menurut ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*); dan
 - Standard Corporate Governance* menurut CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PRESTASI DAN PENGHARGAAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 :

1. ISO 9001:2008
2. Surveillance ISO 9001:2015
3. Juara Kategori Asean GRC Award dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2017
4. Juara Kategori Asean Public Risk dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
5. Runner Up Kategori Asean Risk Educator dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
6. Runner Up Kategori Asean GRC Award dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
7. Nominator Kategori Public Initiative dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2018
8. Juara Kategori Asean Public Risk dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2019
9. Nominator Kategori Asean Risk Educator dalam ajang Asean Risk Awards oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Tahun 2019

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERIODE 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Tujuan Manajemen Risiko Bank (*Enterprise Risk Management*):

1. Menciptakan sistem atau mekanisme dalam perusahaan sehingga risiko bisa di antisipasi dan dikelola untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjaganya.
2. Mendorong manajemen dan karyawan untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan.
3. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan menjaga pengelolaan risiko Perseroan.
4. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

SASARAN MANAJEMEN RISIKO BANK

- Terciptanya SDM yang berwawasan dan berbudaya risiko (risk culture) dengan pola pengembangan yang terencana dan berkesinambungan.
- Mendukung tercapainya RKAP Perseroan tahun 2020.
- Meningkatkan dan menjaga profil risiko dan tingkat kesehatan Perseroan pada tingkat yang diinginkan.
- Mengoptimalkan KPMM yang dimiliki Perseroan serta menjaga pada tingkat yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap unit kerja wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari penerapan manajemen risiko tersebut, dengan mengacu pada cetak biru rencana transformasi strategis 2016-2020 Perseroan, khususnya memperkuat implementasi GRC yang komprehensif, Perseroan menyusun strategis dan rencana kerja terkait penerapan manajemen risiko dengan strategi dan rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan transformasi dalam Cetak Biru Perseroan dan dengan mengacu kepada 11 inisiatif GRC
2. Memperkuat kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan menjaga pengelolaan risiko Perseroan.

terintegrasi yang menjadi tanggung jawab RMD untuk mendukung arah optimalisasi penerapan manajemen risiko RMD telah membuat *Roadmap* transformasi manajemen risiko Perseroan periode 2019-2025 dengan penekanan tujuan yang ingin di capai dalam implementasi tersebut sebagai berikut:

- a. 2019: *Effective Capital*
 - b. 2020: *Optimal Earnings*
 - c. 2021: *Controlled Risk*
 - d. > 2021 – 2025: *Good Corporate Governance*
2. Memperkuat kapabilitas risiko (RM.7), antara lain



dengan melakukan restaffing SDM satuan kerja manajemen risiko dan peningkatan Kompetensi SDM RMD maupun Perseroan secara keseluruhan terkait manajemen risiko.

3. Menetapkan *risk appetite & tolerance* (RM.8) dan strategi yang jelas dengan Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko (termasuk di dalamnya RA/RT per jenis risiko untuk tahun 2020).
4. Memperbaiki proses keputusan kredit (RM.9) dan Membangun model *risk scoring* efektif (RM.11), hal ini dilakukan antara lain dengan memperkaya/ memperluas kapabilitas dari d. Internal Credit Rating (ICR), *Credit Scoring model* (CSM), Pengembangan model Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) maupun EAD sebagai bagian dari implementasi PSAK 71, serta mengembangkan kerangka kerja validasi model risiko, termasuk risiko kredit dan menetapkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
5. Menetapkan struktur tata kelola kuat untuk meningkatkan budaya risiko (RM.10) dengan meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai Perseroan dengan menggunakan metode gamifikasi. Diharapkan dengan metode gamifikasi memudahkan seluruh pegawai dalam memahami pentingnya risk awareness pada setiap aktivitas khususnya pada pekerjaan. Melaksanakan program *risk awareness* yang lebih *fun* dan atraktif dengan Pelaksanaan Program *Risk Culture* 2019.

6. Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko operasional (RM.12) dan melaksanakan penerapan integrated GRC dan melakukan pemantauan KPI, KRI, dan KCI (RM.20), antara lain dengan memperkuat ketentuan internal yang mengatur mengenai *Loss Event Database* (LED), *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) dan *Business Continuity Management* (BCM), selain itu peningkatan kapabilitas manajemen risiko operasional semakin di perluas dengan menyusun ketentuan *Key Risk Indicator* (KRI) dan IT *Risk Management* dan menerapkan aplikasi/sistem IT untuk mendukung implementasi RCSA serta Integrasi *Operational risk Tools* (LED, KRI dan RCSA)
7. Meningkatkan kapabilitas manajemen likuiditas dan risiko pasar (RM.14), yaitu dengan Pengembangan kerangka validasi Model Risiko Pasar & Likuiditas serta mengintensifkan pemantauan atas konsentrasi Nasabah Inti, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) & Net Stable Funding Ratio (NSFR).
8. Membangun sistem informasi risiko (RM.15) dengan mengembangkan dan/atau memperkuat aplikasi-aplikasi sistem IT yang mencakup Aplikasi Integrasi Manajemen Risiko dan Aplikasi *Credit Risk Datamart*.
9. Implementasi sistem peringatan dini berbasis aturan (RM 16) dengan membangun aplikasi *recovery plan*.

Dalam rangka mendukung/mengoptimalkan pelaksanaan implementasi strategi di atas, RMD dalam pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 yang berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

DASAR PENETAPAN

Bagi Perseroan, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Perseroan menjalankan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

KEGIATAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan pengendalian mencakup beberapa aspek yang di dalamnya tidak terbatas pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan Pengendalian khususnya terkait dengan operasional dan keuangan diterapkan pada semua tingkatan fungsional yang tanggung jawabnya disesuaikan berdasarkan struktur organisasi Perseroan di antaranya:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
Direksi Bank secara berkala melakukan rapat koordinasi guna memperoleh informasi atas kinerja Perusahaan dari pejabat dan pegawai. Sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian terhadap realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seperti laporan keuangan atau laporan manajemen yang dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang diantaranya:
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko;
 - b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko; dan
 - c. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan,



- Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).
3. Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi
Pengendalian sistem informasi dan teknologi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
 4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)
Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.
 5. Dokumentasi (*Documentation*)
Perseroan sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor interen, akuntan publik dan otoritas pengawasan Perseroan.
 6. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
Pemisahan fungsi merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:
 - a. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*";
 - b. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi;
 - c. Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen;
 - d. Penerapan *Four-Eyes Principle* dan Tiga *Pilar Proses* yaitu Bisnis, Operations dan Risk sebagai berikut:
 - *Four-Eyes Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang masing-masing berasal dari unit Bisnis dan unit Risiko Kredit yang saling independen satu sama lain.
 - Pengambilan keputusan untuk jenis kredit yang menggunakan *scoring system* atau kriteria khusus yang ditetapkan dalam parameter program/skim pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan prinsip *four-eyes* yaitu antara unit bisnis dengan *scoring system*/kriteria dimana desain model dan parameter *scoring system*/kriteria disusun dan dipelihara oleh unit manajemen risiko.
 - Pemisahan fungsi *sales/business*, fungsi risk dan fungsi *operation* (credit admin dan legal) dalam proses pemberian kredit.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN****KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN DENGAN KERANGKA COSO**

Sistem pengendalian internal Perseroan telah sesuai dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Pemantauan (*Monitoring*).

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Perseroan yang mengacu pada COSO telah disesuaikan dengan surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. SKB-04 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan KD No. 01/DIR/KD/PPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) Bab 7 Kebijakan Pengendalian Internal. Berdasarkan surat keputusan tersebut komponen pengendalian intern Perseroan sejalan dengan *internal control framework* COSO yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*control enviroment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Sedangkan elemen Sistem Pengendalian Intern Bank sebagaimana disebutkan dalam SKB No.SKB-04 No. SKB-04 tanggal 29 Juli 2011 dan dan KD No. 01/DIR/KD/PPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) Bab 7 Kebijakan Pengendalian Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional dimana kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Perseroan dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan,



prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Perseroan bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.

4. Sistem Akuntansi/Kuangan, Informasi dan Komunikasi dimana sistem Akuntansi/Kuangan harus mencakup metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan,

penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan dimana Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit intern.

PERNYATAAN KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERN

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*),

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN

Pada tahun 2019, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Perseroan melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan Internal Control Assessment (ICA) dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen

pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment (ICA)* serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal (SPIN) ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Untuk menilai kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Kecukupan dan Efektifitas Pengendalian Internal menggunakan kuisioner *Internal Control Assessment* (ICA) untuk menyusun Risk Control Assesment serta Audit Rating yang diuji ulang pada saat pelaksanaan audit lapangan (*walkthrough*).
2. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja riil dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP).

Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (*divisi/desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.



PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING LAINNYA

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA ENTITAS ANAK

Selama periode tahun 2019, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki entitas anak usaha.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tahun 2019, Perseroan menghadapi permasalahan hukum berupa perkara/ gugatan penting dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2018-2019							
No	Permasalahan Hukum	2109			2018		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	216	117*	3	134	173*	1
2.	Dalam proses penyelesaian	142	89	1	214	101	1
Jumlah		358	206	4	348	274	2

*) Pada tahun 2019 dari 117 permasalahan hukum pidana, Perseroan bertindak sebagai saksi sebanyak 93 kasus.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN TAHUN 2019

Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Status Terakhir
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pembeli tunai kepada pengembang yang memperoleh fasilitas kredit dari Perseroan dikarenakan para pembeli tunai belum memperoleh sertifikat dari pengembang yang menjadi jaminan kredit di Perseroan	Menunggu Putusan PK dari Mahkamah Agung	Menyerahkan Agunan Kredit senilai Rp1.400.000.000	Putusan Kasasi mengabulkan gugatan dari pembeli tunai
Gugatan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah kepada Pengembang yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank BTN dikarenakan Pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah merasa tidak pernah membuat surat kuasa menjual kepada pengembang.	Menunggu Putusan PK dari Mahkamah Agung	Menyerahkan Agunan Kredit senilai Rp2.100.000	Putusan Kasasi mengabulkan gugatan dari pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah
Gugatan yang dilakukan oleh pihak investor kepada Perseroan dan pengembang dikarenakan pihak investor mengklaim telah menyetorkan uang untuk penebusan agunan kredit milik pengembang tetapi uang yang pada awalnya diperuntukkan penulisan kredit pengembang tersebut tidak terealisasi	Menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung	Kerugian materiil senilai Rp2.380.414.576	Putusan Banding

SANKSI ADMINISTRASI

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat sanksi administratif yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, publikasi (press release), produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Website www.btn.co.id yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
 - a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
 - b. Analisis kinerja keuangan.
 - c. Laporan keuangan tahun selama 5 tahun terakhir
 - d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center 1500 286 atau email csd@btn.co.id.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Investor Relations Perusahaan dengan mengirim email ke investor_relations@btn.co.id atau telepon ke (62-21) 633 6789 ext: 2003.
4. Perusahaan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik spe.ojk.go.id dan idxnet.co.id dan situs web www.btn.co.id.
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
6. Penyampaian laporan kepada regulator, Analyst Meeting, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama	: Achmad Chaerul
Alamat	: Menara BTN : Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
Telepon	: +62 21 6336789 ext. 2003
Fax	: +62 21 6336719
E-mail	: achmad.chaerul@btn.co.id
Website	: www.btn.co.id

ALAMAT KANTOR PUSAT

Alamat	: Menara BTN : Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
Telepon	: 62 21 6336789, 6332666
Fax	: +62 21 6346704
E-mail	: csd@btn.co.id
Website	: www.btn.co.id
Contact Center	: 1500-286 BankBTNcoid @BankBTNcoid www.btn.co.id Bankbtn



KEGIATAN INVESTOR RELATIONS TAHUN 2019

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya, Perseroan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Selain itu, Perseroan secara aktif menyelenggarakan kegiatan lain seperti pertemuan media, ulasan media dan promosi melalui media. Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai komunikasi kepada investor (Investor Relations) sebagaimana diuraikan pada bagian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan.

Adapun kontak untuk Investor Relation Perseroan adalah sebagai berikut:



Investor_Relations@btn.co.id



+62 21 63870107/4

SIARAN PERS

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menjalankan salah satu aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam bentuk siaran pers. Siaran Pers yang telah dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Judul
4 Januari 2019	Kejar Target 2019, Bank BTN Bidik Pembiayaan Rumah Untuk 4 Juta Anggota Korpri
19 Januari 2019	BTN Siapkan Pembiayaan Rumah Bagi Komunitas Pencukur Rambut Garut
25 Januari 2019	Kejar DPK Murah, Bank BTN Gelar Program Poin Serbu BTN
2 Februari 2019	BTN Optimistis Cetak Kredit Baru Rp5 triliun dalam Ipex 2019
10 Februari 2019	69 Tahun Bank BTN Sukses Realisasikan Kredit Senilai Rp523 triliun
11 Februari 2019	Target IPEX 2019 Terlampaui
14 Februari 2019	Gaet Milenial, BTN Syariah Luncurkan KPR Hits
27 Februari 2019	Kejar Target DPK Lembaga, Bank BTN Gaet PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
5 Maret 2019	Dukung Program Satu Juta Rumah, BTN Gelar Literasi Properti di Malang
5 Maret 2019	Bank BTN Optimistis Hasil Pilpres Positif Untuk Sektor Properti
16 Maret 2019	BTN Syariah Roadshow KPR Hits Di Sejumlah Kota Besar
20 Maret 2019	Tingkatkan Kualitas Pengembang Perumahan, BTN Gandeng Perguruan Tinggi Inisiasi School Of Property Developer
1 April 2019	Bidik Kenaikan DPK dan Kredit, Bank BTN Galang Kerjasama Dengan PT Angkasa Pura Support
22 April 2019	BTN Akuisisi Anak Usaha PNM
22 April 2019	Pacu Ekspansi Kredit, BTN Gelar Akad Massal Serentak



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Tanggal	Judul
22 April 2019	BTN Mulai Akuisisi Perusahaan Kecil Sebagai Anak Usaha
23 April 2019	Kuartal I/2019, BTN Catatkan Kredit Naik 19,57%
25 April 2019	BTN Dukung Kesejahteraan Puluhan Ribu Petani di Purwakarta
17 Mei 2019	BTN Akan Ambil Alih Mayoritas Saham PNMIM
20 Mei 2019	Dukung Perkembangan Klub Basket Nasional, Bank BTN Apresiasi Prestasi BTN CLS Knights
23 Mei 2019	BTN Siapkan Rp14,58 Triliun Sambut Libur Idul Fitri 1440 H
23 Mei 2019	BTN Siap Jadi Mitra Utama Tapera
27 Mei 2019	Safari Ramadan, Bank BTN Donasikan Rp 2,24 Miliar
28 Mei 2019	Bank BTN Gandeng Moneygram Sediakan Jasa Remitansi
14 Juni 2019	Himpuni Siap Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
19 Juni 2019	Infrastruktur Mendorong Kenaikan Indeks Harga Properti
27 Juni 2019	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Kelebihan Permintaan
19 Juli 2019	Bank BTN Sesuaikan Rencana Bisnis Bank
22 Juli 2019	Tingkat Penyaluran Kredit Bank BTN Jalin Kerjasama dengan TNI
26 Juli 2019	Kinerja on Track, BTN Bersiap Terbitkan Junior Global Bond
27 Juli 2019	Terus Pacu KPR, BTN Incar Rp 5 Triliun dari IpeX
2 Agustus 2019	Sambut Pertumbuhan Ekonomi Kaltara, BTN Buka Kantor Cabang Tarakan
5 Agustus 2019	Tutup IPEX BTN Bakal Realisasikan Kredit Baru Rp 7,22 Triliun
13 Agustus 2019	Cegah Korupsi, BTN Adopsi Cek Profit Milik KPK
13 Agustus 2019	BTN Mengajak Siswa Bengkulu Perkuat Nilai Kebangsaan
29 Agustus 2019	BTN Dapat Restu Akuisisi Perusahaan Modal Ventura
30 Agustus 2019	Oni Febrianto Rahardjo Ditunjuk Untuk Menjalankan Tugas Direktur Utama BTN
3 September 2019	Mendapat Tambahan Kuota FLPP, Bank BTN Makin Solid Capai Target 2019
4 September 2019	BTN dan BPN Luncurkan Layanan Hak Tanggungan Elektronik
20 September 2019	Relaksasi LTV Pacu Penyaluran KPR Non Subsidi BTN
16 Oktober 2019	Percepat Penyelesaian Dokumentasi Kredit, Bank BTN Luncurkan Web E-Mitra Operation
31 Oktober 2019	Genjot Dana Ritel, Bank BTN Tawarkan Program Kemilau Emas ke Nasabah Tajir
11 Februari 2019	Bank BTN Rangkul Generasi Muda Dengan Tabungan Simpel Dalam Ajang Science Day
11 November 2019	Pacu Kinerja di Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusra Bank BTN Relokasi Kantor Wilayah
11 November 2019	BTN Masuk Dalam Indeks Sri-Kehati
14 November 2019	Kuartal III/2019, BTN Raih Laba Rp801 Miliar
16 November 2019	Dorong Sektor Properti, BTN Gelar IpeX
20 November 2019	Pacu Bisnis Di Sulteng, BTN Syariah Buka Cabang Di Kendari



Tanggal	Judul
24 November 2019	BTN Raup Potensi Kredit Baru Rp 4,54 Triliun Dalam Gelaran Ipex
27 November 2019	BTN Siap Hadapi 2020
28 November 2019	Optimalkan Penyaluran Kpr Subsidi, Bank BTN Pacu Penyaluran Subsidi Bp2bt
4 Desember 2019	Amankan Rasio Kecukupan Modal, Bank BTN Sekuritisasi Aset Senilai Rp 2 Triliun
8 Desember 2019	BTN Telah Salurkan KPR Rp 300 Triliun Untuk Biayai 5 Juta Masyarakat Indonesia
10 Desember 2019	Bisnis Pembiayaan Properti Tahun 2020 Hadapi Banyak Tantangan
11 Desember 2019	Bank BTN Gelar Akad Kpr Massal Untuk Eksekusi Kuota FLPP Tambahan
18 Desember 2019	BTN Bersiap Kuasai Pasar Milenial

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Sepanjang tahun 2019, Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada masyarakat antara lain melalui media massa, situs web Perusahaan dan BEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Tanggal	Perihal	Tujuan
4 Januari 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia
16 Januari 2019	Laporan Pembayaran Bunga Ke-6 (Enam) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A-D	
7 Februari 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
5 Maret 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
8 Maret 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik	
13 Maret 2019	Informasi Pembayaran KUPON	
18 Maret 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Penggantian Kepala Unit Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
28 Maret 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Pembayaran Bunga ke-24 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	
29 Maret 2019	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	
2 April 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
10 April 2019	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
16 April 2019	Informasi Pembayaran KUPON	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Tanggal	Perihal	Tujuan
24 April 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (CSPA) antara Bank BTN dengan PNM Investment Management	OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia
25 April 2019	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
26 April 2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
8 Mei 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
13 Mei 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik	
21 Mei 2019	Jadwal Dividen Tunai	
22 Mei 2019	Perubahan Komite Audit	
24 Mei 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Direktur Utama Bank BTN per 16 Mei 2019	
12 Juni 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
14 Juni 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Risalah RUPS Tahunan No. 97 tanggal 17 Mei 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
27 Juni 2019	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya	OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia
1 Juli 2019	Informasi Pembayaran KUPON	
2 Juli 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Rencana Penyertaan Modal Bank BTN pada PT PNM Investment Management	
4 Juli 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
10 Juli 2019	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	
17 Juli 2019	Informasi Pembayaran KUPON	
23 Juli 2019	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	
29 Juli 2019	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
31 Juli 2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Direktur Utama Bank BTN	
5 Agustus 2019	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan	
7 Agustus 2019	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	
8 Agustus 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
14 Agustus 2019	Laporan Informasi dan Fakta Material	
22 Agustus 2019	Laporan Hasil Public Expose – Tahunan	



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

Tanggal	Perihal	Tujuan
2 September 2019	Laporan Informasi dan Fakta Material	OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia
9 September 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
11 September 2019	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 (RUPSLB)	
12 September 2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
18 September 2019	Informasi atau Fakta Material lainnya	
26 September 2019	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
27 September 2019	Informasi atau Fakta Material lainnya	
4 Oktober 2019	Informasi atau Fakta Material lainnya	
11 Oktober 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
16 Oktober 2019	Penyampaian Bukti Iklan Ralat Pemanggilan RUPSLB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Koreksi)	
28 Oktober 2019	Informasi atau Fakta Material lainnya	
31 Oktober 2019	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III 2019 Ditelaah secara terbatas	
5 November 2019	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	
6 November 2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Tanggal	Perihal	Tujuan
7 November 2019	Permohonan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK	OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia
12 November 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	
15 November 2019	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
20 November 2019	Perubahan Corporate Secretary/Komite Audit/Alamat/NPWP	
29 November 2019	Penyampaian Bukti Iklan Bukti Publikasi Keputusan RUPSLB tanggal 27 November 2019 Bank BTN	
4 Desember 2019	Pembayaran Kupon/Bagi Hasil/Ijarah/Pokok	
9 Desember 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
10 Desember 2019	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (KOREKSI)	
11 Desember 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Direktur Kepatuhan Sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
12 Desember 2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
18 Desember 2019	Perubahan Internal Audit	
26 Desember 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material Risalah RUPSLB BTN No. 97 tanggal 27 November 2019	
27 Desember 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Sdr. Eko D. Heripoerwanto selaku Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
31 Desember 2019	Informasi Kupon	

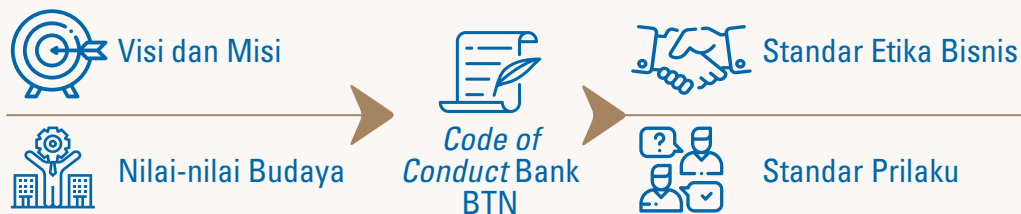


KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Bagi Perseroan, Kode Etik merupakan perwujudan komitmen perusahaan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada best practice lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan menjalankan aktivitas usaha selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN SEBAGAI FONDASI KODE ETIK

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



VISI

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

MISI

1. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
2. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan Keluarga.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.
4. Menyiapkan dan mengembangkan *human capital* yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
5. Meningkatkan *shareholder value* dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
6. Memedulikan kepentingan masyarakat, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)

NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN



Sinergi

Membangun kerja sama yang sinergis dengan seluruh stakeholders dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

Integritas

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

Inovasi

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.

Profesionalisme

Visioner, kompeten di bidangnya, selalu mengembangkan diri dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik.

Spirit Mencapai Keunggulan

Menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil terbaik serta memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan pentingnya aspek kualitas disetiap kegiatan serta risiko yang telah diperhitungkan.



SINERGI

- Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
- Saling percaya dan menghargai



INTEGRITAS

- Konsisten dan disiplin
- Jujur dan berdedikasi



INOVASI

- Tanggap terhadap perubahan
- Kreatif dan Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah



PROFESIONALISME

- Kompeten, intrapreneurship dan bertanggung jawab
- Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil



SPIRIT MENCAPAI KEUNGGULAN

- Antusias, proaktif dan pantang menyerah
- Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan



ISI CODE OF CONDUCT

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan

terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

01. Pendahuluan

Code of Conduct ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis.

Implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, *Code of Conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan *Code of Conduct* yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan adalah Perseroan yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

02. Standar Etika Bisnis

1. Etika Bank dengan Pegawai
Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank.
2. Etika Bank dengan Nasabah
Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah.
3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa
Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok.
4. Etika Bank dengan Pesaing
Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Etika Bank dengan Mitra Kerja
Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.
6. Etika Bank dengan Pemerintah
Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Etika Bank dengan Masyarakat
Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Etika Bank dengan Media Massa
Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.
9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi
Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)

03. Kebijakan Standar Prilaku	1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. 2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan. 3. Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Bank.
04. Penerapan dan Penegakan	Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada <i>Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division</i> dan identitas pelapor dilindungi. <i>Human Capital manajemen & Culture Specialist Division</i> menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

PERNYATAAN PEMBERLAKUKAN *CODE OF CONDUCT* BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEGAWAI

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Pengurus (dhi. Dewan Komisaris, Direksi) serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh stakeholders. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap

Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

PENYEBARLUASAN *CODE OF CONDUCT*

Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh insan Perseroan dan *Stakeholders* melalui media internet Perseroan yang dinamakan *Access Internal Management Standrad* (AIMS) dan website yang dapat diakses dengan mudah setiap saat. Perseroan juga telah melaksanakan sosialisasi kepada perwakilan *Change Agent* dari seluruh unit kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh insan Perseroan melalui kegiatan sosialisasi *anti fraud* yang dilakukan di Kantor Pusat maupun Regional Office. Perseroan juga telah melakukan program *awareness Code of Conduct* dan Pengendalian Gratifikasi melalui kegiatan *compliance quiz* yang diikuti oleh insan Perseroan.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN *CODE OF CONDUCT*

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2019, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam

menerapkan dan menegakan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
2. Sosialisasi *Code of Conduct* dan Pengendalian Gratifikasi melalui kegiatan *Anti Fraud*;
3. Bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan *Code of Conduct*;
4. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari



- seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
5. Penyampaian Surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada *Stakeholder* Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
 6. Penggunaan PIN "Tolak Gratifikasi" oleh setiap insan Perseroan;
 7. Pembuatan *micro learning program* pengendalian gratifikasi melalui media Smartshare Perseroan;
 8. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS); dan
 9. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.

JENIS SANKSI CODE OF CONDUCT

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif
 - a. Kategori Ringan, yaitu: teguran lisan; teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah 3 (tiga) bulan.
 - b. Kategori Sedang, yaitu: tidak mendapatkan uang cuti; tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala dan penurunan *Person Grade* sebanyak 1 (satu) grade (gaji dasar menyesuaikan). Masa berlakunya sanksi pembinaan pegawai adalah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Kategori Berat, yaitu: penurunan *person grade* sebanyak minimal 2 grade (gaji dasar menyesuaikan); pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah selama 2 (dua) tahun.
2. Sanksi Finansial
Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

JUMLAH PELANGGARAN CODE OF CONDUCT DAN TREN KUALITAS PENERAPAN KODE ETIK

Pada tahun 2019 jumlah pelanggaran *Code of Conduct* sebanyak 250 pengenaan sanksi, yaitu: sanksi ringan sebanyak 48 orang, sanksi sedang sebanyak 158 orang, sanksi berat sebanyak 44 orang.

Tren kualitas penerapan Kode Etik dapat dilihat melalui perkembangan jumlah pelanggaran *Code of Conduct* seperti terlihat pada tabel dan bagan di bawah ini.

TREN KUALITAS PENERAPAN KODE ETIK

Kategori Sanksi	2019	2018	2017
Ringan	48	77	125
Sedang	158	37	67
Berat	44	27	65
Total	250	141	257



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagi Perseroan, pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan menjalankan kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Di sisi lain, Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Bank BTN dalam mendukung pemberantasan korupsi dimulai sejak tanggal 25 Juni 2014, bekerja sama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Bank BTN. Berdasarkan komitmen tersebut, tahun 2015 Bank BTN telah mempunyai pedoman *intern* serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Untuk mendukung pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi, Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/CMPD/2017 perihal Petunjuk Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Gratifikasi;
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi;
3. Kategori Gratifikasi;
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi;
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi; dan
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.



Bertepatan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang diselenggarakan oleh KPK, Bank BTN memperoleh penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018. Adapun yang menjadi kriteria penilaian antara lain adanya

kelengkapan perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi termasuk komitmen, aturan dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Inovasi sosialisasi internal, eksternal dan proses pelaporan serta mutu pengelolaan; kuantitas dan kualitas laporan gratifikasi.



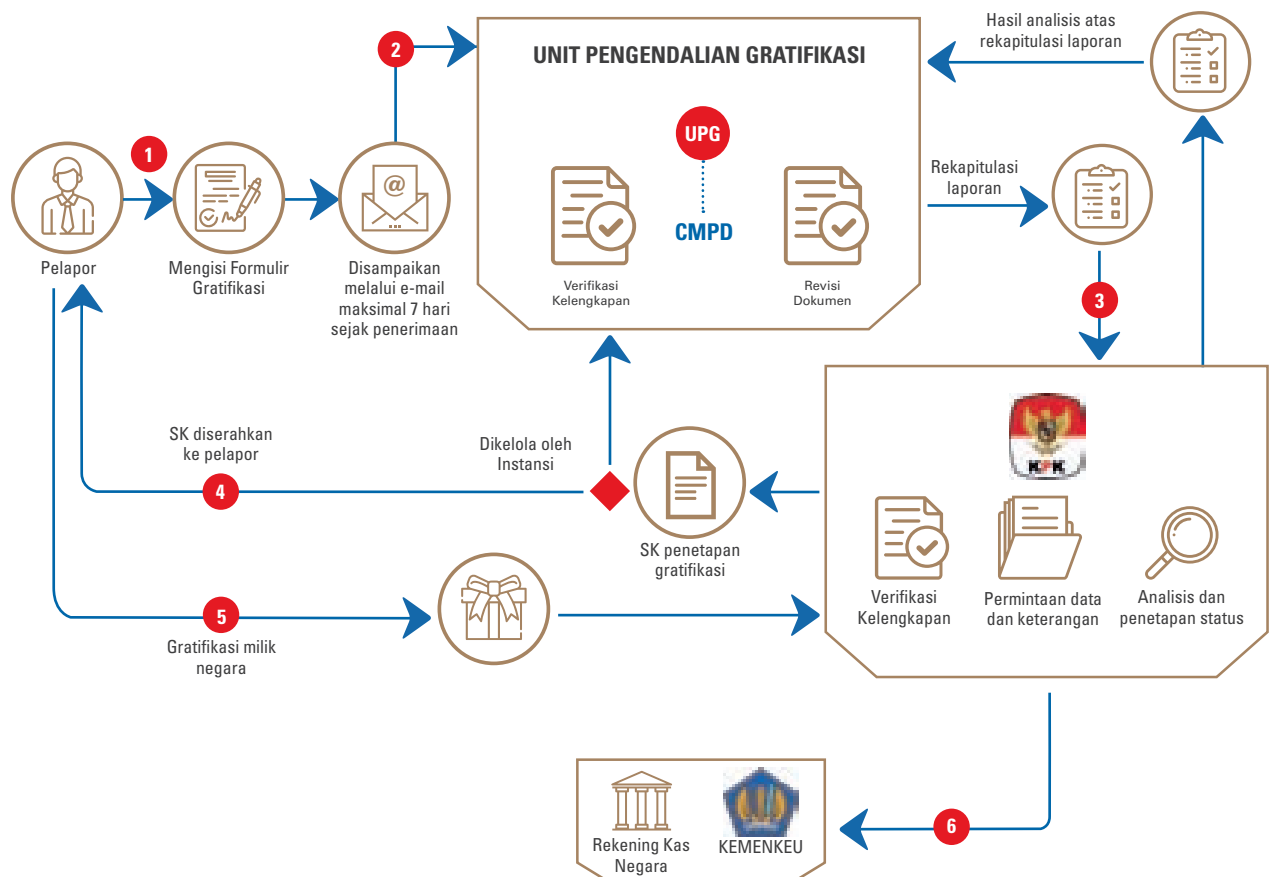
Dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi, pada tanggal 13 Agustus 2019 bersamaan dengan acara implementasi *Integrated Governance Risk and Compliance* (iGRC), seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris mendeklarasikan budaya anti korupsi. Disamping itu Bank BTN juga melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi.
Sampai dengan saat ini terdapat 8 (delapan) peserta yang telah mengikuti ujian sertifikasi API dan telah dinyatakan kompeten oleh KPK.
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi
Bank telah melakukan penayangan film KPK melalui beberapa videotron Bank yang terletak di Menara BTN-Kantor Pusat Bank BTN, Bank BTN Kantor Cabang Solo, SCBD Jakarta, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Polrestabes Bandung Jawa Barat
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).
Bank telah melengkapi dan menyampaikan Panduan Pencegahan Korupsi (CEK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana yang terlihat dalam alur berikut:



Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMPD) dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: upg.btn@btn.co.id Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;

- b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
- c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir '1'.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.

3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK



dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.

4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/ pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola

oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Bank.

5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG,
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PAKTA INTEGRITAS

Perseroan memiliki program Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program pengendalian gratifikasi.

(Hakordia 2019) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2019 dengan penyampaian message tentang tema Hakordia 2019 "Maju Lawan Korupsi" dan pencegahan korupsi kepada seluruh pegawai dan masyarakat melalui beberapa media berikut:

- a. Email Blast;
- b. SMS Blast;
- c. Penayangan anti korupsi melalui beberapa LED Videotron Bank BTN; dan
- d. Sosial media (instagram, facebook dan twitter).

PROGRAM AWARENESS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Himbauan kepada nasabah tentang larangan pemberian gratifikasi kepada Pegawai Bank BTN melalui penayangan *running text* tentang larangan gratifikasi di layar monitor *Banking Hall* di Kantor Cabang.
2. *Awareness* dan sosialisasi tentang larangan gratifikasi dan suap melalui berbagai media seperti videotron yang ditayangkan di setiap lift kantor pusat serta media *Knowledge Management System (KMS) Smartshare*; media poster dan banner serta dilakukan evaluasi melalui tes pemahaman tentang gratifikasi dan suap kepada seluruh pegawai.
3. Melakukan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019

Mengedarkan himbauan kepada seluruh unit kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang serta memasang pemberitahuan pada surat kabar dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, untuk wajib menolak/tidak menerima/ meminta/memberi gratifikasi dari/ke siapapun (rekanan/ debitur/notaris/mitra kerja) dalam bentuk uang, bingkisan, parcel maupun fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya serta dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik (*code of conduct*) Bank, menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/ tidak wajar.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



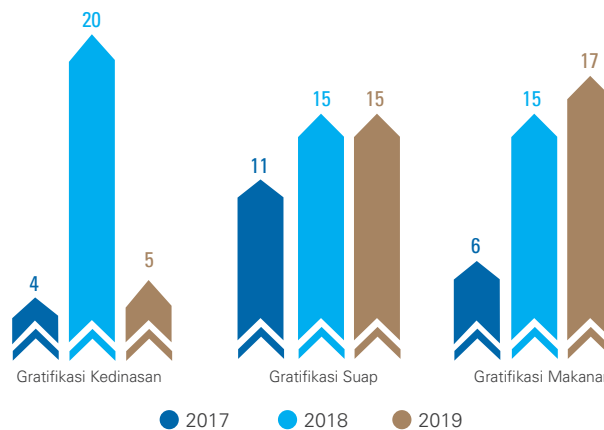
Laporan Keuangan Audited

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

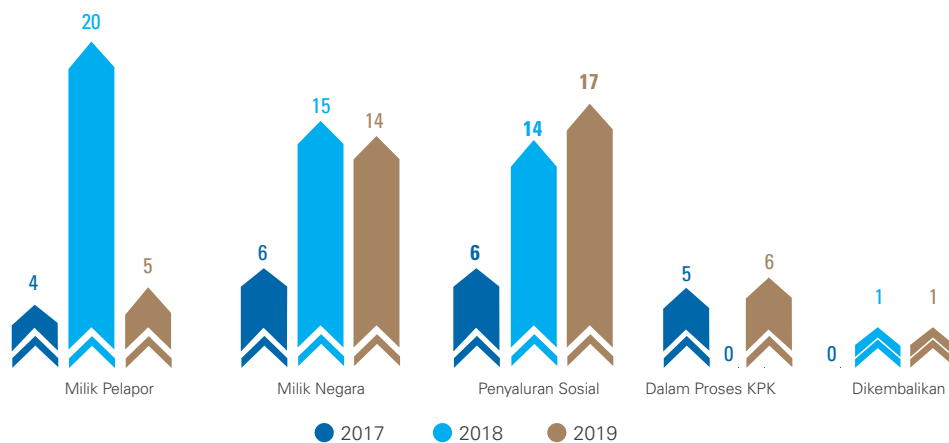
LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Selama periode tahun 2019, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 37 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan maupun gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan.

LAPORAN GRATIFIKASI ATAS DASAR JENIS GRATIFIKASI



LAPORAN GRATIFIKASI ATAS DASAR STATUS KEPEMILIKAN





KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengadaan. Kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan proses Tata Kelola Perusahaan yakni transparansi dalam hal pengadaan, dimana proses pengadaan dilakukan melalui proses tender dengan memperhatikan beberapa aspek di antaranya aspek keterbukaan, menghindari benturan kepentingan, efisiensi, serta Fokus pada tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang atau jasa terbaik. Kegiatan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan yang menjadi pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non- strategis untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko.

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan menjalankan proses pengadaan dengan tujuan dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung kegiatan bisnis. Karena itu, Perseroan melaksanakan proses pengadaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:

Efektif	Kegiatan <i>Procurement</i> harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Perseroan.
Efisien	Kegiatan <i>Procurement</i> dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan, dengan waktu yang telah disepakati pada tingkat harga yang terbaik
Terbuka dan Bersaing	Pelaksanaan <i>Procurement</i> harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
Transparan	Semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan <i>Procurement</i> , termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa bersifat terbuka
Adil dan Tidak Diskriminatif	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun
Akuntabel	Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan
Tanggung jawab	Proses <i>procurement</i> dilaksanakan secara hati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Independen	Keputusan <i>procurement</i> diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan berupaya mewujudkan kegiatan pengadaan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan dengan mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi pada Unit Pelaksana Pengadaan yaitu, unit yang melakukan seleksi calon rekanan/vendor, unit yang melakukan proses pengadaan, unit yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri; dan Unit Kerja Kepatuhan.
2. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi internal dan eksternal.
3. Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan serta pengukuran risiko operasional.
4. Berpedoman pada Budaya Kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan mematuhi Code of Conduct serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, dalam rangka menjaga proses pengadaan berjalan dengan baik tidak mengandung benturan kepentingan dan bersih dari praktek korupsi pejabat pelaksana pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prosedur dan tahapan pengadaan barang dan jasa yang diberlakukan di lingkup Perseroan dijelaskan sebagai berikut.

SKEMA PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

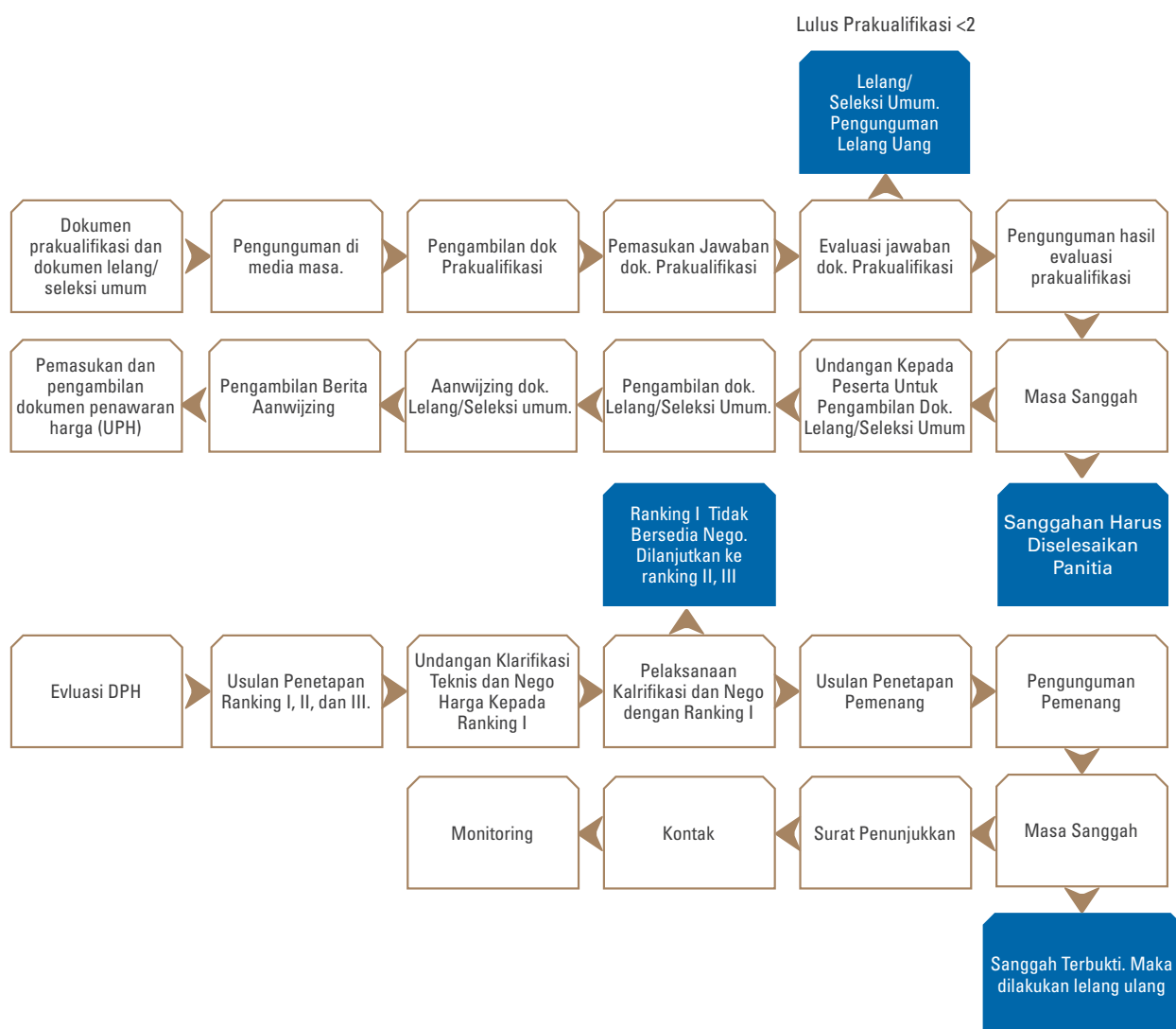




Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui:

1. Pelelangan, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,-.

ALUR PROSES PELELANGAN





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

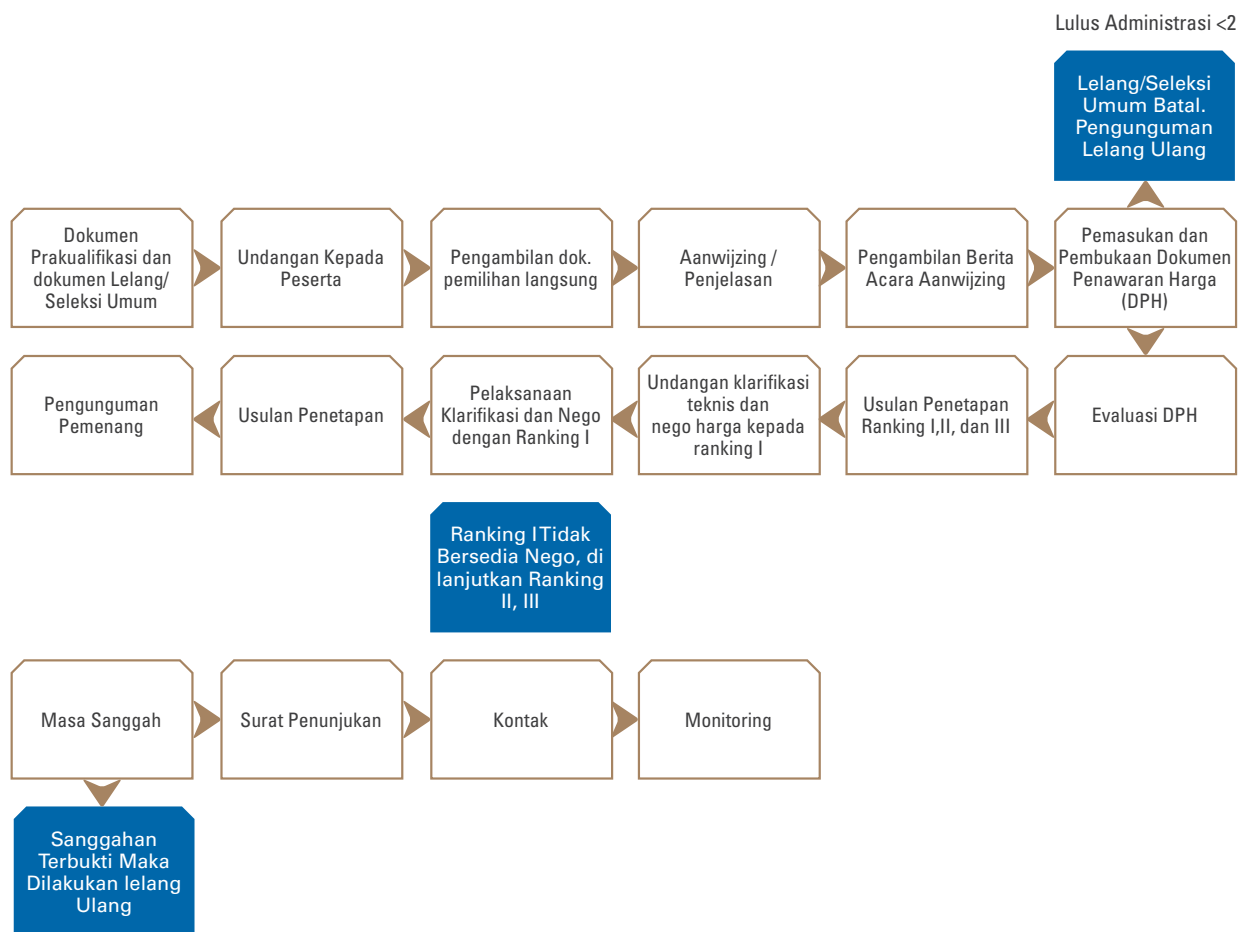


Laporan Keuangan Audited

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Pemilihan Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp2.500.000.000,-.

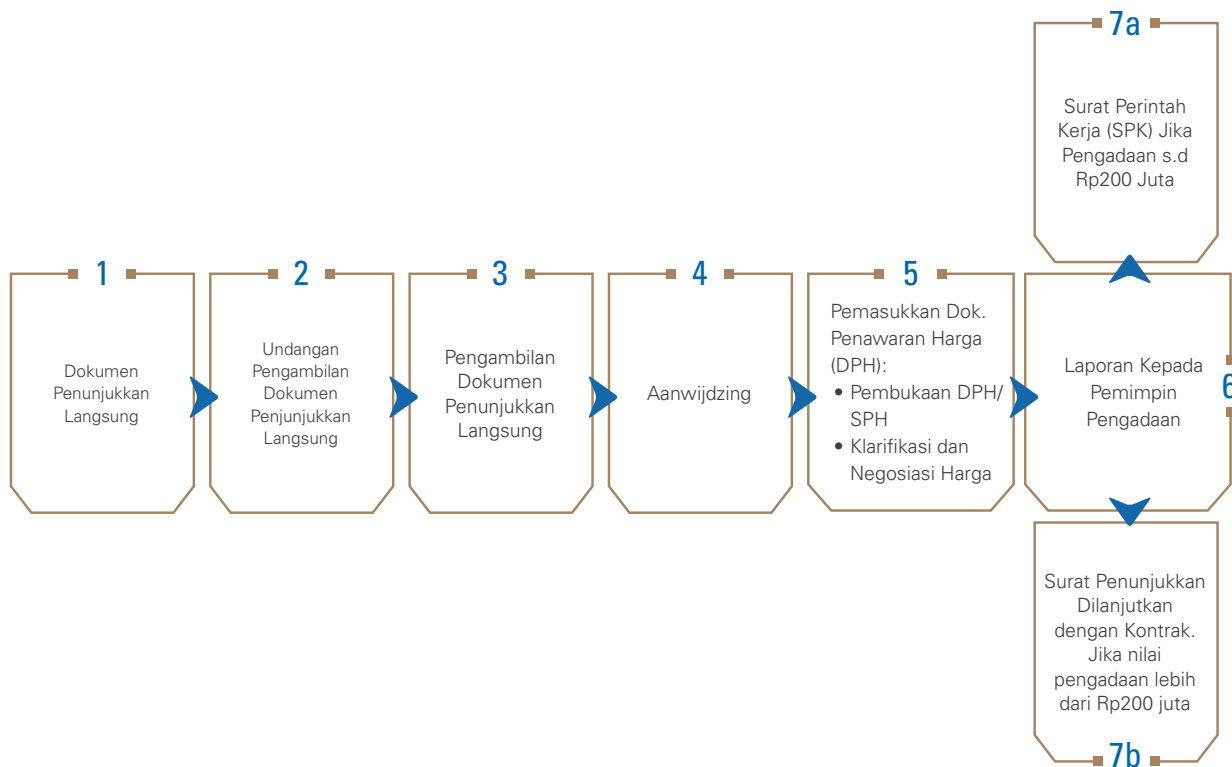
ALUR PROSES PEMILIHAN LANGSUNG





3. Penunjukkan Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,-.

ALUR PROSES PENUNJUKKAN LANGSUNG



PENGELOLAAN REKANAN

Perseroan menetapkan rekanan harus memenuhi kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing unit pengguna jasa dan sesuai dengan kebijakan. Perseroan melakukan standarisasi dan program yang dapat mengoptimalkan kualitas rekanan dalam bekerja sama dengan Perseroan melalui kegiatan sebagai berikut:

Assessment terhadap Rekanan Assesment dilakukan

terhadap rekanan dengan variabel penilaian meliputi *quality*, *delivery*, *flexibility*, *responsiveness*, *price* dan pelanggaran. Dari vendor yang dikelola PGSD didapat kriteria sebagai berikut:

1. *Vendor Excellence* : 32%
2. *Need Improvement* : 3%
3. *Good Vendor* : 65%



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, nilai total pengadaan belanja modal yang dikelola *Procurement and General Service Division* adalah sebesar Rp475,9 miliar yang secara umum mencakup pengadaan terkait tanah, pembangunan/renovasi bangunan, mesin kantor, perabot kantor dan rumah dinas.

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selama tahun 2019, tidak ada temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Perseroan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa Perseroan senantiasa dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa telah dijalankan dengan baik. Kegiatan tersebut salah satunya dilakukan melalui audit secara berkala maupun sewaktu-waktu, baik audit internal maupun eksternal.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISTLEBLOWING SYSTEM

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI No. 11/23/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP mengenai Kebijakan Anti Fraud. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran atau penyimpangan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang secara signifikan berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis atau mengancam keselamatan individu Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Semua tindakan melanggar hukum pidana, (misalnya pencurian, penipuan, penggunaan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya);
2. Penyalahgunaan wewenang dalam melayani nasabah ataupun vendor atau pemasok lainnya (misalnya penundaan pembayaran tidak beralasan, pemerasan, dan lain sebagainya);
3. Pelanggaran peraturan Perbankan yang diatur dalam No. UU No. 10/1998 jo UU No. 7/1992, antara lain tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, membuka rahasia nasabah kepada yang tidak berhak, melakukan pencatatan yang tidak benar, meminta uang atas jasa pelayanan perbankan yang dilakukan, dan lain sebagainya;
4. Pelanggaran peraturan perpajakan, atau aturan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK;
5. Perbuatan yang dapat merugikan Perseroan, baik finansial maupun non-finansial, termasuk menciderai citra Perseroan;
6. Pelanggaran aturan internal (SOP), yang dapat menciderai integritas pelaporan perusahaan, baik di bidang keuangan ataupun bidang lainnya.
7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
8. Perbuatan pelanggaran berat terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Pegawai

SOSIALISASI WBS

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* – WBS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi sharing session secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh stakeholders Perseroan, sosialisasi Whistle Blowing System juga dilakukan melalui website Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN DAN SALURAN WBS

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah pegawai, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada Tim WBS.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISTLEBLOWING SYSTEM

2. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Tim WBS, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama.
 3. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Dewan Komisaris.
 4. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama.
- Perseroan juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media:
1. Tim *Whistleblowing System* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - a. PO Box *Whistleblowing System* (WBS) BTN Jakarta 10000
 - b. Email: wbs.btn@btn.co.id
 - c. SMS / Telepon: 0811-92-45678
 2. Direktur Utama apabila terlapor adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya:
 - a. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - b. PO Box *Whistleblowing System* (WBS) BTN Jakarta 10000
 3. Dewan Komisaris apabila terlapor adalah anggota Direksi atau keluarganya:
 - a. Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - b. PO Box *Whistleblowing System* (WBS) BTN Jakarta 10000

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, email) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

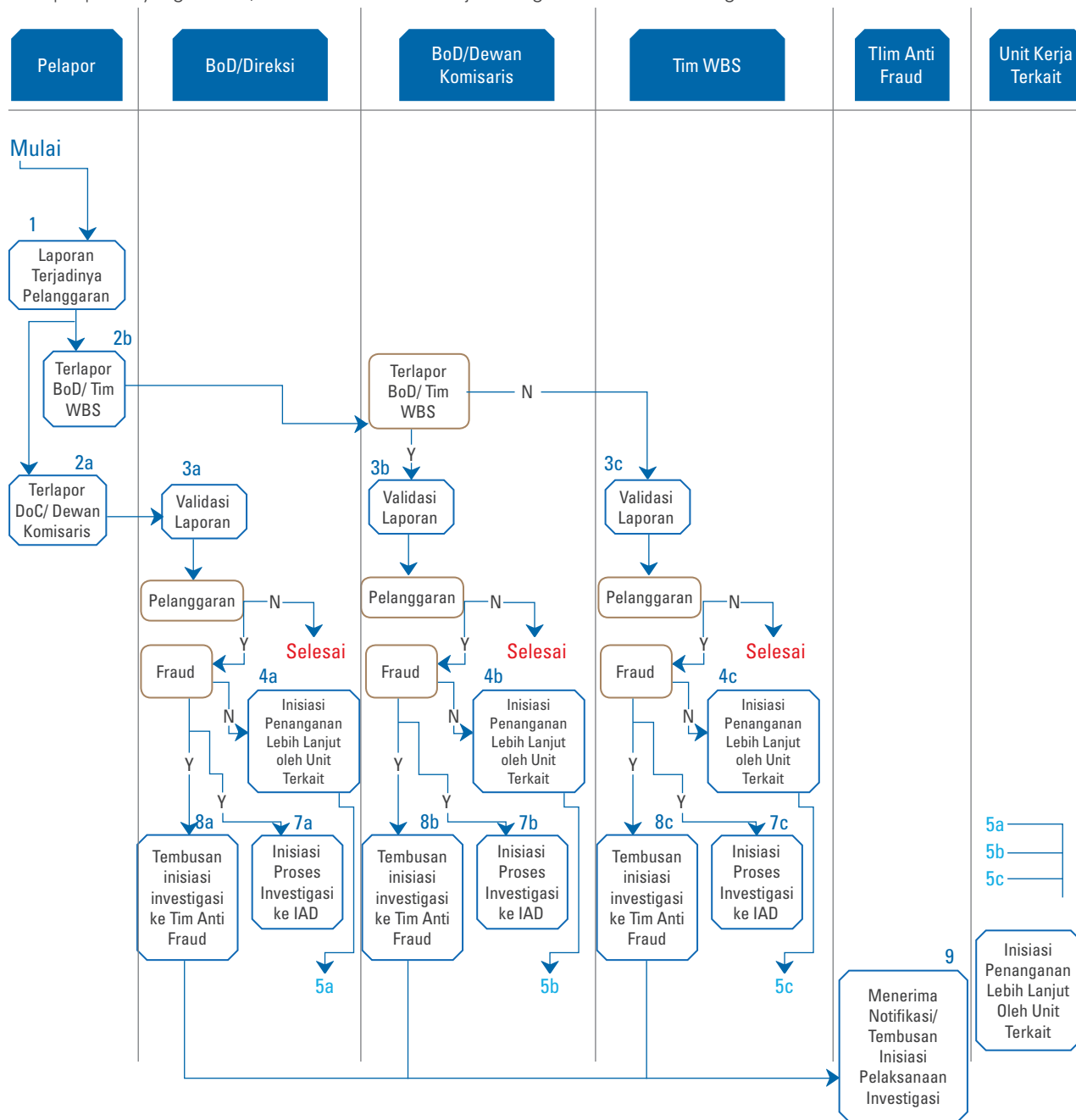
TIM PENGELOLA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WBS

Perseroan membentuk Tim WBS yang mengelola seluruh pengaduan laporan WBS yang terdiri dari:

1. Kepala Internal Audit Division
2. Unit Pengelola WBS (Sekretaris)
3. Kepala Compliance & Governance Division (Anggota)
4. Kepala Human Capital Management Division & Culture Specialist Division (Anggota)
5. Kepala Enterprise Risk Management Division (Anggota)



Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



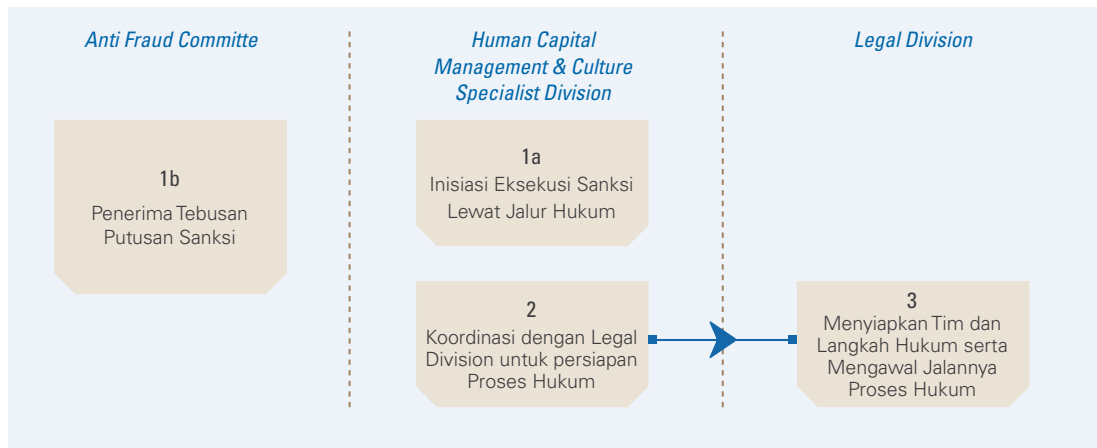
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



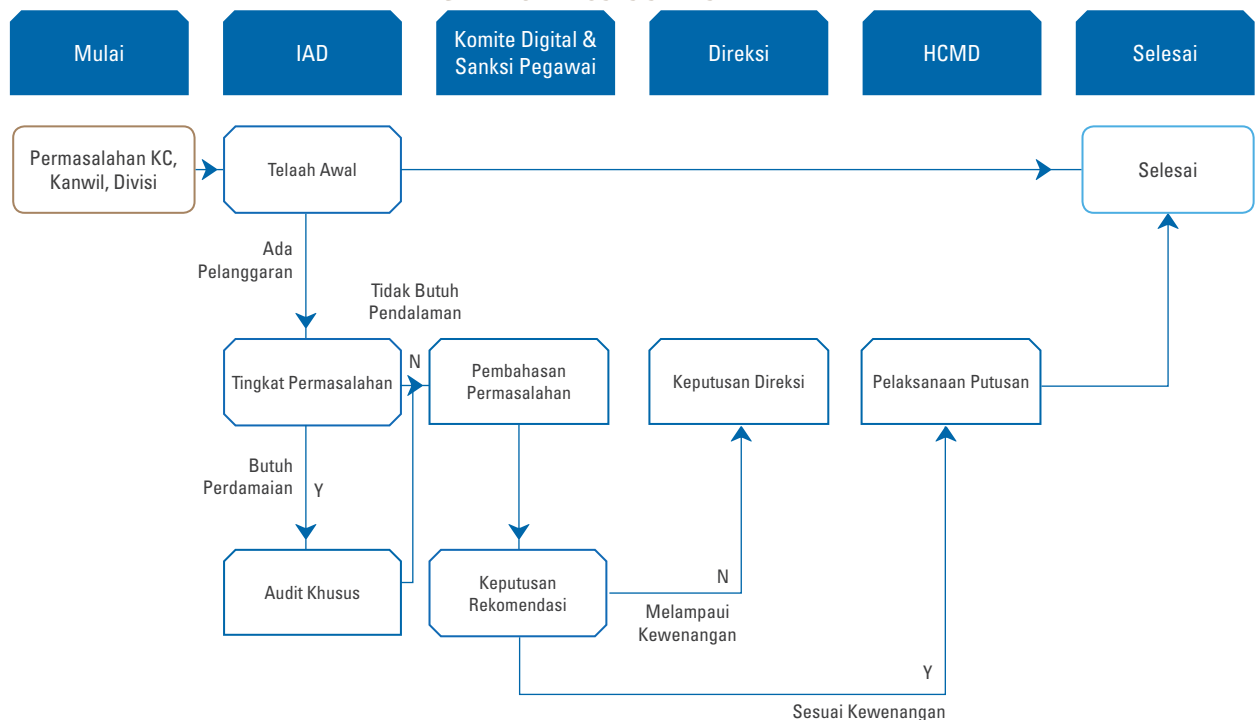
Laporan Keuangan Audited

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISTLEBLOWING SYSTEM

BAGAN ALUR PROSES SANKSI–JALUR HUKUM



BAGAN ALUR PROSES SANKSI PADA BANK





JUMLAH PELAPORAN DAN PENANGANAN WBS TAHUN 2019

Pengaduan yang masuk selama periode 2019 berjumlah 90 pengaduan yang terdiri dari 15 pengaduan melalui Surat/ PO BOX, 26 pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung dan 49 pengaduan melalui Email. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, sebanyak 80 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 10 pengaduan diteruskan ke

proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus). Per 31 Desember 2019, dari 10 pengaduan tersebut, sebanyak 8 (delapan) pengaduan masih dalam proses baik proses audit, pembuktian laporan maupun proses lintas divisi; sedangkan 2 (dua) pengaduan lainnya telah terbukti dan telah diberikan sanksi kepada yang bersangkutan sebagai pihak terlapor.

Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/HP/ Datang Langsung	E-mail	Laporan Ditutup (Tidak Terbukti)	Laporan Masih Dalam Proses (Proses Audit Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan Telah Diberikan Sanksi (Termasuk Sanksi Administratif)	Laporan Diteruskan Kepada Penyidik (Terkait Tindak Pidana Umum atau Korupsi)
2019	15	26	49	80	8	2	-
2018	1	-	5	-	-	6	-
2017	1	-	4	-	-	5	1
2016	5	2	1	-	-	8	-
2015	7	3	9	7	-	12	1



TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)



KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA UUS

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan kinerja terutama pada UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada prinsip syariah dan berlandaskan kepada lima prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Ketetapan Direksi No. 02/KD/DIR/SPMD/2015 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.
6. Anggaran Dasar Perseroan.



Pelaksanaan Tata Kelola UUS di Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

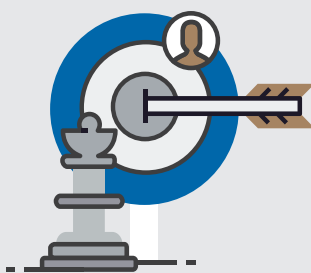
1. **Transparansi:** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Bank yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. **Pertanggungjawaban:** yaitu pengelolaan Bank yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. **Profesionalisme:** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. **Kewajaran:** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan stakeholders berdasarkan perjanjian peraturan perundangundangan yang berlaku.

VISI DAN MISI UUS



VISI

“Menjadi Bank Syariah yang terdepan dalam pembiayaan perumahan dan industri kaitannya”



MISI

- 1 Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah.
- 2 Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan Good Corporate Governance dan Compliance.
- 3 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi terkini.
- 4 Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



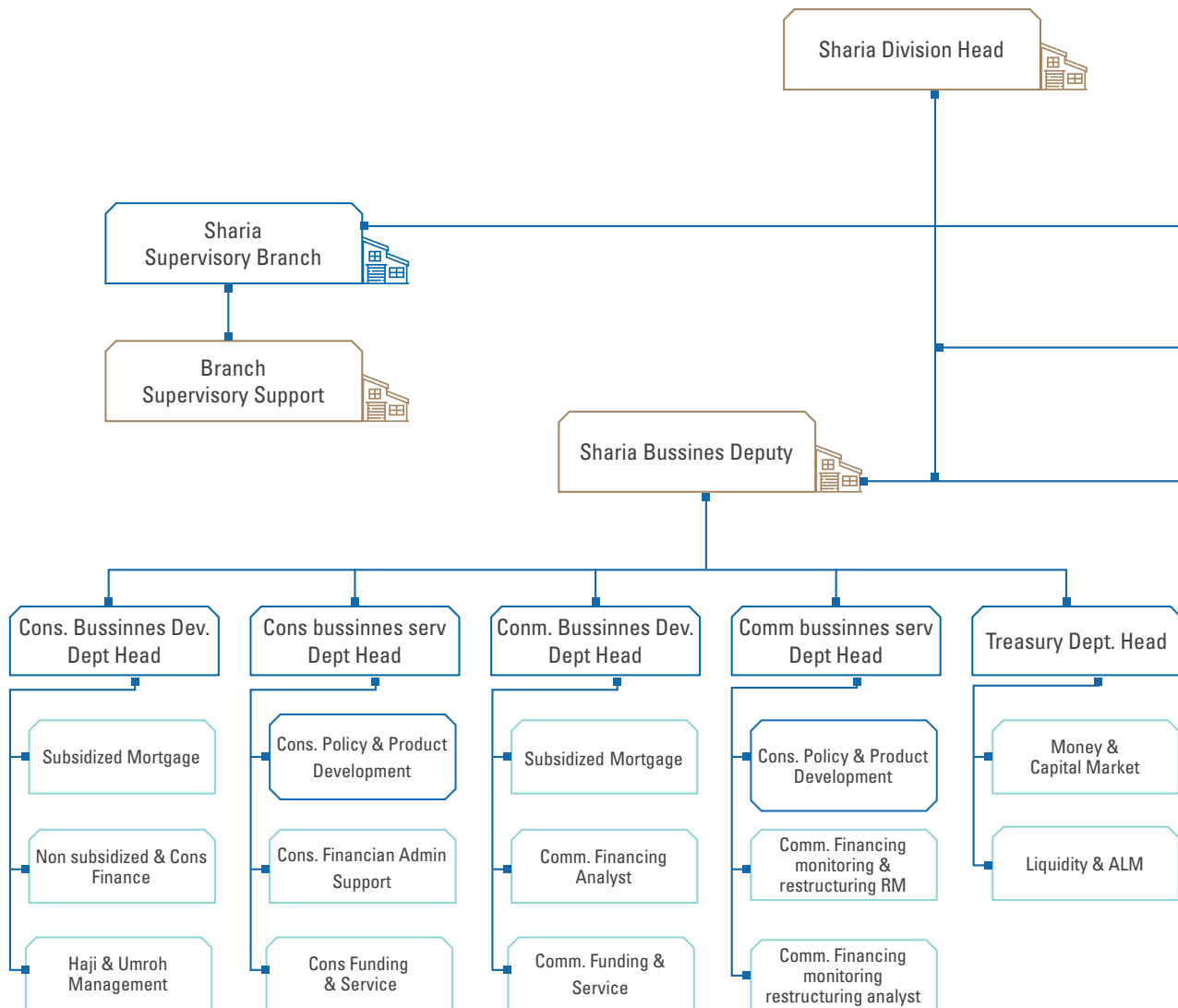
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

halaman ini sengaja dikosongkan

**STRUKTUR UNIT USAHA SYARIAH**

Dalam menjalankan UUS, Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan dikelola oleh Direktur UUS dan dibentuk 1 (satu) Divisi di Kantor Pusat dengan penyediaan jaringan layanan berupa Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Kas Syariah (KKS) dan Syariah *Office Channeling*.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

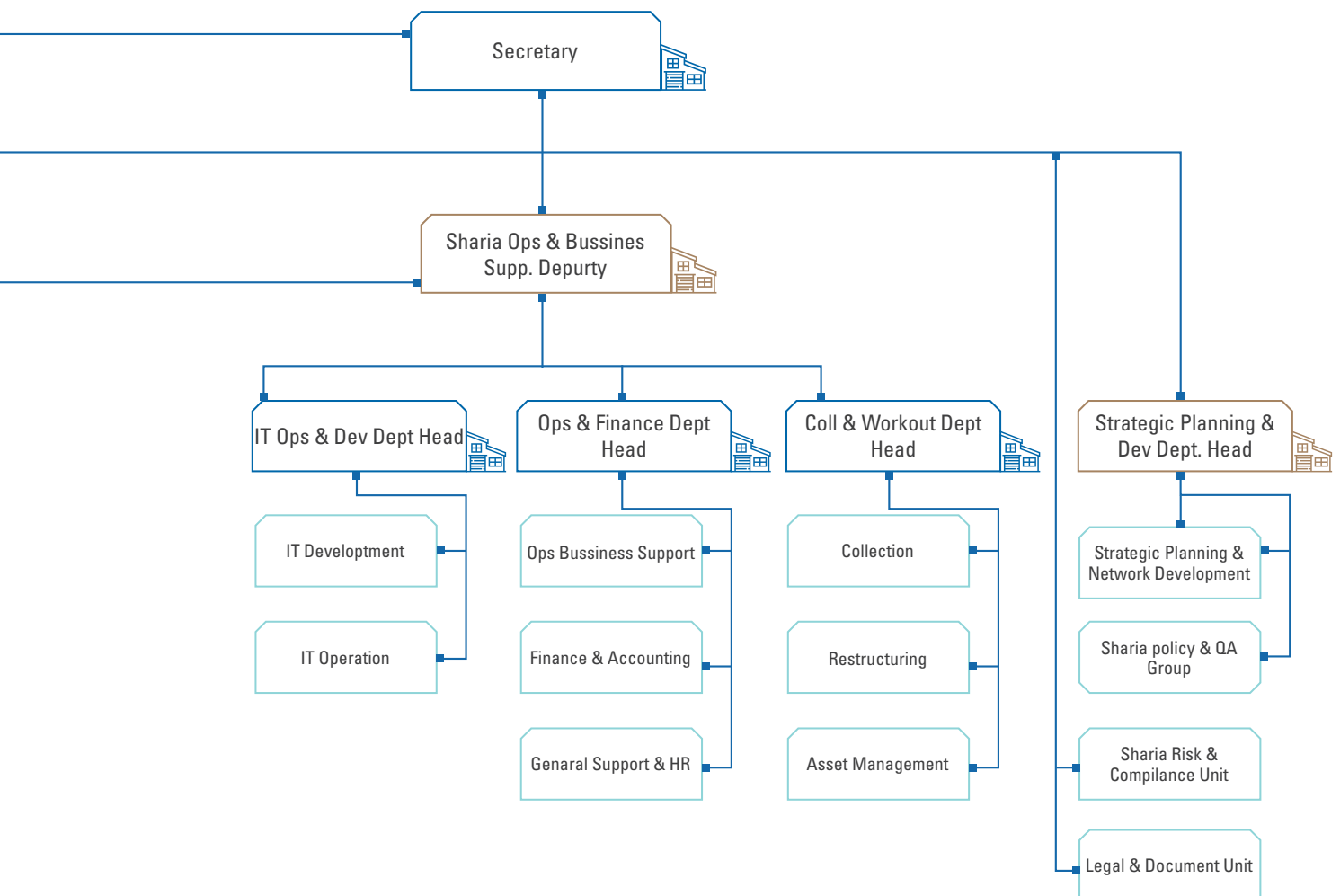


Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)





DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ tata kelola UUS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah. Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Perseroan harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DPS

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013, di mana Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan.

Di sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pergantian DPS. Dengan demikian jumlah, susunan dan komposisi DPS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 adalah sama.

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DPS

Perseroan mengangkat dan memberhentikan DPS melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013, di antaranya sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
6. Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud;
7. Calon Anggota DPS yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan diangkat oleh Perseroan dalam RUPS paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan;
8. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

- Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan; dan
- Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Profil ringkas Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dijelaskan pada bab Profil Dewan Pengawas Syariah dalam laporan tahunan ini.

PEDOMAN KERJA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya DPS mengacu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

INDEPENDENSI DPS

DPS UUS Perseroan berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

Aspek Independensi	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA
Memiliki hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham	×	×	×
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham	×	×	×
Memiliki Rangkap Jabatan baik sebagai konsultan, anggota Direksi maupun sebagai anggota DPS.	×	×	×

✓ = memiliki | × = tidak memiliki

RANGKAP JABATAN DPS

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	- Ketua DPS UUS Bank BTN - Ketua DPS UUS CIMB Niaga

**RANGKAP JABATAN DPS**

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA,MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	• Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan) • Anggota DPS BSM (perbankan) • Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi) • Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi) • Anggota DPS PT BRIngin Life Syariah
Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	• Anggota DPS UUS Bank BTN • Anggota DPS pada BRI Syariah • Ketua merangkap Anggota DPS pada Manulife Asset Management Indonesia • Ketua DPS pada Asuransi Astra Buana

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DPS

1. Rapat DPS

Rapat DPS ini dilakukan sebagai salah satu media implementasi fungsi dan tanggung jawab DPS untuk pemberian opini syariah terhadap produk baru, untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Rapat DPS mengacu Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam pelaksanaannya Rapat DPS dijadwalkan dilakukan secara berkala 1 kali dalam sebulan. Seluruh keputusan dalam rapat DPS Perseroan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Risalah rapat DPS Perseroan diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, DPS Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran DPS, sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Frekuensi (%)
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	10	9	90,00%
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA,MH	10	9	90,00%
Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA	10	10	100,00%

2. Pendapat DPS Terkait pelaksanaan kepatuhan syariah

Pada tahun 2019, DPS UUS Perseroan telah melakukan 9 (sembilan) kali rapat dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan Perseroan dan mengeluarkan pendapat dan opini sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu terkait pelaksanaan kepatuhan syariah dengan daftar pendapat dan opini, berdasarkan hasil notula rapat DPS bersama UUS Perseroan, sebagai berikut:

Tanggal	Perihal
10 Januari 2019	Penyusunan Draf Materi Laporan Pengawasan DPS Semester II 2018.
4 Februari 2019	Finalisasi Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II 2018.
22 Februari 2019	• Penyerahan Pembiayaan Bermasalah Komersil dan Konsumer kepada <i>Asset Management Division</i> (AMD). • <i>Income Smoothing</i>.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Tanggal	Perihal
4 Maret 2019	• <i>Corporate Financing</i> dan <i>Pre Approval Line (Line Facility)</i>. • Pembiayaan Lunak Pegawai (PLP).
28 Maret 2019	• Pembahasan Surat Edaran (SE) tentang Restrukturisasi. • Pemutus Pembiayaan pada Kantor Wilayah. • Tindak lanjut atas pemberlakuan Qanun Aceh. • General Insurance dan <i>Spin Off</i>.
13 Mei 2019	Rapat bersama dengan Direktur Kepatuhan, Direktur Supervisi Syariah, CMGD, TMO dan SHAD terkait beberapa aktivitas kantor
14 Oktober 2019	• Paparan Kinerja UUS Bank BTN per September 2019. • Pelaksanaan Atas Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2019. • Penggunaan Peraturan/Kebijakan Bank BTN Induk untuk dipergunakan oleh UUS Bank BTN sesuai PD No. 01/PD/DSYA/2005 tanggal 14 Februari 2005. • Kebijakan penurunan margin untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. • Temuan Audit terkait mekanisme Pencatatan Uang Muka Pembiayaan KPR akad Murabahah belum sesuai PAPS No. 15/26/DpbS tanggal 10 Juli 2013.
11 November 2019	• Paparan Kinerja UUS Bank BTN per Oktober 2019. • Rencana Aktivitas produk Asuransi Wakaf Generali. • Rencana Penerbitan Sukuk yang diterbitkan oleh BTN Induk. • Penyampaian terkait dengan Pembuatan Piagam DPS
3 Desember 2019	Diskusi terkait dengan masyarakat anti riba
17 Desember 2019	• Paparan Kinerja UUS Bank BTN per November 2019. • Laporan Perkembangan Pelaksanaan Qanun Aceh. • Penyusunan Draft Piagam DPS.

3. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip DPS Perseroan melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Perseroan dilakukan terhadap produk yang telah ada, sebagai berikut:

Aktivitas Pengawasan DPS	Mekanisme Pengawasan	Frekuensi
Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perseroan 2. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi	• Pemberian opini terhadap produk baru pada tahun 2019 belum ada • Pemberian pendapat terkait aktivitas pekerjaan sehari-hari sebanyak 8 (delapan) pendapat



Aktivitas Pengawasan DPS	Mekanisme Pengawasan	Frekuensi
Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank	- Melakukan <i>review</i> atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik ke Kantor Cabang Syariah - Menyusun Laporan Hasil Uji Petik atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik di Kantor Cabang Syariah - Menyusun Laporan Semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil laporan pengawasan pemenuhan prinsip syariah pada UUS Bank BTN - Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas Syariah	- Dilakukan pada 5 (lima) Kantor Cabang Syariah - Laporan Hasil Uji Petik DPS di 5 (lima) Kantor Cabang Syariah - Laporan Semester II Tahun 2018 dan Laporan Semester I Tahun 2019 - Pelaksanaan rapat DPS sepanjang tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 10 kali
Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank	Memberikan tanggapan atas materi temuan Internal Audit Division terkait mekanisme Pencatatan Uang Muka Pembiayaan KPR akad Murabahah belum sesuai PAPS No. 15/26/DpbS tanggal 10 Juli 2013	Pemberian tanggapan tersebut, telah dilakukan pada rapat DPS tanggal 14 Oktober 2019
Melakukan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan	Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun	Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019

4. Pengembangan Kompetensi DPS

DPS secara berkala meningkatkan kompetensi bagi seluruh jajarannya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas DPS melalui program pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan. Sepanjang tahun 2019, anggota DPS Perseoran telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

Nama	Jabatan	Program Pengembangan
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSN MUI Tahun 2019, Oktober 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	- Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSN MUI Tahun 2019, Oktober 2019 - Pemateri dalam seminar "Eksistensi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" 13 Februari 2019 The Sharia Insurance Socialization



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Nama	Jabatan	Program Pengembangan
Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA	Anggota	Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSN MUI Tahun 2019, Oktober 2019

5. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah
Selama tahun 2019, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Perseroan dilakukan terhadap produk yang telah ada, sebagai berikut:

Kegiatan Operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perseroan 2. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi	• Pemberian opini terhadap produk baru pada tahun 2019 belum ada • Pemberian opini terkait aktivitas pekerjaan sehari-hari sebanyak 8 (delapan) opini
Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank	1. Melakukan <i>review</i> atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik ke Kantor Cabang Syariah 2. Menyusun Laporan Hasil Uji Petik atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik di Kantor Cabang Syariah 3. Menyusun Laporan Semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil laporan pengawasan pemenuhan prinsip syariah pada UUS Bank BTN 4. Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas Syariah	• Dilakukan pada 5 (lima) Kantor Cabang Syariah • Laporan Hasil Uji Petik DPS di 5 (lima) Kantor Cabang Syariah • Laporan Semester II Tahun 2018 dan Laporan Semester I Tahun 2019 • Pelaksanaan rapat DPS sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 10 kali
Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank	Memberikan tanggapan atas materi temuan Internal Audit Division terkait mekanisme Pencatatan Uang Muka Pembiayaan KPR akad Murabahah belum sesuai PAPS No. 15/26/DpbS tanggal 10 Juli 2013	Pemberian tanggapan tersebut, telah dilakukan pada rapat DPS tanggal 14 Oktober 2019
Melakukan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan	Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun	Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019

REMUNERASI DAN FASILITAS DPS

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi DPS adalah sebagai berikut:

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota DPS yang ditetapkan RUPS Perseroan adalah gaji dan bonus/tantiem.



2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota DPS, jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

No	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (2019)	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3 orang	Rp1.423
2	Fasilitas Lainnya		
	• Yang dapat dimiliki	-	
	• Yang tidak dapat dimiliki	-	

Jumlah anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran penghasilan, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Pengawas
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	3 orang
Di atas Rp500 juta – 1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-

DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH

PERANAN DIREKTUR UUS

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur UUS yang bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha UUS Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip GCG antara lain dilakukan melalui perencanaan manajemen risiko syariah, menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, temuan audit internal dan auditor eksternal. Direktur UUS pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 27 November 2019 dijabat oleh Bapak Budi Satria yang diangkat berdasarkan surat No.508/DIR/CSD/VII/2017. Selanjutnya Direktur UUS dirangkap oleh Direktur Consumer and Commercial Lending.

KRITERIA DIREKTUR UUS

Direktur UUS Perseroan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Pasal 44 menyebutkan bahwa Direktur UUS

wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS. Sedangkan Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa Calon Direktur UUS wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

KEPALA DIVISI SYARIAH

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Bank BTN
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Bank BTN
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UUS TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, UUS Perseroan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti

- Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan melalui satuan kerja kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada OJK setiap semester.
- Sesuai PD No.01/PD/HCLD/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penyediaan Dana Kepada Debitur Besar (Dana Besar) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disebutkan sebagai berikut:
 - a. Batas (limit) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit dan tingkat penyediaan dana ditetapkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank. Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dan sesuai dengan kebijakan internal Bank tentang pemberian kredit.
 - b. Penyediaan dana dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.
 - c. Penetapan batas (limit) Penyediaan Dana harus dilakukan dengan mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu Penyediaan Dana maupun dampak Penyediaan Dana terhadap kebijakan dan strategi diversifikasi portofolio Bank secara menyeluruh. Penetapan limit terhadap eksposur kepada pihak tertentu, ditetapkan berdasarkan area geografis (*geographic limits*) dan sektor industri tertentu (*certain industries*).
 - d. Analisa dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko kredit terhadap sekumpulan Penyediaan Dana (*pools of provision of funds*) yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan atau jangka waktu. Risiko kredit tersebut diukur antara lain berdasarkan data historis tingkat kegagalan (*historical default rate*) dan perpindahan kualitas Penyediaan Dana (*credit rating migration*) selama periode tertentu.
 - e. Selain melakukan analisa terhadap konsentrasi Penyediaan Dana kepada Peminjam dan sekumpulan Penyediaan Dana sebagaimana dijelaskan di atas, Bank juga harus melakukan analisa terhadap alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio Penyediaan Dana.

**2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**

UUS Perseroan telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, dan akurat melalui situs *web* dan media yang memadai secara transparan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan UUS Perseroan pada tahun buku 2018 dipublikasikan pada beberapa surat kabar, antara lain:

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulanan IV tahun 2018	Media Indonesia, Kontan
Triwulanan I tahun 2019	Bisnis Indonesia, Investor Daily
Triwulanan II tahun 2019	Republika
Triwulanan III tahun 2019	Republika

3. Daftar Konsultan Dan Penasihat UUS

Sepanjang tahun 2019, UUS Perseroan tidak melakukan kerjasama dengan Konsultan.

4. Laporan Penyimpangan Internal UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perseroan yang mempengaruhi kondisi kinerja Perseroan secara signifikan, Perseroan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya internal fraud yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2019, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah internal fraud	0	0	3	4	0	0
Telah diselesaikan	0	0	3	2	0	0
Dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	2	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

Keterangan :

1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus periode Januari – Desember 2019.
2. Jumlah kasus yang “Telah diselesaikan” adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2019.
3. Jumlah kasus yang “Dalam proses penyelesaian di internal bank” adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2019.
4. Jumlah kasus yang “Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum” adalah kasus yang telah terdapat Keputusan Direksi berupa sanksi pidana (proses pelaporan pidana oleh LGD).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**5. Monitoring permasalahan Hukum**

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum terkait operasional Unit Usaha Syariah baik yang bersifat Perdata maupun Pidana. Sepanjang tahun 2019, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Perseroan dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

NO	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	12	-
2	Dalam proses penyelesaian	7	21
Total		19	21

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS Perseroan, selalu mengutamakan Musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Perseroan dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Sepanjang tahun 2019, Sumber dana pendapatan non halal Perseroan antara lain berasal dari denda dan pendapatan non halal seperti jasa bunga, dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARD PERIODE 1 JANUARI 2019 S.D 31 DESEMBER 2019
(DALAM SATUAN ANGKA PENUH)**

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	5.840.420
2	Penerimaan Dana Kebajikan	
	Infak	-
	Sedekah	
	Pengembalian dana kebajikan produktif	
	Denda; dan	-
	Penerimaan non halal	19.550.849
	Total Penerimaan	19.550.849
3	Penggunaan Dana Kebajikan	
	Dana Kebajikan Produktif	
	Sumbangan	
	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	23.280.388
	Total Penggunaan	23.280.388
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan atas Penggunaan	(3.729.539)
5	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	2.110.881



7. Melakukan Self Assessment GCG UUS Tahun Buku 2019

Pada tahun 2019, penilaian penerapan GCG UUS Perseroan dilakukan secara self assessment dengan skor penilaian masing-masing Kriteria sebagai berikut:

Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	0,35	2,00	0,70
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,20	2,00	0,40
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0,10	2,00	0,20
Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depasan inti	0,10	2,00	0,20
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	0,25	2,00	0,50
Total Nilai Komposit	1,00		2,00
Kriteria Angka			2
Predikat			BAIK

Berdasarkan hasil *Self Assessment* yang telah kami lakukan, nilai komposit Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar 2,00 dengan kriteria angka 2 dan predikat "Baik, nilai komposit tersebut sama dengan nilai komposit tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik dan konsisten. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

8. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Sejalan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, Perseroan melalui Direktur Kepatuhan telah melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober tahun 2018, guna memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

9. Pelaporan Risk Management Unit Usaha Syariah

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk risk management tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun di tambahkan 2 jenis resiko yaitu:

- Pengelolaan Risiko Imbal Hasil
Pegawai Divisi Syariah (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Bank menjadi bagian dari

pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS).

Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil dimana Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan hasil assessment dengan parameter/indikator yang digunakan adalah komposisi dana pihak ketiga, Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

laba/pendapatan dan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator yang digunakan *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) mengelola atas Risiko Imbal Hasil.

Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka *Syariah Division* (SHAD) dalam hal ini *Treasury Department* melakukan pengelolaan kebijakan terkait special margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini *Commercial Business Department* dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

Pengelolaan Risiko Investasi adalah risiko pembiayaan yang diberikan dengan nisbah Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank serta sebagai Pedoman bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Mengidentifikasi Risiko Investasi dimana Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha

nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Pengukuran Risiko Imbal Hasil menilai Risiko inheren atas Risiko Investasi menggunakan parameter/ indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Dari ketiga indikator ini yang digunakan *Commercial Business Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko Investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko Investasi Mereview kebijakan Internal Credit Rating antara *Commercial Business Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan *Credit Risk Division* (CRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh *Commercial Business Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.



RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi dikemas dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi perencanaan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun, sementara Rencana Bisnis diwujudkan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berjangka waktu 3 tahun.

Penyusunan RJP dan RBB dilakukan oleh Direksi dan melibatkan unit kerja dengan mekanisme top down dimana Direksi memberikan arahan mengenai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dan bottom up yaitu penyampaian usulan, saran, dan/atau pandangan yang berasal dari unit kerja, baik Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.

Usulan RJP dan RBB diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, RJP dan RBB disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Dewan Komisaris, dan RBB disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pencapaian sasaran kerja tahunan pada RKAP dimonitor setiap bulan oleh Direksi melalui rapat Performance Review, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan sekali setiap bulan.

Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan setiap triwulan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dengan melakukan pembahasan dengan Direksi dan membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.

Dari proses monitoring bulanan, hasil kinerja di-review dan dievaluasi, apabila dirasa perlu untuk perubahan strategi manajemen dan rencana kerja, Direksi mengajukan usulan revisi RBB pada pertengahan tahun buku kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Pada akhir Maret 2018, suku bunga acuan The Fed meningkat 25 bps menjadi 1,75%, hal ini memberikan dampak besar yang bersifat broad based bagi pasar keuangan global tidak terkecuali Indonesia. Tantangan global tersebut mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat langkah stabilisasi moneter dengan meningkatkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo sebesar 50 bps menjadi 4,75% dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan pada pertengahan Mei 2018.

Perkembangan dinamika makro di pertengahan Triwulan II 2018 dan kinerja Perseroan menjadi pertimbangan untuk melakukan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018. Latar belakang Perubahan RBB 2018 tersebut di antaranya dinamika ekonomi makro dan persiapan implementasi PSAK 71.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TUJUAN PERUSAHAAN

Tujuan perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan (tahun 2025) menuju transformational enterprise - global mindset, yaitu menjadi perusahaan global di bidang perumahan, properti dan infrastruktur dasar adalah dengan menjalankan program transformasi sejak tahun 2013 yang terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:

1. *Survival period* (2013-2015) dengan tahapan yang dicapai adalah domination nation wide market leader

yaitu menguasai bisnis perumahan nasional.

2. Digital banking period (2016–2019) dengan tahapan yang akan dicapai adalah *the leading housing bank Indonesia with world class service*.
3. *Global playership* period tahun (2020–2025) dengan tahapan yang akan dicapai adalah transformational *Enterprise Global Mindset*.

RENCANA JANGKA PANJANG

Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan pada tahapan transformasi kedua ini yaitu Digital *banking period* masih fokus pada penguatan bisnis (*stronger business*) dengan fokus penguatan bisnis inti dua segmen yakni segmen *consumer banking* dan *commercial banking* sebagai berikut:

1. Penguatan Bidang Bisnis: *Consumer Banking & Commercial Banking*

Strategi penguatan bidang bisnis dilakukan berdasarkan segmentasinya. Di segmen consumer, pengembangan bisnis yang dilakukan yaitu memperkuat *positioning* KPR di segmen mass dan memperluas layanan digital banking. Sementara itu, di segmen *commercial*, pengembangan bisnis difokuskan untuk meningkatkan *supply* perumahan dan pemetaan value chain nasabah. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan CASA dilakukan melalui perluasan pendanaan berbasis KPR serta mempererat kerja sama dengan berbagai instansi. Adapun strategi jangka pendek dan menengah pada masing-masing segmen adalah sebagai berikut:

Consumer Banking

- a. Memperkuat *positioning* Perseroan pada segmen mass (*subsidized & non subsidized*) dengan memperkuat peran Perseroan sebagai housing market maker melalui peran BTN HFC dan perluasan aliansi strategis dengan developer di luar Pulau Jawa;
- b. Meningkatkan penetrasi pembiayaan pada segmen emerging affluent dan affluent melalui pengembangan ekosistem KPR Digital;

Commercial Banking

Memperluas pangsa pasar segmen UKM, Komersial dan Korporasi untuk mendukung *supply* perumahan dengan membangun *construction value chain*.

2. Penguatan Infrastruktur (*Infrastructure Transformation*) Untuk mendukung tahapan transformasi fase digital banking dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, bidang infrastruktur difokuskan pada tiga hal utama yaitu:

- a. Transformasi infrastruktur (*Transformation Infrastructure*), yang difokuskan untuk meningkatkan kapabilitas IT dalam mendukung implementasi digital banking, digitalisasi proses dan big data analytics melalui:

- Reorganisasi IT berbasis *Digital Banking*
Selain memberikan prosisi khusus kepada segmen emerging affluent dan affluent, digital banking BTN juga merupakan new growth engine dari pelayanan bisnis perbankan modern. Hal ini dilakukan melalui peningkatan keselarasan bisnis antar unit melalui peran IT sebagai enabler.
- Otomatisasi Proses dan Sentralisasi Operasi
Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan end-to-end dengan menggunakan *Enterprise Application Integration* (EAI) dan *Straight-Through Processing* (STP) dengan tujuan mengurangi kebutuhan keterlibatan pengguna dan mengoptimalkan kecepatan proses transaksi.

- b. Penguatan pilar-pilar GCG dengan menerapkan *Governance, Risk & Compliance* secara terintegrasi melalui beberapa strategi, di antaranya:



- Penerapan budaya risiko yang didukung dengan kapabilitas organisasi dan proses yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG.
 - Menentukan *risk appetite & risk tolerance* sebagai bentuk *going concern* dan harmonisasi antara penerapan manajemen risiko dan strategi bisnis.
 - Penyederhanaan sistem dan proses IT melalui data *quality assurance*.
3. Penguatan Sumber Daya Manusia (*People Transformation*)
People transformation dilakukan dengan memperkuat sepuluh *building block* pengembangan sumber daya

manusia dan meningkatkan kapabilitas SDM sebagai agen implementasi transformasi melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Pengembangan program top talent bagi pegawai Perseroan berkinerja tinggi;
- b. Pengembangan kapabilitas *Human Capital* dan penyusunan *man power planning*; dan
- c. Memperkuat manajemen berbasis kinerja dan budaya risiko.

RENCANA JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

Sebagai bentuk komitmen bank dalam mendukung aspirasi pemerintah, target perusahaan dalam jangka pendek dan menengah adalah fokus pada pembiayaan perumahan dengan mendukung realisasi program satu juta rumah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan mengubah strategi bisnis yang lebih mengarah kepada pemetaan segmentasi nasabah.

Melalui strategi tersebut, pertumbuhan *asset* difokuskan untuk memperkuat pangsa pasar segmen mass dengan dukungan perluasan pada segmen lainnya. Sedangkan, untuk pendanaan diintensifkan pada share CASA konsumen dan komersial serta *wholesale funding*.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, juga dilakukan penguatan bidang infrastruktur yang mendukung target jangka pendek dan menengah melalui inovasi digital banking, pengembangan *mortgage ecosystem* dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan proses bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

BIDANG PERKREDITAN

Strategi kredit konsumen akan difokuskan dengan memperkuat positioning Perseroan pada segmen *Mass Subsidized & Non-Subsidized* dan memperluas pangsa pasar segmen *Emerging Affluent* dan *Affluent* melalui pengembangan mortgage ecosystem. Sedangkan kredit komersial, strategi lebih difokuskan untuk memperkuat supply perumahan melalui optimalisasi potensi *construction value chain* pada segmen Usaha Kecil Menengah (UKM),

komersial, dan korporasi.

Strategi Bidang Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat positioning Perseroan pada segmen mass (*subsidized & non-subsidized*);
2. Meningkatkan penetrasi pembiayaan pada segmen *Emerging Affluent & Affluent*;
3. Memperluas pangsa pasar segmen UKM, Komersial dan Korporasi.

BIDANG KUALITAS KREDIT

Membaihnya kualitas kredit menjadi tolak ukur atas perbaikan proses dan keberhasilan kredit yang diberikan. Pada dasarnya strategi bidang kualitas kredit masih didasarkan pada *time bucket*, namun pada pengelolaannya lebih ditekankan pada *profiling* kemampuan membayar debitur dan juga eksposur risiko yang akan ditimbulkan.

Adapun Inisiatif strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kualitas kredit tersebut adalah:

1. Optimalisasi pembendungan kolektibilitas lincer dengan memperkuat aktivitas *smart collection*.
2. Meningkatkan perbaikan postur kolektibilitas kredit melalui *monitoring* dan pembinaan kredit secara periodik hingga optimalisasi penagihan melalui *debt collector*.
3. Meningkatkan *collection* dan penyelesaian kredit melalui program *asset recovery*, *profiling* kriteria debitur, dan eksekusi cessie.

BIDANG PENDANAAN

Sesuai dengan startegi bisnis bank, inisiatif pertumbuhan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

RENCANA STRATEGIS BANK

dana difokuskan untuk memperkuat struktur current account and saving account (CASA) dan dukungan *wholesale funding*. Secara garis besar strategi bidang pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan average balance segmen mass, dengan mengoptimalkan *captive market* nasabah KPR;
2. Rekomposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) konsumen dengan meningkatkan akuisisi nasabah baru di segmen *emerging affluent & affluent* melalui proposisi fitur *digital banking*;
3. Meningkatkan pendanaan komersial berbasis CASA melalui pemetaan value chain nasabah dan pendanaan lembaga berbasis kerja sama KPR; dan
4. Melakukan *front loading* pendanaan *wholesale* untuk menutupi *gap maturity mismatch*.

BIDANG FEE BASED INCOME (FBI) DAN PEMBENTUKAN ANAK USAHA

Mengingat kontribusi *fee based income* (FBI) terhadap pendapatan operasional yang belum optimal dibandingkan dengan rata-rata industri, maka dibutuhkan penguatan beberapa inisiatif strategis untuk merealisasikan perolehan FBI konsumen dan komersial sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan berbasis admin, melalui peningkatan jumlah Number of Account (NOA) dan transaksi;
2. Memperdalam *share of wallet* (s.o.w) nasabah, dengan menawarkan digital banking dan produk wealth management secara masif;
3. Memperkuat perolehan FBI di segmen komersial, melalui peningkatan trade finance, bank garansi dan profitabilitas transaksi surat berharga; dan
4. Mengoptimalkan penyelesaian kredit pasif.

Selain strategi tersebut di atas, perolehan FBI juga dilakukan dengan pembentukan anak usaha yang difokuskan untuk mendukung bisnis induk pada bisnis properti dengan mengoptimalkan program sejuta rumah. Adapun inisiatif perluasan bisnis, rencana penyertaan modal yang awalnya difokuskan pada empat kegiatan (manajemen investasi, asuransi jiwa, perusahaan pembiayaan dan asuransi kerugian) diubah menjadi satu kegiatan pada tahun 2018 yaitu manajemen investasi dan sisanya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2019-2020.

BIDANG BISNIS SYARIAH

Dalam jangka pendek, bisnis syariah tetap mendukung bisnis inti bank yaitu mendukung realisasi program sejuta rumah dengan fokus strategi berdasarkan pemetaan segmentasi nasabah. Sejalan dengan strategi bisnis induk, pertumbuhan aset syariah diarahkan lebih ekspansif pada pertumbuhan pembiayaan konsumen dengan dukungan pendanaan komersial.

Sesuai dengan rencana Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan bisnis Syariah Bank BUMN merupakan salah satu inisiatif untuk memperluas kontribusi perbankan Syariah pada industri perbankan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam jangka pendek bisnis Syariah Perseroan tetap dipertahankan sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dan mendukung bisnis inti bank dalam mendukung realisasi sejuta rumah. Namun demikian, mempertimbangkan UU No 21 tahun 2008 (uu Perbankan Syariah) yang mewajibkan konversi UUS selambat-lambatnya di tahun 2023, persiapan *spin-off* direncanakan akan dilakukan pada tahun 2020 yang mana dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan rencana konsolidasi perbankan Syariah oleh Pemerintah. Perseroan mempersiapkan *spin-off* tersebut dengan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas UUS BTN melalui beberapa langkah persiapan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan infrastruktur induk untuk memperluas jangkauan BTN Syariah
 - a. Melakukan pemetaan potensi pengembangan bisnis syariah pada Kantor Cabang BTN Konvensional sesuai potensi pasar syariah;
 - b. Mendesain *Key Performance Indicator* (KPI) yang spesifik untuk penjualan produk syariah di kantor cabang konvensional;
 - c. Meningkatkan kapabilitas tenaga penjual BTN Konvensional untuk menjual produk syariah melalui program *sales force effectiveness*;
 - d. Mendesain simplifikasi produk yang dapat membantu para staf konvensional dalam menjual produk syariah.
2. Setelah terdapat kejelasan mengenai rencana holding perbankan syariah, akan dilakukan tahapan persiapan *spin off*.
Persiapan *spin off* dengan membentuk satuan tugas untuk melakukan *review* proses secara terperinci guna memastikan risiko operasional yang minimum.



3. Pelaksanaan *spin-off* melalui 3 tahap yaitu persiapan & perizinan, proses pelaksanaan & pendampingan, dan proses pemisahan (diusulkan untuk direncanakan pada tahun 2023).

MEMPERKUAT PERMODALAN

Sejalan dengan ekspansi bisnis, dibutuhkan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 jenis yaitu *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, *capital surcharge*). Strategi penguatan modal yang akan dilakukan Perseroan adalah:

1. Meningkatkan profitabilitas bank;
2. Pinjaman subordinasi;
3. Mengusulkan skema deviden policy yang mendukung Bank fokus perumahan; dan
4. Mengusulkan penerbitan saham baru melalui *rights issue* (apabila pemegang saham menyetujui).

BIDANG HUMAN CAPITAL

Dalam rangka mendukung proses transformasi dan pertumbuhan bisnis diperlukan *people transformation* melalui tema dan strategi yang berkelanjutan, dengan didukung oleh penyelarasan implementasi *human capital management system* sesuai *best practice*.

Untuk memperkuat penerapan risiko operasional pada aktivitas bisnis bank, strategi pengembangan sumber daya manusia juga mempertimbangkan penguatan pengendalian internal (*internal control*) melalui kecukupan jumlah SDM yang disesuaikan dengan *man power planning*, pengembangan kompetensi pegawai dan penguatan implementasi budaya perusahaan termasuk di dalamnya KYC (*Know Your Customer*) & KYE (*Know Your Employee*). Untuk mewujudkan hal tersebut, program kerja pengembangan sumber daya manusia pada jangka pendek dan menengah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program kerja jangka pendek
 - a. Penguatan fokus program budaya yang diselenggarakan dengan transformasi digital melalui implementasi budaya digital dan efisiensi serta efektivitas bekerja;

- b. Melakukan evaluasi manajemen karir dan *job family*;
 - c. Menyusun perencanaan dan strategi alokasi human capital dengan menentukan strategi rekrutmen sumber daya manusia dan mengomunikasikan *employer branding*;
 - d. Menjalankan implementasi employer *Value Proposition* yang baru dengan menjalankan *program talent attraction* dan *employee retention* dan *employee engagement*;
 - e. Memperbaiki Sistem Manajemen Kinerja (SMK) melalui penyederhanaan penilaian kompetensi dan penetapan KPI sesuai struktur organisasi baru; dan
 - f. Membangun mekanisme kompensasi *variable*;
2. Target jangka menengah
 - a. Membangun manajemen karir dan *job family* melalui *review*, evaluasi dan menyusun rencana suksesi;
 - b. Menyusun *strategic man power plan* untuk 2018-2020 dengan strategi yang jelas untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;
 - c. Evaluasi implementasi *employer value proposition* dengan melakukan analisis kinerja brand image dan channel EVP;
 - d. Memperbaiki Sistem Manajemen Kinerja (SMK) melalui review KPI dan kompetensi struktur organisasi.
 - e. Menanamkan budaya kolaboratif dan fokus pada wawasan eksternal untuk transformasi digital sesuai dengan rencana budaya perusahaan 2019-2020; dan
 - f. Mengimplementasi *Human Capital Information System* (HCIS) secara terintegrasi.

MEMPERKUAT INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DAN DIGITAL BANKING

Untuk mendukung inisiatif pengembangan layanan digital banking dan mortgage ecosystem diperlukan penguatan Teknologi Informasi (IT) yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, inisiatif strategis Teknologi Informasi diselenggarakan dengan strategi utama bank yaitu sebagai bank fokus perumahan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis.

Pada transformasi bidang infrastruktur (*infrastructure transformation*), insiatif penguatan Teknologi Informasi tetap berdasarkan Rencana Strategi Teknologi Informasi & Komunikasi (RSTIK), namun diutamakan pada sepuluh pilar strategis yang ditujukan untuk mendukung implementasi



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

RENCANA STRATEGIS BANK

Cetak Biru Transformasi, yang meliputi:

1. Penguatan peran BTN Portal Property
2. Membentuk solusi *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mengetahui 360 degree customer view, profiling dan peningkatan kapabilitas pelayanan nasabah;
3. Mengembangkan aplikasi *internet banking & mobile banking* melalui peningkatan *platform* dan integrasi antar sistem seperti iColl, iCash dan *property portal*;
4. Mengembangkan management tools untuk aktivitas *marketing* dan *sales* dengan membentuk digital *marketing & sales tools*;
5. Perbaikan secara menyeluruh sistem *wealth management*;
6. Peningkatan *operational supporting tools* saat ini, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko;
7. Memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja;
8. Integrasi *Loan Origination System* dan penambahan iCremo untuk melakukan monitoring penyaluran kredit;
9. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengotomasi proses dan menghubungkan ke berbagai database;
10. Sistemasi proses perencanaan dan evaluasi kinerja korporat melalui implementasi sistem untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi *Corporate Planning*.

Selanjutnya, dibidang transformasi digital banking inisiatif yang dilakukan adalah mengembangkan inovasi terkait pengembangan produk, fitur, aplikasi dan simplikasi proses sebagai salah satu strategi rebranding untuk mendapatkan nasabah Perseroan pada segmen *emerging affluent* dan *affluent*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kapabilitas digital banking dilakukan dengan membentuk organisasi Digital *Ecosystem* yang beroperasi secara independen dari unit bisnis. Adapun upaya peningkatan kapabilitas inkubasi dan komersialisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas inkubasi melalui:
 - a. Menerjemahkan output riset menjadi pengembangan produk;
 - b. Mengintegrasikan produk ke channel digital; dan

- c. Mengembangkan *customer journey* berdasarkan *user experience*.

2. Meningkatkan kapabilitas komersialisasi melalui:
 - a. Mengembangkan strategi marketing dan promosi;
 - b. Memperluas aliansi staretgis dengan berbagai mitra potensial untuk melakukan *deals*/promosi;
 - c. Memetakan target pasar;
 - d. Mengembangkan operasional transaksi dan *back office*.

PENINGKATAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG), *RISK MANAGEMENT*, DAN *COMPLIANCE*

Perseroan menyadari dan memahami pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai visi sebagai leading bank in housing finance. Oleh sebab itu, penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu: (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process*, dan (iv) *Governance Outcome*.

Penguatan pilar pertama dilakukan dengan internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada kegiatan bisnis dan operasional bank, yang telah tercantum sebagai salah satu misi bank yaitu "Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk meningkatkan *shareholder value*".

Selanjutnya, penguatan pilar kedua dan ketiga dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada perubahan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis secara menyeluruh yang saat ini sedang dilakukan sebagai tahapan transformasi bisnis bank. Secara garis besar, perubahan tersebut, dilakukan dengan streamlining proses untuk memisahkan antara peran sales, operation dan kebijakan risiko. Penguatan pilar tersebut dilakukan dengan mempertegas mekanisme supervisi operasional kantor, baik dari tingkatan Direktorat sampai dengan Unit Kerja.

PENINGKATAN *RISK MANAGEMENT*

Selain penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan Perseroan juga fokus pada pengembangan bisnis yang



berbasis manajemen risiko. Dalam hal ini, secara garis besar penguatan manajemen risiko dilakukan melalui penguatan empat pilar utama yaitu: (i) Penguatan dan internalisasi budaya risiko pada seluruh tingkatan jenjang organisasi; (ii) Manajemen modal dan likuiditas yang terintegrasi; (iii) Peningkatan kapabilitas pengelolaan risiko kredit dan (iv) Memperkuat fungsi kepatuhan untuk praktik risiko operasional yang komprehensif.

Adapun inisiatif strategis yang akan dijalankan untuk memperkuat empat pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan internalisasi budaya risiko;
2. Memperkuat manajemen permodalan dan likuiditas yang terintegrasi dengan mengembangkan sistem monitoring risiko likuiditas;
3. Meningkatkan kapabilitas risiko kredit melalui pengembangan aplikasi credit risk;
4. Memperkuat fungsi kepatuhan untuk praktik risiko operasional yang lebih komprehensif.

BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN (DELIVERY CHANNEL)

Optimalisasi delivery channel dalam mendukung bisnis dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam channel dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada lima inisiatif utama, yaitu:

1. Strategi regionalisasi;
2. Ekspansi cabang;
3. Penempatan kios;
4. *Agent banking*; dan
5. *Digital Channel*.



TRANSPARANSI INFORMASI LAINNYA

INFORMASI TERKAIT *BUY BACK* SAHAM DAN *BUY BACK* OBLIGASI

Tujuan utama *buy back* Saham dan *buy back* obligasi adalah untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi subordinasi tersebut. Tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga periode akhir tahun 2019, Perseroan melakukan *buy back* obligasi subordinasi, dengan penjelasan secara rinci pada tabel berikut ini:

Penjelasan Kebijakan <i>Buy Back</i> Obligasi	Pembelian obligasi tersebut dikarenakan <i>yield</i> obligasi yang menarik dibanding obligasi sejenis di pasar sekunder	
Jumlah <i>Buy Back</i> Obligasi (Rp-juta)	1. Obligasi XIV Bank BTN 2010	: Rp15 miliar
	2. OB III Bank BTN Tahap I tahun 2017 seri A	: Rp35 miliar
Harga <i>Buy Back</i>	1. Obligasi XIV Bank BTN 2010	: 102,33%
	2. OB III Bank BTN Tahap I tahun 2017 seri A	: 100,73%
Peningkatan Laba dari Hasil <i>Buy Back</i> Obligasi (Rp-juta)	1. Obligasi XIV Bank BTN 2010	: Rp621.347.222
	2. OB III Bank BTN Tahap I tahun 2017 seri A	: Rp81.145.833
	3. Total Keseluruhan	: Rp702.493.055

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Informasi terkait penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sepanjang tahun 2019, dapat disampaikan sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Rp-juta)
Kepada Pihak terkait	Nihil	Nihil
Kepada 50 Debitur Inti:	170	27.541.624
a. <i>Single Debt</i>	33	11.120.273
b. <i>Group</i>	137	16.421.351

Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama periode Januari sampai dengan Desember 2019. Direktur Kepatuhan melalui satuan kerja kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.



PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pada tahun 2019, Perseroan menyalurkan dana untuk kegiatan sosial melalui berbagai program dan kegiatan (CSR). Secara garis besar, biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas CSR sepanjang tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Penyaluran Dana	
	2019 (Rp-Juta)	2018 (Rp-Juta)
Ekonomi	662	1.455,57
Seni Budaya	63	100
Olahraga	-	149,43
Pendidikan	2.304	1.047,34
Kesehatan	-	203,59
Sarana dan Prasarana	2.952	644,56
Keagamaan	946	1.573,60
Pelestarian Alam	15	6
Jumlah	6.942	5.180,09

Informasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan CSR Perseroan disajikan pada pembahasan bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Laporan Tahunan ini serta pada Laporan Keberlanjutan tahun 2019.

PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PENGUNGKAPAN INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRASI OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Hingga akhir periode 31 Desember 2019, Perseroan tidak mendapatkan sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga

tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta ketentuan di bidang pasar modal dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. IX.E.1 tanggal 25

November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dari sisi internal, Perseroan memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan



TRANSPARANSI INFORMASI LAINNYA

kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Perseroan juga mendokumentasikan dengan baik setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan Informasi terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan	Tgl Akad	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan					
1	Agus Rio Trismayanto	DBM Bisnis KC Bandung	Komisaris	22/03/2019	Kredit Ringan Batara	200	Sesuai Prosedur
2	Wisnu Agus Prijanto	BM KC Depok	Komisaris	21/03/2019	Kredit Ringan Batara	200	Sesuai Prosedur
3	Raden Achmad Zein Wargadibrata	BM KC Jkt Harmoni	Komisaris	18/03/2019	Kredit Ringan Batara	200	Sesuai Prosedur
4	Nilo Tjondro Atmodjo	BM KC Magelang	Komisaris	09/09/2019	KPR BTN Platinum	250	Sesuai Prosedur
5	Reno Rahargono	BM KC Palu	Komisaris	20/03/2019	Kredit Ringan Batara	50	Sesuai Prosedur
6	Adhi Santosa	BCRH KC Semarang	Komisaris	21/03/2019	Kredit Ringan Batara	35	Sesuai Prosedur
7	Satrijo Katri Wilargo	BM KC Tegal	Komisaris	19/03/2019	Kredit Ringan Batara	200	Sesuai Prosedur
8	Tyas Dite Kresnanto	Dept Head Divisi Treasury	Komisaris	22/07/2019	Kredit Ringan Batara	200	Sesuai Prosedur



PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Perseroan memiliki kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam ketentuan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan:

1. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;

2. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;
3. Memberikan informasi kepada pihak lain.

Setelah transaksi saham dilakukan maka Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Dengan adanya Kebijakan tersebut diharapkan kegiatan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) dapat dihindari.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Perseroan memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan, sebagaimana berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada Regulator serta dipublikasikan melalui *website* Perseroan;
2. Laporan Keuangan Triwulanan kepada Regulator OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL) serta dipublikasikan melalui surat kabar dan *website* Perseroan;
3. Laporan Tahunan yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada Regulator dan Pemegang Saham serta dipublikasikan melalui situs web Perseroan;
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan yang di antaranya adalah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Visi Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil

Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan internal terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite yang juga dipublikasikan melalui *website* Perseroan;

5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantor dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan *website* Perseroan agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank;
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan dipublikasikan melalui *website* Perseroan untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen; dan
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PERNYATAAN DAN PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *Bad Corporate Governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang telah dibangun. Dalam rangka mendukung hal tersebut, sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik bad corporate governance yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TRANSPARANSI INFORMASI LAINNYA

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil

PERNYATAAN DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Perseroan menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan juga senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Direksi, Dewan Komisaris, beserta seluruh pegawai berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil serta berkesinambungan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan.

PERNYATAAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang ada di Perseroan. Sebagai penutup pembahasan bab Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan telah dijalankan secara efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian intern, antara lain Audit Internal, sistem manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol yang sangat baik sepanjang tahun 2019.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Penyelenggaraan kegiatan CSR BTN memiliki tujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap BTN.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK DAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainability Development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, *profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan. *Sustainability Development* menekankan pada 3 (tiga) fondasi penting, yaitu *economic growth*, *environmental protection* dan *social equity*.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perkembangan isu keberlanjutan, *International Organization for Standardization* (ISO) merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*) pada tahun 2009. Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang pelaksanaan dan pengembangan CSR dalam sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN ISO 26000





Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Sekilas penjelasan ke-7 subyek inti tersebut adalah sebagai berikut.

Tata Kelola Organisasi	:	Proses, sistem, struktur, atau mekanisme lain yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik tanggung jawab sosial.
Hak Asasi Manusia	:	Prinsip spesifik HAM adalah hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu <i>Due diligence</i> (analisa dampak keputusan dan kegiatan); situasi berisiko; menghindari persekongkolan; penanganan keluhan; hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; prinsip dan hak dasar di tempat kerja.
Praktik Ketenagakerjaan	:	Prinsip spesifik Pekerja bukanlah komoditas/tidak diperlakukan sebagai faktor produksi; berhak mendapat nafkah dari pekerjaan yang dipilihnya; berhak atas kondisi kerja yang adil dan baik. Isu Pekerjaan dan hubungan kerja; kondisi kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan SDM dan pelatihan di tempat kerja.
Lingkungan	:	Prinsip spesifik Prinsip tanggung jawab lingkungan; prinsip kehati-hatian; manajemen risiko lingkungan; pencemar membayar. Isu Pencegahan pencemaran; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami.
Prosedur Operasi yang Wajar	:	Prinsip spesifik Perilaku etis. Isu Anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan yang adil (<i>fair</i>); mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; menghargai hak kepemilikan.
Isu Konsumen	:	Prinsip spesifik Terpenuhinya kebutuhan dasar, standar hidup layak, produk dan jasa esensial, keselamatan, informasi; menentukan pilihan; didengarkan; kompensasi kerugian; edukasi; lingkungan yang sehat; privasi; prinsip kehati-hatian. Isu Perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen; konsumsi berkelanjutan; layanan, dukungan serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen; perlindungan data dan privasi konsumen; akses ke pelayanan dasar; pendidikan dan kesadaran.
Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat	:	Prinsip spesifik Perusahaan adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas; komunitas berhak mengambil keputusan sendiri terkait komunitasnya; menghargai karakteristik komunitas; kerja sama. Isu Pelibatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ketrampilan; pengembangan dan akses ke teknologi; kemakmuran dan penciptaan pendapatan; kesehatan; investasi sosial.

Sumber: Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, 2015.



Penyusunan laporan Tanggung Jawab Sosial dalam laporan tahunan ini mengadopsi 2 (dua) Peraturan dari OJK serta turunannya, yaitu Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang

Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.



Ke-2 Peraturan OJK tersebut digunakan Perseroan untuk menyusun laporan Tanggung Jawab Sosial Bank secara terstruktur dan sistematis. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 menjadi skema penyusunan keseluruhan laporan tahunan ini; sedangkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 diadopsi untuk dapat memberikan gambaran tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan Bank.

Di samping itu, Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai laporan terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan memberikan gambaran secara rinci tentang pencapaian yang telah dilakukan Perseroan dalam mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Perseroan memaknai substansi CSR selain mengarah kepada upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan, baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa melayani seluruh pemangku kepentingan dengan integritas yang tinggi, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Penyelenggaraan kegiatan CSR Perseroan memiliki tujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan guna mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Implementasi prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Terdapat delapan prinsip yang terimplementasi ke dalam aktivitas kegiatan usaha Perseroan, yaitu: (1) Prinsip Investasi Bertanggung Jawab, (2) Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan, (3) Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup, (4) Prinsip Tata Kelola, (5) Prinsip Komunikasi yang Informatif, (6) Prinsip Inklusif, (7) Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas dan (8) Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi. Penerapan prinsip tersebut juga terlihat dalam berbagai aktivitas CSR dan PKBL yang secara konsisten telah dijalankan Perseroan melalui pendekatan *triple bottom lines* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah:

1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.
2. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, emiten dan perusahaan publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
4. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

**8 (DELAPAN) PRINSIP DASAR PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN*****Prinsip Investasi
Bertanggung Jawab****Prinsip Strategi
dan Praktik Bisnis
Berkelanjutan****Prinsip Pengelolaan
Risiko Sosial dan
Lingkungan Hidup****Prinsip Tata Kelola****Prinsip Komunikasi
yang Informatif****Prinsip Inklusif****Prinsip Pengembangan
Sektor Unggulan
Prioritas****Prinsip Koordinasi
dan Kolaborasi**

*) Berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasal 2.

Penjelasan ke-8 prinsip dasar di atas adalah sebagai berikut.

Prinsip Investasi Bertanggung Jawab	: Pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.
	Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan	: Pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis.
Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup	: Pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.
Prinsip Tata Kelola	: Penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.
Prinsip Komunikasi yang Informatif	: Penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip Inklusif	: Pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas	: Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi	: Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.

VISI DAN MISI CSR



VISI

“Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan khususnya di lingkungan perumahan/pemukiman yang menjadi *core business* Bank BTN.”

MISI

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
- Mengembangkan nilai dan budaya Bank.
- Membentuk citra Bank yang positif di mata publik.
- Meningkatkan kerja sama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasionalnya Kantor Bank.

Dalam mencapai Visi dan Misi CSR tersebut, Perseroan telah menyusun program CSR yang sejalan dengan prinsip 3P (*People, Profit, Planet*), berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada *stakeholders* maupun komunitas sekitar serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan.

DASAR PELAKSANAAN CSR

Dasar pelaksanaan program CSR di Indonesia yang berfokus pada Keuangan Berkelanjutan dilandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996



tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

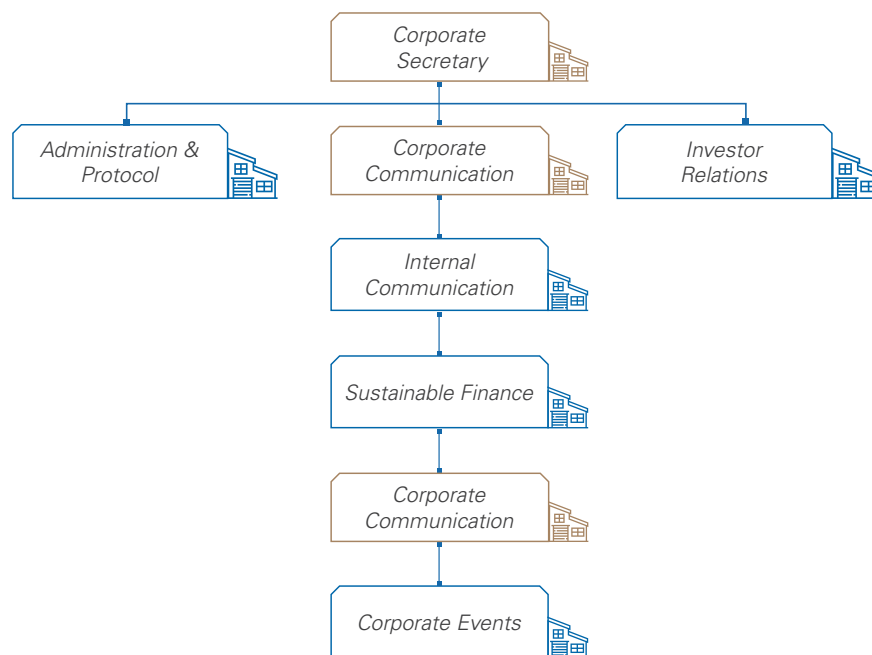
10. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

11. Surat Edaran OJK No. 1/Seojk.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

Selain itu, Perseroan memiliki landasan internal dalam pelaksanaan CSR, yaitu:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 34 tanggal 11 Agustus 2008.
2. Peraturan Direksi No. 6/PD/CSD/2018 tentang Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program *Corporate Social Responsibility* tanggal 18 Mei 2018.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA CSR PERSEROAN



Perseroan memiliki unit khusus menangani kegiatan CSR, yaitu Unit *Community Development Program* yang berada di bawah *Corporate Secretary Division*. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, Unit *Community Development Program* berkoordinasi atau bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya:

1. Pihak Internal Perseroan; dan
2. Pihak Eksternal Perseroan atau Pihak Ketiga, yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah
 - b. Perguruan Tinggi
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - d. Badan Sosial
 - e. Media Massa
 - f. Lembaga lain yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan CSR Perseroan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENT* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERSEROAN

Perseroan telah melakukan kajian atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas usahanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pada kajian dampak sosial terhadap masyarakat, Perseroan melaksanakan program pelaksanaan CSR yang menyinergikan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan kepentingan bisnis Perseroan. Hal ini bertujuan agar Perseroan maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat jangka panjang atas program-program tersebut.

Terhadap dampak ekonomi, Perseroan telah menyalurkan CSR yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, Perseroan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diharapkan akan memberikan penciptaan nilai jangka panjang (*long-term value creation*). RAKB tersebut tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi Perseroan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perseroan telah

mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat.

Terhadap dampak lingkungan, selain telah menyalurkan CSR untuk pelestarian lingkungan, Perseroan juga melakukan penyaluran CSR untuk menunjang bisnis Perseroan agar ramah lingkungan. Mengingat dalam melakukan bisnisnya Perseroan telah melaksanakan kebijakan kredit ramah lingkungan, yaitu penilaian kredit yang memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memutuskan memberi kredit kepada suatu proyek. Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran No.17/DIR/CMLD/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yang menyebutkan bahwa "Upaya Kelayakan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan/atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila diprasyaratkan oleh Pemda setempat, atau diprasyaratkan dalam Izin Lokasi atau Surat Izin Penggunaan Peruntukkan Tanah." Selain AMDAL, Perseroan juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa debitur atau *developer* telah memenuhi persyaratan lingkungan.

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERSEROAN

Perseroan telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan Perseroan yang bertujuan agar Perseroan mengetahui dengan jelas siapa yang paling berkepentingan dengan Perseroan secara timbal balik, hubungan apa yang dijalin, hal apa yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimana memaksimalkan karakteristik media komunikasi sehingga dapat berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif, yang pada akhirnya mampu mencapai target yang diharapkan dalam penyaluran CSR. Sehingga secara

langsung memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keberlanjutan Perseroan. Beberapa pemangku kepentingan yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan Perseroan sebagai berikut:

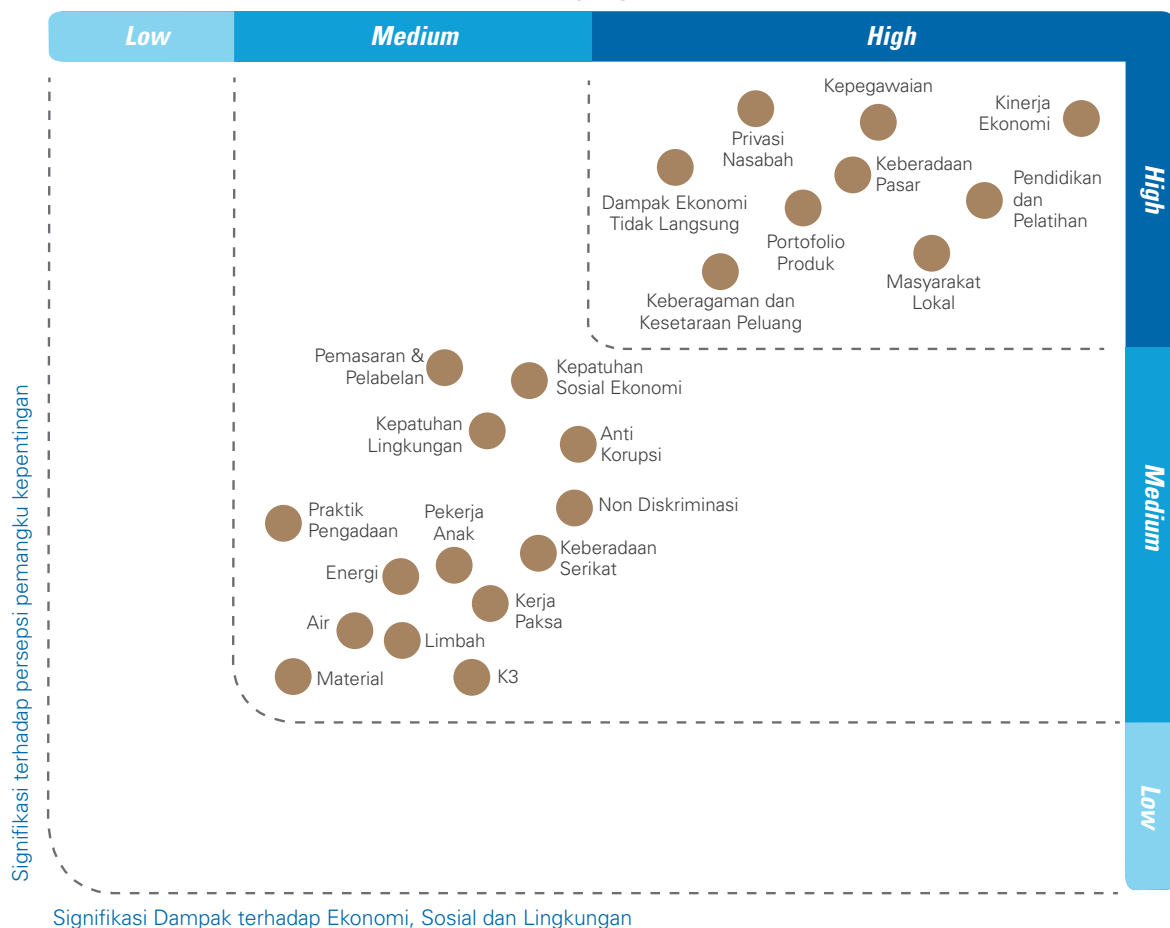
1. Pemegang Saham
2. Nasabah
3. Pegawai
4. Mitra Kerja/Pemasok
5. Pemerintah dan Otoritas Keuangan



ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERSEROAN

Dalam menentukan isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan dengan dampak kegiatan bisnis Perseroan serta signifikan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, Perseroan telah memetakan topik-topik material tersebut dalam grafik materialitas yang dihasilkan dari serangkaian proses pemetaan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan.

MATRIKS TOPIK MATERIAL TERKAIT ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERSEROAN



Dari grafik matriks di atas, dapat dilihat derajat topik material yang cukup penting mencakup kinerja Perseroan, pengelolaan ketenagakerjaan, dampak ekonomi tidak langsung terhadap pemangku kepentingan, serta pengelolaan nasabah.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL

Perseroan turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya berpartisipasi dalam pencapaian SDG 11.1 yaitu membangun kota dan

pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Perseroan telah memulai dengan program ABCG yaitu program membangun hunian yang melibatkan *Academic, Business, Community and Government*.

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) diharapkan mampu memberikan penciptaan nilai jangka panjang (*long-term value creation*) tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perusahaan telah mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat.

Perseroan telah merumuskan RAKB dengan tujuan mewujudkan Bank BTN di tahun 2023 sebagai terdepan dalam sektor perumahan dan mitra keuangan keluarga terpercaya yang menerapkan prinsip keuangan

berkelanjutan untuk bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rumusan RAKB Perseroan telah dituangkan dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk target waktu yang ingin disasar dalam jangka 1 hingga 5 tahun (tahun 2019-2023).

Program-program yang dirumuskan dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bank BTN meliputi perancangan dan penyusunan *Sustainability Policy & Strategy* (kebijakan dan penyesuaian struktur serta peran organisasi), penyesuaian dan peluncuran *Green Finance Product & Index*, serta pelaksanaan berbagai *Sustainability Program* dan *Initiatif*.

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019

Program Pertama	Program Kedua	Program Ketiga
Target Kegiatan Prioritas: Menyiapkan perangkat kebijakan dan Model Keuangan Berkelanjutan. Indikator Keberhasilan: - Terbentuknya Standar Prosedur Operasional (SPO) implementasi keuangan berkelanjutan. - Terlaksananya kajian risiko sosial dan lingkungan. - Adanya <i>output</i> berupa kebijakan dan model strategi komunikasi keuangan berkelanjutan. - Adanya rancangan tema budaya keuangan berkelanjutan. - Terbentuknya model program CSR sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan CSR Bank BTN.	Target Kegiatan Prioritas: Penguatan kelembagaan, Pembentukan/ Pengorganisasian Keuangan Berkelanjutan. Indikator Keberhasilan: Terbentuknya Departemen Keuangan Berkelanjutan, Tim <i>Task Force</i> dan Departemen CSR.	Target Kegiatan Prioritas: Pelatihan SDM Terkait Keuangan Berkelanjutan. Indikator Keberhasilan: Terlaksananya pelatihan Keuangan Berkelanjutan.



Program Keempat	Program Kelima	Program Keenam
Target Kegiatan Prioritas: Pengembangan digitalisasi KPR. Indikator Keberhasilan: Terimplementasinya pembuatan teknologi atau sistem perbankan digital yang terkait dengan KPR.	Target Kegiatan Prioritas: Penyaluran pembiayaan kepada komunitas yang Layak (<i>Feasible</i>) namun belum memiliki akses pendanaan perbankan (<i>Non Bankable</i>). Indikator Keberhasilan: Terimplentasinya pembiayaan kepada 4 komunitas (Go-Jek, Grab, Pedagang dan Tukang Cukur Asgar).	Target Kegiatan Prioritas: Peningkatan akses layanan keuangan perbankan di daerah tertinggal. Indikator Keberhasilan: Tersedianya akses poin layanan keuangan di 17 daerah tertinggal.

Program Ketujuh	Program Kedelapan	Program Kesembilan
Target Kegiatan Prioritas: Pembiayaan Konstruksi Ramah Lingkungan. Indikator Keberhasilan: - Terimplentasinya pembiayaan pembangunan hunian vertikal dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD). - Terimplentasinya pembiayaan pembangunan infrastruktur (<i>homestay</i>) pengembangan pariwisata.	Target Kegiatan Prioritas: Penguatan relasi dan komunikasi dengan Pemerintah, Nasabah dan Media terkait produk dan aktivitas Keuangan Berkelanjutan Bank BTN. Indikator Keberhasilan: Terlaksananya pelibatan pemangku kepentingan dalam hal ini relasi dan komunikasi dengan Pemerintah, nasabah dan media terkait keuangan berkelanjutan.	Target Kegiatan Prioritas: Penyusunan <i>Sustainability Report</i> untuk diikutsertakan dalam ajang <i>Sustainability Finance Award</i> (SFA). Indikator Keberhasilan: Terbit atau tersedianya Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bank BTN mengikuti ajang <i>Sustainability Finance Award</i> (SFA).

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2023

2019
- Menyiapkan perangkat kebijakan dan model Keuangan Berkelanjutan. - Penguatan kelembagaan, pembentukan/pengorganisasian Keuangan Berkelanjutan. - Pelatihan SDM terkait Keuangan Berkelanjutan. - Pengembangan digitalisasi KPR. - Penyaluran pembiayaan kepada komunitas yang layak (<i>Feasible</i>) namun belum memiliki akses pendanaan perbankan (<i>Non Bankable</i>). - Peningkatan akses layanan Keuangan Perbankan di daerah tertinggal. - Pembiayaan konstruksi ramah lingkungan. - Penguatan relasi dan komunikasi dengan Pemerintah, Nasabah dan Media terkait produk dan aktivitas Keuangan Berkelanjutan Bank BTN. - Penyusunan <i>Sustainability Report</i> untuk diikutsertakan dalam ajang <i>Sustainability Finance Award</i> (SFA).



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

2020

1. Melakukan kajian integrasi risiko lingkungan dan sosial ke dalam kebijakan Bank.
2. Peningkatan pembiayaan UMKM.
3. TJSL untuk pembangunan/renovasi rumah yang berkelanjutan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana gedung yang ramah lingkungan.
5. Mengkomunikasikan Keuangan Berkelanjutan kepada pihak eksternal dan internal.
6. Membentuk tema budaya yang berhubungan dengan Keuangan Berkelanjutan.
7. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM terkait Keuangan Berkelanjutan.
8. Pengembangan digitalisasi layanan/produk Perbankan.
9. Penyediaan pembiayaan kepada komunitas sektor informal.
10. Peningkatan akses layanan keuangan Perbankan di daerah tertinggal.
11. Penyaluran kredit komersial yang mendukung pembangunan Berkelanjutan.

2021

1. Pembiayaan konstruksi ramah lingkungan.
2. Pembiayaan kepada petani organik.
3. Pembiayaan kepada nelayan pengguna alat ramah lingkungan.
4. Menerbitkan *Green Bond*.
5. Aplikasi edukasi Nasabah.
6. Penerapan konsep *Green Office* (kegiatan penghematan listrik).
7. Penghapusan air minum kemasan botol, penghematan kertas melalui Aplikasi iFlow dan membangun Sistem Pengelolaan Limbah.
8. Peningkatan akses layanan Keuangan Perbankan di daerah tertinggal.
9. Implementasi Program Griya Daya BTN.
10. Pengembangan sistem informasi dan pelaporan Program *Social Investment* (CSR) BTN berbasis Aplikasi IT.
11. Penguatan relasi, komunikasi, sosialisasi dan kampanye Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh Pemangku Kepentingan Bank BTN.

2022

1. Penerapan pengadaan Berkelanjutan.
2. Penyediaan layanan perbankan ramah disabilitas.
3. Peluncuran kartu kredit yang berkontribusi memberikan manfaat lingkungan dan sosial.
4. Peningkatan akses layanan Keuangan Perbankan di daerah tertinggal.
5. Implementasi Program Griya Daya BTN.

2023

1. Implementasi Program Griya Daya BTN.
2. Melakukan audit sosial dan persepsi penerima manfaat terhadap program CSR selama ini telah dilakukan oleh Bank BTN.
3. Peningkatan akses layanan Keuangan Perbankan di daerah tertinggal.
4. Pelatihan Teknik Analisis Lingkungan (TAL) dan pelatihan yang berkaitan dengan risiko sosial dan lingkungan.
5. Menerapkan Pengadaan Berkelanjutan yakni menggunakan produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan.



PROGRAM CSR 2019

Perseroan memiliki program CSR yang sejalan dengan prinsip 3P (*people, profit, planet*), yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dan diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran CSR yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Program CSR Perseroan juga berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada *stakeholders* maupun komunitas sekitar, serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program CSR Perseroan fokus pada beberapa program dan kegiatan meliputi pendidikan, kesehatan, seni dan budaya,

olahraga, keagamaan, pengembangan kesejahteraan sosial ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, serta hal-hal yang bersifat insidental. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan CSR Perseroan yaitu Peraturan Direksi No. 6/PD/CSD/2018 tentang Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program *Corporate Social Responsibility* tanggal 18 Mei 2018. Program yang dijalankan juga selalu berorientasi membawa manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

ANGGARAN CSR 2019

Pada tahun 2019, Perseroan mengalokasikan anggaran Program CSR sebesar Rp10 miliar dengan realisasi penyaluran dana hingga akhir Desember 2019 mencapai 69,42% atau sebesar Rp6,94 miliar. Dana tersebut terserap pada lingkup kegiatan CSR yang meliputi ekonomi, seni budaya, olahraga, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, keagamaan serta pelestarian alam.

REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM CSR TAHUN 2016-2018

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)		
	2019	2018	2017
Ekonomi	662	1.456	451
Seni Budaya	63	100	115
Olahraga	-	149	-
Pendidikan	2.304	1.047	228
Kesehatan	-	204	20
Sarana dan Prasarana	2.952	645	4.214
Keagamaan	946	1.574	120
Pelestarian Alam	15	6	-
Jumlah	6.942	5.180	5.148



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Selain kegiatan CSR, sebagai bank BUMN, Perseroan juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Perseroan secara khusus telah menyusun laporan tersendiri untuk melaporkan kinerja PKBL yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan. Laporan kinerja PKBL disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/04/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tahun 2019, Perseroan telah mengalokasikan dana untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp22 miliar. Realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp20,07 miliar.

REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM PKBL TAHUN 2017-2019

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Miliar)		
	2019	2018	2017
Program Kemitraan	21.672	37.274	6.531
Program Bina Lingkungan	20.071	21.782	20.033
Jumlah	41.744	59.056	26.564



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL HAK ASASI MANUSIA

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perseroan di antaranya meliputi penegakkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Perseroan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar hidup seperti kelahiran. Perseroan telah memiliki sejumlah prosedur tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus

mengevaluasi dan mengembangkan penerapan prosedur tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perseroan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

PENERAPAN INISIATIF HAK ASASI MANUSIA

Perseroan menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip ini diterapkan pada peraturan atau kebijakan tentang hak asasi manusia yang dimuat dalam Peraturan Direksi, Surat Edaran Direksi dan Perjanjian Kerja Bersama. Di dalam peraturan tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dari mulai penerimaan pegawai, program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, pengembangan karir pegawai, hingga dalam pemberian remunerasi dan kesejahteraan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras dan keberagaman lainnya.

Dalam hal kebebasan berserikat, Perseroan sejak tanggal 24 Juni 1999 memfasilitasi pembentukan serikat pekerja yang diberi nama Serikat Pekerja BTN dan telah memperoleh nomor pencatatan pada Departemen Tenaga Kerja DKI dengan No. Kep-2241/W.26/K.2/1000. Pembentukan Serikat Pekerja Perseroan ini sebagai wadah komunikasi yang efektif antara manajemen Perseroan dengan seluruh pegawai.

Perseroan telah membuat dan mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak 2 Oktober 2012 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan No. Kep.157/PHIJSKPKKAD/PKB/X/2012. PKB diperbarui secara periodik bersama Serikat Pekerja untuk didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, seluruh pegawai Perseroan (100%) telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

Sedangkan terkait dengan remunerasi dan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menerbitkan kebijakan yang mengatur hal tersebut dalam Surat Edaran Direksi Nomor 36/DIR/HCD/2017 tentang *Human Capital Reward*. *Human Capital Reward* menerapkan pola penghargaan yang adil dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan keberagaman lainnya, melainkan berdasarkan pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan yang diemban.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perseroan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, termasuk diantaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai, menghargai hak kepemilikan. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Perseroan yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perseroan yang transparan, wajar dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai *stakeholders*, meliputi:



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel.
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap prosedur tetap yang wajar, adil dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
4. Nasabah dengan kepentingan atas pengelolaan Dana Pihak Ketiga yang akuntabel.
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri perbankan yang stabil.

SASARAN, RENCANA DAN TARGET

Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta

pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada ke-2 aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

PENERAPAN INISIATIF OPERASI YANG ADIL

Perseroan memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Perseroan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan.

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan Perseroan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis Bank. Perseroan berharap,

penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja Perseroan dan melindungi seluruh insan BTN dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat. Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Laporan Tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perseroan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Bank.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP

Selaras dengan implementasi prinsip *sustainability*/keberlanjutan, dalam konteks yang lebih luas Perseroan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Pada konteks internal, Perseroan fokus untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat melalui kebijakan dan inisiatif yang berwawasan lingkungan.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan Perseroan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan terkait lingkungan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Perseroan menyadari perannya sebagai Bank yang memberikan pinjaman kredit/modal kepada nasabah dan juga sebagai agen pembangunan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Perseroan juga berfokus kepada penyaluran kredit yang ramah lingkungan melalui Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan. Dalam pedoman tersebut terdapat persyaratan kredit yang mewajibkan adanya dokumen Upaya Kelayakan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Bank terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

TARGET KEGIATAN

Program tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan dilakukan sebagai bentuk partisipasi Perseroan menuju *sustainable finance*. Perseroan menetapkan target pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Selain itu, target Perseroan lainnya yang ditetapkan yaitu melakukan pengelolaan dan pengkoordinasian aktivitas operasional lingkungan Perseroan dengan menerapkan program *green banking* oleh Bank Indonesia melalui penerapan strategi operasional dan penyaluran kredit yang ramah lingkungan. Dalam program *green banking*, Perseroan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dimana nasabah wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat disetujuinya pemberian kredit oleh Perseroan. Hal ini bertujuan untuk membangun sinergi strategis yang pada gilirannya meningkatkan sisi efisiensi dan efektivitas Perseroan.

Dalam hal lainnya, Perseroan juga menargetkan untuk melaksanakan komitmen pelestarian lingkungan di kawasan Kantor Pusat Perseroan dengan menjalankan kegiatan penghematan energi listrik dan pengurangan emisi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mewujudkan kebijakan dan target yang telah ditetapkan pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif baik diselenggarakan di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya.

PENERAPAN *GREEN BANKING*: PENYALURAN KREDIT RAMAH LINGKUNGAN

Sejalan dengan kebijakan *green banking* dan partisipasi Perseroan menuju *sustainable finance*, Perseroan secara konsisten menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif. Hal ini diwujudkan melalui program *training* untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam analisis lingkungan, baik secara *in-house training* maupun *external training*. Hasil pelatihan kemudian disosialisasikan ke tim kredit untuk diterapkan dalam proses persetujuan kredit.

Perseroan juga memiliki inisiatif untuk menerapkan *green finance product* (produk-produk Perseroan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola). Salah satu upaya yang konsisten dilakukan yaitu diaplikasikan dalam bentuk pemberian kredit. Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit ramah

lingkungan dengan tidak mengucurkan kredit kepada nasabah yang tidak menyertakan hasil AMDAL. Setelah itu terhadap nasabah yang sudah menyertakan hasil AMDAL-pun, Perseroan akan tetap melakukan pengecekan ke lapangan sebagai upaya validasi.

DIGITAL BANKING UNTUK PENGHEMATAN KERTAS (*PAPERLESS*)

Melalui penggunaan *digital banking*, Perseroan telah melakukan penghematan kertas dalam bertransaksi dengan nasabah menyarankan dan memaksimalkan penggunaan layanan *Electronic Channel*. Pada tahun 2019, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas, seperti disampaikan oleh manajemen untuk penghematan salah satunya dengan kertas. Dengan penghematan kertas,

maka Bank Tabungan Negara turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Pengurangan kertas dilakukan Perseroan melalui digitalisasi dokumen. Dengan digitalisasi, pemakaian kertas dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut:

- Tidak lagi menggunakan *faksimile*, surat menyurat dilakukan dengan menggunakan *email*.
- Paperless*: disposisi dan distribusi surat menggunakan sistem *IFlow*.
- Smart Branch*: tidak menggunakan slip setoran dan memaksimalkan digitalisasi.
- BTN Property.co.id : memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian rumah, menemukan rumah serta menikmati fasilitas fitur 3 dimensi melalui dukungan teknologi digital terkini serta dalam penerapannya Perseroan tidak membutuhkan banyak kertas.
- Rumah Murah BTN : memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menemukan aset melalui dukungan teknologi digital terkini serta dalam penerapannya Perseroan tidak membutuhkan banyak kertas.

Selain hal tersebut diatas, Perseroan juga mendukung efisiensi kertas dengan tetap menggunakan kertas bekas untuk Memo Internal.

Dari sisi operasional bisnis, Perseroan melakukan efisiensi penggunaan kertas melalui aplikasi *IFlow* yaitu aplikasi

surat menyurat lintas divisi dan atau lintas cabang yang pendistribusiannya terstruktur. Selain memiliki keunggulan dalam pendistribusian surat menyurat secara terstruktur, aplikasi ini juga memiliki manfaat lain di antaranya yaitu adanya kecepatan waktu dalam alur distribusi surat menyurat, adanya monitoring dokumen atau surat yang



telah terkirim, dan dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) untuk pencetakan.

Selain itu, komitmen Perseroan untuk menghemat penggunaan kertas juga diterapkan secara konsisten dengan memanfaatkan kembali kertas bekas, mengefektifkan penagihan melalui telepon atau secara

langsung yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi yang mendukung aplikasi *mobile*, *paperless*, *historical record* dan *parameterized*, menggunakan metode cetak *2-sided*, memanfaatkan *email*, serta inisiatif *Smart Branch* dengan tidak menggunakan Slip Setoran dan memaksimalkan digitalisasi.

PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN PENGURANGAN EMISI

Sepanjang tahun 2019, Perseroan melakukan berbagai inisiatif efisiensi penggunaan energi listrik untuk mengurangi sumbangan Perseroan terhadap emisi gas rumah kaca. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan antara lain:

1. Mempunyai tempat Pembuangan Sampah Sementara
 - a. Menggunakan tenaga surya untuk pemanas air.
 - b. Pengaturan debit air untuk konsumsi air (toilet, tempat wudhu, dll).
 - c. Pengaturan operasional utilitas dan listrik secara
4. Mencegah pencemaran lingkungan melalui kegiatan
 - a. Menggunakan *freon* pendingin ruangan (*Air Conditioning*) jenis R32, R134A dan R410.
 - b. Mempunyai tempat penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dengan kapasitas 104,5 Kg.
5. Gerakan bebas sampah plastik dengan mengurangi penggunaan air mineral kemasan dan alat makan sekali pakai pada saat *event* ataupun rapat baik dengan pihak internal ataupun eksternal dan mendorong kesadaran penggunaan *tumbler* atau botol minum bebas plastik.
6. Anjuran untuk pegawai agar menggunakan kendaraan umum menuju kantor. Mewajibkan kendaraan operasional untuk menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan kendaraan operasional BUMN menggunakan BBM *non-subsidi*. Melalui Memo No.1836/M/PGSD/GS/XI/2013 tanggal 6 November 2013, *Procurement and General Services Division*

(TPS) dengan kapasitas 5 m³ dan dilakukan pengangkutan ke TPA setiap hari.

2. Mempunyai 4 (empat) sumur resapan dengan kapasitas masing-masing sebesar 48 m³.
3. Melakukan penghematan energi:
 - otomatis dengan menggunakan BAS (*Buidilng Automation System*) untuk pemadaman lampu, *lift* dan unit AC *chiller*.

perbaikan secara berkelanjutan:

- c. Mempunyai tempat pengolahan air limbah gedung dengan kapasitas 260m³ / hari. Kondisi saat ini *output* 220 m³/hari sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang terbit tanggal 19 Juli 2018. menyampaikan Memo ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah mengenai larangan penggunaan bahan bakar minyak tertentu berupa bensin (*gasoline*) RON 88 untuk kendaraan operasional Perseroan.
7. Partisipasi dalam Program *Earth Hour* 2019; dan
8. Perseroan telah berpartisipasi menghemat konsumsi listrik pada Sabtu terakhir selama satu jam di Program *Earth Hour* yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2019 Partisipasi Perseroan dalam acara ini merupakan bentuk konsistensi dalam membangun budaya ramah lingkungan dan upaya untuk mengubah gaya hidup dengan mengurangi jejak ekologis dan emisi gas rumah kaca demi kelestarian bumi.

Dampak atas pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun 2019 Perseroan mencatatkan penggunaan energi listrik di Kantor Pusat sebesar 7.608.000 kWh. Penggunaan energi listrik sedikit turun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 7.863.780 kWh.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

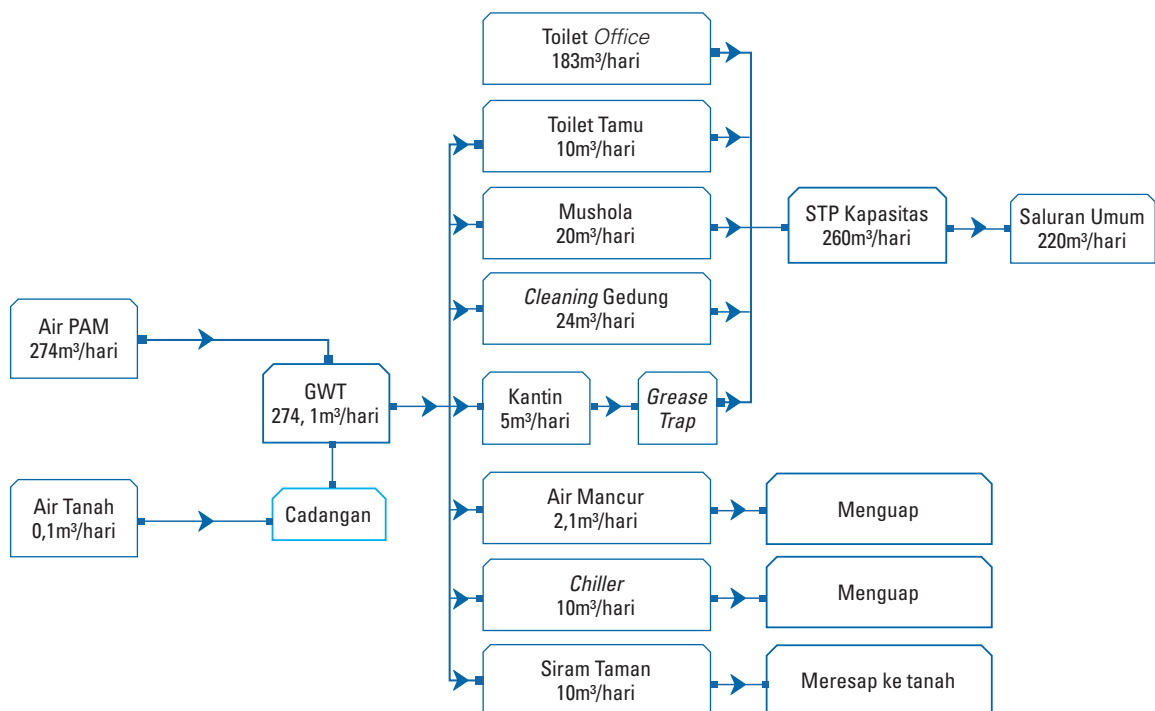
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP

PENGUNAAN AIR

Perseroan melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghimbau seluruh pegawai agar menutup kran air apabila tidak diperlukan. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan kembali air daur ulang untuk berbagai keperluan, seperti penyiraman tanaman serta secara rutin melakukan pengontrolan saluran air dan kran sebagai upaya antisipasi pemborosan dan kebocoran air.

Perseroan memaksimalkan penggunaan air PDAM sebagai sumber air utama sesuai dengan Peraturan Daerah terkait penggunaan air tanah. Perseroan menyediakan tempat pengolahan air limbah gedung dengan kapasitas 260 m³/hari dengan *output* saat ini mencapai 220 m³/hari sesuai

dengan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang terbit tanggal 19 Juli 2018. Air limbah yang dihasilkan diproses melalui STP (*Sewage Treatment Plan*) agar tidak berbahaya bagi lingkungan dan sudah mendapat Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dari Dinas terkait. Keseluruhan hal tersebut merupakan upaya Perseroan untuk melakukan penghematan penggunaan konsumsi air bersih, biaya perawatan dan biaya pembuangan air. Selain itu, Perseroan juga Pengaturan debit air untuk efisiensi penggunaan air di Gedung Menara BTN, dengan neraca pemakaian air bersih sebagai berikut:



Dampaknya pada tahun 2019, volume penggunaan air di Kantor Pusat Perseroan tercatat sebesar 93.537 m³ yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 97.859 m³, yang disebabkan Perseroan telah melaksanakan pengaturan debit air di Gedung Menara BTN. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan penghematan air khususnya di Kantor Pusat.

**PENGUNAAN AIR TANAH**

		2019	2018
SAP 02 (556)	Volume (m ³)	72	421
	Biaya (Rp)	1.217.966	7.221.728
SAP 03 (628)	Volume (m ³)	127	158
	Biaya (Rp)	2.249.855	2.672.759

PENGUNAAN AIR PDAM

	2019	2018
Volume (m ³)	93.537	97.859
Biaya (Rp)	1.175.720.190	1.229.932.290

PENGELOLAAN LIMBAH

Perseroan yang bergerak dalam industri perbankan menghasilkan limbah berupa sampah plastik, kertas dan air kotor. Limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Meski demikian, Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan limbah dari pemakaian air dengan STP (*Sewage Treatment Plan*) yang dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan standar manajemen lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Perseroan juga menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 dengan kapasitas 104,5 kg.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan secara rutin melaksanakan pengukuran air limbah di Kantor Pusat setiap tiga bulan sekali. Dengan adanya pengukuran tersebut, Perseroan dapat memberikan dampak berupa informasi bahwa air yang dibuang dipastikan sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga tidak mencemari lingkungan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP

Uraian mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan Perseroan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Jenis Limbah B3	Perlakuan	2019	2018	2017
Sampah Gedung (Limbah Sisa Makanan, Minuman, Kertas, Kardus)	Dihasilkan	30,706 kg	28.800 kg	38.400 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Oli Bekas	Dihasilkan	15 kg	20 kg	120 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Accu Bekas	Dihasilkan	20 kg	60 kg	20 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Lampu-Lampu (Lampu TL, PLC, Balas, Kabel)	Dihasilkan	7,5 kg	4.4 kg	10 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Limbah Tabung Freon	Dihasilkan	10 kg	20 kg	10 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya

Biaya pengelolaan STP (*Sewage Treatment Plan*) dan untuk biaya pengelolaan sampah tahun 2019:

DATA SAMPAH B3 MENARA BTN TAHUN 2019

No	Bulan	Pengeluaran Dalam Rupiah
1	Januari	Rp2.200.000
2	Februari	Rp2.200.000
3	Maret	Rp2.200.000
4	April	Rp2.200.000
5	Mei	Rp2.200.000
6	Juni	Rp2.200.000
7	Juli	Rp2.200.000
8	Agustus	Rp2.200.000
9	September	Rp2.200.000
10	Oktober	Rp2.200.000
11	November	Rp2.200.000
12	Desember	Rp2.200.000
Total		Rp26.400.000

**DATA SAMPAH MENARA BTN TAHUN 2019**

No	Bulan	Pengeluaran Dalam Rupiah
1	Januari	Rp9.900.000
2	Februari	Rp9.900.000
3	Maret	Rp9.900.000
4	April	Rp9.900.000
5	Mei	Rp9.900.000
6	Juni	Rp9.900.000
7	Juli	Rp9.900.000
8	Agustus	Rp9.900.000
9	September	Rp9.900.000
10	Oktober	Rp9.900.000
11	November	Rp9.900.000
12	Desember	Rp9.900.000
Total		Rp118.800.000

No	Perawatan STP	Pengeluaran Anggaran/Perbulan
1	Januari	Rp9.350.000
2	Februari	Rp9.350.000
3	Maret	Rp9.350.000
4	April	Rp9.350.000
5	Mei	Rp9.350.000
6	Juni	Rp9.350.000
7	Juli	Rp9.350.000
8	Agustus	Rp9.350.000
9	September	Rp9.350.000
10	Oktober	Rp9.350.000
11	November	Rp9.350.000
12	Desember	Rp9.350.000
Total		Rp112.200.000

HIJAU BTN

Hijau BTN merupakan salah satu wujud nyata program pelestarian alam oleh Perseroan. Kegiatan Hijau BTN meliputi kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon di sekitar wilayah kerja Perseroan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, Perseroan senantiasa mewajibkan untuk di setiap rumah yang dibangun memiliki lahan penghijauan untuk setidaknya ditanami satu pohon di setiap rumah.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Perseroan senantiasa membuka diri atas laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perseroan. Mekanisme atas pengaduan masalah terkait dengan lingkungan dapat disampaikan kepada Perseroan dengan mengirimkan laporan pengaduan terkait lingkungan sekitar Menara BTN melalui surat resmi. Selama tahun 2019, Perseroan tidak menerima pengaduan/keluhan terkait isu lingkungan dan juga tidak mendapatkan denda dan atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan Peraturan terkait lingkungan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP

SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan belum menerima sertifikasi terkait lingkungan hidup.

BIAYA PELAKSANAAN

Pada tahun 2019 Perseroan telah mengeluarkan biaya dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebesar Rp365 juta, sedangkan untuk biaya pengelolaan STP (Sewage Treatment Plan) dan untuk biaya pengelolaan sampah tahun 2019 sebesar Rp257,4 juta.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan menempatkan praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi pegawai maupun seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Perseroan memberikan kondisi lingkungan kerja yang aman serta hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan seluruh pegawai sebagai landasan dan prasyarat utama dalam mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berkelanjutan.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan berkomitmen dalam melaksanakan hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perseroan dengan pegawai, serta memastikan seluruh pegawai mendapatkan hak dalam bidang ketenagakerjaan yang sama. Komitmen ini tertuang dalam kebijakan Perseroan pada Peraturan Direksi No. 29/DIR/CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Human Capital (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain itu, Perseroan juga mematuhi kebijakan ketenagakerjaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja. Perseroan juga memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem remunerasi yang sesuai.

TARGET KEGIATAN

Perseroan menyusun target perencanaan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan arah dan strategi Perseroan dalam pengelolaan SDM. Target tersebut antara lain melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM (*People Transformation*) dalam rangka transformasi *digital banking*, pemenuhan terhadap kesejahteraan pegawai, perlakuan kesetaraan, serta menjalankan hubungan industrial yang harmonis. Keseluruhan target tersebut, sejalan dengan rencana transformasi bisnis, penguatan bidang sumber daya manusia dilakukan dengan memperkuat dan meningkatkan kapabilitas SDM sebagai agen implementasi transformasi.

KEGIATAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019, Perseroan menjalankan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Program Kesejahteraan Pegawai
Perseroan menjalankan program kesejahteraan pegawai melalui beberapa cara antara lain: kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, promosi kenaikan peringkat dan jabatan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Adapun komponen remunerasi dan fasilitas yang diperoleh pegawai tetap

yaitu gaji pokok, THR, uang cuti, uang sandang, tunjangan (posisi, perumahan, kendaraan, keahlian, BBM, lokasi, pajak), bonus kinerja, pinjaman perumahan, pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, fasilitas pemeliharaan kesehatan berkala, bantuan pengobatan dan bantuan uang duka.

2. Remunerasi: Pemenuhan Hak Pegawai
Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

produktivitas kerja yang optimal. Remunerasi diberikan kepada pegawai berdasarkan *merit system* dengan mengedepankan kinerja, kompetensi, dan integritas pegawai berupa gaji pokok, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem remunerasi Perseroan telah mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mematuhi

konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kesetaraan Remunerasi, dimana besaran gaji pegawai baru berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Uraian	2019	2018
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	21,82 : 1	35,4 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1	1,1 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,1 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,09 : 1	2,59 : 1

Yang dimaksud pegawai tertinggi adalah Pegawai Tetap dengan gaji tertinggi sedangkan pegawai terendah adalah Pegawai Tetap dengan gaji terendah

3. Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan

Secara berkesinambungan, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional bisnis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan potensi dirinya melalui program pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertuang yang dalam Surat Edaran No. 43/DIR/CMO/2011. Penerapan keikutsertaan memberikan kontribusi secara signifikan pada pencapaian kinerja bisnis Perseroan. Bentuk program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan terbagi dalam tiga kelompok program, yaitu: *School of Leadership*, *School of Operation* dan *School of Business* yang menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai, yaitu:

a. *School of Leadership*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk sikap kepemimpinan di level *Leader* Perseroan. Program ini terdiri dari ODP (*Officer Development Program*), MDP (*Management Development Program*), SDP (*Supervisor Development Program*), Program Beasiswa S2 luar

negeri maupun dalam negeri, SESPIBANK (Sekolah Staf dan Pimpinan Bank) Dewan Komisaris dan Direksi, EDP (*Executive Development Program*) luar negeri untuk Kepala Divisi, serta program *leadership* lainnya.

b. *School of Operation Banking*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi bagian pendukung dari Perseroan sebagai penunjang bisnis Perseroan. Pelatihan ini terdiri dari bidang Audit, *Compliance*, *Corporate Affair*, *Faculty of Human Capital*, *Information Technology*, *Legal*, *Management System*, *Risk*, *Finance & Accounting*, *Operational Banking* dan lainnya.

c. *School of Business Banking*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi yang berfokus pada pengembangan bisnis dan manajemen yang terdiri dari bidang *Collection & Asset Management*, *Commercial Funding*, *Retail Funding & Service*, *Commercial Lending*, *Consumer Lending*, *Digital Banking*, Pembiayaan Syariah, *Service Quality*, *Sharia Funding*, *Sharia Others*, *Treasury*, *Wealth Management* dan lainnya.



Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	
	2019	2018
<i>School Of Business</i> • Loan Academy • Sales Academy • Wealth Management Series • Collection Series • Asset Management Series • Service Series • Sharia Series • Financing Academy	12.632	10.153
<i>School of Operational Banking Training Program</i> • Audit • Compliance • Corporate Affair • Human Capital • Information Technology • Legal • Management System • Risk • Finance & Accounting • Operational Banking	37.690	13.781
<i>School of Leadership</i> • Executive Training for Board of Directors • Executive Training for Board of Commisionners • Executive Training for Division Head & Regional Office Head • SESPIBANK (Sekolah Staff dan Pimpinan Bank) • Executive Development Program (EDP) • Vice President Development Program (VPDP) • Senior Manager Development Program (SMDP) • Manager Development Program (MDP) • Officer Development Program (ODP) • Supervisor Development Program (SDP) • Branch Manager Development Program (BMDP) • Leadership Series • Beasiswa S1 Dalam Negeri	5.936	4.893

4. Perlakuan Setara bagi Seluruh Pegawai Perseroan telah menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pada tahun 2019, jumlah pegawai Perseroan sebanyak 11.647 pegawai, terdiri dari sebanyak 54,46% atau 6.343 pegawai merupakan pegawai laki-laki dan sebanyak 45,54% atau 5.304 pegawai merupakan pegawai perempuan. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa sistem rekrutmen Perseroan

diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita dalam memperkerjakan pegawai.

Dalam hal kesempatan kerja, pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja. Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat, baik pria dan wanita, tanpa melakukan praktik diskriminasi yang memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender ataupun kondisi



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN,

fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pada praktiknya Perseroan membuka kesempatan bagi kandidat terbaik penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya di Perseroan. Hingga akhir tahun 2019, Perseroan memiliki sebanyak 4 (empat) orang pegawai merupakan penyandang disabilitas di beberapa kantor cabang seperti Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Malang, Kantor Cabang Medan dan *Human Capital Management & Culture Specialist Division* (HMCD).

5. **Perlindungan terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)**
Perseroan menempatkan pegawai sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menghormati hak dan melaksanakan kewajiban kepada pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menciptakan hubungan yang harmonis. Perseroan membentuk Lembaga Kerja sama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Perseroan yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN).

Selain itu, Perseroan juga telah menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak dan kewajiban Perseroan dan pegawai guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Perseroan secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja yang membahas berbagai hal terkait pemenuhan hak dan kewajiban pegawai ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai. Pada tahun 2019, seluruh pegawai tetap Perseroan (100%) telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

6. **Tingkat *Turnover* Pegawai**
Pada tahun 2019, tingkat pergantian (*turnover*) pegawai tercatat sebesar 1,51% atau sebanyak 176 pegawai mengambil keputusan meninggalkan perusahaan secara sukarela (*voluntary resign*). Namun demikian, tingkat *turnover* pegawai tersebut masih berada pada level rata-rata industri perbankan. Tingkat *turnover* ini disebabkan oleh karyawan yang memasuki masa pensiun dan pegawai juga mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

PERKEMBANGAN TINGKAT *TURNOVER* PEGAWAI

Keterangan	2019	2018	2107	2016	2015
Jumlah Pegawai*	11	11.810	10.360	9.424	9.069
<i>Voluntary Resign</i> **	176	267	235	248	338
Rasio <i>Turn Over</i>	1,51%	2,26%	2,27%	2,63%	3,73%

Keterangan : * Jumlah Pegawai yaitu jumlah pegawai tetap ditambah dengan pegawai kontrak/calon pegawai/PKWT

** Keputusan Pegawai untuk meninggalkan organisasi secara sukarela (mengundurkan diri dan pensiun dini)

7. ***Employee Engagement System* (EES)**
Perusahaan secara rutin melakukan *Employee Engagement System* (EES) dengan tujuan untuk mengukur keterikatan pegawai, sekaligus menjadi tolak ukur tentang suasana kerja yang kondusif yang dapat memberikan gambaran keselarasan tujuan pegawai dengan tujuan Perseroan. Skor EES Perseroan tahun 2019 menunjukkan angka 86% Hasil EES tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai cukup tinggi. Skor EES Perseroan dalam dua tahun terakhir berada di atas acuan tingkat keterikatan pegawai lainnya seperti Financial Institution APAC, Financial Institution Indonesia serta BE Indonesian benchmark.



BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan nyaman bagi seluruh pegawai dengan senantiasa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal. Pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 86 ayat 2 terkait perlindungan pegawai, implementasi program kesehatan dan keselamatan pegawai juga tertuang dalam kebijakan internal Perseroan yaitu:

1. Peraturan Direksi No. 5/PD/PGSD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Surat Edaran Direksi No. 60/DIR/PGSD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

TARGET KEGIATAN

Pada tahun 2019, Perseroan menetapkan target kegiatan bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berfokus pada peningkatan kompetensi, pelatihan dan kesadaran pegawai dalam bekerja sehingga penerapan K3 dapat berjalan optimal dengan target *zero accident*. Perseroan juga senantiasa memberikan fasilitas kesehatan yang

memadai bagi para pegawai. Sedangkan pengelolaan keselamatan kerja ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penetapan target tersebut diharapkan produktivitas pegawai akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

KEGIATAN BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi kegiatan peningkatan pemahaman K3, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, penyediaan sarana keselamatan kerja beserta pelatihan K3, serta implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman K3 Perseroan kembali melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan untuk menghadapi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2018. Perseroan bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku. Untuk mewujudkan kesehatan kerja, Perseroan melakukan upaya program kesehatan pada proses bisnis, fasilitas *Medical Check Up* secara berkala, melakukan pelatihan, melakukan simulasi tanggap darurat medis dan melakukan *workshop* tentang Kesehatan Kerja.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
Perseroan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai dan mendaftarkan pegawai dalam program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan bantuan persalinan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan karyawan dan menjalin kerja sama dengan berbagai Rumah Sakit yang tersebar di wilayah operasi Perseroan.

Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fasilitas K3, untuk memastikan seluruh fasilitas tersebut dapat bekerja maksimal pada saat dibutuhkan. Dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan senantiasa menjaga keselamatan kerja pegawai, diharapkan produktivitas pegawai akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN,

3. Sarana Keselamatan Kerja dan Pelatihan K3

Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan berbagai jenis bencana di lingkungan kerja, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai sarana keselamatan kerja standar. Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti seperti: Alat Pemadam Api Ringan (Apar), *smoke detector*, *diesel pump*, tangga darurat dan rambu-rambu keselamatan kerja yang telah sesuai dengan standar alat keselamatan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Perseroan juga melakukan inspeksi atau pengecekan rutin alat keselamatan kerja untuk mengetahui tingkat kelayakannya, memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk operator perangkat keselamatan kerja, seperti pesawat angkat dan angkut serta memiliki rencana situasi kebakaran dan peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh pegawai teredukasi dengan baik.

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan terus mengirimkan pegawai pada pelatihan K3 agar memahami dan sadar pentingnya K3 serta bertindak benar sesuai dengan kaidah K3. Perseroan rutin mengikutsertakan pegawai dalam sertifikasi pelatihan “Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)” yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Seluruh pegawai juga telah diikutsertakan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi pegawai terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Tahun 2019, Perseroan telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai komitmen Perseroan dalam pengelolaan K3 yang mengatur terkait *Standard Operational Procedure* (SOP) SMK3 dan Kebijakan Khusus K3 Perseroan. Tujuan dari penerapan SMK3 adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi serta untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di tahun 2019 juga Perusahaan kembali melakukan Sertifikasi AK3U kepada beberapa pegawai Perseroan. Program sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penerapan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Adapun materi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja mencakup:

- Sarana dan prasarana pendukung operasional gedung misal *lift*, genset, AC, penerangan;
- Pelaksanaan *medical check up* secara rutin kepada pegawai;
- Peralatan pendukung kerja seharusnya tidak mempunyai efek kepada kesehatan; dan
- Rotasi pegawai secara periodik sehingga tidak terganggu psikologisnya.

5. Tingkat Kecelakaan Kerja

Selama tahun 2019, Perseroan telah menjalankan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja pegawai secara baik dan optimal. Tercatat, selama periode pelaporan tidak ada pegawai Perseroan yang dalam kegiatannya kerja sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit akibat kerja tertentu (*zero accident*).



MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Perseroan menyediakan saluran pengaduan bagi pegawai dalam berhubungan dengan Perseroan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan di bidang perlindungan pegawai dan menjamin hak-hak dalam berhubungan dengan Perseroan. Beberapa mekanisme penyampaian keluhan pegawai dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila terlapor adalah pegawai Perseroan, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada tim *Whistle Blowing System* dengan alamat:
 - a. Tim *Whistle Blowing System* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - b. PO BOX *Whistle Blowing System* (WBS) BTN Jakarta
 - c. Email: wbs.btn@btn.co.id
 - d. SMS/Handphone: +6281311434343

Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan media lainnya oleh Pelapor/*Whistle Blower*.

2. Apabila terlapor adalah anggota Tim *Whistle Blower System*, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama.
3. Apabila terlapor adalah anggota Direksi atau keluarganya maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Dewan Komisaris.
4. Apabila terlapor adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung Direktur Utama.

Dengan adanya pengelolaan dan penerapan yang efektif terkait praktik ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, selama tahun 2019 tidak terdapat pengaduan terkait praktik ketenagakerjaan maupun pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang dialami oleh pegawai Perseroan.

SERTIFIKASI

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Upaya sertifikasi ini mendorong Perseroan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan selamat bagi pegawai Perseroan

Jenis sertifikasi	Sertifikat Keselamatan Kebakaran
Masa berlaku	20 Oktober 2018 *telah diperpanjang
Lembaga Pemberi	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN

Sebagai Bank pelopor penyedia rumah bagi lapisan masyarakat, Perseroan terus membangun dan mempertahankan reputasi dengan memperkuat komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah. Perseroan menyadari bahwa layanan perbankan yang berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis.

Memahami kebutuhan nasabah, mengedepankan layanan prima, serta optimalisasi *digital banking*, merupakan cara Perseroan guna memastikan pertumbuhan usaha jangka panjang. Pada akhir tahun 2019, Perseroan telah menghadirkan sejumlah layanan berbasis teknologi digital untuk seluruh produk dan transaksi secara bertahap agar transaksi perbankan menjadi lebih efisien, mudah dan praktis.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah secara menyeluruh dengan menerapkan sistem pelayanan yang terbaik. Kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan Perseroan. Di sisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Langkah tersebut tidak hanya selaras dengan pengembangan bisnis tetapi juga penting dalam penerapan budaya dan nilai-nilai Perseroan yang senantiasa menjaga kepentingan nasabah.

TARGET KEGIATAN

Perseroan telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan berbagai program antara lain dengan adanya perlindungan bagi nasabah, pengembangan pelayanan, edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan penyaluran CSR kepada nasabah dan/ atau lingkungannya.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

Penyaluran CSR kepada nasabah dan/atau lingkungannya yang merupakan tanggung jawab Perseroan kepada nasabah akan berdampak kepada peningkatan loyalitas nasabah.

PROGRAM PENINGKATAN LOYALITAS NASABAH

Program peningkatan loyalitas nasabah ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Perseroan melalui berbagai layanan, fasilitas dan kebutuhan yang disesuaikan dengan keinginan nasabah.



Pada tahun 2019, Perseroan melakukan berbagai hal terkait program ini sebagai berikut:

1. Layanan TCASH-BTN Cermat

Untuk mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor yang sejalan dengan program inklusi keuangan (Laku Pandai), Perseroan dan Telkomsel bekerja sama meluncurkan produk layanan TCASH- BTN Cermat. Layanan TCASH-BTN Cermat adalah layanan yang menggabungkan manfaat layanan uang elektronik TCASH dengan tabungan BTN Cermat. Produk ini didesain untuk memudahkan transfer atau pengiriman saldo dari akun tabungan BTN Cermat ke akun *e-money* TCASH Telkomsel dan begitu juga sebaliknya. Kemitraan ini juga merupakan langkah dalam mendukung sinergi BUMN. Perseroan terus berupaya menjangkau masyarakat *unbanked* yang tidak terjangkau layanan perbankan karena letak geografisnya. Dengan adanya kemitraan antara Perseroan dan Telkomsel maka akan mewujudkan ekosistem layanan keuangan *mobile* yang terintegrasi, terutama dalam rangka percepatan program Gerakan Nasional *Non-Tunai* (GNNT).

2. Plaza KPR dan *Hotline* KPR

Sebagai bentuk inovasi Perseroan untuk mempermudah dan mempercepat layanan KPR guna mendukung Program Sejuta Rumah, Perseroan meluncurkan program Plaza KPR dan *Hotline* KPR. Hal ini sekaligus sebagai wujud peningkatan layanan pelanggan, sehingga diharapkan dengan adanya program Plaza KPR dan *Hotline* KPR dapat lebih

memudahkan nasabah dalam menemukan produk KPR yang menjadi pilihannya.

3. Dukung Sejuta Rumah, Perseroan Siapkan Rumah Murah Bagi Pekerja Informal

Dalam rangka menjangkau masyarakat yang belum memiliki rumah sekaligus menyelesaikan Program Sejuta Rumah, Perseroan kembali memperluas akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi para *driver online* sejak tahun lalu. Tujuan program ini untuk menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki hunian, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Melalui langkah strategis tersebut, tukang ojek *online* dan pengemudi taksi diberi kesempatan untuk mengakses KPR Perseroan dengan bunga rendah dan skema cicilan ringan.

4. Fasilitas KPR Mikro

Perseroan juga menyediakan fasilitas KPR Mikro bagi para pekerja informal lainnya. Fasilitas tersebut sebagai wujud komitmen Perseroan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Melalui fasilitas KPR BTN Mikro, para pekerja informal bisa memiliki rumah dengan plafon kredit maksimal Rp75 juta dan tenor 20 tahun. KPR BTN Mikro juga menawarkan skema pembiayaan dengan besaran uang muka dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan pekerja. Langkah ini juga sejalan dengan inklusi keuangan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia mengakses layanan perbankan.

AKSES INFORMASI PRODUK

Perseroan menyediakan akses informasi produk dan jasa perbankan yang salah satunya melalui *website* www.btn.co.id. Selain itu, Perseroan juga membuat dan melaksanakan sistem serta prosedur untuk memastikan bahwa informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia secara terbuka.

Bentuk transparansi informasi produk Perseroan dan penggunaan data pribadi nasabah yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Perseroan;

2. Menyampaikan informasi tersebut kepada Nasabah secara tertulis dan/atau lisan;
3. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*);
4. Informasi mengenai karakteristik produk Perseroan dimaksud meliputi: nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk Perseroan, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk serta penerbit (*issuer/originator*) produk Perseroan;
5. Memberikan informasi mengenai program penjaminan



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

- terhadap produk yang terkait dengan produk Perseroan dan penghimpunan dana;
6. Memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik produk Perseroan;
 7. Mencantumkan informasi mengenai karakteristik produk Perseroan yang letak dan atau bentuknya

terlihat dan atau terbaca secara jelas dan atau mudah dimengerti;

8. Menyediakan layanan informasi karakteristik produk Perseroan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas dan mempublikasikannya melalui *website* Perseroan yaitu www.btn.co.id yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat luas.

PROGRAM EDUKASI NASABAH

Pada program edukasi nasabah, Perseroan telah menjalankan program *financial literacy* maupun edukasi keuangan lainnya setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai program cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Pada tahun 2019, Perseroan melaksanakan program edukasi kepada nasabah melalui salah satunya dengan BTN Laku Pandai dimana jumlah rekening nasabah sebesar 1.649.508 per desember 2019.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN NASABAH

Komitmen Perseroan dalam kesehatan dan keselamatan nasabah diwujudkan dengan menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan kenyamanan sesuai standar minimal sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Perseroan bekerja sama dengan pengembang dan kontraktor dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Dalam kerja sama tersebut, Perseroan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi dan *fairness* sehingga kesehatan dan keselamatan nasabah dapat terjaga. Selain itu, Perseroan juga menjamin keselamatan nasabah dengan menjaga kerahasiaan/privasi data nasabah.

KERAHASIAAN DATA NASABAH

Perseroan senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; (3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Terkait kebijakan kerahasiaan Nasabah.

Perseroan juga telah memiliki kebijakan khusus berupa Surat Edaran Direksi No. 40/DIR/ICTD/2016 perihal Pedoman Keamanan Informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada kebijakan tersebut, Perseroan menetapkan prasyarat untuk memastikan bahwa semua informasi rahasia dan sensitif dilindungi dari virus komputer sehingga dapat meminimalkan dan kerusakan akibat infiltrasi virus komputer. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan untuk menjaga data nasabah di antaranya yaitu menginstalasi semua *software* yang telah disetujui dan



memperbaruinya secara berkala, memberikan pelatihan keamanan TI kepada *user* yang menggunakan sumber daya TI, menerapkan manajemen/standarisasi *password* untuk menjamin akses terhadap informasi yang dilindungi.

Pada tahun 2019, Perseroan tidak mencatatkan adanya keluhan dari nasabah terkait dengan kebocoran data maupun kerahasiaan data nasabah. Perseroan juga tidak mendapati adanya data nasabah yang hilang serta pengaduan lain dari pihak luar maupun pihak regulator

JAMINAN PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH

Salah satu kunci keberlangsungan usaha dalam industri perbankan adalah terpeliharanya kepercayaan nasabah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi internal Perseroan berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Kepercayaan juga lahir atas adanya kepastian hukum dalam pengaturan,

pengawasan Bank dan penjaminan simpanan nasabah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perseroan memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

MEKANISME PENGADUAN NASABAH

Perseroan telah melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan nasabah sesuai dengan melalui pusat pengaduan nasabah melalui Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) yang dapat memantau penyelesaian pengaduan secara menyeluruh. Implementasi SPN didasarkan pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

pengaduan sekaligus memberikan kepastian bagi para nasabah tentang jangka waktu yang dibutuhkan Perseroan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Dengan menggunakan sistem yang *online* dan terpadu, para nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan dan mengecek status pengaduan di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Selain itu, melalui SPN, mekanisme penanganan keluhan menjadi lebih terstruktur dan dapat dimonitor dengan baik.

SPN merupakan sistem berbasis *web* yang dapat memudahkan pemantauan terhadap status penyelesaian

MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Pusat pengaduan nasabah dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain:

Kantor Pusat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp.	:	(021) 6336789
Fax	:	(021) 6336719
Contact Center dengan nomor	:	1500 286
E-mail Contact Center	:	btncontactcenter@btn.co.id



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DALAM SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ATAU WHISLTE BLOWING SYSTEM (WBS) PERSEROAN

Selama tahun 2019 laporan yang masuk melalui WBS senantiasa mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dengan baik bahwa pengaduan yang masuk melalui sarana WBS tercatat sebanyak 90 pengaduan yang terdiri dari 15 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 26 pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung dan 49 pengaduan melalui Email. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 80 pengaduan telah selesai tanpa proses audit klarifikasi dan/atau audit khusus dan sebanyak 10 pengaduan diteruskan melalui proses audit klarifikasi dan/atau audit khusus.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perseroan terhadap keluhan dan pengaduan yang disampaikan tersebut antara lain:

1. Melakukan verifikasi secara mendalam dengan berkoordinasi bersama kantor cabang, divisi dan pihak lain terkait seperti: provider jaringan, *developer*, notaris, dan lainnya;
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah terkait proses penyelesaian pengaduan;
3. Melakukan monitoring atas pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*) penyelesaian pengaduan;
4. Melakukan perbaikan pada sistem prosedur dan peningkatan pemahaman pegawai serta memberikan informasi kepada nasabah agar permasalahan yang masuk dalam bentuk keluhan nasabah agar permasalahan yang masuk dalam bentuk keluhan nasabah tidak terulang.

SURVEI KEPUASAN NASABAH

Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga melaksanakan survei kepuasan nasabah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode tersebut dilakukan melalui *in depth interview*, sedangkan metode pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode *face to face interview*.

DAMPAK KEGIATAN

Perseroan memberikan rasa nyaman dan aman kepada nasabah dalam bertransaksi. Hal ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan jumlah nasabah Perseroan dari tahun ke tahun. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah telah memberikan dampak pada indeks kepuasan nasabah.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sebagai Bank pelopor penyedia rumah bagi lapisan masyarakat, Perseroan terus membangun dan mempertahankan reputasi dengan memperkuat komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah. Perseroan menyadari bahwa layanan perbankan yang berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis.

Memahami kebutuhan nasabah, mengedepankan layanan prima, serta optimalisasi *digital banking*, merupakan cara Perseroan guna memastikan pertumbuhan usaha jangka panjang. Pada akhir tahun 2019, Perseroan telah menghadirkan sejumlah layanan berbasis teknologi digital untuk seluruh produk dan transaksi secara bertahap agar transaksi perbankan menjadi lebih efisien, mudah dan praktis.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah secara menyeluruh dengan menerapkan sistem pelayanan yang terbaik. Kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan Perseroan. Di sisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Langkah tersebut tidak hanya selaras dengan pengembangan bisnis tetapi juga penting dalam penerapan budaya dan nilai-nilai Perseroan yang senantiasa menjaga kepentingan nasabah.

TARGET KEGIATAN

Perseroan telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan berbagai program antara lain dengan adanya perlindungan bagi nasabah, pengembangan pelayanan, edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan penyaluran CSR kepada nasabah dan/atau lingkungannya.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

Penyaluran CSR kepada nasabah dan/atau lingkungannya yang merupakan tanggung jawab Perseroan kepada nasabah akan berdampak kepada peningkatan loyalitas nasabah.

KEGIATAN UTAMA CSR

Peran aktif Perseroan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dilakukan melalui Program CSR. Pada tahun 2018, Perseroan kembali melanjutkan Program Lingkungan Harmoni BTN yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara terpadu melalui beberapa pelatihan dan/atau pendidikan serta pendampingan kepada masyarakat sebagai dasar pengembangan program yang terintegrasi. Terdapat Sembilan kegiatan utama yang menjadi fokus program pengembangan masyarakat yaitu; Program Sejahtera BTN, Religi BTN, Hijau BTN, Bugar BTN, Sehat BTN, Cerdas BTN, Bersih BTN, Peduli BTN serta Kemitraan BTN.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENGUNAAN TENAGA KERJA DAN PEMASOK LOKAL

Perseroan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan CSR yang memberikan efek pengembangan dan pemberdayaan secara langsung bagi masyarakat. Karena itu, Perseroan merekrut tenaga kerja lokal dalam mendukung kegiatan operasional serta melakukan kerja sama dengan pemasok lokal terkait kebutuhan barang dan jasa sebagai mitra kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama dengan perusahaan bidang

konstruksi sebagai pendukung dalam terwujudnya Program Sejuta Rumah. Dalam pemilihan pemasok lokal sesuai dengan konteks keberlanjutan, Perseroan memaksimalkan pemilihan pemasok lokal yaitu pemasok yang berasal dari Indonesia. Hal ini selain untuk menekan biaya operasional, juga bertujuan untuk mendukung kemajuan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

PROGRAM EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN

Program Edukasi dan Literasi Keuangan Perbankan merupakan implementasi dari arahan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan pemahaman yang baik tentang perbankan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung program tersebut, sepanjang tahun 2018 Perseroan telah menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan untuk

mengelola sumber daya keuangan (literasi keuangan) bagi masyarakat dalam mencapai atau meningkatkan kesejahteraan, antara lain:

1. *Edukasi Smart Branch* dalam Program Siswa Mengenal Nusantara;
2. BTN Zone; dan
3. Taman Bacaan Sekolah.

KOMUNIKASI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

Perseroan telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dalam rangka penegakan penyelenggaraan perbankan yang bersih dan transparan, antara lain tertuang dalam kode etik Perseroan, termasuk di dalamnya penerapan *Anti Fraud*. Pelaksanaan penerapan *anti fraud* di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 22/DIR/ IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang *Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Strategi *Anti Fraud* memiliki 4 (empat) pilar yaitu (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan dan sanksi; serta (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Dalam menjalankan program pengelolaan *anti fraud*, Perseroan menyadari pentingnya membangun budaya *anti fraud*. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan Program Sosialisasi Peningkatan *Awareness* kejadian *Fraud* di lingkungan kerja yaitu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* perihal kebijakan Strategi Anti Fraud, korupsi dan pencucian uang, serta Penerapan Pengendalian Gratifikasi. Program Sosialisasi Peningkatan *Awareness* tersebut disosialisasikan Perseroan kepada nasabah maupun masyarakat melalui pemasangan *banner* tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang Perseroan.



PELATIHAN ANTI KORUPSI

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan berbagai program awareness terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perseroan di antaranya melalui implementasi Integrated Governance Risk and Compliance (iGRC), selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anti korupsi sebagai komitmen dalam pengendalian praktik *fraud*/ gratifikasi. Perseroan juga

turut berpartisipasi dalam program awareness terkait anti korupsi yang diadakan oleh KPK. Adanya sosialisasi dan pelatihan program pengendalian gratifikasi ini dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, *fraud* maupun praktik korupsi khususnya di lingkungan Perseroan.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PROGRAM KEMITRAAN

Komitmen Perseroan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha kecil guna menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang telah dianggarkan oleh Perseroan. Target atas program ini adalah memilih mitra binaan yang memiliki prospek baik pada masa mendatang, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta memiliki motivasi menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Perseroan berharap agar dana yang dialokasikan

dan dipinjamkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga menghasilkan daya guna yang optimal.

Pada tahun 2019, Perseroan telah menyalurkan bantuan untuk program kemitraan Rp21.672.794.000 kepada 278 mitra binaan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) sektor meliputi sektor perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, industri, usaha jasa dan perdagangan. Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2019 sebagai berikut:

REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BERDASARKAN SEKTOR USAHA TAHUN 2019

Sektor Usaha	Jumlah Debitur	Realisasi (Rp-juta)
Sektor Industri	5	223.000.000
Sektor Usaha Perdagangan	165	7.089.950.000
Sektor Usaha Pertanian	2	25.000.000
Sektor Usaha Perkebunan	0	0
Sektor Usaha Peternakan	19	1.988.000.000
Sektor Usaha Perikanan	22	1.073.000.000
Sektor Usaha Jasa	64	4.587.000.000
Sektor Industri Kreatif	1	50.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan (Hibah)	0	6.636.844.000
Sektor Usaha Lainnya	0	0
Jumlah	278	21.672.794.000



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BERDASARKAN SEBARAN
KANTOR WILAYAH PERSEROAN TAHUN 2019**

Provinsi	Jumlah Debitur	Realisasi (Rp-juta)
Bangka Belitung	4	130.000.000
Banten	31	1.469.000.000
Bengkulu	3	90.000.000
DI Yogyakarta	7	235.000.000
DKI Jakarta	35	2.266.200.000
Gorontalo	1	30.000.000
Jambi	4	145.000.000
Jawa Barat	36	2.921.500.000
Jawa Tengah	34	2.400.000.000
Jawa Timur	51	2.249.500.000
Kalimantan Barat	2	47.000.000
Kalimantan Selatan	12	470.000.000
Kalimantan Tengah	4	155.000.000
Kalimantan Timur	2	245.000.000
Kepulauan Riau	2	40.000.000
Lampung	1	40.000.000
Maluku	3	42.750.000
Maluku Utara	4	115.000.000
Nanggroe Aceh Darussalam	2	230.000.000
Nusa Tenggara Barat	12	470.000.000
Nusa Tenggara Timur	3	70.000.000
Papua	2	80.000.000
Sulawesi Selatan	2	50.000.000
Sulawesi Tengah	1	50.000.000
Sulawesi Tenggara	3	290.000.000
Sumatera Barat	9	550.000.000
Sumatera Selatan	2	55.000.000
Sumatera Utara	6	100.000.000
Grand Total	278	15.035.950.000



PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Perseroan melaksanakan program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah Perseroan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Pada tahun 2019, realisasi penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan sebesar Rp20.071.000 yang disalurkan kepada masyarakat di 34 Provinsi melalui 6 (enam) wilayah kerja Perseroan.

Dana bantuan program Bina Lingkungan disalurkan melalui berbagai kegiatan bantuan meliputi pendidikan dan pelatihan, prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, peningkatan kesehatan dan sosial masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Berikut realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2019.

REALISASI PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BERDASARKAN BIDANG KEGIATAN TAHUN 2019

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)
Bencana Alam	426
Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.375
Peningkatan Kesehatan	365
Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	438
Sarana Ibadah	7.917
Pelestarian Alam	350
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, termasuk untuk:	5.199
1. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;	
2. Penyediaan sarana air bersih;	
3. Penyediaan sarana mandi cuci kakus;	
4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;	
5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;	
6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; dan	
7. Bantuan peralatan usaha.	
Jumlah Penyaluran	20.071

ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN CSR

Anggaran dana CSR Perseroan ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Perseroan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Pada tahun 2019, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk program CSR sebesar Rp6.941.992.401 yang telah disalurkan kepada berbagai bidang kegiatan meliputi; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, seni budaya serta kegiatan keagamaan.

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)		
	2019	2018	2017
Ekonomi	662	1.456	451
Seni Budaya	63	100	115



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)		
	2019	2018	2017
Olahraga	0	149	-
Pendidikan	2.304	1.047	228
Kesehatan	0	204	20
Sarana dan Prasarana	2.952	645	4.214
Keagamaan	946	1.574	120
Pelestarian Alam	15	6	-
Jumlah	6.942	5.180	5.148

Keterangan**Januari**

Penyediaan Taman Bacaan Sekolah (TBS) bekerja sama dengan PT. Balai Pustaka untuk SDN IV Jambi.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan desain *my creation is my feeling* dalam rangka menyambut Hari Santri Tahun 2018.

Penanggulangan bencana banjir bandang yang melanda Perumahan Gajah Mada Yahim, Kabupaten Jayapura.

Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan merangkai bunga dari bahan akrilik yang diselenggarakan oleh Aktivis Pemuda Pencinta Lingkungan.

Partisipasi Bank BTN pada renovasi Masjid Al Mujahidin yang berlokasi di Grumbul Karangreja, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Renovasi Musholla Ar Rohman yang berlokasi di Dusun Kawunganten RT 05/02, Desa Kawunganten Lor, Kabupaten Banyumas.

Tanggap darurat atas terjadinya bencana Tanah Longsor yang melanda Kampung Cimapag Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi.

Partisipasi Bank BTN dalam perbaikan sarana dan prasarana umum berupa perbaikan lingkungan di sekitar Makam Syeh Hasan Anwar yang berlokasi di Desa Tengguli Dukuh Kali Telon, Jepara, Jawa Tengah.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa kegiatan pemagaran peruntukan SD RA Kartini yang berlokasi di Jalan Buyut Kuntul Dusun Terungtum, Desa Patimban, Kec. Pusanegara, Kabupaten Subang Jawa Barat.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat berupa *sound system*, *mic wireless* dan toa *megaphone* untuk masyarakat RT 009/010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besa Jakarta Pusat.

Tanggap darurat bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi TPQ Baiturrohman yang berlokasi di Jl. Merapi No. 25 Kota Semarang.

Perbaikan talud perumahan Graha Taman Bougenville, Kelurahan Mangunharjo, Kec. Tembalang Kota Semarang yang roboh akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2018.

Bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu atas nama Ibu Sumarsih yang beralamat di Wonosidi Kidul RT 004/013 Wates Kabupaten Kulonprogo, DIY.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Masjid Jenderal Sudirman yang berlokasi di Perumahan Pussenif Kota Bandung.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Masjid Jami' Babul Falah Kayulaut yang berlokasi di Desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.



Keterangan

Februari

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi renovasi Masjid Al Barokah yang berlokasi di Desa Cibalandongjaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang Jawa Barat.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan masyarakat berupa ruang serbaguna (Sekretariat) yang berlokasi di Kramat V RT 004/09 kelurahan Kenari Jakarta Pusat.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Kejuruan Komputer yang dilaksanakan oleh LPK Kanira yang beralamat di Ciparay Indah No. 5A, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jalan Delima Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat.

Program sertifikasi untuk peningkatan mutu pendidikan pada 114 Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Penyaluran bantuan Bank BTN untuk penanggulangan bencana alam di Indonesia kepada Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri.

Maret

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi bagi 114 Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Garut.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan untuk renovasi Majelis Ta'lim Al Junaidyah yang beralamat di Jalan Talib Baru III RT 015/03 No. 27, Kelurahan Krukut, Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

Penyediaan sarana penunjang untuk mendukung kesehatan lingkungan berupa 2 (dua) unit alat *fogging* dan 1 (satu) unit alat pemotong rumput bagi masyarakat di Kampung Rawa Sapi, kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi.

Partisipasi Bank BTN pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah berupa renovasi lapangan upacara di SDN Benhil 12 Jakarta Pusat.

Partisipasi Bank BTN dalam pembangunan Masjid Al Haq yang berlokasi di Perumahan Pepabri, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang tanggap darurat banjir bandang di Kabupaten Madiun.

Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Jalan Lamda Raya No. 1 Cimone Permai Karawaci Kota Tangerang.

Partisipasi Bank BTN dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi Ibu Parjiyah yang beralamat Beji RT 003/002, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo DIY.

Penyaluran beasiswa untuk 25 orang mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Pelatihan Pajak dan *E-Commerce* bagi petugas Rumah Kreatif BUMN di Palembang bekerja sama dengan KPP Wilayah Palembang.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk pembangunan Masjid Roudlotus Solikhin yang beralamat di Klipang Pesona Asri, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk betonisasi Jalan Desa Dragan, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang tanggap darurat banjir bandang di Kabupaten Sentani Papua.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Partisipasi Bank BTN dalam menunjang peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi 15 Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Garut.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pembangunan Pura Tri Murti yang berlokasi di Desa Tamban Luar Purwodadi II, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapus Kalimantan Tengah.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa meja dan kursi belajar bagi SMK Trimitra yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Rajeg No. 17, Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi Yayasan Nida'il Khairat yang berlokasi di Desa Pompewe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatut Thalabah yang berlokasi di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi Pondok Pesantren Al Qur'an Al Hikmah yang berlokasi di Kampung Ngapleng, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana penunjang (MCK dan tempat wudhu) bagi Masjid Nurul Hidayah yang berlokasi di Dusun Lebakwangi RT 05/01, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang keagamaan berupa alat musik hadrah bagi Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor yang berlokasi di Jalan Musi No. 09, Sumberrejo, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur.
April
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Huda yang berlokasi di Jl Gatot Mangkupraja, Kampung Cageundang RW 04, Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
Pembayaran tahap pertama atas kegiatan renovasi 15 Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pendidikan pada Pondok Pesantren Nasrul Ummah yang berlokasi di Jl Suryokusumo Mejobo, Desa Kirig Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana Musholla dan Masjid yang berlokasi di Musholla Al Islam, Desa Garung Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana Musholla dan Masjid yang berlokasi di Masjid Al Barkah, Dusun Resik, Desa Kedungwuni, Kabupaten Lamongan.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana Musholla dan Masjid yang berlokasi di Masjid Rahmad, Desa Gempolmanis, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dan 4 (empat) Masjid At Taubah, Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana Musholla dan Masjid yang berlokasi di Masjid At Taubah, Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.
Kegiatan renovasi 15 Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Darul Qur'an yang berlokasi di Kp Surade Tengah RT 03/01, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.



Keterangan

Penyediaan paket sembako berupa 12 karung beras uk. 50kg, minyak goreng uk. 1 liter sebanyak 650 pcs dan gula putih uk. 1 kg sebanyak 657 kg dalam rangka mendukung pelaksanaan Bakti sosial dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1440 H yang dilaksanakan oleh Yayasan Juang Anak Bangsa.

Bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 orang siswa kurang mampu yang selama 1 semester an. Evi Hartiningsih dan Dwi Hartiningsih yang menempuh pendidikan di MTs dan Sekolah Dasar di Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Dukungan Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen berupa alat pemotong, pembelah dan penyerut bambu.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jl. Moh Kahfi RT 006/005, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat wudhu bagi Balai Pengajian Baitul Khairat yang berlokasi Gamping Kuala Simpang Lim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.

Biaya pelaksanaan dalam rangka mendukung Program Pangan Murah dan Pengobatan Gratis yang dilaksanakan di Makorem 061 Kabupaten Bogor.

Biaya pelaksanaan dalam rangka mendukung Program Pangan Murah dan Pengobatan Gratis yang dilaksanakan di Makorem 062 Kabupaten Garut.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana kegiatan masyarakat yang berlokasi Gampong Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

Biaya pelaksanaan dalam rangka mendukung Program Pangan Murah dan Pengobatan Gratis yang dilaksanakan di Makorem 061 Kabupaten Bogor.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Masjid Nurul Huda yang berlokasi di Kampung Cibitung Sebrang, Kota Bekasi.

Biaya transportasi paket pangan murah sebanyak 5500 paket dari Perum Bulog Jakarta ke Desa Cidolog, Kabupaten Ciamis; Korem 062 Kabupaten Garut dan Korem 061 Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung pelaksanaan Pangan Murah dalam rangka memperingati HUT KBUMN Ke-21.

Pengembalian dana Bina Lingkungan dalam mendukung kegiatan Kunjungan Kerja Menteri BUMN ke Taman Hutan Pinus Jambi.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang berlokasi Musholla Al Amin, Jl Kartini Gg Sena No. 1 Sengon RT 003/069 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang berlokasi Madrasah Diniyyah Darul Mustofa, Jl Masjid Asyrofif Amin RT 05/03 Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang berlokasi Masjid Dzurriyatul Muttaqin, Jalan Bantansari RT 03/06, Desa Bangsri, Kabupaten Brebes.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang berlokasi Musholla Baitul Istiqomah, Desa Tegallagah, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang berlokasi Musholla Baitul Maghfiroh, Jalan Darussalam RT 08/03 Klampok Wanasari, Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan serah terima bantuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 129 Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Garut berupa peningkatan mutu pendidikan bagi 114 Pondok Pesantren dan 15 untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Mei

Penanggulangan bencana alam berupa banjir bandang yang melanda Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Masjid Maarif NU Limpung yang berada di SMK Ma'Arif yang berlokasi di Jl KH Wahid Hasyim No. 1 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Jawa Tengah.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Masjid Darussalam yang berlokasi di Taman Patra XV Kuningan Timur Jakarta Selatan berupa 2 (dua) unit Standing AC dan 1 (satu) unit <i>vacum cleaner</i> .
Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat di Dusun Wayasel, Desa Luhur Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Ambon.
Partisipasi Bank BTN dalam renovasi MCK dan Masjid Nurul Islam yang berlokasi di Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pangan Murah tanggal 1 April 2019.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Masjid Nurfalih yang berlokasi di Perumahan Perum Asri, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan.
Pemberian santunan kepada 1000 orang anak yatim/piatu dalam rangka mendukung pelaksanaan Safari Ramadhan dalam Program BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Bengkulu di GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu.
Penyediaan 200 <i>backpack</i> bagi 200 orang anak yatim dan dhuafa yang hadir dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Internal dan Eksternal Bank BTN di Ruang Serbaguna lantai 6.
Pembelian 1500 paket garam halus kemasan 250gr dari PT Garam Indonesia (Persero) guna mendukung pelaksanaan Program Pangan Murah Bank BTN di Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung renovasi sarana dan prasarana Masjid Al Anshar yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Panaikang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan bakti sosial berupa penyediaan 500 paket sembako bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Maarif NU Sabilil Muttaqien.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat berupa mesin penghancur sampah bagi Karang Taruna Marya Muda Bahari Desa Purworejo, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
Penyediaan tambahan 100 <i>backpack</i> bagi 100 orang anak yatim dan dhuafa yang hadir dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Internal dan eksternal Bank BTN di Ruang Serbaguna lantai 6.
Partisipasi Bank BTN dalam renovasi sarana dan prasarana Masjid Jami Nuruddin yang berlokasi di RT 02/11 Kavling Senjulang Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam.
Penyediaan paket bingkisan ramadhan sebanyak 435 paket @Rp250.000, bagi tenaga pramubakti, <i>cleaning service</i> , teknisi, <i>security</i> dan pengemudi yang berada di Kantor Pusat.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung renovasi sarana dan prasarana ibadah Kabupaten Purbalingga dan Sarana ibadah, sarana pendidikan dan RTLH.
Penyediaan 2 (dua) unit Tandon Air peruntukan masyarakat di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.
Pemberian santunan kepada 300 orang anak yatim dhuafa, bantuan peningkatan mutu dan kualitas pada 6 yayasan yang hadir dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Internal dan eksternal Bank BTN di Ruang Serbaguna lantai 6.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pemberian santunan kepada 1.000 orang anak yatim/piatu dalam rangka mendukung pelaksanaan buka puasa bersama di Masjid Al Rayyan Kementerian BUMN.
Biaya transportasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pangan Murah Ramadhan 1440 H sebanyak 3000 paket dari Gudang PPI Semarang menuju Kecamatan Susukan Cirebon.
Pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada 9 (sembilan) lembaga pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Safari Ramadhan dalam Program BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Bengkulu di GOR Sawah Lebar Kota Bengkulu.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam penyaluran bantuan bagi Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya.
Partisipasi Bank BTN dalam pembangunan Sekolah Al Qur'an yang dilaksanakan oleh Yayasan Al Ihsan Tangerang Selatan berlokasi di Jalan Jamsostek No. 76 RT 001/05, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan.



Keterangan

Pemberian santunan kepada 60 orang anak yatim/piatu yang berasal dari Pondok Pesantren Daarut Tauhiid yang berlokasi di Jl Raya Palembang Indralaya Km.24 Pemulutan Barat, Talang Pangeran dalam rangka Kunker Menteri BUMN di Ponpes Sultan Mahmud Badaruddin.

Pembayaran tahap kedua atas komitmen Bank BTN dalam membantu pembangunan Masjid Taman Sriwedari Kota Surakarta.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan Bakti Sosial Mapag Lebaran 1440 H yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir Sholawat Tjkraboeana Djatiraga yang dilaksanakan di Sekretariat MDS Jalan Simpang No. 35 Alun-Alun Kota Bandung.

Penyediaan sarana transportasi bagi Kepala Kanwil IV dalam rangka menghadiri Safari Ramadhan Direksi di Kantor Cabang Bengkulu.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Betawi dalam rangka kepedulian sosial di Bulan Ramadhan 1440 H berupa pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu di 5 wilayah DKI Jakarta.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam rangka kunjungan kerja Menteri BUMN ke Purbalingga dan Purwokerto untuk penyerahan bantuan CSR dan pelaksanaan Safari Ramadhan 1440 H.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan pemberian santunan bagi 30 orang anak yatim/piatu yang dilaksanakan oleh Remaja islam Mampang Prapatan XVII tanggal 25 Mei 2019.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi siswa di Yayasan Hidayatul Awwalin berupa 160 paket bingkisan sekolah berupa *backpack*, alat tulis dan kaos kaki berlokasi di Kp Cidasgantung RT 06/03, Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Dukungan konsumsi untuk 300 orang anak yatim/piatu dalam rangka pelaksanaan Buka Puasa bersama internal dan eksternal Bank BTN.

Pemberian santunan kepada anak yatim/piatu serta bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan yayasan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Direksi ke Kantor Wilayah 3 di Surabaya.

Pemberian santunan kepada anak yatim/piatu serta bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan yayasan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Direksi ke Kantor Wilayah 1 di Bandung.

Pemberian santunan kepada anak yatim/piatu serta bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan yayasan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Direksi ke Kantor Wilayah 6 di Semarang.

Bantuan sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Safari Ramadhan Direksi.

Pemberian santunan kepada anak yatim/piatu serta bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan yayasan.

Juni

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang perpustakaan pada SMP Plus An Nur yang berlokasi di Taman Baru Desa Akkor, Kec. Palengaan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim/piatu yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim At Taqwa yang berlokasi di Jati Indah VII/17, Pangkalan Jati, Pondok Labu Jakarta Selatan.

Penyediaan 100 paket sembako dalam rangka mendukung Program Bazar Murah Ramadhan 1440 H bagi masyarakat tidak mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Masjid Jami Assalam yang berlokasi di Perumahan Permata Bogor Residence, Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Penyediaan 3.000 *pack* beras ukuran 1kg dari Perum Bulog dalam rangka menunjang pelaksanaan Paket Pangan Murah Ramadhan 1.440 H sebanyak 3.000 paket bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

Penyediaan sarana transportasi dalam mendukung Pelaksanaan Pangan Murah Idul Fitri 1440 H sebanyak 6.000 paket sembako bagi masyarakat tidak mampu yang berasal dari Kelurahan Sendangmulyo dan Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Penyediaan 4.000 garam halus kemasan @250 gram dari PT Garam dalam rangka mendukung pelaksanaan Paket Pangan Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Makorem 061/SK Bogor dan 062/TN Garut.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pengungsi dalam rangka tanggap darurat banjir bandang yang terjadi di Konawe Utara Provinsi Kendari.
Pelaksanaan Pangan Murah Idul Fitri 1440 H sebanyak 6.000 paket sembako bagi masyarakat tidak mampu yang berasal dari Kelurahan Sendangmulyo dan Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
Partisipasi Bank BTN dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di SDN Petojo Utara 09 yang berlokasi di Petojo Barat No. 45, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk perbaikan taman sekolah dan penghijauan lingkungan.
Partisipasi Bank BTN dalam pembangunan Pura Parahyangan Aung Bhuwanan Raksati yang berlokasi di Jalan Vihara 097 RT 02/04 Desa Sodong Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi siswa di Yayasan Hidayatul Awwalin berupa 160 paket bingkisan sekolah berupa backpack, alat tulis dan kaos kaki berlokasi di Kp Cidasgantung RT 06/03, Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pengungsi dalam rangka tanggap darurat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Pemberian santunan kepada anak yatim/piatu serta bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan yayasan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Direksi ke Kantor Wilayah 5 di Makassar.
Persiapan pelaksanaan kegiatan Bersih Kampung Sehat KBUMN yang berlokasi di Bekasi, Kegiatan Pangan Murah dan Cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di Makorem Bogor.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan Bakti Sosial Ramadhan Berbagi Berkah dan Semangat Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Forum CSR Tangerang- di Kelurahan Cikokol Kota Tangerang.
Juli
Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Masjid Nurul Wahid yang berlokasi di Perumahan Villa Arza Jl Dr Purwadi RT 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan asrama santri pada Yayasan Darul Falah Al Hasyimiyah yang berlokasi di Perum Pedurenan Indah RT 05/06, kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Penyediaan 2 (dua) unit AC Merk Daikin Inverter 2 PK untuk Masjid Jami Darussalam yang berlokasi di Jalan Taman Patra XV Kuningan Timur Jakarta Selatan.
Partisipasi Bank BTN dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pada Pondok Pesantren Daarut Tauhiid, yang berlokasi di Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang.
Penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat Kampung Pojok Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang berupa seperangkat sound system, 1 (satu) set rebana, genset dan paving block.
Keperluan Program Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu Tahun 2019 berupa polo shirt, topi, jaket, id lanyard dan backpack sesuai SPK No. 753/SPK/CSD/CC/VII/2019.
Pembelian 4.000 paket gula dari PT Rajawali Nusindo untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Ramadhan 1.440 H yang diselenggarakan di Makorem Bogor dan Makorem Garut masing-masing sebanyak 2.000 paket.
Pembelian 7.500 paket gula dari PT Rajawali Nusindo untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Ramadhan 1440 H dan Paket Pangan Murah Idul Fitri 1.440 H untuk Desa Cidolog (1.500 paket) Kab. Ciamis, Kel. Sendangmulyo Kota Semarang (3.000 paket) dan Kel. Tanjung Mas Kota Semarang (3000 paket).
Pembelian 6.000 paket beras ukuran 1 kg dari Perum Bulog untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Idul Fitri 1.440 H untuk Desa Cidolog untuk Kel. Sendangmulyo Kota Semarang (3.000 paket) dan Kel. Tanjung Mas Kota Semarang (3.000 paket).



Keterangan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangka proses seleksi calon peserta Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar berupa laptop bagi SDN Kebon Kacang 05 Pagi Jakarta Pusat.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Masjid Al Maghfirah yang berlokasi di Perumahan Puri Mustika, Pengasinan, Rawalumbu Kota Bekasi.

Partisipasi Bank BTN dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Raudhatul Munawwarah yang berlokasi di Gamping Bireun Meunasah Dayah, Dusun Tgk Le Bu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Provinsi NAD.

Partisipasi Bank BTN dalam peningkatan sarana dan prasarana Dayah Tgk Chik Meunasah Mee Gampong Sukon Paku, kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie Provinsi NAD.

Partisipasi Bank BTN dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembuatan MCK pada Dayah Darun Najah Al-Azizyah Rambayan, Gampong Rambayan Lueng, Kecamatan Peukan, Kabupaten Pidie Provinsi NAD.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan asrama santri Darul Ulum yang berlokasi di Jalan Masjid No. 12 Pasinan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Tengah.

Partisipasi Bank BTN dalam Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Halmahera Selatan dibawah koordinasi PT ANTAM yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN Koordinator sebagai Koordinator Bencana.

Pembelian 9.000 paket garam halus dari PT Garam untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Ramadhan 1.440 H di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dan Paket Pangan Murah Idul Fitri 1.440 H yang diselenggarakan di Kelurahan Sendangmulyo dan Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Pembelian 3.000 paket sarden berikut *godie bag* dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Ramadhan 1.440 H yang diselenggarakan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

Partisipasi Bank BTN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan Hidroponik sebagai sumber ketahanan pangan dan pendapatan keluarga yang dilaksanakan oleh Yayasan Lima Sila.

Pembelian 6.000 paket sarden berikut *godie bag* dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Paket Pangan Murah Idul Fitri 1440 H yang diselenggarakan di Kelurahan Sendangmulyo dan Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Patung Fatmawati Soekarno oleh Pematung Nyoman Nuarta sinergi 12 BUMN yang berlokasi di Simpang Lima Kota Bengkulu.

Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Safari Ramadhan 1440 H di Kota Bengkulu serta pelaksanaan Kunjungan Kerja Kementerian BUMN dan Pelaksanaan Pangan Murah di Cirebon.

Penyediaan sarana transportasi bagi Tim dari KBUMN dan Kemenko PMK dalam rangka menghadiri *Kick Off meeting* pembangunan Patung Fatmawati Soekarno.

Pembayaran *sharing* biaya atas pembangunan Patung Fatmawati Soekarno di Simpang Lima Kota Bengkulu sesuai Nota Kesepahaman No. 908/CSD/MoU/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Risalah Rapat KBUMN tanggal 7 Mei 2019 tentang Progres Pembangunan Patung Fatmawati.

Agustus

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 1.200 orang anak yatim/piatu yang dilaksanakan oleh Ikatan Bankir Indonesia.

Pembelian paket beras uk. 1 kg dari Perum BULOG Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Paket Pangan Murah sebanyak 1.500 paket untuk kegiatan di Kabupaten Ciamis dan kegiatan Pangan Murah serta Pengobatan Gratis di Korem 061/SK Bogor dan Korem 062/TN Garut.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi musholla Al Ikhlas yang berlokasi di SDN Kota Bambu 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah Jakarta Barat.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Rumah Tidak Layak Huni an. Ibu Nining Guru Honorer SDN 03 Karyabuana yang berlokasi di Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya 68/2019 dalam rangkaian mendukung pelaksanaan Sail Nias 2019 berupa genset, mesin kubota, <i>sound system</i> dan mesin pompa air.
Bantuan beasiswa bagi 2 (dua) orang mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu di Politeknik Kesehatan Surakarta an. Qonita ilfah Putri Susanti dan Dani Nurohman.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung penanaman 500 bibit pohon yang dilaksanakan oleh Masyarakat Hutan Adat Kasepuhan Karang yang berlokasi di Desa Jagakarsa Kecamatan Muncang Kabupten Lebak Provinsi Banten.
Pembuatan <i>backdrop</i> untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembekalan peserta Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
Dukungan Bank BTN pada kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Petojo Utara RW 08 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat untuk Menyemarakkan HUT RI Ke-74.
Penyediaan sarana transportasi bagi 30 orang Peserta Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2019 Provinsi Bengkulu menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi 23 orang siswa dan 7 orang pendamping dalam rangka mengikuti kegiatan Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu Tahun 2019 menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penyediaan sarana penunjang dalam rangka sosialisasi untuk pelaksanaan Program Siswa Mengenal Nusantara dan sarana penunjang berupa baju batik bagi Peserta SMN Provinsi Bengkulu yang telah terpilih untuk mengikuti kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pembangunan Gedung Yayasan Darul Ulum KarangPandan yang berlokasi di Desa Karangpandan, Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
Penyediaan sarana akomodasi bagi peserta Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dalam rangka persiapan pembekalan dan Seremoni Pelepasan Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi peserta SMN Provinsi Bengkulu Tahun 2019 untuk kegiatan pembekalan di Ruang Serbaguna Grage Hotel Kota Bengkulu.
Dukungan Bank BTN dalam pemberian beasiswa pendidikan kepada Sdr. Magistiar Linar Nugrahandi Tahun Akademik 2019/2020 yang sedang menempuh pendidikan di Breda University of Applied Sciences Netherlands.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh SKI dan Baziz Bank BTN dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1440 H berupa 2 (dua) ekor sapi yang diperuntukan bagi masyarakat di sekitar Kantor Pusat Bank BTN.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Insan Cerdas Sejahtera untuk penyediaan 5 (lima) ekor kambing untuk didistribusikan ke daerah pelosok/tertinggal khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan Idul Adha 1440 H pada Yayasan Asy Syuhada yang berlokasi di Jalan Arowana gg Masjid RT 01/06, Gebang Watu, Kel. Kebonwarung, Kec. Kaliwates Kabupaten Jember berupa 1 (satu) ekor sapi.



Keterangan

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan Idul Adha 1440 H masing-masing berupa 1 (satu) ekor hewan qurban untuk :

1. Masjid Muthmainah, Kampung Gedung Jaya RT 001/001, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
2. Masjid Istiqlal, Kampung Sapto Renggo RT 02/01, Kec. Bahuga, Kab. Way Kanan;
3. Masjid Taqwa, Kampung Kali Awi, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan;
4. Masjid Darul Wada, Kampung Negeri Kasih, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan;
5. Masjid Al Amin, Kampung Menanga Jaya, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan;
- 6.. Masjid Al Muttaqin, Kampung Sri Menanti, Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan;
7. Masjid Nurul Huda, Dusun 01 Kampung Negeri Agung, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
8. Masjid Taqwa, Kampung Baru, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan;
9. Masjid Baitur Rohman, Kampung Karya Agung, Dusun 01, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan; dan
10. Masjid Al Muttaqin, Kampung Bumi Ratu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.

Penyediaan sarana transportasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan Idul Adha 1440 H pada Yayasan Asy Syuhada yang berlokasi di Jalan Arowana gg Masjid RT 01/06, Gebang Watu, Kel. Kebonwarung, Kec. Kaliwates Kabupaten Jember berupa 1 (satu) ekor sapi.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seremoni serah terima bantuan Air Bersih yang berlokasi di Dusun Wayasel, Desa Luhur, Kabupaten Seram Bagian barat Provinsi Maluku.

Dukungan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan Seleksi Siswa Mengenal Nusantara Provinsi Bengkulu Tahun 2019, Persiapan seremoni SMN Bengkulu dan Groundbreaking Patung Fatmawati.

September

Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana Sekretariat Rukun Warga 12, Kelurahan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana Yayasan Al Washiyyah yang berlokasi di Kebon Nanas Selatan III, Cipinang Cempedak Jakarta Timur.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada TK Nanda yang berlokasi di Desa Glontor, DK Karangsambung 2 RT 02/02, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid Jami Nurul Hikmah untuk pembuatan kanopi berlokasi di Jalan Letnan Arsyad Selatan/Jalan Baung Ujung, Kayuringin Jaya Bekasi Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid Al Hidayah untuk pembuatan Teras Masjid yang berlokasi di Desa Baran RT 02/03, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan paket sembako dalam mendukung kegiatan Bakti Sosial dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah yang diselenggarakan oleh Yayasan Juang Anak Bangsa di Aula Rangkok, Asrama Yon Arhanudse 6 Jakarta Utara.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid Al Ikhlas untuk pembangunan Masjid yang berlokasi di Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid Jami Baiturrohman yang berlokasi di Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid At Taqwa yang berlokasi di jalan Dr. Ratulangi No. 58 Kabupaten Maros.

Pembelian minyak goreng uk. 1 liter dari PTPN 3 sebanyak 3.000 paket untuk mendukung kegiatan Pangan Murah Ramadhan 1.440 H yang dilaksanakan di Kecamatan Susukan, Kabuapten Cirebon.

Pembelian minyak goreng uk. 1 liter dari PTPN 3 sebanyak 6.000 paket untuk mendukung kegiatan Pangan Murah Ramadhan 1.440 H yang dilaksanakan di Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang dan Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Kota Semarang.

Pembuatan Taman Wiyata yang berlokasi di Kota Sampang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menunjang Program Penghijauan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Musholla At Taqwa yang berlokasi di Perumahan Jasmine Residence, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid At Taubah yang berlokasi di Kelurahan Bengkoang Indah Kota Batam.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana pada Masjid Al Ashri, yang berlokasi di Jalan Lintas Barat KM 42, Tanjungpinang, Tanjung Uban, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada PAUD Tunas Muda IKKT yang berlokasi di Perumahan Mabes TNI, Jatimakmur Pondok Gede Kota Bekasi.
Pemberian Santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa dalam rangka mendukung pelaksanaan acara Implementasi Keuangan Inklusif pada Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental (PKN-GRM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kalimantan Selatan.
Dukungan pelaksanaan kegiatan untuk Seremoni Peresmian atas pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Wayasel, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Oktober
Pembelian 2.000 paket sarden kiku berikut <i>goody bag</i> dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paket Pangan Murah yang dilaksanakan di Korem 061/SK di Kabupaten Bogor.
Pembelian 1.500 paket sarden kiku berikut <i>goody bag</i> dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paket Pangan Murah yang dilaksanakan di Desa Cidolog di Kabupaten Ciamis.
Pembelian 2.000 paket sarden kiku berikut <i>goody bag</i> dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paket Pangan Murah yang dilaksanakan di Korem 062/TN di Kabupaten Garut.
Pembelian sarana dan prasarana penunjang peribadatan untuk siswa/i pada Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RI.
Renovasi/perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana alam angin <i>putting beliung</i> yang melanda Kubu Raya.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana pendidikan untuk perbaikan dan pengecatan lapangan SDIT Al Abrar yang berlokasi di In. Bendungan Hilir Raya No.148, Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Pura Agung Giri Kertha Bhuwana yang berlokasi di Lopo Indah Permai, Kelurahan Kolhua, Maulafa, Jalan Jalur 40, Nusa Tenggara Timur.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Masjid At Taqwa yang berlokasi di Jalan Raya Kresek RT 002/012 No. 120, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana Masjid An Nur yang berlokasi di Dusun Selacai RT 013/011, Desa Selamanik, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Masjid Baitul Amanah yang berlokasi di Kampung Cimaungpaeh, Desa Jayapura, Kec. Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Musholla Al Ukhuwah yang berlokasi di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Penyediaan 1 (satu) unit motor pengangkut sampah sebagai bentuk kepedulian Bank BTN dalam program kebersihan lingkungan Desa Sirnajaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Pembayaran <i>Sharing</i> biaya atas partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi sarana dan prasarana (pekerjaan kusen pintu, jendela aluminium, kaca dan cat duco) TK Adhyaksa XXI yang berlokasi di Perumahan Kejaksanaan Agung, Lebak Bulus Jakarta Selatan.



Keterangan

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelestarian Seni dan Budaya Panjalu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Upacara adat Nyangku dan Panjalu yang berlokasi di Dusun Cimendong, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

November

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Musholla Nurul Mujahidin yang berlokasi di Jalan Tanah Kusir II RT 010/09, Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Musholla Al Ishlah yang berlokasi di Bukit Waringin Blok KLMN, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Sharing biaya untuk pelaksanaan kegiatan Konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon kerjasama Kementerian BUMN dengan Word Wide Fund for Nature untuk Program Pembersihan Tanaman Langkap dan Sekolah Lapang Pertanian Ekologis.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Ikatan Bankir Indonesia di Menara Mandiri I Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55 Jakarta Selatan.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan dan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

Desember

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan No. 1 Purwokerto.

Pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi 10 orang mahasiswa IAIN Ternate yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Pondok Pesantren Mardhotillah yang berlokasi di Jalan KH Abd Ghofar, Dusun Sumber Ds Terik RT 03/02, Krian, Sidoarjo.

Pemberian santunan kepada 39 orang Anak Yatim dan Dhuafa, lansia dan penyandang cacat bekerja sama dengan Yayasan Al Kahfi yang berlokasi di Nginden Baru IV/22 Surabaya.

Partisipasi Bank BTN dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Umum untuk dukungan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu.

Pemasangan Aplikasi Akademik dan Multimedia Berbasis Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh PT Renjasa Abi Yasa pada SD Imanuel yang berlokasi di Jalan Masjid Raya No. 15 Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Masjid Abu Bakar Ash Siddiq yang berlokasi di Perumahan Riung Rangga Residence, Jalan Raya Pangalengan Km 4,5 Jagabaya, Cimaung Bandung.

Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penanaman Pohon, Penyediaan Bibit Ikan dan Bersih-Bersih Pantai dalam mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni ITB Tahun 2019.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi tempat wudhu pada Masjid Baitul Mu'minin yang berlokasi di Jati Tengah IX Perum Bumi Bekasi Baru IV Blok B, Rawa Lumbu Kota Bekasi.

Pengadaan Sarung dan Mukena sebanyak 1.000 pcs untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan 1412 H Sinergi Bank BTN, Kantor Pos, Perum PNRI dan Perum Peruri yang dilaksanakan di GOR Sawah Lebar, Kota Bengkulu.

Partisipasi Bank BTN dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi Komunitas Sahabat Baduy yang berlokasi di Kampung Wisata Baduy Desa Cibeo berupa penyediaan tempa sampah, renovasi toilet umum, papan informasi.

Biaya transportasi atas penyediaan 1.000 pcs Sarung dan Mukena dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Sinergi 4 BUMN (Bank BTN, Perum PNRI, Perum PNRI dan Pos Indonesia) yang dilaksanakan di GOR Sawah Lebar, Kota Bengkulu.

Pembayaran sharing anggaran atas pelaksanaan Kegiatan Natal Bersama dan Tahun Baru 2020 di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara sinergi dengan PT Taspen Persero.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Keterangan
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung Sosialisasi Fungsi Perbankan oleh Lembaga Tunas Bangsa yang dilaksanakan tanggal 16 Desember 2019 di Kota Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung Sosialisasi Fungsi Perbankan oleh Lembaga Tunas Bangsa yang dilaksanakan di Kota Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Partisipasi Bank BTN dalam penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat tidak mampu di Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan Natal Bersama di Pematang Siantar.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan Asrama Santri Mu'alimin Mu'alimat Assalafiyah yang berlokasi di Kota Rembang Jawa Tengah.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu pembangunan gedung SMP IT Al Muhajirin yang berlokasi di Jalan Rajawali Sakti 1 Kavling 1, Tobekgodang, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu sarana dan prasarana penunjang kegiatan peribadatan pada HKBP Harapan Baru yang berlokasi di Jalan Raya Harapan Baru Regency, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Pengadaan 4.000 paket sembako untuk pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka memperingati HUT RI Ke-74 di Kota Bengkulu sebagai bagian dari Program BUMN Hadir untuk Negeri di Kota Bengkulu.
Program pendampingan untuk Pengelolaan Balkondes dan <i>Homestay</i> Bank BTN yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur oleh PT Manajemen CBT Nusantara berupa kegiatan membangun sistem digitalisasi, pengelolaan medsos, publikasi brosur, publikasi <i>event</i> , pelatihan dan pengembangan SDM.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung Program Seminar Disabilitas <i>Goes To Campus</i> dan <i>Corporate</i> dengan tema Upaya Pendampingan Disabilitas Memasuki Dunia Kerja yang dilaksanakan di Selabatu, Sukabumi.
Partisipasi Bank BTN dalam penyediaan 200 paket sembako bagi masyarakat kurang mampu yang berada di RT 43/12, Dusun Rekesan, Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Jawa Timur.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu Pembangunan Pelinggih Merajan yang berlokasi di Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Merajan yang berlokasi di Banjar Darma Tengah, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Musholla Flamboyan AAC Dayan Dawood yang berlokasi di Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
Partisipasi Bank BTN dalam renovasi Musholla Al Mizan yang berlokasi di Jalan Mandor Baret RT 008/007, Legoso, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur Tangerang Selatan.
Partisipasi Bank BTN dalam membantu renovasi Masjid Nurul Iman yang berlokasi di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Partisipasi Bank BTN dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Kerohanian Kristiani (BAPEKKRIS) Bank BTN berupa penyaluran bantuan kepada Korban yang terdampak bencana Gempa Ambon dan Renovasi Rumah Ibadah di Jayapura yang dilaksanakan di Menara Bank BTN Lantai 6.
Dukungan Bank BTN untuk kegiatan Bisnis Indonesia Muda Initiative 2019 di Surabaya dan Solo.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Natal Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan di Sentul International Center.
Partisipasi Bank BTN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Khitanan Massal bagi 300 orang anak dari masyarakat kurang mampu bekerja sama dengan Seksi Kerohanian Islam Bank BTN di Menara Bank BTN Lantai 6.
Pembayaran <i>sharing</i> biaya atas partisipasi Bank BTN dalam Pembangunan Inkubator Bisnis yang berlokasi di Universitas Pattimura, Ambon Sinergi 9 BUMN.



LAPORAN KEUANGAN



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements

As of December 31, 2019

and for the year then ended

with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **Pahala Nugraha Mansury**
Alamat Kantor **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130**
Alamat Domisili **Jl. Empu Sendok No.23 RT 008 RW 003
Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan**
Nomor Telepon **021-6326764**
Jabatan **Direktur Utama / President Director**

We, the undersigned :

*Name
Office Address*

Residential Address

*Telephone
Title*

Nama **Nixon L.P Napitupulu**
Alamat Kantor **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130**
Alamat Domisili **Jl. Kp Benda Melayu RT 001, RW 002
Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja
Jakarta Utara**
Nomor Telepon **021-6346762**
Jabatan **Direktur / Director**

*Name
Office Address*

Residential Address

*Telephone
Title*

Menyatakan bahwa :

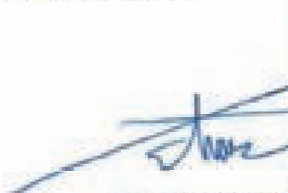
Declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;*
2. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;*
4. *We are responsible for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This is our declaration, which has been made truthfully.*

Jakarta, 14 Februari 2020 / February 14, 2020
Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors



Pahala Nugraha Mansury
Direktur Utama/President Director


Nixon L.P Napitupulu
Direktur/Director

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 7	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	8 - 9	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	10 - 11	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	12 - 14	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 254	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020

*The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampil menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

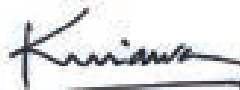
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

14 Februari 2020/February 14, 2020

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
ASET				ASSETS
KAS	1.369.167	2a,2d,4	1.243.615	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	15.512.329	2a,2c,2d,2f,5	15.417.862	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2c,2d		CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	391.877	2e,2f,6,44	718.377	Third parties
Pihak berelasi	357.624		870.392	Related parties
	749.501		1.588.769	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.632)		(1.718)	Allowance for impairment losses
	747.869		1.587.051	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2c,2d 2e,2g,7,44		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	10.996.115		26.461.116	Third parties
Pihak berelasi	101.078		3.644	Related parties
	11.097.193		26.464.760	
EFEK-EFEK		2a,2c,2d, 2e,2h,8,44		SECURITIES
Pihak ketiga				Third parties
Nilai wajar melalui laba rugi	4.189.398		4.147.137	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	1.422.811		637.512	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	373.379		206.897	Held-to-maturity
	5.985.588		4.991.546	
Pihak berelasi				Related parties
Tersedia untuk dijual	1.206.536		874.112	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	919.925		3.000	Held-to-maturity
	2.126.461		877.112	
	8.112.049		5.868.658	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.378)		(20.173)	Allowance for impairment losses
	8.084.671		5.848.485	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2c,2d, 2e,2h,9,44		GOVERNMENT BONDS
Nilai wajar melalui laba rugi	1.232.204		2.777.574	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	6.147.729		3.904.235	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.673.668		2.711.329	Held-to-maturity
	11.053.601		9.393.138	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2c,2d, 2e 2s,10,44		SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
Pihak ketiga	1.675.221		-	Third parties
Pihak berelasi	200.000		-	Related parties
	1.875.221		-	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2c,2d,2e,2i, 2j,11,44		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				Loans
Pihak ketiga	214.807.263		204.651.014	Third parties
Pihak berelasi	17.405.276		11.605.291	Related parties
	232.212.539		216.256.305	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.425.908)		(2.777.845)	Allowance for impairment losses
	226.786.631		213.478.460	
Pembiayaan/piutang syariah				Sharia financing/receivables
Pihak ketiga	23.609.204		22.037.831	Third parties
Pihak berelasi	3.416		3.596	Related parties
	23.612.620		22.041.427	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(690.258)		(520.287)	Allowance for impairment losses
	22.922.362		21.521.140	
	249.708.993		234.999.600	
TAGIHAN SPOT SUKU BUNGA		2d,2e 2ak		INTEREST RATE SPOT RECEIVABLE
Pihak ketiga	-		167	Third parties
TAGIHAN AKSEPTASI		2d,2e 2k,12		ACCEPTANCES RECEIVABLE
Pihak berelasi	487.052		528.148	Related parties
PENYERTAAN SAHAM		2c,2d,2e 2l,13,44		INVESTMENT IN SHARES
Pihak ketiga	270		270	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(270)		(270)	Allowance for impairment losses
	-		-	
ASET TETAP		2m,2n,14,35		PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	8.108.086		7.411.526	Cost/Revaluation value
Akumulasi penyusutan	(2.707.428)		(2.393.832)	Accumulated depreciation
	5.400.658		5.017.694	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	3.210.772	2d,15	2.959.502	INTEREST RECEIVABLE
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	629.105	2ae,39	260.251	DEFERRED TAX ASSETS - Net
ASET LAIN-LAIN	2.600.197	2d,2n, 2o,2aj,16	2.715.921	OTHER ASSETS
TOTAL ASET	311.776.828		306.436.194	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	1.999.183	2d,2p,17	2.301.930	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH		2c,2d,2q,44 18		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro				Demand deposits
Pihak ketiga	9.583.560		17.774.334	Third parties
Pihak berelasi	38.524.556		35.898.854	Related parties
	48.108.116		53.673.188	
Giro <i>Wadiah</i>		18		<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga	917.455		1.314.451	Third parties
Pihak berelasi	1.675.555		1.467.403	Related parties
	2.593.010		2.781.854	
	50.701.126		56.455.042	
Tabungan		19		Savings deposits
Pihak ketiga	41.212.905		37.991.758	Third parties
Pihak berelasi	272.004		359.081	Related parties
	41.484.909		38.350.839	
Tabungan <i>Wadiah</i>		19		<i>Wadiah savings deposits</i>
Pihak ketiga	789.042		765.695	Third parties
Pihak berelasi	847		629	Related parties
	789.889		766.324	
	42.274.798		39.117.163	
Deposito berjangka		20		Time deposits
Pihak ketiga	61.281.176		69.989.506	Third parties
Pihak berelasi	52.648.592		45.472.777	Related parties
	113.929.768		115.462.283	
Total simpanan dari nasabah	206.905.692		211.034.488	Total deposits from customers

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2d,2r, 21		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga	4.509.238		2.992.579	Third parties
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI		2d,2s, 22		SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS
Pihak ketiga	935.000		935.000	Third parties
LIABILITAS AKSEPTASI		2d,2k 23,44		ACCEPTANCES PAYABLE
Pihak berelasi	487.052		528.148	Related parties
LIABILITAS SPOT SUKU BUNGA		2c,2d,2ak		INTEREST RATE SPOT PAYABLE
Pihak ketiga	-		152	Third parties
SURAT-SURAT BERTAGIH YANG DITERBITKAN		1c,2c,2d, 2t,24,44		SECURITIES ISSUED
Pihak ketiga	14.405.980		13.719.734	Third parties
Pihak berelasi	5.377.572		6.925.026	Related parties
	19.783.552		20.644.760	
PINJAMAN YANG DITERIMA		2c,2d,2u, 25,44		FUND BORROWINGS
Pihak ketiga	8.681.368		7.430.342	Third parties
Pihak berelasi	13.784.289		8.069.151	Related parties
	22.465.657		15.499.493	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	630.002	2d,27	630.134	INTEREST PAYABLE
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	5.736.637	2d,2ac 29,41	6.217.814	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
PINJAMAN SUBORDINASI		2c,2d,2v 26,44		SUBORDINATED LOAN
Pihak berelasi	5.999.669		2.999.519	Related parties
TOTAL LIABILITAS	269.451.682		263.784.017	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH				LIABILITIES, TEMPORARY
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				SYIRKAH FUNDS AND
				EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
SIMPANAN NASABAH		2c,2d,2y,44		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro <i>Mudharabah</i>		18		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	826.682		1.059.570	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	588.030		534.702	<i>Related parties</i>
	1.414.712		1.594.272	
 Tabungan <i>Mudharabah</i>		19		 <i>Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga	3.226.349		2.675.780	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	136.577		84.289	<i>Related parties</i>
	3.362.926		2.760.069	
 Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		20		 <i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	11.661.400		8.814.203	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2.038.501		5.625.953	<i>Related parties</i>
	13.699.901		14.440.156	
Total simpanan nasabah	18.477.539		18.794.497	<i>Total deposits from customers</i>
 SIMPANAN DARI BANK LAIN		2c,2d,2y		 DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	243		315	<i>Third parties</i>
 Tabungan <i>Mudharabah</i>		21		 <i>Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga	3.299		8.857	<i>Third parties</i>
 Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		21		 <i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	7.870		8.060	<i>Third parties</i>
Total simpanan dari bank lain	11.412		17.232	<i>Total deposit from other banks</i>
TOTAL DANA SYIRKAH				TOTAL TEMPORARY
TEMPORER	18.488.951		18.811.729	SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018				Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018				Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	5.295.000	2w,30a	5.295.000	Issued and fully paid capital 10,590,000,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,589,999,999 shares of series B as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Tambahan modal disetor	2.054.454		2.054.454	Additional paid-in capital
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	11.460	2h,8,9	(107.430)	Net unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and Government bonds, net of deferred tax
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan	(194.707)	2ac	(82.886)	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	2m,14	2.966.991	Revaluation Surplus of Fixed Assets
Saldo laba ^{*)}				Retained Earnings ^{*)}
Telah ditentukan penggunaannya	12.995.995		10.749.657	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	366.002	2b,2x	2.964.662	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	23.836.195		23.840.448	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	311.776.828		306.436.194	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

^{*)} Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasi-reorganization on May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
		2019	Catatan/ Notes	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bunga		23.271.432	2z,2aa 31a	20.781.512
Bagi hasil dan marjin unit syariah		2.448.442	2ab,31b	2.070.246
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		25.719.874		22.851.758
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses
Bunga		(15.167.294)	2z,32a	(11.627.554)
Beban pendanaan lainnya		(157.708)		(128.826)
Bonus Simpanan <i>Wadiah</i>		(15.641)	2ab,32b	(12.436)
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil <i>Mudharabah</i>		(1.417.430)	2ab,32b	(993.765)
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus		(16.758.073)		(12.762.581)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto		8.961.801		10.089.177
Pendapatan Operasional Lainnya				Other Operating Income
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan		832.556		819.837
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan		113.399		130.900
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto		478.339	2h,8	437.553
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto		144.553	2h,9	8.586
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto		20.894	2h,8	30.316
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto		1.745	2h,9	11.999
Lain-lain		518.366	33	632.403
Total Pendapatan Operasional Lainnya		2.109.852		2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan		(3.486.665)	2e,2n,34	(1.714.427)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)			
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	(3.425.022)	35	(3.225.353)
Gaji dan tunjangan karyawan	(2.863.955)	2ac,36,44	(2.876.562)
Premi program penjaminan			
Pemerintah	(467.791)	43	(401.532)
Lain-lain	(306.447)	37	(349.097)
Total Beban Operasional Lainnya	(7.063.215)		(6.852.544)
LABA OPERASIONAL	521.773		3.593.800
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(110.711)	38	16.475
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	411.062		3.610.275
BEBAN PAJAK	(201.799)	2ae,39	(802.352)
LABA TAHUN BERJALAN	209.263		2.807.923
Pendapatan Komprehensif Lain:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Revaluasi Aset Tetap	341.000	2m,14	-
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(132.869)	2ac,41	80.363
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	21.048		(20.091)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	148.613	2h,8,9	(114.250)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(29.723)		28.562
Total laba komprehensif tahun berjalan	557.332		2.782.507
LABA PER SAHAM			
Dasar (nilai penuh)	20	2ag,49	265

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek Pemerintah yang Tersedia Untuk Dijual - Net/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Net/ Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Fixed Assets	Saldo Laba/Retained Earnings *)		Ekuitas/ Equity	Balance as of December 31, 2017
						Telah Ditetapkan Penggunaan/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaan/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2017	5.295.000	2.054.454	(21.742)	(143.158)	2.966.991	8.327.684	3.184.205	21.663.434	21.663.434
Total laba komprehensif tahun berjalan	2h.8 9.41	-	(85.688)	60.272	-	-	2.807.923	2.782.507	Total comprehensive income for the year
Pembagian laba Dividen	30c	-	-	-	-	-	(605.493)	(605.493)	Distribution of income Dividends
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	2.421.973	(2.421.973)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2018	5.295.000	2.054.454	(107.430)	(82.886)	2.966.991	10.749.657	2.964.662	23.840.448	Balance as of December 31, 2018

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemertintah yang Tersedia Untuk Dijual - Neto/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Fixed Assets	Saldo Laba/Retained Earnings *)		Ekuitas/ Equity	
					Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2018		5.295.000	(82.886)	2.966.991	10.749.657	2.964.662	23.840.448	Balance as of December 31, 2018
Total laba komprehensif tahun berjalan	2n/8 9.14.41	-	(111.821)	341.000	-	209.263	557.332	Total comprehensive income for the year
Pembagian laba	30c	-	-	-	-	(561.585)	(561.585)	Distribution of income
Dividen		-	-	-	-	(2.246.338)	-	Dividends
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	2.246.338	(2.246.338)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2019		5.295.000	(194.707)	3.307.991	12.995.995	366.002	23.836.195	Balance as of December 31, 2019

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan margin	25.453.902		22.179.899	Interest, profit sharing, and margin
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	153.997		151.188	Recoveries from loan debts written-off
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(16.646.046)		(12.624.698)	Interest and bonus, fees and commissions paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	(590.027)		(976.956)	Corporate income tax paid
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	6.710		3.941	Recoveries from tax assessment letter
Beban operasional lainnya - neto	(4.845.107)		(5.163.188)	Other operating expenses - net
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(110.711)		16.475	Other non-operating Income (expense) - net
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	3.422.718		3.586.661	Cash receipts before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain	(351.800)		-	Placement from other banks
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	2.452.777		740.954	Fair value through profit or loss securities
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.547.115		(2.350.369)	Fair value through profit or loss government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(18.229.537)		(39.554.295)	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain	300.335		10.680	Other assets
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(301.002)		(414.568)	Current liabilities
Simpanan dari nasabah				Deposits from customer
Giro	(5.565.072)		3.653.362	Demand deposits
Giro Wadiah	(188.844)		32.528	Wadiah demand deposits
Tabungan	3.134.070		132.903	Savings deposits
Tabungan Wadiah	23.565		143.923	Savings deposits Wadiah
Deposito berjangka	(1.532.515)		29.980.351	Time deposits
Simpanan dari bank lain	1.516.659		(2.070.854)	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	(734.052)		650.935	Other liabilities
Dana syirkah temporer	(322.778)		3.047.359	Temporary syirkah funds
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Operasi	(14.828.361)		(2.410.430)	Net Cash used in Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-		36.889	Proceeds from matured held-to-maturity securities
Pembelian aset tetap	(366.561)	14	(526.743)	Acquisitions of premises and equipment
(Kenaikan) Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	(718.350)		1.089.818	(Increase) Decrease in available -for-sale securities
(Kenaikan) Penurunan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual	(2.085.930)		464.873	(Increase) Decrease in available for-sale government bonds
Penerimaan dari obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-		944.573	Proceeds from maturity of held-to-maturity of government bonds
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	(947.963)		(319.917)	Purchase of held-to-maturity government bonds
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	(1.083.081)		-	Purchased of held to maturity securities
Pembelian efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	(1.875.221)		-	Purchased Securities purchased under agreement to resell
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(7.077.106)		1.689.493	Net Cash provided by (used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	4.144.000		3.660.000	Proceeds from issuance of securities
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(5.122.930)		(3.520.000)	Payment of matured securities issued
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-		(450.000)	Payments of matured securities sold under repurchase agreements
Pembayaran dividen	(561.585)	30c	(605.493)	Payments of dividends
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.001.654		7.550.287	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(4.020.720)		(36.490)	Payment from fund borrowings
Penerimaan dari pinjaman subordinasi	2.999.950		-	Proceeds from subordinated loan
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	8.440.369		6.598.304	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(13.465.098)		5.877.367	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	44.715.006		38.837.639	CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	31.249.908		44.715.006	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				The details of cash and cash equivalents at end of period are as follows:
Kas	1.369.167	2a,4	1.243.615	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	2f,5	15.417.862	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	749.501	2f,6	1.588.769	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	10.745.393	2g,7	26.364.760	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.873.518	2h,8	100.000	Certificates of Bank Indonesia - maturing within three months or less since the acquisition date
Total	31.249.908		44.715.006	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 21 April 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memiliki 103 kantor cabang (termasuk 25 kantor cabang syariah), 379 kantor cabang pembantu (termasuk 53 kantor cabang pembantu syariah), 366 kantor kas (termasuk 8 Kantor Kas Syariah), dan 3.014 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank memiliki 100 kantor cabang (termasuk 24 kantor cabang syariah), 352 kantor cabang pembantu (termasuk 48 kantor cabang pembantu syariah), 476 kantor kas (termasuk 8 Kantor Kas Syariah), dan 3.013 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 66 dated March 23, 2018 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 23, 2018 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated April 21, 2018.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2019, the Bank has 103 branch offices (including 25 sharia branch offices), 379 sub-branch offices (including 53 sharia sub-branch offices), 366 cash offices (including 8 sharia cash offices), and 3,014 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2018, the Bank has 100 branch offices (including 24 sharia branch offices), 352 sub-branch offices (including 48 sharia sub-branch offices), 476 cash offices (including 8 sharia cash offices), and 3,013 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value (full Rupiah) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali penerbitan dan 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	25 Juli/ July 25, 1994*)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	1 Juni/ June 1, 1995*)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	11 November/ November 11, 1996*)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 1996*)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	31 Juli/ July 31, 1998*)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	21 Desember/ December 21, 2000*)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	22 Juli/ July 22, 2001*)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	18 Juli/ July 18, 2002*)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	2 Oktober/ October 2, 2008*)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2009*)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	6 Juli/ July 6, 2010*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	19 September/ September 19, 2016*)	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2012*)	11,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2013*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2014*)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2020	10,25% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 23 (twenty-three) series of bonds and 1 (one) series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2019, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali penerbitan dan 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempol/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN XV/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2021	9,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Continuing Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2022	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Continuing Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	27 Maret/ March 27, 2023	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ Continuing Bonds II Phase I BTN				
Seri A/A Series	900.000	3 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2018*)	9,63% tetap/ fixed
Seri B/B Series	500.000	5 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2020	9,88% tetap/ fixed
Seri C/C Series	800.000	7 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2022	10,00% tetap/ fixed
Seri D/D Series	800.000	10 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2025	10,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ Continuing Bonds II Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.347.000	3 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2019*)	8,20% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.653.000	5 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2021	8,75% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ Continuing Bonds III Phase I BTN				
Seri A/A Series	1.466.000	3 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2020	8,30% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.295.000	5 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2022	8,50% tetap/ fixed
Seri C/C Series	853.000	7 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2024	8,70% tetap/ fixed
Seri D/D Series	1.386.000	10 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2027	8,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ Continuing Bonds III Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.756.500	1 tahun/year	8 Juli/ July 8, 2020	7,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.168.000	3 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2022	8,75% tetap/ fixed
Seri C/C Series	1.219.500	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2024	9,00% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 23 (twenty-three) series of bonds and 1 (one) series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2019, with the details as follows (continued):

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali penerbitan dan 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi Subordinasi BTN I/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2014**)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 23 (twenty-three) series of bonds and 1 (one) series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2019, with the details as follows (continued):

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
(lanjutan)

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

1. GENERAL (continued)

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 27 November 2019, dengan berita acara No. 97 yang dibuat oleh Notaris Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Chandra Hamzah*
Eko Djoeli Heripoerwanto**
Heru Budi Hartono*
Andin Hadiyanto*
Armand Bachtiar Arief*
Ahdi Jumhari Luddin*

December 31, 2019
*President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Mei 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor SR-344/PB.12/2019 tertanggal 20 Desember 2019.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 23 Maret 2018, dengan berita acara No. 63 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018

Komisaris Utama/Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

I Wayan Agus Mertayasa
Arie Coerniadi
Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Kamaruddin Sjam
Garuda Wiko
Iman Sugema
Maurin Sitorus
Sumiyati
Parman Nataatmadja*

December 31, 2018
*President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner*

* Diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 23 Maret 2018 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 27, 2019, as stated under the notarial No. 97 by Notary Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:

December 31, 2019
*President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner*

* Appointed as a Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.

** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on May 17, 2019 and effective as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number SR-344/PB.12/2019 dated December 20, 2019.

Based on the Bank's Annual General Meeting of Stockholders held on March 23, 2018, as stated under the notarial No. 63 dated March 23, 2018 by Notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:

December 31, 2018
*President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner*

* Appointed as a Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 23, 2018 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 27 November 2019, dengan berita acara No. 97 yang dibuat oleh Notaris Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Direktur Utama	Pahala Nugraha Mansury*
Direktur Consumer and Commercial Lending	Hirwandi Gafar**
Direktur Finance, Planning & Treasury	Nixon L.P. Napitupulu***
Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Yossi Istanto****
Direktur Remedial and Wholesale Risk	Elisabeth Novie Riswanti*****
Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Andi Nirwoto***
Direktur Distribution and Retail Funding	Jasmin**
Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Setiyo Wibowo**

* Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor SR-53/PB.12/2020 tanggal 10 Februari 2020.

** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*** Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019.

**** Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019. Pengalihan penugasan khusus sebagai Direktur Compliance berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

***** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Agustus 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 27, 2019, as stated under the notarial No. 97 by Notary Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

December 31, 2019

President Director
Director Consumer and Commercial Lending
Director Finance, Planning & Treasury
Director Human Capital, Legal, and Compliance
Director Remedial and Wholesale Risk
Director Operation, IT, and Digital Banking
Director Distribution and Retail Funding
Director Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics

* Appointed as a President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and effective as a President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number SR-53/PB.12/2020 dated February 10, 2020

** Appointed as a Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.

*** His assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019.

**** His assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019. The appointment of Yossi Istanto specifically as Compliance Director is effective after receiving approval from the Financial Services Authority (OJK)

***** Appointed as a Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 29, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations. Her assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 23 Maret 2018, dengan berita acara No. 63 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018

Direktur Utama	Maryono
Direktur Finance and Treasury	Iman Nugroho Soeko
Direktur IT and Operation	Andi Nirwoto*
Direktur Commercial Banking	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking	Budi Satria
Direktur Strategy, Compliance and Risk	R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection and Asset Management	Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Distribution and Network	Dasuki Amsir
Direktur Strategic Human Capital	Yossi Istanto**

* Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 27/KDK.03/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Andi Nirwoto selaku Direktur IT & Operation PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 10 September 2018.

** Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 28/KDK.03/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yossi Istanto selaku Direktur Strategic Human Capital PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 10 September 2018.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp32.033 dan Rp36.673 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 44b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp72.567 dan Rp85.289 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 44b).

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 17 Mei 2019 dan 23 Maret 2018, Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp40.000 dan Rp60.205 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun berjalan yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019 dan 6 Juni 2018.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's Annual General Meeting of Stockholders held on March 23, 2018, as stated under the notarial No. 63 dated March 23, 2018 by notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

December 31, 2018

President Director
Director Finance and Treasury
Director IT and Operation
Director Commercial Banking
Director Consumer Banking
Director Strategy, Compliance and Risk
Director Collection and Asset Management
Director Distribution and Network
Director Strategic Human Capital

* Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. 27/KDK.03/2018 dated September 7, 2018 regarding the Result on Fit and Proper Test of Andi Nirwoto as the Director of IT & Operation PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The appointment has been effective since September 10, 2018.

** Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. 28/KDK.03/2018 dated September 7, 2018 regarding the Result on Fit and Proper Test of Yossi Istanto as the Director of Strategic Human Capital PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The appointment has been effective since September 10, 2018.

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp32,033 and Rp36,673 for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 44b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp72,567 and Rp85,289 for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 44b).

During the Bank's Stockholders' General Meetings held on May 17, 2019 and March 23, 2018, the Bank distributed tantiem to the Boards of Directors and Commissioners amounting to Rp40,000 and Rp60,205, respectively, which were allocated from current year income and paid on June 10, 2019 and June 6, 2018, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Achmad Chaerul
Hertanta*

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 226/DIR/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 8 Maret 2019.

31 Desember 2018

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Achmad Chaerul*
Triani Pudjiastuti

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 812/DIR/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan berlaku efektif sejak tanggal 30 Oktober 2018.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 23 Maret 2018, dengan berita acara No. 63 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Ketua
Anggota
Anggota

M. Quraish Shihab*
Mohamad Hidayat
Muhammad Gunawan Yasni**

* Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 61/DIR/SHAD/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan efektif sejak tanggal 22 Januari 2019.

** Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 61/DIR/SHAD/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan efektif sejak tanggal 22 Januari 2019.

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees (continued)**

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2019

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.226/DIR/2019 dated March 1, 2019 and Head of Internal Audit Division since March 8, 2019.

December 31, 2018

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.812/DIR/2018 dated October 30, 2018 and effective since October 30, 2018.

Based on the Bank's Annual General Meeting of Stockholders held on March 23, 2018, as stated under the notarial No. 63 dated March 23, 2018 by notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Sharia Supervisory is as follows:

December, 31 2019 and December 31, 2018

Chairman
Member
Member

* Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. SR-4/PB.13/2019 dated January 10, 2019 and appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 61/DIR/SHAD/II/2019 dated January 25, 2019 and effective since January 22, 2019.

** Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. SR-4/PB.13/2019 dated January 10, 2019 and appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 61/DIR/SHAD/II/2019 dated January 25, 2019 and effective since January 22, 2019.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/2019 tanggal 15 November 2019 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No.162/KOM/BTN/XI/2019 tanggal 13 November 2019) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Anggota
Anggota

Adi Prakoso*
Peter Eko Budi Darwito**

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/ 2019 tanggal 15 November 2019 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 13 Maret 2018.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/ 2019 tanggal 15 November 2019 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 19 November 2019.

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 648/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 163/KOM/BTN/XI/2017 tanggal 21 November 2017) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Kamaruddin Sjam
I Wayan Agus Mertayasa
Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Garuda Wiko
Rachmat Supratman
Adi Prakoso*

* Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 190/DIR/2018 tanggal 21 Maret 2018, efektif sejak tanggal 13 Maret 2018.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Board of Directors' Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15th, 2019 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No.162/KOM/BTN/XI/2019 dated November 13, 2019) is as follows:

December 31, 2019

Member
Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Directors' Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15, 2019 and effective since March 13, 2018.

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Directors' Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15, 2019 and effective since November 19, 2019.

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 648/DIR/2017 dated November 21, 2017 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 163/KOM/BTN/XI/2017 dated November 21, 2017) is as follows:

December 31, 2018

Chairman
Member
Member
Member
Member

* Appointed as a member of Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 190/DIR/2018 dated March 21, 2018, effective since March 13, 2018.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 11.241 dan 10.192 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2019 and 2018 of 11,241 and 10,192 employees, respectively (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2019 and 2018 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Statement of Compliance (continued)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Amandement 2015), "Presentation of Financial Statements".

Laporan keuangan Bank cabang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi Wa'd" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The financial statements of the Bank's sharia branches have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2016) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2016) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 (Revised 2016) on "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013) issued by Bank Indonesia and Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flows.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

b. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7 (2015 Adaptation), "Related Party Disclosures".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

- a) suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;
- g) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 44.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

The Bank considers the following as its related parties:

- a) a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;
- b) an entity which is a member of the same group as the Bank;
- c) an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
- d) a member of key management personnel of the Bank;
- e) a close family member of the person described in clause (a) or (d);
- f) an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;
- g) an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transactions done by Bank have complied with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 regarding "The affiliate transactions and conflict of interest of certain transactions", at the time the transactions were made. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the Financial Statements and the details have been presented in Note 44 of the Financial Statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 44.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, reverse repo, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

(i) Classification

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale investments.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: (lanjutan)

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition: (continued)

- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition are designated as available-for-sale investments; or*
- *those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available-for-sale.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif yang dapat dikuotasikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Hasil efektif dan hasil dari dampak nilai tukar untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The effective yield and results of foreign exchange impact for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and comprehensive income.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

- the determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

a. Financial assets are derecognized when:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement); dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukkan sebelumnya, jika dihapusbukkan pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika dihapusbukkan di periode sebelumnya dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if written off in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if written off in prior periods.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

(v) Income and expense recognition

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual, serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

- b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar, diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Unrealized gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale, except financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognized, net of tax, in equity, until the financial assets are derecognized or impaired.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

(vi) Reclassification of financial assets

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss, if the initial recognition of financial instruments is determined by the Bank as measured at fair value through profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank is not allowed to classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceeding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications, that:

- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

- are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;

- occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

- are attributable to an isolated event, that is beyond the Bank's control, is non-recurring, and could not be reasonably anticipated by the Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Saling hapus

(vii) Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Pengukuran nilai wajar

(viii) Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(viii) Fair value measurement (continued)

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(viii) Fair value measurement (continued)

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 48).

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 48).

(ix) Pengukuran biaya diamortisasi

(ix) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(x) Aset keuangan sukuk

(x) Sukuk Financial Asset

Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

In accordance with SFAS No.110 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk *ijarah* and *mudharabah* either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

Sukuk classifications are as follows:

a. Diukur pada biaya perolehan

a. Measured at cost

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.
- Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has been previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

c. Measured at fair value through profit or loss

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

e.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets

e.1. Loans and Murabahah Financing Receivables

On each statement of financial position reporting date, the Bank assesses whether there is an objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrate that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;
- b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;
- c. the creditor, for economic or legal reasons relating to the financial difficulties of the debtor, provides relief (concession) to the debtor that the creditor would not otherwise consider;
- d. it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for that financial asset due to financial difficulties; or
- f. observable data has indicated that there is measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the decrease cannot be identified to the individual financial assets in the portfolio, including:
 1. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 2. national or local economic condition related to defaults on the assets in the portfolio.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

The estimated period between the occurrence of events and identification of loss is determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months and for specific cases, it may need longer period.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with objective evidence of impairment;
2. Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective assessment if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with no objective evidence of impairment;
2. Loans which individually have insignificant value;
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond dibawah Rp5.000.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (probability of default). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode *roll rate* analisis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Bank menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of current and special mention, and have never been restructured; or (b) Loans with credit limit below Rp5,000.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (probability of default). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the *roll rate* analysis method, which is a statistical model analysis method to collectively assess allowance for impairment losses on loans. Under this method, the Bank uses 3 (three) years of historical data to compute for the *Probability of Default* (PD) and *Loss Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

As a practical guidance, the Bank may measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. If loans and receivables or held-to-maturity securities and Government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure impairment loss is the current effective interest rate specified in the contract.

Impairment losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized and the recovery is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses on each statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan obligasi Pemerintah yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang terpulihkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale securities and Government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss previously recognized must be recovered and the recovery is recognized in the year it occurred.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The amount of reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.2. Pembiayaan/Piutang Syariah selain Murabahah

Untuk Aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan perubahannya pada POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.2. Sharia Financing/Receivables Other Than Murabahah

For financial assets of *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, and *musyarakah* financing, the Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 and its amendment POJK No. 19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective on January 1, 2015.

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility*, *term deposit* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, *inter-bank call money* dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk obligasi rekaptalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka rekaptalisasi bank umum.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Current accounts with Bank Indonesia and other Banks

Current accounts with Bank Indonesia and other Banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other Banks are classified under loans and receivables.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility, term deposit and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, inter-bank call money and savings.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

h. Securities and Government Bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Medium Term Notes (MTN) and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds that are issued by the Government for general bank recapitalization.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government Bonds (continued)

Sharia securities are classified as measured at cost and measured at fair value through other comprehensive income.

Securities and Government bonds are initially measured at fair value. Subsequently, securities and Government bonds are accounted for depending on their classification as held-to-maturity, available-for-sale or fair value through profit or loss.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. Held-to-maturity securities and Government bonds are carried at amortized cost using the effective interest method.

The Bank does not classify securities and Government bonds as held-to-maturity financial assets if the Bank has, during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity securities or Government bonds prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2014) applicable in the relevant period.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.
3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government Bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows: (continued)

2. Securities and Government bonds which are classified under available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale securities and Government bonds are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value.

Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from securities and Government bonds is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar (lanjutan)

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government Bonds (continued)

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value (continued)

For securities and Government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the statement of financial position date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and Government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and Government bonds.

i. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified under loans and receivables.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

i. Loans (continued)

Restrukturisasi kredit

Loan restructuring

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts and the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Sales of Housing Loans (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

The Bank sold its KPR to third parties.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

In relation to the above mentioned sale, the Bank has transferred the risks and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

The sale has fulfilled the criteria of true sale according to Bank Indonesia regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005.

j. Pembiayaan/piutang syariah

j. Sharia financing/receivables

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchased arrangements and profit sharing between the Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions and *qardh* transactions, for financing consist of *mudharabah* and *musyarakah* financing.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revaluasi oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revaluasi oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer which sells with a costs price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah financing is a joint financing between the Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the statement of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musarakah is a partnership contract among fund's owners (*musarakah* partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, *musarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. *Istishna* receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

k. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

l. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas yaitu penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan modal sementara dihapuskan dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Qardh is the provision of funds or receivables equivalent based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. *Qardh* is stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

k. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

l. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted the Bank having shares in debtor's company.

Investments in shares representing ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of allowance for impairment losses

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penyertaan Saham (lanjutan)

Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

m. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	10 - 20
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Investment in shares (continued)

Investment in shares with no significant influence or share ownership under 20% are recorded in accordance with SFAS No. 55 (Revised 2014) and deducted by allowance for impairment losses.

m. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings
Office furniture and fixtures, and motor vehicles

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Premises and equipment (continued)

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Land is initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land is performed by appraisers with professional qualification, and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 14).

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" of and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognised in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognized in profit or loss.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits is in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Premises and equipment (continued)

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue at a minimum every 3 (three) years.

n. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

o. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

p. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

q. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Impairment of non-financial assets (continued)

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68: "Fair Value Measurements" (Note 2d).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

o. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Liabilities due immediately

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

q. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Simpanan (lanjutan)

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

r. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Deposits (continued)

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

r. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Simpanan dari bank lain (lanjutan)

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

s. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Deposits from other banks (continued)

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

s. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resell using effective interest rate.

Securities purchased under agreement to resell are classified as loans and receivables measured at amortized cost.

Securities sold under agreement to repurchase

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No 111 tentang "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

t. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah Obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, Pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No 111 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

t. Securities issued

Securities issued by the Bank consist of Bonds and *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

u. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

x. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

y. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Subordinated Loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

w. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

x. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

y. Temporary syirkah funds

Temporary *syirkah* funds represent investments from other parties conducted on the basis of *mudharabah mutlaqah* contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary *syirkah* funds consist of *mudharabah* current accounts, *mudharabah* savings deposits, and *mudharabah* time deposits.

Mudharabah current accounts and savings deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. *Mudharabah* current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposits balance in the Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. *Mudharabah* time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Dana syirkah temporer (lanjutan)

y. Temporary syirkah funds (continued)

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (current and other non-investment accounts).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as *shahibul maal* and the Bank as *mudharib* based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Interest income and expenses

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

aa. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, margin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

ac. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from *istishna*, margin from *murabahah* and profit-sharing on *mudharabah* and *musyarakah* financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from *istishna* is recognized at the date of transfer of assets.

Income from *murabahah* receivables is using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and *musyarakah* income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (*nisbah*).

ac. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

ac. Employee benefits (continued)

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution plan

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

ad. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs spot Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Desember/ December 31, 2019
1 Dolar Amerika Serikat	13.882,50
1 Dolar Australia	9.725,39
1 Pound Sterling Inggris	18.238,14
1 Euro Eropa	15.570,61
1 Yen Jepang	127,81
1 Ringgit Malaysia	3.391,77
1 Dolar Hongkong	1.782,75
1 Riyal Arab Saudi	3.701,00
1 Renminbi	1.994,18
1 Dolar Singapura	10.315,05

ae. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurred, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

ad. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of December 31, 2019 and 2018, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ December 31, 2018	
	14.380,00	1 United States Dollar
	10.162,35	1 Australia Dollar
	18.311,50	1 British Pound Sterling
	16.440,66	1 European Euro
	130,62	1 Japanese Yen
	3.476,79	1 Malaysian Ringgit
	1.836,28	1 Hongkong Dollar
	3.859,39	1 Saudi Arabian Riyal
	2.090,57	1 Renminbi
	10.554,91	1 Singapore Dollar

ae. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Income tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ag. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ag. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambah Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ai. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

aj. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ai. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

aj. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals acquired in settlement of loans (included as part of "Other Assets") are recognized at net realizable values or loan carrying amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal.

The excess in loan balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible loan write-off on loans in the current year. The difference between the value of the collateral and the proceeds from sale thereof is recognized as a gain or loss at the time of sale of the collateral.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aj. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (Reconditioning costs) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

ak. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Foreclosed collaterals (continued)

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

Reconditioning costs arising after foreclosure capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

ak. Derivatives Instrument

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 68: "Fair Value Measurement" (Note 2d)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

al. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan
- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) "Pajak Penghasilan", menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan dari pada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

al. Changes in accounting policy and disclosures

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2019, which is considered relevant to the Bank's Financial Statements, as follows:

- Amendments to SFAS 24 provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the annual reporting period). In addition, the Amendment to SFAS 24 also clarifies how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset limit to change.
- SFAS No. 46 (2018 Adjustment) "Income Tax", confirms the consequences of income tax on dividends by deleting paragraph 52B and adding paragraph 57A. The consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arise when an entity recognizes a liability to pay dividends. The consequences of income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distributed to the owner. Therefore, the entity recognizes the income tax consequences in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of past transactions or events.
- ISFAS 33 clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

al. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu: (lanjutan)

- ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. ISAK ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas tidak signifikan terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

al. Changes in accounting policy and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2019, which is considered relevant to the Bank's Financial Statements, as follows: (continued)

- ISFAS No 34: Uncertainty over Income Tax Treatments. This ISFAS is to clarify and provides guidance of uncertainty over Income tax treatments at financial report.

The impact on the Financial Statements of the adoption of the accounting standards mentioned are not significant to the Financial Statements.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the Financial Statements continues to be prepared on the going concern basis.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2d.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities would therefore be measured at fair value and not at amortized cost.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit
dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and
sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating allowance for impairment losses made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions the correlate with defaults on assets in the group. Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance for losses required.

Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available-for-use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS

	31 Desember/December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		1.363.762
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	202.309	2.809
Dolar Singapura	196.815	2.030
Euro Eropa	18.205	283
Pound Sterling Inggris	4.160	76
Dolar Australia	6.265	61
Yen Jepang	299.000	38
Riyal Arab Saudi	10.009	37
Renminbi	15.626	31
Ringgit Malaysia	7.458	25
Dolar Hong Kong	8.590	15
		5.405
Total		1.369.167

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp256.677 dan Rp244.754, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

4. CASH

	31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		1.240.510	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	79.540	1.144	United States Dollar
Dolar Singapura	130.629	1.379	Singapore Dollar
Euro Eropa	16.925	278	European Euro
Pound Sterling Inggris	4.675	86	Great Britain Pound Sterling
Dolar Australia	6.135	62	Australian Dollar
Yen Jepang	125.000	16	Japanese Yen
Riyal Arab Saudi	2.967	11	Saudi Arabian Riyal
Renminbi	18.206	38	Renminbi
Ringgit Malaysia	11.078	39	Malaysia Ringgit
Dolar Hong Kong	28.190	52	Hong Kong Dollar
		3.105	
Total		1.243.615	Total

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp256,677 and Rp244,754, as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		15.036.853
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	34.250.000	475.476
Total		15.512.329

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp1.359.320 dan Rp1.337.912 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		15.151.113	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currency
Dolar Amerika Serikat	18.550.000	266.749	United States Dollar
Total		15.417.862	Total

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp1,359,320 and Rp1,337,912 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember December 31, 2019	31 Desember December 31, 2018
<u>Konvensional</u>		
Rupiah		
Utama	6,19%	6,61%
Harian	3,00%	3,50%
Rata-rata	3,19%	3,11%
PLM	5,24%	5,45%
Dolar Amerika Serikat	8,28%	8,69%
<u>Syariah</u>		
Rupiah	4,64%	5,30%

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 25 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, PBI No. 20/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 dan perubahan terakhir PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,00% dan 6,50%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8,00%. Untuk PLM adalah sebesar 4,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2019 and 2018, are as follows:

<u>Conventional</u>	
Rupiah	
Primary	
Daily	
Average	
PLM	
United States Dollar	
<u>Sharia</u>	
Rupiah	

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2019 and 2018 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 which has been amended several times with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015, PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 25, 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, PBI No. 20/3/2018 dated March 29, 2018 and Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018 and the latest amendment by PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

As of December 31, 2019 and 2018, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 6.00% and 6.50%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 8.00%, respectively. PLM amounting to 4.00% in Rupiah as of December 31, 2019 and 2018.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 4,50% dan 5,00%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 47).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, based on the above Bank Indonesia regulations, based on sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 4.50% and 5.00%. For foreign currencies of 1.00%, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 regarding "Changes to Bank Indonesia Regulation No.20/4/PBI/2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2019 and 2018.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 47).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		160.984		110.735	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	24.365.550	338.255	92.897.525	1.335.866	United States Dollar
Yen Jepang	1.565.602.333	200.100	724.394.891	94.620	Japanese Yen
Dolar Australia	3.307.204	32.164	-	-	Australian Dollar
Singapura Dollar	1.567.830	16.172	4.321.332	45.611	Singapore Dollar
Euro Eropa	104.380	1.625	104.380	1.716	European Euro
Renminbi	100.692	201	105.639	221	Renminbi
		588.517		1.478.034	
Total		749.501		1.588.769	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.632)		(1.718)	Less allowance for impairment losses
Neto		747.869		1.587.051	Net

b. Berdasarkan bank

b. By bank

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12.496	97.661	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	7.296	4.630	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	5.026	5.602	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.639	707	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Citibank N.A., Jakarta	925	925	Citibank N.A., Jakarta
Lainnya	429	361	Others
	29.811	109.886	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>			<u>Related Parties (Note 44)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	131.028	741	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	145	108	PT Bank Syariah Mandiri
	131.173	849	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Standard Chartered Bank, Jakarta	274.913	283.211
PT Bank ANZ Indonesia	32.164	-
PT Bank Central Asia Tbk	30.363	270.865
PT Bank DBS Indonesia	16.172	45.611
Citibank N.A., Jakarta	6.628	6.865
Indonesische Overzeese		
Bank N.V., Amsterdam	1.625	1.718
PT Bank ICBC Indonesia	201	221
	362.066	608.491
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>		
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk	205.329	99.907
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.122	769.636
	226.451	869.543
Total	749.501	1.588.769
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.632)	(1.718)
Neto	747.869	1.587.051

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp145 dan Rp108, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Rupiah	0,81%	1,23%
Mata uang asing	0,01%	2,19%

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

<u>Foreign currencies</u>
<u>Third Parties</u>
Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
Citibank N.A., Jakarta
Indonesische Overzeese
Bank N.V., Amsterdam
PT Bank ICBC Indonesia

<u>Related Parties (Note 44)</u>
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

*Total
Less allowance
for impairment losses*

Net

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp145 and Rp108, as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

*Rupiah
Foreign currencies*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Lancar	747.869	1.587.051
Macet	1.632	1.718
Total	749.501	1.588.769
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.632)	(1.718)
Neto	747.869	1.587.051

e. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Saldo awal tahun	1.718	1.696
Penyisihan (pembalikan) kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(86)	22
Saldo akhir tahun	1.632	1.718

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 47.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. Collectibility

As of December 31, 2019 and 2018, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

Current Loss
Total
Less allowance for impairment losses
Net

e. As of December 31, 2019 and 2018, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.

f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

Balance at beginning of year
Provision for (reversal of) impairment losses during the year (Note 34)
Balance at end of year

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 47.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Deposit Facility Bank Indonesia	4.299.861	7.198.950
Term Deposit Bank Indonesia	-	12.496.316
Deposit Facility Syariah		
Bank Indonesia	1.834.000	4.005.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	350.000	100.000
	6.483.861	23.800.266
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Inter-bank call Money</u>		
PT Bank Rakyat		
Indonesia (Persero) Tbk	100.000	-
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.078	3.644
	101.078	3.644
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Term Deposit Bank Indonesia	4.512.254	2.660.850
Total	11.097.193	26.464.760

Rupiah
Third Parties
Deposit Facility Bank Indonesia
Term Deposit Bank Indonesia
Deposit Facility Sharia
Bank Indonesia
Bank Indonesia Sharia Certificate

Related Party (Note 44)
Inter-bank call Money
PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk

Savings Deposits
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Foreign currencies
Third Parties
Term Deposit Bank Indonesia

Total

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp2.184.000 dan Rp4.105.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp2,184,000 and Rp4,105,000, respectively.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

b. Based on Remaining Period Until Maturity

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
≤ 1 bulan	10.745.393	26.364.760
> 1 bulan ≤ 6 bulan	236.800	25.000
> 6 bulan ≤ 12 bulan	115.000	75.000
Total	11.097.193	26.464.760

≤ 1 month
> 1 month ≤ 6 months
> 6 months ≤ 12 months

Total

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2019	2018
Rupiah	5,98%	4,39%
Mata Uang Asing	0,47%	0,81%

Rupiah
Foreign Currencies

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan sebagai lancar.
- e. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.
- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 47.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018, are classified as current.
- e. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2019 and 2018, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.
- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 47.

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

8. SECURITIES

- a. Based on currency, type and issuer

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u> <u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u>		
Sertifikat Bank Indonesia	4.189.398	3.005.636
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	1.141.501
	4.189.398	4.147.137
<u>Tersedia untuk dijual</u> <u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u>		
Sertifikat Bank Indonesia	676.423	-
<u>Obligasi</u>		
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016	16.462	15.458
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019	13.004	-
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015	10.266	10.108
<u>Negotiable Certificate of Deposits</u> PT BPD DKI Tahap I Seri A 2019	49.495	-
PT Bank KEB Hana Indonesia Tahap V 2019	47.850	-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2017	-	95.160
PT BPD Jawa Tengah Seri A Tahun 2018	-	48.695

<u>Fair value through profit or loss</u> <u>Rupiah</u> <u>Third Parties</u>
Certificates of Bank Indonesia Deposits Certificates of Bank Indonesia
<u>Available-for-sale</u> <u>Rupiah</u> <u>Third Parties</u>
Certificates of Bank Indonesia
<u>Bonds</u>
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015
<u>Negotiable Certificate of Deposits</u> PT BPD DKI Phases I Series A 2019
PT Bank KEB Hana Indonesia Phases V 2019
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Phases II Series B 2017
PT BPD Jawa Tengah Series A Year 2018

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Medium Term Notes</u>		
PT BPD Jawa Tengah		
MTN Syariah Mudharabah		
Tahap I 2017	25.136	24.339
 Efek Beragun Aset		
EBA - SP - BTN05		
Kelas B	226.151	-
EBA - SP - BTN04		
Kelas B	171.251	154.216
EBA - SP - BTN02		
Kelas B	69.503	107.178
EBA - SP - BTN03		
Kelas B	73.507	78.109
KIK EBA BTN 04		
Kelas B	23.040	60.329
EBA - SP - BTN01		
Kelas B	9.554	17.040
EBA - SP - BTN04		
Kelas A	7.553	19.156
EBA - SP - BTN03		
Kelas A	3.616	7.724
	<u>1.422.811</u>	<u>637.512</u>

Pihak Berelasi (Catatan 44)

Obligasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Tahap III Seri A 2017	201.570	198.072
Tahap I Seri C 2016	10.200	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Tahap II 2017 Seri D	145.430	133.551
Tahap I 2016 Seri A	25.254	24.860
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
Tahap IV Seri B 2017	80.157	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Sukuk Tahap II 2017 Seri B	50.321	46.522
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	25.086	23.456
PT Bank Mandiri Taspen		
Tahap I Seri A 2017	35.248	34.710
Tahap I Seri A 2019	18.067	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)		
Tahun 2017 Seri A	30.485	28.662
PT Timah (Persero) Tbk		
Tahap II Seri A 2019	49.634	-
Tahap I Tahun 2017	5.042	4.884

Negotiable Certificate of Deposits

PT Bank Mandiri Taspen		
Seri B 2019	19.846	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Seri F 2016	-	97.060

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Third Parties (continued)</u>
<u>Medium Term Notes</u>
<u>PT BPD Jawa Tengah</u>
<u>MTN Syariah Mudharabah</u>
<u>Phase I 2017</u>

Asset Backed Securities

EBA - SP - BTN05
Class B
EBA - SP - BTN04
Class B
EBA - SP - BTN02
Class B
EBA - SP - BTN03
Class B
KIK EBA BTN 04
Class B
EBA - SP - BTN01
Class B
EBA - SP - BTN04
Class A
EBA - SP - BTN03
Class A

Related Parties (Note 44)

Bonds

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Phase III Series A 2017
Phase I Series C 2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Phase II Series D 2017
Phase I Series A 2016
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Phase IV Series B 2017
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sukuk Phase II Series B 2017
Sukuk Phase II Series A 2017
PT Bank Mandiri Taspen
Phase I Series A 2017
Phase I Series A 2019
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Year 2017 Series A
PT Timah (Persero) Tbk
Phase II Series A 2019
Phase I 2017

Negotiable Certificate of Deposits

PT Bank Mandiri Taspen
Series B 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Series F 2016

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			<u>Related Parties (Note 44) (continued)</u>
Efek Beragunan Aset			Asset Backed Securities
PT Indonesia Power			PT Indonesia Power
KIK EBA IP PLN			KIK EBA IP PLN
Seri A Tahun 2017	88.365	112.276	Series A Year 2017
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Perum Perumnas			Perum Perumnas
Tahap III 2018 Seri A	102.270	101.709	Phase III 2018 Series A
	886.975	805.762	
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>			<u>Related Parties (Note 44)</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk			(Persero) Tbk
Senior Unsecured			Senior Unsecured
Notes Due 2024	116.008	-	Notes Due 2024
PT Perusahaan Gas Negara			PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk			(Persero) Tbk
Unsecured Fixed			Unsecured Fixed
Rate Notes	110.298	-	Rate Notes
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro Medium			Euro Medium
Term Notes (EMTN) - 2024	20.712	-	Term Notes (EMTN) - 2024
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Lembaga Pembiayaan			Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia			Ekspor Indonesia
EMTN Programme			EMTN Programme
Indonesia Eximbank - 2017	72.543	68.350	Indonesia Eximbank - 2017
	319.561	68.350	
	2.629.347	1.511.624	
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held-to-maturity</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank CIMB Niaga Tbk			PT Bank CIMB Niaga Tbk
Tahap III Seri B 2017	39.145	-	Phases III Series B 2017
Tahap II Seri B 2017	10.039	-	Phases II Series B 2017
PT Bank Maybank			PT Bank Maybank
Indonesia Tbk			Indonesia Tbk
Tahap I Seri A 2019	10.028	-	Phases I Series A 2019
PT Berlian Laju Tanker Tbk			PT Berlian Laju Tanker Tbk
Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000	Sukuk Ijarah 2007

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>		
Efek Beragunan Aset		
KIK EBA BTN 05 Kelas B	120.000	120.000
KIK EBA BTN 03 Kelas B	31.041	60.000
KIK EBA BTN 02 Kelas B	9.623	19.415
EBA-SP-BTN 02 Kelas A1	-	5.482
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>		
PT Bank Commonwealth Tahap II Seri A 2019	29.577	-
MUFG Bank Ltd., Jakarta Tahap IV Seri C 2019	96.373	-
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	25.553	-
	373.379	206.897
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Obligasi</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2019	235.000	-
Tahap II Seri B 2017	20.113	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010	3.000	3.000
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri A 2019	199.897	-
Tahap III Seri D 2019	47.593	-
Tahap III Seri C 2019	47.409	-
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	366.913	-
	919.925	3.000
	1.293.304	209.897
Total	8.112.049	5.868.658
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.378)	(20.173)
Neto	8.084.671	5.848.485

8. SECURITIES (continued)

- a. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Held-to-maturity (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Third Parties (lanjutan)</u>
Asset Backed Securities
KIK EBA BTN 05 Class B
KIK EBA BTN 03 Class B
KIK EBA BTN 02 Class B
EBA - SP-BTN02 Class A1
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>
PT Bank Commonwealth Phases II Series A 2019
MUFG Bank Ltd., Jakarta Phases IV Series C 2019
<i>Domestic Documentary Letters of Credit</i>
<u>Related Parties (Note 44)</u>
<u>Bonds</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phases I Series A 2019
Phases II Series B 2017
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series A 2019
Phase III Series D 2019
Phase III Series C 2019
<i>Domestic Documentary Letters of Credit</i>
Total Allowance for impairment losses
Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ Bank Indonesia Certificates, Deposits Certificates Of Bank Indonesia	< 1 tahun/ < 1 year	4,60% s.d 5,70%, dan 5,70% s.d 6,66% untuk periode yang berakhir masing masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018/ 4.60% to 5.70% and 5.70% to 6.66% for periods ended December 31, 2019 and 2018, respectively	Bank Indonesia
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016	Obligasi/Bonds	15 Juli/ July 15, 2021	9,35% tetap/ fixed	PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019 Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds Negotiable Certificate of Deposits	18 Oktober/ October 18, 2022 2 Oktober/ October 2, 2019	8,25% tetap/ fixed 7,20% tetap/ fixed	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019 Phase II Series B 2017
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015	Obligasi/Bonds	8 Januari/ January 8, 2021	10,99% tetap/ fixed	PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri A 2017	Obligasi/Bonds	24 Agustus/ August 24, 2020	7,60% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series A 2017
Tahap I Seri C 2016	Obligasi/Bonds	1 Desember/ December 1, 2021	8,20% tetap/ fixed	Phase I Series C 2016
Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	17 November/ November 17, 2020	6,50% tetap/ fixed	Phase I Series A 2019
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2020	8,10% tetap/ fixed	Phase II Series B 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	15 Juni/ June 15, 2020	7,80% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase II Series D 2017
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/Bonds	30 September/ September 30, 2021	7,95% tetap/ fixed	Phase I Series A 2016
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap IV Seri B 2017	Obligasi/Bonds	23 Februari/ February 23, 2020	8,40% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase IV Seri B 2017
PT Mandiri Taspen Pos Tahap I 2017 Seri A Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	11 Juli/ July 11, 2020 26 November/ November 26, 2022	8,50% tetap/ fixed 7,90% tetap/ fixed	PT Mandiri Taspen Pos Phase I Series A 2017 Phase I Series A 2019
Seri B 2019	Negotiable Certificate of Deposits	20 Februari/ February 20, 2020	8,40% tetap/ fixed	Series B 2019
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	21 November/ November 21, 2022	7,75% tetap/ fixed	PT Kereta Api Indonesia (Persero) Year 2017 Series A
PT Timah (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2017 Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	28 September/ September 28, 2020 15 Agustus/ August 15, 2022	8,50% tetap/ fixed 8,50% tetap/ fixed	PT Timah (Persero) Tbk Phase I 2017 Phase II Series A 2019

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	2 November / November 2, 2020	7,50% tetap/ fixed	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase III Series B 2017
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	23 Agustus / August 23, 2020	7,70% tetap/ fixed	Phase II Series B 2017
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	13 Juli/ July 13, 2020	7,55% tetap/ fixed	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Phase I Series A 2019
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
PT Bank KEB Hana Indonesia Tahap V 2019	Obligasi/Bonds	17 September/ September 17, 2020	6,89% tetap/ fixed	PT Bank KEB Hana Indonesia Phase V 2019
PT BPD DKI Tahap I Seri A 2019	Negotiable Certificate of Deposits	10 Maret/ March 10, 2020	6,20% tetap/ fixed	PT BPD DKI Phase I Series A 2019
PT BPD Jawa Tengah MTN Syariah Mudharabah Tahap I 2017	Medium Term Notes Negotiable Certificate of Deposits	12 Desember/ December 12, 2020 21 Mei/ May 21, 2019	8,05% tetap/ fixed 8,50% tetap/ fixed	PT BPD Jawa Tengah MTN Syariah Mudharabah Phase I 2017
Seri A Tahun 2018				Series A Year 2018
PT Bank Commonwealth Indonesia Tahap II Seri A 2019	Negotiable Certificate of Deposits	20 Maret/ March 20, 2020	6,55% tetap/ fixed	PT Bank Commonwealth Indonesia Phase II Series A 2019
MUFG Bank Ltd., Jakarta Tahap IV Seri C 2019	Negotiable Certificate of Deposits	14 Agustus/ August 14, 2020	6,95% tetap/ fixed	MUFG Bank Ltd., Jakarta Phase IV Series C 2019
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	12 Januari/ January 12, 2020	12,55% tetap/ fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2022	7,20% tetap/ fixed	Sukuk Phase II Series A 2017
Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2027	8,20% tetap/ fixed	Sukuk Phase II Series B 2017
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri A 2019	Negotiable Certificate of Deposits	3 Januari/ January 3, 2020	6,31% tetap/ fixed	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series A 2019
Tahap III Seri D 2019	Negotiable Certificate of Deposits	1 Oktober/ October 1, 2020	6,70% tetap/ fixed	Phase III Series D 2019
Tahap III Seri C 2019	Negotiable Certificate of Deposits	20 Maret/ March 20, 2020	7,59% tetap/ fixed	Phase III Series C 2019
Seri F 2016	Negotiable Certificate of Deposits	14 Juni/ June 14, 2019	8,40% tetap/ fixed	Series F 2016
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	10 Desember/ December 10, 2021	10,75% tetap/ fixed	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Seri A Tahun 2017	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	19 September/ September 19, 2022	8,02% tetap/ fixed	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Series A Year 2017

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
EBA - SP - BTN01 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Maret/ March 7, 2022	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA - SP - BTN 01 Class B
EBA - SP - BTN02 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Juni/ June 7, 2027	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA - SP - BTN02 Class B
EBA - SP - BTN03 Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Juli/ July 7, 2029	8,00%	EBA - SP - BTN03 Class A
EBA - SP - BTN03 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Juli/ July 7, 2029	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA - SP - BTN03 Class B
EBA - SP - BTN04 Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Mei/ May 7, 2029	7,00%	EBA - SP - BTN04 Class A
EBA - SP - BTN04 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Mei/ May 7, 2029	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA - SP - BTN04 Class B
EBA - SP - BTN05 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Mei/ May 7, 2032	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	EBA - SP - BTN05 Class B
KIK - EBA BTN 02 Kelas B	Efek Beragunan Aset / Asset <i>Backed Securities</i>	27 Februari/ February 27, 2021	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA BTN 02 Class B
KIK - EBA BTN 03 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	7 Januari/ January 7, 2023	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA BTN 03 Class B
KIK - EBA BTN 04 Kelas B	Efek Beragunan Aset/ Asset <i>Backed Securities</i>	26 Februari/ February 26, 2022	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA BTN 04 Class B
KIK - EBA BTN 05 Kelas B	Efek Beragunan Aset / Asset <i>Backed Securities</i>	7 September/ September 7, 2025	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA BTN 05 Class B

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
<u>Mata Uang Asing</u>				<u>Foreign Currencies</u>
Dolar Amerika Serikat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017	Medium Term Notes	6 April/ April 6, 2024	3,88% tetap/ fixed	United States Dollar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024	Obligasi/Bonds	28 Maret/ March 28, 2024	3,95% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes	Obligasi/Bonds	16 Mei/ May 16, 2024	3,95% tetap/ fixed	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2024	3,75% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

**c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo
(efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo)**

**c. Remaining period to maturity (held-to-maturity
securities)**

	31 Desember December 31, 2019	31 Desember December 31, 2018	
≤ 1 tahun	1.130.640	-	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 5 tahun	40.664	87.897	> 1 year ≤ 5 years
> 5 tahun ≤ 10 tahun	120.000	120.000	> 5 years ≤ 10 years
> 10 tahun	2.000	2.000	> 10 years
	1.293.304	209.897	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	Issuer
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016	Obligasi/Bonds	idA+(sy)	idA+(sy)	PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015	Obligasi/Bonds	idA(sy)	idA(sy)	PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idAA-	-	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019
PT BPD Jawa Tengah MTN Syariah Mudharabah Tahap I 2017	Medium Term Notes	idAA-(sy)	idAA-(sy)	PT BPD Jawa Tengah MTN Mudharabah Sharia Phase I 2017
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri A 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series A 2017
Tahap I Seri C 2016	Obligasi/Bonds	idAAA	-	Phase I Series C 2016
Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idAAA	-	Phase I Series A 2019
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	-	Phase II Series B 2017
Senior Unsecured Notes Due 2024	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	-	Senior Unsecured Notes Due 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2016	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I Series A 2016
Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	Phase II Series D 2017
Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	-	Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Sukuk Phase II 2017 Series A
Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(sy)	Sukuk Phase II 2017 Series B
PT Mandiri Taspen Pos Tahap I Seri A 2017	Obligasi/Bonds	AA(idn)	AA(idn)	PT Mandiri Taspen Pos Phase I Series A 2017
Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	AA(idn)	-	Phase I Series A 2019
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	PT Kereta Api Indonesia (Persero) Year 2017 Series A
PT Timah (Persero) Tbk Tahap I 2017	Obligasi/Bonds	idA+	idA+	PT Timah (Persero) Tbk Phase I 2017
Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idA+	idA+	Phase II Series A 2019
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idAAA	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Phase I Series A 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase III Series B 2017
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	-	Phase II Series B 2017
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes	Medium Term Notes	Baa2 ^{*)}	-	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes

^{*)} Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

^{*)} Based on ratings published by Moody's

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	Issuer
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Seri A Tahun 2017	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	idAAA(sf)	idAAA(sf)	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Series A Year 2017
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	idBBB+	idBBB+	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017 Tahap IV Seri B 2017	Medium Term Notes Obligasi/Bonds	Baa2*) idAAA	Baa2*) -	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017 Phase IV Seri B 2017
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idD (sy)	idD (sy)	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
EBA - SP - BTN 03 KPR BTN Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	idAAA	idAAA	EBA - SP - BTN 03 KPR BTN Class A
EBA - SP - BTN 04 KPR BTN Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	idAAA	idAAA	EBA - SP - BTN 04 KPR BTN Class A

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

*) Based on ratings published by Moody's

e. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Lancar	7.974.134	5.723.571	Current
Dalam Perhatian Khusus	60.632	72.382	Special Mention
Kurang Lancar	6.070	6.922	Substandard
Diragukan	6.432	10.952	Doubtful
Macet	64.781	54.831	Loss
Total	8.112.049	5.868.658	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.378)	(20.173)	Allowance for impairment losses
Neto	8.084.671	5.848.485	Net

e. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Rupiah		
Saldo awal tahun	20.173	14.923
Penyisihan		
kerugian penurunan nilai		
selama tahun berjalan		
(Catatan 34)	7.205	5.250
Saldo akhir	27.378	20.173

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

- g. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp478.339 dan Rp437.553, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- h. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari kenaikan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp20.894 dan Rp30.316, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang disajikan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek-neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing berkisar dari 95,70% sampai dengan 100,84% dan 89,03% sampai dengan 101,71%.

8. SECURITIES (continued)

- f. The movements in the allowance for impairment losses on securities are as follows:

Rupiah	
Balance at beginning of year	
Provision for	
impairment losses during	
the year (Note 34)	
Balance at end	

Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

- g. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp478,339 and Rp437,553, for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of securities - net".
- h. The Bank's unrealized gain - net from the increase in value of fair value through profit or loss securities amounting to Rp20,894 and Rp30,316, for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Unrealized gain on changes in fair value of securities - net".
- i. As of December 31, 2019 and 2018, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and available for sale range from 95.70% to 100.84% and range from 89.03% to 101.71%, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- j. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp15.661 dan Rp2.472 dari perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 dalam akun keuntungan (kerugian) dan kerugian neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan net dalam laporan posisi keuangan.
- k. Mutasi keuntungan/(kerugian) efek-efek tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal tahun	2.472	17.425	Balance at beginning of year
Rugi yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	17.156	(10.610)	Unrealized loss recognized in equity
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	(876)	(9.327)	Amount realized to profit or loss
Efek pajak	(3.091)	4.984	Tax effect
Saldo akhir tahun	15.661	2.472	Balance at end of year

- l. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak - pihak berelasi sebesar Rp2.126.461 dan Rp877.112, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 44).
- m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 47.

8. SECURITIES (continued)

- j. The Bank recognized unrealized gain - net (after deferred tax) of Rp15,661 and Rp2,472 from the changes in fair values of available-for-sale securities as of December 31, 2019 and 2018, which are presented as unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds, net of deferred tax in the statement of financial position.

- k. Movements in unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities are as follows:

- l. As of December 31, 2019 and 2018, investments in securities with related parties amounted to Rp2,126,461 and Rp877,112, respectively (Note 44).

- m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 47.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak berelasi		
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0083	73.793	-
FR 0059	50.117	-
FR 0068	42.839	-
ORI 016	40.683	-
FR 0065	39.885	26.058
FR 0082	39.813	-
FR 0078	32.414	20.425
FR 0080	29.592	-
FR 0075	11.272	6.311
FR 0071	11.234	-
FR 0079	10.731	-
SR 0011	5.710	-
FR 0062	3.605	-
ORI 015	3.423	7.560
SR 0010	1.510	75
SR 0009	1.295	183
FR 0076	194	-
ORI 014	10	445
FR 0070	-	30.441
FR 0069	-	19.073
FR 0056	-	10.148
FR 0064	-	8.776
SR 0008	-	598
ORI 013	-	354
	398.120	130.447
<u>Zero Coupon Bonds</u>		
SPN12200106	373.000	-
SPN12200619	195.578	-
SPNS02042020	52.852	-
SPNS11042019	-	575.669
SPN03190207	-	497.095
SPNS08052019	-	490.110
SPN03190124	-	298.968
SPN03190222	-	268.312
SPN03190110	-	249.713
SPN12190214	-	148.951
SPN12190131	-	99.533
SPN12190314	-	18.776
	621.430	2.647.127
	1.019.550	2.777.574
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDON 2029	111.293	-
INDON 2029N	101.361	-
	212.654	-
	1.232.204	2.777.574
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0064	477.799	447.551
SR 0010	235.047	225.720
FR 0065	157.685	147.662
FR 0063	135.847	127.241
FR 0075	108.035	99.937
FR 0061	61.113	58.609
FR 0062	54.284	49.880
FR 0070	53.503	50.735

9. GOVERNMENT BONDS

a. Based on currency and type

Related parties	
<u>Fair value through profit or loss</u>	
<u>Rupiah</u>	
Fixed interest rate	
FR 0083	
FR 0059	
FR 0068	
ORI 016	
FR 0065	
FR 0082	
FR 0078	
FR 0080	
FR 0075	
FR 0071	
FR 0079	
SR 0011	
FR 0062	
ORI 015	
SR 0010	
SR 0009	
FR 0076	
ORI 014	
FR 0070	
FR 0069	
FR 0056	
FR 0064	
SR 0008	
ORI 013	
<u>Zero Coupon Bonds</u>	
SPN12200106	
SPN12200619	
SPNS02042020	
SPNS11042019	
SPN03190207	
SPNS08052019	
SPN03190124	
SPN03190222	
SPN03190110	
SPN12190214	
SPN12190131	
SPN12190314	
<u>Foreign Currencies</u>	
<u>United States Dollar</u>	
Fixed interest rate	
INDON 2029	
INDON 2029N	
<u>Available-for-sale</u>	
<u>Rupiah</u>	
Fixed interest rate	
FR 0064	
SR 0010	
FR 0065	
FR 0063	
FR 0075	
FR 0061	
FR 0062	
FR 0070	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tingkat bunga tetap (lanjutan)		
FR 0072	52.728	49.316
FR 0059	40.094	46.636
FR 0074	39.903	37.344
FR 0056	32.351	30.443
FR 0076	19.378	-
ORI 013	-	278.799
SR 0008	-	30.158
	1.467.767	1.680.031
<u>Zero Coupon Bonds</u>		
SPN12200106	676.358	-
SPN12200619	254.252	-
SPNS02042020	245.384	-
SPN12200130	199.316	-
SPNS10012020	173.142	-
SPN03200123	156.909	-
SPN12201009	144.341	-
SPN12200508	98.349	-
SPNS15052020	98.060	-
SPNS04032020	97.331	-
SPN12200313	81.101	-
SPNS07022020	49.736	-
	2.274.279	-
<u>Tingkat bunga mengambang</u>		
VR 0031	1.121.749	1.108.811
VR 0029	-	708.036
<u>Obligasi Syariah Negara</u>		
PBS 019	107.453	101.735
PBS 016	60.154	59.115
PBS 011	8.578	8.133
PBS 014	4.228	4.076
PBS 022	74.727	-
PBS 021	70.829	-
PBS 013	-	24.893
SPNS08022019	-	49.030
SPNS05032019	-	710
SPNS03042019	-	22.134
	1.447.718	2.086.673
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDON 2029N	205.618	-
INDOIS 2028	142.484	-
INDON 2029	127.191	-
INDON 2025	104.252	-
INDON 2028	97.941	-
INDON 2047N	64.177	54.028
INDON 2048	45.952	-
INDON 2049	44.789	-
INDON 2049N	43.000	-
INDON 2022	42.964	-
INDON 2042	25.087	-
INDON 2028N	14.510	-
INDOIS 2023	-	70.402
INDON 2048	-	13.101
	957.965	137.531
	6.147.729	3.904.235

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Based on currency and type (continued)

<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Fixed interest rate (continued)</u>
FR 0072
FR 0059
FR 0074
FR 0056
FR 0076
ORI 013
SR 0008
<u>Zero Coupon Bonds</u>
SPN12200106
SPN12200619
SPNS02042020
SPN12200130
SPNS10012020
SPN03200123
SPN12201009
SPN12200508
SPNS15052020
SPNS04032020
SPN12200313
SPNS07022020
<u>Floating interest rate</u>
VR 0031
VR 0029
<u>Government Sharia Bond</u>
PBS 019
PBS 016
PBS 011
PBS 014
PBS 022
PBS 021
PBS 013
SPNS08022019
SPNS05032019
SPNS03042019

<u>Available-for-sale</u>
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Fixed interest rate</u>
INDON 2029N
INDOIS 2028
INDON 2029
INDON 2025
INDON 2028
INDON 2047N
INDON 2048
INDON 2049
INDON 2049N
INDON 2022
INDON 2042
INDON 2028N
INDOIS 2023
INDON 2048

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0063	302.941	296.250
FR 0053	248.798	248.098
FR 0056	215.695	215.247
FR 0070	126.377	125.704
FR 0031	115.218	-
PBS 016	100.207	-
FR 0034	63.020	64.875
FR 0043	21.757	-
FR 0069	-	12.933
	1.194.013	963.107
Tingkat bunga mengambang		
VR 0031	1.124.754	1.124.338
VR 0029	-	199.946
Obligasi Syariah Negara		
Sukuk BI	679.701	300.000
	1.804.455	1.624.284
	2.998.468	2.587.391
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDON 2020	267.897	-
INDOIS 2022N	146.271	-
INDOIS 2024	93.430	-
INDON 2021	70.361	-
INDON 2022	41.454	-
INDOIS 2021	28.023	29.235
INDOIS 2024N	27.764	-
INDON 2019	-	58.474
INDOIS 2019	-	36.229
	675.200	123.938
	3.673.668	2.711.329
Total	11.053.601	9.393.138

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Based on currency and type (continued)

Held-to-maturity
Rupiah
Fixed interest rate
FR 0063
FR 0053
FR 0056
FR 0070
FR 0031
PBS 016
FR 0034
FR 0043
FR 0069

Floating interest rate
VR 0031
VR 0029

Government Sharia Bond
Sukuk BI

Foreign Currencies
United States Dollar
Fixed interest rate
INDON 2020
INDOIS 2022N
INDOIS 2024
INDON 2021
INDON 2022
INDOIS 2021
INDOIS 2024N
INDON 2019
INDOIS 2019

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

b. Based on maturity and interest rate

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed	FR 0062
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed	FR 0068
FR 0069	15 April/ April 15, 2019	7,87% tetap/ fixed	FR 0069
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Nilai wajar melalui</u> <u>laporan laba rugi (lanjutan)</u> <u>Rupiah (lanjutan)</u> Tingkat bunga tetap (lanjutan)		
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	8,38% tetap/ fixed
FR 0080	15 Juni/ June 15, 2035	7,50% tetap/ fixed
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed
ORI 013	15 Oktober/ October 15, 2019	6,60% tetap/ fixed
ORI 015	15 Oktober/ October 15, 2021	8,25% tetap/ fixed
ORI 014	15 Oktober/ October 15, 2020	5,85% tetap/ fixed
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed
SR 0008	10 Maret/ March 10, 2019	8,30% tetap/ fixed
SR 0009	10 Maret/ March 10, 2020	6,90% tetap/ fixed
SR 0010	10 Maret/ March 10, 2021	5,90% tetap/ fixed
SR 0011	10 Maret/ March 10, 2022	8,05% tetap/ fixed
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various
<u>Dolar Amerika Serikat</u> Tingkat bunga tetap INDON 2029	11 Februari/ February 11, 2029	4,75% tetap/ fixed
INDON 2029N	18 September/ September 18, 2029	3,40% tetap/ fixed
<u>Tersedia untuk dijual</u> <u>Rupiah</u> Tingkat bunga tetap		
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed
FR 0061	15 Mei/ May 15, 2022	7,00% tetap/ fixed
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50% tetap/ fixed
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed
ORI 013	15 Oktober/ October 15, 2019	6,60% tetap/ fixed

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

Description		
<u>Fair value through</u> <u>profit or loss (continued)</u> <u>Rupiah (continued)</u> Fixed interest rate (continued)		
FR 0071		
FR 0075		
FR 0076		
FR 0078		
FR 0079		
FR 0080		
FR 0082		
FR 0083		
ORI 013		
ORI 015		
ORI 014		
ORI 016		
SR 0008		
SR 0009		
SR 0010		
SR 0011		
Zero Coupon Bonds SPN		
<u>United States Dollar</u> Fixed interest rate INDON 2029		
INDON 2029N		
<u>Available-for-sale</u> <u>Rupiah</u> Fixed interest rate		
FR 0056		
FR 0059		
FR 0061		
FR 0062		
FR 0063		
FR 0064		
FR 0065		
FR 0070		
FR 0072		
FR 0074		
FR 0075		
FR 0076		
ORI 013		

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Tingkat bunga tetap (lanjutan)			Fixed interest rate (continued)
SR 008	10 Maret/ March 10, 2019	8,30% tetap/ fixed	SR 008
SR 010	10 Maret/ March 10, 2021	5,90% tetap/ fixed	SR 010
Zero Coupon Bonds			Zero Coupon Bonds
SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various	SPN
Tingkat bunga mengambang			Floating interest rate
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bonds
PBS 011	15 Agustus/ August 15, 2023	8,75% tetap/ fixed	PBS 011
PBS 013	15 Mei/ May 15, 2019	6,25% tetap/ fixed	PBS 013
PBS 014	15 Mei/ May 15, 2021	6,50% tetap/ fixed	PBS 014
PBS 016	15 Maret/ March 15, 2020	6,25% tetap/ fixed	PBS 016
PBS 019	15 September/ September 15, 2023	8,25% tetap/ fixed	PBS 019
PBS 021	15 November/ November 15, 2026	8,50% tetap/ fixed	PBS 021
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed	PBS 022
SPNS05032019	5 Maret/ March 5, 2019	Beragam/ Various	SPNS05032019
SPNS03042019	3 April/ April 3, 2019	Beragam/ Various	SPNS03042019
SPNS08022019	8 Februari/ February 8, 2019	Beragam/ Various	SPNS08022019
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDOIS 2023	1 Maret/ March 1, 2023	3,75% tetap/ fixed	INDOIS 2023
INDOIS 2028	1 Maret/ March 1, 2028	4,40% tetap/ fixed	INDOIS 2028
INDON 2022	25 April/ April 25, 2022	3,75% tetap/ fixed	INDON 2022
INDON 2025	15 Januari/ January 15, 2025	4,13% tetap/ fixed	INDON 2025
INDON 2028	24 April/ April 24, 2028	4,10% tetap/ fixed	INDON 2028
INDON 2029	11 Februari/ February 11, 2029	4,75% tetap/ fixed	INDON 2029
INDON 2042	17 Januari / January 17, 2042	5,25% tetap/ fixed	INDON 2042
INDON 2048	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed	INDON 2048
INDON 2049	11 Februari/ February 11, 2049	5,35% tetap/ fixed	INDON 2049
INDON 2028N	11 Januari / January 11, 2028	3,50% tetap/ fixed	INDON 2028N
INDON 2029N	18 September/ September 18, 2029	3,40% tetap/ fixed	INDON 2029N
INDON 2047N	18 Juli/ July 18, 2047	4,75% tetap/ fixed	INDON 2047N
INDON 2048N	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed	INDON 2048N
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed	INDON 2049N

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held-to-maturity</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0031	15 November/ November 15, 2020	11,00% tetap/ fixed	FR 0031
FR 0034	15 Juni/ June 15, 2021	12,80% tetap/ fixed	FR 0034
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed	FR 0043
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	FR 0053
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
FR 0069	15 April/ April 15, 2019	7,88% tetap/ fixed	FR 0069
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
PBS 016	15 Maret/ March 15, 2020	6,25% tetap/ fixed	PBS 016
Tingkat bunga mengambang			Floating interest rate
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019	SPN 3 bulan/ months	VR 0029
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2019	6,20% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Januari/ January 2, 2020	5,00% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Januari/ January 2, 2020	5,34% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	8 Januari/ January 8, 2020	5,34% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	22 Januari/ January 22, 2020	5,34% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	29 Januari/ January 29, 2020	5,09% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Februari/ February 5, 2020	5,09% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	12 Februari/ February 12, 2020	5,09% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	19 Februari/ February 19, 2020	5,09% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	26 Februari/ February 26, 2020	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDOIS 2019	15 Maret/ March 15, 2019	6,13% tetap/ fixed	INDOIS 2019
INDOIS 2021	29 Maret/ March 29, 2021	3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2021
INDOIS 2022N	29 Maret/ March 29, 2020	3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2022N
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024	4,35% tetap/ fixed	INDOIS 2024
INDOIS 2024N	20 Agustus/ August 20, 2024	3,90% tetap/ fixed	INDOIS 2024N
INDON 2020	13 Maret/ March 13, 2020	5,88% tetap/ fixed	INDON 2020
INDON 2021	5 Mei/ May 5, 2021	4,88% tetap/ fixed	INDON 2021
INDON 2022	25 April/ April 25, 2022	3,75% tetap/ fixed	INDON 2022

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Obligasi pemerintah (tersedia untuk dijual) sejumlah nominal Rp1.075.000 dan Rp1.075.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 22).

Pembayaran kupon obligasi pemerintah dengan tingkat bunga tetap dan mengambang masing-masing dibayarkan tiap semester dan triwulanan.

Obligasi pemerintah syariah seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual berkisar dari 83,84% sampai dengan 129,05% dan 77,03% sampai dengan 102,12% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual (setelah pajak tangguhan) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.201 dan Rp109.902, yang disajikan dalam akun "Kerugian neto yang belum direalisasi atas obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Mutasi keuntungan/(kerugian) obligasi pemerintah tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Saldo awal tahun	(109.902)	(39.167)
Laba yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	121.135	(100.457)
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	11.198	6.144
Efek pajak	(26.632)	23.578
Saldo akhir tahun	(4.201)	(109.902)

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp144.553 dan Rp8.586, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

As of December 31, 2019 and December 31, 2018, government bonds (available-for-sale) with nominal amounts of Rp1,075,000 and Rp1,075,000, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 22).

Coupon payments of government bonds with fixed and floating interest rates are payable semi-annually and quarterly, respectively.

SR series and ORI series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and available for sale range from 83.84% to 129.05% and 77.03% to 102.12% of nominal amounts as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds (after deferred tax) amounted to Rp4,201 and Rp109,902, respectively, which are presented as "Net-unrealized losses on available-for-sale government bonds net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

Movements in unrealized gain/(loss) on available-for-sale government bonds are as follows:

Balance at beginning of year
Unrealized gain recognized in equity
Amount realized to profit or loss
Tax effect
Balance at end of year

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp144,553 and Rp8,586 for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of government bonds - net".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp1.745 dan Rp11.999 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai *underlying* obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to Rp1,745 and Rp11,999 for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from change in fair value of government bonds - net".

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which is held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

Securities purchased under agreement to resell consist of:

31 Desember/December 31, 2019

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Penjualan Kembali/ Resell Date	Harga Pen- jualan Kembali/ Resell Price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak Ketiga/Third Parties								
Bank Indonesia	SPN12200313	5,00%	98.761	26 Desember/ December 26, 2019	2 Januari/ January 2, 2020	92.932	14	92.918
Bank Indonesia	SPN12200410	5,00%	901.239	26 Desember/ December 26, 2019	2 Januari/ January 2, 2020	844.380	117	844.263
Bank Indonesia	SPN12200703	5,00%	400.000	27 Desember/ December 27, 2019	3 Januari/ January 3, 2020	370.348	103	370.245
Bank Indonesia	SPN12200703	5,00%	400.000	27 Desember/ December 27, 2019	3 Januari/ January 3, 2020	367.897	102	367.795
Total Pihak Ketiga/Total Third Parties			1.800.000			1.675.557	336	1.675.221
Pihak Berelasi/Related Parties								
Asuransi Jiwasraya	WSKT02ACN3	5,75%	200.000	6 September/ September 6, 2019	21 Februari/ February 21, 2020	89.888	-	89.888
Asuransi Jiwasraya	WSKT02ACN2	5,75%	195.000	6 September/ September 6, 2019	28 September/ September 28, 2021	87.640	-	87.640
Asuransi Jiwasraya	WSKT03ACN1	5,75%	25.000	6 September/ September 6, 2019	6 Oktober/ October 6, 2020	11.236	-	11.236
Asuransi Jiwasraya	SMII01BCN1	5,75%	20.000	6 September/ September 6, 2019	18 November/ November 18, 2021	8.989	-	8.989
Asuransi Jiwasraya	PTPP01CN2	5,75%	5.000	6 September/ September 6, 2019	24 Februari/ February 24, 2020	2.247	-	2.247
Total Pihak Berelasi/Related Parties			445.000			200.000	-	200.000
Total			2.245.000			1.875.557	336	1.875.221

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Konvensional</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	172.701.455	159.359.501
Non-kepemilikan rumah	10.177.545	11.259.553
	182.879.000	170.619.054
Modal kerja	36.734.973	36.734.329
Investasi	10.378.286	6.711.315
Sindikasi	70.925	77.033
Direksi dan karyawan		
- Pihak ketiga	2.046.347	2.007.106
- Pihak yang berelasi	103.008	107.468
	232.212.539	216.256.305
<u>Syariah</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	19.490.225	17.077.295
Non-kepemilikan rumah	184.235	242.278
	19.674.460	17.319.573
Modal kerja	3.609.382	4.265.861
Investasi	325.362	452.397
Direksi dan karyawan		
- Pihak yang berelasi	3.416	3.596
	23.612.620	22.041.427
Total	255.825.159	238.297.732
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.116.166)	(3.298.132)
Neto	249.708.993	234.999.600

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

<u>Conventional</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Syndicated
Directors and employees
Third parties -
Related parties -
<u>Sharia</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees
Related parties -
Total
Less allowance
for impairment losses
Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	210.201.524	198.084.109	Property
Konstruksi	7.429.315	7.842.439	Construction
Jasa usaha	4.920.595	6.038.298	Business service
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.196.227	1.303.412	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa sosial	1.997.275	780.783	Social service
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4.421.513	1.225.355	Transportation, warehousing, and communication
Manufaktur	107.752	157.818	Manufacturing
Pertambangan	51.066	87.799	Mining
Listrik, gas dan air	1.568.016	89.603	Electricity, gas and water
Pertanian	28.237	37.055	Farming
Lain-lain ^{*)}	291.019	609.634	Other ^{*)}
	232.212.539	216.256.305	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	19.492.212	17.079.613	Property
Jasa usaha	1.488.813	1.966.834	Business service
Konstruksi	2.631.595	2.994.980	Construction
	23.612.620	22.041.427	
Total	255.825.159	238.297.732	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.116.166)	(3.298.132)	Less allowance for impairment losses
Neto	249.708.993	234.999.600	Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Individual					Individual
Lancar	4.513.426	528.435	1.961.445	430.427	Current
Dalam perhatian khusus	2.283.433	721.262	2.077.246	449.313	Special mention
Kurang lancar	2.154.485	476.092	313.999	47.706	Substandard
Diragukan	677.954	387.446	148.137	46.505	Doubtful
Macet	2.169.877	1.865.237	466.620	369.568	Loss
	11.799.175	3.978.472	4.967.447	1.343.519	
<u>Kolektif</u>					<u>Collective</u>
Lancar	192.882.717	8.910	189.737.457	7.600	Current
Dalam perhatian khusus	22.087.063	4.772	16.943.868	4.327	Special mention
Kurang lancar	413.344	2.639	164.063	642	Substandard
Diragukan	545.383	10.048	242.231	5.453	Doubtful
Macet	4.484.857	1.421.067	4.201.239	1.416.304	Loss
	220.413.364	1.447.436	211.288.858	1.434.326	
<u>Syariah</u>					<u>Sharia</u>
Lancar	19.948.272	182.314	19.589.972	49.135	Current
Dalam perhatian khusus	1.880.014	7.044	1.288.049	8.915	Special mention
Kurang lancar	519.838	31.293	91.940	2.932	Substandard
Diragukan	172.291	11.876	83.092	13.855	Doubtful
Macet	1.092.205	457.731	988.374	445.450	Loss
	23.612.620	690.258	22.041.427	520.287	
Total	255.825.159	6.116.166	238.297.732	3.298.132	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Konvensional</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	7.747	8.118
Non-kepemilikan rumah	108.308	113.479
	116.055	121.597
Modal Kerja	11.186.598	10.051.669
Investasi	6.031.698	1.354.992
Sindikasi	70.925	77.033
	17.405.276	11.605.291
<u>Syariah</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	1.987	2.318
Non- kepemilikan rumah	1.429	1.278
	3.416	3.596
Total	17.408.692	11.608.887

Conventional
Consumer
Housing Loan
Non-housing loan

Working capital
Investment
Syndicated

Sharia
Consumer
Housing Loan
Non-housing loan

Total

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Konvensional</u>		
≤ 1 tahun	3.480.210	4.367.964
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.311.365	3.198.280
> 2 tahun ≤ 5 tahun	14.380.583	15.879.928
> 5 tahun	212.040.381	192.810.133
	232.212.539	216.256.305
<u>Syariah</u>		
≤ 1 tahun	38.263	93.225
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.183.015	1.897.087
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.387.298	2.452.388
> 5 tahun	20.004.044	17.598.727
	23.612.620	22.041.427
Total	255.825.159	238.297.732
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.116.166)	(3.298.132)
Neto	249.708.993	234.999.600

Conventional
≤ 1 year
> 1 year ≤ 2 years
> 2 years ≤ 5 years
> 5 years

Sharia
≤ 1 year
> 1 year ≤ 2 years
> 2 years ≤ 5 years
> 5 years

Total
Less allowance
for impairment losses

Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	13.975.881	15.080.578	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	8.437.350	8.665.118	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	25.420.228	25.173.653	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	184.379.080	167.336.956	> 5 years
	232.212.539	216.256.305	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	2.286.349	2.800.179	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.017.290	1.507.452	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.685.096	1.452.323	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	18.623.885	16.281.473	> 5 years
	23.612.620	22.041.427	
Total	255.825.159	238.297.732	Total
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.116.166)	(3.298.132)	Less Allowance for impairment losses
Neto	249.708.993	234.999.600	Net

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

- i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Piutang Murabahah	17.432.498	15.839.440	Murabahah receivables
Pembiayaan Musyarakah	3.702.276	3.994.172	Musyarakah financing
Piutang Istishna	2.028.282	1.522.644	Istishna receivables
Pembiayaan Mudharabah	418.625	616.198	Mudharabah financing
Pinjaman Qardh	30.939	68.973	Funds of Qardh
Total	23.612.620	22.041.427	Total
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(690.258)	(520.287)	Less Allowance for impairment losses
Neto	22.922.362	21.521.140	Net

- ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 11,30% dan 11,43% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 9,75% dan 11,50% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

- ii. Average annual interest rates for consumer loans are 11.30% and 11.43% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 9.75% and 11.50% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 18, 19 dan 20).

- iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 18, 19 and 20).

- iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 23 tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Cessie No. 41 tanggal 28 Februari 2018.

- iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 23 dated February 12, 2018 and Deed of Cessie No. 41 dated February 28, 2018.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari 18.728 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (8 Februari 2018). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp2,000,000 which consists of 18,728 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (February 8, 2018). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

- v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 31 tanggal 15 Oktober 2019 dan Akta Cessie No. 49 tanggal 27 November 2019.

- v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 31 dated October 15, 2019 and Deed of Cessie No. 49 dated November 27, 2019.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari 16.476 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (8 Oktober 2019). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp2,000,000 which consists of 16,476 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 8, 2019). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

vi. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 3,17% dan 6,37%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp288.899 dan Rp174.336 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 16).

vi. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 3.17% and 6.37%, for year ended December 31, 2019 and 2018, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp288,899 and Rp174,336 as of December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 16).

vii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.408.692 dan Rp11.608.887 (Catatan 44). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar 6,80% dan 4,87%.

vii. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp17,408,692 and Rp11,608,887, respectively (Note 44). As of December 31, 2019 and 2018, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 6.80% and 4.87%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

viii. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

viii. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal tahun	3.298.132	2.355.987	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 34)	3.479.546	1.709.059	Provision for impairment losses during the year (Note 34)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	40.598	20.288	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(702.110)	(787.202)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	6.116.166	3.298.132	Balance at the end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- viii. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut (lanjutan):

- viii. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows (continued):

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp690.258 dan Rp520.287, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/ receivables amounting to Rp690,258 and Rp520,287, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

- ix. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (credit limit) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

- ix. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

- x. Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

- x. Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2019 and 2018, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xi. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode gross dan net) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

- xi. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	2.567.829	519.838	478.062	91.940	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	1.223.337	172.291	390.368	83.092	
Macet	6.654.734	1.092.205	4.667.859	988.374	
	10.445.900	1.784.334	5.536.289	1.163.406	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(4.162.529)	(500.900)	(1.886.178)	(462.237)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	6.283.371	1.283.434	3.650.111	701.169	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	232.212.539	23.612.620	216.256.305	22.041.427	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Gross (Gross NPL/NPF)	4,50%	7,56%	2,56%	5,28%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	2,71%	5,44%	1,69%	3,18%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

Rasio NPL/NPF Gross (total konvensional dan syariah) adalah 4,78% dan 2,81% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 4.78% and 2.81% as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 2,96% dan 1,83% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 2.96% and 1.83% as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah *non-performing*
berdasarkan sektor ekonomi:

xii. *Non-performing loans and sharia*
financing/receivables by economic
sectors:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Konvensional</u>		
Perumahan	8.970.472	4.680.049
Perdagangan, restoran dan hotel	496.253	223.969
Konstruksi	503.378	287.513
Jasa Usaha	168.672	111.591
Manufaktur	59.378	53.942
Jasa-jasa sosial	80.955	42.613
Pertanian	19.979	29.792
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	38.482	13.661
Pertambangan	33.114	13.068
Listrik, gas dan air	10.747	1.275
Lain-lain ^{*)}	64.470	78.816
	10.445.900	5.536.289
<u>Syariah</u>		
Perumahan	619.879	133.825
Jasa usaha	208.256	507.084
Konstruksi	956.199	522.497
	1.784.334	1.163.406
Total	12.230.234	6.699.695
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.663.429)	(2.348.415)
Neto	7.566.805	4.351.280

Conventional
Property
Trading, restaurant and hotel
Construction
Business service
Manufacturing
Social service
Farming
Transportation, warehousing,
and communication
Mining
Electricity, gas and water
Other^{*)}

Sharia
Property
Business service
Construction

Total
Less allowance
for impairment losses

Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

xiii. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap
total kredit adalah sebesar 0,45% dan
0,40% masing-masing pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018.

xiii. *The ratio of small-scale enterprise loans to*
total loans is 0.45% and 0.40% as of
December 31, 2019 and 2018,
respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xiv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 7,03% dan 6,00% (tidak diaudit) dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

xiv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 7.03% and 6.00% (unaudited) for each, respectively, of the total syndicated loans.

xv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2019

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	8.510.874	10.075.429	1.372.947	757.929	2.565.026	23.282.205	Property
Konstruksi	958.367	310.536	296.855	72.980	380.382	2.019.120	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	35.519	294.772	226.666	53.591	101.124	711.672	Trading, restaurant and hotel
Jasa usaha	329.073	71.600	34.170	9.662	225.054	669.559	Business service
Listrik, gas dan air	5.089	-	-	-	2.381	7.470	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial	46.518	19.897	-	2.255	32.687	101.357	Social services
Manufaktur	2.575	2.937	-	636	24.994	31.142	Manufacturing
Pertambangan	6.849	7.176	9.569	-	5.851	29.445	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	15.187	-	2.983	26.118	44.288	Transportation, warehousing and communication
Pertanian	-	-	-	-	543	543	Farming
Lain-lain ^{*)}	13.090	5.706	494	28	4.966	24.284	Other ^{*)}
Total	9.907.954	10.803.240	1.940.701	900.064	3.369.126	26.921.085	Total

31 Desember/December 31, 2018

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	8.567.715	7.866.991	390.958	256.270	1.189.555	18.271.489	Property
Konstruksi	565.961	300.253	12.081	24.146	313.896	1.216.337	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	140.702	518.159	41.852	-	86.214	786.927	Trading, restaurant and hotel
Jasa usaha	225.221	89.258	6.784	13.999	194.392	529.654	Business service
Listrik, gas dan air	8.029	2.895	-	-	-	10.924	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial	59.431	19.236	-	5.664	19.706	104.037	Social services
Manufaktur	11.044	16.400	-	3.943	4.941	36.328	Manufacturing
Pertambangan	54.064	2.516	-	-	8.247	64.827	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.323	37.317	-	-	3.260	41.900	Transportation, warehousing and communication
Pertanian	-	873	-	-	9.377	10.250	Farming
Lain-lain ^{*)}	5.103	16.373	572	975	8.659	31.682	Other ^{*)}
Total	9.638.593	8.870.271	452.247	304.997	1.838.247	21.104.355	Total

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

- xv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectability and economic sector: (continued)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

Dalam menerapkan kolektibilitas kredit dan pembiayaan/piutang syariah, Bank telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam terhadap debitur-debitur yang terkena dampak bencana alam.

In determining collectability for loans and sharia financing/receivables, the Bank has implemented the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Special Treatment of Bank Credit or Financing for Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters for debtors affected by disasters natural.

- xvi. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

- xvi. The loans written-off by the Bank are recorded as extra-comptable in the administrative account.

- xvii. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp7.400.201 dan Rp4.854.997, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

- xvii. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Service Authority amounted to Rp7,400,201 and Rp4,854,997 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

- h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 47.

- h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 47.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. TAGIHAN AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Berelasi</u>		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	487.052	528.148
Total	487.052	528.148

b. Berdasarkan Kolektibilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan Desember 2018, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
≤ 1 bulan	142.780	-
> 1 bulan - 3 bulan	65.159	362.388
> 3 bulan - 1 tahun	279.113	165.760
Total	487.052	528.148

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan akseptasi dapat ditagih.

12. ACCEPTANCES RECEIVABLE

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

<u>Rupiah</u>
<u>Related Parties</u>
Domestic Document
Letter of Credit
Total

b. By Collectibility

All acceptances receivable were classified as current as of December 31, 2019 and December 31, 2018.

c. By Period

≤ 1 month
> 1 month - 3 months
> 3 months - 1 year
Total

The Bank assessed acceptance receivables individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2019 and 2018, because Management believes that acceptances receivable are fully collectible.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut

13. INVESTMENT IN SHARES

The details of investment in shares are as follows:

31 Desember/December 31, 2019 and 2018				
Nama Perusahaan	Jenis usaha/ Type of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat/ Carrying value	Company name
PT Berlian Laju Tanker Tbk	Jasa pelayaran angkutan laut/ Marine transportation service	0,01%	270	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Cadangan kerugian penurunan nilai			(270)	Allowances for impairment losses
Neto			-	Net

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
 penyertaan saham adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment
 losses on investment in shares are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal	270	270	Beginning balance
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	-	-	Provision for impairment losses during the year
Total	270	270	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan
 kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham
 yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for
 impairment losses provided on investment in shares
 is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang
 mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami
 penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 47.

Information with respect to classification of impaired
 and not impaired of financial assets are disclosed in
 Note 47.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

14. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2019

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi ^{*)} / Additions/ Reclassifications ^{*)}	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.628.606	341.786	-	3.970.392	Land
Bangunan	1.498.583	9.307	3	1.507.887	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.265.131	284.679	4.729	2.545.081	Office furniture, fixtures and motor vehicle
	7.392.320	635.772	4.732	8.023.360	
Aset dalam penyelesaian	19.206	65.824	304	84.726	Constructions in progress
	7.411.526	701.596	5.036	8.108.086	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	565.012	72.293	181	637.124	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.828.820	241.940	456	2.070.304	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	2.393.832	314.233	637	2.707.428	
Nilai Buku Neto	5.017.694			5.400.658	Net Book Value

31 Desember/December 31, 2018

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi ^{*)} / Additions/ Reclassifications ^{*)}	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir ^{*)} / Ending Balance ^{*)}	
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.579.953	48.653	-	3.628.606	Land
Bangunan	1.354.709	226.217	82.343	1.498.583	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.946.112	321.990	2.971	2.265.131	Office furniture, fixtures and motor vehicle
	6.880.774	596.860	85.314	7.392.320	
Aset dalam penyelesaian	60.159	180.234	221.187	19.206	Constructions in progress
	6.940.933	777.094	306.501	7.411.526	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	500.796	64.997	781	565.012	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.602.818	228.051	2.049	1.828.820	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	2.103.614	293.048	2.830	2.393.832	
Nilai Buku Neto	4.837.319			5.017.694	Net Book Value

*) Termasuk reklasifikasi dari aset lain-lain dengan nilai perolehan dan akumulasi depresiasi masing-masing sebesar Rp29.164.

**) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi atas tanah sebesar Rp3.042.739 yang dibukukan oleh Bank pada tanggal 13 Juni 2016.

**) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi atas tanah sebesar Rp334.731 yang dibukukan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2019.

*) Included reclassification from other assets which consist of cost and accumulated depreciation amounting to Rp29,164, respectively.

**) Included in additions of premises and equipment is gain on revaluation of land amounting to Rp3,042,739, recorded by Bank on June 13, 2016.

**) Included in additions of premises and equipment is gain on revaluation of land amounting to Rp334,731, recorded by Bank on December 31, 2019.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp314.233 dan Rp263.884 (Catatan 35).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp1.551.685 dan Rp625.279 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 4.451.320 dan Rp2.894.763.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 24,38% dan 22,07%.

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki di tahun 2019 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp314,233 and Rp263,884, for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 35).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp1,551,685 and Rp625,279 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp 4,451,320 and Rp2,894,763, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2019 and 2018, is 24.38% and 22.07%, respectively.

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. The bank revalued its land in 2019 which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards, and regulation No. VIII.C.4 concerning the guidance on valuation and presentation for the appraisal report on the capital market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016 dan 2019 adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Information on the revaluation of land performed by the Bank are as follows:

31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	Land
31 Desember/December 31, 2016				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	Land

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Sedangkan kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp595.922 dan Rp585.867.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334.731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341.000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6.269. However, Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31, 2019 and 2018, would be Rp595,922 and Rp585,867.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2019 and 2018.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Kredit yang diberikan	3.077.639	2.859.189
Obligasi pemerintah	89.554	77.753
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	43.579	22.560
Total	3.210.772	2.959.502

15. INTERESTS RECEIVABLE

This account consists of:

Loans
Government bonds
Securities and placement with other Banks
Total

16. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Pihak ketiga</u>		
Tagihan kepada pihak ketiga	920.408	1.100.960
Biaya dibayar di muka	803.479	730.817
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11g)	288.899	174.336
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591
Uang muka pajak (Catatan 39)	402.428	409.138
Lainnya	107.392	223.079
Total	2.600.197	2.715.921

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

<u>Third party</u>
Third party receivables
Prepaid expenses
Deferred expense for employee loan (Note 11g)
Foreclosed collateral
Prepaid taxes (Note 39)
Others
Total

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

Berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. UM.01.03-Dp/374 tanggal 23 Desember 2016, tagihan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank atas KPR Sejahtera FLPP tahun 2015 dikonversi menjadi subsidi bunga. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tagihan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait transaksi tersebut masing-masing sebesar Rp126.368 dan Rp108.829 yang termasuk dalam tagihan kepada pihak ketiga.

Based on a letter from the Ministry of Public Works and Public Housing No. UM.01.03-Dp/374 dated December 23, 2016, the Bank's FLPP receivable from KPR Sejahtera FLPP 2015 was converted to interest subsidy. On December 31, 2019 and 2018, the Bank's receivable from the Government of the Republic of Indonesia on such transactions amounted to Rp126,368 and Rp108,829, respectively, which are included in Third Party Receivables.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Kewajiban kepada pihak ketiga	1.742.653	1.983.330
Hutang pajak		
Pajak penghasilan		
Pasal 29 (Catatan 39)	1.679	3.425
Pasal 4 ayat (2)	153.872	134.445
Pajak pertambahan nilai	4.467	9.607
Pasal 21	29.586	47.117
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.472	44.622
Deposito berjangka jatuh tempo	17.284	62.874
Bunga atas deposito berjangka		
yang belum diambil nasabah	7.763	1.677
Lainnya	6.407	14.833
Total	1.999.183	2.301.930

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

Third party payables
Taxes payable
Income tax
Article 29 (Note 39)
Article (4) paragraph 2
Value added tax
Article 21
Undistributed profit sharing
Matured time deposits
Interest on time deposits which is
not yet collected by customers
Others

Total

18. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga				
Rupiah		10.494.469		19.076.586
Dolar Amerika Serikat	471.512	6.546	848.351	12.199
		10.501.015		19.088.785
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah		40.199.584		37.366.188
Dolar Amerika Serikat	37.961	527	4.802	69
		40.200.111		37.366.257
Total		50.701.126		56.455.042

Third parties
Rupiah
United States Dollar

Related parties (Note 44)
Rupiah
United States Dollar

Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp2.593.010 dan Rp2.781.854.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 1,89% dan 1,84% masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 0,00% dan 0,02% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp2,593,010 and Rp2,781,854, respectively.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 1.89% and 1.84% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 0.00% and 0.02% for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. GIRO (lanjutan)

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.519.442 dan Rp160.511 (Catatan 11).

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Giro BTN Prima iB	1.414.712	1.594.272
Total	1.414.712	1.594.272

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Ketiga	826.682	1.059.570
Pihak Berelasi (Catatan 44)	588.030	534.702
Total	1.414.712	1.594.272

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	14 : 86	1,57
Mudharabah current accounts		
2018		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	14 : 86	1,50
Mudharabah current accounts		

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat giro mudharabah yang dijadikan jaminan.

18. DEMAND DEPOSITS (continued)

Demand deposits amounting to Rp1,519,442 and Rp160,511 as of December 31, 2019 and 2018, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts

a. By product

b. By relationship

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

As of December 31, 2019 and 2018, there are no mudharabah demand deposits which are pledged as collateral.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TABUNGAN

	31 Desember/December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>		
Tabungan Batara		41.426.261
Tabungan Batara Wadiah		789.889
		42.216.150
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tabungan Batara	3.984.344	55.313
<u>Dolar Singapura</u>		
Tabungan Batara	323.318	3.335
		58.648
Total		42.274.798

19. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
			<u>Rupiah</u>
		38.322.138	Batara savings deposits
		766.324	Batara Wadiah savings deposit
		39.088.462	
			<u>United States Dollar</u>
	1.824.309	26.234	Batara savings deposits
			<u>Singapore Dollar</u>
	233.731	2.467	Batara savings deposits
		28.701	
Total		39.117.163	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp789.889 dan Rp766.324.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 4,17% dan 3,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,30% dan 0,39% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp343.370 dan Rp1.423.373 (Catatan 11).

Tabungan Batara dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp272.851 dan Rp359.710 (Catatan 44).

As of December 31, 2019 and 2018, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp789,889 and Rp766,324, respectively.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 4.17% and 3.75%, for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.30% and 0.39%, for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Savings deposits amounting to Rp343,370 and Rp1,423,373 as of December 31, 2019 and 2018, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

As of December 31, 2019 and 2018, Batara and wadiah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp272,851 and Rp359,710, respectively (Note 44).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Rupiah</u>		
Tabungan BTN Prima iB	3.166.824	2.664.925
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	191.923	92.296
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	2.588	2.147
Tabungan BTN Emas iB	1.591	701
Total	3.362.926	2.760.069

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Ketiga	3.226.349	2.675.780
Pihak Berelasi (Catatan 44)	136.577	84.289
Total	3.362.926	2.760.069

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds – Mudharabah Savings Deposits

a. By product

<u>Rupiah</u>
Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB
Tabungan BTN Emas iB
Total

b. By relationship

Third Parties Related Party (Note 44)
Total

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan Mudharabah untuk periode dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,80
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,73
Tabungan Qurban BTN iB	15,50 : 84,50	1,73
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,80
2018		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,67
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,66
Tabungan Qurban BTN iB	15,50 : 84,50	1,66
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,67

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat tabungan mudharabah yang dijadikan jaminan.

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

Tabungan BTN Prima iB
 Tabungan BTN Haji & Umroh iB
 Tabungan Qurban BTN iB
 Tabungan BTN Emas iB

Tabungan BTN Prima iB
 Tabungan BTN Haji & Umroh iB
 Tabungan Qurban BTN iB
 Tabungan BTN Emas iB

As of December 31, 2019 and 2018, there are no mudharabah saving deposits which are pledged as collateral.

20. DEPOSITO BERJANGKA

- a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Rupiah		
1 bulan	5,39%	5,36%
3 bulan	5,60%	5,46%
6 bulan	5,52%	5,58%
12 bulan	5,58%	5,39%
24 bulan	5,88%	5,77%
Dolar Amerika Serikat	3,47%	0,76%

20. TIME DEPOSITS

- a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

Rupiah
 1 month
 3 months
 6 months
 12 months
 24 months
 United States Dollar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

20. TIME DEPOSITS (continued)

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
1 bulan		44.872.614		56.863.504	1 month
3 bulan		39.590.353		37.997.222	3 months
6 bulan		5.460.901		5.790.978	6 months
12 bulan		3.451.974		2.163.461	12 months
24 bulan		15.216.547		9.657.257	24 months
		108.592.389		112.472.422	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
1 bulan	360.247.279	5.001.133	180.969.246	2.602.338	1 month
3 bulan	23.390.102	324.713	26.137.123	375.852	3 months
6 bulan	819.086	11.371	-	-	6 months
12 bulan	8.538	119	808.538	11.627	12 months
		5.337.336		2.989.817	
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
3 bulan	4.211	43	4.203	44	3 months
		43		44	
Total		113.929.768		115.462.283	Total

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	66.952.126	66.126.560	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	25.087.533	30.251.503	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	2.133.063	5.046.891	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	10.965.305	1.393.904	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	3.454.362	9.653.564	> 12 months ≤ 24 months
	108.592.389	112.472.422	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
≤ 1 bulan	5.001.984	2.602.338	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	323.862	375.852	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	11.371	-	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	119	11.627	> 6 months ≤ 12 months
	5.337.336	2.989.817	
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
> 1 bulan ≤ 3 bulan	43	44	> 1 month ≤ 3 months
	43	44	
Total	113.929.768	115.462.283	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.268.569 dan Rp1.342.090 (Catatan 11).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp52.648.592 dan Rp45.472.777 (Catatan 44).

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah

a. Berdasarkan jangka waktu kontrak

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
1 bulan	7.563.271	8.444.297
3 bulan	3.260.248	5.901.271
6 bulan	795.326	67.976
12 bulan	2.081.034	26.590
24 bulan	22	22
Total	13.699.901	14.440.156

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
≤ 1 bulan	9.146.586	9.307.359
> 1 bulan ≤ 3 bulan	2.402.492	5.073.509
> 3 bulan ≤ 6 bulan	2.134.438	40.372
> 6 bulan ≤ 12 bulan	16.382	18.897
> 12 bulan ≤ 24 bulan	3	19
Total	13.699.901	14.440.156

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Ketiga	11.661.400	8.814.203
Pihak Berelasi (Catatan 44)	2.038.501	5.625.953
Total	13.699.901	14.440.156

20. TIME DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, time deposits amounting to Rp1,268,569 and Rp1,342,090, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

As of December 31, 2019 and 2018, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp52,648,592 and Rp45,472,777, respectively (Note 44).

Temporary Syirkah Funds – Mudharabah Time Deposits

a. By contractual period

1 month
3 months
6 months
12 months
24 months

b. By remaining period to maturity

≤ 1 month
> 1 month ≤ 3 months
> 3 months ≤ 6 months
> 6 months ≤ 12 months
> 12 months ≤ 24 months

c. By relationship

Third Parties
Related Party (Note 44)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018		
	<i>Nisbah (%) / Ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%) / Profit sharing rate (%)</i>	<i>Nisbah (%) / Ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%) / Profit sharing rate (%)</i>	
1 bulan	40 : 60	4,48	40 : 60	4,27	1 month
3 bulan	43 : 57	4,81	43 : 57	4,60	3 months
6 bulan	44 : 56	4,92	44 : 56	4,70	6 months
12 bulan	44 : 56	4,92	44 : 56	4,70	12 months
24 bulan	39 : 61	4,36	39 : 61	4,17	24 months

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:

As of December 31, 2019 and 2018, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Giro	1,73%	1,82%	Demand Deposit
Deposito	7,17%	5,90%	Time Deposits
Inter-bank call money	6,06%	5,25%	Inter-bank call money

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019				
	<i>≤ 1 bulan / month</i>	<i>> 1 - 3 bulan / months</i>	<i>> 3 - 6 bulan / months</i>	<i>> 6 - 12 bulan / months</i>	<i>Total</i>
Rupiah					
Deposito	4.493.870	5.300	-	-	4.499.170
Giro	10.068	-	-	-	10.068
Total	4.503.938	5.300	-	-	4.509.238

Rupiah
Time deposits
Demand deposits
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2018				
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
Rupiah					
Deposito	2.972.970	-	-	-	2.972.970
Giro	19.609	-	-	-	19.609
Total	2.992.579	-	-	-	2.992.579

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Ketiga		
Rupiah		
Deposito berjangka Mudharabah	7.870	8.060
Tabungan Mudharabah	3.299	8.857
Giro Mudharabah	243	315
Total	11.412	17.232

Simpanan bank lain berdasarkan dana syirkah temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

Tabungan dan giro Mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito Mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows: (continued)

Rupiah	
Time deposits	
Demand deposits	
Total	

As of December 31, 2019 and 2018, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil, respectively (Note 44).

As of December 31, 2019 and 2018, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Third Parties		
Rupiah		
Mudharabah Time deposits	7.870	8.060
Mudharabah Saving deposits	3.299	8.857
Mudharabah Current accounts	243	315
Total	11.412	17.232

Deposits from other banks based on temporary syirkah funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2019 and 2018 amounted to RpNil, respectively.

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

	2019	2018
Giro <i>mudharabah</i>	1,05%	1,50%
Tabungan <i>mudharabah</i>	2,44%	2,67%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	4,96%	4,27%

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

By annual interest rates and profit sharing

Mudharabah demand deposits
Mudharabah saving deposits
Mudharabah Time deposits

As of December 31, 2019 and 2018, there are no *mudharabah* deposits from other banks which are pledged as collateral.

22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

22. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

The details of securities sold under repurchase agreements with third parties are as follows:

31 Desember/December 31, 2019

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties								
Deutsche Bank	VR0031	SPN+1,25%	575.000	14 Januari/ January 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	SPN+1,40%	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Total			1.075.000			935.000	-	935.000

31 Desember/December 31, 2018

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties								
Deutsche Bank	VR0031	SPN+1,25%	575.000	14 Januari/ January 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	SPN+1,40%	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Total			1.075.000			935.000	-	935.000

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar RpNil (Catatan 44).

As of December 31, 2019 and 2018, securities sold under repurchase agreement with related parties amounted to RpNil (Note 44).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	487.052	528.148
Total	487.052	528.148

23. ACCEPTANCES PAYABLE

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

<u>Rupiah</u>
<u>Related Parties (Note 44)</u>
Domestic Document
Letter of Credit
Total

b. Berdasarkan Jangka Waktu:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
≤ 1 bulan	142.780	-
> 1 bulan - 3 bulan	65.159	362.388
> 3 bulan - 1 tahun	279.113	165.760
Total	487.052	528.148

b. By Period

≤ 1 month
> 1 month - 3 month
> 3 month - 1 year
Total

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.307 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		
Pihak ketiga	3.430.430	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	709.263	-
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.883 dan Rp5.275 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		
Pihak ketiga	2.775.827	3.021.809
Pihak berelasi (Catatan 44)	2.185.290	1.972.916
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp623 dan Rp1.277 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		
Pihak ketiga	727.726	1.531.348
Pihak berelasi (Catatan 44)	924.651	1.467.375

24. SECURITIES ISSUED

<u>Rupiah</u>
Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounting to Rp4,307 and RpNil as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Third parties
Related parties (Note 44)
Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounting to Rp3,883 and Rp5,275 as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Third parties
Related parties (Note 44)
Continuing Bonds II Phase II net of unamortized issuance cost amounting to Rp623 and Rp1,277 as of December 31, 2019 and 2018, respectively
Third parties
Related parties (Note 44)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.348 dan Rp1.956 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounting to Rp1,348 and Rp1,956 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	1.936.757	1.331.758	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	161.895	766.286	Related parties (Note 44)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp998 dan Rp1.259 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounting to Rp998 and Rp1,259 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	1.600.201	1.614.983	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	398.801	383.758	Related parties (Note 44)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.263 dan Rp1.716 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			Continuing Bonds I Phase I net of unamortized issuance cost amounting to Rp1,263 and Rp1,716 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	1.738.400	1.768.480	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	260.336	229.803	Related parties (Note 44)
Obligasi BTN XV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp762 dan Rp1.218 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			BTN Bonds XV net of unamortized issuance cost amounting to Rp762 and Rp1,218 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	1.191.301	1.190.884	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	107.937	107.898	Related parties (Note 44)
Obligasi BTN XIV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp263 dan Rp818 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			BTN Bonds XIV net of unamortized issuance cost amounting to Rp263 and Rp818 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	1.005.338	1.014.997	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	629.399	634.185	Related parties (Note 44)
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi diskonto masing-masing sebesar RpNihil dan Rp111.719 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			Negotiable Certificate of Deposits (NCD) net of discounts amounting to RpNil and Rp111,719 as of Desember 31, 2019 and 2018, respectively
Pihak ketiga	-	2.245.475	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	1.362.805	Related parties (Note 44)
Total	19.783.552	20.644.760	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi

a. Bonds

i. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

i. Continuing Bonds III Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 Juni 2022, 28 Juni 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, June 28, 2022, and June 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019, Continuing Bonds III Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

ii. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

ii. Continuing Bonds III Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019 and 2018, Continuing Bonds III Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi III Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp35.000 dengan harga beli Rp35.257.

As of December 31, 2019, the Bank bought back BTN Continuing Bonds III Phase I Bonds with nominal value of Rp35,000 with repurchased price of Rp35,257.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,20% dan 8,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2021. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tahun 2016 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-297/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. Continuing Bonds II Phase II

The Bank issued Continuing Bonds II Phase II of 2016 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.20% and 8.75%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase II Series A and Series B, respectively, and will mature on August 30, 2019 and August 30, 2021, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase II of 2016 became effective based on Letter No. S-297/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2019 and 2018, Continuing Bonds II Phase II are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Continuing Bonds II Phase II is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2019, Continuing Bonds II Phase II Series A has been redeemed by the Bank on the maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

iv. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

iv. Continuing Bonds II Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019 and 2018, Continuing Bonds II Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

As of December 31, 2018, Continuing II Phase I Series A has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

v Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

v. Continuing Bonds I Phase II

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and will mature on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2019 and 2018, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

vi. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

vi. Continuing Bonds I Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I Tahap I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on June 5, 2022. The issuance of Continuing Bonds I Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019 and 2018, Continuing Bonds I BTN Phase I were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

vii. Obligasi BTN XV

vii. BTN Bonds XV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun 2011 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 Juni 2011.

The Bank issued BTN Bonds XV of 2011 with a total nominal value of Rp1,300,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 9.50%, payable every three months and will mature on June 28, 2021. The issuance of BTN Bonds XV of 2011 became effective based on Letter No. S-6928/BL/2011 dated June 21, 2011 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019 and 2018, BTN Bonds XV were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XV adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for BTN Bonds XV is PT Bank Mega Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

viii. Obligasi BTN XIV

viii. BTN Bonds XIV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010.

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 10.25%, payable every three months and will mature on June 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated June 3, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2019 and 2018, BTN Bonds XIV are rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi XIV dengan nilai nominal sebesar Rp15.000 dengan harga beli Rp15.348.

As of December 31, 2019, the Bank bought back BTN XIV Bonds with nominal value of Rp15,000 with repurchased price of Rp15,348.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp6.001 dan Rp4.460 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to perform the following:

- *Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.*
- *Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfill its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Reduce the authorized capital and paid-in capital except when required or directed by the Government and/or any governing authority*

For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp6,001 and Rp4,460, respectively, recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has complied with the existing terms and conditions of the above trusteeship agreements.

For year ended December 31, 2019 and 2018, coupon payments to all bond holders have been made by the Bank on the respective interest payment due dates.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 13 Desember 2017, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap IV Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp540.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018. NCD tersebut diterbitkan sebesar 97,12%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp320.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2018. NCD tersebut diterbitkan sebesar 94,08%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, untuk jangka waktu 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 88,19%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap IV Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal Rp540.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 3 April 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap I Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp1.440.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp830.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 182 (seratus delapan puluh dua) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2018. NCD tersebut diterbitkan sebesar 97,10%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp610.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 94,10%.

b. Negotiable Certificate of Deposits

On December 13, 2017, Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase IV year 2017 with principal value amounting to Rp540,000 within 3 (three) series as follows:

- A Series: NCD principal value amounting to Rp160,000 with a fixed interest rate of 5.90% per annum, for 181 (one hundred and eighty one) days period and will mature on June 12, 2018. The NCD were issued at 97.12%.
- B Series: NCD principal value amounting to Rp320,000 with a fixed interest rate of 6.20% per annum, for 365 (three hundred and sixty five) days period and will mature on December 13, 2018. The NCD were issued at 94.08%.
- C Series: NCD principal value amounting to Rp60,000 with a fixed interest rate of 6.60% per annum, for 730 (seven hundred and thirty) days period and will mature on December 13, 2019. The NCD were issued at 88.19%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase IV Series A, Series B and Series C with nominal value of Rp540,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.

On April 3, 2018, the Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase I year 2018 with principal value amounting to Rp1,440,000 within 2 (two) series as follows:

- A Series: NCD principal value amounting to Rp830,000 with a fixed interest rate of 5.90% per annum, for 182 (one hundred and eighty two) days period and will mature on October 2, 2018. The NCD were issued at 97.10%.
- B Series: NCD principal value amounting to Rp610,000 with a fixed interest rate of 6.20% per annum, for 364 (three hundred and sixty four) days period and will mature on April 2, 2019. The NCD were issued at 94.10%.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

b. *Negotiable Certificate of Deposits* (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits* (continued)

Pada tanggal 3 April 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap I Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp1.440.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: (lanjutan)

On April 3, 2018, Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase I year 2018 with principal value amounting to Rp1,440,000 within 2 (two) series as follows: (continued)

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap I Seri A dan Seri B dengan nilai nominal Rp830.000 dan Rp610.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase I Series A and Series B with nominal value of Rp830,000 and Rp610,000 have been redeemed by the Bank on the maturity date.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap II Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp690.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

On July 18, 2018, the Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase II year 2018 with principal value amounting to Rp690,000 within 2 (two) series as follows:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp520.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,32%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp170.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 92,80%.

- A Series: NCD principal value amounting to Rp520,000 with a fixed interest rate of 7.60% per annum, for 181 (one hundred and eighty one) days period and will mature on January 15, 2019. The NCD were issued at 96.32%.

- B Series: NCD principal value amounting to Rp170,000 with a fixed interest rate of 7.70% per annum, for 363 (three hundred and sixty three) days period and will mature on July 16, 2019. The NCD were issued at 92.80%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap II Seri A dan Seri B dengan nilai nominal Rp520.000 dan Rp170.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase II Series A and Series B with nominal value of Rp520,000 and Rp170,000 have been redeemed by the Bank on the maturity date.

Pada tanggal 5 November 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.020.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

On November 5, 2018, the Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase III year 2018 with principal value amounting to Rp2,020,000 within 3 (three) series as follows:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp1.340.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,95%.

- A Series: NCD principal value amounting to Rp1,340,000 with a fixed interest rate of 8.30% per annum, for 183 (one hundred and eighty three) days period and will mature on May 7, 2019. The NCD were issued at 95.95%.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

b. *Negotiable Certificate of Deposits* (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits* (continued)

Pada tanggal 5 November 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.020.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut: (lanjutan)

On November 5, 2018, the Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase III year 2018 with principal value amounting to Rp2,020,000 within 3 (three) series as follows: (continued)

- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp170.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 94,07%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp510.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 92,07%.

- *B Series: NCD principal value amounting to Rp170,000 with a fixed interest rate of 8.40% per annum, for 270 (two hundred and seventy) days period and will mature on August 2, 2019. The NCD were issued at 94.07%.*

- *C Series: NCD principal value amounting to Rp510,000 with a fixed interest rate of 8.50% per annum, for 365 (three hundred and sixty five) days period and will mature on November 5, 2019. The NCD were issued at 92.07%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap III Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal Rp1.340.000, Rp170.000 dan Rp510.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase II Series A, Series B and Series C with nominal value of Rp1,340,000, Rp170,000 and Rp510,000 have been redeemed by the Bank on the maturity date.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp340.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

On December 10, 2018, the Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Phase IV year 2018 with principal value amounted to Rp340,000 within 2 (two) series as follows:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp80.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 97,99%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp260.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2019. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,90%.

- *A Series: NCD principal value amounting to Rp80,000 with a fixed interest rate of 8.00% per annum, for 90 (ninety) days period and will mature on March 12, 2019. The NCD were issued at 97.99%.*

- *B Series: NCD principal value amounting to Rp260,000 with a fixed interest rate of 8.40% per annum, for 180 (one hundred and eighty) days period and will mature on June 11, 2019. The NCD were issued at 95.90%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap IV Seri A dan Seri B dengan nilai nominal Rp80.000 dan Rp260.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase II Series A and Series B with nominal value of Rp80,000 and Rp260,000 have been redeemed by the Bank on the maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
<u>Pihak Ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	5.000.000	4.999.958
PT Bank DKI	997.581	998.071
PT Bank ICBC Indonesia	798.644	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	499.152	-
	7.295.377	5.998.029
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank ANZ Indonesia	1.385.991	1.432.313
	8.681.368	7.430.342
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	12.785.356	8.069.151
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	998.933	-
	13.784.289	8.069.151
Total	22.465.657	15.499.493

25. FUND BORROWINGS

<u>Third Parties</u>	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank DKI	
PT Bank ICBC Indonesia	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
<u>Foreign Currencies</u>	
<u>United States Dollar</u>	
PT Bank ANZ Indonesia	
<u>Related Parties (Note 44)</u>	
<u>Rupiah</u>	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total	

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian No. 166/Add-KCK/2019 tanggal 25 April 2019 yang terdiri dari:

- *Term Loan I, II dan III* yang dilakukan perpanjangan selama 12 (dua belas) bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun yang memiliki suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah margin 0,70% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 28 Juni 2020, 21 Juni 2020 dan 14 Juni 2020.
- *Term Loan IV* sebesar Rp 2 triliun yang memiliki suku bunga mengambang sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah margin 0,70% dengan jangka waktu perpanjangan selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun pada 25 April 2020 dan sebesar Rp1 triliun pada 8 Mei 2020.

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 166/Add-KCK/2019 dated April 25, 2019 and which consists of:

- *For the Term Loan I, II, and III* the loan were extended for 12 (twelve) months, each amounting to Rp1 trillion, with floating interest rate of 3 (three) months JIBOR plus margin of 0.70% and will mature on June 28, 2020, June 21, 2020 and June 14, 2020, respectively.
- *For the Term Loan IV* amounting to Rp2 trillion with floating interest rate of 3 (three) months JIBOR plus margin of 0.70% which were extended for 12 (twelve) months period and will mature amounting to Rp1 trillion on April 25, 2020 and amounting to Rp1 trillion on May 8, 2020, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman dari PT Bank DKI

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bilateral PT Bank DKI ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan PT Bank DKI sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 7,40% dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2020.

Pada tanggal 14 Desember 2018, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga mengambang sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1,20%.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019.

c. Pinjaman dari PT ANZ Indonesia Bank

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari pinjaman sindikasi luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari PT Bank SBI Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, The Korea Development Bank Cabang Singapura, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT ANZ Indonesia Bank. Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi dengan plafond sebesar USD100 juta (nilai penuh) dengan bunga mengambang sebesar LIBOR ditambah margin 0,50% untuk *offshore* dan LIBOR ditambah margin 0,70% untuk *onshore* dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2020.

25. FUND BORROWINGS (continued)

b. Loan from PT Bank DKI

This account represents loan facility obtained from a bilateral loan from PT Bank DKI which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The Bank has several loan agreements with PT Bank DKI as follow:

On December 16, 2019, the Bank received bilateral loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate 7.40% and will mature on December 15, 2020.

On December 14, 2018, the Bank received bilateral loan with plafond amounting to Rp1 trillion with floating interest rate of 3 (three) months JIBOR plus 1.20%.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 13, 2019.

c. Loan from PT ANZ Indonesia Bank

This account represents loan facility obtained from a offshore bank syndicated loan with consortium of banks consisting of PT Bank SBI Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, The Korea Development Bank Singapore Branch, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and PT ANZ Indonesia Bank. This loan is intended to support the business and operational development of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On December 2, 2019, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to USD100 million (full amount) with floating interest rate of LIBOR plus margin 0.50% for offshore and LIBOR plus margin 0.70% for onshore and will mature on November 25, 2020.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT ANZ Indonesia Bank (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5,00%
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 9,00%
- Nilai Rasio Modal Inti (Tier 1 Ratio) minimal 6,00%
- Nilai Rasio Modal Inti Utama (Core Tier 1 Ratio) minimal 5,00%
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 8,00%
- Rasio *Return on Average Assets* minimal 0,6%, dengan ketentuan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar dari 12,50%.

Pada tanggal 12 Desember 2018, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi dengan plafond sebesar USD130 juta (nilai penuh) dengan bunga mengambang sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 0,65% untuk *offshore* dan LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 0,85% untuk *onshore*.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2019.

d. Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank OCBC NISP Tbk ditujukan untuk mendukung modal kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 22 Agustus 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga mengambang sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1,00% dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2020.

25. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT ANZ Indonesia Bank (continued)

The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:

- *Non-Performing Loan* (NPL) ratio maximum of 5.00%
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum of 9.00%
- *Tier 1 Ratio* minimum of 6.00%
- *Core Tier 1 Ratio* minimum of 5.00%
- *Minimum Statutory Reserve* minimum of 8.00%
- *Return on Average Assets* ratio minimum of 0.6%, provided that *Capital Adequacy Ratio* (CAR) is equal to or greater than 12.50%

On December 12, 2018, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to USD130 million (full amount) with floating interest rate of 3 (three) months LIBOR plus 0.65% for offshore and 3 (three) months LIBOR plus 0.85% for onshore.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 6, 2019.

d. Loan from PT OCBC NISP Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank OCBC NISP Tbk which is intended to support working capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On August 22, 2019, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with floating interest rate of 3 (three) months JIBOR plus margin 1.00% and will mature on September 22, 2020.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 14,00%
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Gross maksimal 5,00%
- Wajib menjaga kepemilikan saham pemerintah RI (baik langsung maupun tidak langsung) dalam jumlah minimum 60%
- Tidak akan menurunkan modal disetor perusahaan, tanpa pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahnya
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah RUPS yang terkait, dapat membayar dividen ataupun membagikan kekayaan debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham.

e. Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Berdasarkan *covernote* No 100/N/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp800 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,30% dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 14,00%
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Gross maksimal 5,00%
- Net income tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%

25. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT OCBC NISP Tbk (continued)

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum of 14.00%
- *Non-Performing Loan* (NPL) Gross ratio maximum of 5.00%.
- Obligated to maintain share ownership of the Indonesian government (both directly and indirectly) in a minimum amount of 60%
- Will not reduce the company's paid-up capital, without written notice no later than 7 (seven) days after
- Communicate to OCBC about written information no later than 7 (seven) days after the relevant General Meeting of Shareholders, could settle dividends or distribute debtor wealth in a way to shareholders.

e. Loan from PT ICBC Indonesia

This account represents loan facility obtained from PT Bank ICBC Indonesia which is intended to support the business and operational development of the Bank.

Based on *covernote* No. 100/N/XII/2019 dated December 23, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp800 billion with fixed interest rate of 7.30% and mature on December 23, 2020.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum of 14.00%
- *Non-Performing Loan* (NPL) Gross ratio maximum of 5.00%.
- Net income for the current year with positive numbers
- *Liquidity coverage ratio* minimum 100%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (pihak berelasi)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan ekspansi kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian No. CRO.KP/344/BL/2019 No. 66 tanggal 30 Agustus 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,00% dan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2020.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal sesuai dengan ketentuan OJK untuk Buku triwulan III dan profil risiko bank
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Net maksimal 5,00%
- *Net income* tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

- Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun dan Rp500 miliar dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

25. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (related parties)

This account represents loan facility obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which is intended to support credit expansion development of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Based on loan agreement No. CRO.KP/344/BL/2019 No. 66 dated August 30, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.00% and mature on September 29, 2020.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum is in accordance with OJK regulations for third quarter books and bank risk profiles
- *Non-Performing Loan* (NPL) Net ratio maximum of 5.00%
- *Net income* for the current year with positive numbers
- *Liquidity coverage ratio* minimum of 100%

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- SMF Loan Phase 1 Year 2019

Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

- SMF Loan Phase 2 Year 2019

Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion with details of amounting to Rp1 trillion and Rp500 billion with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

- Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2.095 miliar yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1.455 miliar dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

- Pinjaman SMF FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 009/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp933.759 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Phase 3 Year 2019

Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

- SMF Loan Phase 4 Year 2019

Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion with details of amounting to Rp640 billion with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

- SMF Loan FLPP 2019

Based on loan agreement 009/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 is amounting to Rp933,759 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp455.108 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 is amounting to Rp455,108 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019

Based on loan agreement No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multiqriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.958 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multiqriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 is Rp113,958 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama availability period sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31,092 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama availability period atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 021/PP/SMF-BTN/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga variabel setiap 6 (enam) bulan yaitu sebesar 6,50% dan 6,60%.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp500 miliar.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 is Rp31,092 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Phases 1 Year 2018

Based on loan agreement No. 021/ PP/SMF-BTN/II/2018 dated February 20, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with variable interest rate every 6 (six) months are 6.50% and 6.60%.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 20, 2019 amounting to Rp500 billion.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 022/PP/SMF-BTN/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,3 triliun dengan bunga variabel setiap 6 (enam) bulan yaitu sebesar 6,50% dan 6,60%.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp1triliun dan pada 27 Februari 2019 sebesar Rp300 miliar.

- Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 059/PP/SMF-BTN/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap 6,60%.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp500 miliar dan pada 7 Juni 2019 sebesar Rp500 miliar.

- Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 116/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun dengan bunga tetap 8,40% dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021.

- Pinjaman SMF Tahap 5 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 154/PP/SMF-BTN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar yang terdiri atas sebesar Rp382 miliar dengan bunga tetap 8,75% yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2019, dan sebesar Rp118 miliar dengan bunga tetap 9,10% yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2021.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Phases 2 Year 2018

Based on loan agreement No. 022/PP/SMF-BTN/II/2018 dated February 23, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1.3 trillion with variable interest rate every 6 (six) months are 6.50% and 6.60%.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 23, 2019 amounting to Rp1 trillion and on February 27, 2019 amounting to Rp300 billion.

- SMF Loan Phases 3 Year 2018

Based on loan agreement No. 059/PP/SMF-BTN/V/2018 dated May 31, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 6.60%.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 31, 2019 amounting to Rp500 billion and on June 7, 2019 amounting to Rp500 billion.

- SMF Loan Phases 4 Year 2018

Based on loan agreement No.116/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 28, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion with interest rate of 8.40% and will mature on August 28, 2021.

- SMF Loan Phases 5 Year 2018

Based on loan agreement No. 154/PP/SMF-BTN/X/2018 dated October 26, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with details of amounting to Rp382 billion with interest rate of 8.75% and will mature on October 26, 2019, and amounting to Rp118 billion with interest rate of 9.10% and will mature on October 26, 2021.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Tahap 6 Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian No. 161/PP/SMF-BTN/XI/2018 tanggal 22 November 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021.
- Pinjaman SMF FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp707.124 dan Rp736.037 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* 2018

Berdasarkan perjanjian No.153/AKAD/SMF-BTNS/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 76,22%.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp500 miliar.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related parties) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Phases 6 Year 2018

Based on loan agreement No. 161/PP/SMF-BTN/XI/2018 dated November 22, 2018, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion with interest rate of 9.20% and will mature on November 22, 2021.
- SMF Loan FLPP 2018

Based on loan agreement No.81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 and December 31, 2018 amounting to Rp707,124 and Rp736,037, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.
- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* 2018

Based on loan agreement No.153/AKAD/SMF-BTNS/X/2018 dated October 25, 2018, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion with *nisbah* ratio of 76.22%.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on October 25, 2019 amounting to Rp500 billion.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* 2019

Berdasarkan perjanjian No.217/AKAD/SMF-BTNS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 65,33% dari Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2020.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp31.745 dan Rp33.218 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagikan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related parties) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* 2019

Based on loan agreement No.217/AKAD/SMF-BTNS/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion with *nisbah* ratio of 65.33% from profit sharing of financing facilities and will mature on December 19, 2020.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Based on loan agreement No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2019 and December 31, 2018 is amounting to Rp31,745 and Rp33,218 respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10 of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2017
 Berdasarkan perjanjian No. 009/PP/SMF-BTN/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,55% dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2020.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.784.289 dan Rp8.069.151 (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

25. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related parties) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Phases 1 Year 2017
 Based on loan agreement No. 009/ PP/SMF-BTN/II/2017 dated February 3, 2017, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.55% and will mature on January 3, 2020.

As of December 31, 2019 and 2018, fund borrowings received from related parties amounted to Rp13,784,289 and Rp8,069,151, respectively (Note 44).

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

26. PINJAMAN SUBORDINASI

26. SUBORDINATED LOAN

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 44)</u>			<u>Related Parties (Note 44)</u>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	5.999.669	2.999.519	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp6 triliun. Pinjaman pertama dengan suku bunga 9,00% dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan pencairan. Pencairan tahap ke-1 pada 30 Mei 2016 sebesar Rp1,5 triliun dan tahap ke-2 pada 20 Juni 2016 sebesar Rp1,5 triliun. Pinjaman kedua dengan suku bunga sebesar 8,90% dengan pencairan pinjaman sebesar Rp3 triliun pada 27 Desember 2019. Jangka waktu Pinjaman Subordinasi adalah 5 tahun (60 bulan) yang akan jatuh tempo masing-masing pada 30 Mei 2021, 20 Juni 2021 dan 27 Desember 2024.

Pinjaman subordinasi telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-59/PB.31/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan is the amount of Rp6 trillion. First subordinated loan facility with interest rate of 9.00% is done in 2 (two) steps credit disbursement. The first disbursement is done on May 30, 2016 in the amount of Rp1.5 trillion and the second disbursement is done on June 20, 2016 in the amount of Rp1.5 trillion. Second subordinated loan facility with interest rate of 8.90%. Disbursement is done on December 27, 2019. The time period of the subordinated loan is 5 years (60 months) that will mature on May 30, 2021, June 20, 2021 and December 27, 2024.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-59/PB.31/2016 dated June 30, 2016 and S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

27. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Deposito berjangka	350.839	378.627	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	181.161	187.772	Securities issued
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.852	12.579	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	71.503	35.567	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	11.216	8.250	Subordinated loan
Simpanan dari bank lain	3.431	7.120	Deposits from other Banks
Lain-lain	-	219	Others
Total	630.002	630.134	Total

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali transaksi berdasarkan prinsip syariah penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Bank assessed commitment and contingency transaction which have credit risk individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists, except transaction based on sharia principles, assessment was performed using a collectability guidance of Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The collectability classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Lancar</u> <u>Rupiah</u>					<u>Current</u> <u>Rupiah</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)		1.969.793		3.712.682	Guarantees issued (Note 40)
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		178.693		224.440	Unused loan facility (committed)
		<u>2.148.486</u>		<u>3.937.122</u>	
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)					Guarantees issued (Note 40)
Dolar Amerika Serikat	2.286.869	31.747	5.275.284	75.859	United States Dollar
Euro Eropa	184.351	2.870	184.351	3.031	European Euro
Jepang Yen	41.250.000	5.272	-	-	Japanese Yen
Dolar Singapura	-	-	226.676	2.393	Singapore Dollar
		<u>39.889</u>		<u>81.283</u>	
		2.188.375		4.018.405	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u> <u>Rupiah</u>					<u>Special mention</u> <u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		10.876		45.128	Unused loan facility (committed)
Total		2.199.251		4.063.533	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik masing-masing sebesar RpNihil.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp364.059 dan Rp834.470 (Catatan 44).

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang perlu dibentuk oleh manajemen.

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, there are transaction with related parties for unused loan facility amounting to RpNihil, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, guarantees issued to related parties amounted to Rp364,059 and Rp834,470, respectively (Note 44).

Based on management's judgment, there is no provision for estimated losses on commitments and contingencies that should be provided by management.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

29. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>			<u>Employee benefits liabilities</u>
Bonus dan tantiem	351.402	272.915	Bonuses and tantiem
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 41b)	404.408	297.317	Long term employee benefits (Note 41b)
	755.810	570.232	
<u>Liabilitas lain-lain</u>			<u>Other liabilities</u>
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	4.578.611	5.354.174	Developers' security deposits (liabilities to third party)
Lainnya	402.216	293.408	Others
	4.980.827	5.647.582	
Total	5.736.637	6.217.814	Total

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp165.090 juta dan Rp165.090 juta.

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of potential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp165,090 million and Rp165,090 million, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2019				
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership
Modal Dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%
Dewan Direksi:				
Pahala Nugraha Mansury	453.100	500	227	0,00%
Hirwandi Gafar	56.000	500	28	0,00%
Nixon L.P Napitupulu	236.600	500	118	0,00%
Yossi Istanto	70.200	500	35	0,00%
Elisabeth Novie Riswati	25.000	500	13	0,00%
Andi Nirwoto	70.200	500	35	0,00%
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.235.088.900	500	2.117.544	40,00%
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%

30. EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

Authorized Capital
Series A Dwiwarna Stock
Series B Common Stock

Issued and Fully Paid Capital
Series A Dwiwarna Stock
Government
Series B Stock
Government
Board of Directors:
Pahala Nugraha Mansury
Hirwandi Gafar
Nixon L.P Napitupulu
Yossi Istanto
Elisabeth Novie Riswati
Andi Nirwoto

Public (ownership less than 5% each)
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2018					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Komisaris:					Board of Commissioners:
Iman Sugema	82.900	500	42	0,00%	Iman Sugema
Maurin Sitorus	82.900	500	42	0,00%	Maurin Sitorus
Sumiyati	82.900	500	42	0,00%	Sumiyati
Dewan Direksi:					Board of Directors:
Maryono	346.800	500	173	0,00%	Maryono
Iman Nugroho Soeko	184.300	500	92	0,00%	Iman Nugroho Soeko
Oni Febriarto Rahardjo	184.300	500	92	0,00%	Oni Febriarto Rahardjo
Budi Satria	146.400	500	73	0,00%	Budi Satria
R. Mahelan					R. Mahelan
Prabantarikso	210.400	500	105	0,00%	Prabantarikso
Nixon L.P. Napitupulu	146.400	500	73	0,00%	Nixon L.P. Napitupulu
Dasuki Amsir	2.000	500	1	0,00%	Dasuki Amsir
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.234.530.700	500	2.117.265	40,00%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 911.100 lembar saham dan 1.469.300 lembar saham atau 0,01% dan 0,01% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)
	639.626
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733
	734.359
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130
	740.708

30. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and director follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Non-Independent Board of Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to 911,100 shares and 1,469,300 shares or 0.01% and 0.01% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

Balance as January 1, 2009
Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009
Shares Issuance Cost
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012	1.111.949
Biaya emisi penerbitan saham	(59.154)
	1.793.503
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013	11.063
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013	117.623
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013	103.575
	2.025.764
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014	1.840
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014	243
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014	289
	2.028.136
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015	18.462
	2.046.598
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016	7.856
	2.054.454

30. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital (continued)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012
Shares Issuance Cost
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2018

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp561.585
- b. Laba ditahan Rp2.246.338

Penggunaan Laba Tahun 2017

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp605.493
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.421.973

30. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2018

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2018 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp561,585
- b. Retained earnings amounted to Rp2,246,338

Profit Distribution for Year 2017

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2017 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp605,493
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,421,973

31. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

a. Pendapatan Bunga

Akun ini terdiri dari:

31. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING

a. Interest Income

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2019	2018	
Kredit yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kredit yang diberikan	22.259.815	19.860.531	Loans
Giro pada Bank Indonesia	73.906	59.382	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.962	1.357	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	236.862	214.578	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	3.952	-	Securities purchased under agreement to resell
Nilai wajar melalui Laba rugi			Fair value through profit or loss
Obligasi pemerintah	29.697	22.353	Government bonds
Efek-efek	7.522	1.649	Securities
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Obligasi pemerintah	248.110	223.308	Government bonds
Efek-efek	181.557	168.981	Securities
Dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity
Obligasi pemerintah	134.669	168.081	Government bonds
Efek-efek	93.380	61.292	Securities
Total	23.271.432	20.781.512	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL
(lanjutan)

b. Bagi hasil dan marjin unit syariah

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Pendapatan <i>murabahah</i>	1.775.424	1.419.649
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	265.349	358.858
Pendapatan <i>istishna</i>	184.071	142.611
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	12.504	25.733
Pendapatan usaha utama lainnya	211.094	123.395
Total	2.448.442	2.070.246

31. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT
SHARING (continued)

b. Profit Sharing and Margin from Sharia Unit

This account consists of:

Income from *murabahah*
Musyarakah profit sharing income
Income from *istishna*
Mudharabah profit sharing income
Other main operating income

Total

32. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS

a. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Deposito berjangka	8.770.985	6.121.822
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.763.945	1.753.488
Tabungan	1.580.734	1.433.139
Pinjaman yang diterima	1.390.262	737.136
Giro	910.075	925.651
Simpanan dari bank lain	405.373	291.627
Pinjaman Subordinasi	273.167	270.200
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	72.753	94.491
Total	15.167.294	11.627.554

32. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS
EXPENSES

a. Interest Expense

This account consists of:

Time deposits
Securities issued
Savings deposits
Fund borrowings
Demand deposits
Deposits from other banks
Subordinated Loan
Securities sold under
repurchase agreements

Total

b. Bonus Simpanan *Wadiah* dan Hak Pihak Ketiga
atas Bagi hasil *Mudharabah*

Bonus simpanan *wadiah*:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i> :		
Giro <i>wadiah</i>	13.055	10.270
Tabungan <i>wadiah</i>	2.586	2.166
Total	15.641	12.436

b. *Wadiah* Deposit Bonus and Third Parties' Share
on Return of *Mudharabah*

Wadiah deposit bonus:

Wadiah bonus expenses:
Wadiah demand deposit
Wadiah saving deposit

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS
(lanjutan)

- b. Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah (lanjutan)

Hak bagi hasil mudharabah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah:		
Deposito mudharabah	1.225.139	803.413
Giro mudharabah	24.595	66.362
Tabungan mudharabah	142.479	105.345
Pinjaman mudharabah	25.217	18.645
Total	1.417.430	993.765

32. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS
EXPENSES (continued)

- b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share on Return of Mudharabah (continued)

Mudharabah share on return:

Third Parties' Share on Return
of Mudharabah:
Mudharabah time deposit
Mudharabah demand deposit
Mudharabah saving deposit
Mudharabah borrowing

Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA -
LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Jasa perbankan	151.997	163.551
Jasa penagihan - payment points	16.265	21.253
Servicing Fee Sekuritisasi Aset	116.995	117.658
Lainnya	233.109	329.941
Total	518.366	632.403

33. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

Bank services
Collection services - payment points
Securitization Assets Servicing Fee
Others

Total

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa safe deposit box dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, pembalikan atas cadangan risiko pajak serta pembalikan cadangan operasional terkait dengan kasus pemalsuan bilyet deposito yang kasusnya telah dimenangkan oleh Bank di tingkat Mahkamah Agung.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, reversal of tax risks reserves and reversal of operational reserves related to cases of fictitious deposit bills which has been won by the Bank in Supreme Court.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN
PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN
NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	3.479.546	1.709.059
Efek-efek (Catatan 8)	7.205	5.250
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(86)	22
Properti terbengkalai	-	96
Total	3.486.665	1.714.427

34. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT
LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL
ASSETS

This account consists of:

Loans and sharia financing/
receivables (Note 11)
Securities (Note 8)
Current accounts with
other banks (Note 6)
Abandoned properties

Total

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Perbaikan dan pemeliharaan	1.036.317	924.065
Sewa	594.761	529.059
Promosi	455.292	597.337
Beban kantor	350.709	219.039
Penyusutan (Catatan 14)	314.233	263.884
Listrik, air dan komunikasi	263.847	286.390
Transportasi	130.414	157.771
Jasa profesional	113.041	100.811
Outsourcing	90.122	81.961
Lainnya	76.286	65.036
Total	3.425.022	3.225.353

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

Repairs and maintenance
Rent
Promotion
Office expenses
Depreciation (Note 14)
Electricity, water and telecommunications
Transportation
Professional fees
Outsourcing
Others

Total

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking*, biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah.

Others consist mainly of *branchless banking administration expense*, government program operational expense insurance premium on the building, insurance premium on cash in transit and cash in vault.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Gaji dan upah		
Rutin	1.876.710	1.800.749
Tidak rutin	868.902	881.187
Pelatihan dan pengembangan	95.714	138.272
Lainnya	22.629	56.354
Total	2.863.955	2.876.562

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

36. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

Salaries and wages
 Recurring
 Non-recurring
 Training and development
 Others

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

37. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Imbalan atas jasa penagihan	76.665	82.539
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	38.046	48.190
Lainnya	191.736	218.368
Total	306.447	349.097

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, beban terkait dengan restrukturisasi struktur organisasi Bank, serta beban cadangan atas potensi risiko operasional.

37. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
 Loss on bad debt settlement
 Others

Others consist mainly of representation and entertainment expense, expense related to the restructuring of the Bank's organization structure and provision for potential operational risk.

38. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Pendapatan sewa gedung	127	157
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(110.838)	16.318
Total	(110.711)	16.475

Lainnya terutama terdiri dari beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

38. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

Building rental income equipment
 Other income (expense) - net

Others consist mainly of administration penalty expense, gain/(loss) on trading of foreign currency and community development expense.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2019	2018
Laba sebelum beban pajak	411.062	3.610.275
Beda temporer:		
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	1.939.322	224.613
Penyisihan untuk imbalan kerja	(25.777)	117.364
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	18.865	(33.068)
	1.932.410	308.909
Beda tetap:		
Kenikmatan karyawan	240.378	230.268
Beban kantor	37.891	38.163
Sewa	105.390	69.852
Sumbangan	26.703	24.903
Perbaikan dan pemeliharaan	11.771	13.135
Dana sosial dan representasi	53.334	98.982
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	1.972	1.782
Lain-lain	120.619	1.788
Pendapatan sewa tarif final	(127)	(158)
	597.931	478.715
Taksiran penghasilan kena pajak	2.941.403	4.397.899
Beban pajak penghasilan Pajak penghasilan Pasal 25	588.281 (586.602)	879.580 (876.155)
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 17)	1.679	3.425

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

39. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Income before tax expense
Temporary differences:
Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Provision for employee benefits
Decrease (increase) in fair value of trading securities
Permanent differences:
Employee welfare
Office expense
Rent
Donations
Repairs and maintenance
Social funds and representation
Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Others
Rent income subject to final tax
Estimated taxable income
Income tax expense
Income tax - Article 25
Corporate income tax payable (Note 17)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

39. TAXATION (continued)

- b. Rincian pendapatan (beban) pajak tangguhan - neto dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

- b. The details of deferred tax benefit (expense)-net computed by computing the effect of temporary differences on tax rate are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Pembentukan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	387.864	56.153	Provision for allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
Penyisihan untuk imbalan kerja	(5.155)	29.341	Provision for employee benefits
Kenaikan (penurunan) nilai wajar efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	3.773	(8.267)	Increase (decrease) in fair value of trading securities
Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan - Neto	386.482	77.227	Deferred Tax benefit (expense) - Net

- c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

- c. Deferred tax assets (liabilities)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - dampak dari laporan laba rugi			Deferred tax assets (liabilities) - effect from statement of profit or loss
Penyisihan untuk imbalan kerja	41.546	46.701	Provision for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	548.554	160.690	Allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
(Kenaikan) penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(6.807)	(10.579)	(Increase) decrease in fair value of trading securities
	583.293	196.812	
Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan - efek dari ekuitas			Deferred Tax Assets (Liabilities) - effect from equity
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	(2.865)	35.810	Unrealized loss in fair value of - available for sale securities and government bonds
Pengukuran kembali imbalan pasti	48.677	27.629	Remeasurement of defined benefit obligation
	45.812	63.439	
Aset/(Liabilitas) Pajak Tangguhan - Neto	629.105	260.251	Deferred Tax Assets/ (Liabilities) - Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi Bank terhadap penghasilan pajak masa mendatang menyatakan bahwa penghasilan pajak masa mendatang akan tersedia untuk merealisasikan aset pajak tangguhan.

- d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Laba sebelum beban pajak	411.062	3.610.275
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(82.212)	(722.055)
Beda tetap	(119.587)	(95.743)
Selisih Tarif Pajak	-	15.446
Beban pajak	(201.799)	(802.352)

e. Uang Muka Pajak

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Tahun Pajak 2012	48.683	48.683
Tahun Pajak 2013	156.774	163.484
Tahun Pajak 2014	196.971	196.971
Saldo akhir tahun (Catatan 16)	402.428	409.138

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

39. TAXATION (continued)

c. *Deferred tax assets (liabilities) (continued)*

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that the Bank's estimates of future taxable income indicate that the future income will be available to the realize the deferred tax assets.

- d. *The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2019 and, 2018, are as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Laba sebelum beban pajak	411.062	3.610.275	Income before tax expense
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(82.212)	(722.055)	Tax expense at the applicable tax rate
Beda tetap	(119.587)	(95.743)	Permanent differences
Selisih Tarif Pajak	-	15.446	Tax Rate Difference
Beban pajak	(201.799)	(802.352)	Tax expense

e. *Prepaid Tax*

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Tahun Pajak 2012	48.683	48.683	Fiscal Year 2012
Tahun Pajak 2013	156.774	163.484	Fiscal Year 2013
Tahun Pajak 2014	196.971	196.971	Fiscal Year 2014
Saldo akhir tahun (Catatan 16)	402.428	409.138	Balance at end of year (Note 16)

Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

Under article paragraph 17 (2) of Law No. 7 year 1983 regarding "Income Tax" which was revised for the fourth time by Law No. 36 year 2008, the corporate tax rate is 25%.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

**Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan
(lanjutan)**

Namun demikian, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2020-0148 tanggal 6 Januari 2020 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2019-0145 tanggal 4 Januari 2019 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 2 Januari 2019 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah terpenuhi.

39. TAXATION (continued)

**Reduction of the Tax Rate of Corporate Income
Tax (continued)**

In addition, based on the above Law No. 36 year 2008 dated September 23, 2008, the Government Regulation No. 81 year 2007 dated December 28, 2007, which subsequently has been revoked and replaced by Government Regulation (GR) No. 77 Year 2013 dated November 21, 2013 and replaced by Government Regulation (GR) No. 56 Year 2015 dated August 3, 2015 on "Reduction of the Income Tax Rate on Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" and the Ministry of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 on "The Guidelines on the Implementation and Supervision on the Rate Reduction for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" stipulates that resident public companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest existing income tax rate, provided they meet the prescribed criteria, public companies whose shares are owned by the public at a minimum of 40% or more of the total paid-up shares are traded in the Indonesia Stock Exchange and such shares are owned by at least 300 (three hundred) parties and each party owning only less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the public companies for a minimum period of 183 (one hundred and eighty three) days in 1 (one) fiscal year.

Based on Letter No. DE//2020-0148 dated January 6, 2020 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2019), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2019 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE//2019-0145 dated January 4, 2019 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 2, 2019 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2018), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the period ended December 31, 2018 were fulfilled by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012 atas Kantor Cabang Pekanbaru. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2012	
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305
Total	2.624

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat keputusan yang memenangkan Wajib Pajak dan memerintahkan kantor pajak untuk membayar kembali uang muka pajak tersebut.

39. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) on the Pekanbaru branch office for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)	
		Year 2012
		SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14
		SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14
		Total

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) amounting to Rp3,884. The payment is recorded as other assets (Note 16).

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, the Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. On October 19, 2017, Tax Court has issued an appeal decision in favour of the Bank's Tax Appeal and order tax office to refund the prepaid tax.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2012, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp59.307 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2012 SKPKB PPh Badan No.00003/206/12/093/17	40.073	19.234

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp4.834 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 21 Agustus 2017.

Namun demikian Bank tidak setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp48.683 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima oleh DJP pada tanggal 12 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 25 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

39. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-03/PJ.0401/2017 dated May 22, 2017, regarding tax audit result for the year of 2012, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2012 amounting to Rp59,307 as follows:

	Year 2012 SKPKB Article Corporate Income Tax No.00003/206/12/093/17

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp4,834 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on August 21, 2017.

However, the Bank does not agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 and has submitted the objection letter dated October 10, 2017 which has been received by the Tax Office on October 12, 2017. This payment is recorded as other assets (Note 16).

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected all of the Bank's objection request, on September 25, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still in progress.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Pasal 21 No.00001/243/13/511/16	64	30
SKPKB PPh Pasal 23 No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1
Total	64,2	30,1
	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00012/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00013/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00014/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00015/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00016/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00017/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00018/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00019/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00020/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00021/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00022/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00023/240/13/511/16	381	183
Total	4.572	2.196

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 16) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

39. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result on the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

Year 2013
SKPKB Article 21 No.00001/243/13/511/16
SKPKB Article 23 No.00060/203/13/511/16
Total
SKPKB Article 4 (2) No.00012/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00013/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00014/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00015/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00016/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00017/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00018/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00019/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00020/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00021/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00022/240/13/511/16
SKPKB Article 4 (2) No.00023/240/13/511/16
Total

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment (SKPKB). The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since the Bank has agreed with the said SKPKB. However, in regard to the payment of the SKPKB of Article 4 paragraph (2) amounting to Rp6,768 has been recognized as prepaid tax (Note 16) since Bank did not agree with the SKPKB. On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 paragraph (2).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima sebagian dari permohonan Bank. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp57 yang telah dicatat sebagai pengurang uang muka pajak (catatan 16). Atas pajak yang masih belum diterima, kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2018.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan sebagian dari Banding oleh Bank. Pengembalian pajak tersebut telah diterima pada tanggal 20 Juni 2019 dan 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2013 sebesar Rp183.958 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Badan		
No.00006/206/13/093/17	124.296	59.662

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp9.945 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 4 September 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp156.773 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat tanggal 26 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

39. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On October 16, 2017, the Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has partially granted the Bank's objection request. Based on the said Objection Decision Letter the Tax Office has paid the tax overpayment amounting to Rp57 which was booked as a deduction to the prepaid taxes (Note 16). Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 12, 2018 to the Tax Court for the remaining ungranted amounts.

On May 2, 2019 The Tax Court has issued a decision letter which has partially granted the Bank's appeal. The refund has been received on June 20, 2019 and October 28, 2019.

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 dated July 19, 2017, regarding tax audit result for the year of 2013, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2013 amounting to Rp183,958 as follows:

	Year 2013
SKPKB Article Corporate Income Tax	
No.00006/206/13/093/17	

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp9,945 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on September 4, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp156,773 and has submitted the objection letter dated October 26, 2017. The payment is recorded as other assets (Note 16).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 18 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2014 sebesar Rp206.337 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2014	
SKPKB PPh Badan No.00008/206/14/093/17	139.417

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp 13.530 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 28 Desember 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp196.971 dan akan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 9 Maret 2018.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 2 November 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2019. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

39. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on September 18, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still being processed by the Tax Court.

Assessment for fiscal year 2014

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 dated December 5, 2017, regarding tax audit result for the year of 2014, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax amounting to Rp206,337 for the year of 2014 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)
Year 2014	
SKPKB Article Corporate Income Tax No.00008/206/14/093/17	66.920

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp13,530 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on December 28, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of Corporate Income Tax amounting to Rp196,971 and submitted the objection letter to the Tax Office dated March 9, 2018.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on November 2, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 31, 2019 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still in progress.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak atas penilaian kembali aset tetap

Bank berdasarkan surat No.1195/S/DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan estimasi atas kenaikan nilai wajar tanah, Bank telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp40.035 pada tanggal 10 Desember 2015.

Kemudian berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Bank telah menyampaikan surat No.473/S/DIR/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal tambahan dokumen terkait proses penilaian kembali aset tetap dimana pada tanggal 20 Mei 2016, Bank telah melunasi sisa pembayaran pajak sebesar Rp35.713. Kemudian Kantor Pajak telah menerbitkan surat Keputusan DJP No.KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016 mengenai persetujuan atas permohonan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Bank.

39. TAXATION (continued)

Tax for revaluation of fixed assets

The Bank based on the letter No. 1195/S/DIR/XII/2015 dated December 8, 2015 have submitted an application regarding "Revaluation of fixed assets for tax purposes on 2016 by tax payer that have not revalued fixed assets".

Based on the regulation No.191/PMK.010/2015 on October 15, 2015, from the Ministry of Finance, applications that are submitted up to December 31, 2015 will receive special treatment in the form of final tax rate of 3%. In connection with the estimated increase in fair value of land, the Bank has made tax payment amounting to Rp40,035 on December 10, 2015.

Based on the revaluation report issued by Public Appraisal Company, the Bank has reported a letter No.473/S/DIR/V/2016 dated May 23, 2016 regarding additional data for assets revaluation, in which on May 20, 2016, the Bank has paid the remaining tax of Rp35,713. Furthermore, the Tax Office has issued a Decision Letter No.KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016 that has granted the Bank's request for assets revaluation.

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

40. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.865.327	21.892.927
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.793.877	2.818.535
Liabilitas Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 28)	(2.009.682)	(3.793.965)
Kontinjensi - neto	784.195	(975.430)

COMMITMENTS
Commitments payable
Unused loan facility commitments
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Interest income on non-performing assets
Contingent payables
Guarantees issued (Note 28)
Contingencies - net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp29.059 dan Rp24.375 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 2,57% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 8,93%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 3 Januari 2020 dan 4 Januari 2019 dari aktuaris independen Bestama Aktuaria dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

41. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

Defined contribution plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp29,059 and Rp24,375 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 2.57% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 8.93%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2019 and 2018 is based on the actuarial reports dated January 3, 2020 and January 4, 2019, of Bestama Aktuaria, an independent actuary using the "Projected Unit Credit" method.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Asumsi ekonomi:			Economics assumptions:
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	Basic pensionable annual salary increase rate
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	8,20%	9,20%	Annual discount rate before normal retirement age
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2011	TMI-2011	Mortality rate
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ mortality	1,00% mortalita/ mortality	Disability rate
Tingkat Diskonto per tahun untuk:			Annual Discount rate:
Imbalan Jangka Panjang Lainnya -			Other long-term benefits
Penghargaan Masa Kerja	7,70%	9,20%	Gratuity
Program Pesangon Pensiun -			Retirement severance program
Selisih DPLK	8,20%	9,20%	Difference from DPLK
Masa Persiapan Pensiun	8,00%	8,20%	Retirement Preparation Period
Program Pensiun Imbalan Pasti	8,20%	8,90%	Deferred Benefit Pension Plan
Program Kesejahteraan	6,70%	8,00%	Welfare Program
Tingkat pengunduran diri			Turnover rate
Sampai dengan umur 45	5,00%	5,00%	Up to age 45
Umur 46-50	3,00%	3,00%	Age 46-50
Umur 51	4,00%	4,00%	Age 51
Umur 52	5,00%	5,00%	Age 52
Umur 53	6,00%	6,00%	Age 53
Umur 54	7,00%	7,00%	Age 54
Umur 55	9,00%	9,00%	Age 55
Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.			Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

	31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	32.736	49.271	82.007	Current service cost
Iuran peserta	(7.603)	(7.548)	(15.151)	Contribution from participant
Beban (pendapatan) bunga neto	(639)	24.587	23.948	Net interest (income) cost
Kerugian aktuarial	-	(1.491)	(1.491)	Actuarial loss
Biaya jasa lalu	4.699	-	4.699	Past service cost
Beban imbalan kerja - neto	29.193	64.819	94.012	Employee benefits expense - net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Biaya imbalan kerja (lanjutan)

a. Employee benefits expense (continued)

	31 Desember/December 31, 2018			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	33.252	127.716	160.968	Current service cost
Iuran peserta	(7.908)	(8.106)	(16.014)	Contribution from participant
Beban (pendapatan) bunga neto	(536)	20.998	20.462	Net interest (income) cost
Kerugian aktuarial	-	13.823	13.823	Actuarial loss
Biaya jasa lalu	50.913	-	50.913	Past service cost
Beban imbalan kerja - neto	75.721	154.431	230.152	Employee benefits expense - net

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

	31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	297.317	297.317	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	29.193	64.819	94.012	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	10.296	122.573	132.869	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(39.489)	(80.301)	(119.790)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 29)	-	404.408	404.408	Balance liabilities at end of year (Note 29)

	31 Desember/December 31, 2018			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	260.316	260.316	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	75.721	154.431	230.152	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(36.635)	(43.727)	(80.362)	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(39.086)	(73.703)	(112.789)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 29)	-	297.317	297.317	Balance liabilities at end of year (Note 29)

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.613.352	1.058.758	2.672.110	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	32.736	49.271	82.007	Current service cost
Beban bunga	140.355	84.736	225.091	Interest cost
Biaya jasa lalu	4.699	-	4.699	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(105.392)	(107.006)	(212.398)	Benefits paid
	138.171	207.934	346.105	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	1.823.921	1.293.693	3.117.614	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2018				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.487.751	1.078.194	2.565.945	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	33.252	127.716	160.968	Current service cost
Beban bunga	113.391	72.395	185.786	Interest cost
Biaya jasa lalu	50.913	-	50.913	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan	(101.291)	(111.414)	(212.705)	Benefits paid
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	29.336	(108.133)	(78.797)	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	1.613.352	1.058.758	2.672.110	Balance at end of year

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.807.331	890.313	2.697.644	Balance at beginning of year
Hasil pengembangan aset program	185.315	44.699	230.014	Return on plan asset
Kontribusi Bank	39.489	36.164	75.653	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.603	7.548	15.151	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(105.392)	(62.870)	(168.262)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	1.934.346	915.854	2.850.200	Balance at end of year

31 Desember/December 31, 2018				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.743.289	817.877	2.561.166	Balance at beginning of year
Hasil pengembangan aset program	118.339	102.041	220.380	Return on plan asset
Kontribusi Bank	39.086	31.361	70.447	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.908	8.106	16.014	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(101.291)	(69.072)	(170.363)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	1.807.331	890.313	2.697.644	Balance at end of year

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	44.584	65.931	110.515	Balance at beginning of year
Kerugian aktuarial	138.171	209.425	347.596	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	(27.056)	25.760	(1.296)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(100.820)	(112.611)	(213.431)	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	54.879	188.505	243.384	Balance at the end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2018

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	81.219	109.658	190.877	Balance at beginning of year
Kerugian aktuaris	29.336	(121.956)	(92.620)	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	15.520	(50.644)	(35.124)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(81.491)	128.873	47.382	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	44.584	65.931	110.515	Balance at the end of year

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2019

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	1.934.346	915.853	2.850.199	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(1.823.924)	(889.281)	(2.713.205)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	110.422	26.572	136.994	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	(110.422)	(26.572)	(136.994)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	-	-	-	Liabilities - net

31 Desember/December 31, 2018

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	1.807.331	890.313	2.697.644	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(1.613.352)	(761.438)	(2.374.790)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	193.979	128.875	322.854	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	(193.979)	(128.875)	(322.854)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	-	-	-	Liabilities - net

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada aset Program Pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities: (continued)

- f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Funding status of employee benefit as of December 31, 2019 and 2018 are as follow:

As of December 31, 2019 and 2018, there were no recognition of Pension Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuarial sebagai berikut:

- g. The sensitivity of employee benefit liability (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Tingkat diskonto			Discount rate:
Kenaikan 1%	(136.766)	(1.678)	Increase 1%
Penurunan 1%	185.820	21.938	Decrease 1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate:
Kenaikan 1%	121.943	91.832	Increase 1%
Penurunan 1%	(85.268)	(73.410)	Decrease 1%

- h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pension yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2019				
Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total		
Kurang dari 1 tahun	72.267	109.270	181.537	Less than a year
2 sampai 5 tahun	89.900	222.813	312.713	Between 2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	58.340	8.611.415	8.669.755	Over 5 years
Total	220.507	8.943.498	9.164.005	Total

31 Desember/December 31, 2018				
Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total		
Kurang dari 1 tahun	66.983	151.361	218.344	Less than a year
2 sampai 5 tahun	88.415	273.177	361.592	Between 2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	83.877	31.322.636	31.406.513	Over 5 years
Total	239.275	31.747.174	31.986.449	Total

- i. Risiko

- i. Risk

Bank terespos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.
- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.
- The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.
- The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. PELAPORAN SEGMENT

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

42. SEGMENT REPORTING

Segment information based on business type are as follows:

31 Desember/December 31, 2019					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	23.271.432	2.448.442	-	25.719.874	Segment income
Beban segmen	(15.325.002)	(1.433.071)	-	(16.758.073)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	7.946.430	1.015.371	-	8.961.801	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.035.424	74.428	-	2.109.852	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.099.614)	(387.051)	-	(3.486.665)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(6.599.177)	(464.038)	-	(7.063.215)	Other operating expenses
Laba operasional	283.063	238.710	-	521.773	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(110.461)	(250)	-	(110.711)	Non-operating income (expenses) - net
Tidak dialokasi				(201.799)	Unallocated
Laba tahun berjalan				209.263	Income for the year
Total aset	288.173.171	28.385.675	(4.782.019)	311.776.828	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	268.291.413	24.431.238	(4.782.019)	287.940.633	Total liabilities and temporary syirkah fund

31 Desember/December 31, 2018					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	20.781.512	2.070.246	-	22.851.758	Segment income
Beban segmen	(11.756.380)	(1.006.201)	-	(12.762.581)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	9.025.132	1.064.045	-	10.089.177	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	1.979.067	92.527	-	2.071.594	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.273.482)	(440.945)	-	(1.714.427)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(6.462.296)	(390.248)	-	(6.852.544)	Other operating expenses
Laba operasional	3.268.421	325.379	-	3.593.800	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	126.086	(109.611)	-	16.475	Non-operating income (expenses) - net
Tidak dialokasi				(802.352)	Unallocated
Laba tahun berjalan				2.807.923	Income for the year
Total aset	280.367.092	28.399.275	(2.330.173)	306.436.194	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	259.995.522	24.930.397	(2.330.173)	282.595.746	Total liabilities and temporary syirkah fund

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
(lanjutan)**

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 6,00% dan 6,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 1,75% dan 2,00% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp467.791 dan Rp401.532.

**43. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS
(continued)**

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2019 and 2018 were 6.00% and 6.75% for each deposits in Rupiah and 1.75% and 2.00% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp467,791 and Rp401,532 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018:

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Obligasi Pemerintah / Government Bonds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan / Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Deposits from Other Banks, Fund Borrowing and Securities issued
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, Tagihan Derivatif, Surat Berharga yang Diterbitkan dan Pinjaman yang Diterima / Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Deposits from Other Banks, Derivative Receivable, Securities issued and Fund borrowings

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Deposits from Other Banks, and Securities issued</i>
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain / <i>Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks</i>
PT Bank Mandiri Taspen Pos	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, and Deposits from Other Banks</i>
PT BRI Agroniaga Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, and Deposits from Other Banks</i>
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Indonesia Power	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan / <i>Guarantees issued</i>
PT Timah (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Securities, and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan / <i>Acceptances Receivable and Guarantees issued</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi / <i>Acceptances Receivable</i>
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Acceptances Receivable, Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Securities issued</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables, Securities purchased under agreement to resell and Securities issued</i>
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Permodalan Nasional Madani	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Securities issued</i>
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Wisma Seratus Sejahtera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT Anugrah Bhumi Amaya S	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT PP Properti Jababeka Residen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Sinergi Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Rekayasa Engineering	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Wijaya Karya Krakatau	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Puspetimeo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Jasamarga Toll Road	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan / <i>Guarantees issued</i>
PT Inhutani IV	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan / <i>Guarantees issued</i>
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan / <i>Securities Issued and Guarantees issued</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Asuransi Jiwa Brigin dan Jiwa Sejahtera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT BNI Life Insurance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT Jasaraharja Putera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities Issued
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ Securities issued and Guarantees issued
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi / Fund borrowings and Subordinated Loan
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek - Efek / Securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ Securities issued and Guarantees issued
Perum Damri	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT Infomedia Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT Infomedia Solusi Humanika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT Jasamarga Toll Road Operator	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT. Jasa Marga Toll Road Maintenance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan, Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan / Loans and sharia financing/receivables, Securities and Guarantees issued
PT PNM Ventura Syariah	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
Perum Jasa Tirta I	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Asuransi Asei Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT LEN Railway Systems	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Patra Trading	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Peruri Digital Security	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2019 and 2018 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/ Key Management including Director, Commissioner, Audit Committee, Head Division and Branch Manager	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ Control on company's activities	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syirkah Temporer / Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syirkah Fund
a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:		a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:
	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Aset		Assets
Giro pada bank lain (Catatan 6)	357.624	870.392
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	101.078	3.644
Efek-efek (Catatan 8)	2.126.461	877.112
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	11.053.601	9.393.138
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)	200.000	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	17.289.222	11.483.694
Tagihan Akseptasi (Catatan 12)	487.052	528.148
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	31.615.038	23.156.128
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(11.060)	(2.153)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	31.603.978	23.153.975
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	10,14%	7,56%
		Assets
		Current accounts with other banks (Note 6)
		Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)
		Securities (Note 8)
		Government bonds (Note 9)
		Securities purchased under agreement to resell (Note 10)
		Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)
		Acceptance Receivable (Note 12)
		Total assets to related parties
		Allowance for impairment losses for related parties
		Total assets from related parties - net
		Percentage of total assets from related parties to total assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	93.053.060	83.098.406
Liabilitas Akseptasi (Catatan 23)	487.052	528.148
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan (Catatan 24)	5.377.572	6.925.026
Pinjaman yang diterima (Catatan 25)	13.784.289	8.069.151
Pinjaman Subordinasi (Catatan 26)	5.999.669	2.999.519
Total liabilitas untuk pihak- pihak berelasi	118.701.642	101.620.250
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	44,05%	38,52%
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah (Catatan 18)	588.030	534.702
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	134.558	81.973
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	2.034.644	5.623.470
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	2.757.232	6.240.145
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	14,91%	33,17%
	2019	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	18.351	10.154
Efek-efek	151.664	57.921
Obligasi pemerintah	475.846	413.742
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.347	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.004.323	461.592
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	1.653.531	943.409
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	6,43%	4,13%

Liabilities
Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)
Acceptance Payable (Note 23)
Securities Issued (Note 24)
Fund borrowings (Note 25)
Subordinated Loan (Note 26)
Total liabilities to related parties
Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities
Temporary Syirkah Funds
Mudharabah current accounts (Note 18)
Mudharabah savings deposits (Note 19)
Mudharabah time deposits (Note 20)
Total temporary syirkah funds to related parties
Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds
Interest income and income from profit sharing
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Government bonds
Securities Purchased Under agreement to resell
Loans and sharia financing/ receivables
Total interest income and income from profit sharing from related parties
Percentage to total interest income and income from profit sharing

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	2019	2018
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	4.762.165	1.111.531
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan	1.207.510	588.407
Pinjaman yang diterima	860.282	423.810
Pinjaman Subordinasi	273.167	270.200
Giro <i>Mudharabah</i>	4.978	3.264
Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.792	5.625
Deposito <i>Mudharabah</i>	49.426	30.364
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	7.161.320	2.433.201
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	42,73%	19,07%

Interest, profit sharing and bonus expenses

Deposits from customers

Securities Issued

Fund borrowings

Subordinated Loan

Mudharabah current accounts

Mudharabah savings deposits

Mudharabah time deposits

Total interest and bonus expenses from related parties

Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 28)		
Garansi yang diterbitkan	364.059	834.470
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	18,12%	22,00%

Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 28)

Guarantees issued

Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts

- b. Transaksi dengan manajemen kunci

- b. Transactions with key management personnel

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Aset		
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 11)	119.470	125.193
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(18)	(19)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	119.452	125.174
Persentase terhadap total aset	0,04%	0,04%

Assets

Loan and sharia financing/receivables (Note 11)

Allowance for impairment losses for related parties

Total assets from related parties - net

Percentage to total assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

b. Transactions with key management personnel
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	68.494	100.338
Liabilitas imbalan kerja	210.427	216.319
Total liabilitas dari manajemen kunci	278.921	316.657
Persentase terhadap total liabilitas	0,10%	0,12%

Liabilities
Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)
Employee benefits liability
Total liabilities from key management personnel
Percentage to total liabilities

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Dana Syirkah Temporer		
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	2.019	2.316
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	3.857	2.483
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	5.876	4.799
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	0,03%	0,03%

Temporary Syirkah Funds
Mudharabah savings deposits (Note 19)
Mudharabah time deposits (Note 20)
Total temporary syirkah funds to related parties
Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	7.591	6.155
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,03%	0,03%

Interest income and income from profit sharing
Loans and sharia financing/ receivables
Percentage to total interest income and income from profit sharing

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	3.182	2.914
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	0,02%	0,02%

Interest, profit sharing and bonus expenses
Deposits from customers
Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci

b. Transactions with key management personnel
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Beban gaji dan tunjangan:		
Direksi (Catatan 1f)	72.567	85.289
Dewan Komisaris (Catatan 1f)	32.033	36.673
Karyawan Kunci Lain	362.575	145.555
Total	467.175	267.517
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	16,31%	9,30%

Salaries and employee benefits:
Board of Directors (Note 1f)
Board of Commissioners (Note 1f)
Other Key Employees

Total

Percentage to total salaries and employee benefits

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

45. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Posisi Devisa Neto

Net Open Position

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/ PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The Bank's NOP as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	7.559.184	6.845.122	714.062
Yen Jepang	200.140	-	200.140
Dolar Australia	37.087	10	37.077
Dolar Singapura	18.539	3.438	15.101
Euro Eropa	283	162	121
Renminbi	232	-	232
Pound Sterling Inggris	76	12	64
Riyal Arab Saudi	37	-	37
Dolar Hongkong	15	-	15
Ringgit Malaysia	25	9	16
			966.865
Modal (Catatan 46)			23.350.625
Rasio PDN			4,14%

Statement of financial position
and Administrative accounts
United States Dollar
Japanese Yen
Australian Dollar
Singapore Dollar
European Euro
Renminbi
Great Britain Pound Sterling
Saudi Arabian Riyal
Hongkong Dollar
Malaysian Ringgit

Capital (Note 46)

NOP ratio

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

	31 Desember/December 31, 2018		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	4.777.623	4.576.632	200.991
Yen Jepang	94.638	-	94.638
Dolar Singapura	67.923	2.512	65.411
Euro Eropa	278	-	278
Renminbi	259	-	259
Pound Sterling Inggris	86	-	86
Dolar Australia	62	-	62
Dolar Hongkong	52	-	52
Ringgit Malaysia	39	-	39
Riyal Arab Saudi	11	-	11
			361.827
Modal (Catatan 46)			23.328.446
Rasio PDN			1,55%

Statement of financial position
and Administrative accounts
 United States Dollar
 Japanese Yen
 Singapore Dollar
 European Euro
 Renminbi
 Great Britain Pound Sterling
 Australian Dollar
 Hongkong Dollar
 Malaysian Ringgit
 Saudi Arabian Riyal

Capital (Note 46)

NOP ratio

46. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risks) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

46. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2019 and 2018 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 on date September 22, 2016 concerning of Change regulation No. 11/POJK.03/2016 on date January 29, 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPM) (lanjutan)

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu *low to moderate*, maka rasio kecukupan modal (KPM) minimum per 31 Desember 2019 dan 2018 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 10%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPM.

Perhitungan KPM Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

		31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Modal Inti	a	21.037.417	20.460.086
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	b	2.313.208	2.868.360
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	c	-	-
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	23.350.625	23.328.446

46. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)

Based on POJK No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of *Countercyclical Buffer Requirement*, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of *Systemically Important Bank* and *Capital Surcharge*, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, and *Capital Surcharge* for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on the risk profile as of December 31, 2019 and 2018, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2019 and 2018, is set at 9% to less than 10%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2019 and 2018 follows:

Core Capital
 Supplementary Capital
 (Maximum of 100% of
 Core Capital)
 Additional Supplementary
 Capital Allocated
 for Anticipation
 of Market Risk

 Total Core Capital and
 Supplementary Capital

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPM) (lanjutan)

46. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)

Perhitungan KPM Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2019 and 2018 follows (continued):

		31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	e=c+d	23.350.625	23.328.446	Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk Investment
Penyertaan	f	-	-	
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	g=d-f	23.350.625	23.328.446	Total Capital for Credit Risk
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	h=e-f	23.350.625	23.328.446	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	i	113.079.144	109.507.283	Risk Weighted Assets
ATMR untuk Risiko Pasar	j	801.774	1.007.249	Credit Risk
ATMR untuk risiko operasional	k	20.963.355	17.623.217	RWA for Market Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	l=i+k	134.042.499	127.130.500	Total RWA for Credit Risk and Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	m=i+j+k	134.844.273	128.137.749	RWA for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	n=g/l	17,42%	18,35%	CAR for Credit Risk and Operational Risk
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	o=h/m	17,32%	18,21%	CAR for Credit Risk Operational Risk and Market Risk
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	Minimum CAR

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

47. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 in changed from SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been calculating the minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 dated in July 14, 2016 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Standardized Method for market risk are in accordance with SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 dated in September 8, 2016 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk. To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in Director Circular Letter No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 dated in May 15, 2019 regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan IV/2018, Triwulan I/2019, Triwulan II/2019, Triwulan III/2019. *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan telah dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2019 dan November 2019. Untuk bulan Maret 2019 pelaporannya telah disampaikan kepada OJK dan Untuk bulan November 2019 dilakukan *update* untuk kebutuhan pelaporan Dokumen *Recovery Plan*.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

47. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. Stress Testing for liquidity risk has been carried out 4 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter IV / 2018, Quarter I / 2019, Quarter II / 2019 and Quarter III / 2019. Market Risk and Credit Risk Stress Testing is conducted at least once a year and has been conducted twice in March 2019 and November 2019. For March 2019, the report has been submitted to the OJK and for November 2019, an update is made to the reporting requirements of the Recovery Plan Document.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Strategic Director*. Struktur organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Department Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Risk Officer Coordination (ROC) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi terhadap *Risk Officer* dalam melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Bank. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko, ROC dibantu oleh *Risk Superintendent (RS)* pada tingkat Divisi, *Regional Risk Superintendent (RRS)* pada tingkat Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer (BRO)* di Kantor Cabang di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination (ROC)* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division (RMD)*.

RS dan RRS merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dan Kantor Wilayah (Regional Office) dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi dan Kantor Wilayah dimana RS dan RRS bertugas. BRO adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Division

Risk Management Division (RMD) is a *Risk Management Working Unit (RMWU)* at the Bank, led by a *Division Head* that is responsible directly to the *Risk, Compliance & Strategic Director*. The organizational structure of the *RMD* consists of the *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* and *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. *Credit Risk Management Department* is responsible for credit risk management, while *Operational Risk Management Department* is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputational risk and legal risk. The *Department Head* is assisted by *Policy & Procedure Unit* and *Assessment & Measurement Unit*.

Risk Officer Coordination (ROC) has a responsibility in coordinating and supervising the *Risk Officer* during monitoring the implementation of risk management in the Bank. In performing risk monitoring functions, ROC is assisted by the *Risk Superintendent (RS)* at the Division level, and the *Regional Risk Superintendent (RRS)* at the level of the *Regional Office* and *Branch Risk Officer (BRO)* in the *Branch Office* under the coordination of *Risk Coordination Officer (ROC)* which is directly responsible to the Head of *Risk Management Division (RMD)*.

RS and RRS is directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management in the Division and Regional Office, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the Division and Regional office where the RS and RRS is assigned. The BRO is also directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management at branch offices, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the branch office where the BRO is assigned.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

**Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan
Manajemen Risiko**

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank berada pada peringkat *low to moderate*, yang tercermin dari tingkat risiko *inherent moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Policies and Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

In general, the Bank's composite risk profile is low to moderate, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan.

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD, RS, RRS dan BRO untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (non-housing related).

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by RMD, RS, RRS, and BRO to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya: (lanjutan)

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (coverage ratio).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) *Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation: (continued)*

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) Physical collateral, such as land and buildings.*
- b) Financial collateral, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.*
- c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.*

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2019 and 2018. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2019							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	745.287	-	3.845	342	27	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	-	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.112.049	-	-	-	-	8.112.049	Securities
Obligasi Pemerintah	11.053.601	-	-	-	-	11.053.601	Government bonds
Tagihan Akseptasi	-	487.052	-	-	-	487.052	Acceptance Receivable
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	-	-	-	1.875.221	Securities purchased under agreement to resell
Penyertaan Saham	270	-	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer							Consumer
Pemilikan rumah	-	79.619.786	47.672.420	32.407.778	32.491.696	192.191.680	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.846.773	3.934.990	1.164.891	2.415.126	10.361.780	Non-housing loan
Modal kerja	-	23.280.969	9.362.966	3.593.708	4.106.712	40.344.355	Working capital
Investasi	-	8.000.376	1.748.939	600.624	353.709	10.703.648	Investment
Sindikasi	-	70.925	-	-	-	70.925	Syndicated
Direksi dan karyawan:							Director and Employees
- Pihak ketiga	-	940.480	541.263	264.125	300.479	2.046.347	Third parties -
- Pihak berelasi	-	61.487	20.653	11.260	13.024	106.424	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	133.129	1.370.170	829.395	360.471	517.607	3.210.772	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	889.042	21.397	4.623	1.800	3.546	920.408	Other assets ^{*)}
Total kotor	49.418.121	116.699.415	64.119.094	38.404.999	40.201.926	308.843.555	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.145.446)	Allowances for impairment losses
Neto						302.698.109	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
 **) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third parties receivables
 **) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2018

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Efek-efek	5.868.658	-	-	-	-	5.868.658	Securities
Obligasi Pemerintah	9.393.138	-	-	-	-	9.393.138	Government bonds
Tagihan Akseptasi	-	528.148	-	-	-	528.148	Acceptance Receivable
Tagihan Spot	-	-	-	-	-	-	Interest Rate
Suku Bunga	167	-	-	-	-	167	Spot Receivable
Penyertaan Saham	270	-	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer	-	-	-	-	-	-	Consumer
Pemilikan rumah	-	72.838.728	44.094.458	29.013.786	30.489.824	176.436.796	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	3.210.950	4.313.881	1.376.266	2.600.734	11.501.831	Non-housing loan
Modal kerja	-	23.039.651	9.905.251	3.849.541	4.205.747	41.000.190	Working capital
Investasi	-	4.247.565	1.906.544	479.711	529.892	7.163.712	Investment
Sindikasi	-	77.033	-	-	-	77.033	Syndicated
Direksi dan karyawan:	-	-	-	-	-	-	Director and Employees
- Pihak ketiga	-	916.583	528.200	261.188	301.135	2.007.106	Third parties -
- Pihak berelasi	-	60.617	22.310	13.346	14.791	111.064	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	100.312	1.155.166	763.116	362.312	578.596	2.959.502	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.089.426	5.822	2.676	1.482	1.554	1.100.960	Other assets ^{*)}
Total kotor	59.922.188	106.080.263	61.537.352	35.357.863	38.722.300	301.619.966	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(3.320.293)	Allowances for impairment losses
Neto						298.299.673	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

^{*)} Consists of third parties receivables

^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/December 31, 2019

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	48.604	82.083	39.998	18.884	189.569	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	1.837.018	138.133	11.844	22.687	2.009.682	Guarantees issued
Total	-	1.885.622	220.216	51.842	41.571	2.199.251	Total

31 Desember/December 31, 2018

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	62.120	114.577	74.934	17.937	269.568	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	3.035.052	683.178	36.617	39.118	3.793.965	Guarantees issued
Total	-	3.097.172	797.755	111.551	57.055	4.063.533	Total

^{*)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

^{**)} Hanya fasilitas kredit committed yang belum ditarik

^{*)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2019 and 2018:

31 Desember/December 31, 2019

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	749.501	-	-	-	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.996.115	101.078	-	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek Obligasi Pemerintah	4.865.821	1.882.188	897.539	466.501	-	8.112.049	Securities
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	11.053.601	-	-	-	-	11.053.601	Government bonds
Tagihan Akseptasi	1.675.221	-	200.000	-	-	1.875.221	Securities purchased under agreement to resell
Penyertaan Saham	-	-	-	487.052	-	487.052	Acceptance Receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	-	-	270	-	270	Investment in Shares
Bunga yang masih akan diterima	4.035.376	16.959	2.320.937	42.191.720	207.260.167	255.825.159	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain ^{*)}	122.298	7.415	14.883	1.008.913	2.057.263	3.210.772	Interest receivable
	58.429	247.592	32.508	254.957	326.922	920.408	Other assets ^{*)}
Total kotor	48.319.190	3.004.733	3.465.867	44.409.413	209.644.352	308.843.555	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.145.446)	Allowances for impairment losses
Neto						302.698.109	Net

31 Desember/December 31, 2018

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.417.862	-	-	-	-	15.417.862	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.588.769	-	-	-	1.588.769	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	26.461.116	3.644	-	-	-	26.464.760	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek Obligasi Pemerintah	859.203	3.969.947	717.000	322.508	-	5.868.658	Securities
Tagihan Akseptasi	9.393.138	-	-	-	-	9.393.138	Government bonds
Tagihan Spot	-	-	-	528.148	-	528.148	Acceptance Receivable
Suku Bunga	167	-	-	-	-	167	Interest Rate Spot Receivable

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2018							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Penyertaan Saham	-	-	-	270	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.052.971	538.511	2.225.513	41.137.277	193.343.460	238.297.732	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	87.277	3.186	24.583	927.068	1.917.388	2.959.502	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	210.542	203.584	-	396.325	290.509	1.100.960	Other assets ^{*)}
Total kotor	53.482.276	6.307.641	2.967.096	43.311.596	195.551.357	301.619.966	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(3.320.293)	Allowances for impairment losses
Neto						298.299.673	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2019 and 2018, are as follows:

31 Desember/December 31, 2019							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	-	-	151.740	37.829	189.569	Unused loan facilities ^{*)}
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.008.357	1.325	2.009.682	Guarantees issued
Total	-	-	-	2.160.097	39.154	2.199.251	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018: (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2019 and 2018, are as follows: (continued)

	31 Desember/December 31, 2018					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	-	1.028	225.103	43.437	269.568
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	3.793.965	-	3.793.965
Total	-	-	1.028	4.019.068	43.437	4.063.533

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Current Accounts with Other Banks

	31 Desember/December 31, 2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Rupiah	160.984	-	160.984	Rupiah
Mata Uang Asing	586.885	1.632	588.517	Foreign currencies
Total	747.869	1.632	749.501	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.632)	Allowance for impairment losses
Neto			747.869	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah	110.735	-	110.735
Mata Uang Asing	1.476.316	1.718	1.478.034
Total	1.587.051	1.718	1.588.769
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.718)	Allowance for impairment losses
Neto		1.587.051	Net

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

3. Efek-efek

31 Desember/December 31, 2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Sertifikat Bank Indonesia	4.865.821	-	4.865.821
Obligasi	1.280.569	2.000	1.282.569
Negotiable certificate of deposits	538.040	-	538.040
Medium Term Notes	199.949	-	199.949
Efek Beragunan Aset	833.204	-	833.204
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	392.466	-	392.466
Total	8.110.049	2.000	8.112.049
Cadangan kerugian penurunan nilai		(27.378)	Allowance for impairment losses
Neto		8.084.671	Net

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

1. Current Accounts with Other Bank (continued)

2. Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2018		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Sertifikat Bank Indonesia	3.005.636	-	3.005.636
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1.141.501	-	1.141.501
Obligasi	523.283	2.000	525.283
Negotiable certificate of deposits	240.915	-	240.915
Medium Term Notes	194.398	-	194.398
Efek Beragunan Aset	760.925	-	760.925
Total	5.866.658	2.000	5.868.658
Cadangan kerugian penurunan nilai			(20.173)
Neto			5.848.485

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2019 dan 2018, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

5. Penyertaan saham

Per 31 Desember 2019 dan 2018, penyertaan saham mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil dan RpNihil.

6. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2019 dan 2018, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

7. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2019 dan 2018, tagihan akseptasi tidak mengalami penurunan nilai.

8. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 55 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities (continued)

Certificates of Bank Indonesia
 Deposits Certificates of Bank Indonesia
 Bonds
 Negotiable certificate of deposits
 Medium Term Notes
 Asset-Backed Securities

Allowance for impairment losses

Net

4. Administrative account

As of December 31, 2019 and 2018, these administrative account items are not impaired individually as well as collectively.

5. Investment in Shares

As of December 31, 2019 and 2018, investment in shares which are impaired amounting to RpNil and RpNil, respectively.

6. Securities Purchased Under Agreement to Resell

As of December 31, 2019 and 2018, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

7. Acceptance Receivable

As of December 31, 2019 and 2018, acceptance receivable are not impaired.

8. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No. 55 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

8. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (lanjutan)

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

8. Loans and sharia financing/receivables (continued)

Loans and sharia financing/receivables, as of December 31, 2019 and 2018, are summarized as follows:

31 Desember/December 31, 2019						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Perumahan	161.736.456	33.137.872		22.055.990	12.763.418	229.693.736
Konstruksi	6.664.907	547.449		1.403.458	1.445.096	10.060.910
Jasa-jasa dunia usaha	4.579.076	676.054		448.869	705.409	6.409.408
Perdagangan, restoran dan hotel	272.275	69.215		45.238	809.499	1.196.227
Jasa-jasa sosial	1.702.487	32.784		133.399	128.605	1.997.275
Manufaktur	37.137	5.281		6.387	58.947	107.752
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.281.469	82.381		6.185	51.478	4.421.513
Pertanian	7.843	415		-	19.979	28.237
Pertambangan	-	8.258		15.882	26.926	51.066
Listrik, gas dan air	1.537.206	17.164		4.465	9.181	1.568.016
Lain-lain	176.033	16.994		13.194	84.798	291.019
Total	180.994.889	34.593.867		24.133.067	16.103.336	255.825.159
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.116.166)
Neto						249.708.993
31 Desember/December 31, 2018						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Perumahan	158.007.562	35.380.167		14.820.631	6.955.362	215.163.722
Konstruksi	8.940.459	443.280		840.802	612.878	10.837.419
Jasa-jasa dunia usaha	6.275.580	716.760		629.458	383.334	8.005.132
Perdagangan, restoran dan hotel	299.236	179.004		178.913	646.259	1.303.412
Jasa-jasa sosial	598.743	51.117		47.811	83.112	780.783
Manufaktur	49.531	23.628		34.906	49.753	157.818
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.069.154	22.316		97.219	36.666	1.225.355
Pertanian	4.358	399		2.829	29.469	37.055
Pertambangan	12.514	45.721		2.635	26.929	87.799
Listrik, gas dan air	53.121	25.594		7.988	2.900	89.603
Lain-lain	464.159	38.852		23.581	83.042	609.634
Total	175.774.417	36.926.838		16.686.773	8.909.704	238.297.732
Cadangan kerugian penurunan nilai						(3.298.132)
Neto						234.999.600

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2019						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High Grade</i> ^{*)}	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i> ^{*)}	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Efek-efek						Securities
Nilai wajar melalui laba rugi	4.189.398	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	2.629.347	-	-	-	-	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.291.304	-	-	-	2.000	Held-to-maturity
Obligasi Pemerintah						Government Bonds
Nilai wajar melalui laba rugi	1.232.204	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	6.147.729	-	-	-	-	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.673.668	-	-	-	-	Held-to-maturity
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	747.869	-	-	-	1.632	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Akseptasi	487.052	-	-	-	-	Acceptance Receivable
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	-	-	-	Securities Purchased Under Agreement to Resell
Penyertaan Saham	-	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	139.593.435	29.942.214	19.593.253	3.062.778	192.191.680	Housing loan
Non kepemilikan rumah	7.108.711	1.832.013	1.085.063	335.993	10.361.780	Non-housing loan
Modal kerja	24.595.608	1.937.119	3.007.369	10.804.259	40.344.355	Working capital
Investasi	7.607.002	847.105	431.348	1.818.193	10.703.648	Investment
Sindikasi	-	-	-	70.925	70.925	Syndicated
Direksi dan karyawan						Directors and employees
- Pihak ketiga	1.984.043	35.082	16.034	11.188	2.046.347	Third parties -
- Pihak yang berelasi	106.090	334	-	-	106.424	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	-	-	-	3.210.772	Interests receivable
Aset lain-lain ^{*)}	920.408	-	-	-	920.408	Other assets ^{*)}
Total	234.009.383	34.593.867	24.133.067	16.107.238	308.843.555	Total
Cadangan kerugian nilai					(6.145.446)	Allowance for impairment losses
Neto					302.698.109	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
 **) Tidak diaudit

*) Consists of third party receivables
 **) Unaudited

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

31 Desember/December 31, 2018						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High Grade</i> ^{*)}	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i> ^{**)}	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total
Efek-efek						Securities
Nilai wajar melalui laba rugi	4.147.137	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	1.511.624	-	-	-	-	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	207.897	-	-	-	2.000	Held-to-maturity
Obligasi Pemerintah						Government Bonds
Nilai wajar melalui laba rugi	2.777.574	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	3.904.235	-	-	-	-	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.711.329	-	-	-	-	Held-to-maturity
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	15.417.862	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.587.051	-	-	-	1.718	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	26.464.760	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Akseptasi	528.148	-	-	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Spot	-	-	-	-	-	Interest Rate
Suku Bunga	167	-	-	-	-	Spot Receivable
Penyertaan Saham	-	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer	-	-	-	-	-	Consumer
Pemilikan rumah	131.937.455	29.236.882	12.783.635	2.478.824	176.436.796	Housing loan
Non kepemilikan rumah	8.328.337	2.046.217	821.030	306.247	11.501.831	Non-housing loan
Modal kerja	28.817.049	4.615.115	2.585.634	4.982.392	41.000.190	Working capital
Investasi	4.611.745	1.003.922	488.502	1.059.543	7.163.712	Investment
Sindikasi	-	-	-	77.033	77.033	Syndicated
Direksi dan karyawan	-	-	-	-	-	Directors and employees
- Pihak ketiga	1.969.274	24.195	7.972	5.665	2.007.106	Third parties -
- Pihak yang berelasi	110.557	507	-	-	111.064	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	2.959.502	-	-	-	2.959.502	Interests receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.100.960	-	-	-	1.100.960	Other assets ^{*)}
Total	239.092.663	36.926.838	16.686.773	8.913.692	301.619.966	Total
Cadangan kerugian nilai					(3.320.293)	Allowance for impairment losses
Neto					298.299.673	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.
- (b) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.
- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

- (v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut:

- (v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2019 and 2018, follows:

31 Desember/December 31, 2019						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	18.449.669	262.576	396.078	484.930	19.593.253	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	988.838	21.917	28.391	45.917	1.085.063	Non housing loan
Modal kerja	1.724.687	543.367	243.707	495.608	3.007.369	Working capital
Investasi	317.660	33.141	9.052	71.495	431.348	Investment
Direktur dan karyawan	9.813	-	2.937	3.284	16.034	Directors and employees
Total	21.490.667	861.001	680.165	1.101.234	24.133.067	Total
Cadangan kerugian nilai					(261.153)	Allowance for impairment losses
Neto					23.871.914	Net

31 Desember/December 31, 2018						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	11.520.844	251.405	688.260	323.126	12.783.635	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	778.095	5.560	19.284	18.091	821.030	Non housing loan
Modal kerja	2.380.466	20.027	83.445	101.696	2.585.634	Working capital
Investasi	460.646	2.604	12.253	12.999	488.502	Investment
Direktur dan karyawan	4.890	607	1.178	1.297	7.972	Directors and employees
Total	15.144.941	280.203	804.420	457.209	16.686.773	Total
Cadangan kerugian nilai					(430.641)	Allowance for impairment losses
Neto					16.256.132	Net

- (vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

- (vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

31 Desember/December 31, 2019							
Konsumsi/Consumer							
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/Non- Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employees	
Saldo awal tahun	838.558	136.572	1.999.292	314.966	4.492	4.252	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	533.115	34.543	2.573.116	332.782	-	5.990	Provision for impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	7.525	3.831	26.345	2.897	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(51.398)	(18.790)	(490.903)	(140.430)	-	(589)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	1.327.800	156.156	4.107.850	510.215	4.492	9.653	Balance at end of year
Penurunan nilai individual	420.046	24.059	3.088.836	438.798	4.492	2.241	Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	907.754	132.097	1.019.014	71.417	-	7.412	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	455.299	25.463	9.595.195	1.650.044	70.925	2.249	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows: (continued)

	31 Desember/December 31, 2018						
	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employees	
Saldo awal tahun	926.078	128.641	987.427	311.114	61	2.666	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(33.311)	15.312	1.522.237	197.398	4.431	2.992	Provision for impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	8.815	373	10.060	1.040	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(63.024)	(7.754)	(520.432)	(194.586)	-	(1.406)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	838.558	136.572	1.999.292	314.966	4.492	4.252	Balance at end of year
Penurunan nilai individual	67.070	3.885	1.071.174	196.296	4.492	602	Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	771.488	132.687	928.118	118.670	-	3.650	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	75.131	3.885	3.929.694	881.102	77.033	602	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

- inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
- inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) dan *Risk Management Division* (RMD).

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Bank maupun skenario stress pada faktor pasar).

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the BOC and BOD who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Risk Management Division (RMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

31 Desember/December 31, 2019							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ >6 - 12 Months	> 12 Bulan/ >12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	1.369.167	-	1.369.167	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	15.512.329	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	747.869	(1.632)	749.501	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	10.745.393	236.800	115.000	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.084.671	(27.378)	7.143.578	367.628	438.179	162.664	Securities
Obligasi Pemerintah	11.053.601	-	7.922.598	505.140	1.239.973	1.385.890	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	1.675.221	92.135	11.236	96.629	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-	Acceptance Receivable
Penyertaan saham	-	(270)	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	249.708.993	(6.116.166)	4.895.096	5.279.059	6.088.075	239.562.929	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	-	3.210.772	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	920.408	-	920.408	-	-	-	Other assets**)
Total	304.067.276	(6.145.446)	54.286.843	6.707.174	8.010.323	241.208.382	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	1.803.172	-	1.803.172	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	206.905.692	-	158.169.456	40.216.607	3.405.058	5.114.571	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	4.509.238	-	4.503.938	5.300	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	935.000	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	19.783.552	-	-	2.134.415	3.184.556	14.464.581	Securities issued
Liabilitas akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	22.465.657	-	999.990	5.000.000	5.180.301	11.285.366	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	-	630.002	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	4.592.582	-	4.592.582	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi	5.999.669	-	-	-	-	5.999.669	Subordinated Loans
Total	268.111.616	-	170.841.920	47.582.734	12.822.775	36.864.187	Total
Perbedaan jatuh tempo	35.955.660	(6.145.446)	(116.555.077)	(40.875.560)	(4.812.452)	204.344.195	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2018							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ >6 - 12 Months	> 12 Bulan/ >12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	1.243.615	-	1.243.615	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15.417.862	-	15.417.862	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.587.051	(1.718)	1.588.769	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	26.464.760	-	26.364.760	25.000	75.000	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.848.485	(20.173)	5.658.761	-	-	209.897	Securities
Obligasi Pemerintah	9.393.138	-	6.981.809	107.635	199.946	2.103.748	Government bonds
Tagihan Akseptasi	528.148	-	-	528.148	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Spot	-	-	-	-	-	-	Interest Rate
Suku Bunga	167	-	167	-	-	-	Spot Receivable
Penyertaan saham	-	(270)	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	234.999.600	(3.298.132)	5.969.746	5.389.395	6.521.616	220.416.975	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	2.959.502	-	2.959.502	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	1.100.960	-	1.100.960	-	-	-	Other assets**)
Total	299.543.288	(3.320.293)	67.285.951	6.050.178	6.796.562	222.730.890	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	2.092.503	-	2.092.503	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	211.034.488	-	159.137.118	35.518.200	1.413.904	14.965.266	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.992.579	-	2.992.579	-	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	-	935.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	20.644.760	-	504.383	2.221.227	4.227.380	13.691.770	Securities issued
Liabilitas akseptasi	528.148	-	-	528.148	-	-	Acceptance payable
Liabilitas spot suku bunga	152	-	152	-	-	-	Interest rate spot liabilities
Pinjaman yang diterima	15.499.493	-	-	7.799.922	3.312.372	4.387.199	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	630.134	-	630.134	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	5.366.155	-	5.366.155	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi	2.999.519	-	-	-	-	2.999.519	Subordinated Loans
Total	262.722.931	-	170.723.024	46.067.497	8.953.656	36.978.754	Total
Perbedaan jatuh tempo	36.820.357	(3.320.293)	(103.437.073)	(40.017.319)	(2.157.094)	185.752.136	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

*** Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**** Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

*** Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

**** Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

31 Desember/December 31, 2019						
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months
LIABILITAS						
Liabilitas segera*)	1.803.172	-	1.803.172	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	137.072.728	-	78.050.996	47.692.879	6.025.031	5.303.822
Tabungan	43.131.341	43.131.341	-	-	-	-
Giro	51.566.011	49.403.881	-	-	-	2.162.130
Simpanan dari bank lain	4.194.434	10.315	4.184.119	-	-	-
Efek-efek yang dijual						
dengan janji dibeli kembali	980.318	-	15.106	-	15.106	950.106
Liabilitas akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-
Surat berharga yang diterbitkan	24.534.117	-	160.362	2.311.234	4.417.850	17.644.671
Pinjaman yang diterima	27.227.928	-	1.119.833	6.753.297	5.632.304	13.722.494
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	-	630.002	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	4.592.582	-	4.592.582	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	8.132.250	-	44.750	223.750	268.500	7.595.250
Total	304.351.935	92.545.537	90.743.702	57.207.572	16.476.651	47.378.473

LIABILITIES
Liabilities due immediately*)
Deposits from customers
Time deposits
Savings deposits
Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under repurchase agreements
Acceptance payable
Securities issued
Fund borrowings
Interest payables
Other liabilities**)
Subordinated Loan
Total

31 Desember/December 31, 2018						
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months
LIABILITAS						
Liabilitas segera*)	2.092.503	-	2.092.503	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	136.024.263	-	68.058.821	42.813.938	1.521.266	23.630.238
Tabungan	40.552.467	40.552.467	-	-	-	-
Giro	57.390.964	55.334.069	-	-	-	2.056.895
Simpanan dari bank lain	3.284.206	21.520	3.262.686	-	-	-
Efek-efek yang dijual						
dengan janji dibeli kembali	1.052.578	-	16.797	16.797	33.594	985.390
Liabilitas akseptasi	528.148	-	-	528.148	-	-
Liabilitas spot suku bunga	152	-	152	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	27.302.913	-	627.330	2.882.532	2.982.591	20.810.460
Pinjaman yang diterima	16.945.930	-	133.720	8.397.039	3.227.002	5.188.169
Bunga yang masih harus dibayar	630.134	-	630.134	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	5.366.155	-	5.366.155	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	3.663.750	-	22.500	112.500	135.000	3.393.750
Total	294.834.163	95.908.056	80.210.798	54.750.954	7.899.453	56.064.902

LIABILITIES
Liabilities due immediately*)
Deposits from customers
Time deposits
Savings deposits
Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under repurchase agreements
Acceptance payable
Interest rate spot liabilities
Securities issued
Fund borrowings
Interest payables
Other liabilities**)
Subordinated Loan
Total

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 **) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
 **) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Aset	31 Desember/December 31, 2019	
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies
Giro pada bank lain	0,81%	0,01%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	5,98%	0,47%
Efek-efek	9,05%	3,14%
Obligasi Pemerintah		
Tingkat bunga tetap	9,22%	11,48%
Tingkat bunga Mengambang	5,90%	-
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah	9,88%	-
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	1,89%	0,00%
Tabungan	4,17%	0,30%
Deposito Berjangka	5,59%	3,47%
Simpanan dari Bank lain		
Giro	1,73%	-
Deposito Berjangka	7,17%	-
Inter-bank call money	6,06%	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,51%	-
Surat berharga yang diterbitkan	8,73%	-

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2019 and 2018:

	31 Desember/December, 2018		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
	1,23%	2,19%	Current accounts with other Bank
			Placements with Bank Indonesia and other Banks
	4,39%	0,81%	Securities
	6,40%	2,46%	Government bonds
	8,28%	3,53%	Fixed interest rate
	9,43%	-	Variable interest rate
	11,47%	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilities			Liabilities
			Deposits from customers
	1,84%	0,02%	Demand deposits
	3,75%	0,39%	Savings deposits
	5,50%	0,76%	Time deposits
			Deposits from other banks
	1,82%	-	Demand deposits
	5,90%	-	Time deposits
	5,25%	-	Inter-bank call money
	5,52%	-	Securities sold under repurchase agreements
	9,13%	-	Securities issued

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

31 Desember/December 31, 2019						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Aset Keuangan						
Kas	-	-	-	-	1.369.167	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia	14.153.009	-	-	-	1.359.320	15.512.329
Giro pada bank lain	749.356	-	-	-	145	749.501
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	8.913.193	2.184.000	11.097.193
Efek-efek	733.670	-	-	7.246.108	132.271	8.112.049
Obligasi Pemerintah	2.246.503	-	-	7.801.428	1.005.670	11.053.601
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	200.000	-	-	1.675.221	-	1.875.221
Tagihan Akseptasi	-	-	-	487.052	-	487.052
Penyertaan Saham	-	-	-	-	270	270
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	4.398.474	8.656.844	176.191.398	42.965.823	23.612.620	255.825.159
Bunga yang masih akan diterima Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	3.210.772	3.210.772
	-	-	-	-	920.408	920.408
Total aset keuangan	22.481.012	8.656.844	176.191.398	69.088.825	33.794.643	310.212.722
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera ^{*)}	-	-	-	-	1.803.172	1.803.172
Simpanan dari nasabah	-	-	-	-	-	-
Giro	-	-	-	48.108.116	2.593.010	50.701.126
Tabungan	-	-	-	41.484.909	789.889	42.274.798
Deposito berjangka	-	-	-	113.929.768	-	113.929.768
Simpanan dari bank lain	-	-	-	4.509.238	-	4.509.238
Liabilitas akseptasi	-	-	-	487.052	-	487.052
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	19.783.552	-	19.783.552
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	-	935.000
Pinjaman yang diterima	6.885.143	-	-	14.904.078	676.436	22.465.657
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	630.002	630.002
Liabilitas lain-lain ^{**)}	-	-	-	-	4.592.582	4.592.582
Pinjaman subordinasi	-	-	-	5.999.669	-	5.999.669
Total liabilitas keuangan	7.820.143	-	-	249.206.382	11.085.091	268.111.616
Gap repricing suku bunga-kotor	14.660.869	8.656.844	176.191.398	(180.117.557)	22.709.552	42.101.106

31 Desember/December 31, 2018						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Aset Keuangan						
Kas	-	-	-	-	1.243.615	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	14.079.950	-	-	-	1.337.912	15.417.862
Giro pada bank lain	1.588.661	-	-	-	108	1.588.769
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	22.359.760	4.105.000	26.464.760
Efek-efek	616.287	-	-	5.127.488	124.893	5.868.658
Obligasi Pemerintah	3.141.131	-	-	5.682.181	569.826	9.393.138
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	528.148	528.148
Tagihan spot suku bunga	-	-	-	-	167	167
Penyertaan Saham	-	-	-	-	270	270
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	5.326.203	8.276.069	108.620.296	94.033.737	22.041.427	238.297.732
Bunga yang masih akan diterima Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	2.959.502	2.959.502
	-	-	-	-	1.100.960	1.100.960
Total aset keuangan	24.752.232	8.276.069	108.620.296	127.203.166	34.011.818	302.863.581

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

*** Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

*** Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (lanjutan):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (continued):

31 Desember/December 31, 2018						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera ^{*)}	-	-	-	-	2.092.503	2.092.503
Simpanan dari nasabah						
Giro	51.649.837	-	-	2.023.351	2.781.854	56.455.042
Tabungan	37.532.184	-	-	818.655	766.324	39.117.163
Deposito berjangka	-	-	-	115.462.283	-	115.462.283
Simpanan dari bank lain	19.609	-	-	2.972.970	-	2.992.579
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	528.148	528.148
Liabilitas Spot suku bunga	-	-	-	-	152	152
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	20.644.760	-	20.644.760
Efek-efek yang dijual						
dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	-	935.000
Pinjaman yang diterima	2.430.383	-	-	12.535.892	533.218	15.499.493
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	630.134	630.134
Liabilitas lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	5.366.155	5.366.155
Pinjaman subordinasi	-	-	-	2.999.519	-	2.999.519
Total liabilitas keuangan	92.567.013	-	-	157.457.430	12.698.488	262.722.931
Gap repricing suku bunga-kotor	(67.814.781)	8.276.069	108.620.296	(30.254.264)	21.313.330	40.140.650

^{*)} Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

^{**)} Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

^{***)} Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

^{***)} Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2019 and 2018. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate available-for-sale and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2019 and 2018 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

31 Desember/December 31, 2019

	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(34.453)	(109.946)	Rupiah
	+50	(14.380)	(45.495)	
	-50	15.248	47.679	
	-125	39.898	123.626	
Dolar Amerika Serikat	+125	(19.742)	(114.494)	United States Dollar
	+50	(8.180)	(48.045)	
	-50	8.581	51.403	
	-125	22.256	135.598	

31 Desember/December 31, 2018

	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(8.177)	(91.929)	Rupiah
	+50	(3.386)	(38.185)	
	-50	3.550	40.220	
	-125	9.206	104.677	
Dolar Amerika Serikat	+125	-	(14.485)	United States Dollar
	+50	-	(6.187)	
	-50	-	6.790	
	-125	-	18.285	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

31 Desember/December 31, 2019		
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Rupiah	±125 ±50	± 4.308 ± 1.723

31 Desember/December 31, 2018		
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Rupiah	±125 ±50	± 7.378 ± 2.951

ii. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

ii. Exchange rate risk

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations.

31 Desember/December 31, 2019		
Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30% ±0,35%	±2.888 ±3.370

United States Dollar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

31 Desember/December 31, 2018

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnyal Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30% ±0,35%	±923 ±1.007	United States Dollar

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2019 and 2018, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Internal Audit melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Risk Management Division* (RMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi *BTN Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui media *web* (web based).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan atau regulasi yang mendukung dan kelemahan perjanjian atau perikatan. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan *Risk Management Division* dan *Legal Division* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the RMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus, regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in policy or regulation and weak agreement or engagement. At the same time, each division together with Risk Management Division and Legal Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategy and Performance Management Division* (SPMD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh SPMD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang me-review strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMPD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke RMD dan RMC untuk di-review.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Corporate Social Responsibility is not focused only on *charity*, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategy and Performance Management Division (SPMD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by SPMD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Strategy & Performance Management Division (SPMD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMPD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMPD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by RMD and RMC.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke RMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern. BRO memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

47. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Internal Access Management Standards (AIMS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMPD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to RMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, RMD and CMPD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits. BRO ensures that the branch offices have completed the findings/results of the related audit.

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2019 and 2018 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	1.369.167	1.369.167	1.243.615	1.243.615	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	4.189.398	4.189.398	4.147.137	4.147.137	Securities
Obligasi Pemerintah	1.232.204	1.232.204	2.777.574	2.777.574	Government bonds
Tagihan Spot suku bunga	-	-	167	167	Interest rate Spot receivable
Tersedia untuk dijual					Available for sale
Efek-efek	2.615.895	2.615.895	1.503.858	1.503.858	Securities
Obligasi Pemerintah	6.147.729	6.147.729	3.904.235	3.904.235	Government bonds

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini (lanjutan).

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2019 and 2018 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates (continued).

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Efek-efek	1.279.378	1.238.051	197.490	199.462	Securities
Obligasi Pemerintah	3.673.668	3.752.552	2.711.329	2.721.058	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	1.875.221	-	-	Reverse Repo
Tagihan Akseptasi	487.052	487.052	528.148	528.148	Acceptance Receivable
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	15.512.329	15.417.862	15.417.862	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	747.869	747.869	1.587.051	1.587.051	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	11.097.193	11.097.193	26.464.760	26.464.760	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					Loans and sharia financing/ receivables
Konsumsi					Consumer
Pemilikan rumah	190.863.880	190.468.217	175.598.238	175.024.574	Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	10.205.624	10.205.623	11.365.259	11.365.259	Non-housing loan
Modal kerja	36.236.505	36.236.504	39.000.898	39.000.898	Working capital
Investasi	10.193.433	10.193.434	6.848.746	6.848.746	Investment
Sindikasi	66.433	66.433	72.541	72.541	Syndicated
Direksi dan karyawan	2.143.118	2.143.117	2.113.918	2.113.918	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	3.210.772	2.959.502	2.959.502	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	920.408	920.408	1.100.960	1.100.960	Other assets ^{*)}
Total aset keuangan	304.067.276	303.709.168	299.543.288	298.981.325	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas Spot suku bunga	-	-	152	152	Interest rate Spot liability
Liabilitas segera ^{**)}	1.803.172	1.803.172	2.092.503	2.092.503	Current liabilities ^{**)}
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	50.701.126	50.701.126	56.455.042	56.455.042	Demand deposits
Tabungan	42.274.798	42.274.798	39.117.163	39.117.163	Savings deposits
Deposito Berjangka	113.929.768	113.929.768	115.462.283	115.462.283	Time deposits
Simpanan dari Bank Lain					Deposits from other banks
Giro	10.068	10.068	19.609	19.609	Demand deposits
Deposito Berjangka	4.499.170	4.499.170	2.972.970	2.972.970	Time deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000	935.000	935.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang Diterbitkan	19.783.552	20.154.706	20.644.760	20.903.003	Securities issued
Liabilitas akseptasi	487.052	487.052	528.148	528.148	Acceptance Payable
Pinjaman yang diterima	22.465.657	22.130.449	15.499.493	15.499.493	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	630.002	630.134	630.134	Interest payables
Liabilitas lain-lain ^{***)}	4.592.582	4.592.582	5.366.155	5.366.155	Other liabilities ^{***)}
Pinjaman Subordinasi	5.999.669	6.093.868	2.999.519	2.999.519	Subordinated Loan
Total liabilitas keuangan	268.111.616	268.241.761	262.722.931	262.981.174	Total financial liabilities

^{*)} Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

^{**)} Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

^{***)} Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

^{***)} Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset Keuangan				
Nilai wajar melalui				
laba rugi				
Efek-efek	4.189.398	4.189.398	-	-
Obligasi Pemerintah	1.232.204	1.232.204	-	-
Total nilai wajar melalui laporan	5.421.602	5.421.602	-	-
laba rugi				
Tersedia untuk dijual				
Efek-efek	2.615.895	1.943.355	672.540	-
Obligasi Pemerintah	6.147.729	6.147.729	-	-
Total tersedia untuk dijual	8.763.624	8.091.084	672.540	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Efek-efek	1.238.051	1.238.051	-	-
Obligasi Pemerintah	3.752.552	3.752.552	-	-
Efek-efek yang Dibeli dengan				
Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	1.875.221	-
Total dimiliki hingga jatuh tempo	6.865.824	4.990.603	1.875.221	-
Kredit yang diberikan dan piutang				
Kredit yang diberikan, piutang				
dan pembiayaan Syariah - Net	249.313.328	-	241.492.625	7.820.703
Liabilitas Keuangan				
Surat berharga yang				
Diterbitkan	20.154.706	-	20.154.706	-

Financial Assets

Fair value through profit or loss
 Securities
 Government bonds

Total fair value through profit or loss

Available-for-sale
 Securities
 Government bonds

Total available-for-sale

Held-to-maturities
 Securities
 Government bonds
 Securities purchased under
 agreement Reverse Repo

Total held-to-maturities

Loan and receivables
 Loan and sharia
 financing receivables

Financial Liabilities

Securities issued

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

31 Desember/December 31, 2018				
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset Keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				Financial Assets
Efek-efek	4.147.137	4.147.137	-	Fair value through profit or loss
Obligasi Pemerintah	2.777.574	2.777.574	-	Securities
Tagihan Spot suku bunga	167	167	-	Government bonds
				Interest rate Spot receivable
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	6.924.878	6.924.878	-	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual				
Efek-efek	1.503.858	947.830	556.028	Available-for-sale
Obligasi Pemerintah	3.904.235	3.904.235	-	Securities
				Government bonds
Total tersedia untuk dijual	5.408.093	4.852.065	556.028	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Efek-efek	199.462	199.462	-	Held-to-maturities
Obligasi Pemerintah	2.721.058	2.721.058	-	Securities
				Government bonds
Total dimiliki hingga jatuh tempo	2.920.520	2.920.520	-	Total held-to-maturities
Kredit yang diberikan dan piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Neto	234.425.936	-	230.802.008	Loan and receivables
				Loan and sharia
				financing receivables - Net
Liabilitas Keuangan				
Surat berharga yang Diterbitkan	20.903.003	-	20.903.003	Securities issued

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

- a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- c. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

- a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

- b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

- c. Securities and Government Bonds

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

- d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

48. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

- d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

49. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

49. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic earnings per share, for the year ended December 31, 2019 and 2018, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019			
(i) Laba tahun berjalan	209.263	(a)	Income for the year	(i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590.000	(b)	Weighted average number of shares outstanding	(ii)
(iii) Laba per saham dasar	20	(a/b)	Basic earnings per share	(iii)

	31 Desember/ December 31, 2018			
(i) Laba tahun berjalan	2.807.923	(a)	Income for the year	(i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590.000	(b)	Weighted average number of shares outstanding	(ii)
(iii) Laba per saham dasar	265	(a/b)	Basic earnings per share	(iii)

50. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 23 Desember 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Taruna Bangun Perkasa sehubungan dengan Renovasi Mekanikal Elektrikal Gedung KC Depok dengan nilai kontrak sebesar Rp5.350.

Pada tanggal 11 Desember 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Alekxa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan Relayout KC Ciputat dengan nilai kontrak sebesar Rp5.340.

Pada tanggal 7 Oktober 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Alekxa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan Relayout Gedung KC Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp5.250.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On September 23, 2019, the Bank signed an agreement with PT Taruna Bangun Perkasa in relation to electrical mechanical renovation of Bank BTN KC Depok with contract value of Rp5,350.

On December 11, 2019, the Bank signed an agreement with PT Alekxa Putra Sejati in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Ciputat with contract value of Rp5,340.

On October 7, 2019, the Bank signed an agreement with PT Alekxa Putra Sejati in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Malang with contract value of Rp5,250.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 23 September 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi Gedung Bank BTN KC Jakarta Kuningan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.285.

Pada tanggal 9 Januari 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi dan Relayout Gedung Bank BTN KC Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp5.930.

Pada tanggal 7 Januari 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Emerio Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Implementasi Sistem PSAK 71 selama 175 (seratus tujuh puluh lima hari) dengan masa garansi 10 (sepuluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp8.000.

Pada tanggal 21 Mei 2018, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan pengelolaan gedung Menara Bank BTN selama tiga tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp62.123.

Pada tanggal 20 April 2018, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Integra Dayacipta Grahatama sehubungan dengan renovasi LC lantai 2, 3, 4, dan 5 Gedung Exitama dengan nilai kontrak sebesar Rp8.235.

Pada tanggal 6 Desember 2018, Bank BTN mengadakan perjanjian dengan PT Halik Selindo Alpha sehubungan dengan pengadaan perangkat contact center dengan nilai kontrak sebesar Rp4.950.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)

a. Significant Agreements (continued)

On September 23, 2019, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to renovation of Bank BTN KC Jakarta Kuningan with contract value of Rp5,285.

On January 9, 2019, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Pekanbaru with contract value of Rp5,930.

On January 7, 2019, the Bank signed an agreement with PT Emerio Indonesia in relation to procurement of system Implementation for PSAK 71 for 175 (one hundred seventy five) days with guaranteed time of 10 (ten) month land with contract value of Rp8,000.

On May 21, 2018, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to provide maintenance of Menara Bank BTN Building for 3 years with a contract value amounting to Rp62,123.

On April 20, 2018, the Bank signed an agreement with PT Integra Dayacipta Grahatama in relation to provide LC renovation of 2nd, 3rd, 4th, and 5th floor Gedung Exitama with a contract value amounting to Rp8,235.

On December 6, 2018, the Bank signed an agreement with PT Halik Selindo Alpha in relation to provide procurement contact center device with a contract value amounting to Rp4,950.

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**50. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Liabilitas Kontinjensi (lanjutan)

Jumlah klaim terhadap Bank atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.984 dan Rp7.984. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp7.984 dan Rp7.984. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019:

- a. PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Contingent Liabilities (continued)

The Bank's total potential financial exposure arising from outstanding lawsuits as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp7,984 and Rp7,984, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp7,984 and Rp7,984. Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

51. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2019:

- a. SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application.

This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect that entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgement.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019: (lanjutan)

- b. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku sejak 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antar Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- c. PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

- d. Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020

Amandemen ini mengizinkan asurandur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.

51. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2019: (continued)

- b. PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This SFAS is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- c. SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers.

This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exlusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- d. Amendments to SFAS 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with SFAS 62 Insurance Contract, effective January 1, 2020.

This amendments allows those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of SFAS 71 (*deferral approach*) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

51. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019: (lanjutan)

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2019: (continued)

- e. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Definisi Material dan Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- e. Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements on Material Definitions and Amendments to SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Material Definition, effective January 1, 2020 with earlier application permitted.

Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Amendemen tersebut juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks *over disclosure* karena perubahan ambang batas (thresholds) dari definisi material tersebut. Secara garis besar, amandemen PSAK 1 dan PSAK 25:

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant SFAS. The amendment also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of *over disclosure* due to changes in the thresholds of the material definition. Broadly speaking, amendments to SFAS 1 and SFAS 25:

- menambahkan istilah "obscuring" (pengaburan), penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut;
- mengubah istilah "dapat mempengaruhi" menjadi "diperkirakan cukup dapat mempengaruhi" dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama;
- mengubah istilah "pengguna" menjadi "pengguna utama" dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut.

- add the term "obscuring" (explanation), explanation and examples of the term;
- changing the term "can affect" to be "reasonably expected to affect" in the context of decision making by key users;
- change the term "user" to "main user" in the context of financial statement users and there are additional explanations regarding the main user.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

51. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019: (lanjutan)

- f. Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021. Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Bank masih dalam proses finalisasi perhitungan dampak dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Bank.

51. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2019: (continued)

- f. Amendments to SFAS 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021. These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

The Bank is still in the process of finalizing the impact of those accounting standards on its financial statements.

52. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas/Cash Flow					
	31 Desember/ December 31, 2017	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes	31 Desember/ December 31, 2018
Surat Berharga yang Diterbitkan	20.480.459	3.660.000	(3.520.000)	24.301	20.644.760
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	1.385.000	-	(450.000)	-	935.000
Pinjaman yang Diterima	7.991.053	7.550.287	(36.490)	(5.357)	15.499.493
Total	29.856.512	11.210.287	(4.006.490)	18.944	37.079.253

Arus Kas/Cash Flow					
	31 Desember/ December 31, 2018	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes	31 Desember/ December 31, 2019
Surat Berharga yang Diterbitkan	20.644.760	4.144.000	(5.122.930)	117.722	19.783.552
Pinjaman yang Diterima	15.499.493	11.001.654	(4.020.720)	(14.770)	22.465.657
Pinjaman Subordinasi	2.999.519	2.999.950	-	200	5.999.669
Total	39.143.772	18.145.604	(9.143.650)	103.152	48.248.878

52. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

53. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 4,42% dan 2,65%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 100,84% dan 65,47%.

54. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar USD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,2% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura.

Sampai dengan tanggal laporan ini, Bank masih menunggu persetujuan dari OJK untuk dapat memperhitungkan obligasi ini sebagai komponen modal inti tambahan dalam perhitungan Rasio Kewajiban Penyedia Modal Minimum.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp17.651 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

55. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020.

53. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's *non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio)* are 4.42% and 2.65%, respectively.
- b. As of December 31, 2019 and 2018, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 55 (Revised 2014) to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authority regulation is 100.84% and 65.47%, respectively.

54. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.2% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange.

Until the date of this report, the Bank is still waiting for OJK's approval to include this subordinated bonds as component of additional tier 1 of Capital in the Calculation of Required Capital Adequacy Ratio.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp17,651 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date.

55. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on February 14, 2020.



REFERENSI SILANG

KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
I	Umum		✓
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas		✓
5	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
4	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.		✓
II	Ikhtisar Data Keuangan Penting		
	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi); 3. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; 4. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 5. Penghasilan komprehensif periode berjalan ; 6. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; 7. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 8. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	12-14
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	12-14
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	14-15



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	Jumlah saham yang beredar; - Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; - Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. - Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: - Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	17-24
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: - Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); - Tingkat bunga/imbalan; - Tanggal jatuh tempo; dan - Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018 Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	25-26
III Laporan Dewan Komisaris dan Direksi			
1	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: - Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; - Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; - Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan - Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	35-43
2	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: - Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: - kebijakan strategis; - perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan - kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; - Analisis tentang prospek usaha; - Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan - Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	45-53



REFERENSI SILANG KRITEKRIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	✓
IV Profil Perusahaan			
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.	58-59
2	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	60-61
3	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	70-83
4	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi.	86-87
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	64-66
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	88-93



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	97-104
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	116-123
9	Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: 3. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan 4. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 5. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	124-129
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	131
11	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	132



REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	133
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	134-139
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 1. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 2. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	140-143
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	144-148
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.	149-156
17	Informasi pada Situs Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	158



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	159-166
V Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			
1	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: 3. Produksi; 4. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 5. Penjualan/pendapatan usaha; dan 6. Profitabilitas.	175-215
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.	219-256
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	257-263
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	263-265



REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	251-252
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	266
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	266-267
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	266
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	287-290
10	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	216-218
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	268-269



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	270-273
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	273-281
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.	282
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	282-284



REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
17	Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	285-286
VI Good Corporate Governance			
1.	Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	438-449
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	450-451
3.	Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	452-479
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2016, agar diungkapkan.	394-405



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	480-490
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	490-536
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	124-125, 130-131, 408
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	543-546



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
9.	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	550-559
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	569-589
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	559-568
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	603-610
13.	Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	626-639



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
14.	Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	639-642
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	291-346, 620-662
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	663-667
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tatakelola Tanggung jawab social	1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijaalkan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab social	731-741



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	742-743
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	744-745
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup.	Penyampaian informasi tentang 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	746-753
21	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.	Mencakup antara lain informasi tentang 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	754-760



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
22	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen,	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	761-765
23	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	766-783
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	668
25	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	669-675



REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
26	Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	676-680
27	Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	692-696
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	465-469
VII Informasi Keuangan			
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	785
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		788
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	788



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	789-1042
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	797-798
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	800-802
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	816-865
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	980-995
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	962-971



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

REFERENSI SILANG KRITEKRIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	846-848, 910-912
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	860,978
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	865, 999- 1036
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	788

RUMAH

UNTUK KELUARGA MILENIAL INDONESIA



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel. 62-21 6336789, 6332666

Fax. 62-21 6346704

E-mail : csd@btn.co.id

Contact Center: 1500 286



www.btn.co.id